

2019 Annual Report
Laporan Tahunan



PERURI

DIGITAL TRANSFORMATION FOR SUSTAINABLE GROWTH

*Transformasi Digital untuk
Pertumbuhan Berkelanjutan*



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Daftar Isi Table of Contents	ii	Kesinambungan Tema Sustainability Theme	2
Performa 2019 2019 Performance			
Ikhtisar Data Keuangan Penting Financial Data Highlights	10	Informasi tentang Penerbitan Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, serta Pendanaan Lainnya	16
Ikhtisar Kinerja Organisasi dan Operasi Organizational and Operational Performance Highlights	14	Information on Issuance of Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds, as well as Other Funds	16
Ikhtisar Saham Share Highlights	15	Kilas Peristiwa Event Highlights	18
Laporan Manajemen Management Report			
Laporan Dewan Pengawas Board of Supervisory Report	28	Laporan Direksi Board of Directors Report	40
Profil Perusahaan Company Profile			
Informasi Umum tentang Peruri General Information of Peruri	56	Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi, Joint Venture (JV) dan Special Purpose Vehicle (SPV)	89
Riwayat Singkat Peruri Peruri Brief History	58	List of Subsidiaries and Associated Entities, Joint Venture (JV) and Special Purpose Vehicle (SPV)	89
Bidang Usaha, Produk dan Jasa, Wilayah Operasi serta Pasar yang Dilayani Business Fields, Product and Services, Operating Area and Market Served	60	Informasi tentang Kronologis Penerbitan Saham	99
Wilayah Kerja dan Peta Operasional Areas of Work and Operational Map	64	Information about the Shares Listing Chronology	99
Visi, Misi dan Filosofi, Tata Nilai dan Moto Perusahaan Company's Vision, Mission, Core Values, and Motto	66	Informasi tentang Kronologis Penerbitan Efek Lainnya	99
Makna Logo Perusahaan the Meaning of Company Logo	70	Informasi about Other Securities Issuance Chronology	100
Struktur Organisasi Organizational Structure	72	Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Institutions and Professions	101
Profil Dewan Pengawas Board of Supervisory Profile	73	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	101
Profil Direksi Board of Directors' Profile	78	Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Jaringan Operasional, serta Informasi Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan	104
Daftar Pejabat Eksekutif List of Executive Offices	83	List of Addresses of Subsidiaries and Operational Network Offices, and Information on Branch and Representative Offices	104
Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi Employee Demography and Competency Development	84	Informasi pada Situs Web Perusahaan Information on the Company Website	105
Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	86	Pendidikan dan/atau Pelatihan Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors and Committees	106
Struktur Grup Group Structure	88		

Analisis & Pembahasan Manajemen

Management's Discussion and Analysis

Tinjauan Ekonomi dan Industri Economic and Industrial Review	110	Prospek Usaha Business Outlook	159
Kebijakan Strategis Perusahaan di 2019 Strategic Policies In 2019	114	Aspek Pemasaran Marketing Aspect	161
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Overview of Business Segment Operations	115	Tinjauan Keuangan Lainnya Other Financial Highlights	163
Tinjauan Kinerja Keuangan Overview of Financial Performance	128	Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity	168

Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Function

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resources Management	172	Teknologi Informasi Information Technology	202
---	-----	---	-----

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Implementation of Good Corporate Governance	212	Kebijakan Anti Korupsi Anti Corruption Policy	358
Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Organ Structure	228	Pengelolaan Potensi Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi Management of Potential Conflict of Interest and Gratification Control	359
Manajemen Risiko Risk Management	328	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Report on Assets of State Officials	360
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	346	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services Policy	363
Perkara Penting Important Events	349	Whistleblowing System	364
Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	351	Transparansi Praktik Bad Governance Transparency of Bad Governance Practices	368
Kode Etik Code of Ethics	354		

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Governance	372	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	398
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Corporate Social Responsibility toward Human Right	380	Corporate Social Responsibility Scope of Labor, Safety and Occupational Health	
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Operasi yang Adil Corporate Social Responsibility for Fair Operations	384	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab terhadap Produk/Jasa serta Konsumen dan Mitra Kerja	414
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Lingkungan Hidup Environmental Scope of Corporate Social Responsibility	389	Corporate Social Responsibility Scope of Responsibility for Products/Services as well as Consumers and Work Partners	
		Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Corporate Social Responsibility Scope of Social and Community Development	422

Laporan Keuangan

Financial Report

434

KESINAMBUNGAN TEMA

SUSTAINABILITY THEME



“DIGITAL TRANSFORMATION FOR SUSTAINABLE GROWTH”

Tranformasi Digital untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Sejak berkomitmen untuk melakukan transformasi Perusahaan, Peruri terus meningkatkan kinerja Perusahaan dengan memperkuat fondasi bisnis. Dalam era persaingan yang cukup ketat, Perusahaan terus meningkatkan performa sumber daya yang dimiliki untuk menjadi yang terbaik. Perusahaan siap menyongsong tahun emas dengan spirit yang tinggi, melalui karakter yang tangguh dan strategi yang tepat. Semangat yang tertanam di lingkungan Perusahaan ini membuat Peruri percaya diri untuk berekspansi dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Perusahaan juga telah bersiap dalam menghadapi era digitalisasi dengan membangun *platform* digital terbaik. Segenap Insan Perusahaan senantiasa bersinergi untuk mencapai tujuan yang terbaik dan berkomitmen untuk terus membangun nilai usaha serta proses bisnis yang sehat dan transformasi digital berkelanjutan. Dengan semangat baru yang ditumbuhkan dalam tubuh Peruri, segenap elemen Perusahaan yakin bahwa Peruri akan terus melaju dalam rangka menuju ke arah masa depan yang lebih cerah.

Post transformation, Peruri continues to strive to improve the Company's performance by strengthening its business foundation. In an era of intense competition, the Company continues to improve the performance of its resources to be the best. The company is ready to embrace the golden year with high spirits, through strong character and the right strategy. The spirit embedded in the Company's environment makes Peruri confident to expand in achieving sustainable growth.

The company has also prepared for the digitalization era by building the best digital platform. Every employee always work together to achieve the best goals and are committed to continuing to build business value and healthy business processes and sustainable digital transformation. With the new spirit grown within Peruri, all elements of the Company are confident that Peruri will continue to advance to a brighter future.” Bukan “With the new spirit that has been grown within Peruri, all elements of the Company are confident that Peruri will continue to advance in the direction of a brighter future.

Sepanjang 2019 iklim usaha nasional memang dipenuhi dengan berbagai tantangan. Namun hal itu tak menyurutkan kinerja usaha Peruri untuk senantiasa bergerak positif. Segenap manajemen berhasil menerapkan strategi dan inisiatif yang tepat sehingga Perusahaan berhasil membukukan pencapaian yang optimal. Manajemen telah merancang kebijakan strategis dalam mempertahankan pasar yang berlandaskan semangat yang tinggi agar dapat tumbuh dan berkembang bersama secara sehat dan berkesinambungan.

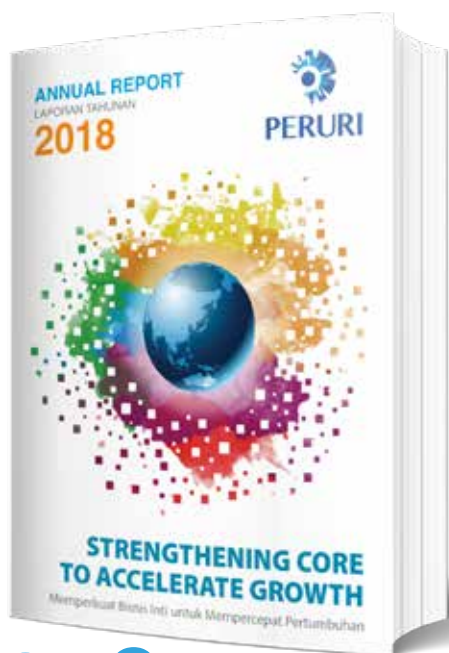
Tahun Buku 2019 juga menjadi babak baru bagi Peruri dalam memperluas segmen usahanya melalui berbagai inovasi layanan berbasis digital selaras dengan visi Peruri menjadi Perusahaan berkelas dunia di bidang *integrated security printing and system*. Selain itu, pada 2019 juga merupakan fase metamorfosa Peruri dalam *me-leverage* kapabilitas dengan telah tersertifikasi sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dari Kementerian Kominfo RI. Peruri adalah satu-satunya BUMN yang mendapatkan sertifikasi ini.

Peruri kini telah siap dengan beberapa lini produk berbasis teknologi digital, yaitu Peruri Code, Peruri Sign dan Peruri Trust yang ketiganya dirangkum dalam satu layanan yaitu Peruri Digital Business Solution. Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan daya saing dan melakukan ekspansi usaha yang berkelanjutan melalui penyediaan jasa layanan dan produk terbaik dengan mengoptimalkan pangsa pasar yang ada.

Throughout 2019 the national business climate was filled with various challenges. However, this did not obstruct Peruri's business performance to keep moving positively. The entire management has successfully implemented the right strategies and initiatives which led the company to record optimal achievements. The management has designed strategic policies in maintaining a market based on high enthusiasm to grow and develop together in a healthy and sustainable manner.

The 2019 Financial Year is also a new chapter for Peruri in expanding its business segment through various digital-based service innovations in line with Peruri's energetic, strong and innovative spirit. In addition, 2019 is also a metamorphosis phase for Peruri in leveraging its capabilities by being certified as an Electronic Certification Operator (PSrE) from the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. Peruri is the only SOE who obtain this certification.

Peruri is currently ready with several product lines based on the latest digital technology through Peruri Code, Peruri Sign and Peruri Trust, all of which are summarized in one service, namely Peruri Digital Business Solution. The company is always committed to increasing competitiveness and carrying out sustainable business expansion by providing the best services and products by optimizing the existing market share.



2018

“STRENGTHENING CORE TO ACCELERATE GROWTH”

MEMPERKUAT BISNIS INTI UNTUK MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN

Berbeda dengan tahun lalu (2017), yang mengusung tema “Peruri Reborn” dengan makna bahwa bisnis Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) ditargetkan tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya dan faktanya, target tersebut tercapai melebihi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu pendapatan tercapai Rp 3,48 triliun, tumbuh 44,3% *year on year* (yoy) dibandingkan 2016; laba usaha tercapai Rp 509,16 miliar, tumbuh 77,55% yoy; laba bersih tercapai Rp 406,2 miliar, tumbuh 161% yoy, *earnings before interest, taxes, depreciation & amortization* (EBITDA) tercapai Rp 879,9 miliar, tumbuh 49,15% yoy. Total aset tercatat sebesar Rp 4,66 triliun, tumbuh 28,21% yoy.

Perlu diketahui bahwa pertumbuhan kinerja perusahaan bergantung sekali kepada pesanan Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengatur peredaran uang di Indonesia. Contohnya penugasan pencetakan uang Rupiah pada 2017, sebanyak 11 miliar bilyet, turun pada 2018, menjadi 8,86 miliar bilyet, termasuk *carry over* 2017 sebanyak 1,85 miliar bilyet. Pada 2019, pemesanan pencetakan uang Rupiah naik lagi 30,3% menjadi 11,56 miliar bilyet, termasuk *carry over* 2018, sebanyak 0,88 miliar bilyet.

Menyadari semuanya itu dan mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi digital yang mendorong *new wave business*, sejak beberapa tahun lalu manajemen Peruri sudah mencanangkan visi sebagai berikut: “To become a world class company in security printing and system”. Sistem di dalam visi tersebut mengandung makna bahwa bisnis Peruri harus terintegrasi antara cetak dengan digital atau perkembangan teknologi sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Melihat kepada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2017 - 2021, dinyatakan secara jelas bahwa arah ke depan dari

Unlike last year (2017), which carried the theme “Peruri Reborn”, meaning that the business of the Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) is targeted to grow better than the previous year and in fact, this target has exceeded the Company’s Work Plan and Budget, namely, revenue reached Rp 3.48 trillion, grew 44.3% year on year (yoy) compared to 2016; operating profit reached Rp 509.16 billion, grew 77.55% yoy; net profit reached Rp 406.2 billion, grew 161% yoy, earnings before interest, taxes, depreciation & amortization (EBITDA) reached Rp 879.9 billion, grew 49.15% yoy. Total assets were recorded at Rp 4.66 trillion, growing 28.21% yoy.

It should be noted that the company’s performance growth depends heavily on orders from Bank Indonesia as the authority that regulates the circulation of money in Indonesia. For example, the assignment for printing Rupiah currency in 2017, amounting to 11 billion bilyet, decreased in 2018, to 8.86 billion, including carry-over 2017 of 1.85 billion bilyet. In 2019, orders for printing Rupiah currency increased by another 30.3% to 11.56 billion, including carry-over 2018, totaling 0.88 billion.

Realizing all this and anticipating the rapid development of digital technology that encourages new wave business, since several years ago Peruri’s management has launched a vision as follows: “To become a world class company in security printing and systems”. The system in this vision implies that Peruri’s business must be integrated between print and digital or technological developments following the demands of society’s needs.

Looking at the Company’s Long-term Plan (RJPP) 2017-2021, it is clearly stated that the future direction of this company is

perusahaan ini memperkuat bisnis inti dan mengembangkan bisnis baru. Memperkuat bisnis inti adalah melalui modernisasi alat produksi untuk cetak uang Rupiah, pita cukai, meterai, paspor dan buku pertanahan sebagai produk utama perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2006, sedangkan mengembangkan bisnis baru, yaitu fokus kepada pengembangan bisnis digital security dan bisnis internasional. Di dalam versi *rolling* yang diselenggarakan pada 21 Agustus 2018, di Jakarta, bahwa untuk RJPP 2019-2021, sebagai pembaruan dan hasil evaluasi internal, target yang harus dicapai pada 2021, adalah Rp 5,068 triliun dengan komposisi dari bisnis domestik (PP 32 dan non PP 32) sebesar Rp 3.127 miliar (62%), bisnis internasional sebesar Rp 65 miliar (1%), *new wave business* (digital) sebesar Rp 1.005 miliar (20%), bisnis *high security paper* (HSP) sebesar Rp 211 miliar (4%) dan pendapatan perusahaan anak sebesar Rp 660 miliar (13%).

Berdasarkan uraian di atas maka diputuskan tema Laporan Tahunan 2018 adalah "Strengthening Core to Accelerate Growth".

Langkah-langkah yang dilakukan untuk merealisasikan tema dimaksud sebagai berikut:

1. Pertama, memperbaharui dan menambah alat produksi pencetakan uang Rupiah pada 2018, sebanyak 2 lini baru sehingga dari sebelumnya 9 lini menjadi 11 lini dengan kapasitas cetak menjadi 8,4 miliar bilyet;
2. Kedua, membeli mesin *double decker* untuk meningkatkan kapasitas produksi uang luar negeri, paspor dan sertifikat Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Ketiga, membeli mesin cetak *commemorative coin* untuk meningkatkan kualitas hasil cetak logam non-uang sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi spesifikasi yang diinginkan;
4. Keempat, mempersiapkan mesin cetak uang khusus untuk pesanan uang luar negeri sebanyak satu lini;
5. Kelima, mengadakan infrastruktur digital platform sebagai langkah awal pengembangan produk digital seperti tanda tangan digital, e-meterai (meterai elektronik) dan lain-lain.

Semuanya itu merupakan upaya manajemen agar alat produksi perusahaan semakin baru dan modern agar mampu menjalankan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu penugasan produk PP 32/2006, pengembangan bisnis digital serta bisnis internasional dan produk Non-PP 32 domestik. Khusus terkait dengan pembaruan dan modernisasi alat produksi untuk produk PP 32, pada 2018, umur teknisnya menjadi lebih muda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kami optimis pekerjaan dan pelayanan kepada pemberi penugasan atau pelanggan utama, yaitu dari Bank Indonesia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Ditjen Bea & Cukai, Ditjen Pajak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan semakin baik.

to strengthen its core business and develop new businesses. Strengthening the core business is through the modernization of production equipment for printing Rupiah notes, excise stamps, seals, passports, and land books as the company's main products under Government Regulation (PP) Number 32 of 2006, while developing new businesses, namely focusing on developing the digital security business. and international business. In the rolling version which was held on August 21, 2018, in Jakarta, that for RJPP 2019-2021, as an update and result of internal evaluation, the target that must be achieved in 2021 is Rp 5.068 trillion with the composition of the domestic business (PP 32 and non PP 32) amounting to Rp. 3,127 billion (62%), international business of Rp. 65 billion (1%), new wave business (digital) of Rp. 1,005 billion (20%), high security paper (HSP) business of Rp. 211 billion (4%) and subsidiary company revenue of Rp 660 billion (13%).

Based on the description above, it was decided that the theme of the 2018 Annual Report is "Strengthening Core to Accelerate Growth".

The steps are taken to realize the theme are as follows:

1. First, updating and adding production equipment for printing Rupiah currency in 2018, as many as 2 new lines, so that from the previous 9 lines to 11 lines with a printing capacity to 8.4 billion bilyets;
2. Second, buying a double decker machine to increase the production capacity of foreign money, passports, and certificates of the National Land Agency (BPN);
3. Third, buy a commemorative coin printing machine to improve the quality of non-currency metal printing so that the resulting product can meet the desired specifications;
4. Fourth, prepare one line of special money printing machines for foreign money orders;
5. Fifth, holding a digital platform infrastructure as the first step in digital product development, such as digital signatures, e-seals (electronic seals), and others.

All of these are management efforts to make the company's production tools new and modern to be able to carry out 3 (three) main functions, namely PP 32/2006 product assignment, digital business development as well as international business and domestic Non-PP 32 products. Specifically related to the renewal and modernization of production equipment for PP 32 products, in 2018, the technical age was younger than in previous years. Therefore, we are optimistic that the work and services for assignments or main customers, namely from Bank Indonesia, the Directorate General (DG) of Immigration, the Directorate General of Customs & Excise, the Directorate General of Taxes and the National Land Agency (BPN) will be better.



REBORN

MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN MENGAKUISISI PASAR INTERNASIONAL

ACCELERATING GROWTH, ACQUIRING INTERNATIONAL MARKETS

Tahun ini merupakan awal dari pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 2017-2021 yang merupakan tindak lanjut dari program transformasi berkelanjutan sejak akhir Desember 2014 untuk merealisasikan visi menjadi perusahaan kelas dunia di bidang *integrated security printing & system*. Pengertian dari visi tersebut adalah sesuai dengan perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis, bahwa peran Peruri ke depan bukan hanya melaksanakan penugasan mencetak uang dan dokumen sekuriti lainnya tetapi juga mempunyai kewajiban untuk melakukan perubahan dengan mengembangkan bisnis *digital security*. Ke depan dalam proses transisi, integrasi antara *security printing, system* dan digital atau yang dikenal *hybrid solution* merupakan sesuatu yang akan terus-menerus dibutuhkan.

This year is the beginning of the implementation of the Corporate Long-term Plan (RJPP) of Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 2017-2021 which is a follow-up to the continuous transformation program since the end of December 2014 to realize the vision of becoming a world class company in the field of integrated security printing & system. The definition of this vision is under the development and changes in the business environment, that the role of Peruri in the future is not only to carry out assignments to print money and other security documents but also to have the obligation to make changes by developing the digital security business. In the future in the transition process, the integration between security printing, systems, and digital or what is known as a hybrid solution is something that will be constantly needed.

Di Indonesia, mungkin lebih dari dua dasawarsa ke depan bisnis Peruri akan bertumpu kepada digital security karena penggunaan *security printing* mulai menurun meskipun tidak akan pernah hilang. Itulah substansi dari RJPP Peruri 2017-2021, antara lain terlihat dari diproyeksikannya perubahan kontribusi pendapatan pada 2021 sebesar Rp7,4 triliun dengan komposisi menjadi 59% dari *security printing* domestik dari produk cetak uang Rupiah, paspor, pita cukai, meterai dan buku pertanahan; 9% dari bisnis internasional dan 32% dari digital security. Perubahan itu dimulai dari langkah pertama dan 2017 adalah titik-sambung yang diharapkan mempercepat terealisasinya cita-cita tersebut. Memang benar hingga 2017, kontribusi terbesar pendapatan Peruri sebesar 71% masih dari pencetakan uang Rupiah dan 29% dari pencetakan paspor, pita cukai, meterai dan buku pertanahan. Kontribusi dari bisnis *digital security* belum kelihatan tetapi kami sudah memulai dengan membentuk Proyek Bisnis Digital dan mengembangkan perusahaan anak, PT Digital Security (PDS).

Peruri juga secara bertahap mengembangkan bisnis internasional dengan mencetak uang dan dokumen sekuriti negara lain, seperti paspor, pita cukai, prangko dan lainnya. Beberapa negara yang pernah bekerja sama dengan Peruri, antara lain Nepal, Sri Lanka dan Filipina. Kontribusinya belum besar tetapi langkah ini penting untuk dikembangkan agar cita-cita Peruri menjadi perusahaan kelas dunia (*world class company*) menjadi kenyataan. Cita-cita menjadi world class company tersebut, bukan hanya mampu menggarap pasar internasional tetapi juga budaya dan standar kerjanya sudah mempunyai standar internasional. Kami berharap semuanya itu dapat tercapai sesuai dengan RJPP yang sudah ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor S-29/MBU/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Persetujuan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) Tahun 2017-2021.

In Indonesia, perhaps more than two decades from now Peruri's business will rely on digital security because the use of security printing has begun to decline, although it will never disappear. That is the substance of 2017-2021 Peruri's RJPP, among others, it can be seen from the projected change in revenue contribution in 2021 of Rp7.4 trillion with a composition of 59% of domestic security printing from Rupiah currency printing products, passports, excise stamps, stamps and land books; 9% from international business and 32% from digital security. The change starts from the first step and 2017 is a connection point that is expected to accelerate the realization of this goal. It is true that until 2017, Peruri's biggest contribution of 71% was still from printing Rupiah currency and 29% from printing passports, excise stamps, seals, and land books. The contribution from the digital security business is yet to be seen but we have started by forming a Digital Business Project and developing a subsidiary company, PT Digital Security (PDS).

Peruri also gradually developed international business by printing money and other countries' security documents, such as passports, excise stamps, postage stamps, and others. Several countries that have worked with Peruri include Nepal, Sri Lanka, and the Philippines. The contribution is not yet big but this step is important to develop so that Peruri's goal of becoming a world class company becomes a reality. The goal of becoming a world class company is not only able to work on international markets but also culture and work standards that already have international standards. We hope that all of this can be achieved in accordance with the RJPP that has been determined by the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia through letter Number S-29/MBU/05/2017 dated May 12, 2017 regarding the Approval and Ratification of the Company Long-term Plan (RJPP) of Perum Printing Uang Republic of Indonesia (Perum Peruri) 2017-2021.

01

PERFORMA 2019 2019 PERFORMANCE

Laba bersih tahun berjalan konsolidasian di 2019 tercatat sebesar Rp725,31 miliar, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 152,25% jika dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan konsolidasian 2018 sebesar Rp287,54 miliar.

Consolidated Nett Income for the Year of 2019 recorded of Rp725.31 billion, increased of 152.25% compared to Consolidated Nett Income for the Year of 2018 of Rp287.54 billion.



10000
SEPULUH RIBU RUPIAH

2000
DUA RIBU RUPIAH

50000
LIMA PULUH RIBU RUPIAH

100000

5000
LIMA RIBU RUPIAH

1000

5000

50000

EMISI 2016

EMISI 2016

Dr. H.C. H. SOEKARNO

Dr. H.C. H. SOEKARNO

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA

TJUT MEUTIA

Dr. K.H. IDHAM CHALID

EMISI 2016

EMISI 2016

EMISI 2016

EMISI 2016

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA

EMISI 2016

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

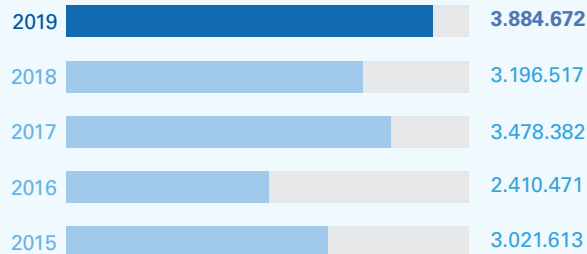
(dalam jutaan rupiah)

(In million rupiah)

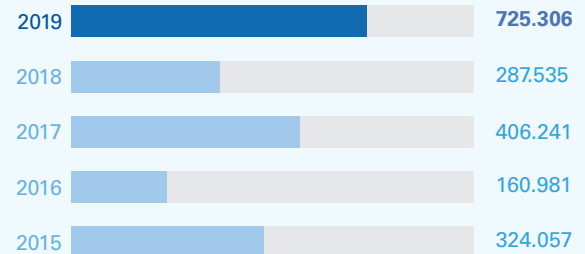
	2015	2016	2017	2018	2019	YoY 2018-2019 (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	3.021.613	2.410.471	3.478.382	3.196.517	3.884.672	21,53%
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(2.297.693)	(1.899.441)	(2.663.629)	(2.130.611)	(2.713.048)	27,34%
Laba (Rugi) Bruto Gross Profit (Loss)	723.920	511.030	814.753	1.065.906	1.171.624	9,92%
Beban Usaha Operating Expenses	(248.123)	(224.252)	(316.655)	(618.164)	(677.807)	9,65%
Laba (Rugi) Usaha Business Profit (Loss)	475.798	286.778	498.098	447.741	493.817	10,29%
Pendapatan Lain-Lain Other Income	83.594	79.938	231.470	107.337	543.800	406,63%
Beban Lain-Lain Other Expenses	(107.565)	(136.570)	(177.147)	(147.131)	(157.356)	6,95%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	451.826	230.146	552.421	407.947	880.260	115,78%
Pajak Kini Current Tax	(126.046)	(35.392)	(202.077)	(121.291)	(139.262)	14,82%
Pajak Tangguhan Deferred Tax	(1.724)	(33.774)	55.897	879	(15.692)	(1.884,48%)
Laba (Rugi) Setelah Pajak Tahun Berjalan Profit (Loss) After Current Year Tax	324.057	160.981	406.241	287.535	725.306	152,25%
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Kerja Actuarial Profit (Loss) on Work Reward Liabilities	(18.892)	(22.300)	(43.457)	(6.003)	(72.522)	1.108,08%
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain- Bersih Other Comprehensive Income (Expense)-Profit	-	-	-	-	-	- %
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Profit (Loss) of Current Year	305.165	138.681	362.785	281.532	652.785	131,87%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Dapat Diatribusikan kepada: Net Profit (Loss) of the Current Year Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	322.570	160.180	403.924	285.041	722.380	153,43%
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	1.486	801	2.317	2.495	2.926	17,30%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Profit (Loss) of the Current Year Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	303.642	137.895	360.676	278.614	649.960	133,28%
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	1.523	786	2.108	2.918	2.825	(3,21%)
Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh) Net Profit (Loss) per Basic Share (expressed in full amount of Rupiah)	-	-	-	-	-	-

Pendapatan Usaha
Operating Revenues

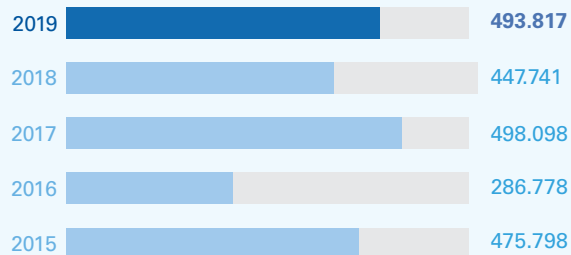
Jutaan Rupiah/Million Rupiah

**Labanya (Rugi) Setelah Pajak Tahun Berjalan**
Profit (Loss) After Current Year Tax

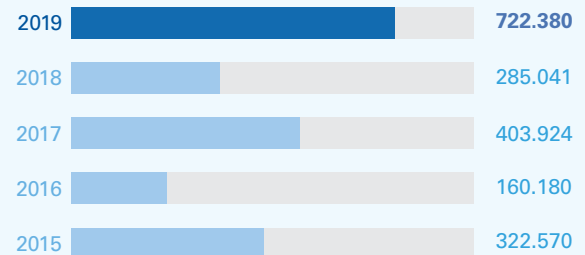
Jutaan Rupiah/Million Rupiah

**Labanya (Rugi) Usaha**
Income (Loss) from Operations

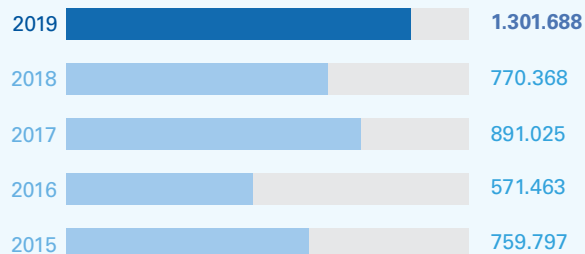
Jutaan Rupiah/Million Rupiah

**Labanya (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk**
Net Profit (Loss) of Current Year Attributable to Owners of Parent Entity

Jutaan Rupiah/Million Rupiah

**EBITDA**
EBITDA

Jutaan Rupiah/Million Rupiah



POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Consolidated Financial Position

(dalam jutaan rupiah)

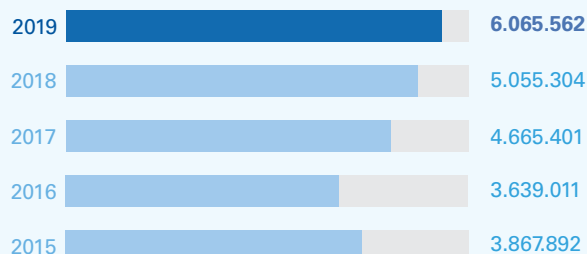
(In million rupiah)

	2015	2016	2017	2018	2019	YoY 2018-2019 (%)
Aset Lancar Current Assets	1.713.423	1.827.644	2.170.617	1.921.786	2.623.183	36,50%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	2.146.531	1.803.428	2.404.459	3.035.782	3.303.904	8,83%
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Joint Venture	7.938	7.938	90.325	97.736	138.475	41,68%
Jumlah Aset Total Assets	3.867.892	3.639.011	4.665.401	5.055.304	6.065.562	19,98%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.902.916	1.606.250	2.308.319	2.541.169	2.998.827	18,01%
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.964.976	2.032.761	2.357.082	2.514.134	3.066.734	21,98%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	3.867.892	3.639.011	4.665.401	5.055.304	6.065.562	19,98%
Modal Kerja Bersih Net Work Capital	895.520	1.191.388	1.223.429	949.370	1.133.950	19,44%
EBITDA	759.797	571.463	891.025	770.368	1.301.688	68,97%

Aset

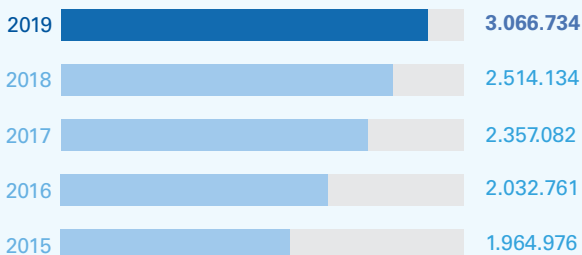
Assets

Jutaan Rupiah/million Rupiah

**Ekuitas**

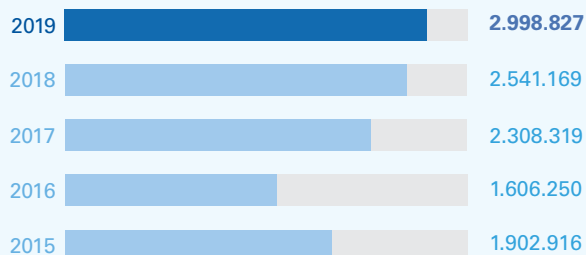
Equity

Jutaan Rupiah/million Rupiah

**Liabilitas**

Liabilities

Jutaan Rupiah/million Rupiah



LAPORAN ARUS KAS

Cash Flow Statement

(dalam jutaan rupiah)

(In million rupiah)

	2015	2016	2017	2018	2019	YoY 2018-2019 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	791.514	46.943	499.699	352.679	1.155.571	227,66%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	(444.139)	(182.055)	(129.958)	(98.588)	375.614	(480,99)%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(5.010)	(19.241)	(312.958)	(438.756)	(443.506)	1,08%
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	342.365	(154.353)	56.784	(184.665)	1.087.678	689,00%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	776.953	1.119.317	964.964	1.021.748	837.083	(18,07)%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	1.119.318	964.964	1.021.748	837.083	1.924.761	129,94%

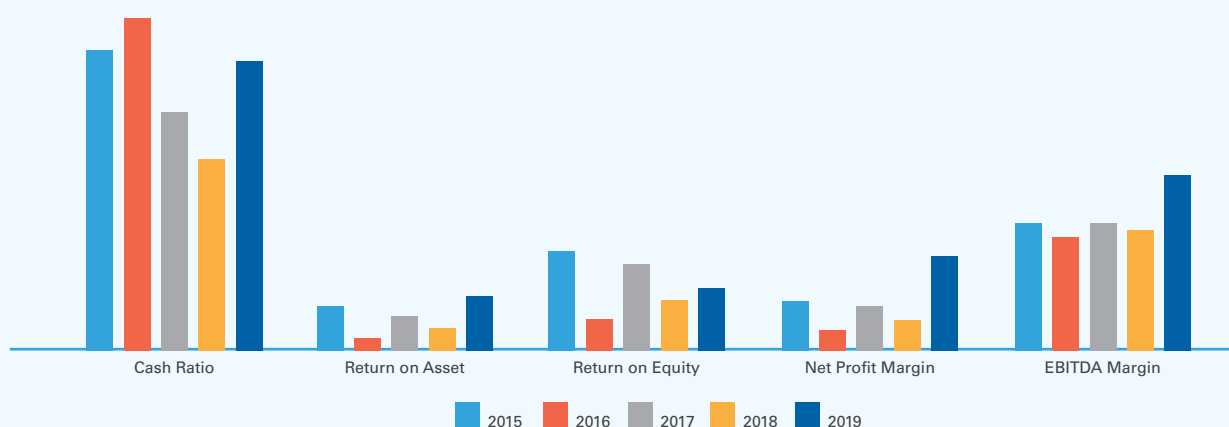
RASIO-RASIO KEUANGAN

Financial Ratios

	Satuan Unit	2015	2016	2017	2018	2019	YoY 2018-2019 (%)
Rasio Kas Cash Ratio	%	136,85	151,66	107,87	86,08	129,25	50,14%
Rasio Lancar Current Ratio	%	209,49	287,25	229,16	197,63	176,14	(10,87)%
Rasio Utang terhadap Aset Debt-to-Asset Ratio	%	49,20	44,14	49,48	50,27	49,44	(1,65)%
Rasio Utang terhadap Ekuitas Debt-to-Equity Ratio	%	97,35	79,39	98,39	101,52	98,23	(3,24)%
Rasio Operasi Operating Ratio	%	15,75	11,90	14,32	14,26	13,08	(8,25)%
Return on Asset	%	9,10	4,60	8,38	5,98	13,52	126,26%
Return on Equity	%	19,53	8,60	18,16	12,85	15,51	20,68%
Return on Investment	%	19,89	29,90	20,17	15,40	15,51	0,71%
Net Profit Margin	%	10,39	6,43	9,72	8,92	18,60	108,47%
EBITDA Margin	%	25,15	23,71	25,62	24,12	33,51	38,92%

Rasio-Rasio
Ratios

dalam % / in %



IKHTISAR KINERJA ORGANISASI DAN OPERASI

ORGANIZATIONAL AND OPERATIONAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS

IKHTISAR KINERJA ORGANISASI

Organizational Performance Highlights

	2015	2016	2017	2018	2019	YoY 2018-2019 (%)
Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Health Level						
Skor Score	92,50	82,00	89,50	89,07	95,50	7,22%
Kategori Category	Sehat (AA) Healthy (AA)	Sehat (AA) Healthy (AA)	Sehat (AA) Healthy (AA)	Sehat (AA) Healthy (AA)	Sehat (AAA) Healthy (AAA)	
Key Performance Indicator						
Skor Score	107,05	74,42	91,04	87,41	115,90	32,60%
Assessment GCG						
Skor Score	86,375	89	89,61	89,788	82,793	(7,79%)
Kategori Category	"Sangat Baik" "Very Good"	"Sangat Baik" "Very Good"	"Sangat Baik" "Very Good"	"Sangat Baik" "Very Good"	"Baik" "Good"	

IKHTISAR KINERJA OPERASI

Operational Performance Highlights

Nilai Pengiriman Delivery

Jenis Produk Product Type	Satuan Unit	2015	2016	2017	2018	2019	YoY 2018-2019 (%)
Uang Kertas Banknotes	Juta Bilyet Million Bills	9.296,25	6.162,48	11.063,12	8.877,75	11.558,00	30,19%
Uang Logam Coins	Juta Keping Million Coins	1.587,42	2.116,09	2.291,69	881,66	999,31	13,34%
Non-Uang DN & LN Domestic & Overseas Non-Currency							
Pita Cukai Excise Stamps	Juta Lembar Million Sheets	179,53	169,17	170,14	169,63	182,60	7,64%
Paspor dan Buku Passport and Books	Juta Buku Million Books	4,68	4,49	4,23	4,56	4,22	(7,49%)
Web and Sheet	Miliar Rupiah Billion Rupiah	250,56	266,32	252,78	305,77	240,47	(21,36%)
Produk Digital Digital Product	Juta Rupiah Million Rupiah	-	-	-	-	1.760,92	100%
Logam Non-Uang Non-Currency Metal	Ribu Buah Thousands	22,00	11,72	11,16	4,75	6,08	27,99%

IKHTISAR SAHAM

SHARE HIGHLIGHTS

INFORMASI JUMLAH SAHAM

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyebutkan bahwa Perusahaan Umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

DIVIDEN

Informasi mengenai pembagian Dividen untuk pemilik modal pada tahun buku 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Dividen Dividends	2019 (Dividen Tahun Buku 2018) (Dividends for Fiscal Year 2018)	2018 (Dividen Tahun Buku 2017) (Dividends for Fiscal Year 2018)
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp) Distributed Cash Dividends (Rp)	64.900.000.000,-	121.177.000.000,-
Rasio Pembayaran Dividen Dividend per Share (Rp/share)	22,77%	38,82%
Tanggal Pembayaran Payment Date	26 Juni 2019 June 26, 2019	7 Juni 2018 June 7, 2018

INFORMASI TENTANG AKSI KORPORASI SAHAM

Sepanjang 2019 Peruri tidak melakukan aksi korporasi saham, karena Peruri tidak memiliki saham yang beredar di bursa efek manapun. Peruri adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Hingga akhir 2019, Peruri tidak mencatatkan Penawaran Umum Saham di bursa efek manapun dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi dalam bentuk grafik yang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan serta volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Peruri juga tidak memiliki informasi terkait aksi penghentian sementara perdagangan saham (*Suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*Delisting*).

INFORMATION ON TOTAL SHARES

According to Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOE), a Public Enterprise is an SOE whose capital is fully owned by the state and not divided into shares.

DIVIDEND

Information of dividend for shareholders in 2018 and 2017 fiscal years are as follows:

INFORMATION ON STOCK CORPORATE ACTION

Peruri did not take any corporate actions in 2019, and did not have any shares outstanding on any stock exchange. Peruri is a State-Owned Enterprise as regulated in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises whose entire capital is owned by the State in the form of state assets which are separated and not divided into shares. As of 2019, Peruri has not listed a Public Offering of Shares on any stock exchange and did not trade its shares to the public. Therefore, there is no information related to market capitalization based on price on the Stock Exchange where the shares are listed; the highest, lowest, and closing share price based on the price on the Stock Exchange where the shares are listed; the volume of share trading at the Stock Exchange where the shares are listed; and information in the form of chart with the closing price based on the price at the Stock Exchange where the shares are listed and the trading volume of the shares on the Stock Exchange where the shares are listed. Peruri also has no information regarding the suspension of trading shares and/or delisting.

INFORMASI TENTANG PENERBITAN OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION ON ISSUANCE OF BONDS, SUKUK, OR CONVERTIBLE BONDS, AS WELL AS OTHER FUNDS

Pada 2019 Peruri tidak melakukan pencatatan tentang penerbitan obligasi, sukuk atau obligasi konversi serta pendanaan lainnya sehingga Perusahaan tidak dapat melaporkan pencatatan tersebut di dalam buku laporan tahunan ini.

In 2019, Peruri did not record any issuance of bonds, sukuk, or convertible bonds as well as other funds.



KILAS PERISTIWA

EVENT HIGHLIGHTS



23 JANUARI
January

Go Live Mercurius 2019

Peruri menyelenggarakan Go Live Mercurius 2019 pada Rabu, 23 Januari 2019 bertempat di Ruang Subono Mantofani, Peruri Jakarta. Mercurius merupakan program ERP-SAP yang sudah dibuat sejak 2017. Mercurius merupakan sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh sumber daya, informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis secara lengkap dan *realtime*. Mercurius pada hakikatnya adalah salah satu sarana pendukung proses bisnis yang lebih efisien untuk meminimalisasi potensi kesalahan, data tidak valid, proses yang masih manual dan beberapa hal lainnya yang dapat menjadi beban perusahaan.

Go Live Mercurius 2019

Peruri held Go Live Mercurius 2019 event on Wednesday, January 23, 2019 at Subono Mantofani Room, Peruri Jakarta. Mercurius is an ERP-SAP program that has been implemented since 2017. It is a corporate information system designed to coordinate and integrate all of necessary resources, information, and activities necessary to run comprehensive business in real time. In essence, Mercurius is a more efficient supporting mechanism for business that can minimize the potential of error and invalid data, as well as modernize manual processes and other aspects that can hinder Company's efficiency.



30 JANUARI
January

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Pengawas Peruri

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) selaku pemilik modal Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menyerahkan Surat Keputusan (SK) No. SK-30/MBU/001/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia. Melalui SK tersebut Kementerian BUMN memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Pengawas Peruri periode 2013-2018, Ari Wahyuni yang telah berakhir masa tugasnya dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pemikirannya serta mengangkat Djoko Hendratto sebagai anggota Dewan Pengawas Peruri yang baru periode jabatan 2019-2024.

Changes in Composition of Peruri Supervisory Board Members

The Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the owner of Public Enterprise of Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) submitted Decision Letter (SK) No. SK-30/MBU/01/2019 dated January 30, 2019, on Dismissal and Appointment of Supervisory Board Members of the Public Enterprise of Banknote Printing and Minting of the Republic of Indonesia. Through the SK, the Ministry of SOE respectfully dismissed a member of Peruri Supervisory Board for the period of 2013-2018, Ari Wahyuni, whose tenure has ended, with utmost gratitude for all her hard work and thoughts, and appointed Djoko Hendratto as a new member of Peruri Supervisory Board for the tenure period of 2019-2024.



19 FEBRUARI
February

Peruri Salurkan Dana Program Kemitraan Senilai Rp1 Miliar melalui PNM

Peruri melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) tentang Hibah Dana Program Kemitraan BUMN pada Selasa, 19 Maret 2019 bertempat di Kantor Kementerian BUMN RI. Kerja sama ini bertujuan untuk menyalurkan dana program kemitraan Peruri dengan total nilai sebesar Rp1 miliar melalui PNM yang nantinya akan dikelola guna melakukan pemberdayaan dan disalurkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai wilayah Indonesia. Melalui bantuan tersebut diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan profesionalisme dan kemandirian usaha sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.

Peruri Distributed Partnership Fund Worth Rp1 Billion through PNM

Peruri signed a Cooperation Agreement with PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) on SOE Partnership Fund Grant on Tuesday, March 19, 2019 at the Office of Indonesian Ministry of SOE. This partnership aims to distribute Peruri's partnership fund worth Rp1 billion through PNM for the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) across Indonesia. With this assistance, MSME owners are expected to improve their professionalism and self-sustenance to be able to compete with other companies.



9 APRIL
April

Peruri Ekspor 1 Juta Buku Paspor Sri Lanka

Peruri melakukan pengiriman terakhir produk cetakan Paspor Sri Lanka pada Selasa, 9 April 2019 di Gedung Cetak Kertas Berharga Non Uang, Kawasan Produksi Peruri, Karawang, dengan total sebanyak 1 juta buku. Sejak 2003, Peruri telah melakukan kerja sama dengan pemerintah Sri Lanka untuk memenuhi kebutuhan dokumen imigrasi berupa pencetakan Paspor Sri Lanka. Hingga 2018 Peruri telah mencetak Paspor Sri Lanka dengan total sebanyak 8 juta buku dengan nilai 15 juta USD.

Peruri Exported 1 Million of Sri Lankan Passport Books

Peruri conducted a final delivery of 1 million printed Sri Lankan passports on Tuesday, April 9, 2019 at Non-Currency Valuable Paper Printing Building, Peruri Production Area, Karawang. Peruri has worked together with the government of Sri Lanka to fulfill the need for immigration document in form of Sri Lankan passport printing since 2003. As of 2018, Peruri has printed 8 million Sri Lankan passport books with a total value of USD15 million.



9 APRIL
April

Peresmian Rumah Kreatif BUMN Karawang

Peruri meresmikan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Karawang yang berlokasi di Jalan Raya Teluk Jambe, Kabupaten Karawang pada Selasa, 9 April 2019 yang bertujuan untuk mendorong kemandirian dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pendirian RKB Karawang yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN RI bertujuan untuk mendampingi dan membina para pelaku UMKM dalam hal pengelolaan usaha seperti: peningkatan kompetensi sumber daya, pengelolaan keuangan, permodalan, segmentasi dan target pasar, proses produksi dan total quality management.

Inauguration of Karawang SOE Creative House

Peruri inaugurated Karawang SOE Creative House (RKB), addressed at Jalan Raya Teluk Jambe, Karawang Regency, on Tuesday, April 9, 2019, which aims to help Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) to improve their self-sustenance and business development. The establishment of Karawang RKB was initiated by the Indonesian Ministry of SOE to facilitate and guide MSME owners in business management aspects, such as improvement of resource competence, financial management, capitalization, market segmentation and target, production process, and total quality management.



30 APRIL
April

Peruri Kerja Sama dengan Dukcapil dalam Pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan untuk Layanan eKYC Biometrik

Peruri bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Selasa, 30 April 2019 di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya dan Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (FP2DK) Ditjen Dukcapil, Gunawan. Melalui Kerja Sama ini, Peruri memperoleh hak akses atas data kependudukan (NIK, nama lengkap dan tanggal lahir) untuk mempermudah dan mempercepat proses validasi dalam penerbitan tanda tangan elektronik tersertifikasi atau biasa disebut proses eKYC (electronic KnowYour Customer) berbasis biometrik. Semua itu dilakukan dalam rangka pengembangan bisnis digital Peruri yang membutuhkan sertifikat elektronik seperti Peruri Sign, Peruri Tera, Digital Locker, Peruri Code serta Label Sekuriti yang dilengkapi layanan Secure Deposit Box untuk dokumen.

Peruri Joined Partnership with Population and Civil Registration Agency in Utilization of Single Identity Number and Population Data for eKYC Biometric Service

Peruri signed a Partnership Agreement with Directorate General of Population and Civil Registration Agency on Tuesday, April 30, 2019, at the Ministry of SOE Office, Central Jakarta. The signing was carried out by the President Director of Peruri, Dwina Septiani Wijaya, and Director of Population Data and Document Utilization Facilitation (FP2K), Directorate General of Population and Civil Registration Agency, Gunawan. Through this Partnership, Peruri gains access to population data (Single Identity Number, full name, and birth date) to ease and expedite validated issuance of certified electronic signatures, also known as biometrically based eKYC (electronic Know Your Customer). The partnership will help grow Peruri's digital businesses that require electronic certificates, such as Peruri Sign, Peruri Tera, Digital Locker, Peruri Code, and Security Label that is complemented with Secure Deposit Box service for documents.



13 MEI
May

Pergantian Anggota Dewan Pengawas Peruri

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) mengganti anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (Peruri) dengan menyerahkan Salinan Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN RI No. SK-93/MBU/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia. Melalui SK tersebut, Menteri BUMN RI memberhentikan anggota Dewan Pengawas (Dewas) Peruri yaitu Hasiholan Siahaan, Suroso Hadi Siswoyo dan Erna Wijayanti serta mengangkat Sutanto dari Badan Intelijen Negara, Dwi Pranoto dari Bank Indonesia dan Muhammad Yusuf Ateh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai anggota Dewan Pengawas Peruri yang baru.

Changes in Peruri Supervisory Board Members

The Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia changed the member of Public Enterprise of Banknote Printing and Minting of the Republic of Indonesia (Peruri) Supervisory Board by issuing Decision Letter (SK) of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-93/MBU/05/2019 dated May 13, 2019, on Dismissal and Appointment of Supervisory Board Members of the Public Enterprise of Banknote Printing and Minting of the Republic of Indonesia. With the SK, the Indonesian Ministry of SOE dismissed the following members of Peruri Supervisory Board: Hasiholan Siahaan, Suroso Hadi Siswoyo, and Erna Wijayanti, and appointed Sutanto from National Intelligence Agency, Dwi Pranoto from Bank Indonesia, and Muhammad Yusuf Ateh from Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, as the new members of Peruri Supervisory Board.



22 AGUSTUS
August

Peruri Raih Penghargaan TOP GRC 2019

Peruri berhasil mendapatkan penghargaan dalam acara GRC Summit & Top GRC 2019 dengan predikat Top GRC 2019 #3stars di bidang tata kelola perusahaan (GCG), manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan versi majalah Top Business. Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Head of Risk Management, Devi Syafriyeni pada acara penganugerahan di Hotel Borobudur, Jakarta.

Peruri Earned TOP GRC 2019 Award

Peruri earned the Top GRC 2019 #3stars award at the GRC Summit & Top GRC 2019 event for the category of Good Corporate Governance (GCG), risk management, and compliance management according to Top Business magazine. The award was received in person by Head of Risk Management, Devi Syafriyeni, at the awarding event in Hotel Borobudur, Jakarta.



LIGHTPERURI

29 AGUSTUS
August

Go Live LiGHT-Peruri

dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi seluruh karyawan, Peruri meluncurkan program software Sistem Manajemen Pembelajaran atau Learning Management System dengan aplikasi berbasis elektronik yang diberi nama LiGHT singkatan dari "Learning and Growth" di ruang Wahyu Hagono, Karawang.

LiGHT-Peruri Went Live

To improve knowledge and competence of all employees, Peruri launched a Learning Management System software program with electronic-based application called LiGHT (Learning and Growth) at Wahyu Hagono room, Karawang.



6 SEPTEMBER
September

Launching New Hyperion (E-Budgeting Application)

Peruri menyelenggarakan Launching New Hyperion, yaitu aplikasi E-Budgeting untuk memudahkan dalam proses input anggaran serta *controlling* anggaran baik dari unit kerja Keuangan maupun masing-masing unit kerja itu sendiri. Acara peluncuran aplikasi New Hyperion ini dalam rangka dimulainya proses penyusunan anggaran sebagai salah satu proses rangkaian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020 di Balai Subono Mantofani, Peruri Jakarta.

New Hyperion (E-Budgeting Application) Launching

Peruri held a launching event for New Hyperion, an E-Budgeting application to simplify the process of inputting and controlling budget by either the Finance work unit or each work unit. The event kickstarted the budgeting process as part of the Company Work Plan and Budget (RKAP) 2020 preparation at Subono Mantofani Hall, Peruri Jakarta.



26 SEPTEMBER
September

Peruri Launching Produk Digital

Peruri gelar *business conference and exhibition* yang bertema "Security in Digital Business". Peruri secara resmi memperkenalkan kepada publik 3 (tiga) produk digitalnya dengan nama Peruri Sign, Peruri Code dan Peruri Trust yang ketiganya dirangkum dalam satu layanan yaitu Peruri Digital Services. Dalam rangkaian acara ini, Peruri juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan BRI, BNI, BCA, Telkom, Askrindo, LPPOM MUI, Bank Muamalat & Hayuni, Dana Rupiah, Koperasi Simpan Pinjam Jakarta, Batumbu, Bahana Sekuritas dan Trimegah Sekuritas, terkait produk-produk digital Peruri yang akan diimplementasikan ke masing-masing jenis usahanya.

Peruri Launched Digital Product

Peruri held a business conference and exhibition called "Security in Digital Business" to introduce 3 (three) of its digital products to the public; Peruri Sign, Peruri Code, and Peruri Trust, under the single service of Peruri Digital Services. In this series of events, Peruri also signed Memorandum of Understanding and Partnership Agreement with BRI, BNI, BCA, Telkom, Askrindo, LPPOM MUI, Bank Muamalat & Hayuni, Dana Rupiah, Koperasi Simpan Pinjam Jakarta, Batumbu, Bahana Sekuritas, and Trimegah Sekuritas on the implementation of Peruri's digital products in their respective businesses.



26 SEPTEMBER
September

Grand Launching M Bloc Space

Peruri gandeng PT Ruang Riang Milenial (RRM) mendirikan M Bloc Space yang merupakan ruang publik/*creative hub* bagi kalangan milenial Jakarta. M Bloc terdiri menjadi 2 bagian utama. Pada barisan depan bekas perumahan dinas karyawan Peruri telah diubah menjadi barisan tenant lokal yang bergerak di bidang usaha kuliner, musik, film, animasi, seni rupa, kriya hingga *co-working space*. Sedangkan pada bagian dalam bekas gudang percetakan diubah menjadi live house, sebuah hall berkapasitas 300-350 orang untuk konser musik serta pertunjukan seni lainnya.

Grand Launching of M Bloc Space

Peruri partnered with PT Ruang Riang Milenial (RRM) to establish M Bloc Space, a creative hub for millennial citizens of Jakarta. M Bloc consists of 2 main areas; the front area which used to be the housing complex for Peruri employee was converted into a hub for local culinary, music, film, animation, visual art, craft, and co-working space tenants, while the back area which used to be a printing warehouse was converted into a live hall with the capacity of 300-350 people for live music concerts and other art performances.

Peruri Raih Penghargaan Infobank BUMN Award 2019

Peruri raih penghargaan Infobank BUMN Award 2019 kategori "The Best State Owned Enterprise Awards (SOE) 2019" dengan predikat BUMN "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan 2018. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Infobank Institute, Tubagus Rully Ferdian kepada Direktur Keuangan Peruri, Nungki Indraty pada acara malam penganugerahan di Grand Ballroom Kempinski Hotel, Jakarta.

Peruri Earned Infobank BUMN Award 2019

Peruri earned Infobank BUMN Award 2019 for the category of "The Best State Owned Enterprise Awards (SOE) 2019" for its "Very Good" SOE Financial Performance 2018. The award was handed in person by Director of Infobank Institute, Tubagus Rully Ferdian, to Peruri Finance Director, Nungki Indraty, during the awarding night at Grand Ballroom Kempinski Hotel, Jakarta.



25 OKTOBER
October



20 NOVEMBER
November

Peruri Raih Penghargaan SNI Award 2019

Peruri berhasil meraih penghargaan SNI Award 2019 peringkat Perak yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala BSN, Bambang Prasetya kepada Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya dalam acara malam penganugerahan di Balai Kartini, Jakarta. SNI Award merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah Republik Indonesia kepada organisasi yang dinilai telah menjalankan sistem manajemen operasional yang baik dan telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten.

Peruri Awarded with SNI Award 2019

Peruri earned a Silver award in the SNI Award 2019, an event held by National Standardization Agency (BSN). The award was handed in person by Head of BSN, Bambang Prasetya, to Peruri President Director, Dwina Septiani Wijaya, during the awarding night in Balai Kartini, Jakarta. SNI Award is the most prestigious award from the Indonesian Government to organizations deemed to have consistently implemented good operational management system and Indonesian National Standard (SNI).

Peruri Raih Penghargaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) 2019

Peruri berhasil mendapatkan penghargaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) 2019 dari Kementerian Perdagangan dengan kategori Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) Sektor Industri. Apresiasi ini diberikan kepada Peruri dan 12 perusahaan lainnya dari PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal dalam Negeri) berdasarkan hasil penyampaian LKTP selama 3 tahun terakhir (2015-2017). Penghargaan ini dinilai dari beberapa aspek seperti: rutin menyampaikan LKTP selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (tahun buku 2015- 2017); kecepatan waktu penyampaian yang dihitung berdasarkan tanggal akhir tutup buku masing-masing perusahaan di banding dengan batas akhir 6 (enam) bulan penyampaian ke Kementerian Perdagangan; dan kelengkapan dokumen yang terdiri dari profil perusahaan, opini terhadap LKTP dari Akuntan Publik, serta pernyataan kebenaran dari Dewan Direksi atau persetujuan RUPS.

Peruri Awarded with Company Annual Report (AR) Award 2019

Peruri was awarded in Company Annual Report (AR) 2019 event held by the Ministry of Commerce in the category of Domestic Capital Investment (PMDN) in Industry Sector. Peruri and 12 other companies were awarded for their PMA (Foreign Capital Investment) and PMDN (Domestic Capital Investment) according to their AR delivery in the last 3 years (2015-2017). The award considered numerous aspects, namely: regular submission of AR for 3 (three) consecutive years (fiscal year 2015-2017); timely submission within 6 (six)-month limit after end of each fiscal year for each company to the Ministry of Commerce; and completeness of documents which consist of company profile, opinion on AR by Public Accountant, and statement on authenticity by the Board of Directors or approval from the GMS.



4 DESEMBER
December

Penandatanganan AJB Persil dengan Bank Indonesia

Peruri bersama dengan Bank Indonesia telah melakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) Persil Kawasan Sentra Pengelolaan Uang (SPU), Data Center II (DC2), Business Resumption Site (BRS) dan Common Center (CC), serta Perjanjian Pekerjaan Jasa Pencetakan Uang Rupiah TA 2020-2021 di Ruang Chandra Gedung Kebun Sirih Lt. 6 Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Melalui penandatanganan AJB ini, sebagian lahan milik Peruri yang berlokasi di Kawasan Produksi Karawang akan dialihfungsikan menjadi beberapa kawasan milik Bank Indonesia dengan total seluas 61,3 hektar. Kerja sama ini tentu akan menjadi lebih baik karena Sentra Pengelolaan Uang (SPU) akan berada dalam satu wilayah yang sama dengan lokasi produksi pencetakan uang, sehingga beberapa proses dapat menjadi lebih terintegrasi dan *secure*.

Signing of Notarial Sale & Purchase Agreement of Lot with Bank Indonesia

Peruri and Bank Indonesia entered into Notarial Sale & Purchase Agreement of Lot Area for Money Management Center (SPU), Data Center II (DC2), Business Resumption Site (BRS), and Common Center (CC), as well as Rupiah Printing Service Work Agreement for Fiscal Year 2020-2021 at Ruang Chandra Gedung Kebun Sirih Lt. 6 Bank Indonesia, Central Jakarta. With the SPA signing, certain part of areas owned by Peruri at Karawang Production Area will be converted to several areas owned by Bank Indonesia with a total size of 61.3 hectare. This agreement will improve the situation as the SPU and money printing production site will operate in the same area, which will result in more integrated and secure processes.



4 DESEMBER
December



12 DESEMBER
December

Peruri Raih Penghargaan BUMN Terbaik 2019 pada Investor Awards 2019

Peruri kembali menerima penghargaan sebagai BUMN Terbaik 2019 Bidang Non Keuangan Sektor Industri Kertas, Percetakan dan Penerbitan pada Investor Awards 2019 di Balai Kartini, Jakarta. Majalah Investor memberikan penghargaan kepada Peruri atas kinerja perusahaan yang baik. Ketika semua industri dituntut tetap tumbuh saat perekonomian cenderung melambat dan sekaligus responsif terhadap tuntutan perubahan bisnis pada era digital, Peruri mampu membuktikannya lewat kinerja keuangan yang positif.

Peruri Won Best SOE 2019 Award in Investor Awards 2019

Peruri was once again rewarded as Best SOE 2019 in the Paper, Printing, and Publishing Industry Sector, Non-Finance Category, at Investor Awards 2019 in Balai Kartini, Jakarta. The Investor magazine awarded Peruri for its remarkable performance. When all industries have to grow in the middle of economic slowdown and demand for business adaptation due to the digital era, Peruri proved its capability through positive financial performance.

Peruri Customer Gathering 2019

Peruri gelar *customer gathering* di M Bloc Live House. Pada kegiatan kali ini, Peruri memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pelanggan yang telah loyal menggunakan layanan Peruri (*the most loyal customer*) dengan dibagi ke dalam 4 (empat) kategori industri yaitu Kementerian-Lembaga, BUMN, Perusahaan Swasta dan Institusi Pendidikan (Perguruan Tinggi). Pelanggan yang datang berasal dari pasar *non captive* domestik / dalam negeri meliputi Kementerian-Lembaga, BUMN, Perusahaan Swasta hingga Instansi Perguruan Tinggi. Jajaran Direksi Peruri secara lengkap menghadiri acara ini untuk bertemu dengan segenap perwakilan dari masing-masing instansi pelanggan yang hadir dan berdiskusi perihal pelayanan serta perkembangan produk Peruri ke depan.

Peruri Customer Gathering 2019

Peruri held a customer gathering event at M Bloc Live House. In this event, Peruri expressed its appreciation and gratitude to its most loyal customers for using Peruri's services, classified into the 4 (four) categories of industries (Ministerial Institutions, SOE, Private Enterprises, and Educational Institutions/Universities). The customers from non-captive domestic/overseas market included Ministerial Institutions, SOEs, Private Enterprises, and Universities. All members in the Board of Directors of Peruri attended the event to meet up with representatives from each customer institution and discuss Peruri's services and products being developed for the future.



16 DESEMBER
December

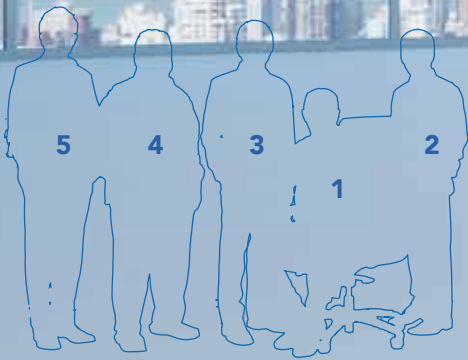
02

LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT

Target dari segenap Manajemen Peruri adalah mewujudkan visi Perusahaan untuk menjadi perusahaan berkelas dunia di bidang *integrated security printing and system*.

Peruri's Management target is to manifest the Company vision to be a world-class company in *integrated security printing and system*.





-
- 1 Rizal Affandi Lukman**
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board

 - 2 Djoko Hendratto**
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Supervisory Board

 - 3 Dwi Pranoto**
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Supervisory Board

 - 4 Muhammad Yusuf Ateh**
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Supervisory Board

 - 5 Sutanto**
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Supervisory Board



LAPORAN DEWAN PENGAWAS

BOARD OF SUPERVISORY REPORT

Dewan Pengawas senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik.

The Supervisory Board always perform its duties and responsibilities professionally and independently according to the good corporate governance.



Rizal Affandi Lukman
Ketua Dewan Pengawas/
Chairman of the Supervisory Board

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, izinkan kami mewakili segenap manajemen Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2019. Melalui buku laporan ini, perkenankanlah kami selaku Dewan Pengawas Peruri untuk menyampaikan pokok-pokok Laporan Pengawasan terhadap operasional Perusahaan di tahun buku 2019. Dapat kami sampaikan bahwa laporan keuangan Perusahaan telah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian". Laporan Tahunan ini juga sebagai upaya untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja Perusahaan di sepanjang 2019.

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

With God Almighty's blessings, allow us on behalf of the entire management of Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) to present the Company's Annual Report for the fiscal year of 2019. Peruri Supervisory Board would like to convey the highlights of the Supervisory Report on the Company's operations for fiscal year 2019 in this Annual Report. We would also like to state that the Company's financial statement was audited by independent auditor from Public Accounting Firm HLB Hadori Sugiarto Adi & Partner with unqualified opinion. This Annual Report also presents a comprehensive summary on the Company's performance throughout 2019.

Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan secara konstruktif dan kolaboratif agar Direksi dapat secara cepat dan tepat menyelesaikan kendala yang muncul dengan tetap memperhatikan implementasi prinsip-prinsip GCG.

Supervision by the Supervisory Board is carried out constructively and collaboratively so that the Board of Directors can quickly and precisely resolve any obstacles while still adhering to the implementation of GCG principles.

KONDISI PEREKONOMIAN SECARA GLOBAL

Sepanjang 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian global. Gejala ketidakpastian ekonomi global masih terus berlanjut. Seperti dikutip dari Bank Indonesia, kemajuan dalam perundingan perdagangan antara AS-Tiongkok berdampak pada menurunnya risiko di pasar keuangan global serta mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing ke negara berkembang. Ke depan, prospek ekonomi global akan dipengaruhi oleh kemajuan *trade deal* AS-Tiongkok, pemanfaatan *trade diversion* negara berkembang, efektivitas stimulus fiskal dan pelanggaran kebijakan moneter serta kondisi geopolitik. Prospek pemulihan global tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi domestik dan arus masuk modal asing.

Dalam rangka menyikapi tantangan usaha, Peruri telah mengambil berbagai kebijakan strategis guna mempertahankan kinerja di level optimal pada 2019 dan Dewan Pengawas mendukung sepenuhnya langkah-langkah Direksi. Dewan Pengawas tetap memiliki optimisme akan perkembangan Perusahaan ke depannya. Target yang diberikan kepada Direksi Peruri adalah mewujudkan visi Perusahaan untuk menjadi perusahaan berkelas dunia di bidang *integrated security printing and system*.

GLOBAL ECONOMY CONDITION

There were many challenges for the global economy in 2019. The global economic turmoil continued on. According to Bank Indonesia, progress in trade discussions between the United States (US) and China decreases the risk in the global economy market and resumed investments of foreign capital in developing countries. Looking forward, the global economy outlook will be impacted by progress in trade deals between the US and China, utilization of trade diversion by developing countries, effectiveness of fiscal stimulus, loosening of monetary policy, and geopolitical situation. This economic recovery outlook is of importance because it may influence domestic economic growth and the incoming foreign capital.

In preparation of the aforementioned business challenges, the Board of Directors of Peruri implemented various strategic policies to maintain its optimal performance in 2019, which were fully supported by the Supervisory Board. The Supervisory Board remains confident in the Company's future growth. The target assigned to the Board of Director of Peruri is to actualize the Company's vision to become a world-class company in integrated security printing and system.



13 (tiga belas) kali rapat internal dan 14 (empat belas) kali rapat gabungan dengan mengundang Direksi.

13 (thirteen) internal meetings and 14 (fourteen) joint meetings with the Board of Directors.

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS DAN HUBUNGAN KERJA DENGAN DIREKSI

Dewan Pengawas dan Direksi merupakan organ sebuah perusahaan yang dibentuk dalam rangka mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Direksi memiliki peran pengelolaan jalannya perusahaan, sedangkan Dewan Pengawas berperan untuk mengawasi pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Masing-masing peran tersebut memiliki batasan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Meskipun adanya perbedaan peran, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dibangun hubungan kerja yang saling menghormati antar keduanya.

Dewan Pengawas senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Pengawas berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan Perusahaan, baik pada proses perumusan rencana strategis Perusahaan, penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja serta penerapan manajemen risiko dan penerapan *Good Corporate Governance*.

Pada aspek pengendalian kinerja dan kepatuhan manajemen, Dewan Pengawas melakukan pemantauan dan saran atas kinerja Perusahaan yang mengacu pada RKAP 2019. Dewan Pengawas juga melakukan kajian atas hasil pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan Perusahaan. Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Pengawas merupakan bagian dari amanat pemegang saham yang telah diputuskan melalui mekanisme RUPS. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Dewan Pengawas menjadi representasi atas kepentingan pemegang saham untuk mengawasi perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan secara konstruktif dan kolaboratif agar Direksi dapat secara cepat dan tepat menyelesaikan kendala yang muncul dengan tetap memperhatikan implementasi prinsip-prinsip GCG. Di sepanjang 2019, Dewan Pengawas mengadakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali rapat internal dan 14 (empat belas) kali rapat gabungan dengan mengundang Direksi. Rapat-rapat dan kunjungan yang juga merupakan program kerja Dewan Pengawas tersebut menjadi forum bagi Dewan Pengawas untuk memantau kinerja dan pencapaian Perusahaan sepanjang 2019.

SUPERVISORY FUNCTION OF SUPERVISORY BOARD AND WORK RELATIONSHIP WITH DIRECTORS

The Supervisory Board and Board of Directors are the Company organs established to comply with the prevailing laws and regulations. The role of Board of Directors is to manage the Company's operations, while the role of Supervisory Board is to supervise the Company's management by the Board of Directors. Each of these roles has their own respective boundaries and responsibilities. Despite these different roles, a work relationship is built based on mutual respect in performing their respective duties and responsibilities.

The Supervisory Board always perform its duties and responsibilities professionally and independently while adhering to good corporate governance. Supervisory Board is committed to be proactive in performing the Company's supervisory function, whether in formulating the Company's strategic plans, designing and implementing business plans, monitoring performances as well as implementing risk management and good corporate governance.

In terms of performance control and management compliance, the Supervisory Board monitored and advised the Company's performance based on RKAP 2019. Supervisory Board also reviewed the result of general audit on the Company's financial statement. The supervisory function performed by Supervisory Board is part of the mandate from shareholders as decided through the GMS. Supervisory Board both directly and indirectly represents the interest of shareholders to supervise the Company's management by the Directors.

Supervision by the Supervisory Board was performed in a constructive and collaborative fashion to ensure that Directors can quickly and properly resolve issues while observing the implementation of GCG principles. In 2019, the Supervisory Board held 13 (thirteen) internal meetings and 14 (fourteen) joint meetings with the Directors. These joint meetings served as a forum for the Supervisory Board to monitor the Company's performance and achievements throughout 2019.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERURI

Iklim usaha Peruri pada 2019 cukup positif di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Atas kinerja tersebut, Dewan Pengawas memberikan apresiasi atas kerja keras Direksi beserta jajarannya bersama semua organ Perusahaan. Penilaian Dewan Pengawas pada pencapaian kinerja Direksi tentunya tidak terlepas dari tingkat keberhasilan Direksi dalam merealisasikan *Key Performance Indicator* maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) seperti yang direncanakan pada awal tahun.

Dewan Pengawas telah memberikan penilaian terhadap kinerja masing-masing Direksi. Adapun parameter yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi tersebut meliputi; pencapaian target kinerja Perusahaan, kekompakan tim, integritas, dan *track record*. Berdasarkan pencapaian yang diraih pada 2019, Dewan Pengawas menilai Direksi telah melakukan strategi usaha yang tepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana Perusahaan.

Melihat pencapaian kinerja yang dihasilkan, Dewan Pengawas yakin bahwa Direksi telah melakukan yang terbaik dalam mengimplementasikan strategi, mengendalikan risiko serta menerapkan praktik tata kelola yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang 2019, segenap Direksi telah menunjukkan komitmennya dan lebih akomodatif terhadap iklim usaha yang senantiasa dihadapkan dengan berbagai perubahan.

Secara keseluruhan Direksi telah menunjukkan komitmen dan dedikasi secara maksimal dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional Peruri serta telah mempertimbangkan rekomendasi dan arahan Dewan Pengawas. Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian Perusahaan telah berusaha secara maksimal dalam rangka memenuhi target RKAP dan/atau kriteria lain yang ditetapkan. Sementara itu, performa Direktur secara individual dalam pencapaian kinerja Perusahaan, seperti yang tercantum dalam kontrak manajemen telah memenuhi hasil yang ditetapkan selaras dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

ASSESSMENT ON DIRECTORS PERFORMANCE IN PERURI MANAGEMENT

The business climate of Peruri in 2019 remained positive in the midst of unstable economic condition. For such performance, the Supervisory Board expressed its appreciation toward the hard work of Directors and all organs of the Company. The assessment from the Supervisory Board of the Directors' performance was focused on their level of success in meeting *Key Performance Indicators* and realizing the Company's RKAP 2019 that was planned at the beginning of the year.

The Supervisory Board decided on the assessment for each of the Directors' performance. The parameters used in assessing their performances included the achievement of the Company's performance targets, team unity, integrity, and track record. Based on the achievements in 2019, the Supervisory Board assessed that the Directors have carried out proper business strategies according to the Company's plans.

Based on the achievements, the Supervisory Board is confident that the Board of Directors have done their best in implementing strategies, controlling risks, and practicing proper governance according to the prevailing laws and regulations. Throughout 2019, the Board of Directors showed their commitments and became more accommodative toward the constantly changing business climate.

Overall, the Board of Directors showed maximum commitment and dedication in running Peruri's business and operational activities, having taking the Supervisory Board's recommendations and directions into consideration. The collective performance of the Board of Directors showed maximum effort in achieving RKAP target and/or other established criteria. Also, the Board of Directors have individually contributed to the Company's performance and achieved results, in line with the implementation of Good Corporate Governance principles as described in the management contract.

PEMBERIAN ARAHAN KEPADA DIREKSI

Pencapaian kinerja Perusahaan di 2019 juga merupakan kontribusi pengawasan Dewan Pengawas dan keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh Dewan pengawas. Sesuai Anggaran Dasar, tidak semua keputusan dapat dilakukan oleh Direksi namun keputusan yang strategis tetap membutuhkan keputusan Dewan Pengawas dan Rapat Umum Pemegang Saham. Beberapa keputusan yang harus melibatkan Dewan Pengawas antara lain penyusunan RKAP dan RJPP Perusahaan.

Mekanisme pemberian nasihat dan arahan kepada Direksi di antaranya melalui forum rapat gabungan Dewan Pengawas bersama Direksi yang diselenggarakan secara berkala maupun melalui Komite-Komite di bawah Dewan Pengawas yang menyelenggarakan rapat rutin bersama Manajemen Perusahaan. Mekanisme lainnya melalui penerbitan surat yang ditujukan kepada Direksi.

Sepanjang 2019, Dewan Pengawas telah memberikan rekomendasi terkait kinerja Perusahaan, diantaranya:

1. Persetujuan Penyaluran Dana Hibah;
2. Laporan Hasil Evaluasi atas Efektivitas Fungsi SPI tahun 2018;
3. Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pelaksana Audit Umum atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) Tahun Buku 2019;
4. Persetujuan penghapusbukuan aset tetap dengan umur ekonomis sampai dengan 5 (lima) tahun;
5. Rekomendasi penghapusbukuan aset tetap 56 unit yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi;
6. Rekomendasi Pengangkatan Direktur Utama PT Peruri Properti;
7. Rekomendasi Pengangkatan Komisaris Utama PT Peruri Digital Security.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERURI YANG DISUSUN DIREKSI

Rumusan target yang tertuang dalam RKAP 2020 harus menjadi gambaran tentang optimisme Perusahaan. Dewan Pengawas menilai bahwa kinerja Peruri 2019 merupakan pondasi yang kokoh untuk menaklukkan berbagai tantangan dan peluang usaha di 2020.

DIRECTIONS TO DIRECTORS

Supervision and strategic decisions from the Supervisory Board also contributed to the Company's performance achievement in 2019. In line with the Articles of Association, the Board of Directors cannot make every decision, as strategic decisions require approval from the Supervisory Board and General Meeting of Shareholders. Several of the decisions that require involvement of Supervisory Board were regarding the preparation of the Company's RKAP and RJPP.

The mechanism for advising and directing the Board of Directors was by regular joint meetings between the Supervisory Board and Board of Directors, as well as through Committees under the Supervisory Board that held routine meetings with the Company Management. Another mechanism was through issuance of letters addressed to the Board of Directors.

During 2019, the Supervisory Board provided the following recommendations on the Company's performance:

1. Approval of Grant Distribution;
2. Report on the Evaluation Results of the Effectiveness of the Internal Audit Function in 2018;
3. Proposal for the appointment of a Public Accountant Office (KAP) to implement the General Audit of the Financial Statements of the Public Company for Printing Money of the Republic of Indonesia (Perum Peruri) for the 2019 Financial Year;
4. Approval for the nits of fixed assets with an economic age of up to 5 (five) years;
5. Recommendation for the nits of fixed assets 56 units that have been damaged and cannot be used anymore;
6. Recommendation for the appointment of the President Director of PT Peruri Properti;
7. Recommendation for the appointment of the President Commissioner of PT Peruri Digital Security.

OPINION ON PERURI BUSINESS OUTLOOK FROM THE BOARD OF DIRECTORS

The target formulation for as described in RKAP 2020 should reflect the Company's optimism. The Supervisory Board assessed that the performance of Peruri in 2019 was a strong foundation to overcome various challenges and seize business opportunities in 2020.

Prospek perekonomian global dan domestik pada 2020 sangat tergantung pada proses penanganan dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Risiko berlanjutnya penyebaran COVID-19 dalam jangka waktu lebih lama dan menjangkau wilayah yang lebih luas dapat menyebabkan pertumbuhan PDB dunia dan volume perdagangan dunia semakin melambat yang dapat menurunkan harga komoditas menjadi lebih dalam. Hal tersebut dapat menyebabkan koreksi terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih rendah. Dengan semakin terhubungnya jalur perdagangan dan sistem keuangan antar negara saat ini, maka dampak penurunan pertumbuhan global semakin cepat bertransmisi ke negara-negara lainnya. Penanganan yang ditempuh oleh negara-negara terdampak yang tidak efisien dan tidak efektif berisiko menyebabkan prospek pertumbuhan ekonomi global dan domestik menjadi lebih lambat dari prediksi.

Di tengah tantangan yang cukup berat tersebut, Dewan Pengawas memberikan apresiasi terhadap Direksi dan segenap manajemen yang telah mengambil langkah strategis dalam rangka memitigasi risiko yang akan timbul di kemudian hari. Langkah strategis tersebut meliputi:

1. Melakukan efisiensi biaya sehingga target atas perolehan laba dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan;
2. Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan atau *training* secara berkelanjutan untuk mengantisipasi kebutuhan SDM terkait dengan rencana pengembangan usaha;
3. Memastikan program investasi telah didukung dengan perencanaan yang memadai dengan mempertimbangkan skala prioritas untuk investasi yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan perusahaan;
4. Melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kinerja perusahaan anak agar dapat memperoleh laba sesuai target RKAP yang telah ditetapkan;
5. Selalu menerapkan Tata Kelola Perusahaan Anak (*subsidiary governance*) dengan baik sehingga Perusahaan Anak tidak saja dikelola dengan baik (*well-managed*) tetapi juga dikelola dengan tata kelola yang baik dan menciptakan *confidence* bagi semua pemangku kepentingan (*well-governed*);
6. Mengimplementasikan *Talent Management System* secara berkesinambungan;
7. Penyaluran dana dari Unit PKBL pada area yang sesuai dan dapat memberikan *corporate image* yang baik bagi bisnis Peruri serta dapat merealisasikan target-targetnya secara tepat sasaran dan tepat jumlah.

The outlook of global and domestic economy in 2020 relies heavily on the process of economic management and recovery following COVID-19. The risk of COVID-19 continuing to spread for a longer period across larger areas may result in an even further slowdown of global GDP growth and trade volume, which may possibly lead to a steeper fall of commodity prices. This may mean a correction in the Indonesia's economic growth projection, revising it down. With international trade routes and financial systems being more connected, the impact of a stunted global growth will quickly spread to other countries. Inefficient and ineffective measures taken by impacted countries may result in a slower global and domestic economic growth than the initial forecast.

Facing such a severe challenge, the Supervisory Board appreciated the Board of Directors and the entire management staff for taking strategic measures to mitigate future risks. These measures included:

1. Carry out cost efficiency so that the target for profit can be achieved as expected;
2. Increasing the capability of human resources through continuous education and training programs to anticipate human resource needs related to business development plans;
3. Ensure that the investment program is supported by adequate planning by considering the priority scale for investments that have a direct impact on increasing company revenues;
4. Continuously monitoring the performance of subsidiaries to earn profits according to the RKAP targets that have been set;
5. Always implement good subsidiary governance so that the Subsidiary is not only well-managed but also managed with good governance and creates confidence for all stakeholders (well-governed);
6. Implementing the Talent Management System on an ongoing basis;
7. Disbursement of funds from the CSR Unit in an appropriate area and can provide a good corporate image for Peruri's business and be able to realize its targets precisely and in the right amount.

Dewan Pengawas memandang bahwa 2020 akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Peruri. Namun Dewan Pengawas yakin bahwa tantangan ini akan mampu dilalui selama seluruh Insan Peruri memiliki rasa optimis dan semangat juang yang tinggi. Oleh karena itu, Dewan Pengawas senantiasa mengingatkan Direksi untuk terus berupaya memberikan hasil terbaik kepada *stakeholders*. Dengan inovasi berkelanjutan dan perbaikan metode kerja yang lebih efektif dan efisien serta kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni, Dewan Pengawas optimis Peruri memiliki prospek usaha jangka panjang yang menjanjikan serta mampu memberikan imbal jasa yang memuaskan bagi Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan lainnya.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN DAN PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI PERURI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), manajemen berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan *Code of Conduct* (CoC) dan budaya kerja. Oleh karena itu, Perusahaan menetapkan kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai salah satu bagian yang menjadi acuan perilaku dan budaya kerja Perusahaan. Pemutakhiran kebijakan WBS senantiasa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapannya.

Pedoman pengelolaan *Whistleblowing System* tertuang dalam surat keputusan Direksi No. SKEP-995/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang *Whistleblowing System*. Evaluasi dan pembaharuan atas pedoman pelaksanaan WBS dilakukan oleh Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) sejak 2019 yang sebelumnya dikelola oleh Biro Legal, Regulatory Management and Compliance. Secara khusus, Perusahaan menyediakan sarana pelaksanaan WBS melalui e-mail: wbs@peruri.co.id dan menunjuk unit kerja untuk memantau dan melakukan tindak lanjut atas pelaporan WBS yang diterima baik melalui e-mail, website maupun yang disampaikan secara langsung.

Dewan Pengawas senantiasa berperan dalam hal pengawasan implementasi WBS di lingkungan Perusahaan, salah satunya memastikan bahwa

The Supervisory Board considers 2020 to be a challenging year for Peruri. However, the Supervisory Board is also confident that the Company can overcome these challenges. Therefore, the Supervisory Board always reminds the Directors to strive toward the best outcome for the sake of the stakeholders. With continuous innovation, more effective and efficient work methods, and capable human resources, the Supervisory Board believes that Peruri has a bright long-term outlook and it able to provide satisfactory return on investment for the Shareholders and other Stakeholders.

OPINION ON IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT OF WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) IN PERURI

To improve the effectiveness of GCG implementation, the management is committed to professionally run the Company based on corporate behaviors that are in line with CoC and the work culture. Therefore, the Company established a Whistleblowing System (WBS) policy as part of the Company's behavioral and work culture guideline. The Company's WBS policy is routinely updated to improve the effectiveness of its implementation.

The guideline for Whistleblowing System management is stipulated in the letter of decision of the directors No. SKEP-995/XII/2015 dated December 18, 2015, concerning Whistleblowing System. Evaluation and update on WBS implementation guideline are always carried out by the regulatory and compliance management of legal bureau. The Company also provided a specific channel for WBS implementation in form of e-mail: wbs@peruri.co.id. A work unit is assigned to periodically monitor and follow up in WBS reporting received by e-mail, website, or directly.

The Supervisory Board always takes part in monitoring the WBS implementation within the Company environment. One of the ways is by ensuring that

sosialisasi WBS berjalan dengan baik di lingkup Peruri. Sosialisasi WBS di internal Perusahaan disampaikan melalui media internal Perusahaan dan presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Sedangkan sosialisasi kepada pihak eksternal, Peruri menggunakan *channel* lain di antaranya melalui website, email dan kegiatan-kegiatan Perusahaan yang bersifat eksternal.

Hingga Desember 2019, terdapat 8 (delapan) pengaduan melalui mekanisme *Whistleblowing System*. Dari keseluruhan pengaduan tersebut, 6 (enam) pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti karena bersifat bukan pengaduan, sementara 2 (dua) pengaduan lainnya telah ditindaklanjuti. Adapun pengaduan yang ditindaklanjuti tersebut berupa 1 (satu) pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang dan telah ditindaklanjuti oleh SPI, serta 1 (satu) pengaduan terkait perbuatan tidak menyenangkan yang telah ditindaklanjuti oleh Divisi SDM. Pedoman WBS diharapkan dapat menjadi peringatan dini (*early warning system*) bagi seluruh Insan Perusahaan dalam berperilaku agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang diatur.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Organ Pendukung Dewan Pengawas yang terdiri dari Komite Audit dan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, keberadaan Organ Pendukung Dewan Pengawas juga diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Komite-komite yang dimiliki Perusahaan bertugas membantu Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perusahaan yang bersifat strategis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta mengidentifikasi masalah yang dianggap penting dalam kepengurusan Perusahaan. Secara rinci kedudukan, tugas, wewenang, tanggungjawab dan kode etik Komite Dewan Pengawas telah diatur dalam Piagam Komite Audit dan Piagam Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko.

the dissemination of information regarding WBS is carried out properly within Peruri. Internal information dissemination of WBS is conveyed through the Company's internal media and direct presentation to the relevant work units, while dissemination to external parties is conducted through website, e-mail, and other external activities of the Company.

As of December 2019, there were 8 (eight) reports through Whistleblowing System received by the Company; 6 (six) of which were not followed up as the reports were considered invalid, while 2 (two) were followed up. From the two reports that were followed up, 1 (one) of which was related to an abuse of authority and was followed up on by SPI, while 1 (one) other report was related to an objectionable act that was followed up on by HR Division. WBS guideline is expected to serve as an early warning system for all elements of the Company to behave in accordance with the prevailing laws and regulations, as well as other preset conditions.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER SUPERVISORY BOARD

In performing its duties, the Supervisory Board is assisted by the Supporting Organs of Supervisory Board, which consists of the Audit Committee and the Risk Assessment and Monitoring Committee. This refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises on Supporting Organs of Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises. Moreover, the existence of Supporting Organs of Supervisory Board is also regulated in the Company's Articles of Association.

The Committees in the Company are tasked to assist the Supervisory Board in supervising the Company's strategic activities, including planning, execution, and accountability, as well as identifying issues considered to be important in the governance of the Company. The positions, duties, authorities, responsibilities, and code of ethics of the Supervisory Board Committees are regulated in detail in the Audit Committee Charter and the Risk Assessment and Monitoring Committee Charter.

Penilaian terhadap kinerja Komite Audit dan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko dilakukan secara kualitatif, meliputi keaktifan Komite dalam menjalankan tugasnya, proses dokumentasi dan rekomendasi yang diberikan. Di sepanjang 2019, Komite Audit melakukan 12 (dua belas) kali rapat dan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko juga melakukan 12 (dua belas) kali rapat dengan agenda yang telah disesuaikan. Dengan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh seluruh anggota komite, izinkan Dewan Pengawas menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Komite Audit dan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko.

Dewan Pengawas menilai bahwa komite-komite penunjang fungsi Dewan Pengawas telah bekerja secara kolektif dan secara independen dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut membuahkan implementasi prinsip GCG di Perusahaan berjalan secara maksimal. Hal ini juga didukung oleh komitmen Dewan Pengawas bersama dengan Direksi yang berkolaborasi dalam rangka mewujudkan transformasi jangka panjang tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan nilai positif yang berkelanjutan.

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS

Sepanjang 2019, komposisi Dewan Pengawas telah mengalami perubahan, dengan kronologi sebagai berikut:

Performance assessment on the Audit Committee and the Risk Assessment and Monitoring Committee was carried out in a qualitative manner and in consideration of the Committees' diligent performance of their duties, documentation process, and recommendations provided. Throughout 2019, the Audit Committee held 12 (twelve) meetings, while the Risk Assessment and Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings with adjusted agenda. For the performance of duties by all members of the committees, allow us as the Supervisory Board to express our appreciation and gratitude to all members of the Audit Committee and the Risk Assessment and Monitoring Committee.

The Supervisory Board assessed that the committees supporting the functions of Supervisory Board worked collectively and independently in performing their duties. This resulted in an optimal implementation of GCG principles, supported by the commitment of the Supervisory Board along with the Directors, in collaborating toward long-term transformation of corporate governance which is expected to generate sustainable positive values.

INFORMATION ON CHANGES IN COMPOSITION OF SUPERVISORY BOARD

Throughout 2019, the composition of the Supervisory Board underwent the following changes in chronological order:

Dasar Hukum Legal Basis	Dewan Pengawas Sebelumnya Previous Member of Supervisory Board	Dewan Pengawas yang Baru New Member of Supervisory Board
Keputusan Menteri BUMN No. SK-30/MBU/01/2019 tertanggal 30 Januari 2019 Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-30/MBU/01/2019 dated January 30, 2019	Ari Wahyuni	Djoko Hendratto
melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-93/MBU/05/2019 tertanggal 13 Mei 2019 Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-93/MBU/05/2019 dated May 13, 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Suroso Hadi Siswoyo • Hasiholan Siahaan • Erna Wijayanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Sutanto • Dwi Pranoto • Muhammad Yusuf Ateh

Dengan demikian, susunan komposisi Dewan Pengawas per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rizal Affandi Lukman : Ketua Dewan Pengawas
Djoko Hendratto : Anggota Dewan Pengawas
Sutanto : Anggota Dewan Pengawas
Dwi Pranoto : Anggota Dewan Pengawas
Muhammad Yusuf Ateh : Anggota Dewan Pengawas

Segecap Dewan Pengawas berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk kepentingan Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan kondisi makro ekonomi serta pertumbuhan iklim usaha di Indonesia, Dewan Pengawas memiliki optimisme bahwa Perusahaan akan mampu mencapai pertumbuhan yang lebih baik pada 2020. Atas seluruh capaian Perusahaan selama 2019, Kami selaku Dewan Pengawas menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian segecap jajaran Direksi, Manajemen dan Karyawan dalam merealisasikan capaian kinerja Peruri. Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada segecap Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas dukungan dan kepercayaan terhadap Perusahaan selama ini.

Hence, the composition of Supervisory Board as of December 31, 2019, is as follows:

Rizal Affandi Lukman : Chairman of Supervisory Board
Djoko Hendratto : Member of Supervisory Board
Sutanto : Member of Supervisory Board
Dwi Pranoto : Member of Supervisory Board
Muhammad Yusuf Ateh : Member of Supervisory Board

All members of the Supervisory Board are committed to performing the mandate entrusted to them by always prioritizing good corporate governance principles in the interest of the Shareholders and other Stakeholders.

CLOSING

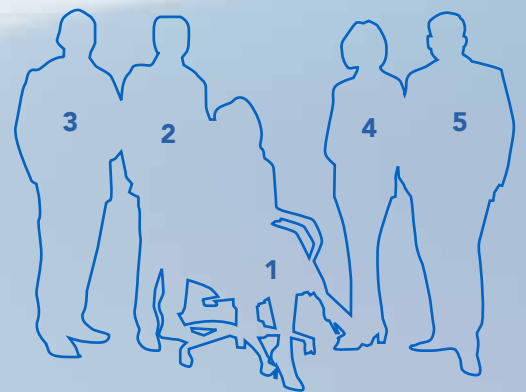
Considering macro economy condition and business climate growth in Indonesia, the Supervisory Board is confident that the Company will have an improved growth in 2020. For all of the Company's achievements in 2019, on behalf of the Supervisory Board, we would like to express our appreciation toward the dedication and service of the Directors, Management, and Employees in contributing to Peruri's performance achievement. We would also like to thank all the Shareholders and Stakeholders for their continuous support and trust to the Company all this time.

Jakarta, September 2020



Rizal Affandi Lukman
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board





-
- 1 Dwina Septiani Wijaya**
Direktur Utama/*President Director*
-
- 2 Gandung Anggoro Murdani**
Direktur SDM dan Umum/*HR and General Director*
-
- 3 Saiful Bahri**
Direktur Operasi/*Director of Operation*
-
- 4 Winarsih Budiriani**
Direktur Keuangan/*Director of Finance*
-
- 5 Fajar Rizki**
Direktur Pengembangan Usaha/
Director of Business Development
-

LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS REPORT

Segenap manajemen berhasil menerapkan strategi dan inisiatif yang tepat sehingga Perusahaan berhasil membukukan pencapaian yang optimal.

The entire management successfully implemented an excellent strategies and initiatives, which resulted in optimal achievement by the Company.



Dwina Septiani Wijaya
Direktur Utama/President Director

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, izinkan kami mewakili segenap manajemen Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk menyampaikan Buku Laporan Tahunan Peruri 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan. Implementasi kebijakan strategis dan pencapaian usaha seperti yang disampaikan dalam laporan tahunan ini merupakan gambaran dari upaya-upaya inisiasi strategis yang telah dilakukan manajemen. Selanjutnya perkenankanlah kami selaku Direksi Peruri untuk menyampaikan pengelolaan Perusahaan di tahun buku 2019.

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

Praise to the God Almighty, on behalf of the entire management of Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), allow us to present the Company Annual Report for fiscal year 2019 as a form of accountability to the Shareholders and all other Stakeholders. The implementation of strategic policies and business achievements conveyed in this annual report reflects the strategic initiative efforts made by the management. Now, as the Board of Directors of Peruri, allow us to present information on the management of the Company in fiscal year 2019.

Peruri senantiasa menghadirkan kinerja yang optimal dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produksi, serta bertransformasi bisnis menjadi perusahaan penjamin sekuriti berbasis digital. Hal tersebut diwujudkan melalui serangkaian kegiatan yang relevan yaitu riset, pengembangan di bidang teknologi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

All Company People always work together to achieve the best goals and are committed to continuing to build business value and healthy business processes and sustainable digital transformation.

PERSPEKTIF PEREKONOMIAN MAKRO

Seperti dikutip dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap memiliki daya tahan yang baik di tengah kinerja perekonomian dunia yang melambat. Pertumbuhan ekonomi keseluruhan pada 2019 berada di angka aman yakni 5,02%, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan capaian 2018 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap positif kendati kinerja ekspor menurun. Pertumbuhan ekonomi 2019 banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga sedangkan ekspor menurun sejalan dengan melambatnya permintaan global dan menurunnya harga komoditas global.

Permintaan domestik yang terjaga dipengaruhi stabilnya konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04% pada 2019, tidak banyak berbeda dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 5,05%. Konsumsi rumah tangga yang terjaga didorong oleh inflasi yang terkendali dan tingkat keyakinan konsumen yang tetap baik. Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT) meningkat dari 9,10% pada 2018 menjadi 10,62% pada 2019 serta didorong dampak positif penyelenggaraan pemilu 2019.

MACRO ECONOMY PERSPECTIVE

According to Bank Indonesia, Indonesia's economic growth remained resilient in the midst of global economy slowdown. The overall economic growth in 2019 remained at the safe figure of 5.02%, although it was lower than the achievement in 2018 at 5.17%. This economic growth was supported by positive domestic demand in spite of declining export performance. Indeed, domestic demand mostly fueled economic growth in 2019, while exports declined with the slowdown in global demand and the fall of global commodity prices.

The stable domestic demand resulted from a stable household consumption, which grew by 5.04% in 2019, quite similar to the growth in previous year of 5.05%. This stable household consumption was supported by controlled inflation and a good level of consumer trust. Household Non-Profit Institution (Lembaga Non Profit Rumah Tangga/ LNPRT) consumption increased by 9.10% in 2018 to 10.62% in 2019 and encouraged by the positive impact of following the positive sentiments of 2019 election.



10,62%

Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) meningkat dari 9,10% pada tahun 2018 menjadi 10,62%

Consumption of Household Non-Profit Institution (Lembaga Non Profit Rumah Tangga/LNPRT) increased from 9.10% in 2018 to 10.62%

Permintaan domestik juga didukung oleh investasi yang tetap tinggi, terutama investasi bangunan yang tumbuh 5,37%, tidak jauh berbeda dari kinerja 2018 sebesar 5,41%. Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi 2019 utamanya didorong oleh kinerja LU jasa-jasa di sektor tersier, terutama sektor komunikasi dan informasi, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa lainnya. Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap baik karena ditopang prospek peningkatan ekspor dan konsumsi rumah tangga.

Investasi diperkirakan juga meningkat didorong oleh pembangunan infrastruktur serta kenaikan keyakinan pelaku usaha sebagai dampak peningkatan ekspor dan kemudahan iklim berusaha. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata dan aliran masuk modal asing, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA).

ULASAN MAKRO INDUSTRI

Seperti dikutip dari Badan Pusat Statistik, Perekonomian Indonesia 2019 diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau US\$4.174,9. Sejalan dengan revolusi industri 4.0, tren digitalisasi memengaruhi sendi-sendi perekonomian dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional. Nilai ekonomi digital di Indonesia pada 2015 mencapai US\$8 miliar atau sekitar Rp120 triliun. Pada 2019, angka tersebut tumbuh lebih dari 4 kali lipat menjadi US\$40 miliar atau Rp560 triliun. Pada 2025 diprediksi nilai ekonomi digital di Indonesia akan tumbuh jauh lebih besar menjadi US\$133 miliar.

Selain nilai ekonomi, Indonesia juga memiliki rasio pertumbuhan ekonomi digital yang lebih cepat dibanding negara lainnya. Menurut laporan Google, Temasek dan Bain, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi digital sebesar 49% sejak 2015. Pertumbuhan tersebut lebih cepat dibanding Vietnam yang berada di posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 38%.

Dalam era perkembangan digitalisasi, Bank Indonesia menyatakan bahwa kelancaran sistem pembayaran tunai maupun nontunai selama 2019 tetap terjaga baik. Posisi Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) per Desember 2019 tumbuh 5,95% (yoy). Sementara itu, transaksi nontunai menggunakan ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit dan Uang Elektronik (UE) posisi Desember 2019 tumbuh 2,45% (yoy), didominasi oleh transaksi nontunai menggunakan Kartu ATM/Debit dengan pangsa 92,92%.

Domestic demand was supported by high investment, especially in building investment, which grew by 5.37%, similar to the performance in 2018 of 5.41%. In terms of the business sector, economic growth in 2019 was mostly supported by the tertiary service sectors, particularly communication and information, finance, insurance, and other sectors. Moving forward, the economic growth of Indonesia was expected to remain stable due to the growth outlook of export and household consumption.

Investment is also predicted to increase, driven by infrastructure development, and increased business confidence as a result of increased exports and the ease of the business climate. Bank Indonesia will continue to strengthen coordination with the Government and relevant authorities to maintain economic stability, boost domestic demand, and increase exports, tourism, and foreign capital inflows, including foreign investment (PMA).

MACRO INDUSTRY REVIEW

According to Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik/BPS), Indonesian economy in 2019, as measured by Gross Domestic Product (GDP) at current price, reached Rp15,833.9 trillion and a GDP per capita reached Rp59.1 million or US\$4,174.9. In line with the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0), digitalization has affected the economy and disrupted conventional functions. The value of Indonesia's digital economy in 2015 was US\$8 billion or Rp120 trillion, and has more than quadrupled in 2019 to US\$40 billion or Rp560 trillion. In 2025, the value of Indonesia's digital economy is predicted to grow exponentially to US\$133 billion.

In addition to its economic value, Indonesia's digital economy growth rate is also faster than those of other countries. According to Google, Temasek, and Bain, Indonesia's digital economy has grown 49% since 2015, a faster growth than in the runner-up country, Vietnam, at 38%.

In the digitalization era, according to Bank Indonesia, cash and non-cash payment operations in 2019 kept running smoothly. As of December 2019, Currency in Circulation has grown by 5.95% (yoy) whereas non-cash transaction (ATM, debit card, credit card, and electronic money) has grown by 2.45% (yoy), of which 92.92% was dominated by ATM/debit card transaction. Electronic money transaction has recorded a significant growth of 188.31% (yoy), which indicated an

Transaksi UE kembali mencatatkan pertumbuhan tinggi mencapai 188,31% (yoy) mengindikasikan preferensi masyarakat terhadap penggunaan uang digital yang terus menguat. Bagi Pemerintah, penguatan elektronifikasi transaksi pembayaran terus dilakukan melalui koordinasi lintas otoritas untuk mempercepat perluasan penyaluran bantuan sosial nontunai, memperluas dan mempercepat elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda) serta mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi.

KEBIJAKAN STRATEGIS 2019

Sepanjang 2019 iklim usaha nasional memang dipenuhi dengan berbagai tantangan. Namun hal itu tak menyurutkan kinerja usaha Peruri untuk senantiasa bergerak positif. Segenap manajemen berhasil menerapkan strategi dan inisiatif yang tepat sehingga Perusahaan berhasil membukukan pencapaian yang optimal. Manajemen telah merancang kebijakan strategis dalam mempertahankan pasar yang berlandaskan semangat yang tinggi agar dapat tumbuh dan berkembang bersama secara sehat dan berkesinambungan.

Tahun Buku 2019 juga menjadi babak baru bagi Peruri dalam memperluas segmen usahanya melalui berbagai inovasi layanan berbasis digital selaras dengan semangat Peruri yang enerjik, kokoh dan inovatif. Selain itu, pada 2019 juga merupakan fase metamorfosa Peruri dalam *me-leverage* kapabilitas dengan telah tersertifikasi sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dari Kementerian Kominfo RI. Peruri adalah satu-satunya BUMN yang mendapatkan sertifikasi ini.

Hal tersebut sekaligus menindaklanjuti terbitnya PP No. 6/2019 yang menyatakan bahwa Peruri sebagai institusi pencetak dokumen sekuriti negara dan sertifikat bernilai uang serta jasa bisnis digital. Peruri kini telah siap dengan beberapa lini produk berbasis teknologi digital terkini melalui Peruri Code, Peruri Sign dan Peruri Trust yang ketiganya dirangkum dalam satu layanan yaitu Peruri Digital Business Solution.

Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan daya saing dan melakukan ekspansi usaha yang berkelanjutan melalui penyediaan jasa layanan dan produk terbaik dengan mengoptimalkan pangsa pasar yang ada. Guna menunjang hal tersebut, Perusahaan

increase in people's preference toward digital money. Electronification of payment transaction continues to be strengthened by inter-authority coordination to expedite the distribution of non-cash assistance, expand and accelerate the electronification of Regional Government transactions, and support the implementation of payment electronification in the transportation sector.

STRATEGIC POLICIES IN 2019

Throughout 2019, the national business climate was met with various challenges. However, this did not stop Peruri's business performance from showing positive progress. The entire management successfully implemented correct strategies and initiatives, which resulted in optimal achievement by the Company. The management designed strategic policies to maintain a high-spirited market that could grow and develop together in a healthy and sustainable fashion.

The year of 2019 also marked a new chapter for Peruri in its business segment expansion through various digital service innovations, in line with Peruri's spirit to be energetic, sturdy, and innovative. This year also reflected Peruri's metamorphosis in revitalizing its brand image in order to enhance the image of the Company, which has been newly certified as Root Certification Authority (CA) from the Ministry of Communication and Information Technology. Peruri is the only SoE to obtain this certification. Previously, Peruri guaranteed authenticity of cash money and all documents in hard copy form.

This action was taken in response to the issuance of Government Regulation No. 6/2019, which stated Peruri as an institution that prints state security documents and valuable certifications, as well as runs digital business service. Peruri is ready with several ready-to-use products based on digital technology. Peruri has officially launched 3 (three) digital products called Peruri Code, Peruri Sign, and Peruri Trust under a single service of Peruri Digital Business Solution.

The Company is always committed to improve its business competitiveness, whether in form of services and products, or by optimizing the existing market share. This is how the Company actualizes its commitment in terms of sustainable business

telah siap dengan membangun *platform* digital yang terbaik. Segenap Insan Perusahaan senantiasa bersinergi untuk mencapai tujuan yang terbaik dan berkomitmen untuk terus membangun nilai usaha serta proses bisnis yang sehat dan transformasi digital berkelanjutan. Dengan semangat baru yang ditumbuhkan dalam tubuh Peruri, segenap elemen Perusahaan yakin bahwa Peruri akan terus melaju dalam rangka menuju ke arah masa depan yang lebih cerah.

TANTANGAN KENDALA DAN SOLUSI PENANGANANNYA

Peruri senantiasa menghadirkan kinerja yang optimal dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produksi serta bertransformasi bisnis menjadi perusahaan penjamin sekuriti berbasis digital. Hal tersebut diwujudkan melalui serangkaian kegiatan yang relevan yaitu riset, pengembangan di bidang teknologi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan bisnis digital menjadi salah satu fokus utama Peruri di 2019. Kendati demikian, dalam pengembangan *core business* Perusahaan, Peruri senantiasa menyiapkan lini produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik serta pasar internasional dengan kualitas terbaik.

Dalam menjalankan roda usaha tersebut, Peruri juga dihadapkan dengan berbagai kendala yang manajemen anggap sebagai tantangan menuju masa depan yang lebih baik. Adapun beberapa kendala atau tantangan utama yang diidentifikasi oleh manajemen di sepanjang 2019, yaitu Perusahaan belum memiliki 3 sub-fungsi Riset dan Pengembangan, yaitu *current product development*, *new product development* dan perencanaan teknologi. Kompetensi SDM dan teknologi bisnis sekuriti digital juga harus ditingkatkan. Sementara itu, ketergantungan pada bahan baku dari luar negeri juga masih cukup tinggi, seiring dengan ketergantungan tinggi pada bisnis cetak uang RI. Selain itu kendala yang terjadi yaitu, manajemen menilai bahwa Kinerja Anak Perusahaan belum optimal.

Sementara itu, jumlah transaksi elektronik yang terus meningkat akan menahan pertumbuhan permintaan terhadap uang. Tingginya tingkat adopsi teknologi digital dalam produk dokumen sekuriti non-uang menimbulkan risiko yang besar bagi perusahaan percetakan dokumen sekuriti konvensional atau berbasis kertas. Sedangkan pasar sekuriti digital merupakan pasar bebas dengan adanya kompetisi antar penyedia layanan sekuriti digital.

The Company has also prepared itself to enter the digitalization era by establishing the best kind of digital platform. All elements of the Company are always in synergy to achieve the best outcome, and are committed to continuously develop its business values, healthy business process, and sustainable digital transformation. With the new spirit that is being cultivated within Peruri, all elements of the Company are confident that Peruri will continue to progress toward a brighter future.

CHALLENGES AND SOLUTIONS

Peruri always endeavors to give an optimal performance to improve its production capacity and quality, and transform its business to a digitally based security guarantor company. This has been actualized through a series of relevant activities, namely, research, technological development, and Human Resources (HR) development. Digital business development was one of Peruri's main focuses in 2019. However, in developing the Company's core business, Peruri always prepares the best quality of production lines that can fulfill demand from both domestic and international markets.

In running this business, Peruri faced various issues deemed by the management as challenges in the journey to a better future. Several of the main issues or challenges identified by the management throughout 2019. The company does not yet have 3 sub-functions of Research and Development, namely current product development, new product development, and technology planning. HR competencies and digital security business technology must also be improved. Meanwhile, dependence on raw materials from abroad is still quite high, in line with the high dependence on the Indonesian money printing business. Management also considers that the performance of the subsidiaries is not optimal.

Meanwhile, the increasing number of electronic transactions will curb the growth in demand for money. The high level of digital technology adoption in non-currency security document products poses a big risk for conventional or paper-based security document printing companies. Meanwhile, the digital security market is a free market with competition between digital security service providers.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, manajemen telah merancang langkah strategis sebagai bentuk mitigasi terhadap kelangsungan usaha Peruri. Langkah strategis tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan strategis sebagai upaya solusi penanganan kendala, sebagai berikut:

1. Transformasi organisasi meliputi perencanaan tenaga kerja, restrukturisasi SDM, pembentukan Unit Tata Kelola Perusahaan, penambahan proses bisnis dan pengembangan indikator penilaian kinerja;
2. Restrukturisasi Anak Perusahaan, bertujuan untuk membentuk struktur Anak Perusahaan yang lebih fleksibel dan tidak tumpang tindih antara satu dan lainnya sehingga dapat menjalankan strategi Perusahaan secara efektif;
3. Peningkatan kapabilitas dan budaya Perusahaan, meliputi rekrutmen karyawan baru, pelatihan kepada karyawan dan aktualisasi budaya Perusahaan;
4. Pemberdayaan teknologi, meliputi pemberdayaan teknologi perangkat lunak dan pemberdayaan perangkat keras;
5. Optimalisasi Project Management Office (PMO), bertujuan untuk mengawasi implementasi inisiatif di seluruh bagian Peruri. Peningkatan kemampuan sumber daya yang memadai tentunya mendukung Perusahaan untuk mempertahankan bisnis utama dan mengakselerasi pengembangan bisnis baru.

KINERJA USAHA DAN PEMENUHAN TARGET RKAP

Sepanjang 2019 iklim usaha nasional memang dipenuhi dengan berbagai tantangan. Namun hal itu tak menyurutkan kinerja usaha Peruri yang senantiasa bergerak positif. Segenap manajemen berhasil menerapkan strategi dan inisiatif yang tepat sehingga Perusahaan berhasil membukukan pencapaian secara optimal dan berkelanjutan. Pada 2019, Peruri merencanakan perolehan dari beberapa komponen substansial sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Perusahaan.

Dari sisi posisi keuangan, realisasi jumlah aset lancar pada 2019 tercatat sebesar Rp2,62 triliun atau 140,60% dari target 2019 sebesar Rp1,87 triliun dan realisasi aset tidak lancar sebesar Rp3,44 triliun atau 86,00% dari target 2019 sebesar Rp4,00 triliun. Perusahaan memproyeksikan aset lancar pada 2020 akan mencapai Rp1,66 triliun dan aset tidak lancar pada 2020 akan mencapai Rp4,08 triliun.

Based on this identification, the management designed strategic plans to mitigate the risks for Peruri's business sustainability. These strategic plans are put into the following strategic policies to resolve issues and challenges:

1. Organizational transformation includes workforce planning, HR restructuring, the establishment of a Corporate Governance Unit, the addition of business processes, and development of performance appraisal indicators;
2. Subsidiary restructuring, aimed at forming a more flexible Subsidiary structure and not overlapping one another so that it can carry out the Company's strategy effectively;
3. Improving the capabilities and culture of the Company, including recruiting new employees, training employees, and actualizing the Company's culture;
4. Technology empowerment, including empowerment of software technology and empowerment of hardware;
5. Optimization of Project Management Office (PMO), which aims to oversee the implementation of initiatives in all parts of Peruri. Increasing the ability of adequate resources certainly supports the Company to maintain its main business and accelerate new business development..

BUSINESS PERFORMANCE AND RKAP TARGET FULFILLMENT

Throughout 2019, the national business climate was met with various challenges. However, this did not stop Peruri's business performance from showing positive progress. The entire management successfully implemented correct strategies and initiatives, which resulted in optimal achievement by the Company. In 2019, Peruri planned to generate gains from several substantial components as a benchmark to evaluate the Company's performance.

In terms of financial position, the realization of current assets in 2019 was recorded at Rp2.62 trillion, or 140.60% of the target in 2019 at Rp1.87 trillion. The realization of non-current assets was Rp3.44 trillion, or 86.00% of the target in 2019 at Rp4.00 trillion. The Company projected that current assets in 2020 would reach Rp1.66 trillion, while non-current assets in 2020 would reach Rp4.08 trillion.

Sementara itu, realisasi jumlah liabilitas jangka pendek pada 2019 tercatat sebesar Rp1,49 triliun atau 127,49% dari target 2019 sebesar Rp1,17 triliun dan realisasi liabilitas jangka panjang sebesar Rp1,51 triliun atau 75,75% dari target 2019 sebesar Rp1,99 triliun. Perusahaan memproyeksikan liabilitas jangka pendek pada 2020 akan mencapai Rp1,04 triliun dan liabilitas jangka panjang akan mencapai Rp1,49 triliun.

Dari sisi laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya, realisasi penjualan bersih Peruri pada 2019 mencapai 94,16% dari target. Belum tercapainya target penjualan bersih dikarenakan menurunnya penempatan pesanan terutama untuk produk uang dari pelanggan utama, dikarenakan pada awal 2018 masih mengerjakan *carry over* pesanan tahun sebelumnya, sehingga dapat diprediksi bahwa persediaan produk uang masih tersedia sampai dengan akhir 2019.

Sedangkan dari sisi arus kas, arus kas dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan pada 2019 masing-masing adalah Rp1,16 triliun, Rp375,61 miliar dan minus Rp443,51 miliar sehingga saldo akhir kas dan setara kas di 2019 sebesar Rp1,92 triliun atau mencapai 307,49% dari target Rp625,96 miliar. Perusahaan memproyeksikan saldo akhir kas dan setara kas pada 2020 sebesar Rp425,00 miliar.

Dapat kami sampaikan juga, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002 Tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan, maka tingkat kesehatan Peruri pada 2019 adalah "SEHAT" dengan klasifikasi "AAA" dengan skor 95,50, di atas target RKAP yaitu 91,00 atau meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian skor tahun sebelumnya sebesar 89,07.

ANALISA TENTANG PROSPEK USAHA TAHUN 2020

Pada saat penyelesaian penyusunan dokumen Laporan Tahunan ini, dunia sedang dilanda oleh kejadian luar biasa dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang muncul pada akhir 2019 di Wuhan, Tiongkok dan menyebar begitu cepat ke berbagai negara. Berbagai negara mengambil kebijakan untuk membatasi akses dalam rangka memutus penyebaran virus ini. Pada 31 Maret 2020 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan tujuan memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Meanwhile, realization of short term liabilities in 2019 was recorded at Rp1.49 trillion or 127.49% of target in 2019 of Rp1.17 trillion, while realization of long-term liabilities was Rp1.51 trillion or 75.75% of target in 2019 of Rp1.99 trillion. The Company projected short term liabilities in 2020 to reach Rp1.04 trillion while short term liabilities would reach Rp1.49 trillion.

In terms of profit/loss and other comprehensive income, the realization of Peruri's net sales in 2019 reached 94.16% of target. The underachievement was caused by declining customer orders, particularly for money products from main customers, as the Company still worked on carryover orders from the previous year, which means it could be predicted that the money product supply was still be available until the end of 2019.

In terms of cash flow, cash flow from operating, investing, and financing activities in 2019 were Rp1.16 trillion, Rp375.61 billion, and -Rp443.51 billion respectively, which means that final balance of cash and cash equivalents in 2019 was at Rp1.92 trillion or 307.49% of the target of Rp625.96 billion. The Company projected the final balance of cash and cash equivalents in 2020 to be Rp425.00 billion.

We can also convey that, according to the Decision Letter of Minister of SoE No.KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 on assessment of company health level, the health level of Peruri in 2019 was "HEALTHY" under the classification of "AAA" with a score of 95.50, above the RKAP target of 91.00, improving from 89.07 in the previous year.

ANALYSIS ON BUSINESS OUTLOOK IN 2020

At the time when this Annual Report was being prepared, the world was hit by an extraordinary event in form of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, which started at the end of 2019 in Wuhan, China, and quickly spread to various countries. Countries implemented policies to restrict access in order to cut off the spread of this virus. On March 31, 2020, the Indonesian Government issued Government Regulation Number 21 of 2020 on Large Scale Social Restriction (LSSR) for the Accelerated Management of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) to cut off the spread of COVID-19 in Indonesia.



Tingkat kesehatan Peruri Peruri Soundness Level

95,50

Tingkat kesehatan Peruri pada 2019 adalah "SEHAT" dengan klasifikasi "AAA" dengan skor 95,50, di atas target RKAP yaitu 91,00 atau meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian skor tahun sebelumnya sebesar 89,07.

Peruri soundness level in 2019 is "HEALTHY" with "AAA" classification scored 95.50, above RKAP target of 91.00 or increased compared to the last year score of 89.07.



Mencermati kondisi perekonomian Indonesia khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, menunjukkan bahwa harga-harga di pasar terkendali dan rendah. Pemantauan harga pada minggu kedua April 2020 menunjukkan inflasi akan berada di sekitar 0,20% (mtm) atau 2,80% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui TPI/TPID dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok;
2. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih rendah dari kemampuan kapasitas produksi nasional sehingga mengalami kesenjangan output yang negatif sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan terkendali;
3. Dampak dari nilai tukar Rupiah terhadap inflasi rendah;
4. Terjangkarnya ekspektasi inflasi baik di sisi konsumen dan produsen.

Niai tukar rupiah diharapkan cenderung menguat hingga akhir 2020 pada level Rp15.000 per dolar AS. Penguatan nilai tukar Rupiah didukung oleh langkah-langkah stabilisasi nilai tukar, komitmen kebijakan yang erat serta komunikasi yang intensif antara pemerintah, BI, OJK dan LPS. Harus diakui bahwa kebijakan PSBB dan penutupan akses oleh berbagai negara berdampak besar terhadap perekonomian dunia serta perekonomian nasional. Di luar itu semua,

In observing the impact of COVID-19 spread on the economic situation in Indonesia, based on Price Monitoring Survey (SPH) conducted by Bank Indonesia with 46 local Representative Offices of Bank Indonesia, market prices remain controlled and low. Price monitoring in the second week of April 2020 showed that inflation would remain at around 0.20% (mtm) or 2.80% (yoy). This was influenced by several following factors:

1. Coordination between central and local government through TPI/TPID in ensuring the fulfillment of principal needs;
2. Indonesia's economic growth level would be lower than the national production capacity, which would result in negative output and controlled inflation pressure from demand;
3. Low impact of rupiah exchange value against inflation;
4. Mild inflation expectation from both consumers and producers.

Rupiah exchange value is expected to strengthen toward Rp15,000 per USD by the end of 2020. The strengthening of Rupiah exchange value will be supported by measures to stabilize exchange value, strict policy commitments, and intensive communication between the government, BI, OJK, and LPS. It must be acknowledged that LSRR policies and closure of access by various countries greatly impact the global and national economy. Regardless,

komitmen seluruh insan Perusahaan agar senantiasa bahu-membahu bekerja sama untuk mematuhi himbauan yang dilakukan Pemerintah Indonesia, dengan harapan besar bahwa situasi yang sangat tidak menggembirakan ini dapat cepat berlalu.

Berkaca dari fenomena tersebut, segenap manajemen Peruri senantiasa melakukan mitigasi demi keberlanjutan usaha agar meraih hasil yang optimal. Perusahaan telah merancang kebijakan strategis terkait menjawab tantangan yang menanti di 2020. Pandemi COVID-19 tidak serta merta menyurutkan langkah Perusahaan untuk terus melaju menggapai hasil yang optimal.

Dampak era revolusi industri 4.0 adalah teknologi digital yang digunakan memungkinkan terjadinya interkoneksi antara *hardware* dengan *software*. 4.0, era yang dikenal dengan nama *disruptive technology*. Secara masif, hal ini tentu saja berpengaruh pada perilaku berbisnis dan kondisi ekonomi global, sehingga lahirlah ekonomi digital. Ekonomi digital adalah aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Di Asia Tenggara, ekonomi digital sedang berkembang pesat seiring dengan besarnya potensi pasar. Terdapat beberapa teknologi yang potensial menjadi unsur utama terhadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital, yaitu *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, *Augmented Reality*, *Cyber Security*, *Artificial Intelligence*, *Addictive Manufacturing*, *Integrated System* dan *Cloud Computing*.

Guna mempertahankan kelangsungan usaha, Peruri senantiasa berfokus dalam memperluas kompetensi dan memberi nilai tambah bagi pelanggan, seperti peningkatan kualitas pelayanan, mengadopsi perkembangan teknologi dan melakukan inovasi sesuai dengan permintaan pelanggan.

Pesatnya pengaruh tren digitalisasi terhadap produk inti Peruri, menuntut Perusahaan harus melakukan transformasi bisnis untuk mengembangkan dan melakukan ekspansi pasar ke produk-produk berbasis teknologi informasi/digital seperti *track & trace*, digital locker dan personalisasi. Membangun kemampuan daya saing Peruri maupun dengan memperbesar peran Anak Perusahaan, termasuk melakukan afiliasi dan akuisisi menjadi strategi yang perlu ditempuh agar bisa meraih peluang pasar secara optimal.

all elements in the Company are committed to always cooperate in complying with the recommendations from the Indonesian Government, with great hope that this extremely unfortunate circumstance will soon pass.

Based on this phenomenon, all elements of Peruri management always try to mitigate negative impacts for business sustainability to achieve optimal result. The Company has designed strategic policies to respond to challenges that await in 2020. The COVID-19 pandemic does not necessarily hinder the Company's progress to achieve optimal result.

The impact of the Industry 4.0 era is digital technology enabling interconnection between hardware and software. The Industry 4.0 era is also known as disruptive technology. This will obviously and massively impact business behavior and global economic condition and give rise to digital economy. Digital economy is an economic aspect based on utilization and empowerment of information technology and digital communication. In Southeast Asia, digital economy is rapidly growing in line with the huge market potential. There are some highly potential technologies that can be the main elements of the transformation of conventional into digital industry, namely *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, *Augmented Reality*, *Cyber Security*, *Artificial Intelligence*, *Addictive Manufacturing*, *Integrated System*, and *Cloud Computing*.

To maintain business continuity, Peruri continues to focus on expanding end-to-end process competencies including added value for customers, such as improving service quality, adopting technological developments, and making innovations according to customer demands.

The rapid influence of the digitalization trend on Peruri's core products requires the Company to carry out business transformation to develop and expand the market to information/digital technology-based products such as *track & trace*, digital locker, and personalization. Building Peruri's competitiveness and expanding the role of Subsidiaries, including making affiliations and acquisitions, are strategies that need to be taken to achieve optimal market opportunities.

Dengan melihat perkembangan dunia seiring revolusi industri 4.0, serta besarnya peluang bersaing dalam bisnis digital dengan semua modal kerja yang dimiliki, hal ini memungkinkan Peruri untuk mendorong bisnis pengamanan dokumen digital (*digital security*). Upaya transformasi Peruri menjadi perusahaan penjamin keaslian dengan menjadikan keamanan digital sebagai medium perusahaan untuk menjamin otentifikasi terus dilakukan sebagai upaya memberikan jaminan keaslian produk kepada masyarakat.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DI 2019

Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG secara sistematis dan konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan. Penerapan GCG pada Perusahaan diharapkan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas serta mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Praktik GCG terus dikembangkan Perusahaan sebagai komitmen untuk terus berinovasi dalam upaya penyempurnaan implementasi GCG di lingkup keorganisasian Perusahaan, dimana hal ini memberikan Perusahaan kepercayaan diri dalam menghadapi setiap tantangan ke depan dan menjadi entitas usaha dengan kompetensi yang kompetitif.

Perusahaan menempatkan kebijakan GCG sebagai pedoman bagi Manajemen dan seluruh insan Peruri dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasional di lingkungan kerja. Kebijakan GCG Perusahaan secara berkesinambungan memberikan standar terbaik dalam menjalin hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan guna menjaga pertumbuhan jangka panjang bagi Perusahaan. Komitmen penerapan GCG tersebut dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki, termasuk meningkatkan sistem dan prosedur bisnis dengan penerapan struktur tata kelola yang mendukung pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan.

Perusahaan mempraktikkan GCG berdasarkan 5 (lima) prinsip sesuai yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan.

In consideration of the global development and Industry 4.0, as well as the huge competitive opportunity in the digital business, Peruri is able to cultivate digital security business. Peruri's transformative efforts to be an authenticity guarantor company by providing digital security as a medium to guarantee authenticity can be carried out in response to the diminishing demand for cash money printing in the future.

DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN 2019

The Company realized that systematic and consistent implementation of GCG by the Company is necessary. Implementation of GCG by the Company is expected to encourage business growth, accountability, and long-term value for shareholders without overlooking other stakeholders. The Company will continue to improve its GCG practices as part of the commitment to continuously innovate in the effort to improve GCG implementation within the Company, which will give the Company the self-belief to face every future challenge and become a competitive and competent business entity.

The Company sets GCG policy as a guideline for the management and all elements of Peruri in running its business and operational activities within the work environment. The Company's GCG policy continuously provides the best standards in creating a harmonious relationship with stakeholders to maintain long-term growth of the Company. The commitment to implement GCG has been actualized through improvement of the Company's infrastructures, including the improvement of business system and procedures by implementing a governance structure that supports GCG implementation within the Company.

The Company practices GCG based on the 5 (five) principles set by the Governance Policy National Committee (Komite Nasional Kebijakan Governance/KNKG). These principles are transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, which are necessary to ensure the Company's long-term business sustainability while still considering the interest of stakeholders.

Peruri berkomitmen penuh untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di setiap tingkatan dan jenjang organisasi, guna menciptakan organisasi yang profesional, solid, baik dan kompetitif, serta dapat memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG telah berlandaskan pada nilai-nilai budaya Perusahaan.

Perusahaan memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar tata kelola yang terbaik. Pengukuran penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012. Hasil *Assessment* penerapan GCG di Perusahaan periode tahun ukur 2019 mencapai total skor 82.78 atau mencapai kualitas "Sangat Baik".

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi Direksi ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Per 31 Desember 2019, susunan komposisi Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dwina Septiani Wijaya	: Direktur Utama
Saiful Bahri	: Direktur Operasi
Winarsih Budiriani	: Direktur SDM dan Umum
Fajar Rizki	: Direktur Pengembangan Usaha
Nungki Indraty	: Direktur Keuangan

Kami mengapresiasi kebijakan Perusahaan yang telah percaya terhadap dedikasi Direksi dalam mengembangkan Peruri untuk lebih maju lagi. Direksi senantiasa berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk kepentingan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Peruri is fully committed to implement Good Corporate Governance (GCG) at every level of the organization to create a professional, solid, good, and competitive organization that can fulfill the demand of all stakeholders. This commitment to implement GCG principles is based on the Company's cultural values of integrity, professionalism, partnership, innovation, and top quality.

The Company is committed to always implementing the best standard of governance. GCG implementation within the Company is measured based on Copy of the Decision of Ministry Secretary of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance Implementation in SoE. The assessment and evaluation method uses 6 (six) aspects with scores as stated in the Copy of the Decision of Ministry Secretary of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012. The assessment on GCG implementation in the Company for the period of 2019 resulted in a total score of 82,78 or classified as "Very Good".

INFORMATION ON CHANGES IN COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS

The Composition of Directors was specifically designed to enable effective, correct, and quick decision-making as well as independent action. As of December 31, 2019, the composition of the Company's Directors are as follows:

Dwina Septiani Wijaya	: President Director
Saiful Bahri	: Operations Director
Winarsih Budiriani	: HR and General Affairs Director
Fajar Rizki	: Business Development Director
Nungki Indraty	: Finance Director

We appreciate the Company's policies that have placed trust in the Directors' dedication to develop Peruri. The Directors are always committed to carrying out this mandate by prioritizing the principles of Good Corporate Governance for the interest of shareholders and other stakeholders.

PENUTUP

Atas pencapaian yang ditorehkan di 2019, izinkan saya mewakili Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Pengawas Peruri. Direksi juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan pemegang saham serta kepada regulator, pelanggan, pemasok dan mitra usaha, atas kerjasama yang telah tercipta. Kepada seluruh Insan Perusahaan, Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras yang telah ditunjukkan. Semoga Peruri dapat terus berkembang dan tumbuh secara positif, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada segenap pemangku kepentingan khususnya untuk pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

CLOSING

For the achievements in 2019, on behalf of the Directors, allow me to express our respect and gratitude to the Supervisory Board of Peruri. The Directors would also like to express our gratitude for the support from shareholders as well to regulators, customers, suppliers and business partners, for their great cooperation. To all elements of the Company, the Directors convey our deepest appreciation for the hard work. Hopefully Peruri can continue to grow and develop, which in turn will provide added values to all stakeholders, especially in sustainable business growth.

Jakarta, September 2020



Dwina Septiani Wijaya

Direktur Utama
President Director

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Peruri 2019 telah dibuat secara lengkap dan bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DEWAN PENGAWAS

Board of Supervisory



Rizal Affandi Lukman

Ketua Dewan Pengawas

Chairman of The Board of Supervisory



Djoko Hendratto

Anggota Dewan Pengawas

Member of The Board of Supervisory



Sutanto

Anggota Dewan Pengawas

Member of The Board of Supervisory



Dwi Pranoto

Anggota Dewan Pengawas

Member of The Board of Supervisory



Muhammad Yusuf Ateh

Anggota Dewan Pengawas

Member of The Board of Supervisory

STATEMENT OF RESPONSIBILITY BY THE BOARD OF SUPERVISORY AND BOARD OF DIRECTORS

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Peruri 2019 Annual Report has been made comprehensively and we are accountable for the accuracy of the content of this Annual Report.

Hereby this statement is made truthfully.

DEWAN DIREKSI

Board of Directors



Dwina Septiani Wijaya

Direktur Utama
President Director



Saiful Bahri

Direktur Operasi
Director of Operation



Winarsih Budiriani

Direktur Keuangan
Director of Finance



Fajar Rizki

Direktur Pengembangan Usaha
Director of Business Development



Gandung Anggoro Murdani

Direktur SDM dan Umum
Director of Human Resources and General Affairs

03

PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

Peruri yang berpengalaman dalam bidang pengamanan dokumen sekuriti milik negara telah melakukan transformasi bisnis di bidang digital *business solutions* yang menjamin keaslian dan keamanan suatu produk demi masa depan yang lebih baik di Indonesia.

Peruri is experienced in securing state-owned security documents, has carried out a business transformation in the field of digital business solutions to ensure the authenticity and safety of a product for a better future in Indonesia.



PEOPLE
FORUMS

SALE



TELE
SUBS

TELE

INFORMASI UMUM TENTANG PERURI

GENERAL INFORMATION OF PERURI



▲ Nama Perusahaan

Company Name

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

▲ Nama Singkatan

Abbreviated Name

Peruri

▲ Status Badan Hukum

Legal Status

Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
Perusahaan Umum (Perum)
State Owned Enterprise (SOE),
General Company (Perum)



▲ Tanggal Pendirian

Date of Establishment

15 September 1971
September 15, 1971

▲ Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006, dan disempurnakan untuk terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2019.

Government Regulation Number 60 of 1971, subsequently amended by Government Regulation Number 25 of 1982, then amended by Government Regulation Number 34 of 2000, Government Regulation Number 32 of 2006, and refined for the last time through Government Regulation Number 06 of 2019.

▲ Bidang Usaha

Business Field

Pencetakan uang Rupiah, baik uang kertas maupun uang logam dan pencetakan dokumen sekuriti untuk negara serta jasa digital sekuriti.

Printing of Rupiah currency, both banknotes or coins and printing of security documents for the state, as well as digital security service.



▲ Modal Dasar

Authorized Capital

Rp363.573.454.896,-

▲ Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Total Issued and Fully Paid Capital

Rp363.573.454.896,-



▲ Kepemilikan

Ownership

Pemerintah Republik Indonesia 100%
Republic of Indonesia Government 100%

▲ Kelompok Usaha

Business Group

Entitas Anak:

Subsidiaries:

- PT Peruri Wira Timur (PWT)
- PT Peruri Digital Security (PDS)
- PT Kertas Padalarang (PTKP)
- PT Peruri Properti (Pepro)

Entitas Anak Tidak Langsung:

Indirect Subsidiaries:

- PT Cardsindo Tiga Perkasa

Perusahaan Afiliasi:

Affiliate:

- PT Sicpa Peruri Securink



▲ Alamat

Address


Kantor Pusat
Head Office
Jl. Palatehan Nomor 4, Blok K-V Kebayoran Baru, Jakarta, 12160, Indonesia.
Telepon: +62 21 7395000
Faksimili: +62 21 7221567

▲ Kawasan Produksi

Production Area

Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41363, Indonesia
Parung Mulya Village, Ciampel District, Karawang Regency, West Java, 41363, Indonesia

 Peruri Indonesia

 @peruri_indonesia

 @peruri.indonesia

 @PeruriID

 contact@peruri.co.id

 www.peruri.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERURI

PERURI BRIEF HISTORY



SEJARAH PENDIRIAN

Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) atau "Perum Peruri", yang selanjutnya disebut "Perusahaan" adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada 15 September 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971. Peruri merupakan BUMN hasil peleburan (*merger*) antara Perusahaan Negara (PN) Arta Yasa dengan PN Pertjetakan Kebayoran.

Sesuai dengan PP 60 Tahun 1971 Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan dan lapangan usaha Peruri adalah mencetak uang kertas dan yang uang logam untuk Bank Indonesia (BI) dan mencetak barang-barang cetakan, surat-surat berharga serta membuat barang-barang logam lainnya untuk pemerintah, BI, Lembaga-lembaga Negara dan umum. Selain itu, ditegaskan pula bahwa Peruri dapat menyelenggarakan usaha-usaha sampingan atas persetujuan Menteri Keuangan dengan berpedoman kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional.

Peruri merupakan satu-satunya BUMN yang mendapat kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan pencetakan uang Rupiah, baik uang kertas maupun uang logam, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011, tentang Mata Uang.

HISTORY OF ESTABLISHMENT

Public Company (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) or "Perum Peruri", hereinafter referred to as "Company" is a State Owned Company (SOE) which was established on September 15, 1971 based on Government Regulation Number 60 of 1971. Peruri is a SOE the result of the merger between the State Company (PN) Arta Yasa and PN Pertjetakan Kebayoran.

In accordance with PP 60 of 1971 Article 3, it is stated that the purpose and field of business of Peruri is to print banknotes and coins for Bank Indonesia (BI) and print printed goods, securities as well as make other metal goods for the government, BI, State and public institutions. Apart from that, it was also emphasized that Peruri could carry out side businesses with the approval of the Minister of Finance based on rational economic basics and principles.

Peruri is the only SOE that has the trust of the Government of the Republic of Indonesia to carry out the printing of Rupiah currency, both banknotes and coins, as mandated by Law Number 7 Year 2011 concerning Currency.



PERKEMBANGAN PERUSAHAAN

Di dalam perkembangannya, Pemerintah mengubah PP 60 Tahun 1971 menjadi PP Nomor 25 Tahun 1982, kemudian diubah kembali dengan PP Nomor 34 Tahun 2000, selanjutnya di ubah menjadi PP Nomor 32 Tahun 2006, dan perubahan terakhir melalui PP 06 Tahun 2019 dengan pengaturan penugasan seperti yang diatur di dalam Bagian Ketiga tentang Kegiatan dan Pengembangan Usaha Peruri, yaitu selain menyelenggarakan usaha mencetak uang RI untuk memenuhi permintaan BI, Peruri juga melaksanakan kegiatan mencetak dokumen sekuriti untuk negara, yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, meterai dan dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang berwenang.

Selain produk di atas, Peruri juga mencetak dokumen sekuriti lainnya dan barang cetakan logam non uang, mencetak uang dan dokumen sekuriti negara lain atas permintaan negara yang bersangkutan. PP terbaru nomor 06 Tahun 2019 juga mengatur bahwa Peruri dapat melakukan kegiatan usaha lainnya yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa digital sekuriti dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki (optimalisasi aset) sehingga hal ini dapat menjadi pengembangan bisnis bagi Peruri.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa untuk mendukung pembiayaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan, Peruri dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, membentuk anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam

DEVELOPMENT OF THE COMPANY

In its development, the Government changed PP 60 of 1971 to PP Number 25 of 1982, then amended again with PP Number 34 of 2000, then changed to PP Number 32 of 2006, and the last amendment through PP 06 of 2019 with assignment arrangements such as those is regulated in Part Three concerning Peruri Business Activities and Development, namely in addition to conducting businesses to print RI money to fulfill BI requests, Peruri also carries out activities to print security documents for the state, namely immigration documents, excise stamps, land stamps and documents at the request of the authorized agency.

Apart from the aforementioned products, Peruri also prints other security documents and Non-Currency Metalprinted goods, prints money and other country's security documents at the request of the country concerned. The latest PP number 06 of 2019 also regulates that Peruri can carry out other business activities aimed at public benefit in the form of providing digital security services and optimizing the utilization of potential resources owned (optimization of assets) so that this can become business development for Peruri.

The regulation states that in order to support financing in order to achieve the company's goals and objectives, Peruri can conduct business cooperation with other parties, both domestic and foreign, form subsidiary companies and make capital participation in other business entities. In line with PP 06 related to business



badan usaha lain. Sejalan dengan PP 06 tersebut terkait dengan pengembangan bisnis, Peruri telah memiliki 4 (empat) anak perusahaan masing-masing PT Kertas Padalarang (PTKP) dengan kepemilikan saham 93,23 persen dengan portofolio bisnis pada saat ini membuat kertas pita cukai dan jenis kertas sekuriti lainnya, PT Peruri Wira Timur (PWT) dengan kepemilikan saham 67 persen dengan bidang usaha pencetakan sekuriti non uang seperti ijazah, dokumen perizinan dan lainnya, PT Peruri Properti (PePro) dengan kepemilikan saham 99,50 persen dengan bidang usaha optimalisasi aset properti Peruri, PT Peruri Digital Security (PDS) dengan kepemilikan saham 99,78 persen dengan bidang usaha *security system, card management system, smart card* dan *personalization*.

Selain itu Peruri juga mempunyai 1 (satu) perusahaan afiliasi PT Sicpa-Peruri Securink (SPS) hasil kerjasama dengan Sicpa, SA (Swiss), kepemilikan saham 48 persen dengan bidang usaha produksi tinta sekuriti untuk uang kertas. PT Peruri Digital Security (PDS) sendiri telah memiliki 1 anak perusahaan yaitu PT Cardsindo Tiga Perkasa (CTP) dengan kepemilikan saham 55 persen yang bergerak di bidang usaha produksi *smart card* seperti *contactless, RFID cards, contact smart cards, PVC cards* dan produk lainnya.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Sejarah Pendirian, Peruri tidak pernah melakukan perubahan nama maupun perubahan status badan hukum sejak pertama kali berdiri pada tanggal 15 September 1971, hingga saat ini.

development, Peruri already has 4 (four) subsidiaries each PT Kertas Padalarang (PTKP) with 93.23 percent ownership with a business portfolio currently making excise tape paper and other types of security paper, PT Peruri Wira Timur (PWT) with 67 percent ownership with non-currency security printing business sectors such as diplomas, permit documents and others, PT Peruri Properti (PePro) with 99.50 percent ownership with the business sector to optimize Peruri's property assets, PT Peruri Digital Security (PDS) with 99.78 percent ownership with business sectors to support national payment gateways (NPG), card management systems, smart cards and personalization.

In addition, Peruri also has 1 (one) affiliated company PT Sicpa-Peruri Securink (SPS) in collaboration with Sicpa, SA (Switzerland), with 48 percent ownership in the business sector of producing security ink for banknotes. PT Peruri Digital Security (PDS) itself has 1 subsidiary, namely PT Cardsindo Tiga Perkasa (CTP) with 55 percent ownership which is engaged in the business of producing smart cards such as contactless, RFID cards, contact smart cards, PVC cards and other products.

NAME CHANGE INFORMATION

As described in the History of Establishment, Peruri has never changed its name or changed its legal status since it was first established on 15 September 1971, until now.

BIDANG USAHA, PRODUK DAN JASA, WILAYAH OPERASI SERTA PASAR YANG DILAYANI

BUSINESS FIELDS, PRODUCT AND SERVICES, OPERATING AREA AND MARKET SERVED



“Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2019, Bab III Pasal 10 ayat 1, maksud dan tujuan dari kegiatan Peruri ialah untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan pencetakan Mata Uang Rupiah, pembuatan dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan, berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.”

"Based on Government Regulation (PP) Number 06 of 2019, Chapter III Article 10 paragraph 1, the aims and objectives of Peruri's activities are to participate in implementing and supporting Government policies and programs in the economic sector and national development by organizing businesses aimed at public benefit in the form of the provision of goods and/or services related to the printing of Rupiah Currency, the creation of state documents that have security features and the optimization of the utilization of Company resources, based on the principles of good corporate management."

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PP NOMOR 06 TAHUN 2019 DAN KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang telah disampaikan di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dengan penjabaran sebagai berikut:

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 06 YEAR 2019 AND BUSINESS ACTIVITIES EXECUTED

In order to achieve the aims and objectives as stated above, the Company carries out business activities with the following descriptions:

Kegiatan Usaha Berdasarkan PP Nomor 06 Tahun 2019 Business Activities Based on PP Number 06 of 2019

Mencetak Mata Uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan Bank Indonesia:
Printing Rupiah Currency to meet the needs as requested by Bank Indonesia:

Membuat dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Dokumen Keimigrasian dan Benda Meterai guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan instansi yang berwenang
Making state documents that have security features in the form of Immigration Documents and Stamp Objects to meet the needs according to the request of the authorized agency

Membuat dokumen lain untuk negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Pita Cukai dan Dokumen Pertanahan
Create other documents for countries that have security features in the form of Excise Ribbons and Land Documents

Membuat dokumen lainnya untuk negara yang memiliki fitur sekuriti dan barang cetakan logam non-uang
Create other documents for countries that have security features and non-currency metal printed articles

Mencetak mata uang dan membuat dokumen negara lain yang memiliki fitur sekuriti atas permintaan negara yang bersangkutan, sepanjang telah terpenuhinya pencetakan Mata Uang Rupiah
Printing currency and making documents from other countries that have security features at the request of the country concerned, as long as the printing of the Rupiah currency has been fulfilled

Menyediakan jasa yang mempunyai fitur sekuriti yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan
Providing services that have security features related to the purposes and objectives and business activities of the Company

Pabrikasi kertas uang, kertas sekuriti, dan tinta sekuriti
Manufacturing of banknotes, security paper, and security inks

Jasa digital sekuriti
Digital security services

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang sudah dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

In addition to the main business activities as referred to above, as long as they financially support the main business activities, the Company can carry out business activities in order to optimize the utilization of the potential resources already owned and/or controlled by the Company as stipulated by the Minister.



PRODUK DAN JASA

Produk dan jasa bisnis utama (*core business*) yang dikeluarkan oleh Peruri adalah:

Uang Kertas & Logam

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 tahun 2019, Peruri memiliki tugas utama untuk mencetak uang Republik Indonesia sesuai pesanan dari Bank Indonesia. Dalam pencetakan uang kertas, Peruri menerapkan Standar Operasional Prosedur yang berpengaman tinggi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan proses cetak uang, mulai dari proses desain uang, penyediaan kertas, tinta maupun proses cetaknya hingga akhirnya menjadi uang Rupiah siap edar yang memiliki beberapa fitur pengaman.

Logam Non-Uang

Tingkat sekuriti yang melekat pada pencetakan produk logam non uang berbeda dengan produk Peruri lainnya yang memiliki banyak fitur. Aspek sekuriti pencetakan pada produk logam non-uang pada prinsipnya lebih banyak ditentukan oleh kualitas bahan, kerumitan desain dan ketajaman pencetakan. Peruri memiliki beberapa hasil produk logam non uang, yaitu: *commemorative coin*, medali, lencana, plakat, penghargaan masa bakti dan logam emas.

PRODUCT AND SERVICES

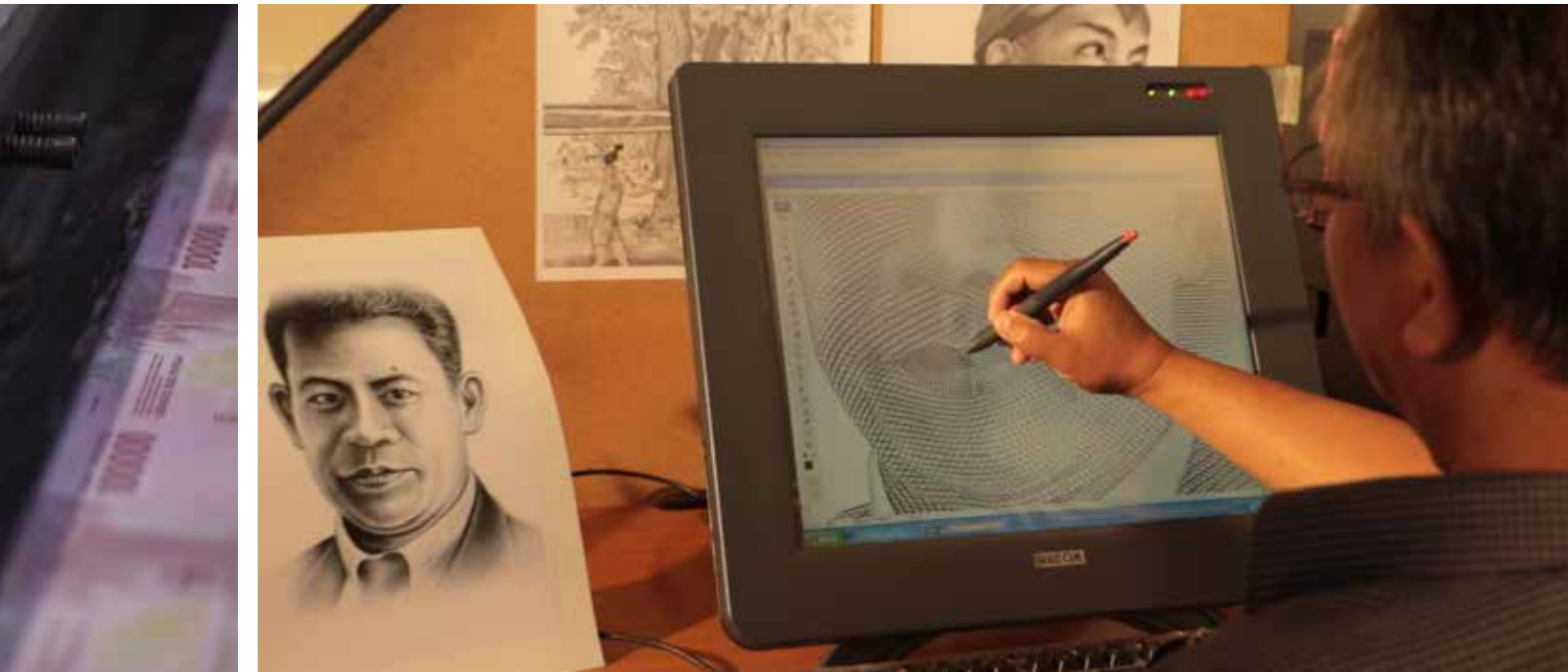
The main business products and services (*core business*) issued by Peruri are:

Banknotes & Coins

Based on Government Regulation (PP) Number 06 of 2019, Peruri has the main task of printing Republic of Indonesia money according to orders from Bank Indonesia. In the printing of banknotes, Peruri applies a highly secure Standard Operating Procedure to ensure the security and confidentiality of the money printing process, starting from the design process for the money, the supply of paper, ink and the printing process until finally becoming ready for circulation Rupiah currency which has several safety features.

Non-Currency Metals

The level of security inherent in the printing of non-currency metal products is different from other Peruri products which have many features. The security aspects of printing on Non-Currency Metal products are mainly determined by the quality of the material, the complexity of the design and the sharpness of the printing. Peruri has several Non-Currency Metal products, namely: *commemorative coin*, medals, badges, plaques, service awards and gold metal.



Kertas Berharga Non-Uang

Peruri juga diberikan amanat oleh pemerintah untuk mencetak dokumen sekuriti negara seperti dokumen keimigrasian, pita cukai, meterai dan dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang berwenang. Mengingat produk-produk tersebut merupakan dokumen yang menjadi kebutuhan masyarakat luas dan sangat berkaitan dengan masalah keamanan negara, maka Peruri selalu berinovasi untuk mengembangkan teknologi pengamanan dokumen untuk memberikan kenyamanan bagi pemesannya.

Produk Digital Business Solutions

Dalam era globalisasi, teknologi informasi telah menjadi bagian dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan kebutuhan akan suatu sistem pengelolaan informasi yang transparan, *real time* dan memiliki fitur sekuriti tinggi untuk melindungi suatu produk dari pemalsuan. Guna mengantisipasi kompetisi bisnis yang semakin kompetitif di bidang digital sekuriti, Peruri yang berpengalaman dalam bidang pengamanan dokumen sekuriti milik negara telah melakukan transformasi bisnis di bidang *digital business solutions* yang menjamin keaslian dan keamanan suatu produk demi masa depan yang lebih baik di Indonesia.

Daftar Produk Digital Security:

1. Peruri Code;
2. Peruri Sign;
3. Peruri Trust.

Non-Currency Securities

Peruri is also given the mandate by the government to print state security documents such as immigration documents, excise stamps, land seals and documents at the request of the competent authority. Considering that these products are documents that are of necessity to the wider community and are closely related to national security issues, Peruri always innovates to develop document security technology to provide convenience for the customers.

Digital Business Solutions Product

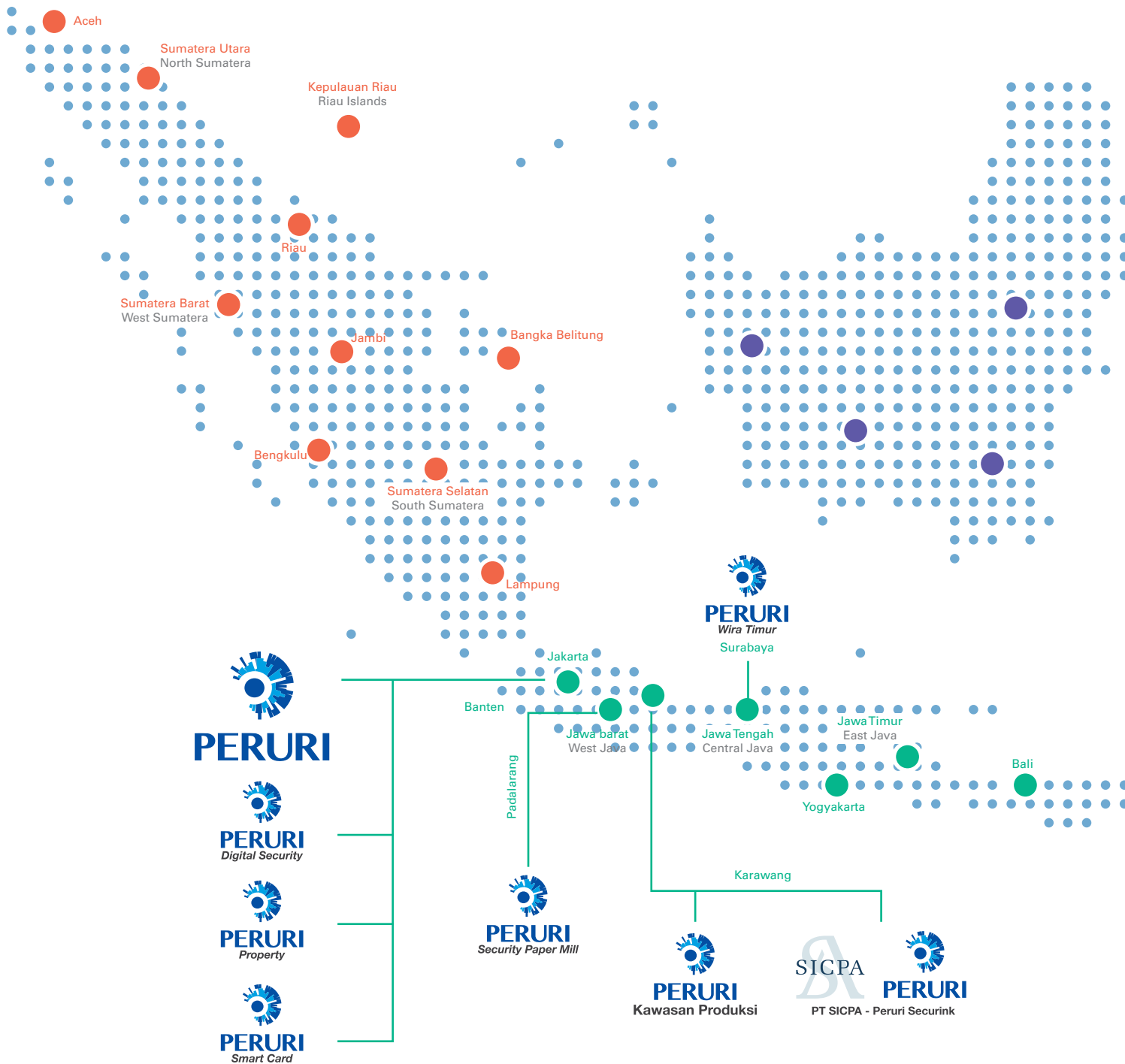
In the era of globalization, information technology has become a part of every aspect of people's lives. This raises the need for an information management system that is transparent, real time and has high security features to protect a product from counterfeiting. In order to anticipate increasingly competitive business competition in the digital security sector, Peruri, who is experienced in the field of securing state-owned security documents, has carried out a business transformation in the digital business solutions platform that ensures the authenticity and security of a product for a better future in Indonesia.

Digital Security Product List:

1. Peruri Code;
2. Peruri Sign;
3. Peruri Trust.

WILAYAH KERJA DAN PETA OPERASIONAL

AREAS OF WORK AND OPERATIONAL MAP





PT Kertas Padalarang
JL. Cihaliwung No. 81 Padalarang
40553, Bandung Barat - Jawa Barat,
Indonesia



PT Peruri Properti (Pepro)
Jl. Sunan Kalijaga No.15
Jakarta Selatan 12160



PT Peruri Digital Security
Jl. Sunan Kalijaga No.11
Jakarta Selatan 12160



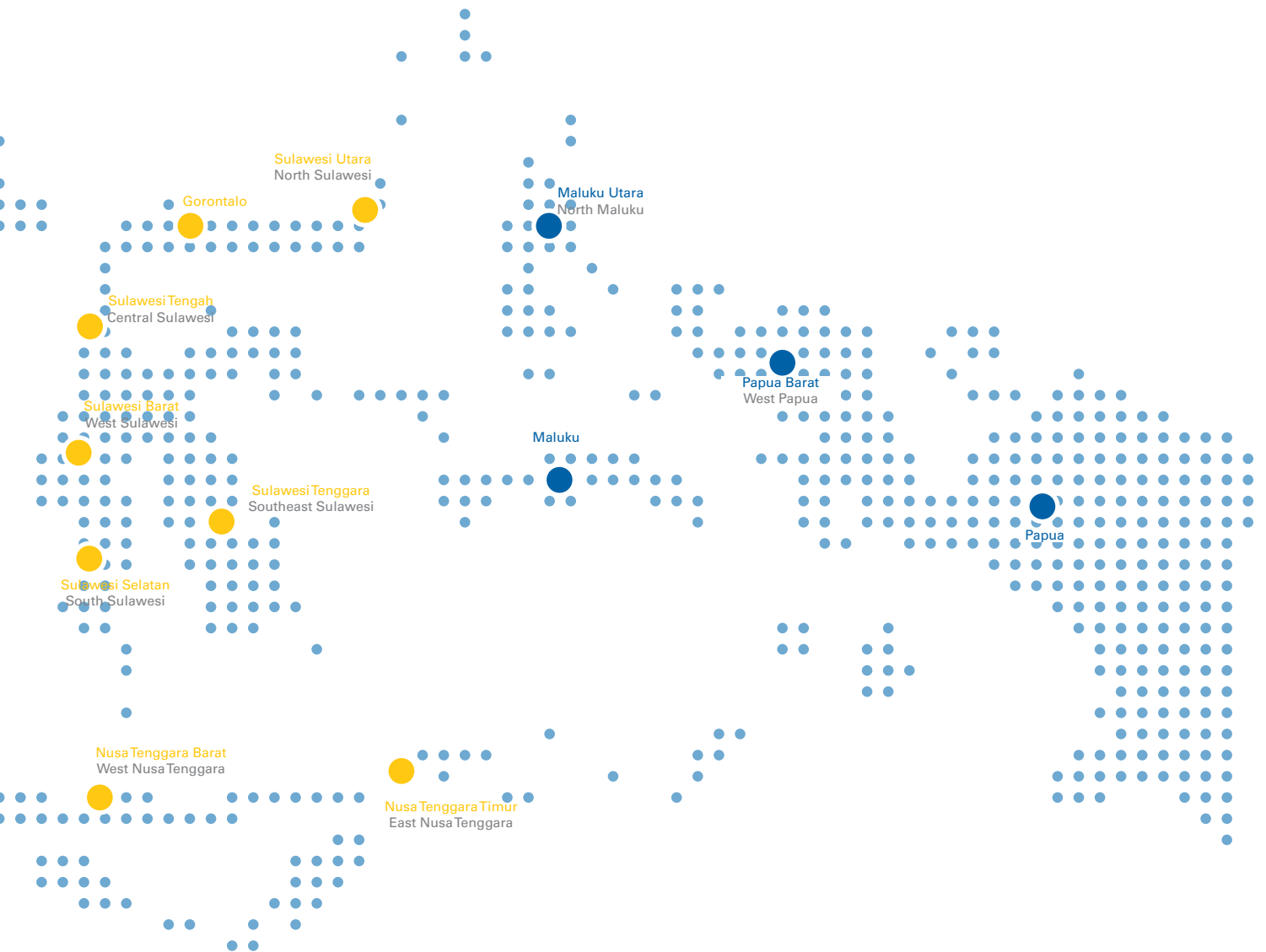
PT Cardsindo Tiga Perkasa
Kawasan Industri Mekar Jaya
Jl. Mekar Jaya 121, Mauk Km. 7,
Tangerang, Indonesia



PT Peruri Wira Timur
Jl. Ahmad Yani No.119
Surabaya 60237



PT Sicpa Peruri Securink
Jl. Tarum Barat, Kawasan Peruri
Ds. Parungmulya, Ciampel
Karawang Barat, 41361, Indonesia



VISI, MISI DAN FILOSOFI, TATA NILAI DAN MOTO PERUSAHAAN

COMPANY'S VISION, MISSION, CORE VALUES, AND MOTTO

VISI VISION

“Menjadi perusahaan berkelas dunia di bidang *integrated security printing and system.*”

“To become a world class company in integrated security printing and system.”



PERSETUJUAN MANAJEMEN KUNCI ATAS VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Visi Misi Perusahaan disahkan berdasarkan Surat Keputusan No. SKEP-234/IV/2008 tanggal 16 April 2008 tentang Pencanangan Visi, Misi dan Tata Nilai Perum Peruri.

KAJIAN PERIODIK VISI DAN MISI PERUSAHAAN OLEH MANAJEMEN KUNCI

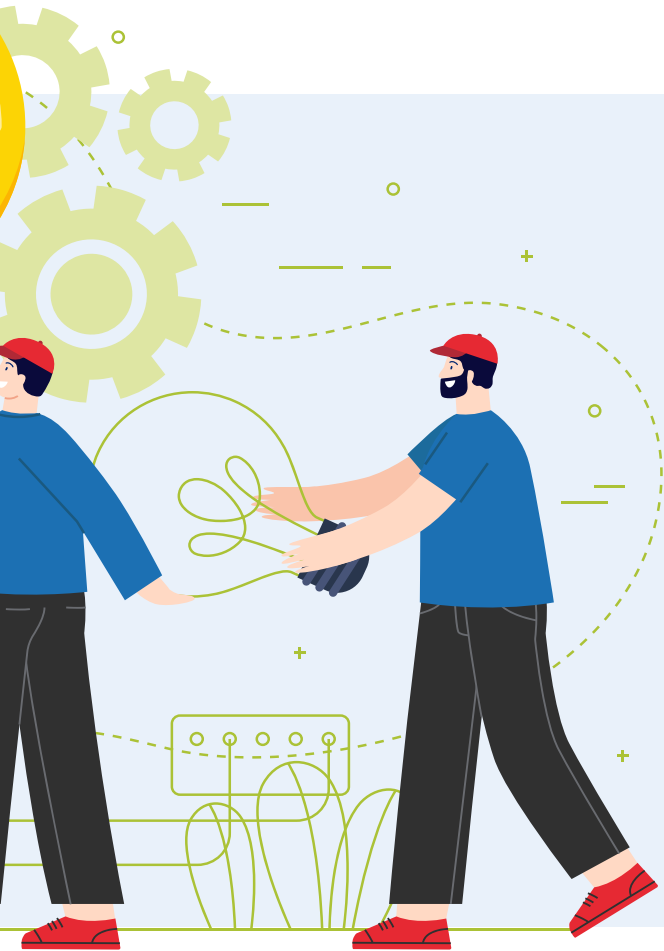
Dewan Pengawas dan Direksi telah melakukan kajian atas visi dan misi Perusahaan, baik dalam periodik jangka pendek Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019 maupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2017-2021.

KEY MANAGEMENT APPROVAL OF THE COMPANY'S VISION AND MISSION

The Company vision and mission has been ratified based on Decree No. SKEP-234/IV/2008 dated April 16, 2008 concerning of the Declaration of Perum Peruri Vision, Mission, and Core Value.

PERIODIC REVIEW OF THE COMPANY VISION AND MISSION BY KEY MANAGEMENT

Supervisory Board and the Board of Directors has examined the Company vision and mission, both in short-term periodic of the Company Work Plan and Budget (RKAP) 2019, or the Company Long-term Plan (RJPP) of 2017 - 2021.



MISI MISSION

“Menghasilkan produk berkualitas dan bernilai security tinggi kebanggaan bangsa.”

“Creating high quality security products and to be the pride of the nation.”

FILOSOFI, TATA NILAI DAN MOTO PERUSAHAAN

Insan Peruri harus memiliki Spirit untuk "Menjadi yang Terbaik". Menjadi yang terbaik adalah lebih kepada dorongan hati (*heart*), dorongan jiwa dan dorongan semangat untuk selalu berprestasi dan memberikan kontribusi maksimal kepada perusahaan. Spirit merupakan *soft aspect* dari sebuah organisasi yang tujuannya untuk membentuk karakter. Oleh karena itu spirit berkaitan dengan motivasi tinggi yang terbentuk dari keyakinan dasar (*basic belief*), nilai-nilai inti (*core values*) dan perilaku yang utama. Di dalam konteks kepemimpinan, spirit lebih fokus kepada *managing people* yaitu bagaimana memimpin dan berinteraksi dengan setiap orang.

COMPANY PHILOSOPHY, VALUES AND MOTTO

Individuals in Peruri must have the Spirit to "Be the Best". Being the best is more of an impulse (*heart*), an impulse of soul and a drive of enthusiasm to always achieve and give maximum contribution to the company. Spirit is the soft aspect of an organization whose goal is to shape character. Therefore spirit is related to high motivation which is formed from basic beliefs, core values and main behavior. In the context of leadership, spirit is more focused on managing people, namely how to lead and interact with everyone.

Seluruh pimpinan di Peruri perlu memiliki Strategi yang tepat berdasarkan kepada "Imaginasi - Fokus - Aksi" (IFA) untuk membawa perusahaan ini terbang tinggi. Di dalam menetapkan strategi, kita dituntut untuk mempunyai kemampuan membuat perencanaan jauh ke depan (*imagine*) yang bentuknya berupa Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tetapi harus fokus kepada "Empat Pilar Bisnis dan Lima Inisiatif Strategi" agar aksi dalam bentuk RKAP bisa kita laksanakan sesuai panduan yang benar dan akurat.

Spirit yang bergelora dan strategi yang akurat akan sukses jika dilandasi oleh filosofi kerja yang sudah melekat di seluruh jiwa insan Peruri, yaitu "Totalitas dalam Bekerja dengan Antusias yang Tinggi". Berdasarkan referensi dari berbagai sumber, pengertian filosofi adalah anggapan, pandangan hidup, sikap batin paling umum yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang/masyarakat. Di dalam kaitan itu, totalitas dan antusias sudah merupakan pandangan umum dan sikap batin insan Peruri karena sudah melekat di dalam hati dan pikiran kita, artinya semua itu telah menjadi panduan perilaku yang timbul dari kesadaran diri sendiri.

Filosofi kerja secara totalitas dan antusias perlu didukung oleh "Tata Nilai AKHLAK", yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Guna mendukung implementasi Tata Nilai maka diperlukan "Moto" yang mudah diingat, gampang dilaksanakan dan menjadi pelengkap dari karakter insan Peruri, yaitu "Cergas - Cepat - Cermat - Cerdas - Ceria". Kita sebut saja supaya mudah, bahwa Moto Peruri adalah "5C". Berikut disampaikan makna dari 5 C tersebut sebagai berikut:

1. Cergas itu tangkas dan giat, gesit dan cekatan. Seseorang akan mudah dilihat dan dipahami tingkah lakunya karena ia bekerja dengan tangkas, giat, gesit dan cekatan sehingga menjadi tumpuan organisasi di tempatnya bekerja. Karakter orang seperti ini akan mudah dikenali karena ia selalu bekerja dengan semangat yang menyala-nyala;
2. Cepat itu lekas, segera atau dalam waktu singkat. Cepat di dalam pengertian cara kerja Peruri adalah bertindak segera di dalam setiap menyelesaikan pekerjaan maupun melakukan eksekusi pada waktu singkat untuk mencapai tujuan perusahaan;

All leaders at Peruri need to have the right Strategy based on "Imagination - Focus - Action" (IFA) to take this company high. In establishing a strategy, we are required to have the ability to plan far ahead (*imagine*) in the form of a Company Long-term Plan (RJPP) but must focus on "Four Business Pillars and Five Strategic Initiatives" so that actions in the form of RKAP can be carried out accordingly. correct and accurate guide.

A passionate spirit and accurate strategy will be successful if it is based on the work philosophy inherent in Peruri's soul, namely "The totality of working with high enthusiasm". Based on references from various sources, the notion of philosophy is the assumption, view of life, the most common mental attitude that a person or group of people/society has. In that connection, totality and enthusiasm are the general views and attitudes of Peruri humans because they are embedded in our hearts and minds, meaning that they have become a guide for behavior arising from self-awareness.

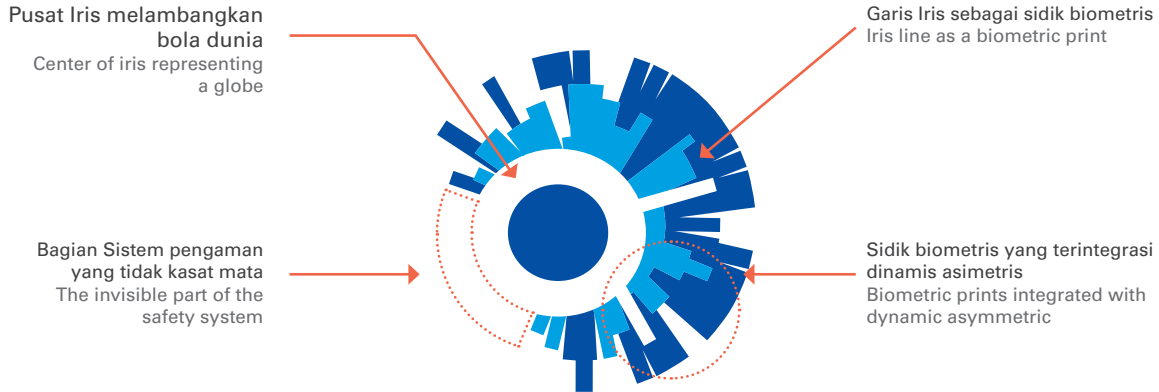
A work philosophy of totality and enthusiasm needs to be supported by the "AKHLAK values", namely Integrity, Security, Teamwork, Innovation and Quality. In order to support the implementation of Values, a "motto" that is easy to remember, easy to implement and complements the character of Peruri's humans being is needed, namely "Cergas - Cepat - Cermat - Cerdas - Ceria". Let's just call it easy, that Peruri's motto is "5C". Following is the meaning of the 5 C's as follows:

1. Cergas is agile and enterprising, skillful and nimble. A person's behavior will be easily seen and understood because he works agile, active, skillful, and nimble so that it becomes the foundation of the organization where he works. The character of a person like this will be easily recognized because he always works with a passionate passion;
2. Cepat, is fast, immediate or in a short time. Fast in terms of Peruri's way of working is to act immediately in completing work or executing it at short notice to achieve company goals;

3. Cermat itu teliti, hati-hati, penuh minat, sungguh-sungguh, seksama.
Peruri sebagai perusahaan yang bergerak di bisnis security printing, tentunya sangat mengharapkan SDM yang bekerja dengan cermat karena secara filosofi kerja, perusahaan ini harus dikelola dengan tingkat pengamanan (*security*) yang tinggi. Tingkat pengamanan yang tinggi itu dapat diperoleh secara self censor dari semua karyawan Peruri karena itu sudah merupakan bagian penting dari sisi hidupnya;
 4. Cerdas itu sempurna perkembangan akal budinya untuk berfikir, mengerti dengan memiliki pemikiran yang tajam.
Cerdas di sini mempunyai lingkup cerdas secara emosional, cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual. Dalam konteks ini maka integritas, inovasi dan kualitas sebagai filosofi dari Peruri terangkum di dalamnya. Oleh karena itu insan Peruri yang cerdas adalah insan Peruri yang bertanggung jawab dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 5. Ceria itu bersih, suci, murni, berseri-seri, bersinar, cerah.
Hanya orang-orang ceria yang mampu bekerja secara antusias dan mempunyai team work yang solid. Ingat, kita bekerja di lingkungan Obyek Vital Nasional sehingga filosofi antusias dan soliditas mempunyai makna yang sangat penting. Oleh karena itu marilah kita bekerja dengan ceria seraya mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita.
3. Cermat is thorough, aware, full of interest, earnest, careful.
Peruri as a company engaged in the security printing business, of course, really expects human resources to work carefully because in a philosophy of work, this company must be managed with a high level of security. This high level of security can be obtained by self-censorship of all Peruri employees because it is an important part of their life;
 4. Cerdas is perfect for the development of one's mind to think, understand by having sharp thoughts.
Intelligent here has the scope of being emotionally intelligent, intellectually intelligent and spiritually intelligent. In this context, integrity, innovation and quality as the philosophy of Peruri are summarized in it. Therefore an intelligent Peruri person is a Peruri person who is responsible and devoted to God Almighty;
 5. Ceria is clean, chaste, pure, radiant, shining, bright.
Only cheerful people are able to work enthusiastically and have a solid team work. Remember, we work within the National Vital Objects environment so the philosophy of enthusiasm and solidity has a very important meaning. Therefore, let us work cheerfully while being grateful for the blessings that God has given us.

MAKNA LOGO PERUSAHAAN

THE MEANING OF THE COMPANY LOGO



PERURI

Pengertian/makna dari logo Peruri sebagai berikut:

The meaning of the Peruri logo are as follows:

1.	Logo Peruri merupakan cerminan dari <i>brand essence</i> Peruri yakni <i>smart security</i> disimbolkan melalui perwujudan ikon grafis dari saraf-saraf penglihatan iris mata.	The Peruri logo is a reflection of the brand essence of Peruri, namely smart security, symbolized through the embodiment of a graphic icon of the visual nerves of the iris.
2.	Iris mata atau selaput pelangi mata yang memiliki garis-garis halus merupakan salah satu biometrik manusia, yaitu setiap orang memiliki garis-garis yang berbeda antara satu dan lainnya. Biometrik iris saat ini digunakan dalam <i>digital security</i> sebagai pengaman yang sangat tinggi. Logo Peruri mengambil filosofi iris mata ini sebagai dasar <i>smart security</i> .	The iris that has fine lines is a human biometric, where everyone has different lines from one another. Iris biometrics is currently used in digital security as a very high security. The Peruri logo takes this iris philosophy as the basis for smart security.
3.	Penggunaan simbol mata juga melambangkan jendela kecerdasan manusia, sementara pusat iris menggarisbawahi visi Peruri sebagai Perusahaan kelas dunia.	The use of the eye symbol also symbolizes the window to human intelligence, while the center of the iris underlines Peruri's vision as a world-class Company.
4.	Penyusunan grafis yang asimetris ingin mewujudkan kesan dinamisme usaha maupun dinamisme pelaku usaha Peruri dalam menjawab tantangan di depan mata.	The asymmetrical graphic arrangement aims to create the impression of business dynamism and dynamism of Peruri's business actors in responding to the challenges in front of their eyes.
5.	Iris Peruri yang tidak penuh melingkar menandakan bahwa tidak semua sistem pengamanan harus kasat mata, kecerdasan terletak pada sistem pengamanan yang tidak terlihat mata.	Peruri irises that are not fully circular indicates that not all security systems have to be visible, intelligence lies in a security system that is not visible to the eye.
6.	Warna logo biru menggambarkan teknologi dan kecerdasan. Objek dengan tonalitas warna biru dapat pula mencerminkan ketentraman, kepercayaan serta keyakinan.	The blue logo color represents technology and intelligence. Objects with a tonality of blue can also reflect tranquility, trust and confidence.
7.	Warna putih sebagai tonalitas netral dan bisa menyatukan beberapa karakter, selain itu dekat dengan karakter jujur, kebersihan dan kebaikan.	White is a neutral tonality and can unite several characters, besides it is close to honesty, cleanliness and kindness.
8.	Warna tonalitas abu-abu sering dikaitkan dengan keamanan, kualitas dan profesionalisme serta keseriusan dalam melakukan sesuatu.	The tonality gray color is often associated with safety, quality and professionalism as well as seriousness in doing something.



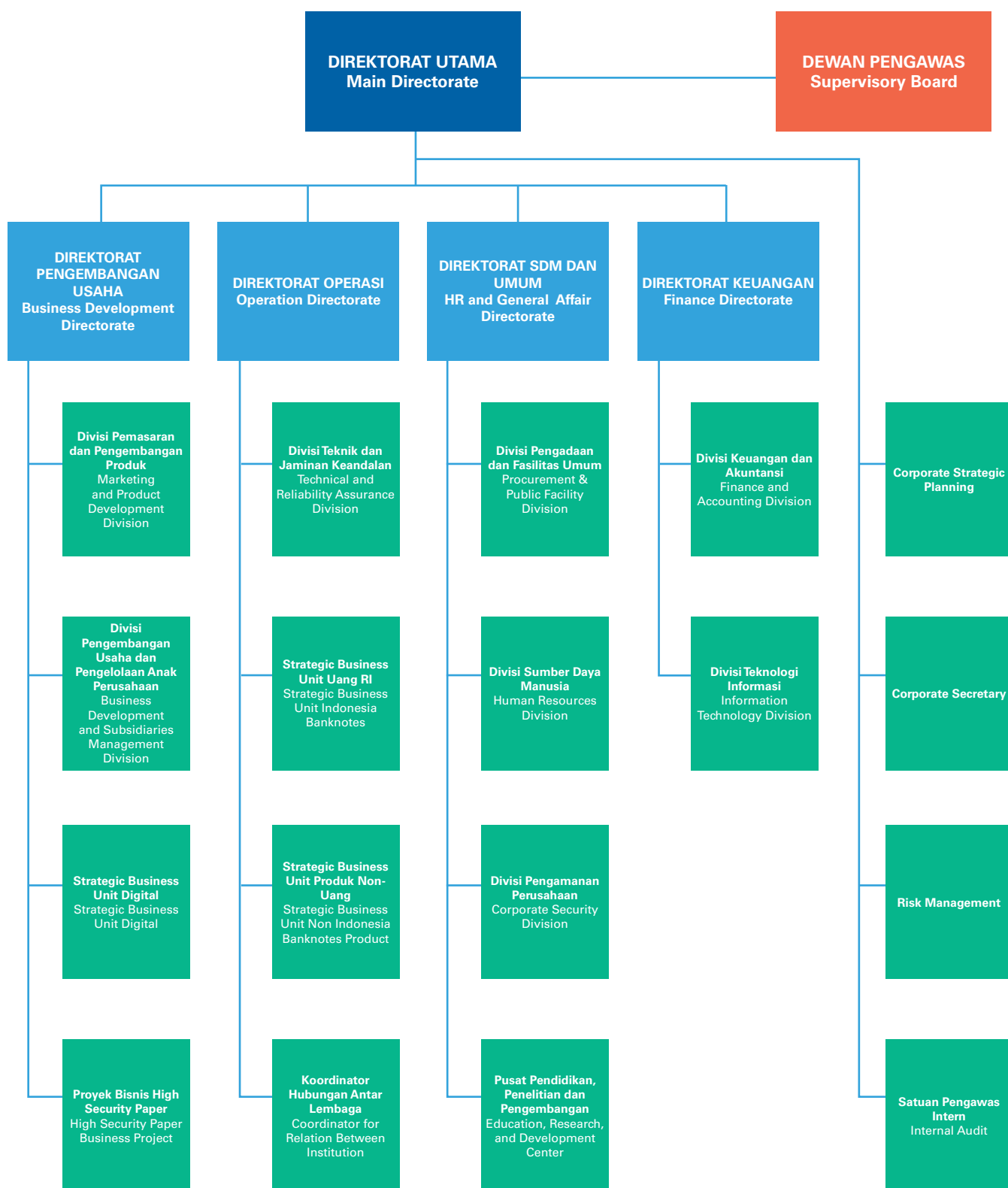

PERURI

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi Peruri per 31 Desember 2019 telah disahkan melalui Keputusan Direksi No. KEP-10/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Struktur Organisasi Perum Percetakan Uang RI.

Peruri Organizational Structure as of December 31, 2019 has been ratified through the Board of Directors Decree No. KEP-10/XI/2019 dated November 19, 2019 concerning Perum Percetakan Uang RI Organizational Structure.



PROFIL DEWAN PENGAWAS

BOARD OF SUPERVISORY PROFILE



Dr. Rizal Affandi Lukman
Ketua Dewan Pengawas/
Chairman of The Board of Supervisory
Periode Jabatan: 2017-2022
Serving Period: 2017-2022

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 58 tahun per 31 Desember 2019
Kelahiran Bandung, 12 Juli 1961

Riwayat Penunjukan

Dr. Rizal Affandi Lukman diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-124/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Uang Republik Indonesia.

Jabatan di Institusi Lainnya

Deputy Minister for International Economic Cooperation, Coordinating Ministry for Economic Affairs.

Pendidikan

- Ph.D International Development, Nagoya University, Japan (2000);
- Magister International Relations Program, International University of Japan, Niigata, Japan (1993);
- Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1986).

Riwayat Karir

- Ketua Dewan Pengawas Perum Peruri (Juli 2017 – Present);
- Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-sekarang);
- Direktur Keuangan dan Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010);
- Asisten Pribadi Presiden Republik Indonesia ke-6, Istana Negara (2008-2009);
- Direktur Keuangan dan Kerja Sama Ekonomi Asia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2005-2008);
- Direktur Kerja Sama Ekonomi Bilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2001-2005).

Personal Data

Indonesian Citizen
58 years old as of December 31, 2019
Born in Bandung, July 12, 1961

Appointment History

Dr. Rizal Affandi Lukman was appointed as Chairman of the Company's Supervisory Board based on the Decree of the Minister for State-Owned Enterprises (SOE) Number SK-124/MBU/07/2017 dated July 5, 2017 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board for Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Uang Republik Indonesia.

Concurrent Position

Deputy Minister for International Economic Cooperation, Coordinating Ministry for Economic Affairs.

Education

- Ph.D in International Development, Nagoya University, Japan (2000);
- Magister in International Relations Program, International University of Japan, Niigata, Japan (1993);
- Industry Engineering in Bandung Institute of Technology, Indonesia (1986).

Career History

- Chief of Supervisory Board of Perum Peruri (July 2017 – present);
- Deputy Minister for International Economic Cooperation, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2010 - present);
- Acting Deputy Minister for International Economic Cooperation and Director for Multilateral Economic and Financial Cooperation, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2010);
- Assistant to 6th President of the Republic of Indonesia Private Secretary, Presidential Palace Office (2008 – 2009);
- Director for Asia Economic and Financial Cooperation, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2001 – 2005);
- Director for Bilateral Economic Cooperation, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2001 – 2005).



Dr. Djoko Hendratto, MBA

Anggota Dewan Pengawas

Member of Supervisory Board

Periode Jabatan: 2019-2024

Serving Period: 2019-2024

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 58 tahun per 31 Desember 2019

Kelahiran Surakarta, 14 November 1961

Riwayat Penunjukan

Dr. Djoko Hendratto, MBA diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-30/MBU/01/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Uang Republik Indonesia.

Jabatan di Institusi Lainnya

Direktur Sistem Manajemen Investasi (SMI), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Keuangan.

Pendidikan

- S3 Universitas Indonesia Jakarta/Indonesia (2017);
- S2 Master of Business Administration University of Colorado Denver/Amerika Serikat (1997);
- S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta/Indonesia (1986).

Riwayat Karir

- Anggota Dewan Pengawas Perum Peruri (2019 – sekarang);
- Direktur Sistem Manajemen Investasi (SMI), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (2018 – sekarang);
- Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (2014 – 2018)
- Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (2013 – 2014);
- Kepala Biro Riset dan Teknologi Informasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Kementerian Keuangan (2011 – 2013);
- Kepala Biro Pengelolaan Investasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Kementerian Keuangan (2006 – 2011).

Personal Data

Indonesian Citizen

58 years old as of December 31, 2019

Born in Surakarta, November 14, 1961

Appointment History

Dr. Djoko Hendratto, MBA was appointed as Chairman of the Company Supervisory Board based on the Decree of the Minister for State-Owned Enterprises (SOE) Number SK-30/MBU/01/2019 dated January 30, 2019 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board for Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Uang Republik Indonesia.

Concurrent Position

Director of Investment Management Systems (SMI), Directorate General of Treasury, Ministry of Finance, and Head of Regional Office of the Directorate General of Treasury, West Java Province, Ministry of Finance.

Education

- Doctoral Degree from University of Indonesia, Jakarta/Indonesia (2017);
- Master of Business Administration from University of Colorado Denver/ United States (1997);
- Bachelor of Economic Development from Sebelas Maret University Surakarta/ Indonesia (1986).

Career History

- Member of Supervisory Board of Peruri (2019 – present);
- Director of Investment Management System (SMI), Directorate General of Treasury, Ministry of Finance (2018 - present);
- Director of Public Service Agency Financial Management Development (PPKBLU), Directorate General of Treasury, Ministry of Finance (2014 - 2018);
- Treasury Researcher, Directorate General of Treasury, Ministry of Finance (2013 - 2014);
- Head of Research and Information Technology Bureau, Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK), Ministry of Finance (2011 - 2013);
- Head of Investment Management Bureau of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK), Ministry of Finance (2006 - 2011).



Drs. Sutanto, SH.
 Anggota Dewan Pengawas
 Member of Supervisory Board
 Periode Jabatan: 2019-2024
 Serving Period: 2019-2024

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
 Usia 56 tahun per 31 Desember 2019
 Kelahiran Karang Anyar, 20 Desember 1963

Riwayat Penunjukan

Drs. Sutanto, SH. Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-93/MBU/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Uang Republik Indonesia.

Jabatan di Institusi Lainnya

Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Intelijen Negara / Kalakhar Botasupal dan Deputy Intelijen Pengamanan Aparatur BIN.

Pendidikan

- Akademi Kepolisian pada 1988;
- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 1995;
- Sekolah Pimpinan Kepolisian RI pada 2004;
- Lembaga Ketahanan Nasional RI pada 2015.

Riwayat Karir

- Anggota Dewan Pengawas Perum Peruri (Mei 2019 – sekarang);
- Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Intelijen Negara / Kalakhar Botasupal (2018-Sekarang);
- Direktur Kontra Infiltrasi dan Sabotase Deputy III BIN (2015-2018);
- Direktur Intelkam Polda Metro Jaya (2013-2015)
- Karo Ops Polda Maluku (2011-2013);
- Direktur Intelkam Polda Bangka Belitung (2008-2010);
- Kapolres Bangka Polda Bangka Belitung (2007-2008);
- Kapolres Bangka Tengah Polda Bangka Belitung (2005-2007).

Personal Data

Indonesian Citizen
 56 years old as of December 31, 2019
 Born in Karang Anyar, December 20, 1963

Appointment History

Drs. Sutanto, SH. was appointed as a Member of the Company Supervisory Board based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) Number SK-93/MBU/05/2019 dated May 13, 2019 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Public Company Supervisory Board (PERUM) of the Republic of Indonesia.

Concurrent Position

Expert Staff for Law and Human Rights of the State Intelligence Agency/Kalakhar Botasupal, and Deputy of Intelligence for Apparatus Security of the National Intelligence Agency.

Education

- Police Academy in 1988;
- Police Science College in 1995;
- Indonesian Police Leadership School in 2004;
- Indonesian National Resilience Institute in 2015.

Career History

- Member of the Perum Peruri Supervisory Board (May 2019 - present);
- Expert Staff for Law and Human Rights of the State Intelligence Agency / Kalakhar Botasupal (2018-Present);
- Director of Counter-Infiltration and Sabotage Deputy III BIN (2015-2018);
- Director of Intelligence and Security at Polda Metro Jaya (2013-2015);
- Karo Ops Polda Maluku (2011-2013);
- Director of Intelligence and Security at Polda Bangka Belitung (2008-2010);
- Chief of Polres Bangka Polda Bangka Belitung (2007-2008);
- Chief of Polres Bangka Tengah Polda Bangka Belitung (2005-2007).



Ir. Dwi Pranoto, MBM
 Anggota Dewan Pengawas
 Member of Supervisory Board
 Periode Jabatan: 2019-2024
 Serving Period: 2019-2024

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
 Usia 56 tahun per 31 Desember 2019
 Kelahiran Jakarta, 26 Oktober 1963

Riwayat Penunjukan

Ir. Dwi Pranoto, MBM diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-93/MBU/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Uang Republik Indonesia.

Jabatan di Institusi Lainnya

Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Regional, Bank Indonesia, dan Asisten Gubernur Kepala Departemen Regional, Bank Indonesia.

Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia (1986) dan meraih gelar S2 Master in Business Management di Asian Institute of Management (AIM), Philippines (1993). Mengikuti berbagai Executive Program di The Wharton School, London Business School, INSEAD, Columbia Business School, dan Harvard Business School.

Riwayat Karir

- Anggota Dewan Pengawas Perum Peruri (2019 – sekarang);
- Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Regional, Bank Indonesia (2019 – sekarang);
- Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Regional II – Jawa, Bank Indonesia (2014 – 2019);
- Direktur Eksekutif, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV (Jawa Timur, 2013-2014) dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III (Bali Nusa Tenggara, 2012-2013);
- Direktur Eksekutif, Kepala Unit Khusus Manajemen Informasi/ Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, Bank Indonesia (2010 – 2012);
- Direktur Departemen Sumber Daya Manusia, Bank Indonesia (2007-2010);
- Direktur Departemen Pengelolaan Uang, Bank Indonesia (2006-2007);
- Deputy Direktur (Kepala Divisi) Office of the Governor/ Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, Bank Indonesia (2002 – 2006);

Personal Data

Indonesian Citizen
 56 years old as of December 31, 2019
 Born in Jakarta, October 26, 1963

Appointment History

Ir. Dwi Pranoto, MBM was appointed as a Member of the Company Supervisory Board based on the Decree of the Minister for State-Owned Enterprises (SOE) Number SK-93/MBU/05/2019 dated May 13, 2019 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board for Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Uang Republik Indonesia.

Concurrent Position

Executive Director, Head of Regional Departments, Bank Indonesia, and Assistant to the Governor Head of Regional Departments, Bank Indonesia.

Education

Bachelor Degree of Industry Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB), Indonesia (1986) and obtained Master in Business Management from Asian Institute of Management (AIM), Philippines (1993). Following various Executive Programs at The Wharton School, London Business School, INSEAD, Columbia Business School, and Harvard Business School.

Career History

- Member of the Perum Peruri Supervisory Board (2019 - present);
- Executive Director, Head of Regional Departments, Bank Indonesia (2019 - present);
- Executive Director, Head of Regional II Department - Jawa, Bank Indonesia (2014 - 2019);
- Executive Director, Chief Representative of Bank Indonesia Region IV (East Java, 2013-2014) and Head of Representative Office of Bank Indonesia Region III (Bali Nusa Tenggara, 2012-2013);
- Executive Director, Head of Information Management Special Unit/Information System Management Department, Bank Indonesia (2010 - 2012);
- Director of the Human Resources Department, Bank Indonesia (2007-2010);
- Director of the Department of Money Management, Bank Indonesia (2006-2007);
- Deputy Director (Head of Division) Office of the Governor/ Department of Strategic Management and Governance, Bank Indonesia (2002 - 2006);



Muhammad Yusuf Ateh, AK.,MBA.

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board
Periode Jabatan: 2019-2024
Serving Period: 2019-2024

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 55 tahun per 31 Desember 2019
Kelahiran Jakarta, 9 Agustus 1964

Riwayat Penunjukan

Muhammad Yusuf Ateh, AK., MBA. Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-93/MBU/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Uang Republik Indonesia.

Jabatan di Institusi Lainnya

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pendidikan

Meraih gelar Diploma III Business Administration di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1986); Meraih gelar Diploma IV Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1992); dan menyelesaikan gelar Master (S2) Business Administration di University of Adelaide, Australia (2001).

Riwayat Karir

- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2020 – Sekarang);
- Anggota Dewan Pengawas Perum Peruri (Mei 2019 - Sekarang);
- Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) (2013 - 2020);
- Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, Kementerian PAN dan RB (2013);
- Inspektur pada Kementerian PAN dan RB (2010 - 2013);
- Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Wilayah Timur II, Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, Kementerian PAN dan RB (2009 - 2010).

Personal Data

Indonesian Citizen
55 years old as of December 31, 2019
Born in Jakarta, August 9, 1964

Appointment History

Muhammad Yusuf Ateh, AK., MBA. was appointed as a Member of the Company Supervisory Board based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) Number SK-93/MBU/05/2019 dated May 13, 2019 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board for Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Uang Republik Indonesia.

Concurrent Position

Head of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).

Education

Diploma III in Business Administration at the State College of Accountancy (1986); Obtained a Diploma IV in Accounting at the State College of Accountancy (1992); and completed a Masters degree (S2) in Business Administration at the University of Adelaide, Australia (2001).

Career History

- Head of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) (2020 - Present);
- Member of Perum Peruri Supervisory Board (May 2019 - Present);
- Deputy for Bureaucratic Reform, Apparatus Accountability, and Supervision, Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PAN and RB) (2013 - 2020);
- Deputy for Apparatus Supervision and Accountability, Ministry of PAN and RB (2013);
- Inspector at the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (2010 - 2013);
- Head of Division of Monitoring and Evaluation of Apparatus Performance Accountability for Eastern Region II, Deputy for Apparatus Accountability, Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (2009 - 2010).

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Dwina Septiani Wijaya

Direktur Utama

President Director

Periode Jabatan: 2017-2022

Serving Period: 2017-2022

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 54 tahun per 31 Desember 2019

Kelahiran Salatiga, 8 September 1965

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Utama Peruri berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-247/MBU/11/2017 tanggal 20 November 2017.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham Peruri

Nihil

Pendidikan

Meraih Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1989). Gelar Magister di Trium Emba Program, New York University, USA (1993); London School of Economics (LSE), UK; HEC School of Management in Paris, France (2009).

Riwayat Karir

- Direktur Utama Peruri (November 2017 – sekarang);
- Staf Khusus Menteri BUMN (Juli 2017 – November 2017);
- Direktur Utama – PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (2013 – 2017);
- Direktur Keuangan – PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2009 – 2013);
- Direktur Utama – PT Bahana TCW Investment Management (2003 – 2009);
- Direktur Investasi – PT Bahana TCW (2002 – 2003);
- Manajer Portofolio – PT Bahana TCW (1994 – 2000);
- Manajer Risiko Pengelolaan Dana – PT Bank Niaga, Jakarta (1990 – 1994).

Personal Data

Indonesian Citizen

54 years old as of December 31, 2019

Born in Salatiga, September 8, 1965

Appointment History

Served as President Director of Peruri based on the Decree of the Minister of SOE Number SK-247/MBU/11/2017 dated November 20, 2017.

Affiliation

Has no affiliation with other Supervisory Board, Board of Directors, or with the Main and Controlling Shareholders.

Peruri Share Ownership

Nil

Education

Bachelor degree (S1) of Civil and Planning Engineering at the Bandung Institute of Technology, Indonesia (1989). Masters Degree in Trium Emba Program, New York University, USA (1993); London School of Economics (LSE), UK; HEC School of Management in Paris, France (2009).

Career History

- President Director of Peruri (November 2017 - present);
- Special Staff of the Minister of SOE (July 2017 - November 2017);
- President Director - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (2013 - 2017);
- Director of Finance - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2009 - 2013);
- President Director - PT Bahana TCW Investment Management (2003 - 2009);
- Investment Director - PT Bahana TCW (2002 - 2003);
- Portfolio Manager - PT Bahana TCW (1994 - 2000);
- Fund Management Risk Manager - PT Bank Niaga, Jakarta (1990 - 1994).



Saiful Bahri
Direktur Operasi
Director of Operation
Periode Jabatan: 2017-2022
Serving Period: 2017-2022

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 48 tahun per 31 Desember 2019
Kelahiran Cilacap, 19 Maret 1971

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Operasi Peruri berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-247/MBU/11/2017 tanggal 20 November 2017.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham Peruri

Nihil

Pendidikan

Meraih gelar Diploma III (D3) Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro (1994). Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro (2001). Gelar Magister Manajemen, Institut Pertanian Bogor (2013).

Riwayat Karir

- Direktur Operasi (November 2017 – sekarang);
- Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) (2012 – 2017);
- Direktur Operasional dan Komersial PT Balai Pustaka (Persero) (2010 – 2012);
- Marketing Corporate Penerbit Grafindo Media Pratama (2008-2010);
- Direktur Utama PT Widya Pustaka (Ganeca Exact Group) (2006 – 2008);
- Direktur Pemasaran Penerbit & Percetakan Ganeca Exact Group (2002);
- Marketing Manager Penerbit & Percetakan Aneka Ilmu (1996 - 2002).

Personal Data

Indonesian Citizen
48 years old as of December 31, 2019
Born in Cilacap, March 19, 1971

Appointment History

Served as Director of Peruri Operations based on the Decree of the Minister of SOE Number SK-247/MBU/11/2017 dated November 20, 2017.

Affiliation

Has no affiliation with other Supervisory Board, Board of Directors, or with the Main and Controlling Shareholders.

Peruri Share Ownership

Nil

Education

Diploma III (D3) of Accounting, Faculty of Economics, Diponegoro University (1994). Bachelor Degree (S1) in Management, Faculty of Economics, Diponegoro University (2001). Master's Degree in Management, Bogor Agricultural University (2013).

Career History

- Director of Operations (November 2017 - present);
- President Director of PT Balai Pustaka (Persero) (2012 - 2017);
- Operational and Commercial Director of PT Balai Pustaka (Persero) (2010 - 2012);
- Marketing Corporate of Grafindo Media Pratama (2008-2010);
- President Director of PTWidya Pustaka (Ganeca Exact Group) (2006 - 2008);
- Ganeca Exact Group Publishers & Printing Marketing Director (2002);
- Marketing Manager for Various Sciences Publishing & Printing (1996 - 2002).

**Fajar Rizki**

Direktur Pengembangan Usaha
 Director of Business Development

Periode Jabatan: 2018-2023
 Serving Period: 2018-2023

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
 Usia 51 tahun per 31 Desember 2019
 Lahir di Jakarta, 15 Juli 1968

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Peruri berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor:SK-209/MBU/07/2018 tanggal 18 Juli 2018.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham Peruri

Nihil

Pendidikan

Meraih Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Manajemen di Universitas Pancasila, Indonesia (1993). Gelar Master Strata Dua (S2) Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta (2008).

Riwayat Karir

- Direktur Pengembangan Usaha Peruri (Juli 2018 – sekarang);
- Kepala Divisi Pengelolaan Aset dan Anak Perusahaan Peruri (Mei 2018 – Juli 2018);
- Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Peruri (2014 – 2017);
- Kepala Departemen Keuangan Peruri (2013).

Personal Data

Indonesian Citizen
 51 years old as of December 31, 2019
 Born in Jakarta, July 15, 1968

Appointment History

Served as Director of Peruri Business Development based on the Decree of the Minister of SOE Number:SK-209/MBU/07/2018 dated 18 July 2018.

Affiliation

Has no affiliation with other Supervisory Board, Board of Directors, or with the Main and Controlling Shareholders.

Peruri Share Ownership

Nil

Education

Bachelor degree (S1) in Management Economics at the Pancasila University, Indonesia (1993). Master Degree (S2) Master of Management at PPM Management College, Jakarta (2008).

Career History

- Director of Peruri Business Development (July 2018 - present);
- Head of Asset Management and Subsidiaries of Peruri (May 2018 - July 2018);
- Head of Finance and Accounting Division of Peruri (2014 - 2017);
- Head of the Peruri Finance Department (2013).

**Winarsih Budiriani***

Direktur Keuangan
Director of Finance
Periode Jabatan: 2018-2023
Serving Period: 2018-2023

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 56 tahun per 31 Desember 2019
Lahir di Klaten, 23 September 1963

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum Peruri berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-209/MBU/07/2018 tanggal 18 Juli 2018. Kemudian pada 18 Maret 2020 Winarsih Budiriani mendapatkan pengalihan penugasan menjadi Direktur Keuangan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN RI Nomor:SK-81/MBU/03/2020.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham Peruri

Nihil

Pendidikan

Meraih Sarjana Strata Satu (S1) Kehutanan di Institut Pertanian Bogor, Indonesia (1986).

Riwayat Karir

- Direktur Keuangan Peruri (Maret 2020 - sekarang);
- Direktur SDM dan Umum Peruri (Juli 2018 – Maret 2020);
- Head of Improvement Project Human Capital Bank Mandiri (2018);
- Executive Business Officer Special Asset Management Bank Mandiri (2017);
- Group Head Mandiri University (2015 – 2017);
- Group Head Jakarta Commercial Sales Bank Mandiri (2003 – 2009).

**Resmi menjabat sebagai Direktur Keuangan per 18 Maret 2020 menggantikan Nungki Indraty.*

Personal Data

Indonesian Citizen
56 years old as of December 31, 2019
Born in Klaten, September 23, 1963

Appointment History

Served as Director of HR and General of Peruri based on the Decree of the Minister of SOE Number SK-209/MBU/07/2018 dated July 18, 2018. Then, in March 18, 2020, Winarsih Budiriani got assignment transfer to be Director of Finance based on the Decree of the Minister of SOE Number:SK-81/MBU/03/2020.

Affiliation

Has no affiliation with other Supervisory Board, Board of Directors, or with the Main and Controlling Shareholders.

Peruri Share Ownership

Nil

Education

Bachelor degree (S1) in Forestry at the Bogor Agricultural Institute, Indonesia (1986).

Career History

- Director of Finance of Peruri (March 2020 - present);
- Director of HR and General Affairs of Peruri (July 2018 - March 2020);
- Head of Improvement Project Human Capital Bank Mandiri (2018);
- Executive Business Officer Special Asset Management at Bank Mandiri (2017);
- Mandiri University Group Head (2015 - 2017);
- Group Head Jakarta Commercial Sales of Bank Mandiri (2003 - 2009).

**Officially served as Director of Finance since March 18, 2020 replacing Nungki Indraty.*



Gandung Anggoro Murdani*
 Direktur SDM dan Umum
 Director of HR and General
 Periode Jabatan: 2020-2025
 Serving Period: 2020-2025

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
 Usia 54 tahun per 31 Desember 2019
 Lahir di Salatiga, 31 Agustus 1965

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum Peruri berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-81/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020

Pendidikan

Meraih Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1990). Gelar Master Strata Dua (S2) Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta, Indonesia (2008).

Riwayat Karir

- Direktur SDM dan Umum Peruri (Maret 2020 - sekarang);
- Senior Vice President Head Corporate HR & GA PT IBS Group (2018 - 2020);
- Kepala Divisi SDM Peruri (2015-2018);
- Head HR, GA, Legal & Regional Head Jawa Barat dan Sumatera Aora TV (2013-2014);
- Tenaga Profesional Pendamping di Peruri (2013);
- Advisor, HR dan Pengembangan Bisnis BSPI Foundation (2011-2013);
- Group Head of Human Capital PT Indosat Tbk (2007-2011).

**Resmi menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum Peruri per 18 Maret 2020*

Personal Data

Indonesian Citizen
 54 years old as of December 31, 2019
 Born in Salatiga, August 31, 1965

Appointment History

Served as Director of Human Resources and General Peruri based on the Decree of the Minister of SOE Number SK-81/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020

Education

Bachelor degree (S1) in Electrical Engineering at the Bandung Institute of Technology, Indonesia (1990). Master Degree in Management (S2) at the PPM Management College, Jakarta, Indonesia (2008).

Career History

- Director of Human Resources and General Peruri (March 2020 - present);
- Senior Vice President Head Corporate HR & GA PT IBS Group (2018 - 2020);
- Head of Peruri HR Division (2015-2018);
- Head HR, GA, Legal & Regional Head West Java and Sumatra Aora TV (2013-2014);
- Assistant Professionals in Peruri (2013);
- Advisor, HR and Business Development of BSPI Foundation (2011-2013);
- Group Head of Human Capital PT Indosat Tbk (2007-2011).

**Officially served as Director of HR and General in Peruri since March 18, 2020.*

DAFTAR PEJABAT EKSEKUTIF

LIST OF EXECUTIVE OFFICERS

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Pendidikan Terakhir Last Education	Dasar Penugasan Assignment Basis	Domisili Domicile
David I B Situmeang	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit	58	S2 – Manajemen Keuangan Master of Finance Management	SKEP-232/IV/2019	Jakarta
Devi Syafriyeni	Head of Risk Management	41	S2 - Manajemen Keuangan Master of Finance Management	SKEP-231/IV/2019	Bogor
Eddy Kurnia	Head of Corporate Strategic Planning	62	S3 - Administrasi Pendidikan Doctor of Education Administration	SKEP-691/XII/2019	Bandung
Adi Sunardi	Head of Corporate Secretary	34	S1 - Ekonomi Akuntansi Bachelor of Economic Accounting	SKEP-688/XI/2019	Jakarta
Ahmad Hidayat	Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk Head of Marketing and Product Development Division	53	S1 - Sistem Informasi Bachelor of Information System	SKEP-231/IV/2019	Karawang
Hesty Purwanti	Kepala Divisi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Anak Perusahaan Head of Business Development and Subsidiaries Management Division	56	S2 - Master Of Business Administration Bachelor of Information Engineering	SKEP-372/VII/2019	Jakarta
Farah Fitria Rahmayanti	Kepala Strategic Business Unit (SBU) Digital Head of Strategic Business Unit (SBU) Digital	45	S1 - Teknik Informatika Bachelor of Industry Engineering	SKEP-314/IV/2018	Depok
Suhadak Bahariawan	Kepala Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan Head of Technical and Reliability Assurance Division	53	S1 - Teknik Industri Master of Industry Engineering	SKEP-314/IV/2018	Karawang
Achmad Karunia Gunajaya	Kepala Strategic Business Unit (SBU) Uang RI Head of Strategic Business Unit (SBU) of Republic of Indonesia Banknotes	54	S2 - Magister Teknik Industri Master of Machine Engineering	SKEP-314/IV/2018	Jakarta
Fadel	Kepala Strategic Business Unit (SBU) Produk Non Uang Head of Strategic Business Unit (SBU) of Non Banknotes Product	47	S2 - Magister Teknik Mesin Master of Machine Engineering	SKEP-698/X/2018	Karawang
Dwiyani H.	Kepala Koordinator Hubungan Antar Lembaga Head of Coordinator Relation Between Institution	55	S1 - Ekonomi Manajemen Bachelor of Management Economy	SKEP-314/IV/2018	Depok
Titi Andayani	Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum Head of the Procurement and Public Facility Division	46	S2 - Magister Teknik Industri Master of Industry Engineering	SKEP-314/IV/2018	Bekasi
Noneng Suangsih	Kepala Divisi Pengamanan Perusahaan Head of Corporate Security Division	46	S2 - Magister Manajemen SDM Master of Human Resources Management	SKEP-430/V/2018	Karawang
Esti Wuryani	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Head of Human Resources Division	42	S2 - Master Human Resource Management	SKEP-118/II/2019	Jakarta
Pramono	Kepala Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Head of Education, Research, and Development Center	55	S2 - Magister Manajemen Marketing Master of Marketing Management	SKEP-314/IV/2018	Jakarta
Halim Sulasmono	Kepala Divisi Teknologi Informasi Head of Information Technology Division	59	S2 - Magister Teknik Informatika Master of Information Engineering	SKEP-369/V/2018	Bandung
Mokhammad Arif Kusumanagara	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Head of Finance and Accounting Division	35	S1 - Ekonomi Manajemen Bachelor of Management Economy	SKEP-314/IV/2018	Jakarta

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

EMPLOYEE DEMOGRAPHY AND COMPETENCY DEVELOPMENT

DEMOGRAFI KARYAWAN

Per 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki 1.820 orang karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

As of December 31, 2019, the Company has 1,820 employees, as follows:

Jumlah dan Komposisi SDM Berdasarkan Pangkat (orang)

Total and Composition of HR Based on Position (person)

Pangkat Position	2018	2019	Selisih Difference	Kenaikan/Penurunan Increased/Decreased
Senior Vice President	3	3	0	0,00%
Vice President 2	3	7	4	133,33%
Vice President 1	8	4	(4)	(50,00%)
Assistant Vice President	9	10	1	11,11%
Senior Manager	13	16	3	23,08%
Manager	14	8	(6)	(42,86%)
Deputi Manager	15	12	(3)	(20,00%)
Assistant Manager	42	51	9	21,43%
Sub Manager	34	38	4	11,76%
Senior Supervisor	34	30	(4)	(11,76%)
Supervisor	175	199	24	13,71%
Assistant Supervisor	323	301	(22)	(6,81%)
Senior Staff	243	201	(42)	(17,28%)
Staff-4	183	114	(69)	(37,70%)
Staff-3	128	329	201	157,03%
Staff-2	376	395	19	5,05%
Staff-1	300	102	(198)	(66,00%)
Jumlah Total	1.903	1.820	(83)	(4,36%)

Jumlah dan Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan (orang)

Total and Composition of HR Based on Position (person)

Pangkat Position	2018	2019	Selisih Difference	Kenaikan/Penurunan Increased/Decreased
Direksi Board of Directors	5	5	0	0,00%
Kepala Divisi/Setingkat Division Head/Equals	14	14	0	0,00%
Kepala Departemen/Setingkat Department Head/Equals	36	34	(2)	-5,56%
Kepala Seksi/Setingkat Section Head/Equals	91	101	10	10,99%
Kepala Unit/Setingkat Unit Head/Equals	209	229	20	9,57%
Pelaksana Executor	1.553	1.442	(111)	(7,15%)
Jumlah Total	1.908	1.825	(83)	(4,35%)

Jumlah dan Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang)
Total and Composition of HR Based on Education Background (person)

Pendidikan Education	2018	2019	Selisih Difference	Kenaikan/Penurunan Increased/Decreased
S2 Master Degree	43	48	5	11,63%
S1 Bachelor Degree	377	445	68	18,04%
D4 Diploma 4	1	3	2	200,00%
D3/SM Diploma 3	110	118	8	7,27%
SLTA Senior High School	1.357	1.195	(162)	(11,94%)
SLTP Junior High School	13	10	(3)	(23,08%)
SD/SR Elementary School	2	1	(1)	(50,00%)
Jumlah Total	1.903	1.820	(83)	(4,36%)

Jumlah dan Komposisi SDM Berdasarkan Kelompok Usia (orang)
Total and Composition of HR Based on Age Group (person)

Usia Age	2018	2019	Selisih Difference	Kenaikan/Penurunan Increased/Decreased
18-20 Tahun/ <i>Years Old</i>	0	0	0	0%
21-25 Tahun/ <i>Years Old</i>	149	148	(1)	(0,67%)
26-30 Tahun/ <i>Years Old</i>	300	311	11	3,67%
31-35 Tahun/ <i>Years Old</i>	356	307	(49)	(13,76%)
36-40 Tahun/ <i>Years Old</i>	283	340	57	20,14%
41-45 Tahun/ <i>Years Old</i>	190	172	(18)	(9,47%)
46-50 Tahun/ <i>Years Old</i>	165	176	11	6,67%
51-55 Tahun/ <i>Years Old</i>	456	360	(96)	(21,05%)
>= 56 Tahun/ <i>Years Old</i>	4	6	2	50,00%
Jumlah Total	1.903	1.820	(83)	(4,36%)

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS COMPOSITION

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PERURI

Peruri adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan.

Perusahaan tidak memiliki ikhtisar saham mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan bahwa seluruh modal Perum dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham sehingga informasi mengenai kronologis pencatatan saham tidak dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

COMPOSITION OF PERURI'S SHARE OWNERSHIP

Peruri is a State Owned Enterprises as stipulated in Laws Number 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises which all the capital is owned by the State in the form of state assets which is separated and not divided into shares. The Supervisory Board and the Board of Directors has do not own any shares in the company.

The company did not have any share overview referring to Laws of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises which stated that the entire capital of Perum is owned by the state and is not divided over the stock, so that the information of chronological of share listing cannot be presented in this Annual Report year.



Pemerintah Republik Indonesia
Government of the Republic of Indonesia

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN

Hingga akhir 2019, Peruri tidak mencatatkan Penawaran Umum Saham di bursa efek manapun, dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Peruri juga tidak melakukan Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Karyawan, atau *Employee and Management Stock Option* (ESOP/MSOP). Seluruhnya atau 100,00% saham Peruri dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk itu, Peruri tidak memiliki informasi terkait kepemilikan saham oleh Dewan Pengawas, Direksi maupun manajemen.

SHARE OWNERSHIP BY MANAGEMENT AND/OR EMPLOYEES

Until the end of 2019, Peruri had not listed a Public Offering of Shares on any stock exchange, and did not trade its shares to the public. Peruri also does not carry out a Share Ownership Program for Management and Employees, or *Employee and Management Stock Option* (ESOP/MSOP). Wholly or 100.00% of Peruri's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Therefore, Peruri has no any information of share ownership of Supervisory Board, the Board of Directors, or management.

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI



"Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham utama dan pengendali sekaligus pemilik akhir dari Peruri dengan kepemilikan sebesar 100,00%."

"The Government of the Republic of Indonesia is the main and controlling shareholder as well as the final owner of Peruri with an ownership of 100.00%."

INFORMATION ON MAJOR/CONTROLLING SHAREHOLDERS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia, Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Based on Government Regulation no. 41 of 2003 concerning the Delegation of the Position, Duties and Authority of the Minister of Finance to Limited Liability Companies (Persero), Public Companies (PERUM) and Service Companies (PERJAN) to the State Minister for State-Owned Enterprises, and Law No.19 of 2003 concerning Business Entities State Owned along with the State Gazette of the Republic of Indonesia; Proxy of the Company's Shareholders is the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Ministry of State Owned Enterprises

Kantor Kementerian BUMN
Ministry of SOE Office

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta, Indonesia


Telp. +62 21 29935678
Fax. +62 21 29935740
www.bumn.go.id

STRUKTUR GRUP

GROUP STRUCTURE



Keterangan | Notes

 **Perusahaan Anak**
Subsidiary

 **Perusahaan Afiliasi**
Affiliate

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI, JOINT VENTURE (JV) DAN SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES, JOINT VENTURE (JV) AND SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

PT PERURI WIRA TIMUR

Visi dan Misi Perusahaan

Visi: Menjadi Perusahaan yang unggul di bidang percetakan dokumen sekuritas, bernilai strategis, dan memberi nilai tambah.

Misi:

1. Menghasilkan produk dokumen sekuriti yang berkualitas, kreatif dan inovatif khususnya di sektor pendidikan;
2. Mewujudkan pertumbuhan pendapatan dan keuntungan yang berkesinambungan;
3. Menjadi perusahaan kebanggaan karyawan dan pemegang saham.

Sejarah dan Bidang Usaha

Sejarah:

PT Peruri Wira Timur didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 05 April 2011, berdomisili di Surabaya sebagai Perusahaan Pengembangan Kerjasama Operasi (KSO) antara Perum Peruri (BUMN) dengan PT Panca Wira Usaha (BUMD) Provinsi Jawa Timur, yang bergerak di bidang Security Printing dalam rangka perluasan pangsa pasar Perum Peruri, khususnya di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia bagian timur.

Kegiatan operasional PT Peruri Wira Timur telah memperoleh izin dari Badan Intelijen Negara (BIN) cq: Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) dan telah memiliki ISO 9001:2015 (*Quality Management System*) dari SAI Global.

Bidang Usaha:

PT Peruri Wira Timur adalah sebuah perusahaan bergerak di bidang pencetakan dokumen dan produk sekuriti yang terkemuka berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

PT PERURI WIRA TIMUR

Vision and Mission of the Company

Vision: To become a company that excels in the field of security document printing, strategic value, and provide added value.

Mission:

1. Produce document security products quality, creative and innovative especially in education sector;
2. Realizing income growth and sustainable benefits;
3. To be the pride of the employees and shareholders.

History and Business Fields

History:

PT Peruri Wira Timur was established based on a Deed of Establishment No. 06 dated April 5, 2011, domiciled in Surabaya as a Development Company Joint Operation (KSO) between Perum Peruri (SOE) with PT Panca Wira Usaha (ROE) East Java Province, which is engaged in Security Printing in order to expand Perum Peruri's market share, particularly in East Java Province and Eastern Indonesia.

The operational activities of PT Peruri Wira Timur obtained permission from the State Intelligence Agency (BIN) cq: Coordination Agency for the Eradication of Counterfeit Money (BOTASUPAL) and has ISO 9001:2015 (*Quality Management System*) from SAI Global.

Business Fields:

PT Peruri Wira Timur is a wellknown Company engaged in document printing and product security located in Surabaya, East Java.

Kinerja Usaha Business Performance

Keterangan Description	Realisasi Realization		
	2017	2018	2019
Pendapatan Usaha Operating Revenues	56.467.474.888	60.688.216.309	62.769.059.240
Laba Usaha Revenue	8.207.149.495	9.325.177.463	10.915.474.348
Laba Bersih Net Revenue	5.809.167.505	7.464.640.093	8.834.409.684
Total Aset Total Assets	38.979.758.528	47.381.593.888	52.363.954.535

Informasi Lainnya**Alamat Kantor/Domisili:**

Jl. Ahmad Yani No. 119, Surabaya, Jawa Timur 60237

Other Information**Office Address/Domicile:**

Jl. Ahmad Yani No. 119, Surabaya, East Java 60237

Persentase Kepemilikan Saham:

Uraian Description	Lembar Saham Shares	Nominal	Jumlah Total	%
Perum Peruri	11.578.307	Rp1.000	11.578.306.850	67
PT Panca Wira Usaha	5.702.748	Rp1.000	5.702.748.000	33
Jumlah Total	17.281.055		17.281.054.850	100

Share Ownership Percentage:

Mulai beroperasi: Sehubungan dengan adanya perubahan status yaitu semula Kerja Sama Operasi (KSO) menjadi Perseroan Terbatas (PT), PT Peruri Wira Timur resmi beroperasi pada tanggal 5 April 2011 berdasarkan Akta Anggaran Dasar Pendirian No. 06 oleh Notaris M. Nova Faisal, SH., M.KN.

Start of Operation: Due to a change in status, from the original Joint Operation (KSO) to a Limited Liability Company (PT), PT Peruri Wira Timur officially operated on April 5, 2011 based on the Deed of Articles of Association of Establishment No. 06 by Notary M. Nova Faisal, SH., M.KN.

PERURI DIGITAL SECURITY**Visi dan Misi Perusahaan****Visi:**

Menjadi penyedia jasa sistem keamanan dan ketahanan transaksi digital nasional dengan jangkauan dan standar global.

PERURI DIGITAL SECURITY**Company Vision and Mission****Vision:**

To become a provider of national digital transaction security and resilience systems with global coverage and standards.

Misi:

Menyediakan dan Mengelola infrastruktur yang handal, efektif, efisien dan aman dalam menjalankan transaksi pembayaran (*Smart Card*), pengamanan transaksi (*Certificate Authority*) dan pengamanan data dan informasi (*Personalisasi*).

Mission:

Providing and managing reliable, effective, efficient and safe infrastructure in carrying out payment transactions (*Smart Cards*), securing transactions (*Certificate Authority*) and securing data and information (*Personalization*).

Sejarah dan Bidang Usaha**Sejarah:**

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat berdampak pada perubahan yang luar biasa terhadap pola transaksi dan pengelolaan informasi pribadi. Perum Peruri sebagai percetakan uang kertas dan dokumen berharga tidak terlepas dari dampak global transformasi produk yang mengarah pada solusi teknologi informasi seperti *e-Authentication*, *e-Identity*, *e-Payment*, *Data Center*, *Service & IT Solution*. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 22 tanggal 15 September 2011 maka dibentuklah PT Peruri Digital Security (PDS).

History and Business Fields**History:**

The rapid development of information technology has resulted in tremendous changes in transaction patterns and management of personal information. Perum Peruri as a printing of banknotes and valuable documents is inseparable from the global impact of product transformation that leads to information technology solutions such as *e-Authentication*, *e-Identity*, *e-Payment*, *Data Center*, *Service & IT Solution*. Based on the Notary Deed No. 22 dated September 15, 2011 PT Peruri Digital Security (PDS) was formed.

Keamanan dokumen, surat-surat berharga, transaksi keuangan, serta ancaman *cyber crime* adalah amanah bangsa. Oleh karena itu, PT Peruri Digital Security tidak dapat hanya mengejar laba dari kinerja bisnis semata namun wajib menjaga kepercayaan masyarakat. Karena PT Peruri Digital Security diberi wewenang melakukan berbagai kiat digital untuk memberantas pemalsuan dokumen, surat berharga maupun data diri kliennya. Walaupun perusahaan secara legal baru dibentuk tahun 2011 yang lalu, namun pengalaman, keahlian serta reputasi induk perusahaannya yaitu Peruri menjadi jaminan integritas, serta keamanan bisnis ini.

Bidang Usaha:

PT Peruri Digital Security adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang mengarah pada solusi teknologi informasi seperti *e-Authentication, e-Identity, e-Payment, Data Center, Service & IT Solution*.

Security of documents, securities, financial transactions, and the threat of cyber crime is the nation's mandate. Therefore, PT Peruri Digital Security cannot only pursue profit from business performance but also must maintain public trust because PT Peruri Digital Security is authorized to carry out various digital tips to eradicate forgery of documents, securities and personal data of its clients. Although the company was only legally formed in 2011, the experience, expertise and reputation of its parent company, Peruri, are a guarantee for the integrity and stability of this business.

Business Fields:

PT Peruri Digital Security is a company engaged in information technology solutions such as *e-Authentication, e-Identity, e-Payment, Data Center, Service & IT Solution*.

Keterangan Description	Realisasi Realization			
	2017	2018	2018 (Restatement)	2019
Pendapatan Usaha Operating Revenues	100.192.862.234	180.717.641.470	175.717.641.470	192.971.541.706
Laba Usaha Revenue	(170.361.544)	1.746.978.322	153.021.678	7.170.798.886
Laba Bersih Net Revenue	85.315.791	2.630.073.786	1.142.739.035	1.130.142.722
Total Aset Total Assets	91.177.889.396	182.113.081.936	194.788.280.368	207.382.278.222

Informasi Lainnya

Alamat Kantor/Domisili:

Jl. Sunan Kalijaga No.11, Jakarta Selatan 12160

Other Information

Office Address/Domicile:

Jl. Sunan Kalijaga No.11, South Jakarta 12160

Persentase Kepemilikan Saham:

Uraian Description	Lembar Saham Shares	Nominal	Jumlah Amount	%
Perum Peruri	89.167	1.000.000	89.167.000.000	99,78
PT Pundi Puri Sejahtera	200	1.000.000	200.000.000	0,22
Jumlah Total	89.367		89.367.000.000	100

Share Ownership Percentage:

Mulai Beroperasi:

PT Peruri Digital Security didirikan pada 15 September 2011.

Start of Operation:

PT Peruri Digital Security was established on September 15, 2011.

PT KERTAS PADALARANG

Visi dan Misi Perusahaan

Visi: Menjadi sebuah perusahaan dengan bisnis utama manufaktur kertas *security* dan kertas khusus lainnya dengan kemampuan tumbuh secara berkelanjutan.

Misi: Memproduksi kertas *security* dan kertas khusus lainnya pada ragam produk bernilai tinggi dengan kualitas produk dan layanan harga yang kompetitif.

Sejarah PT Kertas Padalarang

Sejarah:

Perusahaan didirikan pada tahun 1922 dengan nama NV Papier Fabriek Padalarang yang merupakan cabang dari NV Papier Fabriek Nijmegen di Belanda. Pada tahun 1939 dilakukan pengembangan usaha dengan mendirikan cabang di Probolinggo dengan nama PT Kertas Letjes dan pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1959 NV Papier Fabriek Padalarang dinasionalisasikan menjadi Perusahaan Milik Negara.

Status perusahaan berubah menjadi Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1991 tentang ditetapkannya pengalihan bentuk perusahaan dari semula PN Kertas Padalarang menjadi PT Kertas Padalarang, yang ditindaklanjuti dengan akta pendirian (dalam bentuk usaha yang baru) Nomor 4 tanggal 9 Juni 1992 oleh Notaris Masrie Husen, S.H. Berdasarkan Akta Notaris tersebut disusun Anggaran Dasar Perusahaan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C2-6395 HT 01 tanggal 6 Agustus 1992.

Berdasarkan keputusan para Pemegang Saham PT Kertas Padalarang No. KEP-403/MBU/2013, DIR/337/2013 dan SKEP-705/XI/2013 tentang penjualan saham Negara Republik Indonesia pada PT Kertas Padalarang kepada Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dan diperkuat dengan Akta Notaris Dessi, SH, M.KN Nomor 06 tanggal 19 Desember 2013, maka seluruh saham Negara Republik Indonesia sudah dibeli oleh Perum Peruri. Pada tanggal 23 Mei 2015, melalui RUPS-LB merubah status PT Kertas Padalarang dari Persero menjadi Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam akta No. 9 tanggal 20 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0927019 tanggal 24 April 2015.

Selanjutnya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Kertas Padalarang tahun buku 2015 No. 02/R/PTKP/IV/2016 tanggal 7 April 2016

PT KERTAS PADALARANG

Company Vision and Mission

Vision: To become a company with the main business of manufacturing security paper and other specialty papers with the ability to grow sustainably.

Mission: To produce security paper and other specialty papers in a wide range of high value products with quality products and services at competitive prices.

History of PT Kertas Padalarang

History:

The Company was founded in 1922 under the name NV Papier Fabriek Padalarang which is a branch of NV Papier Fabriek Nijmegen in the Netherlands. In 1939, business development was carried out by establishing a branch in Probolinggo under the name PT Kertas Letjes and in 1961 based on Government Regulation Number 50 of 1959 NV Papier Fabriek Padalarang was nationalized as a State-Owned Company.

The status of the company changed to Persero based on Government Regulation Number 29 of 1991 concerning the stipulation of the transfer of the company form from PN Kertas Padalarang to PT Kertas Padalarang, which was followed up with a deed of establishment (in a new form of business) Number 4 dated June 9, 1992 by Notary Masrie Husen, S.H. Based on the Notary Deed, the Company's Articles of Association were prepared which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree Number C2-6395 HT 01 dated August 6, 1992.

Based on the decision of the Shareholders of PT Kertas Padalarang No. KEP-403/MBU/2013, DIR/337/2013 and SKEP-705/XI/2013 regarding the sale of the Republic of Indonesia shares in PT Kertas Padalarang to the Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) and strengthened by the Notary Deed of Dessi, S.H., M.KN Number 06 dated 19 December 2013, all shares of the Republic of Indonesia have been purchased by Perum Peruri. On 23 May 2015, through RUPS-LB changed the status of PT Kertas Padalarang from Persero to a Limited Liability Company as outlined in deed No. 9 dated 20 April 2015 made by Notary Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0927019 dated April 24, 2015.

Furthermore, based on the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Kertas Padalarang for financial year 2015 No. 02/R/PTKP/IV/2016 dated April

yang dalam salah satu keputusannya tercantum pada poin 7 (tujuh) yaitu PT Kertas Padalarang agar menyesuaikan logo dan nama perusahaan sesuai dengan Induk Perum Peruri, namun dalam penerapannya untuk PT Kertas Padalarang hanya merubah logo menjadi Peruri Security Paper Mill, sementara nama (Badan Hukum) tetap PT Kertas Padalarang.

7, 2016 which in one of its decisions is listed at point 7 (seven), namely PT Kertas Padalarang to adjust its logo and company name according to the Perum Peruri Parent, but in its application for PT Kertas Padalarang it only changes the logo becomes Peruri Security Paper Paper Mill, while the name (Legal Entity) remains PT Kertas Padalarang.

Kegiatan/Bidang Usaha:

1. Produksi Kertas Banderol;
2. Produksi Kertas Security Non Banderol;
3. Produksi Kertas Umum;
4. Produksi Kertas Sigaret;
5. PULP LKU.

Activities/Business Field:

1. Official Paper Production;
2. Non-Standard Security Paper Production;
3. General Paper Production;
4. Cigarette Paper Production;
5. PULP LKU.

Kinerja Usaha

(dalam rupiah)

No.	Keterangan Description	2017	2018	2019
1	Pendapatan Usaha Operating Revenues	63.966.157.935	102.695.185.878	152.026.506.646
2	Laba Usaha Revenue	4.399.317.206	2.874.464.565	10.271.504.690
3	Laba Bersih Net Revenue	1.879.448.448	207.377.259	18.260.738
4	Total Aset Total Assets	53.364.786.261	96.815.612.764	116.980.678.573

Business Performance

(in Rupiah)

Informasi Lainnya

Alamat Kantor/Domisili:

Jalan Cihaliwung No. 181 Padalarang Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40553
Telp/Fax: (022) 6809315-6809393/(022) 6809284
Website: www.kertas-padalarang.co.id
Email: office@kertas-padalarang.co.id

Other Information

Office Address/Domicile:

Jalan Cihaliwung No. 181 Padalarang Kab. West Bandung, West Java 40553
Tel/Fax: (022) 6809315-6809393/(022) 6809284
Website: www.kertas-padalarang.co.id
Email: office@kertas-padalarang.co.id

Persentase Kepemilikan Saham:

Sesuai dengan akta notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn No. 07 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham *Circular Resolution* Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Kertas Padalarang tentang Persetujuan Tambahan Penyertaan Modal Ditempatkan/Disetor pada PT Kertas Padalarang, yang mana terdapat pemberian tambahan setoran modal ditempatkan/disetor sebesar Rp35,6 miliar kepada PT Kertas Padalarang yang akan digunakan sebagai tambahan modal kerja, revitalisasi permesinan: MKI dan MK3 serta pembangunan jaringan & sistem maka terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham di Kertas Padalarang sebagai berikut:

Share Ownership Percentage:

In accordance with the notarial deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn No. 07 dated July 23, 2019 concerning Circular Resolution Shareholders Decree of PT Kertas Padalarang Shareholders regarding Approval for Additional Capital Participation Issued/Paid in PT Kertas Padalarang, which is contained providing additional issued/paid-up capital of Rp35.6 billion to PT Kertas Padalarang which will be used as additional working capital, revitalization of machinery: MKI and MK3 as well as network & system development, there is a change in the composition of share ownership in Kertas Padalarang as follows:

Uraian Description	Lembar Saham Shares	Nominal	Jumlah Amount	%
Perum Peruri	387.707	1.000.000	387.707.000.000	93,23
PT Pengelola Investama Mandiri	28.160	1.000.000	28.160.000.000	6,77
Jumlah Total	415.867		415.867.000.000	100

Mulai Beroperasi

Sehubungan dengan perubahan status Kertas Padalarang dari yang semula Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Perseroan Terbatas (PT), maka Kertas Padalarang sebagai Perseroan Terbatas mulai beroperasi sejak tahun 2015, sesuai dengan akta notaris Notaris Dessi, S.H., M.KN nomor 09 tanggal 20 April 2015.

PT PERURI PROPERTI

Visi dan Misi Perusahaan

Visi: Menjadi perusahaan pengembang dan jasa yang terkait, serta pengelola aset properti berstandar Internasional.

Misi:

1. Mengembangkan dan mengelola aset properti Perum Peruri secara profesional dan bermanfaat tinggi.
2. Mengembangkan usaha terkait pengembangan lahan yang berkualitas tinggi.

Sejarah PT Peruri Properti

Perum Peruri telah secara bertahap merelokasi kegiatan produksi sejak tahun 1996 dari lokasi Jakarta di Jalan Palatehan ke lokasi Teluk Jambe Karawang. Sesuai dengan Instruksi Menteri BUMN untuk optimalisasi aset milik BUMN yang juga telah menjadi Rencana Kerja Perum Peruri sejak tahun 2008 maka untuk mewujudkan hal tersebut didirikan Anak Perusahaan di bidang properti yaitu PT Peruri Properti pada tanggal 10 April 2012, kepemilikan saham mayoritas oleh Perum Peruri.

Start of Operation

In connection with the change in the status of Kertas Padalarang from being a State-Owned Enterprise (SOE) to a Limited Liability Company (PT), Kertas Padalarang as a Limited Liability Company began operating since 2015, in accordance with the notarial deed of Notary Dessi, S.H., M.KN number 09 dated April 20, 2015.

PT PERURI PROPERTI

Company Vision and Mission

Vision: To become a developer and related service company, as well as an international standard property asset manager.

Missions:

1. Develop and manage Perum Peruri property assets in a professional and highly beneficial manner.
2. Developing businesses related to high quality land development.

History of PT Peruri Properti

Perum Peruri has gradually relocated production activities since 1996 from Jakarta location on Jalan Palatehan to the Teluk Jambe Karawang location. In accordance with the SOE Minister's Instruction for optimization of SOE-owned assets which has also become Perum Peruri's Work Plan since 2008, to achieve this, a subsidiary in the property sector was established, namely PT Peruri Properti on April 10, 2012, with majority share ownership by Perum Peruri.

Maksud dan Tujuan Perusahaan:

1. Jasa Pengembangan Properti
Mengembangkan aset lahan Peruri, prioritas aset lahan di Pelatehan, pengembangan lahan menjadi hotel, pusat perbelanjaan/retail/meeting point, gedung kantor, apartemen, gedung pertemuan dan cagar budaya atau museum;
2. Jasa Pengelola Gedung
Mengelola gedung yang dibangun melalui skema sewa dan/atau strata *title* serta bekerja sama dengan mitra strategis;
3. Jasa Pemeliharaan Gedung
Melakukan jasa pemeliharaan gedung-gedung dan infrastruktur dengan prioritas gedung-gedung pada aset lahan Pelatehan;
4. Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi
Menawarkan jasa manajemen konstruksi pada saat pembangunan gedung atau infrastruktur;
5. Jasa Perdagangan
Melakukan usaha perdagangan barang/peralatan terkait dengan pengembangan aset lahan dan lain-lain.

Tujuan Utama PT Peruri Properti:

Tujuan utama didirikannya PT Peruri Properti adalah untuk mengoptimalkan lahan milik Perum Peruri yang selaras dengan bisnis Perum Peruri "5 strategis dan 4 pilar", di mana pilar ke-4 adalah Pengembangan Bisnis *Non-Core* yaitu sektor properti. Hasil dari bisnis ini akan digunakan untuk menopang perkembangan bisnis inti Perum Peruri.

Company Purpose and Objectives:

1. Property Development Services
Developing Peruri land assets, prioritizing land assets in Pelatehan, developing land into hotels, shopping centers/retail/meeting points, office buildings, apartments, conference halls and cultural heritage or museums;
2. Building Management Services
Manage buildings constructed through lease schemes and/or strata title and in collaboration with strategic partners;
3. Building Maintenance Services
Performing maintenance services for buildings and infrastructure with priority for buildings on Pelatehan land assets;
4. Construction Management Consultant Services
Offers construction management services when building buildings or infrastructure;
5. Trade Services
Conducting trade in goods/equipment related to the development of land assets and others.

Main Objectives of PT Peruri Properti:

The main objective of establishing PT Peruri Properti is to optimize Perum Peruri's land which is in line with Perum Peruri's business "5 strategic and 4 pillars", where the 4th pillar is Non-Core Business Development, namely the property sector. The proceeds from this business will be used to support the development of Perum Peruri's core business.

Kinerja Usaha**Business Performance**

Keterangan Description	2017	2018	2019
Pendapatan Usaha Operating Revenues	63.966.157.935	67.707.233.684	105.330.895.839
Laba Usaha Revenue	4.399.317.206	4.157.113.222	8.793.678.878
Laba Bersih Net Revenue	1.879.448.449	1.023.013.845	1.431.140.485
Total Aset Total Assets	53.364.786.261	50.860.151.607	76.746.071.586

Informasi Lainnya**Alamat Kantor/Domisili:**

Jalan Sunan Kalijaga No. 15 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Telp/Fax: (021)7257889/(021)7227848
Email : pproperti@gmail.com

Other Information**Office/domicile address**

Jalan Sunan Kalijaga No. 15 Kebayoran Baru, South Jakarta 12160
Tel/Fax : (021) 7257889/(021) 7227848
Email : pproperti@gmail.com

Persentase Kepemilikan Saham

Sesuai dengan akta notaris Dessi, S.H., M.Kn nomor 10 tanggal 27 maret 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Peruri Properti, yang mana terdapat pemberian tambahan setoran modal sebesar Rp20 miliar kepada PT Peruri Properti yang akan digunakan sebagai modal kerja maka terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham di PT Peruri Properti sebagai berikut:

Uraian Description	Lembar Saham Shares	Nominal	Jumlah Amount	%
Perum Peruri	39.800	1.000.000	39.800.000.000	99,5
YAPETRI	200	1.000.000	200.000.000	0,5
Jumlah Total	40.000	1.000.000	40.000.000.000	100

Mulai Beroperasi

PT Peruri Properti beroperasi pada tanggal 10 April 2012.

PT SICPA PERURI SECURINK (AFILIASI)

Visi dan Misi Perusahaan

Visi: *To be Indonesia's leading supplier of security ink systems for banknotes, documents of value and brand protection.*

Misi: *To be recognized as a quality supplier to selected market segments and that we are perceived by our stakeholders as a partner of first choice.*

Sejarah dan Bidang Usaha

Sicpa Group adalah *global leader* dalam dunia pembuatan tinta berteknologi tinggi dalam sistem keamanan yang canggih. Sicpa adalah perusahaan swasta yang memfokuskan diri pada pembuatan tinta. Sicpa telah memasok tinta sekuriti kepada Perum Peruri selama lebih dari 30 tahun. Pada Tahun 1996, Sicpa SA bersama dengan Yayasan Pensiun dan Hari Tua Peruri (Yapetri) mendirikan PT Sicpa Purindo yang memproduksi tinta sekuriti dan komersial berlokasi di Tangerang.

Pada Juni 2002, Perum Peruri dari Sicpa SA menandatangani perjanjian kerja sama untuk pendirian PT Sicpa Peruri Securink (PT SPS) dan beroperasi berdasarkan hukum Indonesia. PT SPS bergerak di bidang *industry* tinta termasuk tinta *security*.

Share Ownership Percentage

In accordance with the notarial deed of Dessi, S.H., M.Kn number 10 dated March 27, 2019 concerning the Decision Statement of the Limited Liability Company Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Peruri Properti, in which there is an additional capital deposit of Rp20 billion to PT Peruri Properti which will be used as working capital, there is a change in the composition of share ownership in PT Peruri Properti as follows:

Start of Operation

PT Peruri Properti was founded on April 10, 2012.

PT SICPA PERURI SECURINK (AFFILIATE) Company Vision and Mission

Vision: *To be Indonesia's leading supplier of security ink systems for banknotes, documents of value and brand protection.*

Mission: *To be recognized as a quality supplier to selected market segments and that we are perceived by our stakeholders as a partner of first choice.*

History and Business Fields

Sicpa Group is a global leader in the world of high-tech ink manufacturing in sophisticated security systems. Sicpa is a private company that focuses on making ink. Sicpa has been supplying security ink to Perum Peruri for more than 30 years. In 1996, Sicpa SA together with the Peruri Pension and Old Age Foundation (Yapetri) established PT Sicpa Purindo which produces security and commercial inks located in Tangerang.

In June 2002, Perum Peruri of Sicpa SA signed a cooperation agreement for the establishment of PT Sicpa Peruri Securink (PT SPS) and operating under Indonesian law. PT SPS is engaged in the ink industry including security ink.

Bidang Usaha:

PT Sicpa Peruri Securink bergerak di bidang produksi/ manufaktur tinta *security* untuk mencetak uang dan dokumen sekuriti lainnya seperti: materai, *passport*, ijasah, BPKB, STNK.

Business Fields:

PT Sicpa Peruri Securink is engaged in the production/ manufacturing and security inks for printing money and other security documents such as: stamp duty, passport, certificate, BPKB, STNK.

Kinerja Usaha

Keterangan Description	Realisasi Realization		
	2017	2018	2019
Pendapatan Usaha Operating Revenues	739.901.894.000	799.343.258.276	828.297.484.000
Laba Usaha Revenue	118.220.562.000	99.647.051.442	143.264.179.000
Laba Bersih Net Revenue	72.992.952.000	50.189.520.925	89.276.005.259
Total Aset Total Assets	400.666.992.000	641.688.645.000	406.738.742.000

Business Performance**Informasi Lainnya****Alamat Kantor/Domisili:**

Jalan Tarum Barat, Kawasan Peruri
Desa Parungmulya, Ciampel Karawang Barat 41361

Other Information**Office Address/Domicile:**

Jalan Tarum Barat, Peruri area
Parungmulya Village, Ciampel Karawang Barat 41361

Persentase Kepemilikan Saham

Uraian Description	Lembar Saham Shares	Nominal		%
		USD	Rp	
Sicpa S.A	1.748	1.748.000	15.499.516.000	52
Perum Peruri	1.614	1.614.000	14.311.338.000	48
Jumlah Total	3.362	3.362.000	29.810.854.000	100

Share Ownership Percentage**Mulai Beroperasi**

Peruri dan PT Sicpa Peruri Securink menandatangani *Joint Venture Agreement (JVA)* Nomor SP-365/VI/2002 tanggal 3 Juni 2002 dan Addendum JVA tanggal 3 Februari 2003. Akta Notaris Anggaran Dasar PT Sicpa Peruri Securink Nomor 4 tanggal 19 Februari 2003.

Starting of Operation

Peruri and PT Sicpa Peruri Securink signed Joint Venture Agreement (JVA) No. SP-365/VI/2002 dated June 3, 2002 and Addendum JVA dated February 3, 2003. Notary Deed of Articles of Association of PT Sicpa Peruri Securink Number 4 dated February 19, 2003.

**PT CARDSINDO TIGA PERKASA
(CUCU PERUSAHAAN)****Visi dan Misi Perusahaan**

Visi: Menjadi perusahaan *Smart Card* terbaik bertaraf internasional.

Misi: Selalu meningkatkan hubungan kerja yang lebih baik dengan semua mitra bisnis kami.

**PT CARDSINDO TIGA PERKASA
(CUCU PERUSAHAAN)****Company Vision and Mission**

Vision: To become the best international Smart Card company.

Mission: Always promote better working relationships with all our business partners.

Sejarah dan Bidang Usaha

Sejarah:

Berdiri sejak 2012, PT Cardsindo Tiga Perkasa merupakan anak perusahaan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. yang fokus bergerak di bidang telekomunikasi. Pada 29 Maret 2018, PT Peruri Digital Security mengakuisisi 55% saham untuk mengembangkan bisnis perusahaan di bidang smart card.

Bidang Usaha:

PT Cardsindo Tiga Perkasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis *smart card* dan kartu plastik yang memiliki beberapa fitur sekuriti digital. Kunci daya saing Cardsindo terletak dalam kemampuan memproduksi beberapa produk *smart card*.

History and Business Fields

History:

Established in 2012, PT Cardsindo Tiga Perkasa is a subsidiary of PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. which focuses on engaging in telecommunications. On March 29, 2018, PT Peruri Digital Security acquired a 55% stake to develop the company's business in the smart card sector.

Business Fields:

PT Cardsindo Tiga Perkasa is a company engaged in the smart card and plastic card business which has several digital security features. The key to Cardsindo's competitiveness lies in its ability to produce several smart card products.

Kinerja Usaha

Keterangan Description	Realisasi Realization		
	2017	2018	2019
Pendapatan Usaha Operating Revenues	188.857.410.998	125.332.006.400	132.192.065.302
Laba Usaha Revenue	7.759.490.229	(153.021.678)	7.606.553.850
Laba Bersih Net Revenue	1.094.367.681	1.142.739.026	2.795.803.585
Jumlah Aset Asset Total	120.196.155.978	194.788.280.368	130.750.626.197

Business Performance

Informasi Lainnya

Alamat Kantor/Domisili:

Kawasan Industri Mekar Jaya
Jl. Raya Mekar Jaya No 121 Sepatan
Tangerang 15520

Other Information

Office Address/Domicile:

Mekar Jaya Industrial Estate
Jl. Raya Mekar Jaya No 121 Sepatan
Tangerang 15520

Persentase Kepemilikan Saham

Uraian Description	Lembar Saham Shares	Nominal	Jumlah Amount	%
PT Peruri Digital Security	12.705.000	1.000	12.705.000.000,-	55%
PT Jasuindo Tiga Perkasa	10.395.000	1.000	10.395.000.000,-	45%
Jumlah Total	23.100.000		23.100.000.000	100

Share Ownership Percentage

Mulai Beroperasi:

PT Cardsindo Tiga Perkasa resmi beroperasi pada tanggal 19 Juli 2012 berdasarkan Akta Anggaran Dasar Pendirian Nomor 10 oleh Notaris Andreas, SH., LL.M.

Starting Operation:

PT Cardsindo Tiga Perkasa officially operates on July 19, 2012 based on the Deed of Articles of Association of Establishment Number 10 by Notary Andreas, SH., LL.M.

INFORMASI TENTANG KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM

INFORMATION ABOUT THE SHARES LISTING CHRONOLOGY

Saham Peruri seluruhnya atau 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2019, Peruri tidak melakukan Penawaran Umum Saham Perdana di bursa manapun sehingga tidak memiliki informasi mengenai kronologis pencatatan saham.

Peruri's shares are wholly or 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. As of December 31, 2019, Peruri has not made an Initial Public Offering on any stock exchange so it does not have information regarding the share listing chronology.

INFORMASI TENTANG KRONOLOGIS PENERBITAN EFEK LAINNYA

INFORMATION ABOUT OTHER SECURITIES ISSUANCE CHRONOLOGY

Hingga akhir 2019, Peruri tidak menerbitkan efek seperti obligasi, sukuk, obligasi konversi atau efek lainnya di bursa efek baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya dan tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan dan peringkat efek.

Until the end of 2019, Peruri did not issue securities such as bonds, sukuk, convertible bonds or other securities on stock exchanges both in Indonesia and abroad. Therefore, there is no information related to the names of other securities, the year of issuance of other securities, interest rates/benefits of other securities and maturity dates of other securities, offering value of other securities, name of exchange where other securities are listed and effect rating.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

Akuntan Publik Public Accountant

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Wisma Staco 3rd Floor, Jl. Casablanca No. Kav 18,
RT.4/RW.13, Menteng dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Wisma Staco 3rd Floor, Jl. Casablanca No. Kav 18,
RT.4/RW.13, Menteng dalam, Kec. Tebet, South
Jakarta, Jakarta Capital Special Region, 12870

Konsultan Hukum Legal Consultant

1. Kemalsjah Associates
Jl. Jend. Sudirman No.Kav 54-55, RT.5/RW.3,
Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

1. Kemalsjah Associates
Jl. Jend. Sudirman No.Kav 54-55, RT.5/RW.3,
Senayan, Kec. Kby. Baru, South Jakarta, Jakarta
Capital Special Region 12190

2. Bahar & Partners
Menara Prima 18 Floor, Jl. Lingkar Mega Kuningan
6.2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan
Timur, RT.5/RW.2, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan
Tim., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950

2. Bahar & Partners
Menara Prima 18 Floor, Jl. Lingkar Mega Kuningan
6.2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan
Timur, RT.5/RW.2, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan
Tim., South Jakarta, Jakarta Capital Special Region
12950

3. ANC & Co
Graha Mobilkom, Lantai 3, Jalan Raden Saleh
Raya Menteng Greater No.53, RT.3/RW.3, Cikini,
Menteng, RT.1/RW.4, Cikini, Kec. Menteng, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10330

3. ANC & Co
Graha Mobilkom, Lantai 3, Jalan Raden Saleh
Raya Menteng Greater No.53, RT.3/RW.3, Cikini,
Menteng, RT.1/RW.4, Cikini, Kec. Menteng, Kota
Central Jakarta, Jakarta Capital Special Region
10330

Notaris Notary

1. Dessi, S.H., M.Kn
Jl. Delima Raya, RT.2/RW.5, Malaka Sari, Kec. Duren
Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 13460

1. Dessi, S.H., M.Kn
Jl. Delima Raya, RT.2/RW.5, Malaka Sari, Kec.
Duren Sawit, East Jakarta, Jakarta Capital Special
Region 13460

2. Andy Pratomo, S.H.,
Pamulang Permai I C 45 No. 12, Tangerang Selatan

2. Andy Pratomo, S.H.,
Pamulang Permai I C 45 No. 12, South Tangerang

3. Prof. Dr. Suparji Ahmad
Jl. Sisingamangaraja No.2, RT.2/RW.1, Selong, Kec.
Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12120

3. Prof. Dr. Suparji Ahmad
Jl. Sisingamangaraja No.2, RT.2/RW.1, Selong, Kec.
Kby. Baru, South Jakarta, Jakarta Capital Special
Region 12120

4. Ashoya Ratam, S.H., M.Kn
Jl. Suryo No.54, RT.4/RW.4, Rw. Bar., Kec. Kby.
Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12180

4. Ashoya Ratam, S.H., M.Kn
Jl. Suryo No.54, RT.4/RW.4, Rw. Bar., Kec. Kby.
Baru, South Jakarta, Jakarta Capital Special Region
12180

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS

PENGHARGAAN

AWARDS



TOP GRC (Governance, Risk and Compliance) Award 2019
Tanggal: 22 Agustus 2019
Penyelenggara: Majalah Top Business
Penghargaan: Predikat #3 Stars
Date: August 22, 2019
Organizer: Top Business Magazine
Award: Predicate # 3 Stars



Infobank BUMN Award 2019
Tanggal: 25 Oktober 2019
Penyelenggara: Majalah Infobank
Penghargaan: The Best State Owned Enterprise Awards (SOE) 2019 dengan predikat BUMN "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan 2018
Date: October 25, 2019
Organizer: Infobank Magazine
Award: The Best State Owned Enterprise Awards (SOE) 2019 with the title of BUMN "Very Good" for its 2018 Financial Performance



SNI Award 2019
Tanggal: 20 November 2020
Penyelenggara: Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Penghargaan: Peringkat Perak
Date: 20 November 2020
Organizer: National Standardization Body (BSN)
Award: Silver Rank



Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) 2019
Tanggal: 4 Desember 2020
Penyelenggara: Kementerian Perdagangan
Penghargaan: 1 dari 13 perusahaan penerima penghargaan baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)
Date: December 4, 2020
Organizer: Ministry of Trade
Award: 1 out of 13 companies receiving awards from both Foreign Investment (PMA) and Domestic Investment (PMDN)



Investor Award 2019
Tanggal: 12 Desember 2020
Penyelenggara: Majalah Investor
Penghargaan: BUMN Terbaik 2019 Bidang Non Keuangan Sektor Industri Kertas, Percetakan dan Penerbitan
Date: 1 December 12, 2020
Organizer: Investor Magazine
Award: Best BUMN 2019 in Non-Financial Sector, Paper Industry Sector, Printing and Publishing

SERTIFIKASI CERTIFICATIONS



Sertifikat ISO 9001:2015

Sertifikasi ini diperoleh sebagai bukti bahwa Peruri telah memenuhi standar internasional penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM). Peruri telah tersertifikasi standar internasional SMM sejak 24 Februari 1998 dan pada 2018 telah dilakukan *upgrade* ISO 9001 versi 2015. Badan pemberi: PT Soci t  G n rale de Surveillance (SGS) Indonesia. Waktu diperoleh: 4 Oktober 2019. Masa berlaku: 7 Agustus 2021.

ISO 9001:2015 Certification

This certification proves that Peruri has met the international standard in the application of Quality Management System (QMS). Peruri has been certified on QMS international standard since February 24, 1998 and has been upgraded to ISO 9001 version 2015 in 2018. Issuer: PT Soci t  G n rale de Surveillance (SGS) Indonesia. Issued on October 4, 2019. Valid until August 7, 2021.



Sertifikat OHSAS 18001:2007

Sertifikasi ini diperoleh sebagai bukti bahwa Peruri telah memenuhi standar internasional penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). Peruri telah tersertifikasi standar internasional SMK3 sejak 20 Maret 2013. Badan pemberi: PT Soci t  G n rale de Surveillance (SGS) Indonesia. Waktu diperoleh: 12 Oktober 2018. Masa berlaku: 11 Maret 2021.

OHSAS 18001:2007 Certification

This certification proves that Peruri has met the international standard in the application of Occupational Health and Safety Management System. Peruri has been certified on standard since March 20, 2013. Issuer: PT Soci t  G n rale de Surveillance (SGS) Indonesia. Issued on October 12, 2018. Valid until March 11, 2021.



Sertifikasi ISO 14001:2015

Sertifikasi ini diperoleh sebagai bukti bahwa Peruri telah memenuhi standar internasional penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML). Peruri telah tersertifikasi standar internasional SML sejak 6 Maret 2013 dan pada 2018 telah dilakukan *upgrade* ISO 14001 versi 2015. Badan pemberi: PT Soci t  G n rale de Surveillance (SGS) Indonesia. Waktu diperoleh: 6 Maret 2019. Masa berlaku: 6 Maret 2022.

ISO 14001:2015 Certification

This certification proves that Peruri has met the international standard in the application of Environmental Management System (EMS). Peruri has been certified on this standard since March 6, 2013 and has been upgraded to ISO 14001 version 2015 in 2018. Issuer: PT Soci t  G n rale de Surveillance (SGS) Indonesia. Issued on March 6, 2019. Valid until March 6, 2022.



Sertifikat ISO 14298:2013

Sertifikasi ini diperoleh sebagai bukti bahwa Peruri telah memenuhi standar internasional penerapan Management of Security Printing Processes. Standar ISO 14298:2013 merupakan penyempurnaan dari standar High Security Management System for Secure Printing CWA 14641:2009. Sertifikat CWA 14641:2009 sebelumnya telah berhasil diperoleh Peruri pada 2012 berdasarkan ISO 14298:2013 dalam ruang lingkup proses produksi Uang Kertas (Banknotes) dan produksi Kertas Berharga Non Uang (Dokumen Sekuriti). Peruri telah berstandar Governmental Level. Badan pemberi: INTERGRAF (The European Federation for Print & Digital Communication). Waktu diperoleh: 22 Januari 2016 (Banknotes), 12 Mei 2016 (Dokumen Sekuriti). Masa berlaku: 27 Oktober 2021.

ISO 9001:2008 Certification

This certification proves that Peruri has met the international standards in Management of Security Printing Processes. ISO 14298: 2013 is a refinement of the High Security Management Standard System for Secure Printing CWA 14641: 2009. Previously, Peruri has successfully obtained CWA 14641:2009 Certification in 2012 based on ISO 14298:2013 in the Scope of production process Banknotes and production Paper Non-currency (Security Documents). Peruri has been standardized at Governmental Level. Issuer: INTERGRAF (The European Federation for Print & Digital Communication). Issued on January 22, 2016 (Blanknotes), May 12, 2016 (Security Documents). Valid until October 27, 2021.



Sertifikat ISO 28000:2007/SNI ISO 28001:2009

Sertifikasi ini diperoleh sebagai bukti bahwa Konsorsium Perum Peruri yang terdiri dari 3 perusahaan, yakni Perum Peruri, PT Kertas Padalarang dan PT Pura Nusapersada telah memenuhi standar internasional Sistem Manajemen Pengamanan Rantai Pasokan dalam lingkup pengadaan pita cukai, di antaranya penyedia kertas banderol, pembuatan hologram dan pelekatnya pada kertas banderol, pencetakan pita cukai dan pengiriman produk pita cukai ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Badan pemberi: PT Sucofindo. Waktu diperoleh: 6 Agustus 2018. Masa berlaku: 5 Agustus 2021.

ISO 28000:2007/SNI ISO 28001:2009 Certification

This certification proves that Peruri Consortium that consists of 3 companies, namely Peruri, PT Kertas Padalarang and PT Pura Nusapersada has met the international standards in Management System Supply Chain Safety. The scope is procurement of excise stamps, including the provider of paper tags, making holograms and adhesives on the banderol paper, ribbon printing and product delivery to the Directorate General of Customs and Excise. Issuer: PT Sucofindo. Issued on August 6, 2018. Valid until August 5, 2021.



Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Perkap No. 24 Tahun 2007

Sertifikasi ini diperoleh sebagai bukti bahwa Peruri telah memenuhi standar pada elemen-elemen pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan. Sertifikasi ini menjamin dipenuhinya sistem pengamanan perusahaan di mana Peruri merupakan salah satu Objek Vital Nasional yang harus memiliki sistem pengamanan yang baik. Saat ini Peruri telah tersertifikasi pada level Silver yang didapatkan pada 2017.

Badan pemberi: Kepolisian Republik Indonesia
Waktu diperoleh: 22 Maret 2017
Masa berlaku: 22 Maret 2020

Security Management System Certification of Perkap No. 24 Year 2007

This certification proves that Peruri has met the standards specified in the Regulations of Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 24 of 2007 on the System Security Management. This certification ensures the fulfillment of security system at Peruri as one of the Vital Objects National system that must have a reliable system of security. The level Peruri that achieved in 2017 was Silver level.

Issuer: The Police Force of Republic Indonesia
Issued on March 22, 2017
Validity period March 22, 2020



Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005)

Sertifikasi ini diperoleh sebagai bukti bahwa telah memenuhi standar kompetensinya sebagai laboratorium pengujian dengan menerapkan secara konsisten Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi dengan nomor registrasi No. LP-1084-IDN.

Badan pemberi: Komite Akreditasi Nasional
Waktu diperoleh: 16 Februari 2017
Masa berlaku: 15 Februari 2021

Certificates of SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005)

The certificate proves that Peruri has met the standards competence as a laboratory tester via the consistent implementation of General Requirements for Competence of Testing Laboratory and Calibration with registration No LP -1084-IDN.

Issuer: The National Accreditation Committee
Issued on February 16, 2017
Validity period February 15, 2021



Sertifikasi ISO 27001/Intertek

Sertifikasi ini diperoleh sebagai bukti bahwa Peruri telah memenuhi ketentuan Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk operasional *Certificate Authority & Tanda Tangan Digital (Digital Signatures)* dan *Network Lini B Services & Operational Data Center Facilities* at Perum Peruri

Badan Pemberi: Intertek
Waktu Diperoleh: 26 November 2019, 6 Maret 2020
Masa Berlaku: 26 November 2022, 6 Maret 2023

ISO 27001/Intertek certification

This certification was obtained as a proof that Peruri has complied with the provisions of the Information Security Management System for the operation of the Certificate Authority & Digital Signatures and Network Lini B Services & Operational Data Center Facilities at Perum Peruri

Issuer: Intertek
Issued On November 26, 2019, March 6, 2020
Valid Until November 26, 2022, March 6, 2020



Registered at Ministry of
Communication & Information Technology
as PSP no. 0227/LEJUN/PSP/1920/18
as PSrE SK no. 968 Tahun 2019
and Certified PSrE institution no 790 Tahun 2019

Sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI melalui SK No. 790 tahun 2019

Sertifikasi ini menunjukkan bahwa Peruri sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tersertifikasi sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) untuk dapat menerbitkan tanda tangan digital.

Certification from the Ministry of Communication and Information Technology (RI) through Decree No. 790 in 2019

This certification shows that Peruri is the only State-Owned Enterprise (SOE) that is certified as an Electronic Certification Provider (PSrE) to be able to issue digital signatures.

DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK DAN KANTOR JARINGAN OPERASIONAL, SERTA INFORMASI KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

LIST OF ADDRESSES OF SUBSIDIARIES AND OPERATIONAL NETWORK OFFICES, AND INFORMATION ON BRANCH AND REPRESENTATIVE OFFICES

Kantor Pusat Peruri

Peruri Headquarters

Kantor Pusat/Headquarters

Jl. Palatehan Nomor 4, Blok K-V Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia.

Tlp : (021) 7395000

Fax : (021) 7221567

Email : contact@peruri.co.id

Website : www.peruri.co.id



Entitas Anak

Subsidiaries

- **PT Peruri Wira Timur (PWT)**

Jalan Ahmad Yani No. 119, Surabaya, Jawa Timur

Tlp : (031) 8438843

Fax : (031) 8417033

Emai : depjul@peruriwiratimur.co.id

Website : www.peruriwiratimur.co.id

- **PT Peruri Digital Security (PDS)**

Jalan Sunan Kalijaga No. 11, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tlp : (021) 29642737

Fax : -

Email : info@peruridigit.co.id

Website : www.peruridigit.co.id:8080

- **PT Kertas Padalarang**

Jalan Cihaliwung No. 181, Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat

Tlp : (022) 6809315, 6809393

Fax : (022) 6809284

Email : office@kertas-padalarang.co.id

Website : www.kertas-padalarang.co.id

- **PT Peruri Properti (Pepro)**

Jalan Sunan Kalijaga No. 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tlp : (021) 7257889

Fax : -

Email : pepro@peruriproperty.co.id

Website : www.peruriproperty.co.id

Entitas Anak Tidak Langsung

Indirect Subsidiaries

PT Cardsindo Tiga Perkasa

Jalan Raya Mekarjaya No. 121, Kawasan Industri Mekarjaya Raya Mauk KM 7, Sepatan Raya, Tangerang 15131

Tlp : (021) 59370576

Fax : -

Email : Sales - sales@cardsindo.com,

Support - mkt-support@cardsindo.com

Website : www.cardsindo.com

Perusahaan Afiliasi

Affiliate

PT Sicpa Peruri Securink

Jalan Tarum Barat, Kawasan Produksi Peruri, Desa Parungmulya, Ciampel, Karawang, Jawa Barat

Tlp : (0267) 440911

Fax : (0267) 440913

Email : -

Website : www.sicpa.com,

www.sicpa.com/offices/indonesia-kebayoran-baru

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE

Perusahaan memiliki situs web resmi dengan alamat www.peruri.co.id. Peruri telah melengkapi situs web Perusahaan dengan beberapa informasi penting, yang senantiasa diperbaharui secara berkala. Situs web ini juga berisi informasi seputar korporasi, produk dan jasa, hingga berita terkini.

Informasi yang diberikan meliputi:

1. Informasi terkini dari Perusahaan;
2. Profil Perusahaan;
3. Produk;
4. Pemegang Saham;
5. Laporan keuangan;
6. Analisis Kinerja Keuangan;
7. Profil Dewan Pengawas dan Direksi.

Situs web Peruri menjadi portal digital resmi korporasi yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perusahaan kepada khalayak luas.

The Company has an official website with the address www.peruri.co.id. Peruri has provided the Company's website with some important information, which is updated regularly. This website also contains information about corporations, products and services, to the latest news.

The information provided includes:

1. Current information from the Company;
2. Company Profile;
3. Products;
4. Shareholders;
5. Financial statements;
6. Financial Performance Analysis;
7. Profile of the Board of Supervisory and Board of Directors.

The Peruri website is an official corporate digital portal that can be accessed openly, with the aim of providing comprehensive information about the Company to a wide audience.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KOMITE

EDUCATION AND/OR TRAINING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS AND COMMITTEES

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Tempat/Tanggal Date/Place
Dewan Pengawas Supervisory Board		
Rizal Affandi Lukman (Ketua Dewan Pengawas) (Chairman of Supervisory Board)	Indonesia – Africa Infrastructure Dialogue (IAID)	Bali 20-21 Agustus 2019 August 20-21, 2019
Dwi Pranoto (Anggota Dewan Pengawas) (Member of Supervisory Board)	High Security Printing (HSP) Asia	Yokohama, Jepang 25-28 November 2019 November 25-28, 2019
	Embracing GRC (Governance Risk Compliance) in Industry 4.0	Bali 5-6 Desember 2019 December 5-6, 2019
Muhammad Yusuf Ateh (Anggota Dewan Pengawas) (Member of Supervisory Board)	High Security Printing (HSP) Asia	Yokohama, Jepang 25-28 November 2019 November 25-28, 2019
Direksi Board of Directors		
Dwina Septiani Wijaya (Direktur Utama) (President Director)	Seminar Auditor's Talk - Penguat Peran SPI BUMN	Jakarta 9 Mei 2019 May 9, 2019
	4 th Currency Technology Symposium GnD	Munich 15-16 Juli 2019 July 15-16, 2019
	Seminar Nasional Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju	Jakarta 9 Agustus 2019 August 9, 2019
Fajar Rizki (Direktur Pengembangan Usaha) (Director of Business Development)	TRUSTECH 2019. The Global Event Dedicated to Payment, Identification and Security.	Cannes, France 26-28 November 2019 November 26-28, 2019
Winarsih Budiriani (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	International Leadership Seminar "Transformational Leadership through Catalytic Collaboration in the Digital Era"	Medan 31 Juli 2019 July 31, 2019
Saiful Bahri (Direktur Operasi) (Director of Operation)	15 th Symposium and Exhibition on The ICAO Traveller Identification Programme (TRIP)	Montreal-Canada 25-28 Juni 2019 June 25-28, 2019
	4 th Currency Technology Symposium GnD	Munich, 15-16 Juli 2019 July 15-16, 2019
	19 th Technical Meeting of Mints in ASEAN (TEMAN) Conference	Singapura, 5 -7 Juli 2019 Singapore, July 5-7, 2019
	Pacific Rim Banknote Conference XXIII 2019	Filipina 17-20 November 2019 November 17-20, 2019
	High Security Printing Asia Conference	Yokohama, Jepang, 25-26 November 2019 November 25-26, 2019
Komite Audit Audit Committee		
Sufi Safitri Nurwidiati	Embracing GRC (Governance Risk Compliance) in Industry 4.0	Bali 5-6 Desember 2019 December 5-6, 2019
Yanto Sugiyanto	Embracing GRC (Governance Risk Compliance) in Industry 4.0	Bali 5-6 Desember 2019 December 5-6, 2019
Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko		
Teguh Widhyo Utomo	Risk Based Budgeting	Balai Subono Matofani

UNIVERSITAS TARULIMANAGARA

UNIVERSITAS TARULIMANAGARA



UNIVERSITAS INDONESIA



DEPTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SANTAN LAMPUNG

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



AB 000000



04

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S DISCUSSION AND ANALYSIS

Tahun Buku 2019 juga menjadi babak baru bagi Peruri dalam memperluas segmen usahanya melalui berbagai inovasi layanan berbasis digital selaras dengan semangat Peruri yang enerjik, kokoh dan inovatif.

2019 Fiscal year was a new stage for Peruri to expand its business segment through several digital based innovation in line with Peruri spirit namely energetic, strong, and innovative.



TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

ECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok, membuat International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2019 sebesar 0,2% dari 3,2% menjadi hanya 3%.

Trade war between United States (US) with China, make International Monetary Fund (IMF) cut projections global economic growth for 2019 amounted to 0.2% from 3.2% to only 3%.



TINJAUAN EKONOMI GLOBAL

Di sepanjang 2019 perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok yang masih terus berlanjut, terus memicu dinamika ketidakpastian perekonomian global. Kondisi tersebut membuat International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2019 sebesar 0,2% dari 3,2% menjadi hanya 3%. Ini merupakan angka pertumbuhan terendah setelah ekonomi global mengalami ekspansi usai terpapar krisis di 2008. Kondisi ekonomi global yang melambat ini menyebabkan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed) menurunkan suku bunga kebijakan. Sepanjang 2019, The Fed menurunkan suku bunga kebijakan Federal Funds Rate (FFR) sebanyak 75 bps dari 2,50% menjadi 1,75% untuk mengantisipasi dampak dari perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian AS.

GLOBAL ECONOMIC REVIEW

Throughout 2019, the ongoing trade war between the United States (US) and China continues to trigger the dynamics of global economic uncertainty. These conditions prompted the International Monetary Fund (IMF) to cut its projection for global economic growth for 2019 by 0.2% from 3.2% to only 3%. This was the lowest growth rate after the global economy expanded after being exposed to the crisis in 2008. This slowing global economic condition caused the central bank of the United States, The Federal Reserve (The Fed) to lower its policy rate. Throughout 2019, the Fed lowered the Federal Funds Rate (FFR) policy rate by 75 bps from 2.50% to 1.75% in anticipate the impact of the global economic slowdown on the US economy.

Perekonomian global mulai terlihat kondusif di penghujung 2019, dengan meredanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang memberikan optimisme bagi perekonomian global, khususnya ketika Tiongkok memutuskan untuk melakukan perdagangan dengan AS di sektor pertanian. Optimisme juga terlihat dari pasar keuangan di berbagai negara yang cenderung positif. Demikian pula dengan kondisi geopolitik di Zona Eropa yang terbelit persoalan Brexit mulai menunjukkan kepastian setelah Inggris semakin menunjukkan kecenderungan untuk mengambil keputusan bulat keluar dari Uni Eropa.

Menyikapi perkembangan perekonomian global tersebut, Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 Desember 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,25% dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,75%. Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perekonomian global yang melambat. Strategi operasi moneter terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas, khususnya di pergantian tahun dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang akomodatif ditempuh untuk mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus finansial yang masih di bawah optimal dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Respons bauran kebijakan tersebut dapat menjaga stabilitas perekonomian dan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam memitigasi risiko global.

Bank Indonesia ke depannya akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik dalam memanfaatkan ruang bauran kebijakan yang akomodatif untuk menjaga tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal, serta turut mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait terus diperkuat guna mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata dan aliran masuk modal asing, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA).

By the end of 2019, the global economic condition began to look conducive and optimistic, as the US-China trade war subsided, and especially when China decided to trade with the US in agricultural sector. This optimism was reflected in the financial markets of various countries, which showed positive outlook. In addition, the geopolitical situation in Europe, particularly the Brexit situation, has become more certain after the United Kingdom (UK) showed an increasing tendency to reach a unanimous decision to leave the European Union.

In response to the global economic condition, Bank Indonesia (BI), by the resolution of Board of Governors Meeting (Rapat Dewan Gubernur/RDG) on December 18-19, 2019 has decided to maintain the BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) at 5.00%, the Deposit Facility interest rate at 4.25%, and the Lending Facility interest rate at 5.75%. The monetary policies were still accommodating and consistent with the forecast inflation rate, which was still within the targeted range, while still maintaining external stability and the growth momentum of domestic economy amidst a slowdown in global economic condition. Monetary operations strategies were aimed at maintaining adequate liquidity, especially at the end of the year, and at supporting the transmission of accommodative policy mix.

Meanwhile, the accommodative macroprudential policy encouraged the economic funding to be in line with the sub-optimal financial cycle while still adhering to the principle of prudence. Payment system and financial market deepening policies continued to be strengthened to support the economic growth. The policy mix was expected to be able to maintain economic stability and reinforce Indonesia's economic growth in mitigating global risk.

In the future, Bank Indonesia will closely monitor global and domestic economic development and whether they are able to utilize the accommodative policy mix to curb inflation and maintain external stability while supporting the momentum of economic growth. Coordination between Bank Indonesia and Indonesian Government, particularly the relevant authorities, must be strengthened to retain economic stability, encourage domestic demand, and increase export, tourism, and foreign capital inflows, including Foreign Investment.

BI menyatakan bahwa kemajuan dalam perundingan perdagangan antara AS-Tiongkok berdampak pada menurunnya risiko di pasar keuangan global serta mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing ke negara berkembang. Ke depan, prospek ekonomi global akan dipengaruhi oleh kemajuan *trade deal* AS-Tiongkok, pemanfaatan trade diversion negara berkembang, efektivitas stimulus fiskal dan pelanggaran kebijakan moneter, serta kondisi geopolitik. Prospek pemulihan global tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi domestik dan arus masuk modal asing.

Selama 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan ditopang konsumsi rumah tangga, ekspansi fiskal dan perbaikan ekspor. Perkembangan terkini menunjukkan keyakinan konsumen meningkat bersamaan dengan pola musiman jelang akhir tahun sehingga dapat menopang konsumsi rumah tangga tetap baik. Perkembangan positif ini diperkuat ekspansi fiskal sejalan dengan pola musiman akhir tahun sehingga makin mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2019. Perbaikan ekspor antara lain dipengaruhi naiknya ekspor *pulp*, *waste paper* dan serat tekstil ke Tiongkok, masih kuatnya ekspor besi baja ke Tiongkok dan ASEAN, serta berlanjutnya ekspor kendaraan bermotor ke ASEAN dan Arab Saudi.

Investasi mulai tercatat meningkat di beberapa daerah seperti di Sulawesi terkait hilirisasi nikel dan diperkirakan akan terus meningkat dengan sejumlah kebijakan transformasi ekonomi yang ditempuh Pemerintah dan mulai meningkatnya keyakinan dunia usaha. Investasi bangunan juga terus membaik didorong peningkatan kegiatan konstruksi. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2019 mencapai sekitar 5,1% dan meningkat dalam kisaran 5,1-5,5% pada tahun 2020.

TINJAUAN INDUSTRI DAN PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam keterangannya menyatakan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 juta atau US\$4.174,9. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh

As stated by BI, the progress in US-China trade negotiation has reduced the risk in global financial market and encouraged the continuous inflows of foreign capital to developing countries. Looking ahead, global economic prospect will be influenced by the progress of US-China trade deal, trade diversion utilization by developing countries, effectiveness of fiscal stimuli, the easing of monetary policies, and the geopolitical situation. The prospect of global recovery is very important as it will impact the prospect of domestic economic growth and the inflows of foreign capital.

Throughout 2019, Indonesia's economic growth was maintained thanks to the support of household consumption, fiscal expansion, and export improvement. Recent development showed an increase in customers' confidence at the same time as the end-of-year seasonal consumption pattern, thus maintaining the household consumption at a good level. This positive development was reinforced by fiscal expansion during the end-of-year seasonal pattern, which encouraged economic growth in the 4th quarter of 2019. The improvement in export was influenced by the increase in exports of pulp, waste paper, and textile fibers to China, the strong steel export to China and ASEAN, and the export of motor vehicles to ASEAN and Saudi Arabia.

Investment has started to increase in several regions, such as the downstream processing of nickel, and is expected to continue to rise following a number of economic transformation policies issued by the Government, as well as the increasing confidence in the business sector. Construction investment has also continued to improve as a result of the increasing number of construction activities. All things considered, the overall economic growth in 2019 was approximately 5.1% and is projected to reach 5.1-5.5% in 2020.

OVERVIEW OF NATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH

Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik/BPS) stated that Indonesia's economy in 2019, measured by the Gross Domestic Product (GDP) at current price, managed to reach Rp15,833.9 trillion, whereas GDP per capita was at Rp59.1 million or US\$4,174.9. Indonesia's economic growth in 2019 was 5.02%, lower than the

5,02%, lebih rendah dibanding capaian 2018 sebesar 5,17 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 %. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62 %. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59,00 %, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32 % dan Pulau Kalimantan 8,05 %.

Sejalan dengan revolusi industri 4.0, tren digitalisasi memengaruhi sendi-sendi perekonomian, mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional. Nilai ekonomi digital di Indonesia pada 2015 mencapai US\$8 miliar atau sekitar Rp120 triliun. Angka tersebut tumbuh lebih dari 4 kali lipat pada 2019 menjadi US\$40 miliar atau Rp560 triliun. Pada 2025 diprediksi nilai ekonomi digital di Indonesia akan tumbuh jauh lebih besar atau menjadi US\$133 miliar. Selain nilai ekonomi, Indonesia juga memiliki rasio pertumbuhan ekonomi digital yang lebih cepat dibanding negara lainnya. Menurut laporan Google, Temasek dan Bain, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi digital sebesar 49% sejak 2015. Pertumbuhan tersebut lebih cepat dibanding Vietnam yang berada di posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 38%.

Dalam era perkembangan digitalisasi, menurut Bank Indonesia kelancaran sistem pembayaran tunai maupun nontunai selama 2019 masih tetap terjaga. Posisi Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) per Desember 2019 tumbuh 5,95% (yoy). Sementara itu, transaksi nontunai menggunakan ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit dan Uang Elektronik (UE) posisi Desember 2019 tumbuh 2,45% (yoy), didominasi oleh transaksi nontunai menggunakan Kartu ATM/Debit dengan pangsa 92,92%. Transaksi UE kembali mencatatkan pertumbuhan tinggi mencapai 188,31% (yoy) mengindikasikan preferensi masyarakat terhadap penggunaan uang digital yang terus menguat. Penguatan elektronifikasi transaksi pembayaran terus dilakukan melalui koordinasi lintas otoritas untuk mempercepat perluasan penyaluran bantuan sosial nontunai, memperluas dan mempercepat elektronifikasi transaksi Pemda, serta mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi.

growth in 2018 at 5.17%. In the production sector, Other Service Business Fields contributed the highest growth at 10.55%. Meanwhile, on the expenditure side, the highest growth was contributed by the Consumption Expenditure of Non-Profit Institutions Serving Households (Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga/PK-LNPRT) component at 10.62%. In 2019, the structure of Indonesian economy was dominated spatially by the provinces in Java and Sumatra islands. Java island was the largest contributor to the GDP at 59.00%, followed by Sumatra and Kalimantan at 21.32% and 8.05% respectively.

In line with the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0), digitalization has affected the economy and disrupted conventional functions. The value of Indonesia's digital economy in 2015 was US\$8 billion or Rp120 trillion, and has more than quadrupled in 2019 to US\$40 billion or Rp560 trillion. In 2025, the value of Indonesia's digital economy is predicted to grow exponentially to US\$133 billion. In addition to its economic value, Indonesia's digital economy growth rate is also faster than those of other countries. According to Google, Temasek, and Bain, Indonesia's digital economy has grown 49% since 2015, faster than the growth in the runner-up country, Vietnam, at 38%.

In the digitalization era, according to Bank Indonesia, cash and non-cash payment operations in 2019 kept running smoothly. As of December 2019, Currency in Circulation has grown by 5.95% (yoy) whereas non-cash transaction (ATM, debit card, credit card, and electronic money) has grown by 2.45% (yoy), of which 92.92% was dominated by ATM/debit card transaction. Electronic money transaction has recorded a significant growth of 188.31% (yoy), which indicated an increase in people's preference toward digital money. Electronification of payment transaction continues to be strengthened by inter-authority coordination to expedite the distribution of non-cash assistance, expand and accelerate the electronification of Regional Government transactions, and support the implementation of payment electronification in the transportation sector.

KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN DI 2019

STRATEGIC POLICIES IN 2019



Usaha Peruri dalam meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produksi serta bertransformasi bisnis menjadi perusahaan penjamin sekuriti berbasis digital telah dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang relevan yaitu riset, pengembangan di bidang teknologi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan bisnis digital menjadi salah satu fokus utama Perusahaan pada 2019. Namun, dalam pengembangan bisnis inti, Peruri tetap mempersiapkan lini produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik serta pasar internasional dengan kualitas terbaik.

In order to increase production capacity, improve production quality, and transform its business to be a digital-based document security company, Peruri has carried out a series of relevant activities such as research and development in the field of technology and human resources. The development of digital business is one of the main focuses of the Company in 2019. However, Peruri continues to develop its core business by preparing a production line that is capable to meet the demands of both domestic and international markets with the best quality products.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OVERVIEW OF BUSINESS SEGMENT OPERATIONS

Dalam laporan keuangan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan, pengelompokan segmen usaha Perusahaan ditentukan berdasarkan sektor perproduk. Untuk dapat menggambarkan segmen usaha, Perusahaan menggunakan struktur dan sumber pendapatan.

Sementara itu, tinjauan operasi per segmen usaha di Perusahaan membahas tentang pencapaian kinerja produksi dan keuangan terhadap target yang telah ditentukan pada awal tahun anggaran 2019, sebagaimana penjelasan berikut ini.

REALISASI PENYERAHAN PRODUKSI

Dalam proses produksi, bahan material yang digunakan adalah komponen lokal dan impor. Perusahaan menjalankan kegiatan usaha pencetakan uang Rupiah, baik kertas maupun logam, dengan pangsa bisnis selama tahun 2019 sebesar 69,82%. Sedangkan sebesar 30,18% dari kegiatan usahanya pencetakan dokumen sekuriti non uang dan lainnya.

Di bawah ini, rincian hasil penyerahan produksi Perusahaan pada 2019 dalam satuan jutaan:

In the financial statement for the financial year 2019 audited by HLB Hadori Sugiarto Adi & Partners Public Accounting Firm, the Company business segment grouping is determined based on product sector. To provide a better picture of its business segments, the Company uses the structure and sources of revenue.

Meanwhile, overview of the operations of each business segment will describe production and financial performance achievements based on the target set at the beginning of the financial year 2019, as explained below.

PRODUCTION DELIVERY

In our production process, we use local and imported materials. The company engages in the printing of both Rupiah banknotes and coins, with a business share during 2019 of 69.82%. Meanwhile, 30.18% of the business activity was printing non-money and other security documents.

Below are the details of production delivery of the Company in 2019 (in million):

Jenis Produksi Production Type	Satuan Unit	Realisasi 2018 Realization in 2018	RKAP 2019 Planned for 2019	Realisasi 2019 Realization in 2019	(%) Pencapaian Achievement	2019/2018 % Naik/(Turun) % Increase/ (Decrease)
Uang Kertas Banknotes	Bilyet Bills	8.877,75	11.838,94	11.558,00	97,63	30,19
Uang Logam Coins	Keping Pieces	881,66	999,31	999,31	100,00	13,34
Non Uang - DN: Non-Currency - Domestic:						
Pita Cukai Excise Stamps	Lembar Sheets	169,63	158,66	182,60	115,09	7,64
Paspor & Buku Passports & Books	Buku Books	4,06	3,40	3,72	109,23	(8,41)
Web & Sheet Web & Sheet	Rupiah	211.502,35	153.809,09	221.508,53	144,02	4,73
Logam Non Uang Non-Currency Metal	Buah Pieces	0,005	0,01	0,01	47,40	27,99
Digital	Rupiah	-	75.030,00	1.760,92	2,35	100,00
Non Uang - LN : Non-Currency - International:						
Paspor & Buku Passports & Books	Buku Books	0,5	0,50	0,50	100,00	-
Web & Sheet Web & Sheet	Rupiah	94.271,78	115.489,66	17.202,02	14,89	(81,75)
Logam Non Uang Non-Currency Metal	Buah Pieces	-	500,00	-	-	-

Uang Kertas

Dalam memproduksi uang kertas, Perusahaan menerapkan teknologi cetak dengan fitur sekuriti tinggi, dimulai dari desain, kertas, tinta maupun proses cetaknya. Fitur sekuriti yang dikenal oleh masyarakat umum dan dapat dilihat dengan mata adalah penggunaan *watermark*, hasil cetak intaglio, benang pengaman dan tinta sekuriti. Selain fitur-fitur sekuriti yang mudah dikenal oleh masyarakat umum tersebut, juga diterapkan unsur pengaman tertentu yang hanya dapat diketahui oleh petugas laboratorium atau forensik.

Sepanjang 2019, realisasi penyerahan produksi uang kertas tahun 2019 sejumlah 11.558,00 juta bilyet yang terdiri atas penyerahan produksi *carry over* pesanan TA 2018 sebesar 879,98 juta bilyet dan realisasi penyerahan produksi murni atas pesanan TA 2019 sejumlah 10.678,02 juta bilyet atau mencapai 97,63% dari target RKAP tahun 2019 sejumlah 11.838,94 juta bilyet. Bila dibandingkan dengan realisasi penyerahan produksi uang kertas tahun 2018 sejumlah 8.877,75 juta bilyet mengalami peningkatan sebesar 30,19%.

Uang Logam

Ukuran pengamanan atau sekuriti pada cetakan uang logam berbeda dengan uang kertas yang memiliki banyak fitur. Aspek sekuriti pencetakan uang logam pada prinsipnya lebih banyak ditentukan oleh kualitas bahan, kerumitan disain dan ketajaman pencetakan. Realisasi penyerahan produksi pesanan uang logam tahun 2019 sejumlah 999,31 juta keping atau mencapai 100,00% dari target RKAP tahun 2019. Bila dibandingkan dengan realisasi penyerahan produksi uang logam tahun 2018 sejumlah 881,66 juta keping mengalami peningkatan sebesar 13,34%.

Non Uang

Selain memproduksi uang kertas dan uang logam, Perusahaan memproduksi produk-produk non uang yang terdiri dari dokumen sekuriti non uang dan logam non uang.

1. Pita Cukai dan MMEA

Pita cukai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan bukti pembayaran cukai atau Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Pencetakan produk yang dipercayakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Perusahaan memiliki unsur sekuriti yang cukup handal dalam rangka meminimalkan pemalsuan. Pita cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak.

Banknotes

In the production of banknotes, the Company utilizes high-security printing technology, from its design and paper to inks and printing process. The well-known security features that can be seen with bare eyes are watermark, intaglio printing, security thread, and security ink. In addition, the Company also uses a certain security element that can only be detected by forensic or laboratory staff.

Throughout 2019, the realized production delivery of Banknotes was 11,558.00 million bills, of which 879.98 million bills were multi-year carry over orders from the financial year 2018 and 10,678.02 million bills were the realized production delivery of the financial year 2019. The production delivery managed to achieve 97.63% of the planned target of 2019 (11,838.94 million bills), an increase of 30.19% compared to the realized production delivery of Banknotes in 2018 (8,877.75 million bills).

Coins

Security measures for coins are different and much simpler than those for banknotes. The security elements are mostly determined by the quality of the material, the complexity of the design, and the sharpness of the printing. The realized production delivery of Coins in 2019 was 999.31 million pieces, or 100.00% of the planned target of 2019, an increase of 13.34% compared to the realized production delivery of Coins in 2018 (881.66 million pieces).

Non-Currency

In addition to banknotes and coins, the Company also produces non-currency products, i.e. non-currency security documents and non-currency metal.

1. Excise Stamps

The excise stamps issued by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia is a proof of excise payment for excise goods, which include tobacco products and beverages containing ethyl alcohol (Minuman Mengandung Etil Alkohol/MMEA). The Company implements high-security measures to these products to minimize forgery. Excise stamps are printed by order of the Directorate General of Customs and Excise based on the tax value imposed on the excise goods.

Pada 2019, realisasi penyerahan produksi pita cukai dan MMEA sejumlah 182,60 juta lembar atau mencapai 115,09% dari rencana kerja tahun 2019 sejumlah 158,66 juta lembar. Bila dibandingkan dengan realisasi penyerahan produksi pita cukai dan MMEA RI tahun 2018 sejumlah 169,63 juta lembar mengalami peningkatan sebesar 7,64%.

2. Paspur dan Buku

Paspur Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu dokumen sekuriti negara yang penting atau vital, selama ini telah digunakan sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia bagi para pemilikinya dan berfungsi sebagai dokumen pendukung perjalanan khususnya ke luar negeri atau antar negara. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) menugaskan pencetakan dan pembuatan Paspur RI kepada Peruri karena produknya selalu mengutamakan unsur sekuriti. Sedangkan untuk penugasan produk buku kepada Peruri umumnya terdiri dari produk buku KIR dan buku pelaut. Saat ini, Perusahaan tidak hanya mencetak pesanan Paspur RI dari Kemenkumham RI tetapi juga pesanan paspor dari luar negeri, yaitu dari Sri Lanka.

Realisasi penyerahan produksi paspor dan buku dalam negeri pada 2019 sejumlah 3,72 juta buku atau mencapai 109,23% dari target sejumlah 3,40 juta buku. Angka realisasi tersebut seluruhnya adalah jumlah produksi buku paspor. Jika dibandingkan dengan realisasi penyerahan produksi paspor tahun 2018 sejumlah 4,06 juta buku mengalami penurunan sebesar 8,41%.

Selain memproduksi pesanan paspor dalam negeri, selama 2019 Perusahaan juga memproduksi pesanan paspor luar negeri yaitu paspor negara Sri Lanka sejumlah 500 ribu buku atau memenuhi 100% dari target RKAP 2019.

Jika dibandingkan dengan produksi pesanan paspor luar negeri tahun 2018, produksi paspor luar negeri tahun 2019 cenderung stabil, tidak terdapat kenaikan maupun penurunan, yaitu dengan angka produksi yang sama persis sebesar 500 ribu buku.

3. Web dan Sheet

Sektor *Web and Sheet* terdiri dari dokumen keimigrasian, meterai dan dokumen pertanahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019. Selain itu, Perusahaan juga memproduksi cetakan-cetakan sekuriti lain yang dipesan dari dalam negeri maupun luar negeri.

In 2019, the realized production delivery of Excise Stamps was 182.60 million sheets, or 115.09% of the planned target (158,66 million sheets), an increase of 7.64% compared to the production delivery in 2018 (169.63 million sheets).

2. Passports and Books

Indonesian passport is one of the most important state security documents. Passport is used as a proof of Indonesian citizenship for residents traveling overseas. Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia entrusts the creation and printing of the Indonesian passport to the Company for its security measures. Books printed by Peruri include KIR (motor vehicle inspection) book and seaman's book. In addition to Indonesian passport, the Company also receives orders to print Sri Lanka passport.

The realized production delivery for Indonesian passport in 2019 was 3.72 million books, or 109.23% of the planned target of 3.40 million books. However, compared to the production delivery in 2018 of 4.06 million books, the number was 8.41% lower in 2019.

In addition to Indonesian passport, in 2019 the Company also produced 500 thousand Sri Lankan passport books, or 100% of the planned target for 2019.

The production of foreign passports in 2018 and 2019 were stable, with 500 thousand passport books produced respectively.

3. Web and Sheet

Web and Sheet consists of immigration documents, duty stamps, and land certificates in accordance with Government Regulation No. 6 of 2019. The Company also caters to domestic and international markets with other security printings.

Selama 2019, realisasi penyerahan produk pada sektor web & sheet dalam negeri secara total senilai Rp221,51 miliar atau mencapai 144,02% dari target senilai Rp159,81 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi produksi *Web and Sheet* pada 2018 senilai Rp211,50 miliar, mengalami peningkatan sebesar 4,73%.

Selain produk *web* dan *sheet* dalam negeri, Perusahaan juga memproduksi web dan sheet luar negeri yang dikelompokkan kedalam produk-produk sekuriti lainnya luar negeri.

Berikut ini adalah rincian *Web* dan *Sheet* dalam negeri dan luar negeri dalam satuan jutaan:

Jenis Produksi Production Type	Satuan Unit	Realisasi 2018 Realization in 2018	RKAP 2019 Planned for 2019	Realisasi 2019 Realization in 2019	(%) Pencapaian Achievement	2017/2016% Naik/(Turun) Increase/ (Decrease)
Dokumen Keimigrasian Immigration Documents	Lembar Sheets	0,20	-	0,71	100,00	249,17
Meterai Duty Stamps	Keping Pieces	660,10	460,00	616,80	134,09	(6,56)
Dokumen Pertanahan Land Certificates	Set Sets	9,72	8,00	11,14	139,25	14,65
Produk Sekuriti Lain DN Other Security Products - Domestic	Rupiah	33.092,81	26.300,29	35.987,81	136,68	8,75
Produk Sekuriti Lain LN: Other Security Products - International:						
- Pita Cukai Nepal Nepalese Excise Stamps	Rupiah	33.278,87	108.942,16	13.866,97	12,73	(58,33)
- Uang Kertas RS Nepal Nepalese RS Banknotes	Rupiah	60.443,45	-	2.454,82	100,00	(95,94)
- Prangko Nepal Nepalese Postal Stamps	Rupiah	549,46	6.547,50	880,22	13,44	60,20
Total Produk Sekuriti LN Total Security Products - International	Rupiah	94.271,78	115.489,66	17.202,02	14,89	(81,75)

a. Dokumen Keimigrasian
Penugasan produksi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk dokumen keimigrasian kepada Peruri terdiri dari produk visa, *voucher visa*, stiker legalisasi, stiker izin tinggal dan *exit permit*.

Pada 2019, Perusahaan melakukan penyerahan produksi atas pesanan dokumen keimigrasian sejumlah 0,71 juta lembar. Jika dibandingkan dengan realisasi penyerahan produksi dokumen keimigrasian pada 2018 sejumlah 0,20 juta lembar, mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 249,17%.

b. Meterai
Peruri juga dipercaya untuk mencetak meterai Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh

In 2019, the realized product delivery for domestic Web and Sheet was Rp221.51 billion, or 144.02% of the planned target (Rp159.81 billion), an increase of 4.73% compared to the realized Web and Sheet product delivery in 2018 (Rp211.50 billion).

In addition to domestic Web and Sheet products, the Company also delivered Web and Sheet products for international markets, categorized under other security products - international.

The table below details the Web and Sheet product delivery for both domestic and international markets (in millions):

a. Immigration Documents
The Ministry of Foreign Affairs has appointed Peruri to produce various immigration documents, which include visa, visa voucher, legalization sticker, residence permit sticker, and exit permit sticker.

In 2019, the production delivery of Immigration Documents was 0.71 million sheets, a significant increase of 249.17% compared to the production delivery in 2018 of 0.20 million sheets.

b. Duty Stamps
Peruri has also been entrusted with the printing of the duty stamps of the Republic of Indonesia,

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai bukti keabsahan dan legalitas dari suatu perjanjian. Kepercayaan yang diberikan kepada Perusahaan, mengingat dokumen sekuriti yang dicetak oleh Perusahaan mengandung unsur-unsur *security feature*, diantaranya adalah penggunaan hologram sekuriti dan teknik cetak intaglio, sebagaimana yang terdapat pada uang kertas Republik Indonesia. Meterai yang saat ini beredar di Indonesia memiliki nilai Rp3.000 dan Rp6.000.

Sepanjang 2019, Perusahaan melakukan penyerahan produksi atas pesanan meterai sejumlah 616,80 juta keping atau 134,09% dari target RKAP 2019 sejumlah 460,00 juta keping. Jika dibandingkan dengan realisasi penyerahan produksi meterai pada 2018 sejumlah 660,10 juta keping, mengalami penurunan sebesar 6,56%.

c. Dokumen Pertanahan

Dokumen pertanahan dalam bentuk sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tanda bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah adalah salah satu dokumen negara yang vital. Atas dasar itulah BPN mempercayakan pencetakan dokumen sertifikat tanah kepada Perusahaan. Sertifikat tanah yang dicetak oleh Perusahaan mempunyai ciri khusus yang lebih mengutamakan unsur pengamanan atau *security feature* sehingga dapat memperkecil risiko pemalsuan.

Sepanjang 2019 Perusahaan melakukan penyerahan produksi atas pesanan sertifikat tanah sejumlah 11,14 juta set atau mencapai 139,25% dari target RKAP 2019 sejumlah 8,00 juta set. Tingginya pencapaian realisasi terhadap target disebabkan karena meningkatnya perolehan pesanan produk sertifikat tanah dari pelanggan. Jika dibandingkan dengan realisasi penyerahan produksi sertifikat tanah pada 2018 sejumlah 9,72 juta set atau mengalami kenaikan 14,65%.

d. Produk Sekuriti Lainnya

Dokumen sekuriti kertas berharga non uang lainnya yang biasa ditugaskan kepada Peruri antara lain adalah prangko, ijazah pendidikan, transkrip nilai, sertifikat SCI Sucofindo, serta produk luar negeri seperti pita cukai dan prangko Nepal serta uang kertas RS Nepal.

issued by the Directorate General of Taxation, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, as proof of validity and legality of agreements. The Company was chosen for this task as it is able to implement security features such as security hologram and intaglio printing technique, the same features as those found in Indonesian banknotes. There are currently two types of duty stamps in Indonesia, Rp3,000 and Rp6,000.

In 2019, the Company has delivered 616.80 million pieces of duty stamps, or 134.09% of the planned target of 460.00 million pieces. However, compared to the production delivery of 2018 of 660.10 million pieces, the production delivery of Duty Stamps in 2019 declined by 6.56%.

c. Land Certificates

Land certificates are vital national documents issued by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional/BPN) which function as proof of land ownership and rights on land. To ensure the security of the products, BPN entrusts the printing of the land certificates to Peruri. Land certificates printed by Peruri have specific security features to minimize the risk of forgery.

In 2019, the production delivery of Land Certificates was 11.14 million sets, or 139.25% of the planned target (8.00 million sets), an increase of 14.65% compared to the product delivery in 2018, which was 9.72 million sets. The high realization percentage was due to an increase in the number of orders for land certificates.

d. Other Security Products

Other non-currency valuable security document printings entrusted to Peruri are postal stamps, academic certificates, academic transcripts, and Sucofindo SCI certificates, as well as other products for international markets such as Nepalese excise stamps, Nepalese postal stamps, and Nepalese RS banknotes.

Selama 2019, Perusahaan melakukan penyerahan produksi pesanan produk sekuriti lainnya dalam negeri secara total senilai Rp35,99 miliar atau 136,68% dari target RKAP 2019 senilai Rp26,33 miliar. Tingginya pencapaian realisasi terhadap target disebabkan karena meningkatnya perolehan pesanan produk sekuriti lainnya dari pelanggan. Jika dibandingkan dengan realisasi penyerahan produksi sekuriti lainnya dalam negeri pada 2018 senilai Rp33,09 miliar, mengalami kenaikan sebesar 8,75%.

Selain itu, selama 2019 Perusahaan juga telah menyerahkan produksi pesanan produk sekuriti lainnya luar negeri secara total senilai Rp17,20 miliar atau 14,89% dari target RKAP 2019 senilai Rp115,49 miliar.

Jika dibandingkan dengan penyerahan produksi pesanan produk sekuriti lainnya luar negeri tahun 2018 secara total senilai Rp94,27 miliar mengalami penurunan sebesar 81,75%.

In 2019, the delivery of Other Security Products for domestic markets was Rp35.99 billion, or 136.68% of the planned target (Rp26.33 billion), 8.75% higher compared to the delivery of Other Security Products for domestic markets in 2018, which was Rp33.09 billion. The high realization percentage was due to an increase in the number of orders for security products from domestic markets.

In 2019, the Company has also delivered Other Security Products for international markets worth Rp17.20 billion, or 14.89% of the planned target, which was Rp115.49 billion.

The delivery of Other Security Products for international markets decreased by 81.75% compared to Rp94.27 billion in 2018.

4. Logam Non Uang

Peruri memiliki beberapa hasil produk logam non uang, yaitu medali, lencana, plakat, penghargaan masa bakti dan logam emas.

Selama 2019, di sektor logam non uang dalam negeri Perusahaan melakukan penyerahan produksi sebanyak 6,08 ribu buah atau mencapai 47,40% dari target RKAP 2019 sejumlah 12,83 ribu buah. Jika dibandingkan dengan realisasi produksi logam non uang pada 2018 sejumlah 4,75 ribu buah, mengalami penurunan sebesar 27,99%.

Namun, sepanjang 2019 tidak terdapat penyerahan produksi untuk logam non uang luar negeri, di mana secara RKAP terdapat 500 juta buah yang diproyeksikan. Hal tersebut dikarenakan pelanggan menurunkan jumlah pesannya di 2019. Jika dibandingkan dengan penyerahan produksi atas pesanan produk sekuriti lainnya luar negeri tahun 2019 cenderung stagnan yaitu tidak terdapat produksi.

4. Non-Currency Metal

Peruri also produces several types of Non-Currency Metal products, such as medals, badges, plaques, service awards, and gold bullion.

In 2019, the Company delivered 6.08 thousand pieces of Non-Currency Metal products for domestic markets, or 47.40% of the planned target (12.83 thousand pieces). The production delivery of Non-Currency Metal in 2019 was 27.99% higher than the realization in 2018, which was 4.75 thousand pieces.

In 2019, there was no delivery of Non-Currency Metal products for international markets out of the planned target of 500 million pieces. This was due to the suspension of orders from customers in 2019. The same happened in 2019, where there was no production for Non-Currency Metal products for international markets.

5. Digital

Pada 2019 Peruri telah memiliki beberapa kategori produk digital, yaitu Peruri Code, Peruri Sign dan Peruri Trust. Produk-produk yang diproduksi Peruri untuk kategori Peruri Code adalah Secure 2D, Peruri QR, RFID, Peruri Token, Peruri Seal dan NFC. Selain itu adapun produk Peruri Sign terdiri dari PERISAI, Peruri Tera, E-KYC dan Meterai Elektronik. Sedangkan produk kategori Peruri Trust terdiri dari Track & Trace Solution, Peruri Guard, Penjamin Online dan Peruri Box.

5. Digital

By 2019, Peruri has produced digital products that span over several categories, i.e. Peruri Code, Peruri Sign, and Peruri Trust. Products categorized under Peruri Code are Secure 2D, Peruri QR, RFID, Peruri Token, Peruri Seal, and NFC. Products categorized under Peruri Sign are PERISAI, Peruri Tera, E-KYC, and Electronic Duty Stamps. Products categorized under Peruri Trust are Track & Trace Solution, Peruri Guard, Online Guarantor, and Peruri Box.

Selama 2019, di sektor digital Peruri telah menghasilkan pendapatan sebesar Rp1,76 juta atau mencapai 2,35% dari target RKAP 2019 sejumlah Rp75,03 miliar. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan produk digital pada 2018 yang masih belum ada, mengalami kenaikan sebesar 100,00%. Hal ini menjadi sebuah perkembangan yang patut disyukuri dan membuka harapan bagi Peruri dalam upaya bertransformasi menjadi perusahaan penjamin keaslian dengan digitalisasi.

In 2019, Peruri has delivered digital products worth Rp1.76 million, or 2.35% of the planned target of Rp75.03 billion. Compared to 2018, when this product type has not been launched, the number was a 100% increase and showed a positive development which would help Peruri in its transformation of becoming a digital authenticity guarantor.

Kapasitas Produksi

Dilihat dari kemampuan produksi saat ini, fasilitas percetakan Peruri masih mampu memenuhi pemesanan percetakan uang dari Bank Indonesia dan percetakan dokumen sekuriti lainnya untuk kebutuhan domestik dan internasional. Terkait percetakan uang kertas Republik Indonesia, saat ini faktor yang berpotensi menjadi penghambat kecepatan produksi maupun *output* yang dihasilkan adalah ketidakterersediaan atau keterlambatan bahan baku cetak. Faktor penghambat lainnya adalah bahwa sebagian besar bahan baku untuk produk-produk lainnya belum diproduksi lokal sehingga tingkat ketergantungan terhadap bahan baku dari luar negeri masih cukup tinggi. Namun untuk mengatasi kendala tersebut Peruri berusaha menjaga kerja sama yang baik dengan perusahaan penyedia bahan baku.

Production Capacity

With its current production capacity, Peruri is able to fulfill Bank Indonesia's demand for currency printing and other demands from both domestic and international markets for other security document printings. The most common challenges in the printing of Indonesian Rupiah banknotes are the unavailability or late delivery of printing raw materials and that some of the raw materials needed are sourced abroad. To minimize these risks, Peruri always maintains good relationships with its suppliers.

Di samping fasilitas cetak di Karawang, Peruri memiliki beberapa gedung percetakan lain yang dikelola oleh anak perusahaan yaitu pabrik kertas yang terletak di Jawa Barat dan percetakan produk *middle security* di Surabaya.

In addition to the printing facility in Karawang, Peruri owns other printing facilities managed by its subsidiaries, i.e. a paper factory in West Java and a middle security printing facility in Surabaya.

Pemanfaatan Kapasitas

Pada 2019 untuk memenuhi pemesanan cetak uang kartal, Peruri memaksimalkan kapasitas produksinya bahkan rata-rata offset tidak melebihi kapasitas masing-masing mesin cetak, dengan ulasan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Mesin Cetak Uang Kertas
Realisasi pemanfaatan mesin cetak uang kertas terhadap kapasitas yang tersedia di 2019 secara rata-rata mencapai 90,88%. Rincian sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Capacity Utilization

To fulfill the demands of banknote printing, in 2019 Peruri maximized its production capacity without exceeding the maximum capacity of each printing machine, as follows:

1. Banknote Printing Machine Utilization
The average utilization of banknote printing machine compared to the available capacity in 2019 was 90.88%, with details as follows:

Kelompok Mesin Machine Group	Jumlah Mesin (dlm unit) Number of Machine (in unit)	Realisasi Produksi Tahun 2018 Realized Production in 2018	Kapasitas Tersedia 2019 Available Capacity in 2019	Realisasi Produksi Tahun 2019 Realized Production in 2019	% Pencapaian Achievement	% Naik / (Turun) Increase/ (Decrease)
Cetak Rata (Offset) Offset	11	178,16	292,10	251,25	86,01	41,03
Cetak dalam (Intaglio) Intaglio	19	302,70	334,55	407,65	121,85	34,67
Cetak Nomor (Numerota) Numerota	13	191,79	203,69	254,76	125,07	32,83
Cut Pack/Penyelesaian Masinal Cut Pack/Machinal Finishing	12	139,52	182,91	193,73	107,09	38,86

Kapasitas tersedia pada sektor uang kertas dihitung dengan metode *Overall Equipment Effectiveness* (OEE) tahun 2019, sebuah metode perhitungan yang digunakan oleh Perusahaan saat ini, terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu *availability* (waktu kesediaan mesin), *performance* (jumlah unit yang diproduksi) dan *quality* (mutu yang dihasilkan).

Pemanfaatan mesin-mesin terhadap kapasitas tersedia pada sektor uang kertas dengan perhitungan jam kerja normal tanpa lembur, terdiri dari sebagai berikut:

- Kapasitas tersedia untuk mesin cetak rata dengan perhitungan 11 unit mesin menggunakan pola kerja sebanyak 3 gilir;
- Kapasitas tersedia untuk mesin cetak dalam dengan perhitungan 19 unit mesin menggunakan pola kerja sebanyak 3 gilir;
- Kapasitas tersedia untuk mesin cetak nomor dengan perhitungan 13 unit mesin menggunakan pola kerja sebanyak 2 gilir;
- Kapasitas tersedia untuk mesin penyelesaian masinal dengan perhitungan 12 unit mesin menggunakan pola kerja sebanyak 2 gilir.

Proses pencetakan di mesin intaglio dilakukan 2 kali lintasan cetak kecuali pecahan S'16, T'16 dan U'16.

2. Pemanfaatan Mesin Cetak Uang Logam

Realisasi pemanfaatan mesin cetak uang logam terhadap kapasitas yang tersedia 2019 secara rata-rata mencapai 85,84%. Rincian sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Kelompok Mesin Machine Group	Jumlah Mesin (dlm unit) Number of Machine (in unit)	Realisasi Produksi Tahun 2018 Realized Production in 2018	Kapasitas Tersedia 2019 Available Capacity in 2019	Realisasi Produksi Tahun 2019 Realized Production in 2019	% Pencapaian Achievement	% Naik / (Turun) Increase/ (Decrease)
Cetak Print	12	673,42	996,22	999,31	100,31	48,39
Hitung Counter & Wrapping (CW) Counter & Wrapping Calculation	12	672,68	1.400,00	999,31	71,38	48,56

Kapasitas tersedia pada sektor uang logam dihitung berdasarkan metode OEE. Pemanfaatan mesin-mesin terhadap kapasitas tersedia pada sektor uang logam, sebagai berikut:

- Kapasitas tersedia untuk mesin cetak dengan perhitungan 12 unit mesin menggunakan pola kerja sebanyak 2 gilir.
- Kapasitas tersedia untuk mesin *Counter & Wrapping* dengan perhitungan 12 unit mesin menggunakan pola kerja sebanyak 2 gilir.

The available capacity for banknote printing is calculated using the Overall Equipment Effectiveness (OEE) method, which consists of 3 (three) main components: availability (machine available time), performance (number of production units), and quality (quality of products).

Utilization of machine compared to the available capacity for banknote printing, calculated based on normal working hours (without overtime) is detailed as follows:

- Available capacity for offset printing, calculated based on 11 machines, is 3 work shifts;
- Available capacity for intaglio printing, calculated based on 19 machines, is 3 work shifts;
- Available capacity for numerota printing, calculated based on 13 machines, is 2 work shifts;
- Available capacity for machinal finishing, calculated based on 12 machines, is 2 work shifts.

The printing process in the intaglio machine is carried out with 2 printing passes, except for the S'16, T'16, and U'16.

2. Coin Printing Machine Utilization

The average utilization of coin printing machine compared to the available capacity in 2019 was 85.84%, with details as follows:

The available capacity for coin printing is calculated using the OEE method. Utilization of machine compared to the available capacity for coin printing is detailed as follows:

- Available capacity for printing, calculated based on 12 machines, is 2 work shifts.
- Available capacity for Counter & Wrapping machine, calculated based on 12 machines, is 2 work shifts.

Pengoptimalan mesin cetak yang rata-rata sudah sesuai dengan kapasitas dalam rangka memenuhi kebutuhan satu tahun ini menandakan bahwa dari sisi kapasitas produksi, Peruri sudah mempersiapkan dengan baik untuk terjun ke pasar internasional secara lebih serius. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi yaitu dengan melakukan riset dan pengembangan di bidang teknologi berupa investasi mesin-mesin baru, serta mempersiapkan lini produksi yang didedikasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.

The optimum utilization of printing machine capacity in one year shows Peruri's commitment and readiness to expand its international market share. In order to increase its production capacity, Peruri conducts various research and development in technology, such as investing in new machines and preparing a dedicated production line to fulfill the demands of international markets.

3. Pemanfaatan Mesin Cetak Non Uang

3. Non-Currency Printing Machine Utilization

Jenis Produksi Production Type	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Jumlah Produksi Baik Good Production Amount		Kerusakan Cetak 2019 Print Defect	Standar Inschiet (%)	Realisasi Inschiet (%) Inschiet Realization	Pencapaian % Achievement	%Naik / (Turun) % Increase / (Decrease)	
		2018	2019						
Pita Cukai: Tax Ribbon:									
PCHT (Jt Lbr)	157,11	166,28	189,38	10,07	5	5,30	120,54	5,32	13,89
PCHT MMEA (Jt Lbr)	1,54	2,90	3,56	0,22	10	6,10	230,62	6,10	22,91
Produk Paspor & Buku: Passport & Book Products:									
Paspor RI (Jt Bk)	3,00	3,79	3,70	0,09	2,5	2,16	123,33	2,31	(2,48)
Badan Pertahanan Negara National Defense Agency (Jt Sht)	8,00	9,64	11,14	-	7,5	-	139,25	-	15,51
Product Web & Sheet:									
Materai Tempel Stamp (Jt Kpg)	460,00	660,10	616,80	80,18	11	13,00	134,09	13,00	(6,56)
Prangko Stamp (Jt Kpg)	0,93	0,91	1,51	0,27	10	17,98	162,72	17,98	64,49
Produk Luar Negeri: International Products:									
Uang Kertas Nepal Rs 20 CO Nepal Rs 20 CO Banknote (Jt Blyt)	-	87,00	17,00	24,25	7,5	11,55	-	142,65	(80,46)
Uang Kertas Nepal Rs 50 CO Nepal Rs 50 CO Banknote (Jt Blyt)	-	180,00	-	-	-	-	-	-	(100,00)
Prangko Nepal Carry Over (Jt Lbr)	-	8,50	0,50	0,52	-	103,31	-	103,31	(94,12)
Souvenir Sheet Nepal Carry Over (Jt Sht)	-	-	0,20	0,10	-	47,70	-	47,70	-
Passport Sri Lanka 64 Hal CO (Jt Bk)	0,50	0,52	0,50	0,02	2,5	2,15	100,00	4,31	(4,40)

Jenis Produksi Production Type	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Jumlah Produksi Baik Good Production Amount		Kerusakan Cetak 2019 Print Defect	Standar Inschiet (%)	Realisasi Inschiet (%) Inschiet Realization	Pencapaian % Achievement	%Naik / (Turun) % Increase / (Decrease)
		2018	2019					
Produk Logam Non Uang (LNU): Non-Metallic Currency Products (LNU):								
Cap Tanda Tera (Rb Kpg) Tera Mark Stamp	6,50	-	4,50	-	-	-	69,17	-
Koin Emas (Rb Kpg) Gold Coins	0,45	0,30	0,16	-	-	-	34,67	(47,65)
Medali Souvenir/ plakat Souvenir Medals/ Plaques	0,80	1,46	0,48	-	-	-	59,63	(67,33)
Lencana Logam Non Emas Non Gold Metal Badges	0,60	0,65	0,85	-	-	-	141,83	30,12
Pin, Cincin, dll Pins, Rings, etc.	0,03	0,16	0,07	-	-	-	216,67	(58,33)
Lencana Emas (Rb Kpg) Gold Badges	0,05	-	0,07	-	-	-	130,00	-

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha yang diperoleh dari hasil penjualan produk-produk yang dihasilkan, baik uang maupun non uang, serta kontribusi anak perusahaan pada 2019 adalah sebagai berikut:

OPERATING REVENUES

Business income derived from the sales of manufactured products, both currency and non-currency, and contributed by subsidiaries in 2019 are as follows:

(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

Jenis Produk Product Type	Realisasi 2018 Realization in 2018	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Realisasi 2019 Realization in 2019	(%) Pencapaian Achievement	% Naik (Turun) % Increase (Decrease)
Uang Kertas Banknotes	1.950.423	2.667.455	2.609.148	97,82	33,78
Uang Logam Coins	103.087	103.102	103.102	100,00	0,01
Non Uang - DN & LN: Non-Currency – Domestic & International					
Pita Cukai Excise Stamps	289.266	265.417	334.379	125,98	15,60
Paspor & Buku Passports & Books	232.949	189.848	264.530	139,34	13,56
Web & Sheet Web & Sheet	302.485	269.299	238.711	88,64	(21,08)
Produk Digital Digital Product	-	75.030	1.761	2,35	100
Logam Non Uang Non-Currency Metal	12.914	67.045	4.823	7,19	(62,65)
Anak Perusahaan Subsidiaries	302.103	488.314	328.182	67,21	8,63
Jumlah Total	3.196.517	4.125.510	3.884.672	94,16	21,53

Uang Kertas

Realisasi pendapatan uang kertas selama 2019 sebesar Rp2.609,15 miliar, lebih rendah Rp58.27 miliar dari RKAP sebesar Rp2.667,45 miliar atau mencapai 97,82%. Rendahnya pencapaian realisasi pendapatan sektor uang kertas dikarenakan menurunnya perolehan pesanan uang kertas yang diterima, hal ini terkait dengan masih terdapatnya pengerjaan *carry over* pesanan multi year 2017-2018 di awal tahun 2019 sebesar Rp235,15 miliar atau sejumlah 1.848,61 juta bilyet. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan uang kertas pada 2018 sebesar Rp1.950,42 miliar, mengalami penurunan sebesar 33.78%.

Uang Logam

Selama 2019, realisasi pendapatan uang logam sebesar Rp103,10 miliar, sesuai dengan RKAP sebesar Rp103,10 miliar atau mencapai 100%. Pencapaian tersebut termasuk pendapatan atas *carry over* pesanan multi year 2017-2018 sebesar Rp9,55 miliar atau sejumlah 208,99 juta keping yang dikerjakan pada awal tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan uang logam pada 2018 sebesar Rp103.09 miliar, mengalami penurunan sebesar 0.01%.

Pita Cukai dan MMEA

Pada 2019, realisasi pendapatan pita cukai dan MMEA sebesar Rp334,38 miliar, lebih tinggi Rp68,96 miliar dari RKAP sebesar Rp265,42 miliar atau mencapai 125,98%. Tingginya pencapaian realisasi terhadap target RKAP 2019 disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan pelanggan sehingga menambah pesannya di pertengahan periode tahun berjalan.

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pita cukai pada 2018 sebesar Rp289,27 miliar mengalami peningkatan sebesar 15.60%.

Paspor & Buku

Selama 2019, realisasi pendapatan Paspor & Buku sebesar Rp264,53 miliar, lebih tinggi sebesar Rp74,68 miliar dari RKAP sebesar Rp189,85 miliar atau mencapai 139,34%. Pendapatan tersebut diantaranya berasal dari pendapatan paspor & buku dalam negeri sebesar Rp217,89 miliar dan pendapatan paspor & buku luar negeri (paspor Sri Lanka) sebesar Rp15,06 miliar. Tingginya pencapaian realisasi terhadap target RKAP 2019 disebabkan karena adanya peningkatan pesanan produk Paspor RI. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan paspor dan buku pada 2018 sebesar Rp232,95 miliar, mengalami peningkatan sebesar 13,56%.

Banknotes

Income from Banknotes in 2019 was Rp2,609.15 billion, a 97.82% achievement or Rp58.27 billion lower than the planned target of Rp2,667.45 billion, due to the declining number of Banknotes orders. At the beginning of 2019, there were some carryover orders from 2017–2018 of 1,848.61 million bills worth Rp235.15 billion. Compared to the realized income from Banknotes in 2018 of Rp1,950.42 billion, this was a 33.78% decrease.

Coins

In 2019, the realized income from Coins was Rp103.10 billion, a 100% achievement of the planned target of Rp103.10 billion, which also include income from 2017–2018 *carry over* orders at the beginning of 2019 worth Rp9.55 billion, or 208.99 million pieces.

This number was 0.01% or Rp103.09 billion lower compared to the realized income from Coins in 2018.

Excise Stamps

In 2019, the realized income from Excise Stamps, which include excise stamps for tobacco products and alcoholic beverage (MMEA), was Rp334.38 billion or Rp68.96 billion higher than the planned target of Rp265.42 billion or achieved 125.98%, due to the increased demands from customers in the middle of the year.

Compared to 2018 of Rp289.27 billion, the realized income from Excise Stamps in 2019 was increase 15.60%.

Passports & Books

In 2019, the realized income from Passports & Books was Rp264.53 billion, a 139.34% achievement or Rp74.68 billion higher than the planned target of Rp189.85 billion. The number consists of income from Domestic Passports & Books as well as Foreign Passports & Books (Sri Lankan passport), at Rp217.89 billion and Rp15.06 billion respectively. This high achievement was due to the increased demand for Indonesian passport. Compared to 2019 of Rp232.95 billion, the realized income from Passports & Books in 2019 was 13.56% higher.

Web & Sheet

Realisasi pendapatan *Web & Sheet* pada 2019 sebesar Rp238,71 miliar, lebih rendah sebesar Rp30,59 miliar dari RKAP sebesar Rp269,3 miliar atau mencapai 88,64%. Hal ini disebabkan karena belum tercapainya beberapa pendapatan produk-produk *web* dan *sheet* PP 32 dan Non PP 32 yang sudah ditargetkan seperti: dokumen keimigrasian, meterai, prangko, sertifikat kelautan, dokumen perbankan dan beberapa produk sekuriti lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri.

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan *Web & Sheet* pada 2018 sebesar Rp302,48 miliar, mengalami penurunan sebesar 21,08%.

Logam Non Uang

Selama 2019, realisasi pendapatan Logam Non Uang Rp4,82 miliar, lebih rendah sebesar Rp62,22 miliar dari RKAP sebesar Rp67,05 miliar atau mencapai 7,19%. Hal ini didominasi oleh belum tercapainya pendapatan luar negeri berupa pesanan uang logam Thailand yang sudah ditargetkan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan logam non uang pada 2018 sebesar Rp12,91 miliar, mengalami penurunan sebesar 62,65%.

Kontribusi Anak Perusahaan

Pada 2019, realisasi kontribusi pendapatan seluruh anak perusahaan secara total sebesar Rp328,18 miliar, lebih rendah Rp160,13 miliar dari target RKAP 2019 sebesar Rp488,31 miliar atau mencapai 67,21%.

Penyebab tidak tercapainya target kontribusi pendapatan perusahaan anak antara lain antara lain dikarenakan penjualan kertas sigaret PT Kertas Padalarang mengalami penurunan disebabkan utilitas mesin kertas-III diprioritaskan untuk pemenuhan produksi kertas banderol dan kertas *security* non banderol, Target pendapatan PT Peruri Property dari program Optimalisasi Aset Peruri seperti Lahan Gadog, Lahan Lebak Bulus, Lahan Blok B Kebayoran, Lahan Kebon Jeruk dan optimalisasi aset lainnya belum dapat terealisasi di tahun 2019 dan PT Peruri Digital Security kalah dalam mengikuti tender/lelang umum baik dikarenakan ketidaksesuaian spesifikasi teknis maupun harga yang tidak kompetitif.

Jika dibandingkan dengan realisasi kontribusi pendapatan anak perusahaan pada 2018 sebesar Rp302,10 miliar, mengalami peningkatan sebesar 8,63%.

Web & Sheet

The realized income from *Web & Sheet* in 2019 was Rp238.71 billion, a 88.64% achievement or Rp30.59 billion lower than the planned target of Rp269.3 billion. This was due to the several *Web & Sheet* production targets that have not been met (PP 32 and Non-PP 32), such as: immigration documents, duty stamps, postal stamps, nautical certificates, banking documents, and other security products for domestic and international markets.

Compared to 2018 of Rp302.48 billion, the realized income from *Web & Sheet* in 2019 was 21.08% lower.

Non-Currency Metal

In 2019, the realized income from Non-Currency Metal was Rp4.82 billion, or Rp62.22 billion (7.19%) lower than the planned target of Rp67.05 billion. The main reason was the target of Thai coin order that has not been fulfilled. The realized income from Non-Currency Metal in 2019 was 62.65% lower compared to 2018 of Rp12.91 billion.

Income Contribution from Subsidiaries

In 2019, the total realized income from all subsidiaries was Rp328.18 billion, a 67.21% achievement or Rp160.13 billion lower than the planned target, which was Rp488.31 billion.

The contributing factors of this underachievement are, among others, the declining sales of cigarette paper of PT Kertas Padalarang as the utilization of paper machine-III was prioritized to fulfill the demand for excise stamp paper and other security paper; the income target of PT Peruri Property from asset optimization, such as the lands in Gadog, Lebak Bulus, Kebayoran Block B, Kebon Jeruk, and others, that has not been realized in 2019; and PT Peruri Digital Security's lost bid at a public tender by reason of non-conformity of technical specification and non-competitive price.

Despite the underachievement, compared to the realized contribution from subsidiaries in 2018 of Rp302.10 billion, this number is still higher by 8.63%.

KINERJA KEUANGAN

Secara garis besar, kinerja Perusahaan pada 2019 mengalami kenaikan, tercermin pada total pendapatan usaha dari hasil penjualan produksi dan kontribusi anak perusahaan adalah sebesar Rp3.884,67 miliar atau naik 21,53% dari 2018 sebesar Rp3.196,52 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya pesanan pada produk uang kertas.

Laba bersih tahun berjalan konsolidasian di 2019 tercatat sebesar Rp725,31 miliar atau kenaikan 152,25% dari laba bersih tahun berjalan konsolidasian 2018 sebesar Rp287,54 miliar. Laju pertumbuhan majemuk tahunan *Compound Annual Growth Rate (CAGR)* periode 2015-2019 adalah sebesar 22,31%, jauh lebih tinggi dibanding CAGR periode 2014-2018 yang tercatat sebesar (2,22)%.

FINANCIAL PERFORMANCE

Overall, the Company's performance in 2019 experienced a significant improvement, as reflected in the total operating revenue from sales of manufactured products and contribution of subsidiaries amounting to Rp3,884.67 billion, which was a 21.53% increase from the revenue in 2018 of Rp3,196.52 billion. The increase was due to the higher number of banknote orders.

The consolidated current year net profit in 2019 was recorded at Rp725.31 billion, or 152.25% higher than the consolidated current year net profit of 2018 (Rp287.54 billion). The Compound Annual Growth Rate (CAGR) for the period of 2015–2019 was 22.31%, much higher than the CAGR for the period of 2014–2018 at (2.22)%.

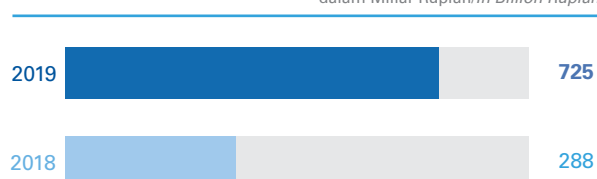
Pendapatan Usaha Operating Revenue

dalam Miliar Rupiah/In Billion Rupiah



Laba Bersih Tahun Berjalan Current Year Net Profit

dalam Miliar Rupiah/In Billion Rupiah



TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

OVERVIEW OF FINANCIAL PERFORMANCE

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia.

Rasio-rasio keuangan pada akhir 2019 menunjukkan bahwa Peruri memiliki posisi yang kuat untuk terus mengembangkan bisnis secara sehat dan berkelanjutan.

Tinjauan mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (PSAK) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi. Bahasan kinerja keuangan Peruri disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan ini.

Bahasan serta analisis tentang kondisi keuangan ini disajikan dalam 5 (lima) bagian sebagai berikut:

1. Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian;
2. Analisis Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian;
3. Analisis Laporan Arus Kas Konsolidasian;
4. Analisis Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian;
5. Analisis Rasio Keuangan Konsolidasian.

STANDARDS FOR PRESENTING INFORMATION AND CONFORMITY TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD

The financial performance analysis and discussion for this annual report refers to the Financial Statement for years ending December 31, 2019 and December 31, 2018, which have been audited by HLB Hadori Sugiarto Adi & Partners Public Accounting Firm. The presentation and disclosure of the Company's financial statement were prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, which includes Statement of Financial Accounting Standards applicable in Indonesia and Interpretation of Statement of Financial Accounting Standards applicable in Indonesia, published by the Indonesian Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants.

The financial ratios at the end of 2019 reflected Peruri's strong position to continue the expansion of its business in a healthy and sustainable manner.

This overview of financial performance is prepared based on the Company's Financial Statement, which was presented in accordance with the financial accounting principles generally applicable in Indonesia for the year ending 31 December 2019.

The financial statement has been audited by HLB Hadori Sugiarto Adi & Partners Public Accounting Firm with Unqualified Opinion. The discussion on Peruri's financial performance is delivered with due regard to the explanation in the Consolidated Financial Statements which are an integral part of this annual report.

The financial statement analysis and discussion of the Company is presented in 5 (five) parts as follows:

1. Analysis of the Consolidated Statement of Financial Position;
2. Analysis of the Consolidated Comprehensive Income Statement;
3. Analysis of the Consolidated Cash Flow Statement;
4. Analysis of the Consolidated Changes in Equity Statement;
5. Analysis of the Consolidated Financial Ratio.

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION

Aset

Assets

(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	2018	2019	Perubahan Changes	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
ASET ASSETS				
Aset Lancar Current Assets				
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	837.083	1.924.761	1.087.678	129,94
Piutang Usaha - Bersih Business Receivables - Net	280.645	53.453	(227.191)	(80,95)
Piutang Lain-Lain - Bersih Other Receivables - Net	36.671	27.572	(9.099)	(24,81)
Persediaan - Bersih Inventories - Net	548.144	364.531	(183.614)	(33,50)
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	104.521	44.487	(60.033)	(57,44)
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka Down Payments and Prepaid Expenses	114.722	208.378	93.656	81,64
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	1.921.786	2.623.183	701.397	36,50
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets				
Investasi Saham dan Ventura Bersama Stock Investments and Joint Ventures	97.736	138.475	40.739	41,68
Surat Berharga Securities	-	40.000	40.000	-
Aset Tetap - Bersih Fixed Assets - Net	2.719.934	2.946.078	226.144	8,31
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	19.225	27.707	8.481	44,12
Aset Tidak Lancar Lainnya - Bersih Other Non-Current Assets - Net	296.623	290.119	(6.503)	(2,19)
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	3.133.518	3.442.379	308.861	9,86
Jumlah Aset Total Assets	5.055.304	6.065.562	1.010.258	19,98

ASET
Asset

dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Aset Perusahaan terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Total Aset Perusahaan di akhir 2019 tercatat sebesar Rp6,07 triliun atau meningkat sebesar 19,98% atau Rp1,01 triliun dibandingkan dengan 2018 sebesar Rp5,06 triliun, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

Aset Lancar

Aset Lancar Current Assets

dalam Juta Rupiah/In million rupiah



Jumlah aset lancar pada 2019 sebesar Rp2,62 triliun, mengalami kenaikan sebesar 36.50% atau Rp701,40 miliar jika dibandingkan dengan periode 2018 sebesar Rp1,92 triliun.

Hal ini disebabkan oleh komponen aset lancar yaitu kas dan setara kas serta uang muka & beban dibayar di muka yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sedangkan piutang, persediaan, pajak dibayar di muka mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas kecil, giro, deposito berjangka dalam bentuk deposito Rupiah, deposito Valuta Asing (Valas) dan bagi hasil atas deposito Syariah serta investasi lainnya dalam bentuk Rupiah ataupun mata uang asing seperti dolar AS dan Euro.

Kas dan setara kas Perusahaan pada 2019 sebesar Rp1.924,78 miliar atau mengalami kenaikan 129,94% atau sebesar Rp1.087,67 miliar jika dibandingkan dengan periode 2018 sebesar Rp837,08 miliar.

Kenaikan kas dan setara kas, salah satunya dikarenakan adanya transaksi penjualan aset.

2. Piutang Usaha

Piutang usaha Perusahaan selama 2019 tercatat sebesar Rp53,45 miliar, mengalami penurunan 80,95% atau sebesar Rp227,19 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp280,64 miliar.

The Company's Assets consist of Current Assets and Non-Current Assets. Total Assets of the Company at the end of 2019 was recorded at Rp6.07 trillion, 19.98% (Rp1.01 trillion) higher compared to Total Assets in 2018, which was Rp5.06 trillion. Detailed explanation of the Company's Assets can be found below:

Current Assets

Total Current Assets in 2019 was Rp2.62 trillion, 36.50% or Rp701.40 billion higher compared to Total Current Assets in 2018, which was Rp1.92 trillion.

The higher total was due to increased Current Assets components, i.e. Cash and Cash Equivalents, as well as Down Payment & Prepaid Expenses, although there was a decrease in Receivables, Inventories, and Prepaid Taxes.

1. Cash and Cash Equivalents

Cash and Cash Equivalents include petty cash, current accounts, time deposit in the form of Rupiah deposit, foreign currency deposit, and profit sharing on Sharia deposits as well as other investments in Rupiah or foreign currencies such as US Dollar and Euro.

The Company's Cash and Cash Equivalents in 2019 was Rp1,924.78 billion, a 129.94% or Rp1,087.67 billion increase compared to Rp837.08 billion in 2018.

One of the factors that led to the increase in Cash and Cash Equivalents was asset sales transactions.

2. Business Receivables

The Company's Business Receivables in 2019 was recorded at Rp53.45 billion, a 80.95% or Rp227.19 billion decrease compared to Rp280.64 billion in 2018.

- Piutang usaha tersebut terbagi atas piutang usaha dengan pihak berelasi dan pihak ketiga yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 22.70% dan 77.30% dari piutang usaha bersih. Penurunan ini disebabkan karena adanya realisasi pembayaran atas piutang usaha dari beberapa customer dalam negeri.
3. **Piutang Lain-Lain**
Piutang lain-lain yang dimiliki Perusahaan pada 2019 terdiri atas piutang bunga deposito, piutang pegawai dan lainnya.
Jumlah piutang lain-lain pada 2019 tercatat sebesar Rp27,57 miliar, menurun 24,81% atau sebesar Rp9,09 miliar jika dibandingkan dengan periode 2018 sebesar Rp36,67 miliar.
Penurunan jumlah piutang lain-lain tersebut disebabkan karena adanya realisasi pembayaran piutang atas transaksi diluar operasional Perusahaan.
 4. **Persediaan**
Persediaan yang dimiliki oleh Perusahaan terdiri atas persediaan bahan baku, bahan penolong, barang jadi dan barang setengah jadi serta barang umum lainnya. Jumlah persediaan pada 2019 tercatat sebesar Rp364,53 miliar, menurun sebesar 33,50% atau Rp183,61 miliar dibandingkan dengan periode 2018 sebesar Rp548,14 miliar.
Penurunan tersebut disebabkan karena produksi uang kertas TA 2019 telah selesai diproduksi.
 5. **Pajak Dibayar di Muka**
Pajak dibayar di muka 2019 tercatat sebesar Rp44,49 miliar, menurun sebesar 57,44% atau Rp60,03 miliar dibandingkan dengan periode 2018 sebesar Rp104,52 miliar.
Penurunan ini disebabkan karena hasil banding atas pemeriksaan pajak tahun pajak 2015, 2014 dan 2012 sudah diselesaikan dan Peruri telah menerima hasil banding tersebut.
 6. **Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka**
Uang muka dan beban dibayar di muka pada 2019 tercatat sebesar Rp208,38 miliar atau meningkat sebesar 81,64% atau Rp93,66 miliar dibandingkan dengan periode 2018 sebesar Rp114,72 miliar.
Penurunan tersebut secara garis besar dikarenakan pihak pemasok telah memenuhi kewajibannya dalam pengiriman barang. Sehingga jumlah uang muka yang telah dibayarkan berkurang diganti dengan masuknya barang oleh pemasok.
- Business Receivables comprises business receivables from related parties and business receivables from third parties, each contributed 22.70% and 77.30%, respectively, to Net Trade Receivables. The decline was due to the realized Business Receivables payment from several domestic customers.
3. **Other Receivables**
The Company's Other Receivables in 2019 consists of receivables from deposit interest, employee receivables, and others.
Other Receivables in 2019 was recorded at Rp27.57 billion, a decline of 24.81% or Rp9.09 billion compared to Rp36.67 billion in 2018.

The decline in Other Receivables was due to the realized receivables payment of the Company's non-operating transactions.
 4. **Inventories**
Inventories owned by the Company consist of raw material inventory, auxiliary material inventory, finished goods, and semi-finished goods, as well as other general goods. In 2019, the Company's Inventories was Rp364.53 billion, a decline of 33.50% or Rp183.61 billion compared to Rp548.14 billion in 2018.
The decline was due to the completion of banknote production in FY 2019.
 5. **Prepaid Taxes**
Prepaid taxes in 2019 was recorded at Rp44.49 billion, a 57.44% or Rp60.03 billion decline compared to Rp104.52 billion in 2018.

This decrease was due to the results of the appeal for the tax audit for the 2015, 2014 and 2012 has been completed and Peruri has accepted the results of the appeal.
 6. **Down Payment and Prepaid Expenses**
Down payment and prepaid expenses in 2019 was recorded at Rp208.38 billion, 81.64% or Rp93.66 billion higher than Rp114.72 billion in 2018.

The main reason for this increase was because the supplier has fulfilled its obligation delivering the goods, and therefore the down payment was reduced and replaced by receipt of goods from the supplier.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

ASET TIDAK LANCAR

Non-Current Assets

dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Total aset tidak lancar Perusahaan pada 2019 tercatat sebesar Rp3,44 triliun, meningkat 9,86% atau sebesar Rp308,86 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp3,13 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan karena realisasi penyerapan capex, Investasi saham dan ventura Bersama PT Sicpa peruri securink dan pembelian obligasi.

- Investasi Saham dan Ventura Bersama**
 Perusahaan melakukan investasi saham dan ventura bersama untuk pengerjaan tinta sekuriti. Hal ini terlihat dari investasi saham dan ventura bersama pada bagian aset tidak lancar. Investasi saham dan ventura bersama 2019 tercatat senilai Rp138,47 miliar, meningkat 41,68% atau sebesar Rp40,74 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan karena pengakuan bagian laba PT Sicpa Peruri Securink sesuai dengan metode ekuitas sehubungan dengan peningkatan kepemilikan saham menjadi 48%.
- Aset Tetap**
 Aset tetap Perusahaan terdiri dari tanah, bangunan, mesin pabrik, peralatan pabrik, peralatan kantor, mebel dan perabotan, serta kendaraan. Perusahaan mencatat aset tetap pada 2019 sebesar Rp2,94 triliun, meningkat 8,31% atau sebesar Rp226,14 miliar dibandingkan dengan periode 2018 sebesar Rp2,72 triliun. Peningkatan dikarenakan ada nya realisasi penyerapan Capex pembelian mesin utama pabrik dan penunjang pabrik, peralatan pabrik dan peralatan kantor.
- Aset Pajak Tangguhan**
 Perusahaan mencatat aset pajak senilai Rp27,71 miliar, meningkat 44,12% atau sebesar Rp8,48 miliar dibandingkan dengan periode 2018 senilai Rp19,23 miliar. Peningkatan ini disebabkan karena hasil perhitungan imbalan pasca kerja yang dilakukan oleh pihak Aktuaria.
- Aset Tak Lancar Lainnya**
 Perusahaan mencatat aset tak lancar lainnya yang dimiliki terdiri dari aset yang dibatasi penggunaannya dan aset tak berwujud (perangkat lunak dan Hak Guna Bangunan). Pada 2019, aset tak lancar lainnya tercatat sebesar Rp290,12 miliar menurun 2,19% atau sebesar Rp6,50 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp296,62 miliar. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan uang jaminan.

Total Non-Current Assets in 2019 was recorded at Rp3.44 trillion, a 9.86% or Rp308.86 billion increase compared to Rp3.13 trillion in 2018. The increase was due to the realization of capex absorption, stock investment and joint venture with PT Sicpa Peruri Securink, and bond purchases.

- Stock Investments and Joint Ventures**
 The Company carried out stock investments and joint ventures for security ink manufacture process, which are reflected in Stock Investments and Joint Ventures section, under the Non-Current Assets section. Stock Investments and Joint Ventures in 2019 were recorded at Rp138.47 billion, a 41.68% or Rp40.74 billion increase compared to 2018. The increase was due to the recognition of PT Sicpa Peruri Securink's share of profits in accordance with the equity method, in relation with the increase in stock ownership to 48%.
- Fixed Assets**
 The Company's Fixed Assets consists of land, building, machineries, factory equipment, office equipment, furniture, and vehicles. The Company's Fixed Assets in 2019 was recorded at Rp2.94 trillion, a 8.31% or Rp226.14 billion increase compared to Rp2.72 trillion in 2018. The increase was due to the realization of capex absorption for the purchase of factory main and supporting machineries, factory equipment and office equipment.
- Deferred Tax Assets**
 Deferred Tax Assets of the Company in 2019 was recorded at Rp27.71 billion, a 44.12% or Rp8.48 billion increase compared to Rp19.23 billion in 2018. This increase was due to results calculation of post-employment benefits arranged by the actuary.
- Other Non-Current Assets**
 The Company's Non-Current Assets consists of restricted-use assets and intangible assets (software and Building Rights on Land). In 2019, Other Non-Current Assets was recorded at Rp290.12 billion, a 2.19% or Rp6.50 billion decline compared to Rp296.62 billion in 2018. The decline was due to the decrease in security deposits.

Liabilitas dan Ekuitas

Liabilities and Equity

(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	2018	2019	Perubahan Changes	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY				
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities				
Pinjaman Bank – Bagian yang Sudah Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Bank Loans – Parts Due in 1 Year	290.637	307.716	17.080	5,88
Utang Usaha Trade Payables	236.796	413.532	176.736	74,64
Utang Pajak Tax Debt	38.645	121.632	82.987	214,74
Beban Akrua Accrual Expense	69.557	132.962	63.405	91,16
Uang Muka Pelanggan Customer Down Payment	7.118	32.655	25.536	358,74
Liabilitas Lancar Lainnya Other Current Liabilities	329.663	480.735	151.073	45,83
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Short-term Liabilities	972.416	1.489.232	516.817	53,15
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities				
Pinjaman Bank – Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Bank Loans – After Deducting Parts Due in 1 Year	1.333.344	1.169.551	(163.793)	(12,28)
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Estimated Liabilities on Work Rewards	219.216	333.418	114.202	52,10
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Liabilities	16.193	6.625	(9.568)	(59,09)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Long-term Liabilities	1.568.753	1.509.595	(59.159)	(3,77)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.541.169	2.998.827	457.658	18,01
EKUITAS EQUITY				
Modal Capital	363.573	363.573	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	(64.059)	(64.059)	-	-
Cadangan Reserve	1.706.966	1.927.107	220.141	12,90
Saldo Laba Retained Earnings	531.628	933.683	402.055	75,63
Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Components	(34.942)	(107.362)	(72.420)	207,26
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	2.503.167	3.052.942	549.776	21,96
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	10.968	13.792	2.825	25,76
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.514.134	3.066.734	552.600	21,98
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	5.055.304	6.065.562	1.010.258	19,98

Liabilitas

Jumlah liabilitas Perusahaan pada 2019 tercatat sebesar Rp3 triliun, meningkat 18,01% atau sebesar Rp457,66 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp2,54 triliun. Peningkatan ini didominasi oleh peningkatan liabilitas jangka panjang sebagaimana penjelasan per segmen berikut ini:

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities

dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Liabilitas jangka pendek Perusahaan pada 2019 tercatat sebesar Rp1.489,23 miliar, meningkat 53,15% atau sebesar Rp516,82 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp972,42 miliar dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

- Pinjaman Bank untuk Jatuh Tempo 1 Tahun**
 Pada 2019, Perusahaan melakukan pinjaman Bank yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp307,72 miliar, meningkat 5,88% atau sebesar Rp17,08 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp290,64 miliar. Peningkatan ini disebabkan tambahan pinjaman jangka pendek atas beberapa bank, khususnya bank yang berelasi dengan Peruri.
- Utang Usaha**
 Utang usaha Perusahaan terdiri dari utang usaha lokal dan impor. Utang usaha pada 2019 tercatat sebesar Rp413,53 miliar, meningkat 74,64% atau sebesar Rp176,74 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp236,80 miliar. Peningkatan ini salah satunya disebabkan karena terdapat peningkatan transaksi barang dan jasa antara pihak berelasi. Sehingga di tahun 2019 Utang usaha kita meningkat.
- Utang Pajak**
 Perusahaan mencatat utang pajak pada 2019 sebesar Rp121,63 miliar, meningkat 214,74% atau sebesar Rp82,99 miliar dibandingkan dengan periode 2018 sebesar Rp38,65 miliar. Peningkatan ini disebabkan karena adanya pembelian barang dan jasa yang mengalami kenaikan dan status PPh badan tahun 2019 yang kurang bayar.

Liabilities

Total Liabilities in 2019 was recorded at Rp3 trillion, a 18.01% or Rp457.66 billion increase compared to Rp2.54 trillion in 2018. The increase was dominated by the increase in Long-term Liabilities, which will be explained in detail below:

Short-term Liabilities

Short-term Liabilities in 2019 was recorded at Rp1,489.23 billion, a 53.15% or Rp516.82 billion increase compared to Rp972.42 billion in 2018. Detailed explanations are as follows:

- Bank Loans Due in 1 Year**
 In 2019, the amount of Bank Loans Due in 1 Year was Rp307.72 billion, a 5.88% or Rp17.08 billion increase compared to Rp290.64 billion in 2018. The increase was due to the additional short-term loans from several banks, especially those in relation with Peruri.
- Trade Payables**
 Trade Payables consists of local and imported trade payables. Trade Payables in 2019 was recorded at Rp413.53 billion, a 74.64% or Rp176.74 billion increase compared to Rp236.80 billion in 2018. One of the reasons for the increase was the higher amount of goods and service transactions between related parties.
- Tax Debt**
 The Company's Tax Debt in 2019 was recorded at Rp121.63 billion, a 214.74% or Rp82.99 billion increase compared to Rp38.65 billion in 2018. This increase is due to the increasing of purchase of goods and services and status of the 2019 corporate income tax was insufficient payment.

4. **Beban Akrua**
Beban akrual yang dimiliki Perusahaan pada 2019 sebesar Rp132,96 miliar, meningkat 91,16% atau sebesar Rp63,41 miliar dibandingkan dengan periode 2018 sebesar Rp65,56 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh BYMHD lain lain.
 5. **Uang Muka Pelanggan**
Uang muka pelanggan merupakan tanda persetujuan untuk mengerjakan proyek atau pekerjaan yang diberikan oleh pelanggan. Perusahaan mencatat uang muka pelanggan pada 2019 sebesar Rp32,66 miliar, meningkat 358,74% atau sebesar Rp25,54 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp7,11 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena Peruri belum memenuhi kewajibannya atau belum selesai mengerjakan proyek yang diberikan oleh pelanggan.
 6. **Liabilitas Lancar Lainnya**
Pada 2019, liabilitas lancar lainnya tercatat sebesar Rp480,74 miliar, menurun 45,83% atau sebesar Rp151,07 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp329,66 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya liabilitas yang timbul atas transaksi terkait dengan karyawan.
4. **Accrual Expense**
The Accrual Expense of the Company in 2019 was Rp132.96 billion, a 91.16% or Rp63.41 billion increase compared to Rp65.56 billion in 2018. The increase was due to other accrual payables.
 5. **Customer Down Payment**
Customer Down Payment is a sign of agreement to work on a project initiated by the customer. In 2019, Customer Down Payment was Rp32.66 billion, a 358.74% or Rp25.54 billion increase compared to Rp7.11 billion in 2018. The increase was because Peruri has not fulfilled its obligations or has not completed the projects initiated by the customers.
 6. **Other Current Liabilities**
In 2019, the Company's Other Current Liabilities was recorded at Rp480.74 billion, a 45.83% or Rp151.07 billion decrease compared to Rp329.66 billion in 2018. This decline was due to liabilities arising from employee-related transactions.

Liabilitas Jangka Panjang

Long-term Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities

dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Liabilitas jangka panjang tercatat sebesar Rp1,51 triliun pada 2019, menurun 3,77% atau sebesar Rp59,16 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp1,57 triliun. Penurunan tersebut disebabkan karena kredit investasi perbankan dan liabilitas imbalan pasca kerja.

The Company's Long-term Liabilities was recorded at Rp1.51 trillion in 2019, a 3.77% or Rp59.16 billion decline compared to Rp1.57 trillion in 2018. The decline was due to bank investment credits and post-employment reward liabilities.

1. **Pinjaman Bank untuk Jatuh Tempo Diatas 1 Tahun**
Pada 2019, Perusahaan mencatat pinjaman bank sebesar Rp1,17 triliun, terjadi penurunan 12,28% atau sebesar Rp163,79 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp1,33 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh penambahan kredit investasi untuk pemenuhan belanja modal (Capex 2018).
 2. **Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja**
Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada 2019 sebesar Rp333,42 miliar, meningkat 52,10% atau sebesar Rp114,20 miliar bila dibandingkan periode 2018 sebesar Rp219,22 miliar. Peningkatan ini disebabkan perhitungan
1. **Bank Loans Due in More Than 1 Year**
In 2019, Bank Loans taken by the Company was Rp1.17 trillion, a 12.28% or Rp163.79 billion decline compared to Rp1.33 trillion in 2018. The decline was due to the increase of investment credit to fulfill Capex 2018.
 2. **Estimated Liabilities on Work Rewards**
Estimated Liabilities on Work Rewards in 2019 was recorded at Rp333.42 billion, a 52.10% or Rp114.20 billion increase compared to Rp219.22 billion in 2018. The increase was due to the actuarial calculation on post-employment reward in 2019,

aktuarial atas imbalan pasca kerja selama periode 2019 yang mana salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan gaji pokok secara berkala di perusahaan dan juga disertai oleh meningkatnya tingkat inflasi.

3. Liabilitas Tidak Lancar Lainnya

Liabilitas tidak lancar lainnya pada 2019 tercatat sebesar Rp6,62 miliar, menurun 59,09% atau sebesar Rp9,57 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp16,19 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya temuan audit, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penghapusan utang tidak lancar lainnya milik Peruri sebesar 2,94 miliar dan reklasifikasi liabilitas tidak lancar lainnya ke liabilitas lancar milik PDS sebesar 6,63 miliar.

Ekuitas

Ekuitas Perusahaan terdiri dari modal, tambahan modal disetor, saldo laba, komponen ekuitas lainnya dan kepentingan non pengendali. Pada 2019, Perusahaan mencatat total ekuitas sebesar Rp3,07 triliun, meningkat 21,98% atau sebesar Rp552,60 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp2,51 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh saldo laba yang meningkat.

which was influenced by the periodic increments in basic salary as well as the increase of inflation rate.

3. Other Non-Current Liabilities

The Company's Other Non-Current Liabilities in 2019 was recorded at Rp6.62 billion, a 59.09% or Rp9.57 billion decline compared to Rp16.19 billion in 2018. The decline was due to audit findings which was followed up by the deletion of Other Non-Current Liabilities amounting to Rp2.94 billion, as well as reclassification of Peruri's Non-Current Liabilities to PDS's Current Liabilities amounting to Rp6.63 billion.

Equity

The Company's Equity consists of Capital, Additional Paid-In Capital, Retained Earnings, Other Equity Components, and Non-Controlling Interest. In 2019, the Company's total Equity was recorded at Rp3.07 trillion, a 21.98% or Rp552.60 billion increase compared to Rp2.51 trillion in 2018, due to an increase in Retained Earnings.

Grafik Modal

Graphic of Capital

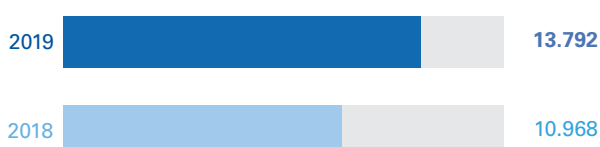
dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Grafik Kepentingan Non Pengendali

Graphic of Non-Controlling Interest

dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Grafik Ekuitas

Graphic of Equity

dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk

Equity Attributable to Parent Entity

dalam jutaan rupiah/In million rupiah



LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIANCONSOLIDATED INCOME STATEMENT
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	2018	2019	Perubahan Changes	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
PENDAPATAN USAHA OPERATING REVENUES	3.196.517	3.884.672	688.155	21,53
BEBAN POKOK PENJUALAN COST OF GOODS SOLD	(2.130.611)	(2.713.048)	(582.436)	27,34
LABA BRUTO GROSS PROFIT	1.065.906	1.171.624	105.718	9,92
Pendapatan Lainnya Other Income	59.492	457.132	397.640	668,39
Pendapatan Bunga Interest Income	23.753	43.529	19.775	83,25
Bagian atas Laba Bersih Ventura Bersama Net Profit Shares in Joint Ventures	24.091	43.139	19.048	79,07
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(557.000)	(615.565)	(58.565)	10,51
Beban Penjualan dan Pemasaran Sales and Marketing Expenses	(53.172)	(47.911)	5.260	(9,89)
Beban Bunga Interest Expenses	(137.612)	(142.711)	(5.099)	3,70
Beban Pajak Tax Expenses	(7.992)	(14.331)	(6.339)	79,31
Beban Lain-Lain Other Expenses	(9.519)	(14.646)	(5.127)	53,86
Jumlah – Bersih Total - Net	(657.959)	(291.364)	366.595	(55,72)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PROFIT BEFORE INCOMETAX	407.947	880.260	472.313	115,78
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)				
Beban Pajak Kini Current Tax Expense	(121.291)	(139.262)	(17.971)	14,82
Tangguhan Deferred	879	(15.692)	(16.572)	(1.884,48)
Beban Pajak Penghasilan – Bersih Income Tax Expense - Net	(120.412)	(154.954)	(34.542)	28,69
LABA BERSIHTAHUN BERJALAN NET PROFIT OF THE CURRENT YEAR	287.535	725.306	437.771	152,25
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN OTHER COMPREHENSIVE INCOME OF THE CURRENT YEAR				
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi Periode Berjalan: Other Comprehensive Profit (Expense) Not to be Reclassified to Profit & Loss of Current Period:				
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Kerja Actuarial Profit (Loss) on Work Reward Liabilities	(6.003)	(72.522)	(66.519)	1.108,08
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Profit of the Current Year	281.532	652.785	371.252	131,87
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Net Profit of the Current Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	285.041	722.380	437.339	153,43
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	2.495	2.926	432	17,30
	287.535	725.306	437.771	152,25

(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	2018	2019	Perubahan Changes	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Profit of the Current Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	278.614	649.960	371.346	133,28
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	2.918	2.825	(94)	(3,21)
	281.532	652.785	371.252	131,87

Pendapatan Usaha

Hasil penjualan dari produk-produk yang dihasilkan Perusahaan pada 2019 tercatat sebesar Rp3,88 triliun, meningkat 21,53% atau sebesar Rp688,15 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp3,20 triliun. Penjualan pada 2019 mengalami peningkatan proporsional dengan perolehan pesannya terutama pada pesanan produk uang NKRI.

Operating Revenues

The result from sales of manufactured products in 2019 was recorded at Rp3.88 trillion, a 21.53% or Rp688.15 billion increase compared to Rp3.20 trillion in 2018. Sales in 2019 increased proportionally with the orders, especially for Indonesian banknote orders.

Grafik Pendapatan Usaha
Graphic of Operating Revenues

dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Beban Pokok Penjualan

Besarnya beban pokok penjualan Perusahaan pada 2019 tercatat sebesar Rp2,71 triliun, meningkat 27,34% atau sebesar Rp582,44 miliar dibandingkan dengan periode 2018 sebesar Rp2,13 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan tingkat penjualan yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 terutama untuk biaya tinta dan penolong serta biaya tenaga kerja pada sektor uang kertas.

Cost of Goods Sold

Cost of Goods Sold (COGS) in 2019 was recorded at Rp2.71 trillion, a 27.34% or Rp582.44 billion increase compared to Rp2.13 trillion in 2018. The increase was in line with the increase in sales, particularly on ink and auxiliary costs, as well as labor costs in banknote manufacturing process.

Beban Usaha

Beban usaha Perusahaan terdiri dari beban umum dan administrasi, serta beban penjualan dan pemasaran yang secara total pada 2019 tercatat sebesar Rp663,48 miliar, meningkat 7,33% atau sebesar Rp45,312 miliar dibandingkan dengan periode 2018 sebesar Rp610,17 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh beban karyawan dan jasa profesional.

Operating Expenses

Operating Expenses consists of general expenses and administrative expenses, as well as sales and marketing expenses. In 2019, Total Operating Expenses was recorded at Rp663.48 billion, a 7.33% or Rp45.312 billion increase compared to Rp610.17 billion in 2018. The increase was due to employee and professional expenses.

Pendapatan dan Beban di Luar Usaha

Pendapatan di luar usaha pada 2019 tercatat sebesar Rp543,80 miliar, meningkat 406,63% atau sebesar Rp436,46 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp107,34 miliar. Nilai pendapatan di luar usaha ini diantaranya diperoleh dari:

1. Pendapatan bunga deposito dan jasa giro sebesar Rp43,53 miliar;
2. Penyerapan laba bersih perusahaan ventura bersama (PT SPS) sebesar Rp43,14 miliar;
3. Selisih kurs sebesar Rp758,07 juta;
4. Penjualan Aset Rp383,78 miliar;
5. Denda atas Keterlambatan pengiriman Rp955,79 juta;
6. Sewa tanah dan bangunan sebesar Rp4,59 miliar.
7. *Handling fee* dan test uji mutu sebesar Rp1,51 miliar.

Sedangkan beban di luar usaha pada 2019 tercatat sebesar Rp171,69 miliar, meningkat 10,71% atau sebesar Rp16,60 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp155,08 miliar. Nilai Beban Usaha ini sebagian besar diperoleh dari Beban bunga sebesar Rp142,71 miliar.

Non-Operating Income and Expenses

Non-operating income in 2019 was recorded at Rp543.80 billion, a 406.63% or Rp436.46 billion increase from Rp107.34 billion in 2018. This non-operating income was earned from among others:

1. Income from deposit interest and current account service in total of Rp43.53 billion;
2. Absorption of net profit from joint venture company (PT SPS) in total of Rp43.14 billion;
3. Exchange difference in total of Rp758.07 million;
4. Assets sale in total of Rp383.78 billion;
5. Fine for late delivery in total of Rp955.79 million;
6. Land and building lease in total of Rp4.59 billion;
7. Handling fee and quality check test in total of Rp1.51 billion.

Meanwhile, non-operating expenses in 2019 were recorded at Rp171.69 billion, a 10.71% or Rp16.60 billion increase from Rp155.08 billion in 2018. These non-operating expenses came mostly from interest expenses in total of Rp142.71 billion.

Grafik Laba Usaha
Graphic of Operating Profit

dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Labanya Sebelum Pajak Penghasilan

Perusahaan mencatat laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp880,26 miliar pada 2019, meningkat 115,78% atau sebesar Rp472,31 miliar dibandingkan dengan periode 2018 sebesar Rp407,95 miliar. Peningkatan pendapatan diluar usaha di 2019 disebabkan karena adanya penjualan bersih lahan Karawang sebesar Rp384,67 miliar (pendapatan atas penjualan lahan sebesar Rp591,7 miliar dikurangi dengan nilai buku tanah sebesar Rp794 juta dan kemudian dikurangi provisi sebesar Rp185,32 miliar serta biaya lain terkait SPU sebesar Rp20,9 miliar).

Pajak Penghasilan

Perusahaan mencatat manfaat (beban) pajak penghasilan pada 2019 sebesar Rp154,95 miliar, meningkat 28,69% atau sebesar Rp34,54 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp120,41 miliar. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan tahun 2019 dibandingkan dengan 2018.

Profit Before Income Tax

The Company recorded profit before income tax in total of Rp880.26 billion in 2019, a 115.78% or Rp472.31 billion increase from Rp407.95 billion in 2018. Increase in non-business income in 2019 due to the net sales of Karawang Land amounting to Rp384.67 billion (Land sales income of Rp591.7 billion are reduced with a land book value of Rp794 million and then deducted by the provision of Rp185.32 billion and also other costs related to SPU of Rp20.9 billion).

Income Tax

The Company recorded income tax benefit (expense) in 2019 at Rp154.95 billion, a 28.69% or Rp34.54 billion increase from Rp120.41 billion in 2018. This increase is in line with the increase of 2019 profit before income tax compared with 2018.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Perusahaan mencatat laba bersih tahun berjalan 2019 sebesar Rp725,31 miliar, meningkat 152,25% atau sebesar Rp437,77 miliar dibandingkan dengan periode 2018 sebesar Rp287,54 miliar. Secara keseluruhan, peningkatan ini merupakan dampak dari adanya peningkatan jumlah pesanan dari pelanggan utama dan penjualan aset.

Current Year Net Profit

The Company recorded current year net profit in 2019 at Rp725.31 billion, a 152.25% or Rp437.77 billion increase from Rp287.54 billion in 2018. As a whole, this increase was a result of increased order from main customers and sale of assets.

Grafik Laba Bersih Tahun Berjalan
Graphic of Net Profit

dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Pendapatan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan

Pada 2019, Perusahaan mencatat beban komprehensif tahun berjalan sebesar Rp72,52 miliar, meningkat 1.108,08% atau sebesar Rp66,52 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp6,00 miliar. Beban komprehensif ini muncul karena adanya perhitungan PSAK 24 atas imbalan kerja.

Current Year Comprehensive Income (Expenses)

In 2019, the Company recorded a current year comprehensive expenses of Rp72.52 billion, a 1,108.08% or Rp66.52 billion increase from Rp6.00 billion in 2018. These comprehensive expenses were due to the calculation of PSAK 24 against work compensation.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Perusahaan mencatat laba komprehensif tahun berjalan 2019 sebesar Rp652,78 miliar, meningkat 131,87% atau sebesar Rp371,25 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp281,53 miliar.

Current Year Comprehensive Profit

In 2019, the Company recorded a current year comprehensive profit of Rp652.78 billion, a 131.87% or Rp371.25 billion increase from Rp281.53 billion in 2018.

ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED CASH FLOW

(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	2018	2019	Perubahan Changes	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	352.679	1.155.571	802.892	227,66
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	(98.588)	375.614	474.202	(480,99)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(438.756)	(443.506)	(4.751)	1,08
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) of Net Cash and Cash Equivalents	(184.665)	1.087.678	1.272.343	(689,00)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	1.021.748	837.083	(184.665)	(18,07)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	837.083	1.924.761	1.087.678	129,94

Kas dan setara kas pada 2019 tercatat sebesar Rp1.924,76 miliar, mengalami kenaikan 129,94% atau sebesar Rp1.087,68 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp837,08 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan kas dari aktivitas operasi dan kas dari aktivitas investasi.

Cash and cash equivalents in 2019 were recorded at Rp1,924.76 billion, a 129.94% or Rp1,087.68 billion increase from Rp837.08 billion in 2018. The increase was caused by increased cash from operating activities and cash from investing activities.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada 2019, arus kas dari aktivitas operasi tercatat sebesar positif Rp1.155,57 miliar, mengalami peningkatan 227,66% atau sebesar Rp802,89 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar positif Rp352,68 miliar. Peningkatan ini didominasi oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan.

Cash Flow from Operating Activities

In 2019, cash flow from operating activities was recorded at Rp1,155.57 billion, a 227.66% or Rp802.89 billion increase from Rp352.68 billion in 2018. The increase was mostly caused by increased income from customers.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities

dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi pada 2019 tercatat sebesar positif Rp375,61 miliar, mengalami peningkatan 480,99% atau sebesar Rp474,20 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar minus Rp98,59 miliar. Arus kas dari aktivitas investasi ini terdiri dari pengeluaran kas untuk penempatan deposito, pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap dan pengeluaran kas untuk penyertaan.

Cash Flow from Investing Activities

Cash flow from investing activities in 2019 was recorded at Rp375.61 billion, a 480.99% or Rp474.20 billion increase from Rp98.59 billion in 2018. This cash flow from investing activities consisted of deposit placement, cash expense for procurement of fixed assets, and cash expense for investment.

Grafik Arus Kas dari Aktivitas Investasi Graphic of Cash Flow from Investing Activities

dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada 2019, pengeluaran arus kas dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp443,51 miliar, lebih besar 1,08% atau sebesar Rp4,75 miliar dibandingkan periode 2018 sebesar Rp438,75 miliar. Salah satu penyebab peningkatan ini adalah karena adanya pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, pembayaran pokok pinjaman dan pengeluaran kas bunga pinjaman.

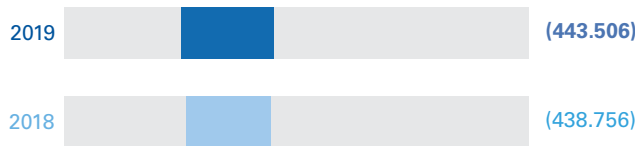
Cash Flow from Financing Activities

Cash flow from Financing activities in 2019 was recorded at Rp443.51 billion, a 1.08% or Rp4.75 billion increase from Rp438.75 billion in 2018. One of the reasons for this increase was the cash expenses for dividend payment, principal loan payment, and loan interest.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flow from Financing Activities

dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Kas dan Setara Kas Akhir

Perusahaan mencatat kas dan setara kas akhir sebesar Rp1,92 triliun, mengalami kenaikan 129,94% atau sebesar Rp1,09 triliun dibandingkan periode 2018 sebesar Rp837,08 miliar, peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan dari arus kas bersih aktivitas operasi sebesar 227,66% dan arus kas bersih dari aktivitas investasi 480,99% dibandingkan dengan 2018.

Final Cash and Cash Equivalents

The Company recorded final cash and cash equivalents of Rp1.92 trillion, a 129.94% or Rp1.09 trillion increase from Rp837.08 billion in 2018. This increase was caused by increased net cash flow from operating activities by 227.66% and from net cash flow from investing activities by 480.99% compared to 2018.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas pada akhir 2019 memperlihatkan jumlah sebesar Rp3,07 triliun meningkat 21,98% dibandingkan 2018 yang terdiri atas modal sebesar Rp363,57 miliar, tambahan modal disetor Rp64,06 miliar dan cadangan sebesar Rp1,93 triliun. Selain itu, terdapat komponen ekuitas lainnya sebesar negatif Rp107,36 miliar, saldo laba sebesar Rp933,68 miliar dan kepentingan non pengendali sebesar Rp13,79 miliar yang mengalami peningkatan dari 2018 masing-masing sebesar 207,26%, 75,63% dan 25,76%.

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Statement of changes in equity at the end of 2019 showed a total of Rp3.07 trillion, a 21.98% increase from in 2018, which consisted of a capital of Rp363.57 billion, additional paid up capital of Rp64.06 billion, and reserve of Rp1.93 trillion. Additionally, there were other equity components which amounted to -Rp107.36 billion, retained earning of Rp933.68 billion, and non-controlling interest of Rp13.79 billion, which increased from 2018 by 207.26%, 75.63%, and 25.76% respectively.

(dalam jutaan rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	2018	2019	Perubahan Changes	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Modal Capital	363.573	363.573	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid in Capital	(64.059)	(64.059)	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Components	(34.942)	(107.362)	(72.420)	207,26
Cadangan Reserve	1.706.966	1.927.107	220.141	12,90
Saldo Laba Retained Earning	531.628	933.683	402.055	75,63
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Difference in Value Resulting from Restructuring Transaction of Entities Under Common Control	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Total Equity that can be Attributed to Owners of Parent Entity	2.503.167	3.052.942	549.776	21,96
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	10.968	13.792	2.825	25,76
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.514.134	3.066.734	552.600	21,98

Grafik Ekuitas

Graphic of Equity

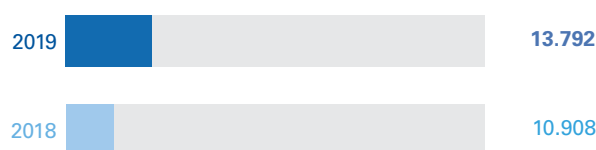
dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Kepentingan Non Pengendali

Non-Controlling Interest

dalam jutaan rupiah/In million rupiah



Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Equity Attributable to Owners of Parent Entity

dalam jutaan rupiah/In million rupiah



RASIO-RASIO KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Berikut adalah analisis mengenai rasio keuangan konsolidasian penting yang menggambarkan pencapaian kinerja keuangan dan operasional Perusahaan pada 2019 dan 2018.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Tingkat kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tercermin dalam rasio kas dan rasio lancar.

Hal ini berarti bahwa aset lancar Perusahaan mampu memenuhi liabilitas jangka pendek Perusahaan sebanyak 1,76 kali atau 1 Rupiah liabilitas jangka pendek Perusahaan dapat dijamin pembayarannya dengan 1,76 Rupiah aset lancar dan menunjukkan bahwa sepanjang 2019 Perusahaan mampu menutupi liabilitas lancarnya dengan menggunakan seluruh aset lancarnya.

Nilai ideal kedua rasio likuiditas ini adalah minimum sebesar 150%. Semakin besar nilai rasio akan semakin baik dan Perusahaan dalam kondisi sehat.

Grafik Cash Ratio

Graphic of Cash Ratio

dalam %/In %



CONSOLIDATED FINANCIAL PERFORMANCE RATIOS

The following is analysis on important consolidated financial ratios that reflect the achievements of the Company's financial and operational performances in 2019 and 2018.

Liquidity Ratio

Liquidity ratio is the measurement used to calculate the Company's ability to fulfill short term obligation. This ratio is used to measure the liquidity of a company. The Company's ability to fulfill short term obligation is reflected in cash ratio and current ratio.

This means that the Company's current assets were able to fulfill short term liability at 1.76 times, or in other words, the payment of Rp1 of its short term liability can be covered with Rp1.76 of its current assets, which showed that throughout 2019, the Company was able to cover its current liabilities by using all of its current assets.

The ideal value for both liquidity ratios is 150% at the minimum. The greater the ratio value, the better and healthier the Company is.

Grafik Current Ratio

Graphic of Current Ratio

dalam %/In %



Rasio Leverage atau Solvabilitas

Rasio *leverage* atau solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aset atau kekayaan yang dimiliki Perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Perusahaan yang memiliki rasio solvabilitas yang tinggi maka memiliki risiko kerugian yang lebih besar daripada Perusahaan dengan rasio yang rendah. Kemampuan ini antara lain dapat diukur melalui rasio liabilitas terhadap aset (*debt to total asset*) dan rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to total equity*).

Rasio liabilitas terhadap aset (*debt to total asset*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pendanaan Perusahaan dibiayai oleh liabilitas Perusahaan dibanding dengan total aset yang dimiliki oleh Perusahaan, dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset. Selain itu, kemampuan Perusahaan juga dapat diukur dari rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to total equity*) yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap Rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan liabilitasnya, dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas. Liabilitas tidak boleh lebih besar dari modal sendiri agar beban Perusahaan tidak bertambah.

Rasio liabilitas terhadap aset Perusahaan pada 2019 tercatat sebesar 49,44% menurun dari periode 2018 sebesar 50,27%. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan Perusahaan yang dibiaya oleh liabilitas Perusahaan sebesar 49,44% dari total aset yang dimiliki Perusahaan.

Rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) Perusahaan pada 2019 tercatat sebesar 98,23% menurun dibandingkan periode 2018 sebesar 101,52%. Hal ini menunjukkan besarnya pendanaan Perusahaan yang dibiayai oleh total liabilitas sebesar 98,23% dari total ekuitasnya.

Semakin besar nilai kedua rasio diatas, maka semakin besar liabilitas yang dimiliki Perusahaan, artinya semakin besar kewajiban Perusahaan yang harus dipenuhi.

Leverage Ratio or Solvability

Leverage ratio or solvability is the ratio to assess a Company's ability in paying off all obligations, both short term and long term, with guarantee of assets or asset owned until the Company is closed or liquidated. A company with a high solvability ratio had a bigger loss risk compared to another company with a low ratio. This ability could be measured with debt to total asset and debt to total equity.

Debt to Total Asset is a ratio used to measure how much a Company is funded by its liabilities compared to its own total assets. It is calculated by comparing total liability to total assets. In addition, the Company's ability can also be measured with liability ratio to equity (*debt to total equity*), which is used to measure how much each rupiah of its own assets constitute the guarantee for its overall liabilities, and calculated by comparing total liability to total equity. Liabilities must not be higher than own assets, to ensure that the Company's expense would not increase.

The Company recorded a liability to total asset ratio at 49.44% in 2019, a decrease from 50.27% in 2018. This showed that the Company's fund from its liabilities constituted 49.44% of its total assets.

The Company recorded a debt to equity ratio at 98.23% in 2019, decreasing from 101.52% in 2018. This showed that the Company's fund from its liabilities constituted 98.23% of its total equity.

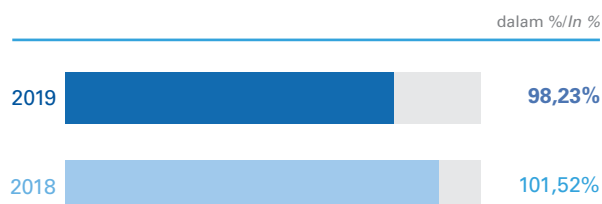
The higher these two ratios are, the higher the Company's liabilities are. This means that the Company has more obligation to fulfill.

Grafik Debt to Asset Ratio

Graphic of Debt to Asset Ratio

**Grafik Debt to Equity Ratio**

Graphic of Debt to Equity Ratio

**Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas adalah ukuran yang dipergunakan Perusahaan untuk menghitung hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen dalam mengelola Perusahaan. Rasio ini merupakan rasio utama dalam seluruh laporan keuangan, karena tujuan utama Perusahaan adalah hasil operasi/keuntungan. Adapun tingkat profitabilitas perusahaan pada 2019 ditunjukkan dengan rasio *Net Profit Margin*, *Return on Investment* dan *Return on Net Worth*.

1. Rasio Net Profit Margin

Pada 2019 perusahaan mencatat rasio net profit margin sebesar 18,60%, berarti bahwa besarnya prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari setiap penjualannya sebesar 18,60% atau meningkat dibandingkan periode 2018 sebesar 8,63%.

Profitability Ratio

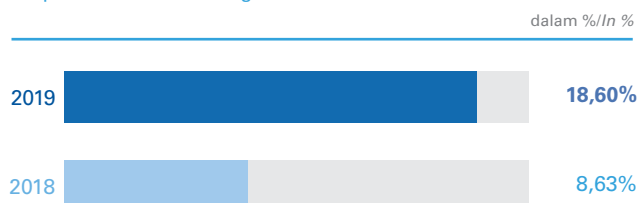
Profitability Ratio is the measurement used by The Company to calculate the net end result from various policies and decisions taken by management, which will provide a final verdict on the management's effectiveness in managing the Company. This ratio is the main ratio in all financial statements, because the Company's main objective is to seek profit/operational result. Meanwhile, the Company's profitability level in 2019 was shown through the ratios of Net Profit Margin, Return on Investment, and Return on Net Worth.

1. Net Profit Margin Ratio

In 2019, the Company recorded a net profit margin ratio of 18.60%, which means that the percentage of its net profit in each sale constituted 18.60%, or an 8.63% increase from 2018.

Grafik Net Profit Margin

Graphic of Net Profit Margin

2. *Return on Investment*

Pada 2019, perusahaan mencatat rasio *return on investment* sebesar 15,51% atau menurun bila dibandingkan dengan 2018 sebesar 15,40%.

2. Return on Investment

In 2019, the Company recorded a return on investment ratio of 15.51%, or a 15.40% decrease from 2018.

Grafik Return on Investment

Graphic of Return on Investment



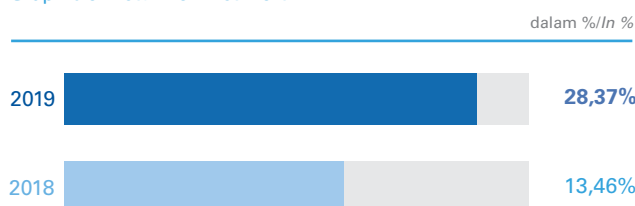
3. Return on Net Worth

Perusahaan mencatat rasio *return on net worth* pada 2019 sebesar 28,37% atau meningkat dibandingkan dengan periode 2018 sebesar 13,46%. Hal ini terkait pula dengan kenaikan laba bersih tahun berjalan yang dihasilkan perusahaan pada periode 2019 dibandingkan periode 2018.

3. Return on Net Worth

In 2019, the Company recorded a return on net worth ratio of 28.37%, or a 13.46% increase from 2018. This is attributable to the Company's increased net profit of the current year in 2019 compared to 2018.

Grafik Return on Net Worth
Graphic of Return on Net Worth



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan membayar utang dapat dilihat melalui rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, antara lain dapat diukur melalui rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki Perusahaan dengan jumlah liabilitas jangka pendeknya sedangkan rasio lancar dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah asset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendeknya.

ABILITY TO REPAY DEBTS AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY LEVEL

ABILITY TO REPAY DEBTS

Ability to repay debts can be seen from liquidity ratio and solvability. Liquidity ratio shows a Company's ability to fulfill the short-term liability and among others, is measured by cash ratio and current ratio. Cash ratio is measured by comparing cash and cash equivalent with total of short-term liability, meanwhile the current ratio can be measured by comparing the total of current asset with short-term liability.

Tabel Rasio Likuiditas
Table of Liquidity Ratio

Kinerja Keuangan Financial Performance	Hasil Perhitungan Rasio Ratio Calculation Result		Perubahan Changes	Persentase Percentage
	2018	2019		
Cash Ratio (%)	86,08%	129,25%	43,16%	50,14%
Current Ratio (%)	197,63	176,14	(21,49%)	(10,87%)

Sedangkan rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya antara lain dapat diukur melalui rasio liabilitas terhadap aset (*debt to total asset ratio*) dengan cara membandingkan total liabilitas terhadap total asetnya dan rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) dengan cara membandingkan jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitasnya.

Meanwhile, the solvability ratio shows the Company's ability to pay its obligations, which could be measured by debt to total asset ratio, by comparing total of liquidity toward total of asset. Debt to equity ration is known by comparing the total of liability to the total of equity.

Tabel Rasio Solvabilitas

Table of Solvability Ratio

Kinerja Keuangan Financial Performance	Hasil Perhitungan Rasio Ratio Calculation Result		Perubahan Changes	Persentase Percentage
	2018	2019		
Debt to Asset Ratio (%)	50,27%	49,44%	(0,83%)	(1,65%)
Debt to Equity Ratio (%)	101,52%	98,23%	(3,29%)	(3,24%)

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang) maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut dapat disajikan sebagai aset tidak lancar.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang non usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tak tertagih, dibuat Penyisihan piutang tak tertagih. Kolektibilitas piutang Perusahaan berdasarkan collection period ratio pada 2019 sebesar 5 hari lebih cepat dibandingkan pada 2018 sebesar 32 hari. Hal ini disebabkan piutang usaha pada 2019 mengalami penurunan sebesar Rp227,12 miliar atau (80,95%) dari periode 2018.

RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE

Business receivables are the total debts of customers on the goods and service sales in normal business activities. If the receivables are estimated to be billed in a year or less (or if longer, in normal operational cycle), the receivables are classified as current asset. If not, the receivables are be considered as non-current asset.

Business receivables collectivity and non-business receivable were reviewed periodically. Receivables that could not be billed were set aside as written-off receivables. The Company's receivables collectibility based on the collection period ratio was 32 days, 5 days faster than in 2018. This was caused by decreasing trade receivables in 2019 by Rp227.12 billion or -80.95% from 2018.

Tabel Kolektibilitas Piutang
Table of Receivables Collectibility

Hasil Perhitungan Rasio Ratio Calculation Results		Perubahan Changes	Persentase Percentage
2018	2019		
32	5	27	(5,4%)

**STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL****CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT
POLICY ON CAPITAL STRUCTURE****Struktur Modal**
Capital Structure(dalam jutaan rupiah)
(In million rupiah)

Uraian Description	2018	Kontribusi (%) Contribution	2019	Kontribusi (%) Contribution	Pertumbuhan Growth	
					Nominal	%
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	972.416	38,27	1.489.232	49,66	516.817	53,15
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	1.586.753	61,73	1.509.595	50,34	(59.159)	(3,77)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.541.169	50,27	2.998.827	49,44	457.658	18,01
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.514.134	49,73	3.066.734	50,56	552.600	21,98
Total Modal yang Diinvestasikan Total Invested Capital	5.055.304	100,00	6.065.562	100,00	1.010.258	19,98

Tujuan utama pengelolaan Perusahaan adalah memastikan bahwa rasio modal tetap terjaga untuk mendukung bisnis Perusahaan. Pemilihan ini didasarkan pada penyesuaian yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap kondisi perekonomian Indonesia dan lebih mempertimbangkan risiko bisnis yang ada.

Komposisi struktur modal Perusahaan pada 2019 lebih didominasi oleh ekuitas dibanding liabilitas. Pada 2019, aset yang dibiayai ekuitas adalah 50,56% lebih tinggi dibandingkan pada 2018 sebesar 49,73%. Sedangkan aset yang dibiayai liabilitas pada 2019 adalah sebesar 49,44 lebih rendah dibandingkan 2018 sebesar 50,27%.

Peruri adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak terbagi atas saham-saham. Tujuan pendirian Perusahaan untuk kemanfaatan umum berupa pencetakan uang kertas dan logam Rupiah Republik Indonesia, dokumen sekuriti untuk dalam negeri, uang dan produk sekuriti negara lain dan menyediakan jasa yang mempunyai nilai sekuriti tinggi serta jasa digital sekuriti.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Pada 2019 Perusahaan memiliki ikatan material untuk investasi barang modal berupa komitmen yang telah ditetapkan dalam RKAP 2019, meliputi pembelian aset tetap berupa kendaraan, mesin, peralatan kantor dan pabrik serta bangunan dengan total nilai rencana investasi sebesar Rp838,62 miliar.

Tujuan investasi barang modal adalah untuk mendukung jalannya aktivitas serta kegiatan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

Sumber dana untuk memenuhi ikatan material untuk investasi barang modal tersebut sebagian besar diperoleh dari kredit investasi perbankan.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Realisasi investasi barang modal selama 2019 sebesar Rp629,810 miliar atau menurun 28,63% dari realisasi 2018 sebesar Rp882,49 miliar.

Rincian atas realisasi investasi barang modal selama 2019 sebagai berikut:

The main objective of corporate management is to ensure that the capital ratio is maintained to support its business. This matter is based on the adjustment done by the Company on Indonesian economic condition and in consideration of existing business risks.

Peruri's capital structure composition in 2019 was dominated more by equity than liability. In 2019, assets funded by equity was 50.56%, 49.73% higher than in 2018. Meanwhile, assets funded by liabilities in 2019 was 49.44%, 50.27% lower than in 2018.

Peruri is a SOE that all of the capital is owned by Indonesian Republic and is not divided into stocks. The Company's objective of establishment is to benefit the public in form of Rupiah banknotes printing and coins minting, domestic security documents, money, and overseas security products, as well as high security services and digital security solutions.

MATERIAL BOND FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

In 2019, the Company had material bond for capital goods investment through commitments determined in 2019 RKAP, including purchase of assets such as vehicles, machine, office equipment, and factory and building with the total value of investment planning amounting to Rp838.62 billion.

The objective of capital goods investment is to support long term corporate activities and operations.

The source of funds to fulfill this material bond for capital goods investment mostly came from banking investment credit.

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Realization of capital goods investment in 2019 was Rp629.810 billion, or decreasing by 28.63% from Rp882.49 billion in 2018.

Details on realization of capital goods investment during 2019 are as follows:

(dalam jutaan rupiah)
(In million rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2018 Realization 2018	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Realisasi 2019 Realization 2019	% Pencapaian Achievement	% Naik/(Turun) Increase/ (Decrease)
Mesin dan Peralatan Kantor Machine and Office Equipment	17.965	97.708	79.837	81,71	344,40

(dalam jutaan rupiah)
(In million rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2018 Realization 2018	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Realisasi 2019 Realization 2019	% Pencapaian Achievement	% Naik/(Turun) Increase/ (Decrease)
Alat dan Perkakas/ <i>Spareparts</i> Tools and Spareparts	29.973	33.743	12.983	37,26	(56,69)
Mesin dan Peralatan Pabrik Machine and Factory Equipment	670.949	439.784	347.103	79,12	(48,27)
Bangunan dan P3KPA Building and P3KPA	47.408	97.196	71.041	73,09	49,85
Aset tak Berwujud Intangible Assets	116.194	170.190	118.846	69,83	2,28
Total Capex	882.490	838.620	629.810	75,10	(28,63)

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2019 DAN PROYEKSI TAHUN 2020

Tabel Perbandingan antara Target RKAP 2019 dengan Realisasi 2019 dan Target 2020.

TARGET REALIZATION IN 2019 AND PROJECTION OF 2020

Comparison Table between RKAP Target in 2019, Realization in 2019, and Target for 2020.

Posisi Keuangan**Financial Position**(dalam jutaan rupiah)
(In million rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2019 Realization 2019	RKAP 2019 Planned Target for 2019	% Pencapaian Target Target Achievement	RKAP 2020
Aset Lancar Current Assets	2.623.183	1.865.693	140,60	1.656.131
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	3.442.379	4.002.984	86,00	4.079.472
Jumlah Aset Total Assets	6.065.562	5.868.677	103,35	5.735.603
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	1.489.232	1.168.151	127,49	1.042.038
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	1.509.595	1.992.754	75,75	1.492.881
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.998.827	3.160.905	94,87	2.534.919
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.066.734	2.707.772	113,26	3.200.684
Jumlah Liabilitas & Ekuitas Total Liabilities & Equity	6.065.562	5.868.677	103,35	5.735.603

Pada 2019, realisasi jumlah aset lancar tercatat sebesar Rp2,62 triliun atau 140,60% dari target 2019 sebesar Rp1,87 triliun dan realisasi aset tidak lancar sebesar Rp3,44 triliun atau 86,00% dari target 2019 sebesar Rp4,00 triliun. Perusahaan memproyeksikan aset lancar pada 2020 akan mencapai Rp1,66 triliun dan aset tidak lancar pada 2020 akan mencapai Rp4,08 triliun.

In 2019, the realization of total current assets was recorded at Rp2.62 trillion, or 140.60% of the target in 2019 at Rp1.87 trillion, while realization of non-current assets was Rp3.44 trillion, or 86.00% of the target in 2019 at Rp4.00 trillion. The Company projected current assets in 2020 to reach Rp1.66 trillion and non-current assets in 2020 to reach Rp4.08 trillion.

Realisasi jumlah liabilitas jangka pendek pada 2019 tercatat sebesar Rp1,49 triliun atau 127,49% dari target 2019 sebesar Rp1,17 triliun dan realisasi liabilitas jangka panjang sebesar Rp1,51 triliun atau 75,75% dari target 2019 sebesar Rp1,99 triliun. Perusahaan memproyeksikan liabilitas jangka pendek pada 2020 akan mencapai Rp1,04 triliun dan liabilitas jangka panjang akan mencapai Rp1,49 triliun.

The realization of total short-term liabilities in 2019 was recorded at Rp1.49 trillion or 127.49% of the 2019 target of Rp1.17 trillion and the realization of long-term liabilities was Rp1.51 trillion or 75.75% of the 2019 target of Rp1.99 trillion. The company projects that short-term liabilities in 2020 will reach Rp1.04 trillion and long-term liabilities of Rp1.49 trillion.

Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain

Profit/Loss and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan rupiah)
(In million rupiah)

Uraian Description	Realisasi Realization 2019	RKAP 2019 Planned Target for 2019	% Pencapaian Target Target Achievement	RKAP 2020
Pendapatan Usaha Operating Revenues	3.884.672	4.125.510	94,16	3.669.924
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(2.713.048)	(2.940.992)	92,25	(2.577.994)
Laba (Rugi) Bruto Gross Profit (Loss)	1.171.624	1.184.517	98,91	1.091.929
Beban Usaha Business Expenses	(677.807)	(645.899)	104,94	(618.246)
Laba (Rugi) Usaha Business Profit (Loss)	493.817	538.618	91,68	473.683
Pendapatan Lain-Lain Other Income	543.800	51.108	1.064,01	51.366
Beban Lain-Lain Other Expenses	(157.356)	(161.339)	97,53	(188.882)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	880.260	428.387	205,48	336.167
Beban Pajak Penghasilan – Bersih Tax Income Expense – Net	(154.954)	(126.537)	122,46	(116.210)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit of Current Year	725.306	301.851	240,29	219.957
Pendapatan (Beban) Komprehensif – Bersih Comprehensive Income (Expense) – Net	(72.522)	-	100,00	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Profit of Current Year	652.785	301.851	216,26	219.957
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Net Profit of Current Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of Holding Entity	722.380	298.722	241,82	218.390
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	2.926	3.129	93,53	1.567
	725.306	301.851	240,29	219.957
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Profit of Current Year Attributable to :				
Pemilik Entitas Induk Owner of Holding Entity	649.960	298.722	217,58	218.390
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	2.825	3.129	90,29	1.567
	652.785	301.851	216,26	219.957

Pada 2019, realisasi pendapatan usaha mencapai 94,16% dari target. Belum tercapainya target penjualan bersih dikarenakan menurunnya penempatan pesanan terutama untuk produk uang dari pelanggan utama, dikarenakan pada awal 2018 masih mengerjakan *carry over* pesanan tahun sebelumnya, sehingga dapat diprediksi bahwa persediaan produk uang masih tersedia sampai dengan akhir 2019.

In 2019, the realization of operating revenue reached 94.16% of the target. The failure to reach the net sales target was caused by decreasing order placement, especially for money products from main customers, due to carry over of order from the previous year in the beginning of 2018. Therefore, it can be assumed that the supply of money products was still available until the end of 2019.

Arus Kas

Cash Flow

(dalam jutaan rupiah)
(In million rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2019 Realization 2019	RKAP 2019 Planned Target for 2019	% Pencapaian Target Target Achievement	RKAP 2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	1.155.571	846.399	136,53	119.128
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	375.614	(530.062)	(70,86)	(1.000.179)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(443.506)	(527.781)	84,03	(618.710)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) of Net Cash and Cash Equivalents	1.087.678	(211.444)	(514,40)	(1.499.762)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	837.401	837.401	99,96	1.924.761
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	1.924.761	625.957	307,49	425.000

Pada 2019, arus kas dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan masing-masing adalah Rp1,16 triliun, Rp375,61 miliar dan minus Rp443,51 miliar sehingga saldo akhir kas dan setara kas di 2019 sebesar Rp1,92 triliun atau mencapai 307,49% dari target Rp625,96 miliar. Perusahaan memproyeksikan saldo akhir kas dan setara kas pada 2020 sebesar Rp425,00 miliar.

In 2019, cash flow from operating, investing, and funding activities were Rp1.16 trillion, Rp375.61 billion, and -Rp443.51 billion respectively, which means that final cash balance and cash equivalents in 2019 was Rp1.92 trillion or 307.49% of the target at Rp625.96 billion. The Company projected final cash balance and cash equivalents in 2020 at Rp425.00 billion.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Health Level

Indikator Penilaian Assessment Indicator	Skor Penilaian Assessment Score			%	
	Realisasi Realization 2018	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Realisasi Realization 2019	Pencapaian Achievement	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease)
Aspek Keuangan Financial Aspect	61,00	62,00	66,50	107,26	9,02
Aspek Operasional Operational Aspect	14,07	15,00	15,00	100,00	6,61
Aspek Administrasi Administrative Aspect	14,00	14,00	14,00	100,00	-
Total Skor Total Score	89,07	91,00	95,50	104,95	7,22
Tingkat Kesehatan Health Level	Sehat AA Healthy AA	Sehat AA Healthy AA	Sehat AAA Healthy AAA		

Aspek Keuangan
Financial Aspect

Indikator Penilaian Assessment Indicator	Skor Penilaian Assessment Score			%	
	Realisasi Realization 2018	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Realisasi Realization 2019	Pencapaian Achievement	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease)
Return on Equity (ROE)	16,00	16,00	20,00	125,00	25,00
Return on Equity (ROI)	13,50	13,50	13,50	100,00	-
Cash Ratio	5,00	5,00	5,00	100,00	-

Aspek Keuangan
Financial Aspect

Indikator Penilaian Assessment Indicator	Skor Penilaian Assessment Score			%	
	Realisasi Realization 2018	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Realisasi Realization 2019	Pencapaian Achievement	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease)
Current Ratio	5,00	5,00	5,00	100,00	-
Collection Periods (hari)	5,00	5,00	5,00	100,00	-
Inventory Turnover (hari)	4,50	5,00	5,00	100,00	100,00
Total Assets Turnover (TATO)	3,00	3,50	3,00	85,71	-
Equity to Total Assets	9,00	9,00	10,00	111,11	11,11
Jumlah Aspek Keuangan Total Score of Financial Aspects	61,00	62,00	66,50		

Tingkat Kesehatan Perusahaan dihitung dan hasil skor/bobotnya ditentukan berdasarkan KEP-100/MBU/2002. Pada 2019, tingkat kesehatan Perusahaan di atas target yang ingin dicapai dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada 2018.

The calculation method and score/weight of the Company is based on KEP-100/MBU/2002. In 2019, Peruri's level of health was above the desired target and improved from its condition in 2018.

PENCAPAIAN TARGET ANAK PERUSAHAAN 2019

Gambaran secara umum mengenai anak perusahaan pada 2019 dapat tercermin dalam laporan keuangan pokok anak perusahaan sebagai berikut:

1. Peruri Security Papermill/PT Kertas Padalarang (PT KP)
 - a. Laporan Posisi Keuangan

TARGET ACHIEVEMENT OF SUBSIDIARIES IN 2019

The general outlook of subsidiaries in 2019 is reflected in the Company's main financial statement as follows:

1. Peruri Security Papermill/PT Kertas Padalarang (PT KP)
 - a. Financial Statement Position

Uraian Description	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Realisasi Per 31 Des 2019 Realization as of Dec 31, 2019	% Pencapaian Achievement
ASET ASSETS			
Aset Lancar Current Assets	71.910	85.193	118,47
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	48.079	31.788	66,12
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	119.989	116.981	97,49
LIABILITAS & EKUITAS LIABILITIES & EQUITY			
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	29.523	33.138	112,24
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	465	202	43,39
Ekuitas Equity	90.001	83.641	92,93
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	119.989	116.981	97,49

b. Laporan Laba (Rugi)

b. Profit (Loss) Statement

(dalam jutaan rupiah)
(In million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Realisasi 2019 Realization 2019	% Pencapaian Achievement
Pendapatan Usaha Operating Revenues	190.107	152.027	79,97
Harga Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(162.706)	(125.352)	77,04
Laba/(Rugi) kotor Gross Profit (Loss)	27.400	26.674	97,35
Biaya Usaha Business Expense	(18.647)	(16.403)	87,97
Laba/(Rugi) Usaha Business Profit (Loss)	8.754	10.272	117,34
Pendapatan/(Biaya) Lain-Lain: Other Income/(Expenses):			
Pendapatan Lain-Lain Other Income	1.570	1.444	92,01
Biaya Lain-Lain Other Expenses	(5.113)	(20.215)	199,77
Jumlah Total	(3.544)	(8.771)	247,49
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Profit/(Loss) Before Tax	5.210	1.501	28,80
Pajak Kini Current Tax	-	-	-
Pajak Tangguhan Deferred Tax	-	(1.482)	-
Laba/(Rugi) Setelah Pajak Profit/(Loss) After Tax	5.210	18	0,35

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa posisi laporan keuangan PT Kertas Padalarang tidak mencapai target 2019. Posisi Aset dan Liabilitas dan Ekuitas pada 2019 tercatat sebesar Rp116,98 miliar atau 97,49% dari target RKAP 2019 sebesar Rp119,99 miliar. Sedangkan pada Laporan Laba (Rugi) 2019, tercatat bahwa PT Kertas Padalarang membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp18 juta atau 0,35% dari target RKAP 2019 sebesar Rp5,21 miliar.

Tidak tercapainya target pendapatan 2019 disebabkan karena beberapa hal di bawah ini:

- *Sample* paspor RI, materai serta band uang masih dalam tahap uji coba. Realisasi pendapatan dari sektor *trading* berasal dari penjualan kertas *non security* berupa doos pengemas, *wrapping paper coin* dan bahan penolong keperluan internal Peruri.

Based on the above table, it shows that PT Kertas Padalarang financial statement position did not achieve the target set in 2019. Asset, liability and equity position in 2019 was recorded at Rp116.98 billion or 97.49% of the target in RKAP 2019 at Rp119.99 billion. Meanwhile, in Profit (Loss) statement of 2019, it was recorded that PT Kertas Padalarang posted current year profit of Rp18 million or 0.35% of RKAP 2019 target of Rp5.21 billion.

The failure to meet the income target in 2019 was caused by the following factors:

- The Indonesian Republic passport, stamp, and money band samples were still in trial period. The realization of income from trading sector came from the sale of non-security paper in form of packaging cardboard, coin wrapping paper, and supporting material for Peruri's internal needs.

- Adanya kerusakan *aplicator chemical roll* pada mesin MK 3 sehingga produksi sempat berhenti sejak bulan Maret 2019 dan baru mulai beroperasi kembali di bulan September.
- The damaged chemical roll applicator in the MK 3 machine resulted in production delay from March 2019 until it restarted in September.

2. PT Peruri Wira Timur (PT PWT)

a. Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan rupiah)
(In million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Realisasi 2019 Realization 2019	% Pencapaian Achievement
Aset Assets			
Aset Lancar Current Assets	29.070	32.597	112,13
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	32.869	19.767	60,14
Jumlah Aset Total Assets	61.939	52.364	84,54
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity			
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	13.712	7.634	55,67
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	8.750	-	-
Ekuitas Equity	39.477	44.730	113,31
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	61.939	52.364	84,54

b. Laporan Laba (Rugi)

Uraian Description	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Realisasi 2019 Realization 2019	% Pencapaian Achievement
Pendapatan Usaha Operating Revenues	71.715	62.769	87,53
Harga Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(34.232)	(32.326)	94,43
Labab/(Rugi) Kotor Gross Profit/(Loss)	37.482	30.443	81,22
Biaya Usaha Business Expense	(26.867)	(19.528)	72,68
Labab/(Rugi) Usaha Business Profit/(Loss)	10.616	10.915	102,83
Pendapatan Lain-Lain Other Income	864	1.126	134,27
Biaya Lain-Lain Other Expenses	(526)	(139)	32,82
Jumlah Total	338	988	291,90
Labab/(Rugi) Sebelum Pajak Profit/(Loss) Before Tax	10.954	11.903	108,67

b. Profit (Loss) Statement

Uraian Description	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Realisasi 2019 Realization 2019	% Pencapaian Achievement
Pajak Kini Current Tax	(2.810)	(3.396)	120,85
Pajak Tangguhan Deferred Tax	-	328	-
Pajak Tax	(2.810)	(3.069)	109,19
Laba/(Rugi) setelah Pajak Profit/(Loss) after Tax	8.144	8.834	108,48

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa posisi laporan keuangan PT PWT tidak mencapai target 2019. Posisi Aset dan Liabilitas & Ekuitas pada 2019 tercatat sebesar Rp52,36 miliar atau 84,54% dari target RKAP 2019 sebesar Rp61,94 miliar. Sedangkan Laporan Laba (Rugi) mencapai target 2019, tercatat bahwa PT PWT memperoleh laba tahun berjalan sebesar Rp8,53 miliar atau mencapai 104,70% dari target RKAP 2019 sebesar Rp8,14 miliar.

Tidak tercapainya target pendapatan 2019 disebabkan karena belum terealisasinya penjualan atas produk Sertifikat/Piagam, ijazah & SKHUN, SKPD/SPOPD, blanko izin, lembar raport dan buku.

Based on the above table, it shows that PT PWT did not achieve the target set in 2019. Asset, liability and equity position in 2019 was recorded at Rp52.36 billion or 84.54% of the target in RKAP 2019 at Rp61.94 billion. Meanwhile, in Profit (Loss) statement of 2019, it was recorded that PT PWT posted current year profit of Rp8.53 billion or 104.70% of RKAP 2019 target of Rp8.14 billion.

The failure to meet the income target in 2019 was caused by the lack of realization in the sales of Certificate/Charter, diploma & SKHUN, SKPD/SPOPD, permit blanks, report card sheets, and books.

3. PT Peruri Properti (PT PEPRO)
a. Laporan Posisi Keuangan

3. PT Peruri Properti (PT PEPRO)
a. Financial Statement Position

(dalam jutaan rupiah)
(In million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Realisasi 2019 Realization 2019	% Pencapaian Achievement
Aset Assets			
Aset Lancar Current Assets	44.083	70.150	159,13
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	90.373	6.596	7,30
Jumlah Aset Total Assets	134.456	76.746	57,08
Liabilitas Liabilities			
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	19.673	31.145	158,31
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	42.250	-	-
Ekuitas Equity	72.533	45.602	62,87
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	134.456	76.746	57,08

b. Laporan Laba (Rugi)

b. Profit (Loss) Statement

(dalam jutaan rupiah)
(In million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Realisasi 2019 Realization 2019	% Pencapaian Achievement
Pendapatan Usaha Operating Revenues	81.992	105.331	128,46
Harga Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(65.964)	(86.497)	131,13
Laba/(Rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	16.028	18.834	117,51
Biaya Usaha Business Expenses	(8.658)	(10.040)	115,96
Laba/(Rugi) Usaha Business Profit (Loss)	7.370	8.794	119,32
Pendapatan/(Biaya) Lain-Lain Other Income/(Expenses)			
Pendapatan Lain-Lain Other Income	36	137	381,88
Biaya Lain-Lain Other Expenses	(1.440)	(4.340)	301,40
Jumlah Total	(1.404)	(4.203)	299,33
Laba/(Rugi) sebelum Pajak Profit/(Loss) before Tax	5.966	4.591	76,96
Pajak Kini Current Tax	(2.460)	(3.160)	128,46
Pajak Tangguhan Deferred Tax	-	-	-
Pajak Tax	(2.460)	(3.160)	128,46
Laba/(Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit/(Loss) of Current Year	3.506	1.431	40,82

Dari tabel di atas, terlihat bahwa posisi laporan keuangan PT Pepro tidak mencapai target 2019. Posisi Aset dan Liabilitas & Ekuitas pada 2019 tercatat sebesar Rp76,75 miliar atau 57,08% dari target RKAP 2019 sebesar Rp134,46 miliar. Sedangkan dari Laporan Laba (Rugi) 2019 tercatat bahwa PT Pepro memperoleh laba bersih tahun berjalan sebesar Rp1,43 miliar atau 40,82% dari target RKAP 2019 sebesar Rp3,51 miliar.

Tidak tercapainya target pendapatan 2019 disebabkan karena terdapat beberapa proyek yang tidak dianggarkan di tahun 2019 antara lain Pekerjaan Pembangunan Gedung Pusat Rekayasa Lanjutan, Jasa Pembangunan Secant Pile Gardu induk serta peningkatan pendapatan atas pekerjaan lain-lain.

Based on the above table, it shows that PT Pepro did not achieve the target set in 2019. Asset, liability and equity position in 2019 was recorded at Rp76.75 billion or 57.08% of the target in RKAP 2019 at Rp134.46 billion. Meanwhile, in Profit (Loss) statement of 2019, it was recorded that PT Pepro posted current year net profit of Rp1.43 billion or 40.82% of RKAP 2019 target of Rp3.51 billion.

The failure to meet the income target in 2019 was due to several unbudgeted projects in 2019, including the Construction Work of Main Building Advanced Engineering, Construction Service of Secant Pile Main Substation, as well as increased income from other work.

4. PT Peruri Digital Security (PT PDS) Konsolidasian
a. Laporan Posisi Keuangan
4. Consolidated PT Peruri Digital Security (PT PDS)
a. Financial Position Statement

(dalam jutaan rupiah)
(In million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Realisasi 2019 Realization 2019	% Pencapaian Achievement
Aset Assets			
Aset Lancar Current Assets	163.001	140.611	86,26
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	59.325	66.771	112,55
Jumlah Aset Total Assets	222.326	207.382	93,28
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity			
Liabilitas Pendek Short-term Liabilities	128.993	131.378	101,85
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	19.933	13.189	66,17
Ekuitas Equity	73.400	62.816	85,58
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	222.326	207.382	93,28

- b. Laporan Laba (Rugi)

- b. Profit (Loss) Statement

Uraian Description	RKAP 2019 Planned Target for 2019	Realisasi 2019 Realization 2019	% Pencapaian Achievement
Pendapatan Usaha Operating Revenues	305.373	192.972	63,19
Harga Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(263.407)	(163.027)	61,89
Laba/(Rugi) Kotor Gross Profit/(Loss)	41.966	29.944	71,35
Biaya Usaha Business Expenses	(22.301)	(22.774)	102,12
Laba/(Rugi) Usaha Business Profit/(Loss)	19.665	7.171	36,46
Pendapatan/(Biaya) Lain-Lain Other Income/(Expenses)			
Pendapatan Lain-Lain Other Income	219	946	432,46
Biaya Lain-Lain Other Expenses	(7.670)	(7.130)	92,96
Jumlah Total	(7.451)	(6.184)	82,99
Laba/(Rugi) sebelum Pajak Profit/(Loss) before Tax	12.214	987	8,08
Pajak Kini Current Tax	(3.053)	-	-
Pajak Tangguhan Deferred Tax	-	143	-
Pajak Tax	(3.053)	143	(4,70)
Laba/(Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit/(Loss) of Current Year	9.160	1.130	12,34

Berdasarkan tabel di atas, posisi laporan keuangan Konsolidasian PDS tidak mencapai target RKAP 2019. Posisi Aset dan Liabilitas & Ekuitas pada 2019 tercatat sebesar Rp207,38 miliar atau 93,28% dari target RKAP 2019 sebesar Rp222,33 miliar. Sedangkan Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian 2019 tercatat bahwa PDS membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp1,13 miliar atau 12,34% dari target RKAP 2019 sebesar Rp9,16 miliar.

Tidak tercapainya target pendapatan 2019 disebabkan karena beberapa hal di bawah ini:

- Terdapat beberapa proyek yang pengadaannya tidak berjalan diantaranya pengadaan alat lab, proyek OPTI (Investasi) dan pengadaan mesin cetak offset 4 warna;
- Tidak diperolehnya proyek Pengadaan Barang dan Jasa LPSE, Buku tanah, *Perso click charge* pita cukai dan target atas kontrak/proyek baru lainnya.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Manajemen telah melakukan pembayaran insentif atas kinerja 2019 pada bulan Februari 2020 dan pembayaran jasa produksi atas kinerja 2019 akan dibayarkan setelah diselenggarakannya Rapat Pembahasan Bersama (RPB).

Based on the above table, it shows that the consolidated financial statement position of PDS did not achieve the target set in RKAP 2019. Asset, liability and equity position in 2019 was recorded at Rp207.38 billion or 93.28% of the target in RKAP 2019 at Rp222.33 billion. Meanwhile, Consolidated Profit (Loss) Statement of 2019 recorded current year net profit of Rp1.13 billion or 12.34% of RKAP 2019 target of Rp9.16 billion.

The failure to meet income target in 2019 was caused by these following factors:

- Several projects could not manage to procure lab equipment, OPTI (investment) project, and 4-color offset printing machine;
- Unable to get procurement projects for LPSE Goods and Service Procurement project, land book, *Perso click charge* excise stamp, and to meet target for other new contracts/projects.

INFORMATION AND MATERIAL FACTS AFTER THE ACCOUNTANT REPORT DATE

The management has paid out performance incentive for 2019 in February 2020, and production service payment for performance in 2019 will be paid after Joint Discussion Meeting (RPB).

PROSPEK USAHA

BUSINESS OUTLOOK

Upaya transformasi Peruri menjadi perusahaan penjamin keaslian dengan menjadikan keamanan digital sebagai medium perusahaan untuk menjamin otentifikasi terus dilakukan sebagai upaya antisipasi atas berkurangnya permintaan percetakan uang tunai di masa mendatang.

Peruri's transformative efforts to be an authenticity guarantor company by providing digital security as a medium to guarantee authenticity can be carried out in response to the diminishing demand for cash money printing in the future.



Pada saat penyelesaian penyusunan dokumen Laporan Tahunan ini, dunia sedang dilanda oleh kejadian luar biasa dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang muncul pada akhir 2019 di Wuhan, Tiongkok dan menyebar begitu cepat ke berbagai negara. Berbagai negara mengambil kebijakan untuk membatasi akses dalam rangka memutus penyebaran virus ini. Pada 31 Maret 2020 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan tujuan memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Mencermati kondisi perekonomian Indonesia khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, menunjukkan bahwa harga-harga di pasar terkendali dan rendah. Pemantauan harga pada minggu kedua April 2020 menunjukkan inflasi akan berada di sekitar 0,20% (mtm) atau 2,80% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu;

1. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui TPI/TPID dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok;
2. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih rendah dari kemampuan kapasitas produksi nasional sehingga mengalami kesenjangan output yang negatif sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan terkendali;
3. Dampak dari nilai tukar Rupiah terhadap inflasi rendah;
4. Terjangkarnya ekspektasi inflasi baik di sisi konsumen dan produsen.

At the time this Annual Report was being prepared, the world was hit by extraordinary event in form of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic, which emerged at the end of 2019 in Wuhan, China, and quickly spread to various countries. Several countries have implemented policies to restrict access in order to cut off the spread of this virus. On March 31, 2020, the Indonesian Government issued Government Regulation Number 21 of 2020 on Large Scale Social Restriction (LSSR) for the Accelerated Management of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) to cut off the spread of Covid-19 in Indonesia.

In terms of the impact of COVID-19 spread on the economic situation in Indonesia, based on Price Monitoring Survey (SPH) conducted by Bank Indonesia with 46 local Representative Offices of Bank Indonesia, market prices remain controlled and low. Price monitoring in the second week of April 2020 showed that inflation would remain at around 0.20% (mtm) or 2.80% (yoy). This was influenced by several following factors:

1. Coordination between central and local government through TPI/TPID in ensuring the fulfillment of principal needs;
2. Indonesia's economic growth level will be lower than the national production capacity, which will result in negative output and controlled inflation pressure from demand;
3. Low impact of rupiah exchange value against inflation;
4. Mild inflation expectation from both consumers and producers.

Nilai tukar rupiah diharapkan cenderung menguat hingga akhir tahun 2020 pada level Rp15.000 per dolar AS. Penguatan nilai tukar Rupiah didukung oleh langkah-langkah stabilisasi nilai tukar, komitmen kebijakan yang erat serta komunikasi yang intensif antara pemerintah, BI, OJK dan LPS. Harus diakui bahwa kebijakan PSBB dan penutupan akses oleh berbagai negara berdampak besar terhadap perekonomian dunia serta perekonomian nasional. Di luar itu semua, komitmen seluruh insan Perusahaan agar senantiasa bahu-membahu bekerja sama untuk mematuhi himbauan yang dilakukan Pemerintah Indonesia, dengan harapan besar bahwa situasi yang sangat tidak menggembirakan ini dapat cepat berlalu.

Berkaca dari fenomena tersebut, segenap manajemen Peruri senantiasa melakukan mitigasi demi keberlanjutan usaha agar meraih hasil yang optimal. Perusahaan telah merancang kebijakan strategis terkait menjawab tantangan yang menanti di 2020. Pandemi COVID-19 tidak serta merta menyurutkan langkah Perusahaan untuk terus melaju menggapai hasil yang optimal.

Dampak era revolusi industri 4.0 adalah teknologi digital yang digunakan memungkinkan terjadinya interkoneksi antara hardware dengan *software*. 4.0, era yang dikenal dengan nama *disruptive technology*. Secara masif, hal ini tentu saja berpengaruh pada perilaku berbisnis dan kondisi ekonomi global, sehingga lahirlah ekonomi digital. Ekonomi digital adalah aspek ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Di Asia Tenggara, ekonomi digital sedang berkembang pesat seiring dengan besarnya potensi pasar. Terdapat beberapa teknologi yang potensial menjadi unsur utama terhadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital, yaitu *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, *Augmented Reality*, *Cyber Security*, *Artificial Intelligence*, *Addictive Manufacturing*, *Integrated System* dan *Cloud Computing*.

Dengan melihat perkembangan dunia seiring revolusi industri 4.0 serta besarnya peluang bersaing didalam bisnis digital dengan semua modal kerja yang dimiliki, hal ini memungkinkan Peruri untuk mendorong bisnis pengamanan dokumen digital (*digital security*). Upaya transformasi Peruri menjadi perusahaan penjamin keaslian dengan menjadikan keamanan digital sebagai medium perusahaan untuk menjamin otentifikasi terus dilakukan sebagai upaya antisipasi atas berkurangnya permintaan percetakan uang tunai di masa mendatang.

Rupiah exchange value is expected to strengthen toward Rp15,000 per USD at the end of 2020. The strengthening of Rupiah exchange value will be supported by the measures to stabilize exchange value, strict policy commitment, and intensive communication between the government, BI, OJK, and LPS. It must be acknowledged that LSRR policies and closure of access by various countries greatly impact the global and national economy. Regardless, all elements in the Company are committed to always cooperate in complying with the recommendations from the Indonesian Government, with a great hope that this extremely unfortunate circumstance will soon pass.

Based on this phenomenon, all elements of Peruri management always try to mitigate negative impacts for business sustainability and optimal result. The Company has designed strategic policies to respond to challenges that await in 2020. The COVID-19 pandemic does not necessarily hinder the Company's progress to achieve optimal result.

The impact of industrial revolution 4.0 era is the digital technology that enables interconnection between hardware and software. The 4.0 era is also known as disruptive technology. This will obviously and massively impact business behavior and global economic condition and give rise to digital economy. Digital economy is an economic aspect based on utilization and empowerment of information technology and digital communication. In Southeast Asia, digital economy is rapidly growing in line with the huge market potential. There are some highly potential technologies that can be the main elements of the transformation of conventional into digital industry, namely *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, *Augmented Reality*, *Cyber Security*, *Artificial Intelligence*, *Addictive Manufacturing*, *Integrated System*, and *Cloud Computing*.

In consideration of the global development and 4.0 industry, as well as the huge competitive opportunity in the digital business, Peruri is able to cultivate digital security business. Peruri's transformative efforts to be an authenticity guarantor company by providing digital security as a medium to guarantee authenticity can be carried out in response to the diminishing demand for cash money printing in the future.

ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECT

Kegiatan usaha Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam PP 6 Tahun 2019, yaitu menyelenggarakan usaha mencetak uang rupiah Republik Indonesia untuk memenuhi permintaan pelanggan utama dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencetak Mata Uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan Bank Indonesia;
2. Membuat dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Dokumen Keimigrasian dan Benda Meterai guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan instansi yang berwenang;
3. Membuat dokumen lain untuk negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Pita Cukai dan Dokumen Pertanahan;
4. Membuat dokumen lainnya untuk negara yang memiliki fitur sekuriti dan barang cetakan logam non uang;
5. Mencetak mata uang dan membuat dokumen negara lain yang memiliki fitur sekuriti atas permintaan negara yang bersangkutan, sepanjang telah terpenuhinya pencetakan Mata Uang Rupiah;
6. Menyediakan jasa yang mempunyai fitur sekuriti yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan;
7. Pabrikasi kertas uang, kertas sekuriti dan tinta sekuriti; dan
8. Jasa digital sekuriti.

Dalam pelaksanaan program pemasaran telah dilakukan berbagai upaya secara proaktif untuk mencapai target penjualan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKAP 2019. Usaha-usaha yang dilakukan adalah meraih pesanan pencetakan uang maupun non uang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri serta aktif dalam memelihara/membina hubungan baik dengan pelanggan. Dalam rangka meraih pasar dalam negeri dan luar negeri, secara rutin tim pemasaran melakukan kunjungan kerja dan kegiatan promosi penjualan dengan memaparkan kekuatan produk, menawarkan produk-produk unggulan yang memiliki unsur sekuriti tinggi serta proaktif dan responsif terhadap kebutuhan dan keluhan pelanggan.

Strategi Program Pemasaran

Dalam mengembangkan dan memperluas pasar, Perusahaan melaksanakan strategi pemasaran baik untuk memperoleh pesanan dari dalam negeri maupun luar negeri, yaitu:

1. Peningkatan pangsa pasar melalui *market education*, via FGD, seminar, pameran dan sosialisasi;

The Company's business activities, as described in Government Regulation 6 of 2019, is to print Rupiah for Republic of Indonesia to fulfill the demand from main customer and carry out these following activities:

1. Printing Rupiah to meet the needs according to Bank Indonesia demands;
2. Printing state documents which has security features such as imigration documents and excise stamps to fulfill the needs of authorized agency;
3. Printing other documents for other countries which has security feature such as excise stamps and land document;
4. Printing other documents for other countries which has security features and non-coins;
5. Printing the money and other documents for other countries which has security features on the related country demands, as long as the rupiah printing was fulfilled;
6. Providing the service which has security features related to the objectives and corporate business activities;
7. Manufacturing banknotes, security papers, security tint; and
8. Digital security service.

In implementing the marketing program, several efforts were done proactively to achieve sales target as determined in RKAP 2019. The efforts consisted of seeking order for money and non-currency printing from domestic and overseas and being active in maintaining good relation with customers. In order to attract domestic and overseas market, the marketing team routinely conduct work visit and sales promotion activities by explaining product advantages, offering top products with high security features, and being proactive and responsive to customers' needs and complaint.

Marketing Program Strategy

In developing and expanding its market, the Company carried out marketing strategies to obtain order from domestic and overseas, namely:

1. The increase of market shares through market education in form of FGD, seminars, exhibitions, and dissemination events;

2. Justifikasi pelaksanaan partisipasi lelang maupun *getting order (Repeat order /New Order)* dengan *gross margin* dibawah ketentuan;
 3. Melakukan penyesuaian CPM untuk lebih menyesuaikan kondisi persaingan pasar;
 4. Pembuatan *dummy product* untuk persiapan peluang pasar tahun 2020;
 5. Analisa peluang kolaborasi produk digital dengan konvensional;
 6. Melakukan negosiasi dan pendekatan kepada calon pelanggan untuk merencanakan anggaran pengadaan;
 7. Menerapkan skema bisnis melalui pola sinergi antar BUMN dengan *positioning* Peruri sebagai *vendor choice* untuk penyediaan layanan *digital signature*;
 8. Melakukan *approach ke potential customer*;
 9. Optimalisasi anak dan afiliasi perusahaan serta kemitraan;
 10. dalam lingkup internasional, dilakukan strategi berikut:
 - a. Mempersiapkan tender dengan rencana yang matang serta melibatkan seluruh unit kerja terkait;
 - b. Melakukan strategi kemitraan;
 - c. Mencari informasi dari partner serta melalui kunjungan;
 - d. Melakukan negosiasi dan pendekatan kepada calon customer untuk merencanakan anggaran pengadaan.
2. Justifying auction participation and getting repeat/new order with a gross margin below the condition;
 3. Adjusting CPM to better fit the market competition;
 4. Designing product dummy to prepare for opportunity in the market in 2020;
 5. Analyzing the opportunity of collaboration between digital and conventional products;
 6. Negotiating with and approaching potential customers to plan for procurement budget;
 7. Applying business scheme through synergy model with SOE as Peruri positions itself as a vendor of choice for digital signature services;
 8. Approaching potential customers;
 9. Optimizing subsidiaries and affiliates of the Company and its partners;
 10. Internationally, carrying out these following strategies:
 - a. Preparing a well-planned tender by involving all related work units;
 - b. Implementing partnership strategy;
 - c. Looking for information from partners and through visits;
 - d. Negotiating with and approaching potential customers to plan for procurement budget.

TINJAUAN KEUANGAN LAINNYA

OTHER FINANCIAL HIGHLIGHTS

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA

Kebijakan dividen/pembagian laba dilakukan setiap akhir periode setelah mendapatkan Persetujuan Laporan Tahunan melalui Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Bersama Pemilik Modal. Laba dibagi dan ditetapkan penggunaannya untuk dividen dan cadangan.

Berikut adalah pembayaran dividen dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Tahun Buku Fiscal Year	Tanggal Pembayaran Payment Date	Jumlah (Rp) Total (Rp)
1.	2017	7 Juni 2018 June 7, 2019	121.177.000.000,-
2.	2018	24 Juni 2019 June 24, 2019	64.900.000.000,-
3.	2019	7 September 2020 September 7, 2020	73.000.000.000,-

POLICY ON DIVIDEND AND ITS PAYMENT

Dividend policies/profit sharing was carried out at the end of period after gaining the approval from the Annual Statement in Joint Discussion Meeting (RPB). Profit was divided and its use was determined for dividend and reserve.

The following is the dividend payment in the last 3 years:

Uraian Description	Pembagian Laba Profit Sharing					
	Tahun Buku 2017 Fiscal Year 2017		Tahun Buku 2018 Fiscal Year 2018		Tahun Buku 2019 Fiscal Year 2019	
	%	Rp	%	Rp	%	Rp
Laba Dibagikan Pembagian Laba: Pembagian Laba/Profit Sharing :		360.676.167.223		278.613.873.005		722.379.971.695
Dividen Dividend	33,60	121.177.000.000	23,29	64.900.000.000	10,11	73.000.000.000
Cadangan Reserve	66,40	239.499.167.223	76,71	213.713.873.005	89,89	649.379.971.695
		360.676.167.223		278.613.873.005		722.379.971.695

KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

Selain Dividen yang dibayarkan, Perusahaan juga berkontribusi kepada Negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan. Berikut rincian jumlah pemenuhan kewajiban perpajakan Perusahaan.

CONTRIBUTION TO THE STATE

In addition to the paid dividend, the Company also contributed to the State through fulfillment of its tax obligation. The following is the details on the Company's total fulfillment of its tax obligation.

Perbandingan Jumlah Pembayaran Pajak Tahun 2018 dan 2019

Comparison of Total Tax Payment in 2018 and 2019

(dalam jutaan rupiah)
(In million rupiah)

Uraian Description	2018	Tahun Pajak Tax Year 2019	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Jenis Pajak Type of Tax				
PPh 21	41.724	49.845	8.121	19,46%
PPh 22	18.531	19.985	1.604	8,73%
PPh 23	5.422	5.568	146	2,69%
PPh 25	74.682	54.470	(20.212)	(27,06%)
PPh 4 (2)	2.216	17.180	14.964	675,27%

Perbandingan Jumlah Pembayaran Pajak Tahun 2018 dan 2019
Comparison of Total Tax Payment in 2018 and 2019

(dalam jutaan rupiah)
(In million rupiah)

Uraian Description	2018	Tahun Pajak Tax Year 2019	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Jenis Pajak Type of Tax				
PPN Masa Period PPN	8.231	140.250	132.019	1.603,92%
PBB	8.360	9.587	1.227	14,68%
Jumlah Total	159.166	296.886	137.720	86,53%

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KARYAWAN (ESOP/MSOP)

Peruri merupakan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh kepemilikan modalnya (100%) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Peruri bukan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh karyawan dan/atau manajemen melalui pelaksanaan program kepemilikan saham (ESOP/MSOP) yang memuat uraian mengenai:

1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya;
2. Jangka waktu;
3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan
4. Harga exercise.

INFORMASI TENTANG PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada 2019, Perusahaan tidak melakukan penggunaan dana hasil penawaran umum di Bursa Efek Indonesia yang memuat uraian mengenai:

1. Total perolehan dana;
2. Rencana penggunaan dana;
3. Rincian penggunaan dana;
4. Saldo dana; dan
5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atau perubahan penggunaan dana.

INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI, TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI, SERTA TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Pada 2019, tidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi yang terjadi adalah transaksi dengan para pihak berelasi.

Perusahaan melakukan transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai PSAK Nomor 7 (Revisi 2014) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", di mana dari definisi pihak-pihak berelasi sesuai PSAK Nomor 7 (Revisi 2014) adalah orang atau entitas yang terkait dengan Peruri atau entitas pelapor.

INFORMATION ON SHARE OWNERSHIP PROGRAM BY THE MANAGEMENT AND EMPLOYEE (ESOP/MSOP)

Peruri is one of the SOEs whose capital (100%) is entirely owned by Republic of Indonesia. Peruri is not a company whose shares are owned by employee and/or management through share ownership program (ESOP/MSOP) with the descriptions of:

1. Total shares of ESOP/MSOP and their realization;
2. Period of time;
3. Prerequisites for eligible employee and/or management; and
4. Exercise price.

INFORMATION ON UTILIZATION OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

In 2019, the Company did not utilize the proceeds from public offering in Indonesian Stock Exchange consisting the following information:

1. Total proceeds;
2. Fund utilization plan;
3. Fund utilization details;
4. Fund balance; and
5. Date of agreement from RUPS/RUPO or change in fund utilization.

INFORMATION ON TRANSACTION WITH AFFILIATES, TRANSACTION WITH RELATED PARTIES, AND TRANSACTION THAT CONTAINS CONFLICT OF INTEREST

In 2019, there was no material transaction which contained interest impact and/or transaction with affiliated party. The transaction that occurred was the one with related parties.

The Company carried out transaction with several parties it has special relations with, according to PSAK Number 7 (Revised in 2014) about disclosure of related parties. The definition of related parties according to PSAK Number 7 (Revised in 2014) is the people or entity related to Peruri or reporting entity.

Definisi pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang terkait dengan Perum Peruri (entitas pelapor).

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a;
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas Berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini didefinisikan dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan.

Peruri dan entitas anak telah menerapkan pengecualian dalam PSAK 7 (Revisi 2014) menyajikan luasnya penjelasan dalam kaitannya dengan transaksi dan saldo akun pihak berelasi, termasuk ikatan dengan entitas terkait dengan Pemerintah.

The definition of related parties is as follows:

Related parties are people or entity related to the entity related to Peruri (reporting entity).

1. Person or closest family member related to reporting entity if the person:
 - a. Has control or joint control on reporting entity;
 - b. Has significant influence on reporting entity;
 - c. The key management person of reporting entity or the parent entity of reporting entity;
2. An entity related to reporting entity if it fulfills one of these criteria:
 - a. Entity and reporting entity are the members of the same business group (means that the parent entity, child entity and the next entity related to other entity);
 - b. One entity are associated entity or joint venture from other entity (or associated entity or joint venture which is member of a business group, which the other entity is the member);
 - c. Both entities are joint venture from the same third parties;
 - d. One entity is the joint venture from the third entity and other entity is the associated entity of the third entity;
 - e. Entity is the post work reward program from one of reporting entities or entity related to reporting entity; If the reporting entity held the program, the sponsor entity would also be related to the reporting entity.
 - f. Entity which is controlled or joint controlled by people identified in (a).
 - g. People identified in (1) (a) with significant influence on entity or key management person (or parent entity of the entity).

Entity related to the Government is the controlled entity, joint controlled, or influenced significantly by the Government. The Government in this matter is defined within the scope of Ministry of Finance.

Peruri and its subsidiaries had implemented the exception in PSAK 7 (Revised in 2014) in presenting the breadth of explanation in relation with transaction and balance of related parties account, including the bond with entity related to the government.

Tabel Pihak Berelasi
Table of Related Parties

No.	Nama Pihak Parties	Sifat Hubungan Relation	Transaksi Transaction
1.	Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang Saham Shareholder	Modal Disetor Paid-Up Capital
2.	PT Asuransi Jiwasraya	BUMN SOE	Asuransi Insurance
3.	PT Bank Mandiri Tbk	BUMN SOE	Deposito, Giro Deposit, Current Account
4.	PT Bank Negara Indonesia Tbk	BUMN SOE	Deposito, Giro, Kredit Investasi Deposit, Current Account, Investment Credit
5.	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	BUMN SOE	Deposito, Giro, Kredit Investasi Deposit, Current Account, Investment Credit
6.	PT Bank Tabungan Negara Tbk	BUMN SOE	Deposito, Giro, Kredit Investasi Deposit, Current Account, Investment Credit
7.	PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	BUMN SOE	Pemasangan, pemeliharaan, pembayaran pemakaian listrik Electricity installation, maintenance, and payment
8.	PT Kertas Kraft Aceh	BUMN SOE	Piutang Receivables
9.	PT Pos Indonesia	BUMN SOE	Prangko, Souvenir Sheet Stamp, Souvenir Sheet
10.	PT Sucofindo	BUMN SOE	Sertifikat SCI SCI Certificate
11.	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	BUMN SOE	Medali Medallion
12.	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	BUMN SOE	Asuransi Insurance
13.	Perum PNRI	BUMN SOE	Pelanggan Customer
14.	PT Pegadaian (Persero)	BUMN SOE	Pelanggan Customer
15.	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	BUMN SOE	Medali Medallion
16.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	BUMN SOE	Tiket Ticket
17.	PT Rekayasa Industri (Persero)	BUMN SOE	Lencana Badge
18.	PT Sicpa Peruri Securink	Afiliasi	Tinta Sekuriti Security Ink
19.	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	BUMN SOE	Pelanggan Customer
20.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	BUMN SOE	Pelanggan Customer
21.	PT Indah Karya (Persero)	BUMN SOE	Pelanggan Customer
22.	PT Balai Pustaka (Persero)	BUMN SOE	Pelanggan Customer
23.	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	BUMN SOE	Pelanggan Customer
24.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	BUMN SOE	Pelanggan Customer
25.	PT Virama Karya (Persero)	BUMN SOE	Pelanggan Customer

Tabel Transaksi dengan Pihak Berelasi
Table of Transaction with Related Parties

(dalam jutaan rupiah)
(In million rupiah)

Uraian Description	2018	2019
Aset/Assets		
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	654.595	1.620.645
Piutang Usaha Business Receivables	18.607	12.134
Piutang Lain-Lain Other Receivables	23.486	16.327
Liabilitas/Liabilities		
Utang Usaha Business Debt	140.185	109.942
Pinjaman Bank Bank Loan	1.595.032	1.454.701
Beban Expenses		
Beban Bunga Pinjaman Loan Interest Expense	134.102	132.046

INFORMASI KEUANGAN YANG MENDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Sepanjang 2019 tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN

Pada 2019, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyajian Laporan Keuangan telah menyesuaikan dengan kebijakan keuangan Perusahaan yang tertuang dalam *Corporate Policy Manual* bagian *Financial Policy*.

Penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan

Mulai 1 Januari 2015, Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK 24 (revisi 2013) "Imbalan Kerja". Dengan penerapan standar ini, salah satu perubahan yang berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan dan entitas anak adalah pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial. Sebelumnya, perusahaan dan entitas anak mencatat keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi dan perbedaan antara asumsi aktuarial dengan kenyataan (*experience adjustment*) sejumlah yang lebih besar antara 10% dari aset program atau 10% dari liabilitas imbalan pasti, dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi komprehensif selama rata-rata sisa masa kerja para karyawan yang bersangkutan.

FINANCIAL INFORMATION THAT CONTAINS EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Throughout 2019, there was no financial information that contained extraordinary and rare events.

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS THAT IMPACT THE COMPANY

In 2019, there was no change in laws and regulations that significantly impact the Company.

CHANGE IN ACCOUNTING POLICY

The presentation of Financial Statement has been made in line with the Company's financial policy as described in the Financial Policy section of Corporate Policy Manual.

Implementation of PSAK 24 (Revised in 2013), "Work Compensation" and Its Impact toward Financial Statement

Since January 1, 2015, the Company and its subsidiaries implemented PSAK 24 (revised in 2013) "Work Compensation". Through the Implementation of this standard, one of the changes that impacted the Company's and its subsidiaries' financial statement is the disclosure of profit and actuarial loss. Previously, the Company and its subsidiaries recorded profit and actuarial loss that arose from assumption changes and the difference between actuarial assumption and the reality (*experience adjustment*) by selecting whichever one is higher between 10% of program assets or 10% of compensation liabilities, which is charged or credited on comprehensive profit loss statement for average remaining duration of related employees' years of service.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY



Tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan periode 2019. Namun untuk mengelola pertumbuhan ke depan, Perusahaan akan meningkatkan faktor-faktor kekuatan yang ada sedangkan peluang yang diperkirakan ada, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri, cukup besar dari pada ancaman yang dihadapi sebagaimana dapat pada analisa SWOT berikut yang merupakan artikulasi dari keadaan Perusahaan pada masa sekarang dan mendatang.

Kekuatan (*Strength*)

1. Peruri masih menjadi satu-satunya BUMN yang dipercaya untuk mencetak uang RI dan proteksi ini akan terus berlanjut;
2. Standar kualitas produk yang memenuhi kualifikasi internasional;
3. Likuiditas perusahaan baik.

There were no matters that potentially have significant impact to the Company's business continuity during 2019. However, to manage its future growth, the Company will improve its existing strengths. There are existing opportunities in domestic and overseas market that can overcome the threats as laid out in the following SWOT analysis, which articulates the Company's present and future states.

Strength

1. Peruri is still the only SOE entrusted to print domestic money and this protection will still continue;
2. Product quality standard meeting the international qualifications;
3. Good corporate liquidity;

Kelemahan (Weakness)

1. Tidak memiliki fungsi *Key Account Management*;
2. Tidak memiliki 3 sub-fungsi Riset dan Pengembangan, yaitu *Current Product Development*, *New Product Development* dan *Perencanaan Teknologi*;
3. Tidak memiliki fungsi untuk manajemen pembelanjaan modal;
4. Tidak memiliki fungsi untuk manajemen kemitraan;
5. Tidak memiliki fungsi untuk manajemen regulasi;

Peluang (Opportunities)

1. Pasar mata uang Indonesia akan terus meningkat hingga akhir 2021;
2. Pangsa pasar dokumen sekuriti non-uang jauh lebih besar daripada pasar sektor uang dan akan mencapai Rp4,1 triliun pada 2021;
3. Pasar substrat uang kertas yang dapat diraih oleh perusahaan pada 2021 untuk uang kertas sebesar Rp870 miliar;
4. Pasar internasional yang dapat diraih oleh perusahaan pada 2021 untuk uang kertas sebesar Rp290 miliar dan untuk uang logam sebesar Rp120 miliar;
5. Pasar internasional yang dapat diraih oleh perusahaan pada 2021 untuk paspor sebesar Rp240 miliar;
6. Potensi pasar yang dapat diraih oleh perusahaan pada 2021 untuk produk *track-and-trace* sebesar Rp2 triliun;
7. Pangsa pasar yang dapat diraih oleh perusahaan pada 2021 untuk produk *digital locker* adalah sebesar Rp20 miliar;
8. Pangsa pasar yang dapat diraih oleh perusahaan pada 2021 untuk produk personalisasi paspor adalah sebesar Rp413 miliar.

Ancaman (Threats)

1. Jumlah transaksi elektronik yang terus meningkat akan menahan pertumbuhan permintaan terhadap uang;
2. Pada pasar domestik non-uang, Peruri menghadapi persaingan dari >30 perusahaan lain;
3. Tingginya tingkat adopsi teknologi digital dalam produk dokumen sekuriti non-uang menimbulkan risiko yang besar bagi perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang masih konvensional (berbasis kertas).

Weakness

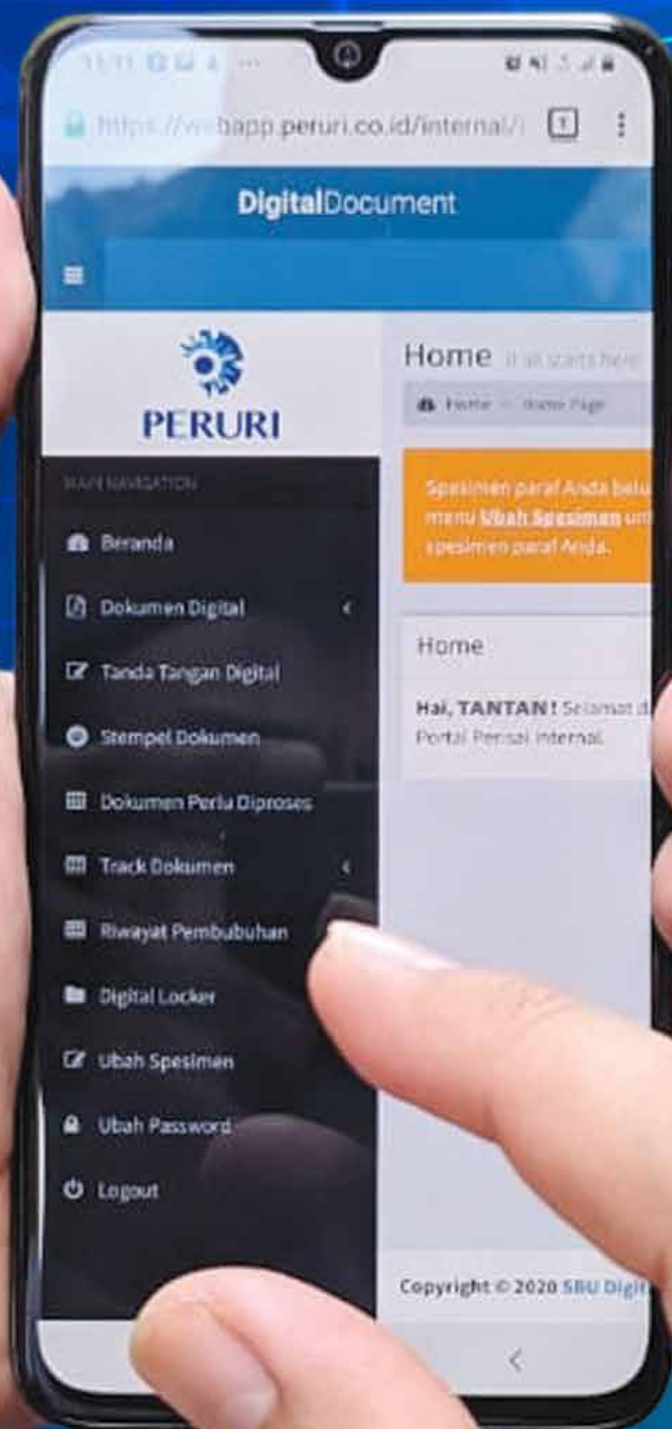
1. No key account management function;
2. Lack of 3 sub-functions of Research and Development; Current Product Development, New Product Development, and Technology Planning;
3. No capital expenditure management function;
4. No partnership management function;
5. No regulation management function.

Opportunities

1. Indonesian money market will continue to increase until the end of 2021;
2. Market share of non-currency security documents will be bigger than money sector market and will reach Rp4;1 trillion in 2021;
3. Banknotes substrate market which can be gained by the Company in 2021 for banknotes is worth 70 billion;
4. International market which can be gained by the Company in 2021 for banknotes is worth Rp290 billion, and for coins Rp120 billion;
5. International market which can be gained by the Company in 2021 for passports is worth Rp240 billion;
6. Market potential which can be capitalized by the Company in 2021 for track-and-trace product is worth Rp2 trillion;
7. Market share which can be achieved by the Company in 2021 for digital locker product is worth Rp20 billion;
8. Market share which can be achieved by the Company in 2021 for passport personalization is worth Rp413 billion.

Threats

1. The continuously increasing amount of electronic transaction will slow down the growth of money demand;
2. In non-currency domestic market, Peruri faces competition from >30 other companies;
3. The high level of adoption of digital technology in non-currency security documents products causes big risks for conventional (paper-based) security document printing.



11:11 | <https://webapp.peruri.co.id/internal/>

DigitalDocument



MAIN NAVIGATION

- Beranda
- Dokumen Digital
- Tanda Tangan Digital
- Stempel Dokumen
- Dokumen Perlu Diproses
- Track Dokumen
- Riwayat Pembubuhan
- Digital Locker
- Ubah Spesimen
- Ubah Password
- Logout

Home It all starts here

Home - Home Page

Spesimen paraf Anda belum
menyediakan menu Ubah Spesimen untuk
menyusun ulang spesimen paraf Anda.

Home:

Hai, **TANTAN!** Selamat di
Portal Pensiil internal.

Copyright © 2020 SBU Digital

05

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

BUSINESS SUPPORT FUNCTION

Perusahaan menerapkan strategi pengelolaan SDM yang lebih efektif dan efisien guna menciptakan SDM unggul dan dapat beradaptasi dengan perkembangan lingkungan bisnis yang kerap berubah.

The company is implementing a more effective and efficient HR management strategy in order to create excellent HR and adapt to the changing business environment.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT



Perusahaan memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu unsur terpenting dalam menggerakkan roda bisnis di tengah dunia industri yang terus berkembang. Pengelolaan SDM yang terintegrasi dengan strategi Perusahaan akan mampu meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja Perusahaan. SDM menjadi mitra strategis bagi Perusahaan untuk dapat meraih kesuksesan dalam setiap lini bisnis yang dijalankan, serta target bisnis yang telah dicanangkan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Bagi Perusahaan, SDM adalah aset berharga yang eksistensinya selalu mendapat perhatian khusus baik dalam bentuk pengembangan kompetensi maupun tingkat kesejahteraan. Manajemen SDM memiliki tanggung jawab untuk membentuk karyawan yang andal dan berkompeten agar mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dengan kemampuan inilah Perusahaan dapat melaju dengan baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era yang serba kompetitif.

The company consider Human Resources (HR) as one of the most important elements in driving the wheels of business in the midst of a growing industrial field. HR management which is integrated with the Company's strategy will be able to increase competitiveness and accelerate the Company's performance. HR is a strategic partner for the Company to be able to achieve success in business line, as well as business targets that have been set by shareholders and stakeholders.

For the Company, HR is a valuable asset whose maintained to always receives special attention both in the form of competency development and welfare levels. HR management has a responsibility to form reliable and competent employees so that they are able to carry out their duties properly. With this capability, the Company can run well and be able to face various challenges in this competitive era.

STRATEGI PENGELOLAAN SDM

Pengelolaan SDM yang tepat dan berkesinambungan terus dilakukan Perusahaan dalam mengembangkan talenta yang berkualitas di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Perusahaan meyakini bahwa dengan memiliki SDM yang andal, loyal dan berkompeten merupakan modal utama Perusahaan guna menggapai visi, misi dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan. Seiring dengan berbagai tantangan dan perkembangan di bidang Human Resources Management (HRM), Perusahaan melakukan beberapa strategi pengelolaan SDM yang lebih efektif dan efisien guna menciptakan SDM unggul dan dapat beradaptasi dengan perkembangan lingkungan bisnis yang kerap berubah.

Perusahaan meyakini bahwa setiap karyawan memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan melalui pengelolaan SDM yang unggul. Dalam menghadapi tantangan bisnis, Perusahaan telah mempersiapkan SDM yang dimiliki untuk menjadi karyawan profesional, berkompeten dan berintegritas tinggi guna mendukung strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Perusahaan yang berpedoman pada tata nilai dan budaya Perusahaan.

Selama 2019, Peruri fokus pada program pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang berkaitan dengan kepemimpinan profesional dan kompetensi yang sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, seperti program *Talent Development Program* yang berfokus pada "*Leading Team for Operational Excellence* dan *Leading Operational Excellence for Global Standard*".

Selain program tersebut, Perusahaan juga memberikan berbagai bentuk *knowledge enhancement* dalam bentuk *intensive training*, *workshop*, seminar dan konferensi yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun luar negeri guna peningkatan kapabilitas dan kapasitas Karyawan.

Peruri memberikan kesetaraan kesempatan kepada seluruh Karyawan dalam hal pengembangan kompetensi. Program pengembangan kompetensi Karyawan dibuat berdasarkan aspek profesionalisme tanpa memandang ras, kepercayaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal daerah, keturunan, usia, status perkawinan, cacat, kondisi medis, gender atau orientasi seksual. Hal ini adalah salah satu komitmen Perusahaan untuk menjaga hak asasi manusia pada setiap Karyawannya.

HR MANAGEMENT STRATEGY

The Company continues to carry out proper and sustainable HR management in developing talents quality in the midst of increasingly fierce industrial competition. The Company believes that having reliable, loyal and competent human resources is the main asset of the Company to achieve its vision, mission and sustainable business success. Along with various challenges and developments in the field of Human Resources Management (HRM), the Company has implemented several HR management strategies that are more effective and efficient in order to create superior HR and adapt to the changing business environment.

The Company believes that every employee has a very important role in the success of the Company through excellent HR management. In facing business challenges, the Company has prepared its human resources to become professional, competent and high integrity employees in order to support the Company's short, medium, and long term strategies that are guided by the Company's values and culture.

During 2019, Peruri focused on education, training and development programs related to professional leadership and competencies in accordance with the Company's Long-term Plan, such as the Talent Development Program which focuses on "*Leading Team for Operational Excellence* and *Leading Operational Excellence for Global Standard*".

Beside of these programs, the Company also provides various knowledge enhancement in the form of intensive training, workshops, seminars and conferences held both domestically and abroad to increase the capabilities and capacities of employees.

Peruri provides equal opportunities for all employees in terms of competency development. Employee competency development programs are managed based on aspects of professionalism regardless of race, belief, skin color, religion, gender, regional origin, descent, age, marital status, disability, medical condition, gender or sexual orientation. This is one of the Company's commitments to protect the human rights of every employees.

SISTEM REKRUTMEN KARYAWAN

Perusahaan terus mengimbangi pemenuhan kebutuhan SDM baik yang sudah berpengalaman maupun *fresh graduate* agar selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis Perusahaan. Perekrutan SDM dilingkungan Perusahaan dilaksanakan dengan mengacu pada proyeksi kebutuhan karyawan untuk tahun berjalan serta mengacu kepada standar kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan memegang teguh Nilai-Nilai Perusahaan.

Menghadapi persaingan di industri 4.0 diperlukan SDM dengan kualitas terbaik untuk mendukung pengembangan perusahaan di masa depan. Proses rekrutmen dan seleksi merupakan pintu gerbang pertama untuk menyaring kandidat-kandidat terbaik yang akan menjadi ujung tombak SDM perusahaan ke depan.

Proses rekrutmen dan seleksi dilakukan secara terintegrasi melalui proses perencanaan SDM dan aktivitas lainnya. Proses rekrutmen dan seleksi dilakukan secara objektif dengan menggandeng pihak ketiga/konsultan dan bersifat *online-based system*.

Terdapat dua jalur pengisian kebutuhan karyawan, yakni:

1. Sumber Internal
Sumber pelamar berasal dari internal perusahaan yang dilakukan melalui *internal-job tender*, mutasi karyawan lintas unit/direktorat, perbantuan karyawan/mobilisasi dan rekrutmen internal bersumber dari Karyawan PKWT;
2. Sumber Eksternal
Sumber pelamar berasal dari luar perusahaan yang dilakukan melalui program *Management Trainee* dengan sumber calon karyawan lulusan D3/D4/S1 dari *reputable university*, rekrutmen karyawan profesional/*professional hire*, rekrutmen bersama Kementerian BUMN dengan sumber calon karyawan lulusan perguruan tinggi, difabel dan KTI (Kawasan Indonesia Timur); serta rekrutmen calon karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).

Berikut perkembangan rekrutmen karyawan tetap maupun tidak tetap yang dilakukan Perusahaan di sepanjang 2019.

EMPLOYEE RECRUITMENT SYSTEM

The Company continues to keep pace with the fulfillment of HR needs, both experienced and fresh graduates, so that it is in line with the development and growth of the Company's business. HR recruitment within the Company is carried out by referring to the projected needs of employees for the current year as well as referring to the competency standards as stated in the Company's Articles of Association by upholding the Company's Values.

To face competition in 4.0 Industry, the best quality HR is needed to support the company's future development. The recruitment and selection process is the first gateway to screening the best candidates who will spearhead the company's HR in the future.

The recruitment and selection process is carried out in an integrated manner through the HR planning process and other activities. The recruitment and selection process is carried out objectively by cooperating with a third party/consultant and is an online-based system.

There are two lines for filling employee needs, namely:

1. Internal Sources
The source of applicants comes from internal companies which are carried out through internal job tenders, employee transfers across units/directorates, employee assistance/mobilization and internal recruitment from contract employees;
2. External Sources
The source of applicants comes from outside the company which is carried out through the Management Trainee program with the source of prospective employees who are Diploma 3/ Diploma 4/ Bachelor degree graduates from reputable universities, recruitment of professional employees/ professional hires, recruitment with the Ministry of SOE with sources of prospective employees who are university graduates, with disabilities and KTI (Kawasan Timur Indonesia); as well as the recruitment of prospective contract employees (Fixed Term Work Agreements).

Following are the developments in the recruitment of permanent and non-permanent employees that the Company carried out throughout 2019.

Data Rekrutmen Karyawan 2019

Employee Recruitment Data 2019

Keterangan Information	Jumlah Total
PKWTT	57 Orang/People
PKWT	693 Orang/People
TPBW	8 Orang/People
Honorer Honorary	10 Orang/People
Tenaga Kontrak Ahli Contract Expert	3 Orang/People

PERENCANAAN SDM

Melalui strategi SDM yang tepat, Peruri optimis mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam visi dan misi Perusahaan. Strategi SDM harus mampu mengatasi perkembangan bisnis yang kerap berubah, sekaligus memberikan solusi yang tepat sesuai kebutuhan. Perencanaan SDM disusun dari kebutuhan SDM (*labor demand*), inventarisasi sumber tenaga kerja yang tersedia (*labor supply*), *reconcilliation* antara *labor demand & labor supply* dengan berbasiskan analisis beban kerja, kapasitas produksi dan rencana strategis perusahaan.

PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

dalam upaya mendukung peningkatan produktivitas karyawan, Perusahaan merancang *Key Performance Indicator*, penetapan target, pengukuran realisasi serta memonitoring realisasinya. Secara periodik, Perusahaan melaksanakan penilaian atas unjuk kerja dan kompetensi karyawan yang selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan atas remunerasi dan pengembangan pegawai yang bersangkutan.

Penilaian Kinerja Karyawan dimulai dari penetapan Kontrak Manajemen (KM) untuk para Direksi, Kepala Departemen/Biro dan Kepala Divisi hingga Sasaran Kinerja Individu (SKI) untuk Kepala Seksi, Kepala Unit hingga tingkat staf pelaksana.

Penyempurnaan sistem penilaian kinerja menjadi program kerja continue SDM agar penilaian kinerja dapat meningkatkan motivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dengan hasil nilai yang obyektif dan proporsional.

HR PLANNING

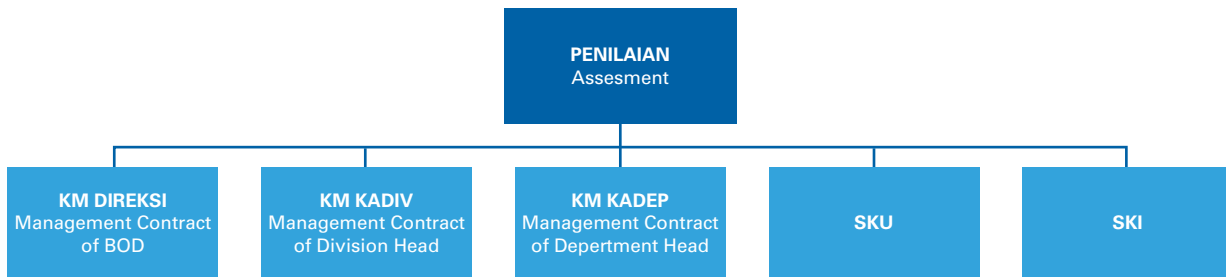
Through the right HR strategy, Peruri is optimistic that it will be able to achieve the stated goals as stated in the Company's vision and mission. Where the HR strategy must be able to cope with changing business developments, while providing the right solutions as needed. HR planning is prepared from human resource needs (*labor demand*), inventory of available labor sources (*labor supply*), *reconciliation* between *labor demand & labor supply* based on workload analysis, production capacity and company strategic plans.

EMPLOYEE PERFORMANCE APPRAISAL

In an effort to support employee productivity, target setting, measurement of realization, and monitoring of realization. Periodically, the Company provides services for the work and competence of employees which are subsequently used as a consideration for the remuneration and development of responsible employees.

Employee Performance Appraisal starts from the determination of Management Contracts (KM) for Directors, Heads of Departments/ Bureaus and Heads of Divisions to Individual PerformanceTargets (SKI) for Section Heads, Unit Heads to the executive staff level.

The improvement of the performance appraisal system into a continuing HR work program so that performance appraisal can increase employee motivation in achieving organizational goals with objective and proportional value results.



PROGRAM PENSIUN

Terkait dengan program pensiun karyawan, Perusahaan mengimplementasikan Program Pensiun luran Pasti kepada Karyawan. Perusahaan juga mengimplementasikan kebijakan jaminan pensiun sesuai peraturan perundangan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui BPJS Ketenagakerjaan. program pensiun yang diberikan kepada para karyawan merupakan bagian dari komitmen Perusahaan untuk memberikan rasa aman dan jaminan hari tua kepada karyawan. Melalui program tersebut, karyawan akan mampu memberikan kontribusi optimalnya kepada Perusahaan, sekaligus menumbuhkan loyalitas karyawan terhadap Perusahaan.

INFORMASI KARYAWAN

Perusahaan senantiasa mendukung setiap kegiatan SDM, melalui fasilitas internet dan intranet yang sudah dilengkapi dengan aplikasi *Employee Self Service* yang memudahkan kegiatan-kegiatan Karyawan yang berhubungan dengan SDM, misalnya Portal yang mengakomodasi kios informasi karyawan, menu cuti, *helpdesk* SDM dan *office automation*.

PEMENUHAN HAK DAN KESEHATAN KARYAWAN

Salah satu bentuk upaya Perusahaan dalam memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawai, dengan memberikan remunerasi bagi pegawai yang memiliki kinerja yang baik setiap tahunnya. Remunerasi atau imbalan kerja yang diberikan oleh Perusahaan kepada karyawan merupakan bentuk komitmen imbal jasa kepada karyawan mencakup imbalan kerja jangka pendek, jangka panjang dan imbalan pascakerja serta pesangon pemutusan kerja. Imbalan kerja diberikan melalui gaji/honorarium, tunjangan-tunjangan, bonus, penghargaan masa kerja, hingga program kesehatan dan program pensiun bagi karyawan. Perusahaan tetap melanjutkan komitmennya untuk memberikan struktur pemenuhan hak karyawan yang kompetitif.

PENSION PROGRAM

Regarding the employee retirement program, the Company has been implemented Program Pensiun luran Pasti for the employees. The Company also implements a ension security policy in accordance with the laws and regulations on the National Social Security System (SJSN) through BPJS Ketenagakerjaan. The pension program provided to employees is part of the Company's commitment to provide a sense of security and retirement benefits to employees. Through this program, employees will be able to contribute optimally to the Company, while at the same time fostering employee loyalty to the Company

EMPLOYEE INFORMATION

The Company always supports every HR activity, through internet and intranet facilities that are equipped with the Employee Self Service application that facilitates employee activities related to HR, for example a Portal that accommodates an Employee Information Kiosk, Leave Menu, HR Helpdesk and Office Automation.

FULLFILLMENT OF EMPLOYEE RIGHTS AND HEALTH

One form of the Company's efforts to pay attention to the welfare of all employees, by providing remuneration for employees who have good performance every year. Remuneration or employment benefits provided by the Company to employees is a form of commitment to remuneration for employees including short-term, long-term and post-employment benefits as well as termination benefits. Employee benefits are provided through salary/ honorarium, allowances, bonuses, service awards, to health programs and employee retirement programs. The company continues its commitment to provide a competitive employee rights fulfillment structure.

Perusahaan juga menyediakan fasilitas kesehatan berupa BPJS Kesehatan untuk seluruh karyawan, fasilitas kesehatan non plafon (*unlimited*) serta fasilitas *Medical Check Up* untuk karyawan organik/ karyawan tetap dan fasilitas klinik perusahaan yang dapat digunakan seluruh karyawan.

PENGHARGAAN KEPADA KARYAWAN

Perusahaan senantiasa berkomitmen dalam memberikan hak-hak remunerasi karyawan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam rangka memberikan apresiasi dan motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan, Perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja dengan baik. Pada 2019, Perusahaan memberikan penghargaan kepada 38 karyawan dalam program *Best Employee 2019*. Karyawan yang mendapat penghargaan tersebut telah melalui beberapa proses sebagai berikut:

1. Proses penyaringan awal di Divisi SDM, yaitu karyawan terpilih yang tidak memiliki catatan pelanggaran dan karyawan yang memiliki skor NKI minimal P3 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
2. Karyawan yang telah melalui proses penyaringan awal kemudian dilakukan asesmen oleh atasan langsung dan *peer*;
3. Proses selanjutnya yaitu tahap seleksi final melalui wawancara serta presentasi dengan pihak ketiga dan manajemen.

PENGEMBANGAN KARIR, PROMOSI DAN MUTASI

Untuk memastikan *Career Success Factor* (CSF) terpenuhi, maka Perusahaan melaksanakan kegiatan pengembangan karir yang sesuai dengan masing-masing faktor. Perusahaan memiliki manajemen karir untuk karyawan melalui *assessment* profesional yang direkomendasikan oleh Kementerian BUMN guna menjamin penilaian karir yang objektif dan profesional, pemetaan kompetensi serta pemenuhan dengan mekanisme mutasi, kontrak, magang dan penugasan yang diselaraskan dengan kebutuhan organisasi.

Promosi dan mutasi menjadi bagian dari rangkaian pengelolaan SDM yang dapat menciptakan pengembangan talenta dari masing-masing karyawan. Promosi dan mutasi/rotasi diberlakukan dengan maksud memberikan pengalaman menyeluruh kepada setiap karyawan tentang keseluruhan operasional dan bisnis yang dikembangkan Perusahaan. Melalui kebijakan promosi dan mutasi ini, karyawan dapat mengenal prosedur, sistem, kebijakan, hingga kegiatan sehari-hari dan visi yang ingin dicapai Perusahaan.

The Company also provides health facilities in the form of BPJS Kesehatan for all employees, non-ceiling health facilities (*unlimited*) as well as *Medical Check Up* facilities for organic employees/ permanent employees and the company's clinic facilities that can be used by all employees.

APPRECIATION TO EMPLOYEES

The Company is always committed to providing employee remuneration rights as stipulated in the Collective Labor Agreement (PKB). To provide appreciation and motivation to improve employee performance, the Company rewards employees who have performed well. In 2019, the Company awarded 38 employees in the *Best Employee 2019* program. The employees who received the award went through the following processes:

1. The initial screening process in the HR Division, namely selected employees who have no record of violations and employees who have a minimum NKI score of P3 for 3 (three) consecutive years;
2. Employees who have gone through the initial screening process are then assessed by their direct supervisor and peer;
3. The next process is the final selection stage through interviews and presentations with third parties and management.

CAREER DEVELOPMENTS, PROMOTION AND TRANSFER

To ensure that the *Career Success Factor* (CSF) is met, the Company carries out career development activities in accordance with each factor. The company has career management for employees through professional assessments recommended by the Ministry of SOE to ensure an objective and professional career assessment, competency mapping and compliance with transfer, contract, apprenticeship and assignment mechanisms that are aligned with organizational needs.

Promotion and transfer are part of a series of HR management that can create talent development for each employees. Promotions and transfers/rotations are enforced with the aim of providing a comprehensive experience to each employee regarding the entire operation and business developed by the Company. Through this promotion and transfer policy, employees can become familiar with the procedures, systems, policies, daily activities and the vision the Company wants to achieve.

Perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan seluruh karyawan, baik dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kerja maupun untuk pengembangan potensi dan karir dari masing-masing karyawan. Di samping itu, promosi dan mutasi juga diberlakukan dengan merujuk kepada penilaian kinerja dari setiap karyawan. Kepada karyawan dengan potensi talenta yang spesifik, pengelolaan SDM akan memberikan masukan untuk menempatkan karyawan tersebut pada posisi dan jabatan yang dapat mempercepat pengembangan talentanya.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TALENTA SDM

Sebagai aset utama, Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan SDM secara berkesinambungan. Saat ini, Perusahaan aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi para karyawan. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan memungkinkan Perusahaan untuk tetap mengikuti perkembangan bisnis yang cukup dinamis. Divisi SDM, sebagai bagian dari Perusahaan yang memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan SDM diharapkan mampu menyediakan talenta SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan sikap yang mendukung optimalisasi produktivitas karyawan serta pencapaian sasaran Perusahaan melalui program pelatihan yang bersinergi dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

Peruri memiliki program pengembangan kompetensi yang terencana dan terfokus sesuai perkembangan bisnis perusahaan. Salah satu program pengembangan kompetensi utama yang telah dilaksanakan secara konsisten adalah program pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang mendukung proses peningkatan kualitas SDM.

The company always strives to improve the insights and skills of all employees, both in support of improving the quality of work and for developing the potential and career of each employee. In addition, promotions and transfers are also enforced with reference to the performance appraisal of each employee. For employees with specific potential talents, HR management will provide input to place these employees in positions that can accelerate their talent development.

TRAINING AND DEVELOPMENT HR TALENT

As the main asset, the Company is committed to developing Human Resources in a sustainable manner. Currently, the Company is actively organizing various trainings for employees. The education and training provided allows the Company to keep abreast of fairly dynamic business developments. The HR Division, as part of the Company which has a central role in organizing HR training and development, is expected to be able to provide HR talents who have high competence and attitudes that support the optimization of employee productivity and achievement of the Company's goals through training programs that are synergized with the Company's business development.

Peruri has a well-planned and focused competency development program according to the company's business development. One of the main competency development programs that have been implemented consistently is the education and training program (Diklat) which supports the process of improving the quality of human resources.

Realisasi dan Biaya Pengembangan Kompetensi Soft & Managerial
Realization and Costs of Managerial and Soft Competence Development

No.	Nama Program Pengembangan Development Program Name	Durasi Duration	Peserta Participants	Biaya Cost
1.	Talent Development Program – Job Target Kepala Departemen Target Job to Departement Head	3 bulan/ <i>months</i> (in class training & action learning) (in class training & action learning)	25 orang 25 people	Rp586.000.000
2.	Talent Development Program – Job Target Kepala Seksi (I) Section Head Target (I)	3 bulan/ <i>months</i> (in class training & action learning) (in class training & action learning)	25 orang 25 people	Rp546.000.000

Pelaksanaan Program Diklat Selama 2019
Implementation Diklat Program During 2019

No.	Pelaksana Excecutor		Kepala Unit Head Unit		Kepala Seksi Section Head		Kepala Departemen Head of Departement		Kepala Divisi Head of Divison	
	Pelatihan Training	Peserta Participant	Pelatihan Training	Peserta Participant	Pelatihan Training	Peserta Participant	Pelatihan Training	Peserta Participant	Pelatihan Training	Peserta Participant
1.	57	204	30	98	26	70	8	27	12	16
2.	2	67	3	8	1	1	1	3	0	0
3.	20	157	8	19	8	13	3	4	5	8
4.	157	1.039	79	237	62	127	21	51	22	39

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Pelaksana
Diklat Peruri Based on Executive Position Level

NO.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
1	Training Validasi Metode Pengujian dan Pengendalian Mutu Internal Training on Validation of Testing Methods and Internal Quality Control	5	21 s.d 22 Juni 21 until 22 June
2	Training Pekerjaan Pengadaan Software Integrasi dan server Database Materai Training Software Integration Procurement Work and Stamp Database server	4	30 Oktober s.d 2 November 30 October until 2 November
3	Training Pengukuran Hasil Pekerjaan dan Kegiatan Training in Measuring the Results of Work and Activities	2	26 s.d 28 Juni 26 until 28 June
4	Inhouse Training Audit Management System (AMS) Champions Inhouse Training Audit Management System (AMS) Champions	8	7 s.d 8 Oktober 7 until 8 October
5	Training Coaching skills Training Coahing Skills	3	25 s.d 27 September 25 until 27 September
6	Intensive English Course For Conference Day-10 Intensive English Course For Conference Day-10	61	3, 5, 10, 12, 17, 19, 26 September, 1, 3, 8, 10, 15, 24, 29 Oktober 3, 5, 10, 12, 17, 19, 26 September 3, 8, 10, 15, 24, 29 October
7	Kursus Bahasa Inggris English Courses	9	6 s.d 9 Februari, 2 Juni s.d 2 September, 2 s.d 6 September, 22 s.d 25 Oktober 6 until 9 February, 2 June until 2 September, 2 until 6 September, 22 until 25 October
8	Kursus Bahasa Inggris (GKM) English Courses (GKM)	4	20 s.d 26 Agustus 20 until 26 August

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Pelaksana

Diklat Peruri Based on Executive Position Level

NO.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
9	Kursus Bahasa Inggris kelas persiapan training Luar Negeri English Courses Abroad Preparation Class	22	14 s.d 16 Maret, 28 Februari s.d 5 Maret, 17 s.d 20 Juni, 10 s.d 13 Juli, 16 s.d 19 Juli 14 until 16 March, 28 February until 5 March, 17 until 20 June, 10 until 13 July, 16 until 19 July
10	Revisi Training Pelaporan Proses Kerja dan Kegiatan Revised Training on Work Process and Activity Reporting	15	25 s.d 26 Juli, 30 s.d 31 Juli & 29 s.d 30 Agustus 25 until 26 July, 30 until 31 July & 29 until 30 August
11	Training Investasi Pekerjaan Visitor Management System Tahap Pertama First Phase Visitor Management System Job Investment Training	7	29 September s.d 4 Oktober 29 September until 4 October
12	Training Leadership Training Leadership	1	11 s.d 12 Juli 11 until 12 July
13	General Knowledge & Placement Test English for Presentation	15	13 Agustus 13 August
14	Training Profesional Presentation Skills	11	25 s.d 26 Juli 25 until 26 July
15	Training Project Management	3	13 s.d 16 Agustus 13 until 16 August
16	Training Effective Communication Skills	5	14 s.d 17 Oktober & 26 s.d 29 November 14 until 17 October & 26 until 29 November
17	Training Report Writing Skills	4	26 s.d 29 Maret 26 until 28 March
18	Supervisory Skill	5	22 s.d 23 Mei 22 until 23 May
19	Training Certified Strategic Execution Profesionals (CSEP)	2	22 Maret s.d 10 Mei 22 March until 10 May
20	Creative Thinking	6	9 s.d 12 Desember 9 until 12 December
21	Training Pelayanan Manajemen dan Sistem Mutu ISO 9001 : 2015 ISO Quality System and Management Service Training 9001 : 2015	1	10 s.d 11 September 10 until 11 September
22	Training Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Laboratory Quality Management System Training	3	5 s.d 6 April 5 until 6 April
23	Workshop Personal Engagement Appraisal	1	21 s.d 22 Februari 21 until 22 February
24	Training Business Continuity Management (BCM)	3	16 s.d 19 Juli 16 until 19 July
25	Market Competitor Analysis	3	3 s.d 4 Desember 3 until 4 December
26	Training Competitive Pricing Analysis	1	18 s.d 19 Juli 18 until 19 July
27	Training Chemicals Handling	2	29 September s.d 3 Oktober 29 September until 3 October
28	Training Handling Customer Complaint Batch	28	24 s.d 25 & 26 s.d 27 September 24 until 25 & 26 until 27 September
29	Training Pump & Compressor Operation	3	16 s.d 20 September 16 until 20 September

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Pelaksana
Diklat Peruri Based on Executive Position Level

NO.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
30	Customer Loyalty & Satisfaction Program	3	19 s.d 20 Desember 19 until 20 December
31	Managing Your Sales Team	1	16 s.d 17 Desember 16 until 17 December
32	Color Management & Basic Pre-Press	13	3 s.d 4 Desember 3 until 4 December
33	Design Thinking For Innovation	5	16 s.d 20 Desember 16 until 20 December
34	Training Pengadaan Mikroskop Digital Digital Microscope Procurement Training	4	20 s.d 24 Agustus 20 until 24 August
35	Workshop ITIL Foundation 40	1	12 Februari 12 February
36	Training Production Planning & Inventory Control(PPIC)	3	29 Oktober s.d 1 November 29 October until 1 November
37	Inhouse Training Klasifikasi HCS dan HCTS UGAM Batch I Inhouse Training for HCS and HCTS Classification UGAM Batch I	15	13 & 18 Juni 13 & 18 June
38	Training Elektroplating Training Electroplating	5	8 s.d 13 September 8 until 13 September
39	Traning Autonomous Maintenance Revisi Training Autonomous Maintenance Revision	15	10 s.d 11 April 10 until 11 April
40	Inhouse Training Dasar Teknik Ilmu Grafika Inhouse Basic Graphic Science Engineering Training	14	9 s.d 10 Oktober 9 until 10 October
41	Training Dasar Teknik Dasar Ilmu Grafika (Pengantar Teknik Security Printing) Basic Engineering Basic Training in Graphic Science (Introduction to Security Printing Techniques)	13	23 s.d 25 April 23 until 25 April
42	Teknik Verifikasi Produk Batch 1 Verification Technic Product Batch 1	30	26 & 27 Desember 26 & 27 December
43	Inhouse Training Pengoperasian Mesin Sortir Bagi Operator Kepala Inhouse Training Operation of Sorting Machines for Head Operators	11	14 September
44	Inhouse Training Teknik Penerapan 5S/5R Inhouse Training on 5S/5R Implementation Techniques	13	30 s.d 31 Oktober 30 until 31 October
45	Pengambilan Sample dan Penghitungan Tarif Sampling and Tariff Calculation	4	5 Juli 5 July
46	Training Statistic Control (SQC)	1	12 s.d 13 April 12 until 13 April
47	Proses Excellence	7	15 s.d 18 Desember 15 until 18 December
48	Total Produktive Maintenace (TPM)/OEE Total Productive Maintenace (TPM)/OEE	9	18 s.d 20 Desember 18 until 20 December
49	Training Programmable Logic Control (PLC)	5	8 s.d 12 September 8 until 12 September
50	Workshop Scanning Electron Microscope (SEM)	1	10 s.d 22 Oktober 10 until 22 October
51	Training Plumbing System and maintenance	2	1 s.d 4 September 1 until 4 September
52	Training Kalibrasi Massa (Timbangan) dan pH Meter Mass (Scale) and pH Meter Calibration Training	3	18 s.d 21 November 18 until 21 November
53	Training Spare part Management - Revisi Training Spare Part Management – Revision	6	29 September s.d 3 Oktober 29 September until 3 October
54	Training Food Sanitation Hygiene	1	16 s.d 17 September 16 until 17 September
55	Diklat Damkar Level D Fire Fighting Training Level D	5	15 s.d 18 Juli 15 until 18 July

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Pelaksana

Diklat Peruri Based on Executive Position Level

NO.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
56	Pembinaan Tim P2K3 Team Coaching P2K3	14	19 s.d 20 Desember 19 until 20 December
57	Training Pengelolaan Limbah B3 Waste Management Training B3	4	7 s.d 10 Mei & 18 s.d 21 November 7 until 10 May & 18 until 21 November
58	Training Work Permit System	3	1 s.d 4 Juli 1 until 4 July
59	Sosialisasi/Coaching Clinic AEO Dari Bea dan Cukai AEO Socialization/Development Clinic from Bea and Cukai	3	30 Agustus 30 August
60	Inhouse Training Management Inventory	8	22 s.d 23 Oktober 22 until 23 October
61	Diklat Manajemen Logistik Logistics Management Training	1	5 s.d 6 Maret 5 until 6 March
62	Training Building Inspector (Pengawasan Bangunan)- Batch-2 Training Building Inspector (Building Supervision) - Batch-2	2	11 s.d 15 November & 25 s.d 29 November 11 - 15 & November 25 - 29
63	Diklat SIO Forklift SIO forklift Training	15	20 s.d 22 Februari, 24 s.d 26 April, 28 s.d 30 Agustus, 29 s.d 31 Oktober 20 until 22 February, 24 until 26 April, 28 until 30 August, 29 until 31 October
64	Operator License 1 (satu) Unit Forklift Electric 3,5 Ton Operator License 1 (one) 3.5Ton Electric Forklift	3	11 Desember 11 December
65	Training SIO Forklift Investasi 2 (dua) Unit Forklift Electric 25 Ton SIO Investment Forklift Training 2 (two) Units 25Ton Electric Forklift	5	22 s.d 24 April 22 until 24 April
66	Diklat Kepabeanaan Ekspor Impor Export Import Customs Training	2	30 Maret s.d 29 Juni 30 March until 29 June
67	Blimbingan Teknis Nasional Perpres Pengadaan Barang/Jasa No. 16 Tahun 2018 National Technical Guidance of Presidential Decree for the Procurement of Goods/Services No. 16 of 2018	1	25 s.d 26 Maret 26 until 26 March
68	Training Teknik Penyusunan HPS/OE HPS/OE Compilation Technique Training	4	9 s.d 10 Agustus 9 until 10 August
69	Prinsip Training Penyusunan Bussiness Development dan Feasibility Study Training Principles for Business Development and Feasibility Study Preparation	1	12 s.d 13 September 12 until 13 September
70	Training Behaviour Based Interview (BBI)	1	2 Juli 2 July
71	Diklat Supervisor Pelatihan dan Pengembangan SDM Training for Supervisory HR Training and Development	4	19 s.d 24 Agustus 19 until 24 August
72	Analisa Beban Kerja (Work Load Analysis) Work Load Analysis	6	25 s.d 28 Desember 25 until 28 December
73	Workshop Bagi Serikat Pekerja "Hubungan Industrial" Workshop "Industrial Relations" for Trade Unions	3	14 s.d 15 Februari 14 until 15 February
74	Ahli K3 Umum General OSH Specialist	1	16 s.d 29 Juni 16 until 29 June
75	Diklat AK3 Umum General AK3 Training	1	1 s.d 13 Juli 1 until 13 July
76	Training AK3 Lingkungan Kerja (Lingker) Sertifikasi BNSP Training for AK3 Work Environment (Ring) BNSP Certification	1	22 s.d 29 September 22 until 29 September
77	Genetec (Control Access System)	4	17 s.d 20 Desember 17 until 20 December
78	Training AK3 Muda Konstruksi AK3 Young Construction Training	3	17 S.D 23 November 17 until 23 November
79	Training AK3 Lingkungan Kerja Sertifikasi Kemenakertrans AK3 Training for Ministry of Manpower Certification Work Environment	2	27 Oktober s.d 3 November 27 October until 3 November

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Pelaksana
Diklat Peruri Based on Executive Position Level

NO.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
80	Training Decigo (Building Management Software)	4	23 s.d 26 April 23 until 26 April
81	Pelatihan Menembak Tahun 2019 Batch-1 Shooting Training Year 2019 Batch-1	90	20, 27 Oktober, & 3 November 20, 27 October, & 3 November
82	Master Class & Risk Beyond Conference Bali 2019	1	3 s.s 6 Desember 3 until 6 December
83	Risk Beyond Conference Bali 2019	1	5 s.d 6 Desember 5 until 6 December
84	Workshop The 5Th Jambore PR Indonesia	1	29 s.d 31 Oktober 29 until 31 October
85	Pelatihan Penulisan dan Kehumasan Di Era Milenial Writing and Public Relations Training in the Millennial Era	6	26 Januari 26 January
86	Training Filling Management	2	24 September
87	Training ISO-31000 Series 2 Risk Assessment Technique (RAT)	2	18 s.d 22 Maret 18 until 22 March
88	Ujian Sertifikasi Prinsip Asuransi dan Hukum Asuransi Insurance Principles Certification Exam and Insurance Law	2	9 Oktober 9 October
89	Contract Management/Drafting	1	16 s.d 20 Desember 16 until 20 December
90	Workshop Merger Akuisisi dan Holdingisasi Acquisition and Holding Merger Workshop	1	11 s.d 13 Desember 11 until 13 December
91	Training Certified Security Analyst (CSA)	2	13 s.d 15 April 13 until 15 April
92	Workshop Holding Company BUMN	1	13 s.d 15 November 13 until 15 November
93	Workshop Memahami Hapus Buku (Termasuk Pindahantanganan) Aset Tetap BUMN/Anak Perusahaan Workshop on Understanding Wrapping Books (Including Transfer of Fixed Assets of SOE/Subsidiaries)	2	24 s.d 25 Oktober 24 until 25 October
94	Training Finance For Non Finance	2	12 s.d 13 September 12 until 13 September
95	Workshop Rekonsiliasi Laporan Keuangan Financial Statement Reconciliation Workshop	1	28 Februari s.d 1 Maret 28 February until 1 March
96	Pelatihan Prinsip Asuransi dan Hukum Asuransi Insurance Principles Training and Insurance Law	2	2 s.d 4 Oktober 2 until 4 October
97	Sosialisasi Training Asuransi Aset Periode 2019 - 2020 Asset Insurance Training Socialization 2019 - 2020	8	16 s.d 18 Februari 16 until 18 February
98	Workshop Penerapan Standard Akuntansi Keuangan PSAK 72, 73, di BUMN dan Anak Perusahaan. Workshop on the Application of Financial Accounting Standards PSAK 72, 73, in SOE and Subsidiaries.	1	18 s.d 19 Juli 18 until 19 Juli
99	Workshop PSAK Terkini Sesuai Konvergensi IFRS Recent PSAK Workshop in Accordance with IFRS Convergence	1	7 s.d 12 Oktober 7 until 12 October
100	Training Perpajakan Tax Training	1	25 s.d 26 November 25 until 26 November
101	Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan PPh WOP 2018 - Jakarta Socialization of the Filling of the 2018 WOP PPh Annual Tax Return - Jakarta	16	26 Maret 26 March
102	Workshop Big Data Analytics	2	19 s.d 21 November 19 until 21 November
103	Pengadministrasian Data Base Data Base Administration	2	5 s.d 7 Agustus & 28 s.d 30 Oktober 5 until 7 August & 28 until 30 October
104	Bussiness Inteligent "SAP Dashboard Design 2013" Batch-2	1	9 s.d 12 Juli 9 until 12 July

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Pelaksana

Diklat Peruri Based on Executive Position Level

NO.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
105	Training Certified Information System Security Profesional (CISSP) - Revisi Training Certified Information System Security Profesional (CISSP) – Revision	3	13 s.d 17 Mei 13 until 17 May
106	Training Pekerjaan Jasa Assurance Security Website Job Training for Website Security Assurance Services	2	26 s.d 28 September 26 until 28 September
107	Pelatihan Pekerjaan Jasa Pembuatan Aplikasi ESS ESS Application Development Services Job Training	2	1 s.d 3 Maret 1 until 3 March
108	Revisi Workshop Human Capital With Big Data Revised Human Capital Workshop With Big Data	1	21 s.d 23 Juli 21 until 23 July
109	Training Investasi Pekerjaan ERP SAP Server Disaster Recovery Center ERP Job Investment Training SAP Server Disaster Recovery Center	3	3 s.d 8 November 3 until 8 November
110	Training Business Intelegent SAP Dashboard 2013	1	25 s.d 28 Juni 25 until 28 June
111	Training System Analysis And Program For Enterprise Resource Planing ERP SAP/ABAP	3	23 s.d 27 September 23 until 27 September
112	Auditor Internal ISO 27001:2013	2	3 Agustus 3 August
113	Diklat Auditor Interen Tingkat Manajerial - Revisi Managerial Level Internal Auditor Training - Revision	5	18 s.d 27 Maret 18 until 27 March
114	Seminar Nasional Internal Auditor dan Pengukuhan Qualified Internal Auditor (QIA) National Seminar on Internal Auditors and Confirmation of Qualified Internal Auditors (QIA)	5	23 s.d 26 April 23 until 26 April
115	Drill (Latihan) Sertifikasi Certified Information System Auditor (CISA) - Revisi Drill (Exercise) Certification of Certified Information System Auditor (CISA) - Revision	6	16 Mei 16 May
116	Diklat Auditor Interen Tingkat Dasar - RIT003 Basic Level Internal Auditor Training - RIT 003	2	4 s.d 16 Maret 4 until 16 March
117	Exam CISA CISA Exam	5	13 November
118	Diklat Auditor Dasar Basic Auditor Training	2	12 s.d 23 Agustus 12 until 23 August
119	Inhouse IDEA Single One Computer Level-1 (Investasi)	13	10 s.d 11 Juli 10 until 11 July
120	Inhouse Training IDEA Single One Computer Level 2	13	7 s.d 8 Agustus 7 until 8 August
121	TEMAN CONFERENCE 2019 Singapore	2	4 s.d 7 November 4 until 7 November
122	Training Legal & Compliance Risk Management	2	9 s.d 11 Oktober 9 until 11 October
123	Training Certified Governance Professionals	2	26 s.d 28 Juni 26 until 28 June
124	Pelatihan Risk Control Self Assesment (RCSA) Batch-2 Risk Control Self Assessment (RCSA) Training Batch-2	19	18 s.d 19 & 25 s.d 26 September 18 until 19 & 25 until 26 September
125	TOT	1	15 s.d 16 April 15 until 16 April
126	Training Return On Training Investment (ROTI)	1	22 s.d 25 April 22 until 25 April
127	Konsenyering Pengembangan Aplikasi Website LMS LMS Website Application Development Consistent	1	23 s.d 26 April 23 until 26 April

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Pelaksana
Diklat Peruri Based on Executive Position Level

NO.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
128	Benchmark Knowledge Management	1	17 Juli 17 July
129	Training Problem Solving and Decision Making	1	7 s.d 11 Oktober 7 until 11 October
130	Workshop Menghindari 10 Kesalahan dalam Persiapan Pensiun 10 Avoiding Mistakes in Retirement Preparation Workshop	1	11 September
	JUMLAH DIKLAT SESUAI SILABUS AMOUNT OF TRAINING ACCORDING TO SYLLABUS	771	
131	Audit Internal Laboratorium Laboratory Internal Audit	6	24 s.d 28 Juni 24 until 28 June
132	Benchmark Investasi Keuangan dan Hedging di BNI Financial Investment Benchmark and Hedging at BNI	2	29 Juli s.d 2 Agustus 29 July until 2 August
133	Bimtek Grafikasi Bimtek Graphics	10	23 s.d 24 Juli 23 until 24 July
134	Diklat Pra Pensiun Batch 2 Tahun 2019 Batch 2 Pre-Retirement Training 2019	70	23 s.d 26 April, 23 s.d 26 Juli, 20 s.d 23 Agustus, 23 s.d 26 Agustus, 1 s.d 4 Oktober, 17 s.d 20 Desember 23 until 26 April, 23 until 26 July, 20 until 23 August, 23 until 26 August, 1 until 4 October, 17 until 20 December
135	GKM 2019 Batch 1	63	29 s.d 30 April, 22 s.d 23 Mei, 24 s.d 25 Juni, 26 s.d 27 Juni 29 until 30 April, 22 until 23 May, 24 until 25 June, 26 until 27 June
136	Investasi Jasa Asset Tracking Tahap 2 Investment in Asset Tracking Services Phase 2	4	16 s.d 21 Maret 16 until 21 March
137	Investasi Jasa System Management Monitoring Production (SMPP) Investasi Jasa System Management Monitoring Production (SMPP)	1	26 s.d 29 Februari 26 until 29 February
138	Investasi Mesin Grinding for Intaglio Printing Investment Grinding Machines for Intaglio Printing	3	30 Maret s.d 7 April 30 March until 7 April
139	Investasi Replacement Mesin Cetak Nomor Prodnu Investment Replacement Printing Machine Product Numbers	4	23 Februari s.d 3 Maret 23 February until 3 March
140	Konvensi GKM Tingkat Internasional ICQCC 2019 Tokyo – Japan ICQCC International Level GKM Convention 2019 Tokyo - Japan	4	22 s.d 27 September 22 until 27 September
141	Optimalisasi Hubungan Kerja Outsourcing dan PKWT di BUMN dan Anak Perusahaan Optimization of Outsourcing and PKWT Work Relationships in SOE and Subsidiaries	2	5 Juli 5 July
142	Pekerjaan Jasa Review dan Roll Over Master Plan Service Work Review and Roll Over Master Plan	1	2 s.d 6 Desember 2 until 6 December
143	Pekerjaan Jasa Sewa Data Storage CCTV System Tahun 2019 (Investasi) Rental Services for Data Storage CCTV System in 2019 (Investment)	4	7 s.d 12 Juli 7 until 12 July
144	Pelatihan koordinator Pemagangan Di Industri Apprenticeship coordinator training in industry	1	19 s.d 25 Agustus 19 until 25 August
145	Pelatihan Pelatihan Pemagangan (Mentor) Apprenticeship Training (Mentor)	1	16 s.d 31 Agustus 16 until 31 August
146	Pelatihan Sistem Ijin Kerja, Penandaan dan Penguncian Work Permit, Marking and Lockout System Training	11	10 Oktober 10 October
147	Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Employee Self Service (ESS) Employee Self Service Management Information System (ESS) Training	66	29 & 30 Januari 29 & 30 January

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Pelaksana
Diklat Peruri Based on Executive Position Level

NO.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
148	Pendamping Diklat Pra Pensiun Batch-4 Pre-Retirement Training Assistant Batch-4	1	1 s.d 4 Oktober 1 until 4 October
149	Pendidikan Penilaian Dasar Properti (PDP) 1 Masyarakat Penilaian Properti Indonesia Basic Property Appraisal Education (PDP) 1 Indonesian Property Appraisal Society	1	11 s.d 18 November 11 until 18 November
150	Penyampai Materi diklat pra Pensiun Batch-4 Tahun 2019 Presentation of pre-retirement training materials for Batch-4 2019	1	2 s.d 4 Oktober 2 until 4 October
151	Revisi Training Pengadaan 1 (Satu) Unit Mesin Bubut Manual Revision of Training for Procurement of 1 (One) Manual Lathe Machine	4	9 s.d 17 Maret 9 until 17 March
152	Seminar "How to Maximize Corporate Image With Photography"	7	15 Februari 15 February
153	Sosialisasi Pengisian Pajak SPT Tahunan WOP PPh 2018 – Karawang Sosialisasi Pengisian Pajak SPT Tahunan WOP PPh 2018 - Karawang	59	18 Maret 18 March
154	Training 1 (One) Unit Coating Flexography UV Cure Machine	1	23 Februari s.d 2 Maret 23 February until 2 March
155	Training 1 (One) Unit Finishing & Digital Numbering Label Machine	3	28 September s.d 6 Oktober 28 September until 6 October
156	Training and Transfer Knowledge Bagi Delegasi PSD Nepal Training and Transfer of Knowledge for PSD Nepal Delegates	4	20 Agustus 20 August
157	Training and Transfer Knowledge Delegasi Nepal Rastra Bank Hari Pertama Day 1 of Nepal Rastra Bank Delegation Training and Knowledge Transfer	1	5 Agustus 5 August
158	Training dan Inspector Jasa Penggantian Chiller Air Cooled No.1 Utas Training and Inspector for Air Cooled Chiller Replacement Service No. 1 Thread	4	24 Februari s.d 2 Maret 24 February until 2 March
159	Training dan Inspector cooling Tower Training and Inspector cooling Tower	1	13 s.d 16 November 13 until 16 November
160	Training dan Inspector Investasi Replacement Genset Peruri Jakarta Training and Investment Inspector for Replacement Genset Peruri Jakarta	3	20 s.d 26 Oktober 20 until 26 October
161	Training dan Inspector Pekerjaan Jasa Replacement Mesin Chiller Air Cooled No.3 Gedung Training and Inspector Work Services for Replacement of Chiller Air Cooled Machines No. 3 Building	3	19 s.d 28 Oktober 19 until 28 October
162	Training Investasi 1 (satu) Unit Portable Roughness Tester Investment Training 1 (one) Unit Portable Roughness Tester	2	31 Juli s.d 4 Agustus 31 July until 4 August
163	Training Investasi 1 Unit Mesin Coin Inspection Investment Training 1 Coin Inspection Machine Unit	6	7 s.d 15 Desember 7 until 15 December
164	Training Investasi Mesin NC Bubut NC Lathe Machine Investment Training	6	22 s.d 30 Juni 22 until 30 June
165	Training Investasi Pekerjaan Network Infrastructure Services Investment Training for Network Infrastructure Services Jobs	2	17 s.d 22 November 17 until 22 November

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Pelaksana
Diklat Peruri Based on Executive Position Level

NO.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
166	Training Investasi Pengadaan 1 (Satu) Unit Mesin Acid Rinsing Station Procurement Investment Training for 1 (one) Acid Rinsing Station Machine Unit	1	7 s.d 13 Juli 7 until 13 July
167	Training Investasi Pengadaan 1 (Satu) Unit Mesin Bubut Manual Dengan Digital Read Out (DRO) Investment Training for Procurement of 1 (One) Unit Manual Lathe with Digital Read Out (DRO)	4	26 Januari s.d 3 Februari 26 January until 3 February
168	Training Investasi Pengadaan 2 Sets Numbering Box Telescopic Procurement Investment Training 2 Sets Telescopic Numbering Box	1	7 s.d 15 Desember 7 until 15 December
169	Training Investasi Rekondisi Instalasi Damkar Gedung Uang Logam Training on Investment Reconditioning of Metal Money Building Damkar Installation	3	12 s.d 17 Agustus 12 until 17 August
170	Training Investasi Replacement Mesin Cetak Nomor ke 1 Investment Training for Printing Machine Replacement Number 1	7	20 s.d 27 Juli & 20 s.d 3 Agustus 20 until 27 July & 20 until 3 August
171	Training Investasi Replacement Mesin Cetak Nomor ke 2 Investment Training for Printing Machine Replacement Number 2	7	17 s.d 24 & 17 s.d 31 Agustus 17 until 24 & 17 until 31 August
172	Training Investasi Replecement Mesin Cetak Offset Ke-1 Investment Training for the 1st Offset Printing Machine Replecement	6	11 s.d 25 Mei 11 until 25 May
173	Training Investasi Replecement Mesin Cetak Offset Ke-2 2nd Offset Printing Machine Replecement Investment Training	7	15 s.d 22 & 15 s.d 29 Juni 15 until 22 & 15 until 29 June
174	Training Investasi Timbangan Digital Dep Siap Ceteuang Digital Scales Investment Training Dep Ready to Ceteuang	3	26 s.d 28 Desember 26 until 28 December
175	Training Pekerjaan Upgrading Fire Alarm dan Intrusion System Job Training for Upgrading Fire Alarm and Intrusion System	3	20 s.d 25 Oktober 20 until 25 October
176	Training Pekerjaan Upgrading vidio Management System dan Penambahan CCTV Gedung Lini Internasional Training for Video Upgrading Management System and Addition of CCTV for the International Line Building	5	3 s.d 8 November 3 until 8 November
177	Training Pengadaan 2 (Dua) Unit Replacement Inline Paper Counting Machine Procurement Training for 2 (Two) Units Replacement Inline Paper Counting Machines	2	5 s.d 13 Oktober 5 until 13 October
178	Training & Inspeksi Cooling Tower Training & Inspection Cooling Tower	2	7 s.d 9 Maret 7 until 9 March
	JUMLAH DIKLAT NON SILABUS TOTAL OF NON-SYLABUS DIKLAT	413	
	JUMLAH TOTAL	1.184	

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Supervisi
Peruri Training Program Based on Supervision Position Level

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
1	Training Validasi Metode Pengujian dan Pengendalian Mutu Internal Training for Validation of Testing Methods and Internal Quality Control	1	21 s.d 22 Juni 21 until 22 June
2	Training Pengukuran Hasil Pekerjaan dan Kegiatan Work and Activity Outcome Measurement Training	1	26 s.d 28 Juni 26 until 28 June
3	Training Coaching skills	3	25 s.d 27 September 25 until 27 September
4	Intensive English Course For Conference Day-10 -	13	5, 10, 12, 17, 19, 26 September, 1, 3, 8, 10, 15, 24, 29 Oktober 5, 10, 12, 17, 19, 26 September, 1, 3, 8, 10, 15, 24, 29 October
5	Kursus Bahasa Inggris - English Courses -	2	6 s.d 9 Februari & 2 Juni s.d 2 September 6 until 9 February & 2 June until 2 September
6	Kursus Bahasa Inggris (GKM) - English Courses	1	3 September
7	Kursus Bahasa Inggris Kelas Prsiapan Training Luar Negeri - English Courses for Abroad Preparation Class -	2	17 s.d 20 Juni 17 until 20 June
8	Rapat Koordinasi Dengan Jajaran SPN PMJ Lido Bogor - Coordination Meeting with PMJ Lido Bogor SPN -	1	21 Oktober 21 October
9	Revisi Training Pelaporan Proses Kerja dan Kegiatan - Revised Work Process and Activity Reporting Training -	30	25 s.d 26 Juli, 30 s.d 31 Juli, 29 s.d 30 Agustus 25 until 26 July, 30 until 31 July, 29 until 30 August
10	Training Investasi Pekerjaan Visitor Management System Tahap Pertama - First Phase Visitor Management System Job Investment Training -	1	29 September s.d 4 Oktober 29 September until 4 October
11	General Knowledge & Placement Test English For Presentation	1	13 Agustus 13 August
12	Training Profesional Presentation Skills	6	25 s.d 26 Juli 25 until 26 Juli
13	Training Effective Communication Skills	1	26 s.d 29 November 26 until 29 November
14	Supervisory Skill	15	22 s.d 23 Mei 22 until 23 May
15	Workshop Aspek Hukum di Era Digital - CSS002 Workshop on Legal Aspects in the Digital Age - CSS002	1	3 s.d 5 Juli 3 until 5 July
16	Training Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Laboratory Quality Management System Training	1	5 s.d 6 April 5 until 6 April
17	Workshop Personal Engagement Appraisal	1	21 s.d 22 Februari 21 until 22 February
18	Market Competitor Analysis	1	3 s.d 4 Desember 3 until 4 December
19	Training Competitive Pricing Analysis	1	18 s.d 19 Juli 18 until 19 July
20	Training Chemicals Handling	1	29 September s.d 3 Oktober 29 September until 3 October
21	Training Handling Customer Complaint Batch-2	2	26 s.d 27 September 26 until 27 September
22	Customer Loyalty & Satisfaction Program	2	19 s.d 20 Desember 19 until 20 December
23	Managing Your Sales Team	2	16 s.d 17 Desember 16 until 17 December

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Supervisi
Peruri Training Program Based on Supervision Position Level

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
24	Color Management & Basic Pre-Press	1	3 s.d 4 Desember 3 until 4 December
25	Training Pengadaan Mikroskop Digital Digital Microscope Procurement Training	2	20 s.d 24 Agustus 20 until 24 August
26	Training Production Planning & Inventory Control (PPIC)	1	19 Oktober s.d 1 November 19 October until 1 November
27	Training Dasar Teknik Dasar Ilmu Grafika (Pengantar Teknik Security Printing) Basic Engineering Basic Training in Graphic Science (Introduction to Security Printing Techniques)	2	23 s.d 25 April 23 until 25 April
28	Inhouse Training Teknik Penerapan 5S/5R Inhouse Training on 5S/5R Implementation Techniques	7	30 s.d 31 Oktober 30 until 31 October
29	Pengambilan Sample dan Penghitungan Tarif Sampling and Tariff Calculation	1	5 Juli 5 July
30	Training Statistic Control (SQC)	3	12 s.d 13 April 12 until 13 April
31	Total Produktive Maintenance (TPM)/OEE Total Productive Maintenance (TPM)/OEE	8	18 s.d 20 Desember 18 until 20 December
32	Workshop Scanning Electron Microscope (SEM)	1	20 s.d 22 Oktober 20 until 22 October
33	Training Kalibrasi Massa (Timbangan) dan pH Meter Mass (Scale) and pH Meter Calibration Training	1	18 s.d 21 November 18 until 21 November
34	Training Food Sanitation Hygiene	1	16 s.d 17 September 16 until 17 September
35	Pembinaan Tim P2K3 - IKT020 P2K3 - IKT020 Team Coaching	11	19 s.d 20 Desember 19 until 20 December
36	Sosialisasi/Coaching Clinic AEO Dari Bea dan Cukai - JLM001 AEO Socialization/Coaching Clinic from Bea and Cukai - JLM001	4	30 Agustus 30 August
37	Inhouse Training Management Inventory - JLS001	3	22 s.d 23 Oktober 22 until 23 October
38	Training Building Inspector (Pengawasan Bangunan)-Batch-1 - JLT003 Training Building Inspector (Building Supervision) -Batch-1 - JLT003	1	11 s.d 15 November 11 until 15 November
39	Diklat SIO Forklift Batch 3 Tahun 2019 - JLT004 SIO Forklift Batch 3 Training Year 2019 - JLT004	2	28 s.d 30 & 29 s.d 30 Agustus 28 until 30 & 29 until 30 August
40	Training SIO Forklift Investasi 2 (dua) Unit Forklift Electric 25 Ton - JLT004 SIO Investment Forklift Training 2 (two) Units 25 Ton Electric Forklift - JLT004	1	22 s.d 24 April 22 until 24 April
41	Workshop Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa - JLT006 Workshop on the Implementation of Goods and Services Procurement - JLT006	1	10 s.d 22 November 10 until 22 November
42	Diklat Kepabeanan Ekspor Impor - JLT008 Export Import Customs Training - JLT008	1	30 Maret s.d 29 Juni 30 March until 29 June
43	Blimbingan Teknis Nasional Perpres Pengadaan Barang/Jasa No. 16 Tahun 2018 - JLT009 National Technical Guidance of Presidential Decree for the Procurement of Goods/Services No. 16 of 2018 - JLT009	1	25 s.d 26 Maret 25 until 26 March
44	Training Teknik Penyusunan HPS/OE - JLT014 HPS/OE Compilation Technique Training - JLT014	3	9 s.d 10 Agustus 9 until 10 August
45	Training Behaviour Based Interview (BBI) - KMS002	1	2 Juli 2 July
46	Analisa Beban Kerja (Work Load Analysis) - KMU002 Work Load Analysis - KMU002	1	25 s.d 28 Desember 25 until 28 December

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Supervisi
Peruri Training Program Based on Supervision Position Level

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
47	Training Design For HR Development - KMV001	1	26 s.d 29 Mei 26 until 29 May
48	Training AK3 Lingkungan Kerja Sertifikasi Kemenakertrans - LPT009 AK3 Training for Ministry of Manpower Certification Work Environment - LPT009	1	27 Oktober s.d 3 November 27 October until 3 November
49	Genetec (Control Access System) - LPT010	1	17 s.d 20 Desember 17 until 20 December
50	Training Decigo (Building Management Software) - LPT011	1	23 s.d 26 April 23 until 26 April
51	Pelatihan Menembak Tahun 2019 Batch-1 - LPU002 Shooting Training Year 2019 Batch-1 - LPU002	6	20, 27 Oktober & 3 November 20. 27 October & 3 November
52	Workshop The 5Th Jambore PR Indonesia - MRT002	1	29 s.d 31 Oktober 29 until 31 October
53	Workshop Memahami Cyber Law, Cyber Crime dan Digital Forensic dalam Sistem - NHT001 Workshop on Understanding Cyber Law, Cyber Crime and Digital Forensic in Systems - NHT001	1	22 s.d 23 Januari 22 until 23 January
54	Contract Management/Drafting - NHU003	1	16 s.d 20 Desember 16 until 20 December
55	Workshop Merger Akuisisi dan Holdingisasi - OUS001 Acquisition and Holding Merger Workshop - OUS001	1	11 s.d 13 Desember 11 until 13 December
56	Workshop Holding Company BUMN - OUT00014	1	13 s.d 15 November 13 until 15 November
57	Sosialisasi Training Asuransi Aset Periode 2019 - 2020 - OUT008 Asset Insurance Training Socialization 2019 - 2020 - OUT008	7	16 s.d 18 Februari 16 until 18 February
58	Workshop Penerapan Standard Akuntansi Keuangan PSAK 72, 73, di BUMN dan Anak Perusahaan. - PAS001 Workshop on the Application of Financial Accounting Standards PSAK 72, 73, in SOE and Subsidiaries. - PAS001	1	18 s.d 19 Juli 18 until 19 July
59	Training Perpajakan - PAT011 Tax Training - PAT011	1	15 s.d 26 November 15 until 26 November
60	Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan PPh WOP 2018 - Jakarta - PAT012 Socialization of the Filling of the 2018 WOP PPh Annual Tax Return - Jakarta - PAT012	1	26 Maret 26 March
61	Workshop Big Data Analytics -QTS004	1	19 s.d 21 November 19 until 21 November
62	Training Certified Information System Security Profesional (CISSP) - Revisi - QTT004 Training Certified Information System Security Profesional (CISSP) - Revision - QTT004	1	13 s.d 17 Mei 13 until 17 May
63	Revisi Workshop Human Capital With Big Data - QTT005 Revised Human Capital Workshop With Big Data - QTT005	1	21 s.d 23 Juli 21 until 23 July
64	Auditor Internal ISO 27001:2013 - QTU001 Internal Auditor ISO 27001:2013 - QTU001	1	3 Agustus 3 August
65	Training Certified Lead Auditor ISO-27001/IRCA - QTU001	1	6 s.d 10 Mei 6 until 10 May
66	Drill (Latihan) Sertifikasi Certified Information System Auditor (CISA) - Revisi - RIT002 Drill (Exercise) Certification of Certified Information System Auditor (CISA) - Revision - RIT002	1	16 Mei 16 May
67	Exam CISA - RIT002 CISA Exam - RIT002	1	13 November

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Supervisi
Peruri Training Program Based on Supervision Position Level

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
68	Inhouse IDEA Single One Computer Level-1 (Investasi) - RIT006 Inhouse IDEA Single One Computer Level-1 (Investment) - RIT006	1	10 s.d 11 Juli 10 until 11 July
69	Inhouse Training IDEA Single One Computer Level 2 - RIU002	1	7 s.d 8 Agustus 7 until 8 August
70	Pelatihan Risk Control Self Assesment (RCSA) Batch-2 - SMU001 Risk Control Self Assessment (RCSA) Training Batch-2 - SMU001	8	18 s.d 19 & 25 s.d 26 September 18 until 19 & 25 until 26 September
71	Training Return On Training Investment (ROTI) - TCS002	1	22 s.d 25 April 22 until 25 April
72	Benchmark Knowledge Management - TCS004	1	17 Juli 17 July
73	Training Problem Solving and Decision Making - TCT001	1	7 s.d 11 Oktober 7 until 11 October
74	Workshop Menghindari 10 Kesalahan dalam Persiapan Pensiun - TCT001 10 Avoiding Mistakes in Retirement Preparation Workshop - TCT001	1	11 September
	JUMLAH DIKLAT SESUAI SILABUS AMOUNT TRAINING ACCORDING TO SYLLABUS	194	
75	Audit Internal Laboratorium Laboratory Internal Audit	3	24 s.d 28 Juni 24 until 28 June
76	Benchmark Investasi Keuangan dan Hedging di BNI Financial Investment Benchmark and Hedging at BNI	1	29 Juli s.d 2 Agustus 29 July until 2 August
77	Bimtek Grafikasi Bimtek Graphics	6	23 s.d 24 Juli 23 until 24 July
78	Pendamping Diklat Pra Pensiun Batch-4 Pre-Retirement Training Assistant Batch-4	1	1 s.d 4 Oktober 1 until 4 October
79	Diklat Pra Pensiun Batch 2 Tahun 2019 Pre- Retirement Training Batch 2 2019	25	23 s.d 26 April, 23 s.d 26 Juli, 20 s.d 23 Agustus, 23 s.d 26 Agustus, 1 s.d 4 Oktober, 17 s.d 20 Desember 23 until 26 April, 23 until 26 July, 20 until 23 August, 23 until 26 August, 1 until 4 October, 17 until 20 December
80	Diklat Tim Juri Innovation Award & Expo 2019 Innovation Award & Expo 2019 Jury Team Training	5	21 s.d 23 Agustus 21 until 23 August
81	GKM Batch 1 dan 4	3	29 s.d 30 April & 26 s.d 27 Juni 29 until 30 April & 26 until 27 June
82	Konvensi GKM Tingkat Internasional ICQCC 2019 Tokyo – Japan ICQCC International Level GKM Convention 2019 Tokyo - Japan	1	22 s.d 27 September 22 until 27 September
83	Pekerjaan Jasa Sewa Data Storage CCTV System Tahun 2019 (Investasi) Rental Services for Data Storage CCTV System in 2019 (Investment)	2	7 s.d 12 Juli 7 until 12 July
84	Revisi Training Pengadaan 1 (Satu) Unit Mesin Bubut Manual Revision of Training for Procurement of 1 (One) Manual Lathe Machine	1	9 s.d 10 Maret 9 until 10 March
85	Training 1 (One) Unit Finishing & Digital Numbering Label Machine	1	28 September s.d 6 Oktober 28 September until 6 October
86	Training and Transfer Knowledge Bagi Delegasi PSD Nepal Training and Knowledge Transfer for PSD Nepal Delegations	1	20 Agustus 20 August
87	Training and Transfer Knowledge Delegasi Nepal Rastra Bank Hari Pertama Day 1 of Nepal Rastra Bank Delegation Training and Knowledge Transfer	1	5 Agustus 5 August

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Supervisi
Peruri Training Program Based on Supervision Position Level

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
88	Training dan Inspector Pekerjaan Jasa Replacement Mesin Chiller Air Cooled No.3 Gedung Training and Inspector Work Services for Replacement of Chiller Air Cooled Machines No. 3 Building	1	19 s.d 28 Oktober 19 until 28 October
89	Training Investasi Pengadaan 1 (Satu) Unit Mesin Acid Rinsing Station Procurement Investment Training for 1 (one) Acid Rinsing Station Machine Unit	1	7 s.d 13 Juli 7 until 13 July
90	Training Investasi Pengadaan 1 (Satu) Unit Mesin Bubut Manual Dengan Digital Read Out (DRO) Investment Training for Procurement of 1 (One) Unit Manual Lathe with Digital Read Out (DRO)	1	26 Januari s.d 3 Februari 26 January until 3 February
91	Training Investasi Replecement Mesin Cetak Offset Ke-1 Investment Training for the 1st Offset Printing Machine Replecement	1	11 s.d 18 Mei 11 until 18 May
92	Training Pekerjaan Upgrading Fire Alarm dan Intrusion System Job Training for Upgrading Fire Alarm and Intrusion System	1	20 s.d 25 Oktober 20 until 25 October
93	Training Pekerjaan Upgrading Fire Alarm dan Intrusion System Job Training for Upgrading Fire Alarm and Intrusion System	1	20 s.d 25 Oktober 20 until 25 October
94	Training Pekerjaan Upgrading vidio Management System dan Penambahan CCTV Gedung Lini Internasional Training for Video Upgrading Management System and Addition of CCTV for the International Line Building	1	3 s.d 8 November 3 until 8 November
95	Investasi Mesin Grinding for Intaglio Printing Investment Grinding Machines for Intaglio Printing	1	30 Maret s.d 7 April 30 March until 7 April
96	Pelatihan Balanced Score Card (BSC) Master Camp Balanced Score Card (BSC) Master Camp Training	6	6 s.d 8 Februari & 2 Juni s.d 2 Agustus 6 until 8 February & 2 June until 2 August
97	Pelatihan koordinator Pemagangan Di Industri Apprenticeship coordinator training in industry	1	13 s.d 16 Agustus 13 until 16 August
98	Pelatihan Sistem Ijin Kerja, Penandaan dan Penguncian Work Permit, Marking and Lockout System Training	1	10 Oktober 10 October
99	Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Employee Self Service (ESS) Employee Self Service Management Information System (ESS) Training	9	29 & 30 Januari 29 & 30 January
100	Seminar "How to Maximize Corporate Image With Photography"	1	15 Februari 15 Febuary
101	Sosialisasi Pengisian Pajak SPT Tahunan WOP PPh 2018 – Karawang Socialization of the 2018 WOP PPh Annual SPT Filling - Karawang	6	18 & 18 s.d 20 Maret 18 & 18 until 20 March
	JUMLAH DIKLAT NON SILABUS TOTAL OF NON-SYLLABUS TRAINING	83	
	JUMLAH TOTAL	277	

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Kepala Seksi
Peruri Training Program Based on the Position Level of Section Head

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Amount of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
1	Training Validasi Metode Pengujian dan Pengendalian Mutu Internal Training for Validation of Testing Methods and Internal Quality Control	2	21 s.d 22 Juni 21 until 22 June
2	Training Pekerjaan Jasa Assurance Security Website Website Security Assurance Services Job Training	3	26 s.d 28 September 26 until 28 September
3	Training Pekerjaan Pengadaan Software Integrasi dan server Database Materai Job Training for Procurement Software Integration and Stamp Database server	1	30 Oktober s.d 2 November 30 October until 2 November
4	Training Pengukuran Hasil Pekerjaan dan Kegiatan Work and Activity Outcome Measurement Training	1	26 s.d 28 Juni 26 until 28 June
5	Kursus Bahasa Inggris English Courses	1	22 s.d 25 Oktober 22 until 25 October
6	Kursus Bahasa Inggris Persiapan Training LN English Courses Preparation Training LN	1	16 s.d 19 Juli 16 until 19 July
7	Training Profesional Presentation Skills	3	25 s.d 26 Juli 25 until 26 July
8	Training Certified Strategic Execution Profesionals (CSEP)	1	22 Maret s.d 10 Mei 22 March until 10 May
9	Training Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Laboratory Quality Management System Training	1	5 s.d 6 April 5 until 6 April
10	Customer Loyalty & Satisfaction Program	1	19 s.d 20 Desember 19 until 20 December
11	Color Management & Basic Pre-Press	1	3 s.d 4 Desember 3 until 4 December
12	Design Thinking For Innovation	1	16 s.d 20 Desember 16 until 20 December
13	Workshop ITIL Foundation 40	1	12 Februari 12 February
14	Pengambilan Sample dan Penghitungan Tarif Sampling and Tariff Calculation	2	5 Juli 5 July
15	Contractor Security Management System (CSMS)	1	16 s.d 18 Juli 16 until 18 July
16	Pembinaan Tim P2K3 P2K3 Team Coaching	3	19 s.d 20 Desember 19 until 20 December
17	Training Pengelolaan Limbah B3 Waste Management B3 Training	1	18 s.d 21 November 18 until 21 November
18	Sosialisasi/Coaching Clinic AEO Dari Bea dan Cukai AEO Socialization/Coaching Clinic from Bea and Cukai	10	30 Agustus 30 August
19	Inhouse Training Management Inventory	7	22 s.d 23 Oktober 22 until 23 October
20	Training Building Inspector (Pengawasan Bangunan)- Batch-2 Training Building Inspector (Building Supervision) - Batch-2	1	25 s.d 29 November 25 until 29 November
21	Diklat SIO Forklift Batch 3 Tahun 2019 SIO Forklift Batch 3 2019 Training	1	28 s.d 30 Agustus 28 until 30 August
22	Workshop Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Workshop on the Implementation of Goods and Services Procurement	1	20 s.d 22 November 20 until 22 November
23	Training Teknik Penyusunan HPS/OE HPS/OE Compilation Technique Training	1	9 s.d 10 Agustus 9 until 10 August
24	Prinsip Training Penyusunan Bussiness Development dan Feasibility Study Training Principles for Business Development and Feasibility Study Preparation	1	12 s.d 13 September 12 until 13 September
25	Training Design For HR Development	1	26 s.d 29 Mei 26 until 29 May

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Kepala Seksi
Peruri Training Program Based on the Position Level of Section Head

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Amount of Participants	Tanggal Pelaksanaa Date of Implementation
26	Pelatihan Menembak Tahun 2019 Batch-1 Shooting Training Year 2019 Batch-1	3	20, 27 Oktober & 3 November 20, 27 October & 3 November
27	Workshop Memahami Aspek Hukum Ketenagakerjaan Di BUMN Workshop on Understanding the Aspects of Labor Law in SOE	1	3 s.d 5 April 3 until 5 April
28	Workshop Memahami Cyber Law, Cyber Crime dan Digital Forensic dalam Sistem Workshop on Understanding Cyber Law, Cyber Crime and Digital Forensic in Systems	1	22 s.d 23 Januari 22 until 23 January
29	Workshop Holding Company BUMN	1	13 November
30	Workshop Rekonsiliasi Laporan Keuangan Financial Statement Reconciliation Workshop	1	28 Februari s.d 1 Maret 28 February until 1 March
31	Sosialisasi Training Asuransi Aset Periode 2019 - 2020 Asset Insurance Training Socialization 2019 - 2020	5	16 s.d 18 Februari 16 until 18 February
32	Kompotisi The Asset Manajemen 2019 The Asset Management Competition 2019	1	20 s.d 25 Oktober 20 until 25 October
33	Training Certified Management Accountant	1	7 September s.d 30 November 7 September until 30 November
34	Pengadministrasian Data Base Data Base Administration	1	25 s.d 27 November 25 until 27 November
35	Bussiness Inteligent "SAP Dashboard Design 2013" Batch-2	1	9 s.d 12 Juli 9 until 12 July
36	Pelatihan Pekerjaan Jasa Pembuatan Aplikasi ESS ESS Application Development Services Job Training	2	1 s.d 3 Maret 1 until 3 March
37	Training Investasi Pekerjaan ERP SAP Server Disaster Recovery Center ERP Job Investment Training SAP Server Disaster Recovery Center	2	3 s.d 8 November 3 until 8 November
38	Training Business Inteligent SAP Dashboard 2013	2	25 s.d 28 Juni 25 until 28 June
39	Auditor Internal ISO 27001:2013 ISO Internal Auditor 27001:2013	5	3 Agustus 3 August
40	Training Certified Lead Auditor ISO-27001/IRCA	1	6 s.d 10 Mei 6 until 10 May
41	Drill (Latihan) Sertifikasi Certified Information System Auditor (CISA) - Revisi Drill (Exercise) Certification of Certified Information System Auditor (CISA) - Revision	1	16 Mei 16 May
42	Diklat Auditor Interen Tingkat Dasar Basic Level Internal Auditor Training	1	4 s.d 16 Maret 4 until 16 March
43	Inhouse IDEA Single One Computer Level-1 (Investasi) Inhouse IDEA Single One Computer Level-1 (Investment)	2	10 s.d 11 Juli 10 until 11 July
44	Inhouse Training IDEA Single One Computer Level 2	3	7 s.d 8 Agustus 7 until 8 August
45	Diklat Pengawas SMK3 (Contractor Safety Management System Supervisor) SMK3 Supervisory Training (Contractor Safety Management System Supervisor)	1	15 s.d 18 Juli 15 until 18 July
46	Seminar Nasional Sehari Komite Anti Korupsi Indonesia (Kaki) One day National Seminar of the Indonesian Anti-Corruption Committee (Leg)	1	31 Oktober 31 October
47	Pelatihan Risk Control Self Assesment (RCSA) Batch-2 Risk Control Self Assessment (RCSA) Training Batch-2	8	18 s.d 19 & 25 s.d 26 September 18 until 19 & 25 until 26 September
48	Sertifikasi Knowledge Management System - Sesi 1 Knowledge Management System Certification - Session 1	3	28 s.d 29 Agustus 28 until 29 August
49	Benchmark Knowledge Management	1	17 Juli 17 July

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Kepala Seksi
Peruri Training Program Based on the Position Level of Section Head

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Amount of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
50	Training Problem Solving and Decision Making	2	7 s.d 11 Oktober 7 until 11 October
	JUMLAH DIKLAT SESUAI SILABUS AMOUNT TRAINING ACCORDING TO SYLLABUS	99	
51	Audit Internal Laboratorium Laboratory Internal Audit	3	24 s.d 28 Juni 24 until 28 June
52	Benchmark Investasi Keuangan dan Hedging di BNI Financial Investment Benchmark and Hedging at BNI	1	29 Juli s.d 2 Agustus 29 July until 2 August
53	Pelatihan Balanced Score Card (BSC) Master Camp Balanced Score Card (BSC) Master Camp Training	2	6 s.d 8 Februari 6 until 8 February
54	Pelatihan Sistem Ijin Kerja, Penandaan dan Penguncian Work Permit, Marking and Lockout System Training	1	10 Oktober 10 October
55	Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Employee Self Service (ESS) Employee Self Service Management Information System (ESS) Training	7	29 Januari 29 January
56	Penilaian Lapangan Tim Juri Internal ke PWT-Surabaya Field Assessment of Internal Jury Team to PWT-Surabaya	2	6 s.d 7 September 6 until 7 September
57	Sosialisasi Pengisian Pajak SPT Tahunan WOP PPh 2018 – Karawang Socialization of the 2018 WOP PPh Annual SPT Filling - Karawang	1	18 s.d 20 Maret 18 until 20 March
58	Bimtek Grafikasi Bimtek Graphics	17	23 s.d 24 Juli 23 until 24 July
59	CIIP ID Summit For ICT Sector 2019 Conference	2	27 s.d 30 Agustus 27 until 30 August
60	Diklat Pra Pensiun Batch 3 Pre-Retirement Training Batch 3	3	23 s.d 26 April, 20 s.d 23 Agustus & 1 s.d 4 Oktober 23 until 26 April, 20 until 23 August & 1 until 4 October
61	Diklat Tim Juri Innovation Award & Expo 2019 Innovation Award & Expo 2019 Jury Team Training	11	21 s.d 23 Agustus 21 until 23 August
62	GKM 2019 Batch 3	1	24 s.d 25 Juni 24 until 25 June
63	Investasi Jasa System Management Monitoring Production (SMPP) Investment in System Management Monitoring Production (SMPP) Services	1	26 s.d 29 Februari 26 until 29 February
64	Pekerjaan Jasa Review dan Roll Over Master Plan Service Work Review and Roll Over Master Plan	4	2 s.d 6 Desember 2 until 6 December
65	Training and Transfer Knowledge Bagi Delegasi PSD Nepal Training and Knowledge Transfer for PSD Nepal Delegations	2	20 Agustus 20 August
66	Training and Transfer Knowledge Delegasi Nepal Rastra Bank Hari Pertama Day 1 of Nepal Rastra Bank Delegation Training and Knowledge Transfer	1	5 Agustus 5 August
67	Investasi Jasa Asset Tracking Tahap 2 Investment in Asset Tracking Services Phase 2	1	16 s.d 21 Maret 16 until 21 March
68	Training 1 (One) Unit Coating Flexography UV Cure Machine	1	12 Februari s.d 2 Maret 12 February until 2 March
69	Training Investasi Pekerjaan Redundant Server Virtualisasi Redundant Server Virtualization Job Investment Training	2	8 s.d 13 Desember 8 until 13 December
70	Training Investasi Rekondisi Instalasi Damkar Gedung Uang Logam Training on Investment Reconditioning of Metal Money Building Damkar Installation	1	12 s.d 17 Agustus 12 until 17 August
	JUMLAH DIKLAT NON SILABUS TOTAL OF NON-SYLLABUS TRAINING	64	
	JUMLAH TOTAL	163	

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Kepala Departemen
Peruri Training Program Based on the Position Level of Head of Department

No	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
1	Training Pengukuran Hasil Pekerjaan dan Kegiatan Work and Activity Outcome Measurement Training	1	26 s.d 28 Juni 26 until 28 June
2	Rapat Koordinasi Dengan Jajaran SPN PMJ Lido Bogor Coordination Meeting with PMJ Lido Bogor SPN	1	21 Oktober 21 October
3	Seminar Transformational Leadership through Catalytic Collaboration Seminar on Transformational Leadership through Catalytic Collaboration	1	30 s.d 31 Juli 30 until 31 July
4	Training Leader As A Coach	1	12 s.d 14 November 12 until 14 November
5	Pembinaan Tim P2K3 P2K3 Team Coaching	3	19 s.d 20 Desember 19 until 20 December
6	Sosialisasi/Coaching Clinic AEO Dari Bea dan Cukai AEO Socialization/Coaching Clinic from Bea and Cukai	6	30 Agustus 30 August
7	Training Teknik Penyusunan HPS/OE HPS/OE Compilation Technique Training	1	9 s.d 10 Agustus 9 until 10 August
8	Training Design For HR Development	1	26 s.d 29 Mei 26 until 29 May
9	Diklat Gada Utama Main Gada Training	1	18 s.d 23 Juli 18 until 23 July
10	Pelatihan Menembak Tahun 2019 Batch-1 Shooting Training Year 2019 Batch-1	2	20 & 27 Oktober 20 & 27 October
11	Sosialisasi Training Asuransi Aset Periode 2019 - 2020 Asset Insurance Training Socialization 2019 - 2020	4	16 s.d 18 Februari 16 until 18 February
12	Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan PPh WOP 2018 - Jakarta Socialization of the Filling of the 2018 WOP PPh Annual Tax Return - Jakarta	1	26 Maret 26 March
13	Seminar Nasional Internal Auditor Dan Pengukuhan Gelar QIA National Seminar on Internal Auditor and Confirmation of the Title of QIA	1	23 s.d 26 April 23 until 26 April
14	Inhouse IDEA Single One Computer Level-1 (Investasi) Inhouse IDEA Single One Computer Level-1 (Investment)	2	10 s.d 11 Juli 10 until 11 July
15	Inhouse Training IDEA Single One Computer Level 2	2	7 s.d 8 Agustus 7 until 8 August
16	Seminar Nasional Sehari Komite Anti Korupsi Indonesia (Kaki) One day National Seminar of the Indonesian Anti-Corruption Committee (Leg)	1	31 Oktober 31 August
17	Pelatihan Risk Control Self Assesment (RCSA) Batch-2 Risk Control Self Assessment (RCSA) Training Batch-2	17	18 s.d 19 & 25 s.d 26 September 18 until 19 & 25 until 26 September
18	Benchmark Knowledge Management	1	17 Juli 17 July
	JUMLAH DIKLAT SESUAI SILABUS AMOUNT OF TRAINING ACCORDING TO SYLLABUS	47	
19	Pembukaan Diklat Pra Pensiun Batch-4 Tahun 2019 Opening of 2019 Batch-4 Pre-Retirement Education and Training	1	1 s.d 4 Oktober 1 until 4 October
20	Training dan Inspector Jasa Penggantian Chiller Air Cooled No.1 Utas Training and Inspector for Air Cooled Chiller Replacement Service No. 1 Thread	1	24 Februari s.d 2 Maret 24 February until 2 March
21	Training and Transfer Knowledge Delegasi Nepal Rastra Bank Hari Pertama Day 1 of Nepal Rastra Bank Delegation Training and Knowledge Transfer	1	5 Agustus 5 August

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Kepala Departemen
Peruri Training Program Based on the Position Level of Head of Department

No	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
22	Investasi Jasa System Management Monitoring Production (SMPP) Investment in System Management Monitoring Production (SMPP) Services	1	26 s.d 29 Februari 26 until 29 February
23	Diklat Tim Juri Innovation Award & Expo 2019 Innovation Award & Expo 2019 Jury Team Training	3	21 s.d 23 Agustus 21 until 23 August
24	Bimtek Grafikasi Bimtek Graphics	1	23 s.d 24 Juli 23 until 24 July
25	Diklat Pra pensiun Batch-4 Tahun 2019 Batch-4 Pre-retirement Education and Training in 2019	2	1 s.d 4 Oktober 1 until 4 October
	JUMLAH DIKLAT NON SILABUS TOTAL OF NON-SYLLABUS TRAINING	10	
JUMLAH TOTAL		57	

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Kepala Divisi
Peruri Training Program Based on Level Position Head of Division

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementations
1	Training Validasi Metode Pengujian dan Pengendalian Mutu Internal Training for Validation of Testing Methods and Internal Quality Control	1	21 s.d 22 Juni 21 until 22 June
2	Seminar Tentang Mengantisipasi Tantangan Bisnis dengan Manajemen Resiko Berintegrasi Seminar on Anticipating Business Challenges with Integrated Risk Management	1	24 Juli 24 July
3	Training Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Laboratory Quality Management System Training	1	5 s.d 6 April 5 until 6 April
4	Pengambilan Sample dan Penghitungan Tarif Sampling and Tariff Calculation	1	5 Juli 5 July
5	Pembinaan Tim P2K3 P2K3 Team Coaching	1	19 s.d 20 Desember 19 until 20 December
6	Sosialisasi/Coaching Clinic AEO Dari Bea dan Cukai AEO Socialization/Coaching Clinic from Customs and Excise	10	30 Agustus 30 August
7	Training Teknik Penyusunan HPS/OE HPS/OE Compilation Technique Training	1	9 s.d 10 Agustus 9 until 10 August
8	Pelatihan Menembak Tahun 2019 Batch-1 Shooting Training Year 2019 Batch-1	4	20, 27 Oktober & 3 November 20, 27 October & 3 November
9	Master Class & Risk Beyond Conference Bali 2019 Master Class & Risk Beyond Conference Bali 2019	1	3 s.d 4 Desember 3 until 4 December
10	Workshop Rekonsiliasi Laporan Keuangan Financial Statement Reconciliation Workshop	1	28 Februari s.d 1 Maret 28 February until 1 March
11	Sosialisasi Training Asuransi Aset Periode 2019 - 2020 Asset Insurance Training Socialization 2019 - 2020	2	16 s.d 18 Februari 16 until 18 February
12	Integrated GRC & Financial Crime Conference	1	26 s.d 28 Juni 26 until 28 June
13	Indonesia Chief Information Officer Network 7 th Conference 2019	1	20 s.d 23 Maret 20 until 23 March

Program Diklat Peruri Berdasarkan Level Jabatan Kepala Divisi
Peruri Training Program Based on Level Position Head of Division

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementations
14	Auditor Internal ISO 27001:201 ISO Internal Auditor 27001:2013	1	3 Agustus 3 August
15	Exam CISA CISA Exam	1	13 November
16	TEMAN CONFERENCE 2019 Singapore	2	4 s.d 7 November 4 until 7 November
17	Training Certified Chief Governance Officer (CCGO)	1	14 s.d 16 Agustus 14 until 16 August
18	Pelatihan Risk Control Self Assesment (RCSA) Batch-2 Risk Control Self Assessment (RCSA) Training Batch-2	4	18 s.d 19 & 25 s.d 26 September 18 until 19 & 25 until 26 September
19	Sertifikasi ISO-31000 : ERM Fundamental ISO-31000 Certification: ERM Fundamentals	1	21 s.d 22 Februari 21 until 22 February
20	Training Sertifikasi ISO-31000 ERM Fundamental Fundamental ISO-31000 ERM Certification Training	1	30 Juni s.d 6 Juli 30 June until 6 July
	JUMLAH DIKLAT SESUAI SILABUS AMOUNT OF ACCORDING TO SYLLABUS	37	
19	Training and Transfer Knowledge Bagi Delegasi PSD Nepal Training and Knowledge Transfer for PSD Nepal Delegations	1	20 Agustus 2020 20 August 2020
20	Diklat Tim Juri Innovation Award & Expo 2019 Innovation Award & Expo 2019 Jury Team Training	1	21 s.d 23 Agustus 21 until 23 August
21	Bimtek Grafikasi Bimtek Graphics	1	23 s.d 24 Juli 23 until 24 July
22	Audit Internal Laboratorium Laboratory Internal Audit	1	24 s.d 28 Juni 24 until 28 July
	JUMLAH DIKLAT NON SILABUS TOTAL OF NON-SYLLABUS TRAINING	4	
	JUMLAH TOTAL	41	

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN KERJA YANG KONDISIF

Pembentukan lingkungan kerja yang kondusif juga merupakan salah satu faktor peningkatan kesejahteraan Karyawan. Hal tersebut ditandai dengan upaya Perusahaan dalam menyediakan tempat ibadah, membuat komunitas olahraga dan mengadakan acara-acara pada hari raya keagamaan. Perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk mengembangkan dirinya melalui berbagai kegiatan di luar tanggung jawab performa kinerja. Kegiatan-kegiatan seperti olahraga, kegiatan keagamaan dan kegiatan hobi lainnya diharapkan mampu memberikan wadah kepada setiap karyawan untuk lebih mengenal satu sama lain secara personal. Dengan pengenalan personal ini, Perusahaan berupaya untuk membentuk lingkungan kerja yang kondusif, yang akan berujung pada loyalitas dan produktivitas kinerja karyawan.

ESTABLISHMENT OF A CONDUCTIVE WORK ENVIRONMENT

The establishment of a conducive work environment is also one of the factors in increasing employee welfare. This is marked by the Company's efforts to provide places of worship, create a sports community and hold events on religious holidays. The company provides opportunities for all employees to develop themselves through various activities outside of performance responsibilities. Activities such as sports, religious activities, and other hobbies are expected to provide a platform for each employee to get to know each other personally. With this personal introduction, the Company strives to establish a conducive work environment, which will lead to employee loyalty and productivity.

SURVEI KETERIKATAN KARYAWAN

Employee Engagement Survey terhadap karyawan merupakan cara yang dilakukan untuk mengukur tingkat keterikatan karyawan terhadap Perusahaan. Tingkat keterikatan karyawan tercermin dari semangat, dedikasi dan rasa kebersamaan pada seluruh karyawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan Perusahaan. Tingkat keterikatan karyawan ini juga menggambarkan bagaimana kesiapan Perusahaan akan menjadi *High Performing Organization* dan siap berkompetisi baik pada industri keuangan nasional maupun regional. Tingkat keterikatan karyawan Peruri 2019 dikategorikan *engaged* dengan skor 7,63. Karyawan dengan keterikatan ini dinilai baik dalam menyampaikan hal-hal positif perihal perusahaan, memiliki keinginan untuk bertahan di perusahaan, serta memiliki kemauan untuk bekerja di luar pekerjaan utamanya.

EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY

Employee Engagement Survey of employees is a way to measure the level of employee engagement with the Company. The level of employee engagement is reflected in the enthusiasm, dedication and sense of togetherness of all employees in order to achieve the Company's goals and success. The level of employee engagement also illustrates how the Company is ready to become a High Performing Organization, and is ready to compete in both the national and regional financial industries. In 2019, the engagement level of Peruri employees is categorized as engaged with a score of 7.63. Employees with this engagement are considered good at conveying positive things about the company, have a desire to stay at the company, and have a willingness to work more than their main job.

Skor Keterikatan
Engagement Score

Status	2018	2019
Skor Score	7,20	7,63

Indeks Kepuasan
Satisfaction Index

Status	2017	2018	2019
Indeks Index	78,2%	76,8%	80,5%

Indeks kepuasan karyawan adalah proporsi karyawan yang *satisfied* dan *very satisfied*. Indeks kepuasan pada 2019 sebesar 80,5% masuk dalam kategori *high* dan mengalami kenaikan dari tahun lalu sebesar 3,7. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum karyawan puas dengan pekerjaan di lingkungan kerjanya, utamanya pada indikator *reputation*, *diversity* dan *colleague*. selain itu dua aspek yang dianggap masih perlu ditingkatkan yaitu *career opportunity* dan *learning development* hal ini menunjukkan bahwa Karyawan Peruri memiliki antusiasme untuk meningkatkan *skill* untuk menunjang produktivitas Perusahaan.

The employee satisfaction index is the proportion of employees who are satisfied and very satisfied. The 2019 satisfaction index of 80.5% is in the high category and has increased from last year's 3.7. This shows that in general employees are satisfied with their work in their work environment, especially in the indicators of reputation, diversity, and colleague. in addition, two aspects that are considered still need to be improved, namely career opportunity and learning development, this shows that Peruri employees have enthusiasm to improve skills to support company productivity.

PENGELOLAAN KEPUASAN KARYAWAN

Perusahaan terus berupaya melakukan pengelolaan kepuasan dan loyalitas pegawai secara optimal dengan senantiasa memerhatikan kesejahteraan seluruh pegawai agar dapat saling bersinergi demi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Perusahaan menyadari bahwa tingkat kepuasan dan keterikatan yang tinggi akan menunjukkan sikap yang positif terhadap kinerja pegawai. Sebaliknya, ketidakpuasan dan keterikatan karyawan menunjukkan sikap yang kontraproduktif terhadap kinerja Perusahaan.

EMPLOYEE SATISFACTION MANAGEMENT

The company continues to strive to manage employee satisfaction and loyalty optimally by always adhering to the welfare of all employees so that they can work together to create optimal work productivity. The company realizes that a high level of satisfaction and engagement will show a positive attitude towards employee performance. On the other hand, employee dissatisfaction and attachment shows a counterproductive attitude towards the Company's performance.

PENGELOLAAN HAM KARYAWAN

Peruri memiliki komitmen dalam menjaga hak asasi manusia pada setiap karyawannya berupa memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, ras, ataupun kondisi fisik lainnya dalam hal pengembangan diri, pemberian upah kerja, jam kerja, kesempatan kerja, maupun kebebasan dalam berpendapat.

PENGELOLAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perusahaan selalu berupaya untuk menciptakan suasana kerja yang terbuka, positif dan progresif dalam rangka meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan adil. Perusahaan berupaya membangun hubungan ketenagakerjaan yang sehat sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelaksanaan hubungan industrial dibangun atas dasar pemahaman bahwa Perusahaan dan karyawan melaksanakan hak, kewajiban serta tanggung jawabnya dalam suasana saling menghormati, saling mempercayai dan tekad untuk saling bekerjasama dengan tujuan menjamin kelangsungan usaha Perusahaan dan perbaikan kesejahteraan karyawan.

Serikat Pekerja merupakan sarana penghubung antara perusahaan dengan karyawan untuk menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antar kedua belah pihak. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Peruri memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menjadi salah satu anggota Serikat Pekerja yang ada di Peruri, yaitu:

1. Serikat Pekerja Peruri Bersatu (SPPB);
2. Serikat Pekerja Perum Peruri (SP3);
3. Serikat Pekerja Bersama Membangun Peruri (SP-Bemper).

Perusahaan juga memberikan bantuan iuran keanggotaan kepada serikat pekerja yang telah diatur pada SKEP-95/II/2010, pada 12 Februari 2010.

EMPLOYEE HUMAN RIGHTS MANAGEMENT

Peruri is committed to protecting the human rights of every employee in the form of providing equal rights and opportunities to every employee regardless of gender, ethnicity, religion, race, or other physical conditions in terms of personal development, work wages, working hours, work opportunities, as well as freedom of opinion.

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS

The company always strives to create an open, positive and progressive working atmosphere in order to promote harmonious, dynamic and fair industrial relations. The company seeks to build a healthy employment relationship in accordance with the applicable regulations as set out in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The implementation of industrial relations is built on the basis of the understanding that the Company and employees exercise their rights, obligations and responsibilities in an atmosphere of mutual respect, mutual trust and determination to work together with the aim of ensuring the continuity of the Company's business and improving the welfare of employees.

The Workers Union is a means of connecting the company and employees to create a good and harmonious relationship between the two parties. In accordance with the mandate of Law Number 21 of 2000 concerning Worker Unions/Labor Unions, Peruri gives freedom to employees to become members of the Workers' Union in Peruri, namely:

1. United Peruri Workers Union (SPPB);
2. Perum Peruri Workers Union (SP3);
3. Joint Workers Union Building Peruri (SP-Bemper).

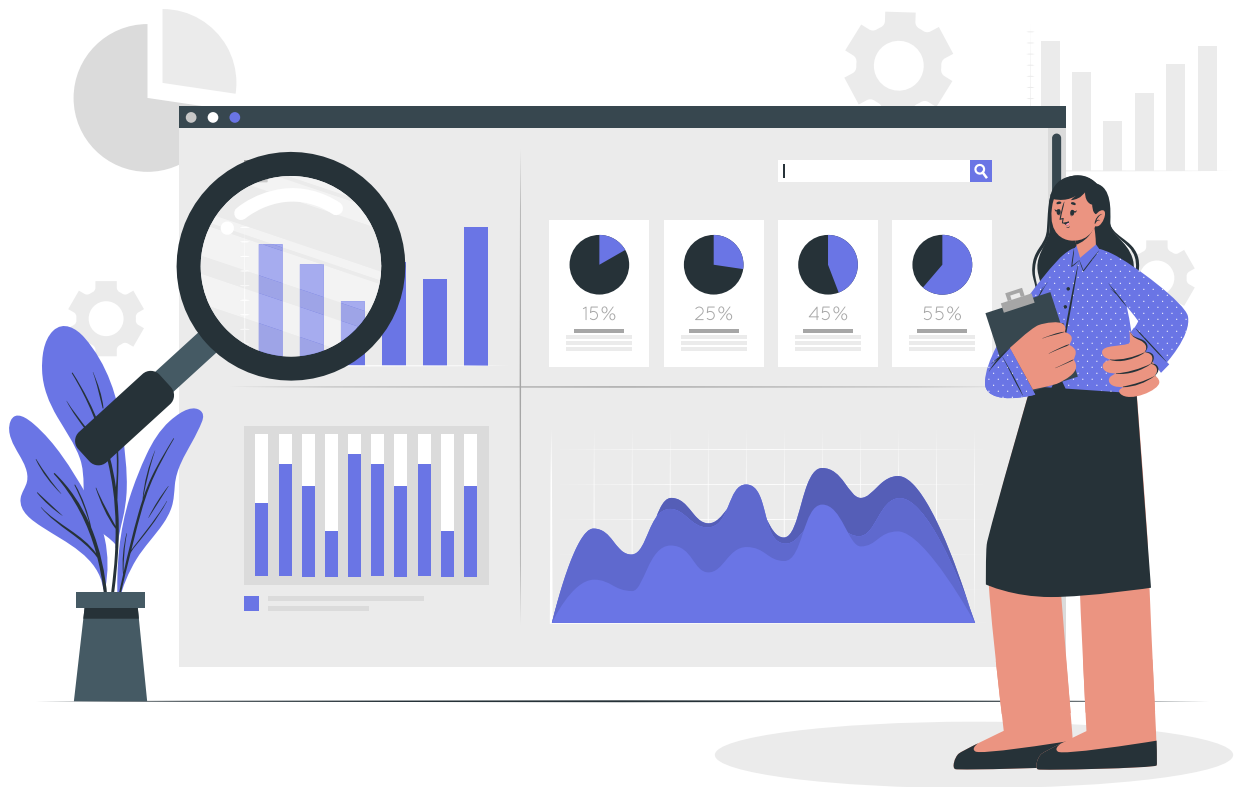
The company also provides membership dues assistance to trade unions as regulated in SKEP-95/II/2010, on February 12, 2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 28 tahun 2014, pada 31 Desember 2014, Serikat Pekerja Peruri Bersatu dan Serikat Pekerja Perum Peruri dapat mewakili Karyawan/ti dalam melakukan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama dengan Perusahaan yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Perundingan Perjanjian Kerja Bersama Peruri telah dilakukan pada Agustus 2017, antara perusahaan dengan serikat pekerja dan menghasilkan Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 29 Desember 2017 dan didaftarkan di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan masa berlaku 2 tahun (1 Januari 2018 – 31 Desember 2019).

In accordance with the Regulation of the Minister of Manpower of Indonesia Number 28 of 2014, on December 31, 2014, the United Peruri Workers Union and the Perum Peruri Workers Union can represent employees in auditing Collective Bargaining Agreements with Companies which are conducted every 2 (two) years.

Peruri Collective Labor Agreement negotiations were conducted in August 2017, between the company and the labor union and resulted in a Collective Labor Agreement that was signed by both parties on December 29, 2017, and was registered at the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia and the Office of Manpower and Transmigration of Karawang Regency with a period of valid for 2 years (1 January 2018 - 31 December 2019).



TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY

SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan kebutuhan bisnis dan organisasi mengharuskan Perusahaan untuk menata dan membenahi diri dalam menyiapkan teknologi yang dibutuhkan untuk dapat mendukung pengembangan dan perluasan bisnis, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen melalui layanan berbasis teknologi informasi. Dalam era globalisasi, kehandalan teknologi informasi merupakan salah satu unsur penting yang mendukung proses bisnis dan layanan yang prima. Teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan Perusahaan menyediakan produk dan jasa kepada konsumen, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usaha.

KEBIJAKAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI

Seuai Keputusan Direksi No. KEP-1/I/2017, pada 24 Januari 2017, tentang Pedoman Corporate Policy Manual dan Operation Manual terkait Perusahaan Umum Percetakan Uang RI, Peruri menetapkan Panduan Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi yang dimaksudkan sebagai kerangka utama dalam pengelolaan tata kelola TI yang baik guna mendukung penerapan *good corporate governance* secara lebih komprehensif.

Tujuan Kebijakan Tata Kelola TI ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai arahan manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan TI dan memuat kebijakan-kebijakan strategis dan operasional TI yang wajib dipenuhi dan dipatuhi dalam pengelolaan TI Perusahaan untuk menghasilkan layanan TI dan informasi sebagai berikut:

1. Efektif, yaitu informasi yang tepat waktu, benar, konsisten, bermanfaat, relevan dan berkaitan dengan proses bisnis Perusahaan;
2. Efisien, yaitu informasi yang dihasilkan melalui penggunaan sumber daya secara optimal;
3. Kerahasiaan, yaitu perlindungan atas informasi yang sensitif dari penyajian yang tidak terotorisasi;
4. Integritas, yaitu perlindungan atas akurasi, validitas dan kelengkapan informasi sesuai dengan kebutuhan dan kriteria proses bisnis Perusahaan;
5. Ketersediaan, yaitu perlindungan atas ketersediaan informasi sehingga dapat tersedia pada saat dibutuhkan;
6. Kepatuhan, yaitu pengelolaan TI yang patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan dan pengelolaan TI;

INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM

The development of business and organizational needs requires the Company to organize and improve itself in preparing the technology needed to be able to support business development and expansion, as well as providing the best service to consumers through information technology-based services. In the era of globalization, reliability of information technology is one of the important elements that support excellent business processes and services. Technology is the main key that enables the Company to provide products and services to consumers, measure and track business performance, and make the right management decisions for business continuity.

INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGIC POLICY

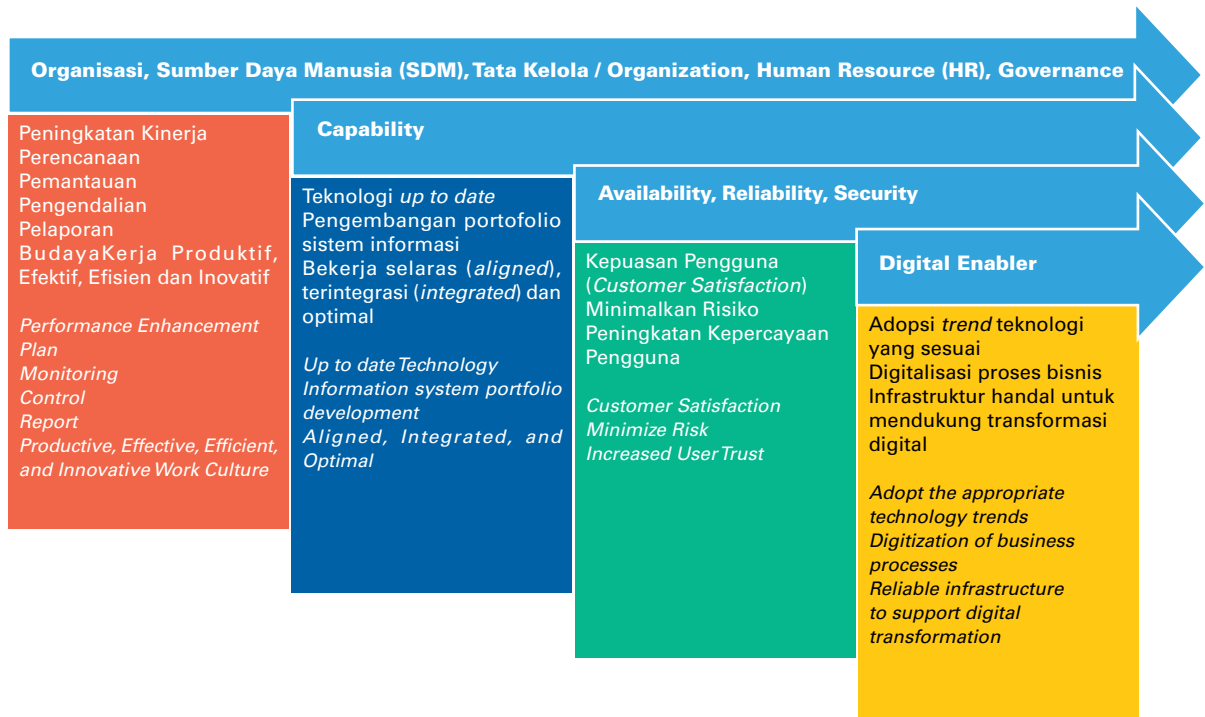
After the Decree of the Board of Directors No. KEP-1/I/2017, on January 24, 2017, regarding the Guidelines for the Corporate Policy Manual and Operation Manual regarding Perusahaan Umum Percetakan Uang RI, Peruri established the Information Technology Governance Policy Guide which is intended as the main framework in managing governance Good IT to support the implementation of good corporate governance more comprehensively.

The purpose of the IT Governance Policy is intended to provide an overview of the direction of the Company's management relating to IT management and contain IT strategic and operational policies that must be fulfilled and complied with in the IT management of the Company to produce IT services and information as follows:

1. Effective, namely information that is timely, correct, consistent, useful, relevant and related to the Company's business processes;
2. Efficient, namely information generated through optimal use of resources;
3. Confidentiality, namely the protection of sensitive information from unauthorized presentation;
4. Integrity, namely protection of the accuracy, validity and completeness of information in accordance with the needs and criteria of the Company's business processes;
5. Availability, namely protection of the availability of information so that it can be available when needed;
6. Compliance, namely IT management that complies with laws and regulations relating to the management of the Company and IT management;

- 7. Keandalan, yaitu informasi yang dapat dipercaya dan digunakan oleh manajemen dalam rangka pengambilan keputusan.
- 7. Reliability, namely information that can be trusted and used by management for decision making.

Sasaran Strategis TI
IT Strategic Goals



STRUKTUR PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan manufaktur di bidang *Security Printing*, maka teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting bagi Peruri. Secara umum, teknologi informasi berperan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan automasi proses Peruri. Sementara itu, secara khusus terkait bidang *Security Printing*, teknologi informasi juga berperan untuk menjamin keamanan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) informasi.

Konsekuensi dari bisnis perusahaan memberikan tuntutan spesifik terhadap Divisi Teknologi Informasi Peruri. Divisi Teknologi Informasi harus dapat memenuhi tuntutan performa perusahaan dan kepatuhan secara berimbang:

1. Mewujudkan cita-cita perusahaan yaitu Go Global – Go Digital pada 2020;
2. Digitalisasi internal proses dan *enabler*.

Regulasi terkait TI yang harus dipatuhi selaku BUMN:

1. Permen BUMN No. PER-02/MBU/2013, tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara;
2. Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016, tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi;
3. Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara;
4. Permen BUMN No. PER-03/MBU/02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara.

Standar Industri terkait TI yang dituntut oleh pasar Peruri:

1. ISO 27001 – Information Security Management Systems

STRUCTURE OF COMPANY INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

As a manufacturing company in the field of Security Printing, information technology has a very important role for Peruri. In general, information technology plays a role in increasing the effectiveness, efficiency and automation of Peruri's processes. Meanwhile, specifically related to the field of Security Printing, information technology also plays a role in ensuring the security (*confidentiality*), integrity, and availability of information.

The consequence of the company's business is that it puts specific demands on Peruri's Information Technology Division. The Information Technology Division must be able to meet the demands of company performance and compliance in a balanced manner:

1. Realizing the company's goal of Go Global - Go Digital in 2020;
2. Internal digitalization process and enabler.

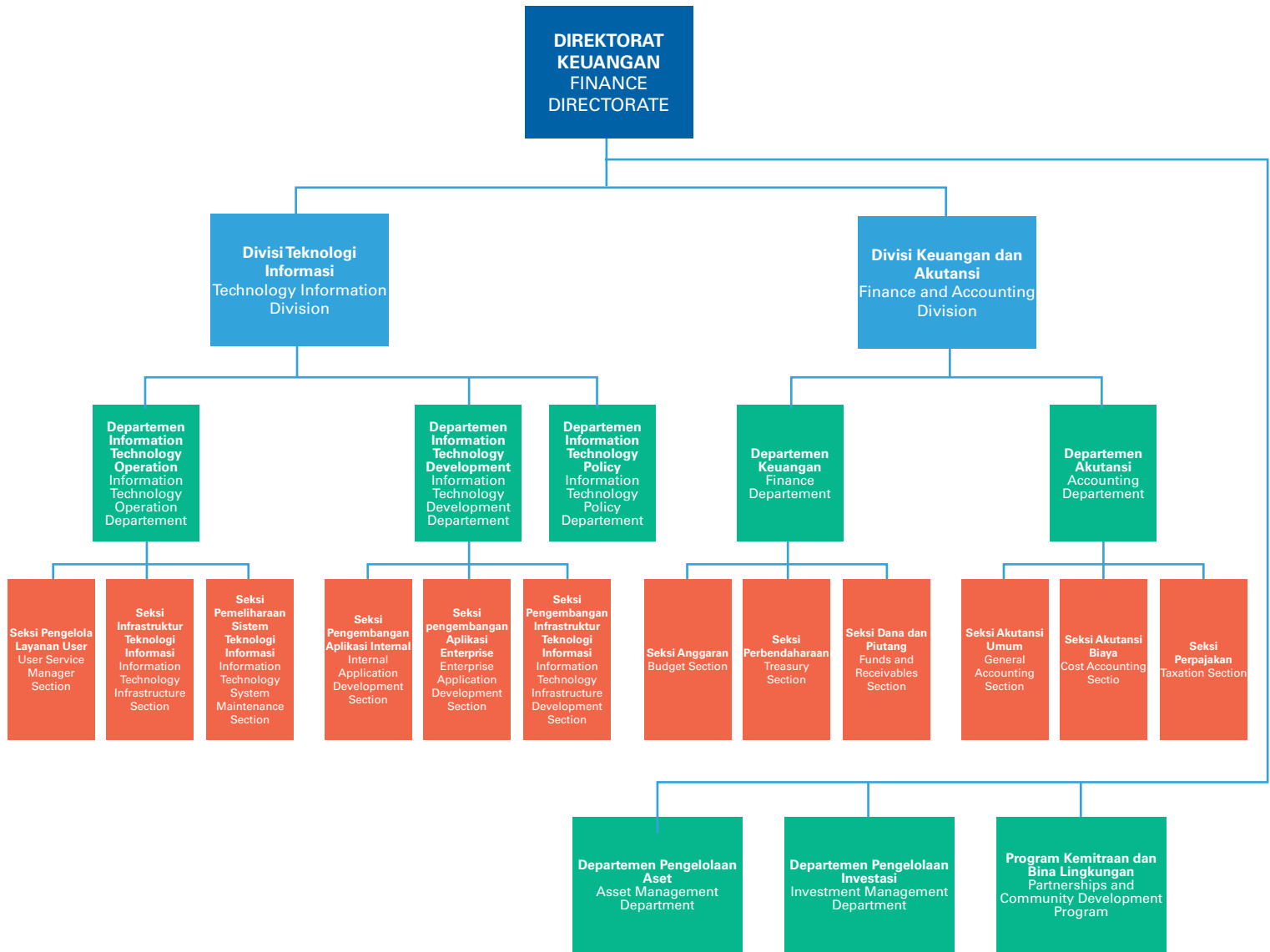
IT-related regulations that must be obeyed as a SOE:

1. SOE Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/2013, concerning Guidelines for the Compilation of Information Technology Management for State-Owned Enterprises;
2. Minister of Communication and Information Regulation No. 4 of 2016, concerning Information Security Management Systems;
3. SOE Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/02/2018 concerning Principles of SOE Information Technology Governance;
4. SOE Ministerial Regulation No. PER-03/MBU/02/2018 concerning Amendments to the Regulation of the SOE Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/2013 concerning Guidelines for the Compilation of SOE Information Technology Management.

IT related Industry Standards demanded by the Peruri market:

1. ISO 27001 - Information Security Management Systems

Struktur Organisasi Divisi TI
IT Division Structure Organization



PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIVISI IT

IT DIVISION COMPETENCY DEVELOPMENT

No	Nama Kegiatan Activity	Jumlah Peserta Total Participants	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1	Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Employee Self Service (ESS) Training of Management Information Training Employee Self Service (ESS)	8	29 Januari 2019 January 29, 2019
2	Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Employee Self Service (ESS) - Karawang A Training of Management Information Training Employee Self Service (ESS) - Karawang A	1	30 Januari 2019 January 30, 2019
3	Pelatihan Sistem Manajemen Informasi Employee Self Service (ESS) - Karawang B Training of Management Information Training Employee Self Service (ESS) - Karawang B	1	31 Januari 2019 January 31, 2019
4	Seminar "How to Maximize Corporate Image With Photography"	1	15 Februari 2019 February 15, 2019
5	Pelatihan Pekerjaan Jasa Pembuatan Aplikasi ESS Training of ESS Application Development Service	4	01 Maret 2019 March 01, 2019
6	Training Business Inteligent SAP Dashboard 2013	5	25 Juni 2019 June 25, 2019
7	Inhouse Training Investasi IDEA Single One Computer Level-1 Inhouse Investment Training IDEA Single One Computer Level-1	1	10 Juli 2019 July 10, 2019
8	Workshop ITIL Foundation 40	2	12 Februari 2019 February 12, 2019
9	Drill (Latihan) Sertifikasi Certified Information System Auditor (CISA) - Revisi Drill (Exercise) Certification – Certified Information System Auditor (CISA) - Revision	1	16 Mei 2019 May 16, 2019
10	Training Certified Lead Auditor ISO-27001/IRCA	1	06 Mei 2019 May 06, 2019

IT STEERING COMMITE

Sesuai dengan *IT governance* maka anggota *IT steering commite* antara lain: direksi, sekretaris perusahaan, *corporate internal control*, *corporate strategic* serta kepala divisi dan kepala departemen.

Tanggung jawab *IT steering commite* adalah sebagai berikut:

1. Memastikan inisiatif strategis dan investasi TI sejalan dengan misi dan strategi Peruri;
2. Memastikan investasi TI dan sumber daya TI digunakan secara efektif dan efisien;
3. Memastikan insiatif strategis dan investasi TI memberikan manfaat sesuai dengan yang dijanjikan baik secara individual proyek maupun secara program keseluruhan;
4. Memastikan risiko terkait inisiatif strategis dan investasi TI terukur dan tepat;
5. Sebagai pengarah keamanan TI.

IT STEERING COMMITE

In accordance with *IT governance*, the members of the *IT steering committee* include: directors, corporate secretaries, *corporate internal control*, *corporate strategic* as well as head of divisions and head of departments.

The responsibilities of the *IT steering committee* are as follows:

1. Ensure strategic initiatives and IT investments are in line with Peruri's mission and strategy;
2. Ensure IT investment and IT resources are used effectively and efficiently;
3. Ensure strategic initiatives and IT investments deliver the promised benefits, both on an individual project basis and as a whole program;
4. Ensure that risks related to strategic initiatives and IT investments are measured and appropriate;
5. As IT security director.

ROADMAP DAN PROYEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN

Perusahaan telah merancang strategi di bidang teknologi informasi jangka panjang, *roadmap* atau peta jalan di bidang teknologi informasi ini dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dari kondisi bisnis serta perkembangan teknologi yang ada. Penyusunan masterplan TI merupakan bagian dari pengejawantahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-02/MBU/2013, tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara. Sesuai dengan RJPP Peruri periode 2017-2021, perusahaan berkeinginan untuk menata ulang proses internal untuk meningkatkan operasi, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan optimalisasi proses bisnis Perencanaan kegiatan TI Peruri 2017-2021, difokuskan pada hal berikut:

1. Meningkatkan konsistensi proses TI dengan prosedur-prosedur dan kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan perusahaan;
2. Selain infrastruktur dan aplikasi, TI Peruri akan berkembang untuk memberikan layanan berupa pengelolaan analisis data dan informasi;
3. Untuk mendukung persaingan pasar, TI menyiapkan layanan yang memberikan percepatan pengelolaan data dan informasi dari unit produksi ke pengelolaan informasi;
4. Sejalan dengan arah strategi perusahaan, TI akan mendukung layanan produk digital Peruri;
5. Dengan merambah ke bisnis baru (Produk *New Wave*), TI akan melakukan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi digital.

ROADMAP AND PROJECTION OF FUTURE INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

The company has designed a strategy in the field of long-term information technology, a roadmap in the field of information technology is designed and adapted to the needs of business conditions and existing technological developments. The preparation of the IT master plan is part of the embodiment of the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises No. Per-02/MBU/2013, concerning Guidelines for the Compilation of Information Technology Management for State-Owned Enterprises. In accordance with RJPP Peruri for the 2017-2021 period, the company is rushing to restructure internal processes to improve operations, optimize the use of information technology and optimize business processes Planning for 2017-2021 Peruri IT activities, focused on the following:

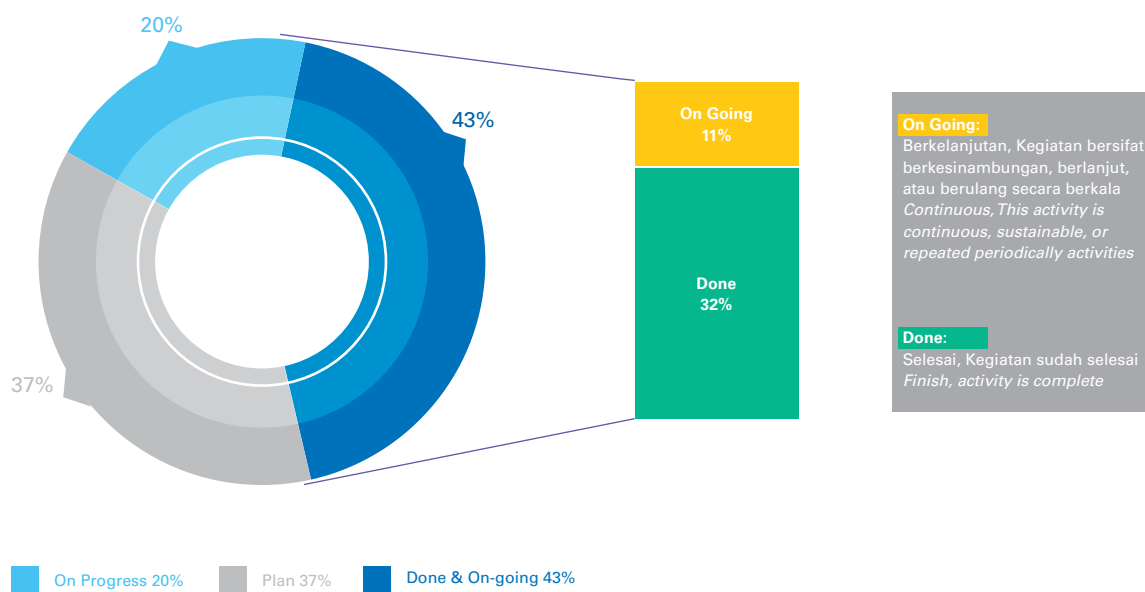
1. Improve consistency of IT processes with procedures and policies that are better and in line with company demands;
2. In addition to infrastructure and applications, Peruri IT will develop to provide services in the form of data analysis and information management;
3. To support market competition, IT prepares services that accelerate data and information management from production units to information management;
4. In line with the company's strategic direction, IT will support Peruri's digital product services;
5. By entering into a new business (New Wave Product), IT will carry out the construction of supporting infrastructure of digital transformation.

Status Pengembangan 2017 – 2021

Development Status 2017 – 2021

PERSENTASE STATUS PENGEMBANGAN PER DESEMBER 2019

PERCENTAGE OF DEVELOPMENT STATUS AS OF DECEMBER 2019





06

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dibuktikan melalui assessment atau penilaian penerapan GCG yang dilakukan secara berkala setiap tahunnya, hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan perkembangan infrastruktur serta softstructure GCG di lingkup Perusahaan.

The Company's commitment to implementing GCG principles is proven through the assessment of GCG implementation which is carried out periodically every year, this is in line with business growth and developments in the GCG infrastructure and softstructure within the Company.



CONNECTION
ANALYSIS
DATA
EXPLORING
PERFORMANCE
CORRELATION
TRENDS

26%

3%

24%

55%



PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE



Peruri memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dengan tujuan untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan. Peruri sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus melakukan penyempurnaan sistem tata kelola Perusahaan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi dalam hal kinerja dan kemampuan berorganisasi serta untuk memastikan pemenuhan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan GCG merupakan salah satu faktor penting bagi Perusahaan untuk memberikan pelayanan yang berintegritas dan profesional dalam setiap kegiatan. Hal tersebut diharapkan menjadi Budaya Perusahaan yang senantiasa dijaga oleh seluruh insan Peruri, sehingga Perusahaan mampu berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi serta menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders*.

Peruri is highly committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) with the aim of maintaining sustainable business growth. Peruri as one of the State-Owned Enterprises (SOE) continues to make improvements to the corporate governance system to achieve higher levels in terms of performance and organizational skills and in order to ensure fulfillment of the aspirations of all stakeholders.

The implementation of GCG is an important factor for the Company in carrying out its activities. This is manifested by services with integrity and professionalism in every activity and as a Corporate Culture that is always maintained by all Peruri personnel, so that the Company is able to develop and have high competitiveness, as well as create added value for stakeholders.

DASAR DAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) adalah kewajiban dalam pengelolaan perusahaan agar terwujud iklim usaha yang sehat dan bersih serta tumbuh secara berkelanjutan. Komitmen Peruri dalam mewujudkan GCG dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi No. SK-01/DP/I/2019 dan KEP-1/I /2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Etika Perilaku (*Code of Conduct*).

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan citra dan kinerja perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi para *stakeholders*. Adapun tujuan penerapan GCG adalah:

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara Nasional maupun Internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
3. Mendorong organ perusahaan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.

Penerapan GCG tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam pencapaian maksud dan tujuan dari Peruri sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

BASIS AND COMMITMENT TO IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Purpose of Corporate Governance Implementation

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is an obligation in the management of the company in order to create a healthy and clean business climate and grow sustainably. The commitment of Perum Peruri (Peruri) in realizing GCG is stated in the Joint Decree of the Board of Supervisors and Directors No. SK-01/DP/I/2019 and KEP-1/I/2019 dated January 29, 2019 concerning Code of Corporate Governance and Code of Conduct.

Based on GCG, the application of the principles of Corporate Governance is expected to improve the image and performance of the company as well as increase the company's value for stakeholders. The objectives of implementing GCG are:

1. Optimizing corporate value so that the company has strong competitiveness, both nationally and internationally, so that it is able to maintain its existence and live sustainably to achieve its goals and objectives;
2. Encouraging the professional, efficient and effective management of SOE, as well as empowering functions and increasing the independence of company organs;
3. Encourage the company's organs to make decisions and carry out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of the existence of corporate social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the Company;
4. Increase the company's contribution to the national economy.

The implementation of GCG then becomes the basis for achieving the goals and objectives of Peruri as mandated by Government Regulation (PP) No. 6 of 2019 concerning Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Pada 2019, pemerintah telah mengesahkan PP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat kewajiban untuk menerapkan GCG, yaitu pasal 10 ayat 1 sebagai berikut:

“Pemerintah memiliki maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan pencetakan Mata Uang Rupiah, pembuatan dokumen negara yang memiliki fitur serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan, berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.”

"The government has the aims and objectives to participate in implementing and supporting Government policies and programs in the economic sector and national management by organizing businesses aimed at public benefit in the form of providing goods and/or services related to printing Rupiah currency, making state documents that have features, as well as optimizing the utilization of the Company's resources, based on the principles of good corporate management."

Dalam pelaksanaannya, Peruri kerap melakukan peninjauan kembali atas kebijakan GCG. Pada 2019 Perusahaan telah memperbarui pedoman dengan menerbitkan pedoman yang baru pada Surat Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi No. SK-01/DP//2019 dan KEP-1//2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Etika Perilaku (*Code of Conduct*). Ke depan, akan dilakukan peninjauan secara berkala sesuai perkembangan dan kondisi perusahaan.

Ruang Lingkup Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman GCG, ruang lingkup kebijakan tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada:

1. Dewan Pengawas Perusahaan;
2. Direksi Perusahaan;
3. Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan;
4. Jajaran manajemen dan karyawan di lingkungan Peruri;
5. Karyawan atau orang yang ditunjuk Direksi yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Perusahaan.

Corporate Governance Implementation Policy

In 2019, the government has ratified Government Regulation Number 6 of 2019 concerning Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, which includes an obligation to implement GCG, namely article 10 paragraph 1 as follows:

In its implementation, Peruri also reviewed the GCG policy, which in 2019 updated the old guidelines by issuing new guidelines in the Joint Decree of the Board of Supervisors and Directors No. SK-01/DP//2019 and KEP-1//2019 dated January 29, 2019 concerning Code of Corporate Governance and Code of Conduct, which will also be reviewed periodically to be refined/updated according to the development and condition of the company and/or government regulations.

Scope of Corporate Governance Policy

In accordance with the provisions of the GCG Guidelines, the scope of the policy is to provide information to:

1. Company Supervisory Board;
2. Directors of the Company;
3. Board of Commissioners and Directors of Subsidiaries;
4. Management and employees in the Peruri environment;
5. Employees or people appointed by the Board of Directors who are assigned to carry out development activities, supervision and management of the Company.

Setiap Insan Peruri wajib mematuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Etika Perilaku dalam setiap perilaku dan kegiatan bisnis. Hubungan Peruri dengan *stakeholders* juga diatur dalam Pedoman GCG agar tercipta iklim bisnis yang transparan, sehat dan bersih dari praktik-praktik KKN.

Every Peruri Person is obliged to comply with the Corporate Governance Guidelines and Code of Conduct in every conduct and business activity. Peruri's relationship with stakeholders is also regulated in the GCG Guidelines in order to create a business climate that is transparent, healthy and clean from corruption, collusion and nepotism practices.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERURI

DEVELOPMENT OF IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN THE SCOPE OF PERURI

Jejak Langkah Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Milestone of Development in the Implementation of Good Corporate Governance

Tahapan Implementasi GCG di Peruri GCG Implementation Stages in Peruri

2015	Melakukan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, memutakhirkan seluruh kebijakan dan pedoman perusahaan dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Tahap komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik.	Evaluating the implementation of good corporate governance, updating all company policies and guidelines in the context of implementing good corporate governance. Commitment stage towards implementing good corporate governance.
	Berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.	
2016	Membangun tata kelola perusahaan menjadi sebuah sistem. Melakukan asesmen atas penerapan GCG, yang hasilnya menjadi area of improvement dalam meningkatkan kualitas sistem tata kelola perusahaan yang baik.	2016 Building corporate governance into a system. Assessing the implementation of GCG, the results of which are areas of improvement in improving the quality of a good corporate governance system.
	Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan tentang GCG serta mengukur pemahamannya, sehingga GCG dapat menjadi budaya yang melekat. Menjadikan prinsip GCG sebagai sistem dan budaya Perusahaan.	
2017	Terdapat peningkatan awareness dan pemahaman atas tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa kegiatan perusahaan telah mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik.	There is an increase in awareness and understanding of good corporate governance. Several company activities have referred to good corporate governance.
2018	Menerapkan tata kelola perusahaan yang terintegrasi dengan sistem tata kelola anak perusahaan, sehingga dapat berjalan selaras dan menghasilkan kualitas pengelolaan Perusahaan yang semakin baik.	Implementing corporate governance that is integrated with the governance system of the subsidiaries, so that it can run in harmony and produce better quality management of the Company.
	Menerapkan Sistem <i>Governance, Risk and Compliance</i> (GRC) untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.	Peruri implements a Governance, Risk, and Compliance (GRC) System to optimize effective and efficient supervision and control functions, to encourage healthy and sustainable business growth.
2019	Sesuai dengan roadmap dan sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), pada 2019, adalah awal penerapan GCG sebagai sebuah budaya. Hal ini akan mempermudah dalam melakukan integrasi tata kelola perusahaan dengan anak perusahaan.	2019 In accordance with the roadmap and in line with the Company's Long-term Plan (RJPP), 2019 is the beginning of implementing GCG as a culture. This will make it easier to integrate corporate governance with subsidiaries.
	GCG terintegrasi dengan anak perusahaan berjalan dan terbangun sebagai sistem GCG antara induk dengan anak perusahaan.	Integrated GCG with subsidiaries runs and is built as a GCG system between parent and subsidiary.
	GCG berjalan dengan didukung seluruh sistem-sistem yang berlaku, baik manajemen risiko maupun compliance. Inisiasi GRC terintegrasi (dengan anak perusahaan) dilakukan agar antara Peruri dan perusahaan anak berjalan selaras.	GCG runs with the support of all applicable systems, both risk management and compliance. The integrated GRC initiation (with subsidiaries) is carried out so that Peruri and its subsidiaries run in harmony.

Peta Jalan dan Rencana Pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Roadmap and Development Plan for Good Corporate Governance



Sesuai dengan *milestone* yang sudah dicanangkan, pada 2019 Peruri mulai menginisiasi penerapan GCG untuk mewujudkan *Good Corporate Citizen* dengan menjadikan GCG sebagai budaya yang melekat pada perilaku Insan Peruri. Selain itu senantiasa berpedoman pada etika perilaku dan etika berbisnis perusahaan untuk mewujudkan perusahaan yang sehat dan bersih dari praktik-praktik KKN. Upaya dalam mewujudkan *Good Corporate Citizen* antara lain adalah:

1. Melakukan penyempurnaan/pemutakhiran pedoman pengendalian gratifikasi dan LHKPN dalam *Risk Management and Compliance Manual (RMCM)* khususnya Bab X *Anti fraud Program* yang telah disahkan oleh Direksi pada tanggal 9 Desember 2019. Perubahan dalam manual tersebut juga telah disesuaikan dengan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi. Sedangkan penyempurnaan/pemutakhiran pedoman LHKPN adalah adanya klausul sanksi bagi Wajib Laporan yang tidak menyampaikan LHKPN dan/atau terlambat menyampaikan LHKPN;
2. Sosialisasi Etika Perilaku dan Etika Berbisnis Perusahaan;
3. Pemantauan secara konsisten penerapan Pedoman Etika Perilaku Perusahaan.

Penghargaan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Tahun 2019

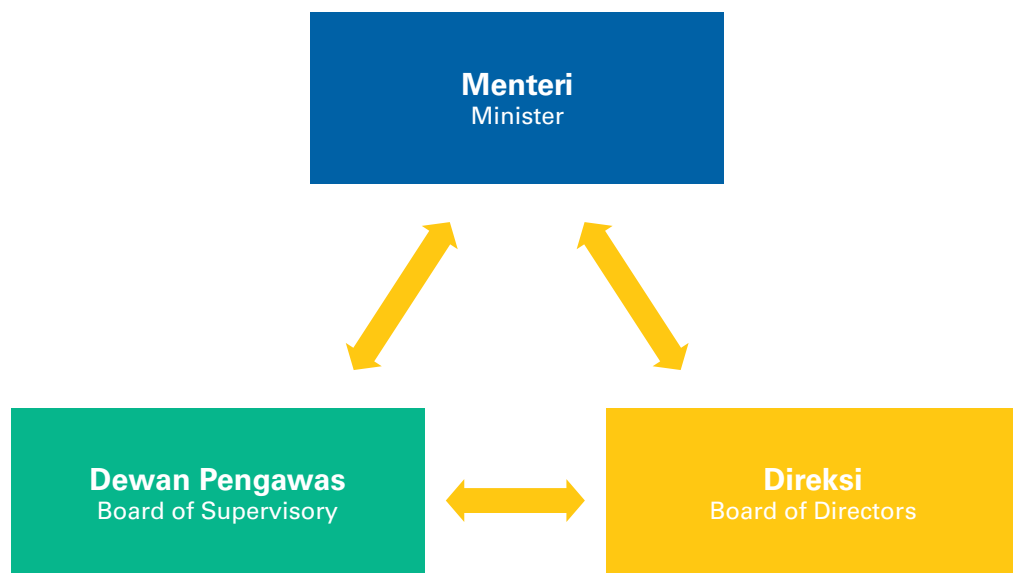
Peruri berhasil mendapatkan penghargaan TOP GRC (*Governance, Risk and Compliance*) Award 2019 pada 22 Agustus 2019 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business. Peruri dinilai selalu berkomitmen mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan profesional.

In accordance with the milestones that have been declared, in 2019 Peruri also started to initiate the implementation of GCG towards Good Corporate Citizen with GCG becoming a culture that is inherent in the behavior of Peruri Individuals so that it is always guided by ethical conduct and business ethics to create a company that is healthy and clean from KKN practices. Efforts in realizing Good Corporate Citizen include:

1. Refined/updated the gratuity control guidelines and LHKPN in the Risk Management and Compliance Manual (RMCM), especially Chapter X Anti-fraud Program which was approved by the Board of Directors on December 9, 2019. Changes in the manual have also been adjusted to the provisions of the Corruption Eradication Commission (KPK) regarding Guidelines and Limits of Gratuity. Meanwhile, the refinement/updating of the LHKPN guidelines is the existence of a sanction clause for Reporting Obligators who do not submit LHKPN and/or are late in submitting LHKPN;
2. Dissemination of Ethical Conduct and Business Ethics of the Company;
3. Consistent monitoring of the implementation of the Company's Code of Conduct.

Award for the Implementation of Good Corporate Governance in 2019

Peruri was awarded the TOP GRC (*Governance, Risk, and Compliance*) Award 2019 on August 22, 2019, organized by Top Business Magazine. Peruri is considered always committed to realizing good and professional corporate governance.

**STRUKTUR DAN KEBIJAKAN TATA
KELOLA PERUSAHAAN****CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE
AND POLICY****Struktur Tata Kelola Perusahaan****Corporate Governance Structure**

Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, organ Perusahaan Umum diuraikan sebagai berikut:

1. Menteri adalah Menteri yang ditunjuk dan/ atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan;
2. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.

According to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, the organs of a Public Company are described as follows:

1. Minister is the Minister who is appointed and/or authorized to represent the Government as the owner of capital in the Company by observing the laws and regulations;
2. The Board of Directors is a company organ that is responsible for the management of the company for the interests and objectives of the company and represents the company both inside and outside the court;
3. The Supervisory Board is a company organ whose job is to supervise and provide advice to the Board of Directors in carrying out corporate management activities.

Landasan dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup Peruri

Dalam PP 6 Tahun 2019, Pasal 10, telah mewajibkan bahwa: "Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan pencetakan Mata Uang Rupiah, pembuatan dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan, berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik."

Amanat dari peraturan tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan perusahaan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Peruri SK-01/DP/I/2019 dan KEP-1/I/2019 tanggal 29 Januari 2019, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Etika Perilaku (*Code of Conduct*). Peruri selalu melakukan *review* secara berkala atas efektivitas pedoman tersebut. Pada 2019, hasil *review* menyatakan bahwa pedoman masih dianggap relevan dengan situasi bisnis Peruri saat ini.

Surat Keputusan Bersama tersebut juga telah diinformasikan kepada seluruh insan Peruri melalui kegiatan sosialisasi dan untuk meningkatkan komitmen dari masing-masing insan Peruri, implementasi tata kelola perusahaan yang baik termaktub dalam Corporate Policy Manual BAB I, bahwa prinsip-prinsip GCG menjadi dasar dalam penetapan seluruh kebijakan Perusahaan.

Berdasarkan surat keputusan bersama tentang pedoman tata kelola perusahaan, adapun ruang lingkup pedoman GCG, untuk memberikan informasi kepada:

1. Direksi;
2. Dewan pengawas;
3. Dewan komisaris dan direksi perusahaan anak;
4. Jajaran manajemen dan karyawan di lingkungan Peruri;
5. Pegawai atau orang yang ditunjuk direksi perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan pada ruang lingkup tersebut, seluruh Insan Peruri telah berkomitmen untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan bisnis dan dapat hidup berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.

Foundations and Corporate Governance Policies in Peruri Scope

In Government Regulation 6 of 2019, Article 10, it is mandatory that: "Companies have the aims and objectives to participate in implementing and supporting Government policies and programs in the economic sector and national development by organizing businesses aimed at the public benefit in the form of providing goods and/or services related to the printing of Rupiah currency, the creation of state documents that have security features and the optimization of the utilization of Company resources, based on the principles of good corporate governance."

The mandate of this regulation is then outlined in company policy through the Joint Decree of the Board of Directors and the Peruri Supervisory Board SK-01/DP/I/2019 and KEP-1/I/2019 dated January 29, 2019, regarding the Code of Corporate Governance and Code of Conduct. Peruri always conducts periodic reviews of the effectiveness of these guidelines. In 2019, the results of the review stated that the guidelines were still considered relevant to Peruri's current business situation.

The joint decree has also been informed to all Peruri employees through socialization activities and to increase the commitment of each Peruri employee, the implementation of good corporate governance is contained in the Corporate Policy Manual CHAPTER I, that the principles of GCG are the basis for determining all Company's policy.

Based on a joint decree regarding the corporate governance guidelines, as for the scope of the GCG guidelines, to provide information to:

1. Board of Directors;
2. The supervisory board;
3. Board of commissioners and Board of directors of subsidiaries;
4. Management and employees of Peruri;
5. Employees or people appointed by the board of directors of the company to carry out development, supervision and management activities of the company.

Based on this scope, all Peruri Individuals are committed to realizing the principles of good corporate governance in business activities and can live sustainably based on the principles of corporate governance.

Sosialisasi GCG Terintegrasi

Pada 2019, Peruri melaksanakan sosialisasi GCG dan Program Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

Kegiatan Activities	Tanggal Date	Unit Kerja Work Unit	Peserta Participants
Penerapan GCG di Peruri Implementation of GCG in Peruri	28 Maret 2019 March 28, 2019	Direktorat Pengembangan Usaha Divisi Keuangan dan Akuntansi Directorate of Business Development Finance and Accounting Division	31 orang/people
Penerapan GCG di Peruri Implementation of GCG in Peruri	10 April 2019 April 10, 2019	Staf jajaran Corporate Secretary and Strategic Planning; Staf jajaran SBU Digital Staf jajaran Departemen Pengelolaan Aset Staff at the ranks of Corporate Secretary and Strategic Planning; SBU Digital staff Asset Management Department staff	20 orang/people
Penerapan GCG di Peruri Implementation of GCG in Peruri	30 April 2019 April 30, 2019	Direktorat Operasi; Direktorat SDM dan Umum Directorate of Operation; Directorate of Human Resources and General Affairs	40 orang/people
Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi Technical Guidance for the Gratification Control Program	23 – 24 Juli 2019 July 23 - 24, 2019	Perwakilan dari setiap unit kerja Representatives from each work unit	27 orang/people
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Socialization of Gratuity Control	30 Juli 2019 July 30, 2019	Pimpinan Senior Senior Leaders	83 orang/people
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Socialization of Gratuity Control	11 November 2019 November 11, 2019	Perwakilan seluruh setiap unit kerja Representatives of all work units	22 orang/people

ASSESSMENT DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tujuan Assessment, Dasar Penilaian dan Metode

Perusahaan memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar pengelolaan Perusahaan terbaik dengan selalu berusaha menerapkan praktik tata kelola yang baik melalui berbagai usaha perbaikan dan peningkatan serta merujuk pada standar minimal maupun rekomendasi yang harus dipenuhi.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri (Permen) BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Perusahaan sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG yang dilakukan melalui penilaian (*assessment*). Perusahaan

Integrated GCG Socialization

In 2019, Peruri carried out the socialization of GCG and the Gratification Control Program as follows:

ASSESSMENT AND IMPROVEMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Assessment Objectives, Assessment Basis and Methods

The company has a commitment to always apply the best governance standards by always trying to implement good governance practices through various improvements and enhancements, and refers to the minimum standards and recommendations that must be met.

In accordance with Presidential Regulation (Perpres) No. 192 of 2014 concerning the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), Government Regulation (PP) No. 60 of 2008 concerning Government Internal Control Systems, and Ministerial Regulation (Permen) of SOE No. PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOE. Companies as state-owned companies have the obligation to measure the implementation of GCG through assessments. The company evaluates the implementation of GCG

melakukan penilaian penerapan GCG secara konsisten setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan. Penilaian yang dilakukan menggunakan berbagai acuan standar praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku.

Secara umum, tujuan dilaksanakannya *assessment* tersebut adalah untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan GCG di Perusahaan melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Perusahaan, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG;
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG Perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria GCG dan penerapannya pada Perusahaan;
3. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di Perusahaan sejalan dengan *best practices*;
4. Memantau konsistensi penerapan GCG pada Perusahaan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012, Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan/*assessment* GCG dilakukan secara berkala oleh Perusahaan oleh *assessor* eksternal dan tidak menutup kemungkinan diselingi oleh *self assessment* yang dilakukan oleh *assessor* internal Perusahaan.
2. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada *point* pertama, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Pengukuran penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur

consistently every year to determine the adequacy level of GCG implementation within the Company. The assessment is carried out using various references to applicable best practices standards.

In general, the objectives of carrying out the assessment are to:

1. Testing and assessing the implementation of GCG in the Company through the elaboration of the conditions for implementing GCG and with the actual conditions applied to the Company, by providing a score/value for the implementation of GCG and the category of the quality of GCG implementation;
2. Identify the strengths and weaknesses of the Company's GCG implementation, and propose recommendations for improvements to reduce the gap between the GCG criteria and its application to the Company;
3. Provide recommendations for improvements to gaps found in the implementation of GCG in the Company in line with best practices;
4. Monitor the consistency of GCG implementation in the Company and obtain input for the improvement and development of GCG policies in the Company.

Based on the Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/2012, the Company measures GCG as follows:

1. Implementation of GCG Implementation/GCG assessment is carried out periodically by the Company by an external assessor, and does not rule out self-assessments conducted by the Company's internal assessors.
2. Evaluation (*review*), which is a program to describe the follow-up of the implementation and application of GCG in the Company which is carried out the following year after the assessment as referred to in the first point, which includes evaluation of the results of the assessment and follow-up on recommendations for improvement.

Measurement of GCG implementation within the Company refers to the Copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE. The method of assessment and evaluation is carried out using a measuring instrument consisting

yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012.

of 6 (six) aspects with a predetermined weight as stipulated in the Copy of Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012.

6 Aspek Assessment GCG (Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)

6 Aspects of GCG Assessment
(Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012)



Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019

Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2019 dilaksanakan dengan kriteria penilaian kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan berpedoman pada SK-16/MBU/2012 tentang Indikator/parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, yang mencakup 6 (enam) aspek yaitu :

1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan;
2. Aspek Pemilik Modal;
3. Aspek Dewan Pengawas;
4. Aspek Direksi;
5. Aspek Pengungkapan Transparansi;
6. Aspek Lainnya.

Adapun dalam pelaksanaan *Assessment* GCG Tahun Buku 2019 yang dilakukan oleh BPKP dibuka dengan *Kick Off Meeting* pada 3 Januari 2020. Pada agenda tersebut disepakati bahwa *Assessment* GCG dilaksanakan pada 3 Januari 2020 hingga 2 Maret 2020, yang kemudian dituangkan dalam Surat Tugas BPKP No.ST-1/D403/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Surat Tugas untuk melakukan *Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* Tahun 2019 pada Perum

Assessment of GCG Implementation for the 2019 Financial Year

Assessment of GCG Implementation for the 2019 financial year was carried out with the criteria for assessing the quality of the implementation of Good Corporate Governance and based on SK-16/MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in Business Entities. State-owned, which includes 6 (six) aspects, namely:

1. Aspect of Commitment to Sustainable Governance Implementation;
2. Capital Owner Aspect;
3. Supervisory Board Aspect;
4. Directors Aspect;
5. Transparency Disclosure Aspects;
6. Other Aspects.

As for the implementation of the GCG Assessment for the 2019 Fiscal Year carried out by BPKP, it was opened with a *Kick Off Meeting* on January 3, 2020. On the agenda it was agreed that the GCG Assessment will be held on January 3, 2020 to March 2, 2020, which was then outlined in the BPKP Task Letter No. 1/D403/1/2020 dated 2 January 2020 regarding a Letter of Assignment to conduct an Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance in 2019 at Perum Peruri.

Peruri. Adapun perolehan hasil penilaian GCG adalah sebagai berikut:

The results of the GCG assessment are as follows:

Aspek Aspect	2015		2016		2017		2018		2019	
	Assessment oleh IICG Assessment by IICG		Self Assessment oleh SPI Self Assessment by SPI		Assessment oleh IICG Assessment by IICG		Self Assessment oleh Tim Internal Self Assessment by Internal Team		Assessment oleh BPKP Assessment by BPKP	
	Skor Score	Tingkat Pemenuhan Compliance Rate (%)	Skor Score	Tingkat Pemenuhan Compliance Rate (%)	Skor Score	Tingkat Pemenuhan Compliance Rate (%)	Skor Score	Tingkat Pemenuhan Compliance Rate (%)	Skor Score	Tingkat Pemenuhan Compliance Rate (%)
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan Commitment to the Implementation of Governance in a sustainable manner	6,29	89,86	6.382	91,2	6,569	93,84	6,66	95,14	5,993	86
Pemilik Modal Capital owners	7.973	88,58	8.049	89,4	8,609	95,66	7,347	81,63	7,753	86
Dewan Pengawas Supervisory Board	31.082	88,80	31.993	91,4	32,11	91,75	32,52	92,93	31,317	89
Direksi Board of Directors	31.701	90,58	33.107	94,6	32,15	91,85	32,57	93,06	31,164	89
Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	8.080	89,77	8.219	91,3	8,29	92,16	8,73	97	6,566	73
SUBTOTAL	85.126	89,61	87.75	91,58	87,735	87,73	87,83	87,83	82,793	82,79
Lainnya Others	1.250	25	1.250	25	1,875	26	1,95	39	-	-
TOTAL NILAI KUALITAS PENERAPAN GCG TOTAL VALUE OF QUALITY OF GCG IMPLEMENTATION	86.375	86,37	89	89%	89,61	89,61	89,78	89,78	82,793	82,79

dalam penilaian tersebut, BPKP selaku asesor juga telah memberikan *Area of Improvement* (AOI) sebagai berikut:

In the assessment, BPKP as the assessor has also provided the Area of Improvement (AOI) as follows:

No.	Rekomendasi Recommendation	Pemilik Modal Capital Owners	Dewan Pengawas Supervisory Board	Direksi Board Of Directors
Aspek Komitmen/Aspect of Commitment				
1	Memperbaiki kebijakan WBS terkait kejelasan mekanisme penanganan dan kejelasan peran Sekretaris Perusahaan (Biro Legal & Regulatory Management) , SPI, Sekretaris Dewan Pengawas dan pihak terkait lainnya Improve WBS policies related to clarity of handling mechanisms and clarity of roles of the Corporate Secretary (Legal & Regulatory Management Bureau), SPI, Secretary of the Supervisory Board and other related parties		√	√
2	Meningkatkan kualitas sosialisasi kebijakan WBS kepada karyawan dan menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk memuat kebijakan WBS yang paling mutakhir dalam website perusahaan. Improve the quality of the socialization of WBS policies to employees and instruct the Corporate Secretary to find the most up-to-date WBS policies on the company website.			√
3	Menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk menyusun laporan Pelaksanaan WBS secara berkala (triwulanan) dan mendokumentasikan hasil evaluasi pelaksanaan WBS Instructs the Corporate Secretary to compile a WBS Implementation report periodically (quarterly) and document the results of the WBS implementation evaluation			√
Aspek Pemilik Modal/Capital Owner Aspect				
1	Menetapkan anggota Dewan Pengawas Independen sesuai ketentuan dan mengangkat anggota Dewan Pengawas secara tepat waktu To appoint members of the Independent Supervisory Board according to the provisions and appoint members of the Supervisory Board in a timely manner	√		
2	Menyebutkan alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dalam Surat Keputusan Pemberhentian State the reasons for the dismissal of a member of the Supervisory Board in the Dismissal Decree	√		
3	Memberikan persetujuan/pengesahan RJPP secara tepat waktu dan memberikan keputusan secara resmi apakah revisi RJPP disetujui/ tidak disetujui. Give approval/ratification of the RJPP in a timely manner and give an official decision whether the revised RJPP is approved/not approved.	√		
4	Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan Pemilik Modal secara tepat waktu Provide approval/decision on corporate action proposals that require the approval/decision of the Capital Owner in a timely manner	√		
5	Menetapkan kebijakan tentang pedoman sistem penilaian kinerja Dewan Pengawas dan Konevsa Direksi secara individual serta menuangkan hasil penilaian kinerja Direksi dan kinerja Dewan Pengawas dalam risalah RPB atau Surat Pengesahan/Persetujuan Laporan Tahunan Establish policies regarding the performance appraisal system guidelines for the Board of Supervisors and the Board of Directors' work meeting individually and state the results of the performance appraisal of the Board of Directors and the performance of the Supervisory Board in the minutes of the RPB or Letter of Ratification/Approval of the Annual Report	√		
6	Mendokumentasikan hasil pembahasan usulan pengajuan auditor eksternal dan proses pencalonan auditor eksternal yang akan mengaudit Laporan Keuangan perusahaan. Documenting the results of the discussion of the proposed external auditors and the process of nominating the external auditors who will audit the company's financial statements.	√		
7	Menindaklanjuti AOI yang dihasilkan dari assessment penerapn GCG dan membahasnya secara komprehensif Following up the AOI generated from the GCG implementation assessment and discussing it comprehensively	√		

No.	Rekomendasi Recommendation	Pemilik Modal Capital Owners	Dewan Pengawas Supervisory Board	Direksi Board Of Directors
Aspek Dewan Pengawas/Aspect of the Supervisory Board				
1	Memberikan nasihat dan mengingatkan Direksi untuk mengajukan surat permohonan persetujuan tertulis terhadap tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas sesuai anggaran dasar Perusahaan, serta memberikan persetujuan terhadap tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas secara tepat waktu Provide advice and remind the Board of Directors to submit a written request for approval of the Board of Directors' actions which require Board of Supervisory approval in accordance with the Company's articles of association, as well as to provide approval for the Board of Directors' actions that require the Board of Supervisors' approval in a timely manner		√	
2	Memberikan persetujuan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan secara tepat waktu Provide written approval of the appointment process for the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries/Joint Ventures in a timely manner		√	
3	Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dan melaporkannya kepada Pemilik Modal Assess the performance of the Board of Directors individually and report it to the Capital Owner		√	
4	Memutakhirkan kebijakan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengawas dengan memuat aturan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja masing - masing anggota Dewan Pengawas dan melaksanakan kebijakan tersebut. Update the policy for measuring and assessing the performance of the Supervisory Board to include the rules for evaluating the performance achievement of each member of the Supervisory Board and implementing the policy.		√	
5	Memutakhirkan pedoman/tata tertib rapat dengan menambahkan muatan mengenai tata penyusunan risalah rapat dan ketentuan pembahasan/ telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan Pemilik Modal terkait dengan usulan Direksi Updating the guidelines/rules of the meeting by adding content regarding the procedures for preparing minutes of meetings and provisions for discussion/ review of proposals from the Board of Directors and directions/decisions of Capital Owners related to proposals from Directors		√	
6	Memberikan nasihat kepada Direksi untuk segera menindaklanjuti keputusan hasil rapat sebelumnya secara tuntas. Provide advice to the Board of Directors to immediately follow up on the decisions of the previous meeting results completely.		√	
Aspek Direksi/Directors Aspect				
1	Menyampaikan usulan secara tertulis kepada Dewan Pengawas atas segala tindakan yang wajib mendapatka persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan terkait lainnya Submit a written recommendation to the Supervisory Board for all actions that require written approval from the Supervisory Board in accordance with the Company's Articles of Association and other related regulations.			√
2	Memastikan adanya keselarasan antara RKAP dengan RJPP dan menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu. Ensuring harmony between the RKAP and RJPP and submitting the draft RKAP to the Supervisory Board in a timely manner.			√
3	Membuat <i>Internal Control Report</i> yang memuat pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawas untuk menetapkan dan memelihara struktur pengendalian intern serta pernyataan atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan tersebut, serta menginstruksikan kepada Kepala SPI untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern level entitas perusahaan. Creating an Internal Control Report containing a statement that management is responsible for establishing and maintaining the internal control structure as well as a statement on the effectiveness of the internal control structure and financial reporting procedures, as well as instructing the Head of SPI to conduct an evaluation of internal control at the company entity level.			√

No.	Rekomendasi Recommendation	Pemilik Modal Capital Owners	Dewan Pengawas Supervisory Board	Direksi Board Of Directors
4	Meningkatkan kualitas kinerja perusahaan untuk memenuhi harapan Pemilik Modal Improve the quality of company performance to meet expectations of Capital Owners			√
5	Melakukan pemutakhiran pedoman/tata tertib Direksi yang memuat pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas Keputusan Dewan Pengawas terkait dengan usulan Direksi Updating the guidelines/rules of conduct of the Board of Directors containing discussion/review of directions/suggestions and/or follow-up on the implementation of the Board of Supervisors Decree related to the recommendation of the Directors			√
6	Melakukan pemantauan progress atas pelaksanaan hasil rapat sebelumnya dan pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai dilakukan pembahasan untuk tindak lanjutnya. Monitoring the progress of the implementation of the results of the previous meeting and the implementation of decisions on the results of previous meetings that have not yet been completed to be discussed for follow up			√
7	Menindaklanjuti arahan dan keputusan Dewan Pengawas secara tuntas. Follow up the directions and decisions of the Supervisory Board thoroughly.			√
Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi/Aspects of Information Disclosure and Transparency				
1	Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan sesuai kriteria ARA Improve the quality of the preparation of the Company's Annual Report according to the ARA criteria			√
2	Berpartisipasi dalam ajang Sustainability Award dan ajang penghargaan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi Participate in the Sustainability Award and awards in the field of publication and information disclosure			√

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018: Hasil, Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya Hingga Akhir Tahun Buku 2019

Assessment penerapan GCG untuk periode tahun buku 2018 dilakukan dengan *Self Assessment* oleh Tim Internal yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: SKEP-550/VIII/2018, tentang Tim Self Assessment Implementasi GCG Perum Peruri Tahun Buku 2018, dengan metode pengukuran mencakup 6 (enam) aspek pokok, 43 indikator dan 153 parameter pengujian (subindikator), sesuai Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012.

Hasil *Assessment* penerapan GCG di Perusahaan periode tahun buku 2018 mencapai total skor 89,78 dengan kualifikasi "Sangat Baik". Perolehan skor tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil *Assessment* untuk penerapan GCG tahun buku 2017 sebesar 89,61. Penjabaran pencapaian nilai tersebut adalah sebagai berikut.

Assessment of GCG Implementation for the 2018 Fiscal Year: Results, Recommendations and Follow-Up to the End of the 2019 Financial Year

The assessment of GCG implementation for the 2018 financial year period was carried out by means of a Self-Assessment by an Internal Team who was appointed through the Decree of the Board of Directors Number: SKEP-550/VIII/2018, concerning the Self-Assessment Team for the Implementation of GCG Perum Peruri for the 2018 Fiscal Year, with measurement methods including 6 (six) main aspects, 43 indicators and 153 testing parameters (sub-indicators), according to the Decree of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012.

The results of the assessment of GCG implementation in the Company for the 2018 financial year reached a total score of 89.78 with the qualification of "Very Good". The score has increased when compared to the results of the Assessment for the implementation of GCG for the 2017 financial year of 89.61. The description of the achievement of these values is as follows.

No.	Aspek Pengujian Aspect of Testing	Bobot Weight	Pencapaian Tahun Buku 2018 Achievements for the 2018 Fiscal Year		
			Skor Score	Capaian Achievements (%)	Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Classification
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,66	95,14	"Sangat Baik" "Very Good"
2	Pemegang Saham/Pemilik Modal Shareholders/Capital Owners	9,00	7,347	81,63	"Baik" "Good"
3	Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Supervisory Board/Supervisory Board	35,00	31,52	92,93	"Sangat Baik" "Very Good"
4	Direksi Board of Directors	35,00	32,57	93,06	"Sangat Baik" "Very Good"
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	8,73	97,00	"Sangat Baik" "Very Good"
6	Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	1,95	39,00	"Tidak Baik" "Not good"
Skor Keseluruhan Overall Score		100,00	89,78	89,78	"Sangat Baik" "Very good"

Keterangan/Information:

0-50 : Tidak Baik/Not Good | 50-60 : Kurang Baik/Not so good |
60-75 : Cukup Baik/Good Enough | 75-85 : Baik/Good | 85-100 : Sangat Baik/Very Good

Perkembangan Assessment Penerapan GCG

Komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dibuktikan melalui *assessment* atau penilaian penerapan GCG di lingkup Perusahaan yang dilakukan secara berkala setiap tahunnya, hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan perkembangan infrastruktur serta *softstructure* GCG di lingkup Perusahaan.

Perusahaan senantiasa melakukan *assessment* GCG untuk mengukur keberhasilan implementasi GCG dalam kinerja Perusahaan, di antaranya adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Direksi, penyelesaian pelaksanaan tugas Komite-komite dan unit kerja yang mempraktikkan fungsi Kepatuhan terhadap tata kelola, pengawasan internal, pelaksanaan manajemen risiko, pelaksanaan keterbukaan pada kondisi finansial maupun non-finansial Perusahaan dan lain-lain.

GCG Implementation Assessment Development

The Company's commitment to implementing GCG principles is proven through the assessment or assessment of GCG implementation within the Company which is carried out periodically every year, this is in line with business growth and developments in the GCG infrastructure and softstructure within the Company.

The Company always carries out a GCG assessment to measure the success of GCG implementation in the Company's performance, including the success rate of the implementation of the duties of the Supervisory Board and the Board of Directors, completion of the implementation of the duties of committees and work units that practice the functions of Compliance with governance, internal control, implementation of risk management, implementation of disclosure on the Company's financial and non-financial conditions, and others.

KEPATUHAN TERHADAP PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BUMN

Pelaksanaan seluruh aspek GCG di lingkup Perusahaan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 dan best practices yang berlaku di dunia usaha. Regulator, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia serta regulator industri telah memberikan penekanan pada transparansi, akuntabilitas dan penyampaian informasi yang wajar sebagai hal yang dapat menjadi fondasi bagi pelaku usaha.

Perusahaan tidak memiliki status sebagai emiten maupun perusahaan terbuka, dengan demikian Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan *roadmap* dan pedoman GCG yang diberlakukan di pasar modal dan pasar keuangan.

Namun demikian, sebagai BUMN, Perusahaan meletakkan penerapan seluruh aspek GCG dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011.

COMPLIANCE WITH SOE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

The implementation of all aspects of GCG within the scope of the Company is guided by the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as well as Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-01/MBU/2011 and best practices that apply in the business world. Regulators, in this case the Government of the Republic of Indonesia as well as industry regulators have emphasized transparency, accountability and the delivery of fair information as things that can become the foundation for business actors.

The company does not have the status of an issuer or a public company, thus the Company does not have the obligation to implement the GCG roadmap and guidelines that apply in the capital market and financial market.

However, as a SOE, the Company implements all aspects of GCG based on the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as well as Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-01/MBU/2011.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ORGAN STRUCTURE



RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA (RPB)

RPB sebagai organ Perusahaan merupakan wadah bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Kepemilikan saham Perusahaan 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara, kebijakan hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Tata Aturannya tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

COLLECTIVE DISCUSSION MEETING (RPB)

RPB as an organ of the Company is a forum for Shareholders to make important decisions related to the management of the Company under the provisions of the Articles of Association and laws and regulations.

Policy on Relations with Shareholders

100% ownership of the Company's shares is owned by the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises, the policy on the relationship between the Company and Shareholders is regulated in Article 14 of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and the Regulations contained in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Wewenang dan Ketentuan Rapat Pembahasan Bersama

Rapat Pembahasan Bersama (RPB) sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Nomor SK-04/DP/XII/2015 dan KEP-12/XII/2015, pada 17 Desember 2015, pada Bab II bagian A merupakan mekanisme yang digunakan oleh menteri sebagai organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.

Setiap tahun, RPB diselenggarakan minimal 2 (dua) kali, yaitu untuk membahas laporan keuangan tahunan dan yang lainnya untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Mekanisme Penyelenggaraan RPB

RPB diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan mengacu kepada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah, wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

Penyelenggaraan RPB di Sepanjang Tahun 2019 dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen

Di sepanjang 2019, Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali RPB, yaitu Rapat pembahasan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 pada Jumat, 8 Maret 2019. Seluruh keputusan dalam RPB dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RPB beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir 2019 adalah sebagai berikut:

Agenda Pembahasan RPB

Agenda pembahasan RPB untuk Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 adalah:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan selama Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas selama Tahun Buku 2018;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Pengawas atas tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018;

The Authority and Conditions of the Joint Discussion Meeting

The Joint Discussion Meeting (RPB) in accordance with the Corporate Governance Guidelines Number SK-04/DP/XII/2015 and KEP-12/XII/2015, on December 17, 2015, in Chapter II part A is the mechanism used by the minister as a corporate organ holds the highest power in the company and holds all powers that are not delegated to the board of directors or the supervisory board.

Every year, the RPB is held at least 2 (two) times, namely to discuss annual financial reports and the other to discuss the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

RPB Implementation Mechanism

RPB is carried out in accordance with the interests of the Company with reference to the Articles of Association and laws and regulations, as well as with adequate preparation, so that it can take legal, fair and transparent decisions by taking into account matters necessary to safeguard the company's long-term business interests.

Implementation of RPB throughout 2019 and the Follow-up by Management

Throughout 2019, the Company held 1 (one) RPB, namely a meeting to discuss the Annual Report and Financial Report for the 2018 Financial Year on Friday, March 8, 2019. All decisions in the RPB were made by deliberation to reach consensus. All decisions in the RPB are made by deliberation to reach consensus. The results of the RPB decision and its implementation and follow-up by the Company Management until the end of 2019 are as follows:

RPB Discussion Agenda

The RPB discussion agenda for the 2018 Annual Report and Financial Report are:

1. Approval of the Company's Annual Report regarding the condition and operation of the Company during the 2018 Financial Year, including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Supervisory Board during the 2018 Fiscal Year;
2. Ratification of the Company's Financial Statements as well as granting full payment and discharge of responsibility (*volledig acquit et decharge*) to the Board of Directors and the Supervisory Board for the management and supervision actions that have been carried out during the 2018 Financial Year;

3. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Dewan Pengawas dan Direksi Peruri atas tindakan pengawasan dan pengurusan program yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018;
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan Tahun Buku 2018;
5. Persetujuan penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas Tahun Buku 2018 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun Buku 2019;
6. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2019.

Keputusan RPB

Keputusan RPB 2019 yang membahas agenda RPB Tahun Buku 2018 hasilnya sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan selama tahun buku 2018 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas selama tahun buku 2018;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018, yang telah diaudit oleh KAP Wisnu B. Soewito & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00005/2.1229/AU.1/11/0360-1/1/II2019 dan Nomor: 00009/2.1229/AU.1/11/0360-1/1/II2019 tanggal 15 Februari 2018 yang memberikan opini laporan keuangan konsolidasian disajikan secara "wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Peruri dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Pengawas atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perusahaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

RPB Decision

The results of the 2019 RPB decision discussing the RPB agenda for the 2018 Fiscal Year are as follows:

1. Approve the Company's Annual Report regarding the condition and operation of the Company during the 2018 financial year and the Supervisory Board's Supervisory Task Implementation Report for the 2018 financial year;
2. Ratify the Company's Financial Statements and the 2018 Partnership and Community Development Program Financial Statements, which have been audited by KAP Wisnu B. Soewito & Partners as contained in the report Number: 00005/2.1229/AU.1/11/0360-1/1/II2019 and Number: 00009/2.1229/AU.1/11/0360-1/1/II2019 dated February 15, 2018 which provides an opinion on the consolidated financial statements presented "fairly in all material respects, the consolidated financial position of Perum Peruri and its Subsidiaries dated 31 December 2018, as well as the consolidated financial performance and cash flow for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "as well as providing full payment and discharge of responsibility (*volledig acquit et decharge*) to the Board of Directors and the Supervisory Board for management and supervision that has been carried out during the 2018 financial year, as long as the act does not constitute a criminal act or violates applicable legal provisions and procedures I am also recorded in the Company's Financial Statements and do not conflict with the provisions of laws and regulations;

3. Menetapkan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp285.040.648.178, digunakan untuk dividen sebesar Rp64.900.000.000 atau (23%);
4. Penetapan tentang tantiem atas kinerja tahun buku 2018, gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tahun 2019 bagi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan akan ditetapkan secara tersendiri;
5. Penetapan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019, dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan berdasarkan usulan Dewan Pengawas.
6. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian:
 - a. Direksi diminta untuk meningkatkan pendapatan non uang dan meningkatkan kontribusi anak usaha;
 - b. Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan, catatan dan saran/rekomendasi dari Auditor baik internal maupun eksternal dan ditindaklanjuti serta dibahas bersama Dewan Pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri BUMN;
 - c. Direksi agar melakukan penyampaian data, laporan dan dokumen kepada Kementerian BUMN secara elektronik, tepat waktu sesuai peraturan Menteri BUMN No. PER-18/MBU/10/2014 dan emmantau progress pemutahiran data pada 5 (lima) portal BUMN, yakni Portal Silaba, Portal Aset, Portal SDM, Portal PKBL dan Portal Publik;
 - d. Direksi agar mengupayakan penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari 2020;
 - e. Direksi diminta untuk meningkatkan penggunaan barang dan jasa komponen dalam negeri dan mengutamakan sinergi antar BUMN, anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha dan perekonomian.;
 - f. Direksi agar meningkatkan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal perusahaan.
 - g. Direksi agar memperhatikan tanggapan, pendapat dan saran Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Determined that the net profit for the year attributable to owners of the parent entity amounting to Rp.285,040,648,178, used for dividends of Rp.64,900,000,000 or (23%);
4. Determination of tantiem for the performance of the 2018 financial year, salary/honorarium, allowances, and facilities in 2019 for the Board of Directors and the Company's Supervisory Board will be determined separately;
5. Determination of the KAP that will audit the Corporate Financial Statements and Financial Statements for the Partnership and Community Development Program for the 2019 Financial Year, carried out separately by the Minister of SOE as the Government Representative as the Owner of Company Capital based on the recommendation of the Supervisory Board.
6. Matters that need attention:
 - a. Directors are asked to increase non-currency income and increase the contribution of subsidiaries;
 - b. The Board of Directors is required to follow up and resolve findings, notes, and suggestions/recommendations from auditors, both internal and external, and followed up and discussed with the Supervisory Board which is then submitted to the Minister of SOE;
 - c. Directors are required to submit data, reports, and documents to the Ministry of SOE electronically, on time according to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-18/MBU/10/2014 and monitor the progress of updating data on 5 (five) SOE portals, namely Silaba Portal, Asset Portal, HR Portal, CSR Portal, and Public Portal;
 - d. The Board of Directors shall endeavor to submit the audited 2019 Financial Statements of the Company by the end of February 2020;
 - e. Directors are asked to increase the use of domestic component goods and services and prioritize synergies between SOE, SOE subsidiaries, and/or SOE affiliated companies to improve business efficiency and the economy;
 - f. The Board of Directors to improve compliance with the submission of the Report on Assets of State Officials (LHKPN) under the provisions of laws and regulations and company internal regulations;
 - g. The Board of Directors must pay attention to the comments, opinions, and suggestions of the Supervisory Board which are an integral part of this decision.

Seluruh keputusan dalam RPB dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RPB beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

All decisions in the RPB are made by deliberation to reach consensus. The results of the RPB decision and its implementation and follow-up by the Company Management until the end of 2019 are as follows:

Realisasi Keputusan RPB Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018	Realization of RPB Decision of Annual Report and Financial Report on 2018 Fiscal Year
<p>Keputusan Pertama: Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan selama tahun buku 2018 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas selama tahun buku 2018.</p>	<p>First Decision: Approve the Company's Annual Report regarding the situation and the running of the Company during the 2018 financial year and the Report Implementation of Supervisory Duties of the Supervisory Board during the year book 2018.</p>
<p>Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi 100%. Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali RPB, yaitu Rapat pembahasan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 pada Jumat, 8 Maret 2019. Seluruh keputusan dalam RPB dilakukan dengan musyawarah mufakat</p>	<p>Follow-up on the decision result: It has been 100% realized. The company organizes 1 (one) RPB times, namely the Annual Report and Report discussion meeting Financial Year 2018 on Friday, March 8 2019. All decisions in the RPB are made by deliberation to reach consensus</p>
<p>Keputusan Kedua: Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018, yang telah diaudit oleh KAP Wisnu B. Soewito & Rekan</p>	<p>Second Decision: Ratify the Company's Financial Statements and Reports Partnership and Community Development Program Finance 2018, which has been audited by KAP Wisnu B. Soewito & Partners</p>
<p>Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi 100%. Sebagaimana tahun-tahun sebelum, Peruri selalu berupaya untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI maupun Kantor Akuntan Publik dalam kurun waktu tidak melebihi dari yang telah ditetapkan. Untuk Tahun Buku 2018, laporan yang telah diaudit telah disampaikan pada 15 Februari 2019.</p>	<p>Follow-up on the decision results: It has been 100% realized. As in the years before, Peruri always tries to submit financial reports which has been audited by the Republic of Indonesia BPK and the Public Accounting Firm within a period of not exceeding that which has been determined. For the 2018 Fiscal Year, the audited reports have been submitted on 15 February 2019.</p>
<p>Keputusan Ketiga: Menetapkan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp285.040.648.178, digunakan untuk dividen sebesar Rp64.900.000.000 atau (23%).</p>	<p>Third Decision: Determine attributable net income for the year to owners of the parent entity amounting to Rp285,040,648,178, used for dividends of Rp. 64,900,000,000 or (23%).</p>
<p>Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi 100%. Dividen telah disetorkan ke kas negara pada 2019.</p>	<p>Follow-up on the decision results: It has been 100% realized. Dividends have been deposited into the state treasury in 2019.</p>
<p>Keputusan Keempat: Penetapan tentang tantiem atas kinerja tahun buku 2018, gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tahun 2019 bagi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan akan ditetapkan secara tersendiri.</p>	<p>Fourth Decision: Determination of tantiem for the performance of the 2018 financial year, salary/honorarium, allowances and facilities in 2019 for the Board of Directors and The Company Supervisory Board will be appointed separately.</p>
<p>Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi 100%. Pemberian tantiem dan penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas 2018, sudah dilakukan.</p>	<p>Follow-up on the decision results: It has been 100% realized. The provision of bonuses and stipulations remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board 2018, has been carried out.</p>
<p>Keputusan Kelima: Penetapan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.</p>	<p>Fifth Decision: Determination of KAP that will audit the Financial Statements Corporate and Partnership Program Financial Statements and Community Development for the 2019 Financial Year.</p>
<p>Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi 100%. Dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan berdasarkan usulan Dewan Pengawas.</p>	<p>Follow-up on the decision results: It has been 100% realized. Done separately by The Minister of BUMN as the Representative of the Government as the Owner of Capital Company based on the recommendation of the Supervisory Board.</p>

Penyelenggaraan RPB pada Tahun Buku 2018, Hasil Keputusan dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen

Pada 2018, Perusahaan menyelenggarakan RPB untuk pembahasan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017, pada Kamis, 3 Mei 2018.

Seluruh keputusan dalam RPB dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RPB beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Implementation of RPB in 2018, Result of Decisions and Follow-up by Management

In 2018, the Company organized an RPB for discussion of the Annual Report and Financial Report for the 2017 Financial Year, on Thursday, May 3, 2018.

All decisions in the RPB are made by deliberation to reach consensus. The results of the RPB decision and its implementation and follow-up by the Company Management until the end of 2018 are as follows:

Realisasi Keputusan RPB Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017	Realization of Decision on RPB for Annual Report and Financial Report for Fiscal Year 2017
Keputusan Pertama: Menetapkan penggunaan laba bersih (laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk) sebesar Rp121.177 juta.	First Decision: Determined the use of net profit (net profit attributable to parent entity) of Rp.121,177 million.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi 100%. Dividen telah disetorkan ke kas negara pada 2018.	Follow-up on the decision result: It has been 100% realized. Dividends were deposited into the state treasury in 2018.
Keputusan Kedua: Menetapkan pemberian tantiem kepada direksi dan Dewan Pengawas atas kinerja tahun buku 2017, dan penetapan remunerasi direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan 2018, akan diputuskan kemudian secara tersendiri.	Second Decision: Determine the provision of bonuses to the directors and the Supervisory Board for the 2017 financial year performance, and the remuneration of the Board of Directors and the Company's Supervisory Board for 2018, will be decided later separately.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi 100%. Pemberian tantiem dan penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas 2017, sudah dilakukan.	Follow-up on the decision result: It has been 100% realized. The provision of bonuses and determination of the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2017 have been carried out.
Keputusan Ketiga: Menetapkan auditor eksternal atas laporan keuangan Peruri tahun buku 2018.	Third Decision: Appointed an external auditor for Peruri's financial statements for the 2018 financial year.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi 100%. Penetapan auditor eksternal telah dilakukan pada 2018.	Follow-up on the decision result: It has been 100% realized. The appointment of an external auditor was carried out in 2018.
Keputusan Keempat: Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap temuan, catatan dan saran/rekomendasi KAP dan BPK RI yang belum selesai. Progress tindak lanjut atas temuan tersebut agar dibahas bersama dewan pengawas dan disampaikan kepada menteri BUMN dalam kesempatan pertama.	Fourth Decision: Follow up and complete the findings, notes and suggestions/recommendations of KAP and BPK RI that have not been completed. The follow-up progress on these findings should be discussed with the supervisory board and submitted to the SOE minister at the first opportunity.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi 100%. Direksi melalui Satuan Pengawasan Intern telah melakukan pemantauan terhadap temuan dan rekomendasi BPK RI.	Follow-up on the decision result: It has been 100% realized. The Board of Directors through the Internal Audit Unit has monitored BPK RI findings and recommendations.

Realisasi Keputusan RPB Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017	Realization of Decision on RPB for Annual Report and Financial Report for Fiscal Year 2017
<p>Keputusan Kelima: Kewajiban penyampaian data, laporan dan dokumen kepada kementerian BUMN secara elektronik, tepat waktu dan konsisten sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014 dan memantau progress pemutakhiran data pada 5 (lima) portal BUMN, yakni Portal Financial Information System, portal aset, portal SDM, portal PKBL dan portal publik.</p>	<p>Fifth Decision: The obligation to submit data, reports and documents to the Ministry of SOE electronically, on time and consistently in accordance with the Regulation of the Minister of SOE Number PER-18/MBU/10/2014 and to monitor the progress of updating data on 5 (five) SOE portals, namely the Financial Information System Portal, asset portal, HR portal, CSR portal and public portal.</p>
<p>Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi 100%. Peruri telah menyampaikan data, laporan dan dokumen kepada kementerian BUMN melalui FIS portal system, portal aset, portal SDM, portal PKBL dan portal publik secara tepat waktu dan konsisten sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-18/MBU/10/2014.</p>	<p>Follow-up on the decision result: It has been 100% realized. Peruri has submitted data, reports and documents to the Ministry of SOE through the FIS portal system, asset portal, HR portal, CSR portal and public portals in a timely and consistent manner according to the Regulation of the Minister of SOE Number PER-18/MBU/10/2014.</p>
<p>Keputusan Keenam: Penyampaian laporan keuangan tahun buku 2018, yang telah diaudit selambat lambatnya pada akhir bulan Februari 2019.</p>	<p>Sixth Decision: Submission of audited financial statements for the 2018 financial year by the end of February 2019.</p>
<p>Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi 100%. Sebagaimana tahun-tahun sebelum, Peruri selalu berupaya untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI maupun Kantor Akuntan Publik dalam kurun waktu tidak melebihi dari yang telah ditetapkan. Untuk Tahun Buku 2018, laporan yang telah diaudit telah disampaikan pada 28 Februari 2019.</p>	<p>Follow-up on the decision result: It has been 100% realized. As in previous years, Peruri always strives to submit financial reports that have been audited by BPK RI and the Public Accountant Office within a period not exceeding that which has been determined. For the 2018 Fiscal Year, the audited report was submitted on 28 February 2019.</p>
<p>Keputusan Ketujuh: Meningkatkan penggunaan barang dan jasa dengan mengutamakan sinergi antar BUMN, anak perusahaan BUMN dan /atau perusahaan terafiliasi BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha dan perekonomian. Khususnya sinergi dengan PNRI untuk bidang yang memiliki kompetensi sama pada bidang smart card secara profesional sehingga berdampak positif pada kinerja kedua perusahaan.</p>	<p>Seventh Decision: Increase the use of goods and services by prioritizing synergy between SOE, SOE subsidiaries, and/or SOE affiliated companies in order to improve business efficiency and the economy. In particular, the synergy with PNRI for fields that have the same competence in the smart card field professionally so that it has a positive impact on the performance of the two companies.</p>
<p>Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi 100%. Dalam rangka meningkatkan penggunaan barang dan jasa Peruri bekerja sama dengan PNRI di Surabaya untuk memanfaatkan mesin Drent Peruri.</p>	<p>Follow-up on the decision result: It has been 100% realized. In order to increase the use of Peruri's goods and services in collaboration with PNRI in Surabaya to utilize Drent Peruri machines.</p>
<p>Keputusan Kedelapan: Peningkatan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.</p>	<p>Eighth Decision: Improve compliance in submitting Report on Assets of State Officials (LHKPN) in accordance with the provisions laws and regulations.</p>
<p>Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi 100%. Direksi melalui Biro Manajemen Risiko telah melakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.</p>	<p>Follow-up on the decision result: It has been 100% realized. The Board of Directors through the Risk Management Bureau submitted the Report on Assets of State Officials (LHKPN) in accordance with the provision laws and regulations.</p>

DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan Peruri melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Selain itu, pengawasan Dewan Pengawas kepada Direksi adalah memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan selalu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RPB, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dewan pengawas berpedoman pada charter dewan pengawas yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan No. SK-13/DP/XII/2017, pada 22 Desember 2017, tentang Charter Dewan Pengawas Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

Kualifikasi dan Persyaratan Dewan Pengawas

Syarat seseorang dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas Peruri adalah:

1. Memenuhi kriteria integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi, komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu persero atau perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
3. Berkewarganegaraan Indonesia.

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Di dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mensyaratkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Dewan Pengawas Tahun 2019

Pada 2019 terdapat pergantian susunan Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Kementerian BUMN selaku pemilik modal dengan keterangan sebagai berikut:

SUPERVISORY BOARD

The Supervisory Board is a corporate organ that has the collective duty and responsibility of supervising and providing advice to the Board of Directors and ensuring Peruri implements Good Corporate Governance (GCG) at all levels and levels of the organization. In addition, the Supervisory Board's supervision of the Board of Directors is to ensure that the management of the Company is always in accordance with the provisions of the Articles of Association and RPB Decrees, as well as the prevailing laws and regulations.

In carrying out its duties and functions, the supervisory board is guided by the supervisory board charter which has been stipulated by Decree No. SK-13/DP/XII/2017, on December 22, 2017, concerning the Charter of the Supervisory Board for the Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

Qualifications and Requirements for the Supervisory Board

1. The requirements for a person to be appointed as a member of Peruri's supervisory board are: Meet the criteria of integrity, dedication, understand management issues related to a management function, have adequate knowledge in the company's business and can provide sufficient time to carry out their duties;
2. Able to carry out legal actions and have never been declared bankrupt or have been a member of the board of directors, commissioners or supervisory boards found guilty of causing a company or perum to be declared bankrupt or a person who has never been convicted of a criminal act that caused losses to state finances;
3. Indonesian citizenship.

Term of Office of the Supervisory Board

Article 28 paragraph (3) of Law Number 19 Year 2003 concerning State-Owned Enterprises requires that the term of office of members of the Supervisory Board is set at 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office.

Number, Composition and Arrangement of the Supervisory Board in 2019

In 2019 there was a change in the composition of the Supervisory Board carried out by the Ministry of SOE as the owner of the capital with the following information:

Dasar Hukum Legal Basis	Dewan Pengawas Sebelumnya Previous Member of Supervisory Board	Dewan Pengawas yang Baru New Member of Supervisory Board
Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/01/2019 tertanggal 30 Januari 2019 Minister of SOE Decree Number SK-30/MBU/01/2019 dated January 30, 2019	Ari Wahyuni	Djoko Hendratto
Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-93/MBU/05/2019 tertanggal 13 Mei 2019 Through Minister of DOE Decree Number SK-93/MBU/05/2019 dated May 13, 2019	1. Suroso Hadi Siswoyo 2. Hasiolan Siahaan 3. Erna Wijayanti	1. Sutanto 2. Dwi Pranoto 3. Muhammad Yusuf Ateh

Dengan demikian, susunan komposisi Dewan Pengawas per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Thus, the composition of the Supervisory Board as of 31 December 2019 is as follows:

Susunan Dewan Pengawas Per 31 Desember 2019
Composition of the Supervisory Board As of December 31, 2019

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basic Appointment
Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	Rizal Affandi Lukman	SK-124/MBU/07/2017
Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Djoko Hendratto	SK-30/MBU/01/2019
Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Sutanto	SK-93/MBU/05/2019
Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Dwi Pranoto	SK-93/MBU/05/2019
Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Muhammad Yusuf Ateh	SK-93/MBU/05/2019

**Profil singkat masing-masing anggota Dewan Pengawas dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas, dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini*

** Brief profiles of each member of the Supervisory Board can be seen in the Profile of the Supervisory Board, in the Company Profile chapter of this Annual Report*

Independensi Dewan Pengawas

Seluruh anggota Dewan Pengawas bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun. Dewan Pengawas juga diwajibkan untuk melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya di Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya guna menjamin independensi seluruh anggota Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan dengan anggota Dewan Pengawas lainnya dan atau dengan pemegang saham atau hubungan lainnya dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Sikap independensi Dewan Pengawas dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang memuat bahwa dalam pengambilan keputusan, tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk manfaat diri sendiri, keluarga, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri sendiri, atau pihak yang terafiliasi dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*Conflict of Interest Rule*).

Independence of the Supervisory Board

All members of the Supervisory Board act independently and are free from intervention from any party. The Supervisory Board is also required to report to the company regarding its and/or family's share ownership in the Company and other companies, including any amendments to ensure the independence of all members of the Supervisory Board.

The Supervisory Board does not have a management relationship, share ownership and/or relationship with other members of the Supervisory Board and/or with shareholders or other relationships with the Company that may affect its ability to act independently. The independent attitude of the Supervisory Board is stated in a statement made by all members of the Supervisory Board which states that in making decisions, they do not have personal interests or goals for the benefit of themselves, their families, or benefit parties related to themselves, or affiliated parties. , and thus do not have a position that contains a potential conflict of interest (*Conflict of Interest Rule*).

Board Manual: Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas memiliki Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas, yang semuanya diatur dalam *Charter* Dewan Pengawas Nomor SK-18/DP/XI/2019 tentang Piagam Dewan Pengawas Peruri. Berbagai hal yang diatur dalam *Charter* Dewan Pengawas, diantaranya:

1. BAB I Pendahuluan;
2. BAB II Pembentukan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Larangan dan Pemberhentian Dewan Pengawas;
3. BAB III Tugas, kewajiban dan Kewenangan Dewan Pengawas;
4. BAB IV Kegiatan dan Tata Kerja Dewan Pengawas;
5. BAB V Rencana kerja dan Anggaran Tahunan Dewan pengawas;
6. BAB VI Informasi Untuk dewan Pengawas;
7. BAB VII Tata kelola di Lingkungan Dewan Pengawas;
8. BAB VIII Perangkat Pendukung Dewan Pengawas;
9. BAB IX Penutup.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, memberikan nasihat atau saran serta memastikan bahwa Direksi telah menjalankan tugas-tugasnya untuk kepentingan *stakeholders*. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas tertuang dalam *Charter* Dewan Pengawas Nomor SK-18/DP/XI/2019, tentang Piagam Dewan Pengawas Peruri, yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Pengawasan sebagaimana dimaksud termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - b. Kebijakan yang ditetapkan oleh menteri;
 - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberi nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan perusahaan.

Board Manual: Guidelines and Work Rules of the Supervisory Board

In carrying out its duties and responsibilities, the Supervisory Board has Guidelines and work rules for the Supervisory Board, all of which are regulated in the Supervisory Board Charter Number SK-18/DP/XI/2019, concerning the Peruri Supervisory Board Charter. Various things are regulated in the Supervisory Board Charter, including:

1. Chapter I Introduction;
2. CHAPTER II Establishment, Appointment, Term of Office, Prohibition and Termination of the Supervisory Board;
3. CHAPTER III Duties, obligations and authorities of the Supervisory Board;
4. CHAPTER IV Activities and Work Procedures of the Supervisory Board;
5. CHAPTER V Work plan and annual budget of the Supervisory Board;
6. CHAPTER VI Information for the Supervisory Board;
7. CHAPTER VII Governance in the Environmental Supervisory Board;
8. CHAPTER VIII Support Tools for the Supervisory Board;
9. CHAPTER IX Conclusion.

Duties and Responsibilities of the Supervisory Board

The Supervisory Board is responsible for supervising the performance of the Board of Directors, providing advice or suggestions and ensuring that the Board of Directors has carried out its duties in the interests of stakeholders. The duties and responsibilities of the Supervisory Board are contained in the Supervisory Board Charter Number SK-18/DP/XI/2019, concerning the Peruri Supervisory Board Charter, namely:

1. Supervise the management of the company which is carried out by the board of directors. Supervision as referred to includes supervision of the implementation of:
 - a. Company Work Plan and Budget (RKAP);
 - b. Policy set by the minister;
 - c. The provisions of the legislation.
2. Give advice to the directors in carrying out corporate management activities.

Kewajiban Dewan Pengawas

1. Memberi pendapat dan saran kepada menteri mengenai RKAP yang diusulkan direksi;
2. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada menteri untuk setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan perusahaan;
3. Melaporkan dengan segera kepada menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan.

Wewenang Dewan Pengawas

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, setiap anggota Dewan Pengawas, secara individu maupun kolektif, memiliki kewenangan berikut:

1. Melihat buku, surat, dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengurusan perusahaan;
4. Meminta direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
5. Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
6. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah, memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
7. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri, melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam hal direksi tidak ada;
8. Memberhentikan sementara direksi dengan menyebutkan alasannya.

Pembagian Tugas dan Wewenang Antar Anggota Dewan Pengawas

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perusahaan serta membuat pembagian tugas yang diatur oleh Dewan Pengawas.

Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas SK-18/DP/XI/2019, tentang Pembagian Tugas Dewan Pengawas Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

Obligations of the Supervisory Board

1. Provide opinions and suggestions to the minister regarding the RKAP proposed by the board of directors;
2. Follow the development of company activities, provide opinions and suggestions to the minister for any issues deemed important for the management of the company;
3. To report immediately to the minister if there are signs of a decline in company performance.

Authority of the Supervisory Board

In carrying out their duties and obligations, each member of the Supervisory Board, individually or collectively, has the following powers:

1. View books, letters, other documents, check cash for verification purposes and check company assets;
2. Entering the premises, buildings and offices used by the company;
3. Requesting an explanation from the board of directors and/or other officials regarding all matters relating to the management of the company;
4. Requesting the board of directors and/or other officials with the knowledge of the Board of Directors to attend the Supervisory Board meeting;
5. Attend board of directors meetings and provide views on matters being discussed;
6. Based on the provisions in government regulations, giving approval or assistance to the directors in carrying out certain legal actions;
7. Based on the provisions in government regulations or ministerial regulations, take corporate management actions in the absence of a board of directors;
8. Suspend the board of directors by stating the reasons.

Division of Duties and Authorities among Members of the Supervisory Board

As stipulated in the Regulation of the State Minister for SOE number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 in carrying out its duties the Supervisory Board must comply with the provisions of laws and regulations and/or the articles of association of the company as well as formulate the division of tasks regulated by the Supervisory Board.

Based on this, according to the Decree of the Supervisory Board SK-18/DP/XI/2019, concerning the Division of Duties of the Supervisory Board of Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, are as follows:

Rizal Affandi Lukman	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator tugas-tugas anggota Dewan Pengawas dan Hubungan Antar Kelembagaan. • Ketua Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko. • Coordinator of the duties of members of the Supervisory Board and Inter-Institutional Relations. • Chairman of the Risk Evaluation and Monitoring Committee.
Djoko Hendratto	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pada Direktorat Pengembangan Usaha. • Pengawasan pada Direktorat Keuangan • Supervision at the Directorate of Business Development. • Supervision at the Directorate of Finance
Sutanto	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pada Direktorat SDM dan Umum. • Pengawasan pada Direktorat Operasi • Supervision at the Directorate of Human Resources and General Affairs. • Supervision at the Operations Directorate
Dwi Pranoto	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pada Direktorat Operasi • Pengawasan pada Direktorat Pengembangan Usaha. • Ketua Komite Audit. • Supervision at the Operations Directorate • Supervision at the Directorate of Business Development. • Chairman of the Audit Committee.
Muhammad Ateh Yusuf	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pada Direktorat Keuangan • Pengawasan pada Direktorat SDM dan Umum. • Supervision at the Directorate of Finance • Supervision at the Directorate of Human Resources and General Affairs.

Program Pengenalan Perusahaan

Dengan beragamnya latar belakang anggota Dewan Pengawas dimungkinkan belum mengenal Perusahaan secara mendetail. Oleh karena itu program pengenalan mengenai Perusahaan sangat penting untuk dilaksanakan dengan tujuan bahwa anggota Dewan Pengawas dapat secepatnya memberikan kontribusi terhadap kinerja Perusahaan.

Untuk anggota Dewan Pengawas baru, Perusahaan menyelenggarakan program orientasi sehingga Dewan Pengawas yang baru dapat segera memahami lingkup tugasnya dan dapat segera menjalankan tugasnya. Program pengenalan perusahaan dilaksanakan dalam bentuk presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada *Head of Corporate Secretary*.

Kegiatan agenda pengenalan organisasi bagi Dewan Pengawas baru dilakukan dalam rapat koordinasi antara Direksi dan Dewan Pengawas yang dilakukan sebulan sekali.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas

Program pengembangan kompetensi dimaksudkan sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Pengawas dalam rangka peningkatan kemampuan untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung-jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap kepengurusan Perusahaan dan memberikan nasihat strategis pada Direksi untuk kemajuan Perusahaan.

Company Introduction Program

With the various backgrounds of members of the Supervisory Board, it is possible that they are not familiar with the Company in detail. Therefore, the introduction program regarding the Company is very important to be implemented with the aim that members of the Supervisory Board can immediately contribute to the Company's performance.

For new Supervisory Board members, the Company organizes an orientation program so that the new Supervisory Board can immediately understand the scope of its duties and can immediately carry out its duties. The company introduction program is carried out in the form of presentations, meetings, company visits and document review or other programs. The responsibility for conducting the introductory program lies with Head of Corporate Secretary.

The agenda for the introduction of the organization for the Supervisory Board is only carried out in a coordination meeting between the Board of Directors and the Supervisory Board which is held once a month.

Training and Competency Improvement of the Supervisory Board

The competency development program is intended as a form of program to add insight and knowledge to the Supervisory Board in order to increase the ability to carry out its duties, functions and responsibilities in supervising the management of the Company and providing strategic advice to the Board of Directors for the progress of the Company.

Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Pengawas di sepanjang 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Tahun Buku 2019

Dewan Pengawas senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam menjalankan fungsinya Dewan Pengawas di sepanjang 2019 melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Perusahaan, secara umum kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dibagi menjadi beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Kegiatan Rutin
 - a. Mengikuti Rapat Pembahasan Bersama (RPB) untuk membahas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perum Peruri Tahun Buku 2018 pada tanggal 30 Mei 2019;
 - b. Rapat rutin internal Dewas setiap bulan;
 - c. Rapat Koordinasi dengan Direksi setiap bulan, untuk membahas kegiatan Direksi, capaian RKAP (kinerja operasi dan keuangan) dan status beserta *action plan* nya. Adapun aspek-aspek yang dibahas/dievaluasi yang menjadi perhatian Dewan Pengawas dalam tahun 2019 antara lain adalah *issue-issue* strategis terkait:
 - Evaluasi capaian kinerja bulanan;
 - Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
 - Laporan Tahunan;
 - Persiapan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk *me-review* usulan agenda yang akan diputuskan dalam RPB seperti remunerasi, pembagian laba tahun berjalan dan hal-hal khusus yang dimintakan pengesahan dari Pemilik Modal
 - Evaluasi / Penunjukan KAP dan konsultan *assessment* GCG;
 - Review Hasil Pemeriksaan Auditor Internal/SPI;
 - *Review* Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal (KAP/ BPK) ;
 - *Review* Kinerja Investasi termasuk penyertaan dan Pembinaan dan kinerja anak perusahaan;
 - Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum;

The list of training and competency improvement activities that the Supervisory Board participated in throughout 2019 can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.

Brief Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Supervisory Board in 2019

The Supervisory Board always carries out its duties and responsibilities in a professional and independent manner based on Good Corporate Governance. In carrying out its functions the Supervisory Board throughout 2019 carried out activities related to the Company, in general the activities carried out by the Supervisory Board were divided into several activities, including:

1. Routine Activities
 - a. Following the Joint Discussion Meeting (RPB) to discuss the Annual Report and Ratification of Perum Peruri Financial Statements for the 2018 Fiscal Year on May 30, 2019;
 - b. Dewas's regular monthly internal meeting;
 - c. Monthly Coordination Meetings with the Board of Directors, to discuss the activities of the Board of Directors, the achievements of the RKAP (operational and financial performance) and the status and action plans. The aspects discussed/evaluated that are of concern to the Supervisory Board in 2019 include strategic issues related to:
 - Evaluation of monthly performance achievements;
 - Company Work Plan and Budget (RKAP);
 - Company Long-term Plan (RJPP);
 - Annual report;
 - Preparation for Ratification of the Annual Report, including reviewing the proposed agenda to be decided in the RPB such as remuneration, profit sharing for the year, and special matters that are requested for approval from the Capital Owner;
 - Evaluation/Appointment of KAP and GCG assessment consultants;
 - Review the results of the Internal Auditor/SPI;
 - Review of External Auditor (KAP/BPK) Audit Results;
 - Review of investment performance including inclusion and guidance and performance of subsidiaries;
 - Human Resources and General Affairs;

- *Review* Implementasi IT dan Permasalahan Teknologi Informasi yang digunakan;
 - *Review* Pengelolaan Akuntansi dan Keuangan;
 - *Review* Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Kepatuhan Perusahaan;
 - Efektifitas Audit Eksternal, Audit Internal serta Telaah atas Pengaduan dan tindak lanjutnya;
 - *Review* Bidang Operasional (kebijakan mutu dan pelayanan);
 - *Review* Implementasi Manajemen Risiko dan kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;
 - *Review* Implementasi GCG (incl. Internal Dewas);
 - Permasalahan (Strategis) Perusahaan;
 - *Review* Inisiasi bisnis baru Perum Peruri;
 - *Review* Pengelolaan aset perusahaan;
 - KPI Dewan Pengawas dan Direksi.
- d. Memantau dan mendorong Direksi untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal oleh SPI maupun audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik dan atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dibantu oleh Komite Audit dan Komite Evaluasi & Pemantauan Risiko;
- f. Dibantu Komite Audit dan Direksi Perum Peruri melakukan proses pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik untuk melakukan *General Audit* atas Laporan Keuangan dan PKBL Perum Peruri 2019;
- g. Dibantu Komite Audit dan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko, dalam melakukan evaluasi dan memberi tanggapan atas Surat Rekomendasi Dewan Pengawas, Laporan Manajemen Triwulanan dan Semesteran serta Laporan Keuangan yang telah diaudit Auditor Eksternal;
- h. Lain-Lain kegiatan pengawasan dan pemberian nasehat rutin, antara lain:
- Persetujuan Penyaluran Dana Hibah;
 - Laporan Hasil Evaluasi atas Efektivitas Fungsi SPI tahun 2018;
- Review of IT Implementation and Information Technology Problems used;
 - Review of Accounting and Financial Management;
 - Review of Procurement of Goods and Services;
 - Corporate Compliance;
 - The effectiveness of External Audit, Internal Audit and review of complaints and their follow-ups;
 - Operational Sector Review (quality and service policy);
 - Review of Risk Management Implementation and Board of Directors' compliance with laws and regulations and agreements with third parties;
 - Review of GCG Implementation (incl. Internal Dewas);
 - Company (Strategic) Problems;
 - Review of Perum Peruri's new business initiation;
 - Review the management of company assets;
 - KPI for the Supervisory Board and Directors.
- d. Monitor and encourage the Board of Directors to carry out follow-up recommendations on the results of internal examinations by SPI as well as external audits by the Public Accountant Office and/or the Republic of Indonesia Audit Board (BPK-RI);
- e. Monitoring and evaluating the effectiveness of the internal control system, risk management and corporate governance assisted by the Audit Committee and the Risk Evaluation & Monitoring Committee;
- f. Assisted by the Audit Committee and the Board of Directors of Perum Peruri, carried out the process of procuring the services of a Public Accounting Firm to conduct a General Audit of Perum Peruri's 2019 Financial Statements and CSR;
- g. Assisted by the Audit Committee and the Risk Evaluation and Monitoring Committee, in evaluating and providing responses to the Supervisory Board Recommendation Letter, Quarterly and Semester Management Reports as well as Financial Reports that have been audited by an External Auditor;
- h. Other routine monitoring and advisory activities, including:
- Approval of Grant Distribution;
 - Report on the Evaluation Results of the Effectiveness of the SPI Function in 2018;

- Persetujuan Penugasan Sdr. David IB Situmeang Sebagai Kepala SPI di Perum Peruri;
- Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pelaksana Audit Umum atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia/"Perum Peruri" Tahun Buku 2019;
- Pemberian izin cuti kepada Direksi;
- Persetujuan Pergantian Direktur Keuangan PT Sicpa Peruri Securink;
- Persetujuan Penugasan Sdr. Adi Sunardi Sebagai Kepala Sekretaris Perusahaan di Perum Peruri;
- Persetujuan Penghapusbukuan Aset Tetap Dengan Umur Ekonomis Sampai Dengan 5 (lima) Tahun;
- Rekomendasi Penghapusbukuan Aset Tetap 56 Unit yang Sudah Rusak dan Tidak Dapat Digunakan Lagi;
- Rekomendasi Pengangkatan Direktur Utama PT Peruri Properti;
- Rekomendasi Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas PT Peruri Digital Security.

2. Kunjungan Kerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi atas pengelolaan Perusahaan, dalam tahun 2019 Dewan Pengawas telah melakukan peningkatan pengetahuan dan profesionalisme antara lain melalui berbagai kegiatan/kunjungan kerja sebagai berikut:

- a. Kunjungan anggota Dewan Pengawas (Sdr. Muhammad Yusuf Ateh) bersama Anggota Komite Audit dan Sekretariat Dewas ke PT. Kertas Padalarang pada tanggal 28 Juni 2019 yang merupakan anak perusahaan Perum Peruri. Adapun pembahasan yang dilakukan saat rapat adalah:
 - Pengenalan PT Kertas Padalarang;
 - Pembahasan Kinerja PT Kertas Padalarang Tahun Buku 2018;
 - Bisnis Proses dan RKAP PT Kertas Padalarang Tahun 2019.
- b. Kunjungan Ketua Dewas (Sdr. Rizal Affandi Lukman), Anggota Dewas (Sdr. Sutanto) dan Anggota Komite Dewas ke Pabrik Peruri di Karawang dan PT Sicpa Peruri Securink di Lingkungan Pabrik Peruri di Karawang pada tanggal 26 Juli 2019. Adapun pembahasan yang dilakukan saat kunjungan adalah:

- Approval of Assignment Mr. David IB Situmeang as Head of SPI at Perum Peruri;
- Proposal for the Appointment of a Public Accountant Firm (KAP) to implement the General Audit of the Financial Statements of the Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia /"Perum Peruri" for the 2019 Financial Year;
- Granting leave permission to the Board of Directors;
- Approval of the replacement of the Finance Director of PT Sicpa Peruri Securink;
- Approval of Assignment Mr. Adi Sunardi As Chief Corporate Secretary at Perum Peruri;
- Approval for write-off of fixed assets with an economic age of up to 5 (five) years;
- Recommendation for write-off of 56 fixed assets units that have been damaged and cannot be used anymore;
- Recommendation for the appointment of the President Director of PT Peruri Properti;
- Recommendation for the appointment of the Chairman of Supervisory Board of PT Peruri Digital Security.

2. Work Visits

In order to improve the quality of supervision and advice to the Board of Directors on the management of the Company, in 2019 Supervisory Board has increased his knowledge and professionalism through various activities/work visits as follows:

- a. A visit from members of the Supervisory Board (Mr. Muhammad Yusuf Ateh) together with members of the Audit Committee and the Dewas Secretariat to PT. Kertas Padalarang on June 28, 2019 which is a subsidiary of Perum Peruri. The discussions held at the meeting were:
 - Introduction of PT Kertas Padalarang;
 - Discussion on the Performance of PT Kertas Padalarang in Buku 2018;
 - PT Kertas Padalarang's Business Process and RKAP in 2019.
- b. The visit of the Chairman of Dewas (Mr. Rizal Affandi Lukman), Members of Dewas (Sdr. Sutanto) and Members of the Dewas Committee to the Peruri Factory in Karawang and PT Sicpa Peruri Securink in the Peruri Factory Environment in Karawang on 26 July 2019. The discussion was carried out when the visit is:

- Kunjungan Mesin Double Decker SBU Non Uang RI;
 - Pembahasan Kinerja Produksi Uang Kertas;
 - Pembahasan SDM Bagian Produksi.
3. Pendapat dan Saran Dewan Pengawas
Selama 2019, Dewan Pengawas telah memberikan pendapat dan saran atas kepengurusan Perusahaan dengan pokok-pokok sebagai berikut:
- a. Direksi diminta untuk mengupayakan tercapainya target-target pendapatan yang telah ditetapkan serta melakukan efisiensi biaya sehingga target atas perolehan laba dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan;
 - b. Direksi agar mengupayakan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui diklat atau training secara berkelanjutan untuk mengantisipasi kebutuhan SDM terkait dengan rencana pengembangan usaha;
 - c. Direksi diminta aktif menggali potensi peningkatan pendapatan, antara lain dengan optimalisasi potensi tambahan pendapatan dari bisnis yang sudah ada, pengembangan bisnis baru yang prospektif termasuk mendorong kinerja investasi yang *market driven* dan mendukung peningkatan pendapatan;
 - d. Direksi agar memastikan bahwa program investasi telah didukung dengan perencanaan yang memadai dengan mempertimbangkan skala prioritas untuk investasi yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan perusahaan dan diminta agar dapat terealisasi sesuai rencana dalam rangka meningkatkan kehandalan produksi;
 - e. Perlu dilakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kinerja perusahaan anak, baik pencapaian pendapatan usaha maupun pengendalian atas biaya/beban yang dikeluarkan oleh masing-masing entitas anak, agar masing-masing dapat memperoleh laba minimal sesuai target RKAP yang telah ditetapkan;
 - f. Hal penting yang perlu dilakukan Perum Peruri selaku induk usaha adalah menerapkan Tata Kelola Perusahaan Anak (*subsidiary governance*) dengan baik, sehingga Perusahaan Anak tidak saja dikelola dengan baik (*well-managed*) tetapi juga dikelola dengan tata kelola yang baik dan menciptakan *confidence* bagi semua pemangku kepentingan (*well-governed*);
- Visit of the RI Non Money SBU Double Decker Machine;
 - Discussion on Banknote Production Performance;
 - Discussion of Human Resources for Production.
3. Supervisory Board Opinions and Suggestions
During 2019, the Supervisory Board has provided opinions and suggestions on the management of the Company with the following points:
- a. The Board of Directors is asked to strive to achieve predetermined revenue targets and to carry out cost efficiency so that the target for profit can be achieved as expected;
 - b. The Board of Directors shall endeavor to improve the capabilities of human resources through continuous training or training to anticipate human resource needs related to business development plans;
 - c. The Board of Directors is asked to actively explore the potential for increasing income, among others by optimizing the potential for additional income from existing businesses, developing new prospective businesses, including encouraging market-driven investment performance and supporting increased income;
 - d. The Board of Directors is to ensure that the investment program is supported by adequate planning by considering priority scales for investments that have a direct impact on increasing company revenues and is requested to be realized according to plan in order to increase production reliability;
 - e. It is necessary to carry out continuous monitoring of the performance of the subsidiary companies, both the achievement of operating income and control over the costs/expenses incurred by each subsidiary, so that each can obtain a minimum profit according to the RKAP target that has been set;
 - f. The important thing that needs to be done by Perum Peruri as the parent company is to implement good Subsidiary Governance, so that the Subsidiary is not only well-managed but also managed with good governance and creates confidence in being managed; all stakeholders (*well-governed*);

- g. Direksi hendaknya mengimplementasikan *Talent Management System* secara berkesinambungan, antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi yang relevan dengan dinamika bisnis, pemberian motivasi kerja dan *spirit* bersaing sehingga mampu menggerakkan potensi sumber daya manusia yang ada guna mendorong terciptanya organisasi pembelajar dan organisasi yang memiliki daya tahan dalam menghadapi persaingan bisnis;
 - h. Teknologi informasi yang digunakan dengan Sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) belum memberikan manfaat yang optimal; Oleh karena itu Dewan Pengawas menyarankan agar proses optimalisasi dapat terus dimonitor dan dievaluasi dan diawasi secara ketat sehingga target beroperasinya ERP yang telah dioptimalisasi tidak terus menerus mundur/tertunda;
 - i. Direksi diminta untuk dapat lebih meningkatkan peran Satuan Pengawasan Intern (“SPI”) dan Divisi *Risk Management* khususnya dalam rangka implementasi GCG dan penerapan manajemen risiko secara terpadu (*Enterprise Risk Management*) di seluruh lini organisasi, sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan semua jenis risiko dapat dimitigasi, dimonitor, diukur dan dikendalikan;
 - j. Disamping itu, dapat memberikan *early warning* kepada Direksi terhadap kemungkinan tidak tercapainya target RKAP dan memberikan rekomendasi yang diperlukan;
 - k. Perlu dibuatnya program *maintenance* untuk mesin-mesin utama yang dipakai dalam proses cetak uang, seperti sistem untuk mengontrol permesinan yang ada, sehingga tidak ada lagi kendala dalam produksi uang;
 - l. Terkait rencana *finish banknote* yang akan dilakukan oleh BI ke Perum Peruri, Direksi diharapkan dapat menyusun *roadmap*, mulai membuat kajiannya serta mempersiapkan *guidance* yang harus dimiliki; Apabila sudah berjalan dengan lancar dapat dilakukan *benchmark* ke Printing *banknote company* lainnya yang menerima pesanan *finish banknote*;
 - m. Dengan melihat skala bisnis yang dimiliki masing-masing SBU, perlu dilakukan evaluasi apakah masing-masing SBU telah memiliki beban kerja yang sama dan bila dianggap perlu dapat dilakukan restrukturisasi agar diperoleh efektifitas dan efisiensi usaha yang lebih baik;
- g. The Board of Directors should implement the Talent Management System on an ongoing basis, including through increasing organizational capacity and capabilities that are relevant to business dynamics, providing work motivation and a competitive spirit so that they are able to mobilize the potential of existing human resources to encourage the creation of learning organizations and organizations that have the power; resilient in the face of business competition;
 - h. The information technology used with the Enterprise Resource Planning (ERP) system has not provided optimal benefits; Therefore, the Supervisory Board suggested that the optimization process can be continuously monitored and evaluated, and closely monitored so that the operating target of the optimized ERP does not continue to be delayed/delayed;
 - i. The Board of Directors is asked to further enhance the role of the Internal Supervisory Unit (“SPI”) and the Risk Management Division, particularly in the context of implementing GCG and implementing integrated risk management (Enterprise Risk Management) in all organizational lines, so that every activity can be carried out by prioritizing the principles prudence and all types of risk can be mitigated, monitored, measured and controlled;
 - j. In addition, it can provide an early warning to the Board of Directors against the possibility of not achieving the RKAP target and provide the necessary recommendations;
 - k. It is necessary to establish a maintenance program for the main machines used in the money printing process, such as a system to control existing machinery, so that there are no more constraints in money production;
 - l. Regarding the banknote finish plan that will be carried out by BI to Perum Peruri, the Board of Directors is expected to be able to compile a roadmap, start making a study and prepare the guidance that must be owned; If it is running smoothly, a benchmark can be made to other banknote printing companies that accept banknote finish orders;
 - m. By looking at the business scale of each SBU, it is necessary to evaluate whether each SBU has the same workload, and if deemed necessary, restructuring can be carried out in order to obtain better business effectiveness and efficiency;

- n. dalam rangka optimalisasi penjualan luar negeri, Direksi agar mengkaji potensi pasar luar negeri dengan membuat profile perusahaan yang disampaikan ke Kedutaan Besar (terutama di negara dunia ketiga) untuk mohon disosialisasikan guna memperluas pasar;
- o. Penyaluran dana dari Unit PKBL agar *concern* pada area yang sesuai dan dapat memberikan *corporate image* yang baik bagi bisnis Perum Peruri, serta dapat merealisasikan target-targetnya secara tepat sasaran dan tepat jumlah;
- p. Direksi diminta untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap temuan, catatan dan saran/rekomendasi KAP pada tahun buku 2019, termasuk tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti.

- n. In order to optimize foreign sales, the Board of Directors should study the potential of foreign markets by creating a company profile that is submitted to Embassies (especially in third world countries) to ask for socialization in order to expand the market;
- o. Disbursement of funds from the CSR Unit in order to be concerned with the appropriate areas and to provide a good corporate image for Perum Peruri's business, as well as to realize its targets with the right target and the right amount;
- p. The Board of Directors is asked to follow up and complete the KAP findings, notes and suggestions/recommendations in the 2019 financial year, including previous years that have not been followed up.

Penilaian Kinerja Organ dan Komite Pendukung di Bawah Dewan Pengawas

Penilaian kinerja organ dan komite di bawah Dewan Pengawas dilakukan baik secara kolegal maupun individual. Penilaian dilakukan oleh Dewan Pengawas dengan berdasarkan parameter kriteria kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.

Performance Appraisal of Organs and Supporting Committees under the Supervisory Board

Performance evaluation of organs and committees under the Supervisory Board is carried out both collegially and individually. The assessment is carried out by the Supervisory Board based on the criteria for the Completeness and Implementation of Committee Duties parameters.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Pengawas

Sepanjang 2019, kinerja sekretaris Dewan Pengawas telah dijalankan dengan baik, yaitu:

1. Memastikan bahwa dewan pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi secara berkala yang dibutuhkan oleh dewan pengawas;
3. Mengkoordinasikan anggota komite dewan pengawas jika diperlukan;
4. Sebagai penghubung komunikasi antara anggota dewan pengawas dengan pihak lain.

Performance Assessment of the Supervisory Board Secretary

Throughout 2019, the performance of the Supervisory Board secretaries has been carried out well, namely:

1. Ensure that the supervisory board complies with laws and regulations and applies GCG principles;
2. Provide regular information required by the supervisory board;
3. Coordinate the committee members of the Supervisory Board as needed;
4. As a communication liaison between members of the Supervisory Board and other parties.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Parameter penilaian kinerja Komite Audit dilakukan melalui uraian sebagai berikut:

1. Telah melakukan analisa hasil audit SPI sebanyak 4 kali;
2. Telah melakukan hasil audit KAP sebanyak 1 kali;
3. Menelaah Laporan Berkala Keuangan dan Kinerja Manajemen sebanyak 12 kali;
4. Menggelar rapat koordinasi dalam rangka sinergitas dengan Satuan Pengawasan Internal sebanyak 4 kali;

Performance Assessment of the Audit Committee

The parameters for the performance assessment of the Audit Committee are carried out as follows:

1. Has analyzed the SPI audit results 4 times;
2. Has conducted KAP audit results once;
3. Reviewing Financial Periodic Reports and Management Performance 12 times;
4. Holding coordination meetings in the framework of synergy with the Internal Control Unit 4 times;

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Bersama SPI dan Divisi Dafasum memproses pengadaan Auditor Eksternal untuk melakukan General Audit Tahun Buku 2019 sebanyak 3 kali; 6. Rapat dengan KAP sebanyak 2 kali; 7. Rapat internal Komite Audit sebanyak 12 kali; 8. Rapat Koordinasi dengan Komite EPR sebanyak 4 kali; 9. Menyusun masukan berdasarkan hasil evaluasi laporan berkala manajemen untuk Dewan Pengawas sebagai bahan rapat sebanyak 12 kali; 10. Menyusun laporan periodik kegiatan Komite Audit sebanyak 4 kali; 11. Telah mengikuti <i>workshop</i> dan seminar sebanyak 2 kali; 12. Berhasil melaksanakan tugas khusus dari Dewan Pengawas dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 13. Menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dewan Pengawas sebanyak 12 kali. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Together with SPI and the Dafasum Division to process the procurement of an External Auditor to conduct a General Audit for the 2019 Fiscal Year 3 times; 6. Meetings with KAP twice; 7. 12 Internal Audit Committee meetings; 8. Coordination Meetings with the EPR Committee 4 times; 9. Compiling input based on the evaluation results of management periodic reports for the Supervisory Board as material for 12 meetings; 10. Prepared periodic reports on the Audit Committee's activities 4 times; 11. Has attended 2 workshops and seminars; 12. Successfully carrying out special tasks from the Supervisory Board and preparing reports on the implementation of tasks; 13. Held 12 Coordination Meetings with the Supervisory Board. |
|---|--|

Penilaian Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko

Parameter penilaian kinerja Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko dilakukan melalui uraian sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan pada 2019 sebanyak 1 kali; 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas sistem Manajemen Risiko sebanyak 12 kali; 3. Melakukan rapat internal Komite EPR sebanyak 12 kali; 4. Rapat koordinasi dalam rangka sinergitas dengan Komite Audit sebanyak 4 kali; 5. Mengikuti <i>workshop</i> seminar sebanyak 2 kali; 6. Rapat koordinasi dengan RM sebanyak 4 kali; 7. Menyusun masukan berdasarkan hasil evaluasi laporan berkala manajemen untuk Dewan Pengawas sebagai bahan rapat sebanyak 12 kali; 8. Menyusun laporan periodik kegiatan Komite EPR sebanyak 4 kali; 9. Bersama Divisi RM dan Dafasum memproses pengadaan konsultan <i>Assessment</i> GCG sebanyak 3 kali; 10. Berhasil melaksanakan tugas khusus dari Dewan Pengawas dan Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 11. Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dewan Pengawas sebanyak 12 kali. | <h4>Risk Evaluation and Monitoring Committee Assessment</h4> <p>The parameters for the performance assessment of the Risk Evaluation and Monitoring Committee are carried out as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studying the risk management system implemented by the company in 2019 1 time; 2. Monitored and evaluated the effectiveness of the Risk Management system 12 times; 3. Conducted 12 internal EPR Committee meetings; 4. Coordination meetings for synergy with the Audit Committee 4 times; 5. Attending Seminar Workshop 2 times; 6. Coordination meetings with RM 4 times; 7. Compiling input based on the evaluation results of management periodic reports for the Supervisory Board as material for 12 meetings; 8. Prepare periodic reports on the activities of the EPR Committee 4 times; 9. Together with the RM and Dafasum Divisions, the GCG Assessment consultant procured 3 times; 10. Successfully carrying out special tasks from the Supervisory Board and preparing reports on the implementation of tasks; 11. Held 12 Coordination Meeting with the Supervisory Board. |
|---|---|

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan Perusahaan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Guna menjalankan fungsinya, jajaran direksi berpegang pada pedoman kerja direksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor Kep-3/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang *Board of Director Charter* (Pedoman Kerja Direksi) Perum Peruri.

Kualifikasi dan Persyaratan Menjadi Anggota Direksi

Syarat menjadi anggota direksi Peruri adalah:

1. Memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan perusahaan,
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi, komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah, menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
3. Kewarganegaraan Indonesia.

Seluruh anggota Direksi Peruri telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut di atas.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Direksi

Komposisi Direksi Peruri adalah sebagai berikut:

Susunan Direksi

Arrangement of the Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Dwina Septiani Wijaya	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-247/MBU/11/2017 tanggal 20 November 2017 Ministry of SOE Decree Number SK-247/MBU/11/2017 dated November 20, 2017	2017-2022
Direktur Operasi Director of Operation	Saiful Bahri	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-247/MBU/11/2017 tanggal 20 November 2017 Ministry of SOE Decree Number SK-247/MBU/11/2017 dated November 20, 2017	2017-2022
Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	Fajar Rizki	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-209/MBU/07/2018 tanggal 18 Juli 2018. Ministry of SOE Decree Number SK-209/MBU/07/2018 dated July 18, 2018	2018-2023

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is an organ of the Company that is collectively tasked and responsible for managing the Company and implementing GCG at all levels or levels of the organization.

To carry out their functions, the board of directors adheres to the work guidelines of the board of directors which have been established through the Decree of the Board of Directors Number Kep-3/III/2019 dated March 5, 2019, concerning the Board of Director Charter (Directors Work Guidelines) of Perum Peruri.

Qualifications and Requirements to Become Members of the Board of Directors

Requirements for becoming a member of the board of directors of Peruri are:

1. Meet the criteria of expertise, integrity, leadership, experience, honesty, good behavior and have high dedication to advancing the company,
2. Able to carry out legal acts and have never been declared bankrupt or have been found guilty of being a member of the board of directors, commissioners or supervisory board, causing a company or perum to be declared bankrupt or a person who has never been convicted of committing a crime that has caused losses to state finances.
3. Indonesian citizenship.

All members of the Board of Directors of Peruri have fulfilled all of the above conditions.

Number, Composition and Arrangement of the Board of Directors

The composition of the Board of Directors of Peruri is as follows:

Susunan Direksi

Arrangement of the Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Keuangan Director of Finance	Winarsih Budiriani	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-81/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Ministry of SOE Decree Number SK-81/MBU/03/2020 dated March 18, 2018	2018-2023
Direktur SDM dan Umum Director of HR and General	Gandung Anggoro Murdani	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-81/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Ministry of SOE Decree Number SK-81/MBU/03/2020 dated March 18, 2018	2020-2025

**Profil singkat masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi, dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.*

** Brief profiles of each member of the Board of Directors can be seen in the Directors Profile section, in the Company Profile chapter of this Annual Report.*

Independensi Anggota Direksi

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan terkait, Direksi Peruri wajib menjaga independensinya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya secara optimal. Dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka, seluruh anggota Direksi tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun dan wajib bertindak independen demi kepentingan Perusahaan.

Independence of the Members of the Board of Directors

In accordance with the Articles of Association of the Company and the related laws and regulations, the Directors of Peruri are required to maintain their independence so that they can optimally carry out the tasks entrusted to them. In carrying out their assigned duties, all members of the Board of Directors may not be influenced by pressure from any party and must act independently in the interests of the Company.

Untuk menjaga independensi Direksi, Perusahaan telah menyusun ketentuan berikut:

1. Menyusun pedoman kerja direksi;
2. Membuat laporan secara berkala terkait kepemilikan saham di perusahaan lain;
3. Membuat pernyataan tertulis yang berisi penegasan bahwa keputusan senantiasa berdasarkan prinsip kemandirian (*independency*), penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*), profesional dan berdasarkan kepada kepentingan perusahaan, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

To maintain the independence of the Board of Directors, the Company has compiled the following provisions:

1. Develop work guidelines for the board of directors;
2. Making regular reports regarding share ownership in other companies;
3. Make a written statement that affirms that decisions are always based on the principle of independence, full of prudence (duty of care and loyalty), professional and based on company interests, free from conflict of interest and comply with the provisions and laws and regulations.

Board Manual: Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Peruri telah menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi atau Board of Director Charter No KEP-III/2019 tanggal 5 Maret 2019, sebagai pedoman bagi seluruh anggota Direksi dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan perusahaan serta dalam hubungan dengan Dewan Pengawas, yang antara lain mengatur mengenai:

1. Landasan dan Arah Pengembangan Perusahaan Perusahaan;
2. Dasar Hukum Pembentukan dan Organisasi Direksi;
3. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban;
4. Pakta Integritas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Board Manual: Guidelines and Work Rules of the Board of Directors

Peruri has compiled the Board of Directors Charter No KEP-III/2019 dated March, 5 2019 as a guideline for all members of the Board of Directors in carrying out the roles and functions of managing the company as well as in the relationship with the Supervisory Board. others regulate regarding:

1. Foundation and Direction of Company Development;
2. Legal Basis for Establishment and Organization of the Board of Directors;
3. Duties, Authorities, and Obligations;
4. Integrity Pact Implementation of Good Corporate Governance.

Board Manual Direksi ini disusun dengan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan ditujukan untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Secara Kolegial Direksi bertugas secara kolektif menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan RPB. Direksi bertugas untuk memelihara dan mengurus aset Perusahaan dan wajib melaksanakan tugasnya tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan perusahaan.

Secara umum, Direksi memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan Pengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendirisendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
4. Mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawasan Intern dan jabatan lainnya; dan

This Board Manual for the Board of Directors is prepared in accordance with applicable laws and regulations and is intended to assist the Board of Directors in carrying out its duties to realize the Company's Vision and Mission.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors

Collegially, the Board of Directors is tasked collectively to carry out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the company and to represent the Company both inside and outside the Court regarding all matters and all events with restrictions as regulated in laws and regulations. invitation, Articles of Association and/ or RPB Decree. The Board of Directors is tasked with maintaining and managing the assets of the Company and in carrying out these duties, the Board of Directors is obliged to carry out its duties in good faith and full of responsibility, and comply with the prevailing laws and regulations, and always be oriented towards the interests of the company.

In general, the Board of Directors has the following duties and authorities:

1. Establish Company Management policies;
2. Arrange the transfer of power of the Board of Directors to one or more members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company in and outside the court;
3. Arranging the transfer of power of the Board of Directors to one or more employees of the Company, either individually or collectively or to other people, to represent the Company in and outside the court;
4. Regulate the provisions concerning the employment of the Company including the determination of the salary, pension or old-age security and other income for the Company's employees based on the provisions of the laws and regulations, with the stipulation of salary, pension or old-age security, and other income for workers who exceed the stipulated obligations. provisions of statutory regulations must obtain prior approval from the Minister;
5. To appoint and dismiss Company workers based on the Company's labor laws and regulations;
6. To appoint and dismiss the Corporate Secretary and Head of Internal Control Unit, and other positions; and

7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai Pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Take all other actions and actions regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company inside and outside the court regarding all matters and events, with restrictions as stipulated in the Budget The basis and/or provisions of laws and regulations..

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Berdasarkan *Board of Director Charter*, pembagian kerja masing-masing anggota Direksi Peruri sebagai berikut:

Scope and Responsibilities of Each Board of Directors

The Board of Directors is an organ of the Company that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the interests and objectives of the Company and represents the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Based on the Board of Directors Charter, the division of labor of each member of the Board of Directors of Peruri is as follows:

Direktur Utama	President Director
1. Mengurus perusahaan sesuai maksud dan tujuannya;	1. Manage the company according to its aims and objectives;
2. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas perusahaan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang ditetapkan;	2. Planning, coordinating, directing, controlling, supervising and evaluating company tasks so that all activities run in accordance with the vision, mission, business objectives, strategies, policies and work programs that have been set;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional di bidang pelaksanaan audit internal, kesekretariatan perusahaan, manajemen risiko serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;	3. Coordinating the implementation of operational tasks in the field of internal audit, corporate secretarial, risk management and ensuring compliance with applicable laws and regulations;
4. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi internalisasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten;	4. Coordinating, controlling and evaluating the consistent internalization of the principles of good corporate governance;
5. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam rapat direksi	5. Right and authorized to act for and on behalf of the board of directors based on the policies stipulated in the board of directors meeting;
6. Berhak dan berwenang bertindak selaku koordinator dari anggota direksi;	6. The right and authority to act as the coordinator of the members of the board of directors;
7. Memastikan informasi yang terkait dengan perusahaan selalu tersedia bila diperlukan oleh dewan pengawas;	7. Ensuring information related to the company is always available when required by the supervisory board;
8. Menyelenggarakan dan memimpin rapat direksi secara periodik sesuai ketetapan direksi atau rapat-rapat lain apabila dipandang perlu sesuai usulan direksi;	8. Organizing and chairing directors' meetings periodically according to the decision of the board of directors or other meetings if deemed necessary according to the recommendations of the board of directors;
9. Mengesahkan keputusan direksi tentang kebijakan manajemen perusahaan;	9. Ratify the decision of the board of directors regarding company management policies;
10. Menunjuk anggota direksi lain untuk bertindak atas nama direksi.	10. Appoint other members of the board of directors to act on behalf of the board of directors.

Direktur Operasi	Director of Operations
<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis proses produksi untuk mencapai tingkat kualitas produk sesuai dengan standar mutu; Mengkoordinasikan perumusan dan pencapaian kualitas produk uang kertas, uang logam dan logam non-uang dan kertas berharga non-uang agar dapat berjalan dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu; Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pencapaian sasaran/target di masing-masing unit produksi untuk memastikan adanya perkembangan yang progresif dan berkesinambungan sebagai dukungan terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan; Bersama-sama direktur utama dan anggota direksi lainnya melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan dalam kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan lingkungan serta sistem manajemen mutu (ISO). 	<ol style="list-style-type: none"> Coordinating the preparation of a strategic plan for the production process to achieve product quality levels in accordance with quality standards; Coordinating the formulation and achievement of the quality of banknotes, coins and non-currency coins and non-currency banknotes so that they can run on time, on quantity and on quality; Coordinating all activities to achieve goals/targets in each production unit to ensure progressive and continuous development as support for the achievement of the company's vision and mission; Together with the president director and other members of the board of directors, monitor and supervise the implementation of occupational health and safety (K3) and the environment and management systems (ISO).
Direktur Pengembangan Usaha	Director of Business Development
<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategi dan program implementasi untuk bidang penjualan domestik, penjualan internasional, pengembangan segmen pasar dan pengembangan bisnis perusahaan untuk mencapai sasaran pendapatan perusahaan serta untuk bidang desain, pengembangan produk dan teknologi proses produksi serta unsur pengamanan untuk mewujudkan rencana strategis pengembangan perusahaan; Mengkoordinasikan dalam perumusan dan pencapaian kinerja untuk penjualan domestik, penjualan internasional, pengembangan pasar-pasar baru, pengembangan bisnis baru perusahaan, desain, pengembangan produk dan pengembangan teknologi serta pengamanan agar strategis perusahaan dapat tercapai; Memantau penyusunan, sistem yang efektif untuk pelaksanaan fungsi penjualan, pengembangan segmen pasar dan pengembangan bisnis perusahaan, desain pengembangan produk dan teknologi serta pengamanan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana; Memantau pembuatan usulan berdasarkan hasil kajian bisnis untuk pengembangan segmen pasar, pengembangan produk baru dan pengembangan teknologi proses produksi serta terlaksananya proses implementasi dari rekomendasi yang disetujui oleh manajemen; Memantau proses pemasaran dari suatu produk atau bidang usaha baru perusahaan; Bersama-sama dengan direktur utama dan anggota direksi lainnya melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan lingkungan serta sistem manajemen mutu (ISO). 	<ol style="list-style-type: none"> Coordinating the preparation of strategic plans and implementation programs for domestic sales, international sales, market segment development and company business development to achieve corporate revenue targets as well as for design, product development and production process technology as well as security elements to realize the company's strategic development plan; Coordinating in the formulation and achievement of performance for domestic sales, international sales, development of new markets, development of new company businesses, design, product development and technology development as well as safeguards so that the company's strategy can be achieved; Monitor the preparation, an effective system for the implementation of sales functions, market segment development and company business development, product and technology development design as well as safeguards so that implementation can go according to plan; Monitor the making of recommendations based on the results of business studies for the development of market segments, development of new products and development of production process technology as well as the implementation of the implementation process of recommendations approved by management; Monitor the marketing process of a product or new company line of business; Together with the president director and other members of the board of directors, monitor and supervise the implementation of Occupational Health and Safety (K3) and the environment and management systems (ISO).
Direktur Keuangan	Director of Finance
<ol style="list-style-type: none"> Mengarahkan dan mengkoordinasikan dalam penyusunan strategis untuk pengelolaan keuangan dan investasi; Mengkoordinasikan perumusan strategi jangka panjang sebagai dasar perumusan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dengan bekerja sama dengan direksi lainnya; Memberlakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi dan mengevaluasi berbagai jenis risiko keuangan yang dapat dihadapi perusahaan; Mengarahkan dan memantau kebutuhan dana operasional dan investasi serta terjaganya keamanan dalam pengelolaan dana perusahaan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai rencana; Bersama-sama anggota direksi lainnya melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan dalam kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta sistem manajemen. 	<ol style="list-style-type: none"> Directing and coordinating the strategic preparation for financial and investment management; Coordinating the formulation of a long-term strategy as the basis for the formulation of the company's work plan and budget (RKAP) in collaboration with other directors; Implement steps that can reduce and evaluate various types of financial risks that can be faced by the company; Directing and monitoring the need for operational and investment funds as well as maintaining security in the management of company funds so that company activities can run according to plan; Together with other members of the board of directors, monitor and supervise the implementation of occupational health and safety (K3) and management systems.

Direktur SDM dan Umum	HR and General Affairs Director
<ol style="list-style-type: none"> Mengarahkan dan mengkoordinasikan dalam penyusunan rencana strategis untuk pengembangan SDM, pengamanan, pengadaan, kebijakan pengadaan dan pergudangan, fasilitas umum dan lingkungan; Memantau penyusunan kebijakan untuk menjalankan fungsi pengadaan barang dan jasa, pengendalian jasa, persediaan barang dan gudang, penyediaan fasilitas umum agar dapat berjalan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu; Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM, pengamanan, pengadaan, kebijakan pengadaan dan pergudangan, fasilitas umum dan lingkungan agar sasaran strategis perusahaan dapat tercapai; Menyusun kebijakan pokok dan pelaksanaan fungsi manajemen SDM, pengamanan, pengadaan, kebijakan pengadaan pergudangan, fasilitas umum dan lingkungan untuk kelancaran dalam pengelolaan perusahaan; Memantau pemenuhan kebutuhan SDM perusahaan sesuai jumlah dan kompetensi yang direncanakan agar proses pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan lancar; Bersama-sama anggota direksi lainnya melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta system manajemen. 	<ol style="list-style-type: none"> Directing and coordinating the preparation of strategic plans for human resource development, security, procurement, procurement and warehousing policies, public facilities and the environment; Monitor the formulation of policies to carry out the functions of procurement of goods and services, control of services, inventory of goods and warehouses, provision of public facilities so that they can run on time, on quantity and on quality; Planning, developing and implementing strategies in the field of human resource management and development, security, procurement, procurement and warehousing policies, public facilities and the environment so that the company's strategic goals can be achieved; Formulate basic policies and implement HR management functions, security, procurement, warehousing procurement policies, public facilities and the environment for smooth management of the company; Monitor the fulfillment of the company's HR needs according to the planned number and competencies so that the company's management process can run smoothly; Together with other members of the board of directors, they monitor and supervise the implementation of Occupational Health and Safety (K3) and management systems.

Program Pengenalan Perusahaan

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan, dengan Sekretaris Perusahaan sebagai penanggung jawab program pengenalan tersebut. Program Pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang, ke fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen, *team building*, atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Untuk anggota Direksi baru, Peruri menyelenggarakan program orientasi sehingga Direksi yang baru dapat segera memahami lingkup tugasnya dan dapat segera menjalankan tugasnya. Program pengenalan perusahaan dilaksanakan dalam bentuk presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan.

Pelaksanaan Program pengenalan perusahaan kepada direksi baru dilaksanakan pada penyelenggaraan Rapat Direksi atau *Board of Management Meeting* yang diselenggarakan secara rutin.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Perusahaan merancang program untuk memberikan wawasan baru bagi Direksi untuk meningkatkan kapasitas Perusahaan dalam lingkungan usaha yang

Company Introduction Program

Members of the Board of Directors who are appointed for the first time must be given an introduction program regarding the Company, with the Corporate Secretary as the person in charge of the introduction program. The Company Introductory Program can take the form of presentations, meetings, visits to branch offices, to Company facilities, document review, team building, or other programs deemed appropriate.

For new members of the Board of Directors, Peruri organizes an orientation program so that the new Directors can immediately understand the scope of their duties and can immediately carry out their duties. The company introduction program is carried out in the form of presentations, meetings, company visits and document review or other programs. The responsibility for conducting the induction program rests with the Corporate Secretary.

The implementation of the new company introduction program to the new directors is carried out at the Board of Directors Meeting or Board of Management Meeting which is held regularly

Training and Competency Improvement of Directors

The Company designed a program to provide new insights for the Board of Directors to increase the Company's capacity in a competitive business

kompetitif, serta memberikan kesempatan untuk membangun jaringan dalam rangka memberdayakan sumber daya yang ada dalam organisasi sehingga menjadikan Perusahaan sebagai organisasi berkinerja tinggi. Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Penilaian Kinerja Komite dan Organ di Bawah Direksi

dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan, selain di bantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis, serta Satuan Pengawasan Intern, Direksi juga dibantu oleh beberapa organ pendukung berupa kelompok kerja dan komite. Ketiga organ pendukung tersebut memiliki kedudukan dan fungsi yang kurang lebih sama dengan komite-komite di bawah direksi pada entitas bisnis pada umumnya, yakni memberikan masukan dan rekomendasi kepada direksi terkait kebijakan serta pengambilan keputusan yang sifatnya strategis. Hingga akhir 2019, Direksi memiliki organ pendukung yaitu Komite Sumber Daya Manusia, Komite Anggaran serta Komite Investasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Investasi.

Komite Sumber Daya Manusia

Sepanjang 2019, Komite Sumber Daya manusia telah menjalankan tugasnya dengan baik antara lain: memastikan keselarasan kebijakan SDM dengan strategi dan tujuan bisnis perusahaan, menetapkan strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan SDM yang berkualitas, membahas dan menyempurnakan berbagai kebijakan penting terkait bidang SDM, memantau dan melaporkan pelaksanaan atas program-program terkait SDM yang dijalankan.

Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran

Sepanjang 2019, Komite Anggaran telah berperan besar dalam membantu pekerjaan direksi dalam rangka menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019 yang akan ditetapkan oleh Menteri BUMN.

Komite Investasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Investasi

Sepanjang 2019 Komite Investasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Investasi telah menjalankan fungsinya dengan baik yaitu untuk merumuskan kebutuhan investasi dalam rangka mendukung kinerja dan produktivitas perusahaan.

environment, as well as provide opportunities to build networks in order to empower existing resources in the organization so as to make the Company a high-performance organization. Regarding the competency improvement activities that the Board of Directors participated in throughout 2019, please see the Company Profile chapter in this annual report.

Performance Assessment of Committees and Organs under the Board of Directors

In carrying out the Company's operational activities, apart from being assisted by the Corporate Secretary and Strategic Planning, as well as the Internal Control Unit, the Board of Directors is also assisted by several supporting organs in the form of working groups and committees. The three supporting organs have positions and functions that are more or less the same as committees under the board of directors in business entities in general, namely providing input and recommendations to the board of directors regarding policies and strategic decision making. Until the end of 2019, the Board of Directors has supporting organs, namely the Human Resources Committee, the Budget Committee and the Investment Committee and Investment Working Group (Pokja).

Human Resources Committee

Throughout 2019, the Human Resources Committee has carried out its duties properly, including: ensuring the alignment of HR policies with the company's business strategy and objectives, establishing strategies for maintaining and developing quality human resources, discussing and refining various important policies related to HR, monitoring and reporting on implementation on HR-related programs being implemented.

Budget Preparation Working Group

Throughout 2019, the Budget Committee has played a major role in assisting the work of the board of directors in preparing the 2019 Corporate Work and Budget Plan (RKAP) which will be determined by the Minister of SOE.

Investment Committee and Investment Working Group (Pokja)

Throughout 2019 the Investment Committee and the Investment Working Group (Pokja) have carried out their functions properly, namely to formulate investment needs to support the Company's performance and productivity.

TRANSPARANSI INFORMASI TERKAIT DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Pengawas dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, optimal dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Pengawas maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perusahaan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Perusahaan.

Keberagaman komposisi direksi dan dewan pengawas diatur pada PP 32, Tahun 2006, Pasal 17, mengenai bagian Direksi dan Pasal 32, mengenai bagian Dewan Pengawas dengan menyatakan bahwa yang dapat diangkat sebagai direksi dan dewan pengawas adalah perseorangan yang memenuhi kriteria integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen di salah satu fungsi manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan.

Komposisi direksi dan dewan pengawas Peruri ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Peruri termasuk memperhatikan unsur keberagaman yang meliputi pendidikan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan, termasuk yang berkaitan dengan jenis kelamin.

Pada 2019 ini, direksi dan dewan pengawas perusahaan terdiri dari profesional yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Hal ini merupakan nilai tambah tersendiri bagi Perusahaan dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

TRANSPARENCY OF INFORMATION RELATED TO THE SUPERVISORY BOARD AND THE BOARD OF DIRECTORS

DIVERSITY OF THE COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD AND THE BOARD OF DIRECTORS

The diversity of the composition of the Supervisory Board and the Board of Directors is part of the Company's efforts to encourage a more objective, comprehensive, optimal decision-making process that has a positive impact on the Company's supervision and management. This diversity is expected to enrich viewpoints and interests in the decision-making process both within the Supervisory Board and the Board of Directors, so as to provide added value to the operational and business aspects of the Company, as well as the implementation of Corporate Governance within the Company.

The diversity of the composition of the board of directors and the supervisory board is regulated in PP 32, 2006, Article 17, regarding the part of the board of directors and Article 32, regarding the part of the supervisory board by stating that those who can be appointed as directors and the supervisory board are individuals who meet the criteria of integrity, dedication, understand the problem. management in a management function and have adequate knowledge in the company's business.

The composition of the board of directors and supervisors of Peruri is determined by considering Peruri's needs and complexities, including taking into account the elements of diversity which include education, expertise, knowledge and experience required, including those related to gender.

In 2019, the company's directors and supervisory boards consist of professionals with diverse educational backgrounds and experiences. This is an added value for the Company in developing its business in a sustainable manner.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Peruri
Table of Peruri's Supervisory Board and Board of Directors Composition Diversity

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Pendidikan Terakhir Last Education	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Dewan Pengawas Supervisory Board						
Dr. Rizal Affandi Lukman Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	Indonesia	S-3	Ph.D in International Development	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Dewan Pengawas Perum Peruri (Juli 2017 – Present) • Deputy Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-sekarang) • Direktur Keuangan dan Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010) • Asisten Pribadi Presiden Republik Indonesia ke-6, Istana Negara (2008-2009) • Direktur Keuangan dan Kerja Sama Ekonomi Asia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2005-2008) • Direktur Kerja Sama Ekonomi Bilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2001-2005) • Chief of Supervisory Board of Perum Peruri (July 2017 – present); • Deputy Minister for International Economic Cooperation, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2010 - present); • Acting Deputy Minister for International Economic Cooperation and Director for Multilateral Economic and Financial Cooperation, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2010); • Assistant to 6th President of the Republic of Indonesia Private Secretary, Presidential Palace Office (2008 – 2009); • Director for Asia Economic and Financial Cooperation, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2001 – 2005); • Director for Bilateral Economic Cooperation, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2001 – 2005). 	58	Laki-laki Male

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Peruri

Table of Peruri's Supervisory Board and Board of Directors Composition Diversity

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Pendidikan Terakhir Last Education	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Dr. Djoko Hendratto, MBA Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Indonesia	S-2	Master of Business Administration	<ul style="list-style-type: none"> • 2019 – sekarang menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Peruri • 2018 – sekarang menjabat sebagai Direktur Sistem Manajemen Investasi (SMI), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; • 2014 – 2018 menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; • 2013 – 2014 menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; • 2011 – 2013 menjabat sebagai Kepala Biro Riset dan Teknologi Informasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Kementerian Keuangan; • 2006 – 2011 menjabat sebagai Kepala Biro Pengelolaan Investasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Kementerian Keuangan. • Member of Supervisory Board of Peruri (2019 – present); • Director of Investment Management System (SMI), Directorate General of Treasury, Ministry of Finance (2018 - present); • Director of Public Service Agency Financial Management Development (PPKBLU), Directorate General of Treasury, Ministry of Finance (2014 - 2018); • Treasury Researcher, Directorate General of Treasury, Ministry of Finance (2013 - 2014); • Head of Research and Information Technology Bureau, Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK), Ministry of Finance (2011 - 2013); • Head of Investment Management Bureau of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK), Ministry of Finance (2006 - 2011). 	58	Laki-laki Male

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Peruri
Table of Peruri's Supervisory Board and Board of Directors Composition Diversity

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Pendidikan Terakhir Last Education	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Drs. Sutanto, SH. Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Indonesia	S-2	Akademi Kepolisian Police Academy	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Dewan Pengawas Perum Peruri (Mei 2019 – sekarang) • Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Intelijen Negara / Kalakhar Botasupal (2018-Sekarang) • Direktur Kontra Infiltrasi dan Sabotase Deputy III BIN (2015-2018) • Direktur Intelkam Polda Metro Jaya (2013-2015) • Karo Ops Polda Maluku (2011-2013) • Direktur Intelkam Polda Bangka Belitung (2008-2010) • Kapolres Bangka Polda Bangka Belitung (2007-2008) • Kapolres Bangka Tengah Polda Bangka Belitung (2005-2007) • Member of the Perum Peruri Supervisory Board (May 2019 - present); • Expert Staff for Law and Human Rights of the State Intelligence Agency / Kalakhar Botasupal (2018-Present); • Director of Counter-Infiltration and Sabotage Deputy III BIN (2015-2018); • Director of Intelligence and Security at Polda Metro Jaya (2013-2015); • Karo Ops Polda Maluku (2011-2013); • Director of Intelligence and Security at Polda Bangka Belitung (2008-2010); • Chief of Polres Bangka Polda Bangka Belitung (2007-2008); • Chief of Polres Bangka Tengah Polda Bangka Belitung (2005-2007). 	56	Laki-laki Male
Ir. Dwi Pranoto, MBM Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Indonesia	S-2	Master in Business Management	<ul style="list-style-type: none"> • 2019 – sekarang menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Peruri • 2019 – sekarang, Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Regional, Bank Indonesia • 2014 – 2019, Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Regional II – Jawa, Bank Indonesia • 2012 – 2014, Direktur Eksekutif, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV (Jawa Timur, 2013-2014) dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III (Bali Nusa Tenggara, 2012-2013) • 2010 – 2012, Direktur Eksekutif, Kepala Unit Khusus Manajemen Informasi/ Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, Bank Indonesia • 2006 – 2010, Direktur Departemen Sumber Daya Manusia, Bank Indonesia (2007-2010) dan Direktur Departemen Pengelolaan Uang, Bank Indonesia (2006-2007) • 2002 – 2006, Deputy Direktur (Kepala Divisi) Office of the Governor/ Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, Bank Indonesia 	56	Laki-laki Male

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Peruri

Table of Peruri's Supervisory Board and Board of Directors Composition Diversity

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Pendidikan Terakhir Last Education	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
				<ul style="list-style-type: none"> Member of the Perum Peruri Supervisory Board (2019 - present); Executive Director, Head of Regional Departments, Bank Indonesia (2019 - present); Executive Director, Head of Regional II Department - Java, Bank Indonesia (2014 - 2019); Executive Director, Chief Representative of Bank Indonesia Region IV (East Java, 2013-2014) and Head of Representative Office of Bank Indonesia Region III (Bali Nusa Tenggara, 2012-2013); Executive Director, Head of Information Management Special Unit/Information System Management Department, Bank Indonesia (2010 - 2012); Director of the Human Resources Department, Bank Indonesia (2007-2010); Director of the Department of Money Management, Bank Indonesia (2006-2007); Deputy Director (Head of Division) Office of the Governor/Department of Strategic Management and Governance, Bank Indonesia (2002 - 2006); 		
Muhammad Yusuf Ateh, AK. ,MBA. Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Indonesia	S-2	Master in Business Administration	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2020 – Sekarang) Anggota Dewan Pengawas Perum Peruri (Mei 2019 - Sekarang) Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) (2013 - 2020); Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, Kementerian PAN dan RB (2013); Inspektur pada Kementerian PAN dan RB (2010 - 2013); Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Wilayah Timur II, Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, Kementerian PAN dan RB (2009 - 2010). Head of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) (2020 - Present); Member of Perum Peruri Supervisory Board (May 2019 - Present); Deputy for Bureaucratic Reform, Apparatus Accountability, and Supervision, Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PAN and RB) (2013 - 2020); Deputy for Apparatus Supervision and Accountability, Ministry of PAN and RB (2013); Inspector at the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (2010 - 2013); Head of Division of Monitoring and Evaluation of Apparatus Performance Accountability for Eastern Region II, Deputy for Apparatus Accountability, Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform(2009 - 2010). 	55	Laki-laki Male

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Peruri
Table of Peruri's Supervisory Board and Board of Directors Composition Diversity

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Pendidikan Terakhir Last Education	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Direksi Board of Director						
Dwina Septiani Wijaya Direktur Utama President Director	Indonesia	S2	Magister Manajemen Master of Management	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama Peruri (November 2017 – sekarang); Staf Khusus Menteri BUMN (Juli 2017 – November 2017); Direktur Utama – PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (2013 – 2017); Direktur Keuangan – PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2009 – 2013); Direktur Utama – PT Bahana TCW Investment Management (2003 – 2009); Direktur Investasi – PT Bahana TCW (2002 – 2003); Manajer Portofolio – PT Bahana TCW (1994 – 2000); Manajer Risiko Pengelolaan Dana – PT Bank Niaga, Jakarta (1990 – 1994). President Director of Peruri (November 2017 - present); Special Staff of the Minister of SOE (July 2017 - November 2017); President Director - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (2013 - 2017); Director of Finance - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2009 - 2013); President Director - PT Bahana TCW Investment Management (2003 - 2009); Investment Director - PT Bahana TCW (2002 - 2003); Portfolio Manager - PT Bahana TCW (1994 - 2000); Fund Management Risk Manager - PT Bank Niaga, Jakarta (1990 - 1994). 	54	Perempuan Female
Saiful Bahri Direktur Operasi Director of Operation	Indonesia	S2	Magister Manajemen Master of Management	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Operasi (November 2017 – sekarang); Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) (2012 – 2017); Direktur Operasional dan Komersial PT Balai Pustaka (Persero) (2010 – 2012); Marketing Corporate Penerbit Grafindo Media Pratama (2008-2010); Direktur Utama PT Widya Pustaka (Ganeca Exact Group) (2006 – 2008); Direktur Pemasaran Penerbit & Percetakan Ganeca Exact Group (2002); Marketing Manager Penerbit & Percetakan Aneka Ilmu (1996 - 2002). Director of Operations (November 2017 - present); President Director of PT Balai Pustaka (Persero) (2012 - 2017); Operational and Commercial Director of PT Balai Pustaka (Persero) (2010 - 2012); Marketing Corporate of Grafindo Media Pratama (2008-2010); President Director of PT Widya Pustaka (Ganeca Exact Group) (2006 - 2008); Ganeca Exact Group Publishers & Printing Marketing Director (2002); Marketing Manager for Various Sciences Publishing & Printing (1996 - 2002). 	48	Laki-laki Male

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Peruri

Table of Peruri's Supervisory Board and Board of Directors Composition Diversity

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Pendidikan Terakhir Last Education	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Fajar Rizki Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	Indonesia	S2	Magister Manajemen Master of Management	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Pengembangan Usaha Peruri (Juli 2018 – sekarang); • Kepala Divisi Pengelolaan Aset dan Anak Perusahaan Peruri (Mei 2018 – Juli 2018); • Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Peruri (2014 – 2017); • Kepala Departemen Keuangan Peruri (2013). • Director of Peruri Business Development (July 2018 - present); • Head of Asset Management and Subsidiaries of Peruri (May 2018 - July 2018); • Head of Finance and Accounting Division of Peruri (2014 - 2017); • Head of the Peruri Finance Department (2013). 	51	Laki-laki Male
Winarsih Budiriani Direktur Keuangan Director of Finance	Indonesia	S1	Kehutanan Forestry	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan Peruri (Maret 2020 - sekarang); • Direktur SDM dan Umum Peruri (Juli 2018 – Maret 2020); • Head of Improvement Project Human Capital Bank Mandiri (2018); • Executive Business Officer Special Asset Management Bank Mandiri (2017); • Group Head Mandiri University (2015 – 2017); • Group Head Jakarta Commercial Sales Bank Mandiri (2003 – 2009). • Director of Finance of Peruri (March 2020 - present); • Director of HR and General Affairs of Peruri (July 2018 - March 2020); • Head of Improvement Project Human Capital Bank Mandiri (2018); • Executive Business Officer Special Asset Management at Bank Mandiri (2017); • Mandiri University Group Head (2015 - 2017); • Group Head Jakarta Commercial Sales of Bank Mandiri (2003 - 2009). 	56	Perempuan Female
Gandung Anggoro Murdani* Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs	Indonesia	S2	Magister Manajemen Master of Management	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur SDM dan Umum Peruri (Maret 2020 - sekarang); • Senior Vice President Head Corporate HR & GA PT IBS Group (2018 - 2020); • Kepala Divisi SDM Peruri (2015-2018); • Head HR, GA, Legal & Regional Head Jawa Barat dan Sumatera Aora TV (2013-2014); • Tenaga Profesional Pendamping di Peruri (2013); • Advisor, HR dan Pengembangan Bisnis BSPI Foundation (2011-2013); • Group Head of Human Capital PT Indosat Tbk (2007-2011). • Director of Human Resources and General Peruri (March 2020 - present); • Senior Vice President Head Corporate HR & GA PT IBS Group (2018 - 2020); • Head of Peruri HR Division (2015-2018); • Head HR, GA, Legal & Regional Head West Java and Sumatera Aora TV (2013-2014); • Assistant Professionals in Peruri (2013); • Advisor, HR and Business Development of BSPI Foundation (2011-2013); • Group Head of Human Capital PT Indosat Tbk (2007-2011). 	54	Laki-laki Male

Asesmen Penerapan GCG untuk Aspek Dewan Pengawas dan Direksi

Sebagai organ utama dalam Perusahaan, Dewan Pengawas dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perusahaan. *Assessment* atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perusahaan merupakan Perusahaan BUMN yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BUMN sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan di bagian awal bab ini, Perusahaan melakukan evaluasi dan pemantauan Hasil Tata Kelola, atau *Governance Outcome* melalui mekanisme *Assessment* atau penilaian penerapan GCG secara periodik. Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG melalui penilaian penerapan GCG berdasarkan pendekatan BumN. Sebagai BUMN, Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG dengan menggunakan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Metode penilaian tersebut di atas, memiliki kriteria penilaian yang mencakup aspek Dewan Pengawas dan Direksi. Pada penilaian penerapan GCG melalui Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012, terdapat penilaian terhadap aspek Dewan Pengawas/Dewan Pengawas dan aspek Direksi.

Lebih lanjut tentang metode, proses dan hasil penilaian terkait penerapan GCG untuk aspek Dewan Pengawas dan Direksi, dapat dilihat pada bagian "Assessment dan Peningkatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik" di awal bab Tata Kelola Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Assessment of GCG Implementation for the Aspects of the Supervisory Board and the Board of Directors

As the main organs in the Company, the Supervisory Board and Directors have a central role in the movement of the Company's growth. The assessment of these two organs is a must, especially because the Company is a state-owned company that is directed to apply the principles of GCG to SOE standards as well as an assessment of the implementation.

As explained in the early part of this chapter, the Company evaluates and monitors the Governance Outcome, through the Assessment mechanism or the periodic assessment of GCG implementation. The company assesses the implementation of GCG through an assessment of GCG implementation based on the SOE approach. As a SOE, the Company assesses the implementation of GCG using a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE.

The assessment method mentioned above, has assessment criteria covering aspects of the Supervisory Board and Directors. On the assessment of the implementation of GCG through a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012, there is an assessment of aspects of the Supervisory Board/Supervisory Board and aspects of the Board of Directors.

More details on the methods, processes and results of assessment related to the implementation of GCG for the aspects of the Board of Supervisors and Directors, can be seen in the "Assessment and Improvement of the Implementation of Good Corporate Governance" at the beginning of the Corporate Governance chapter in this annual report.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 pasal 12 ayat 5 sebagaimana telah diubah dengan Nomor: PER-09/MBU/2012 dinyatakan bahwa Dewan Pengawas wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.

Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut pada pasal 15 juga diatur mengenai *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Pengawas, yang dinyatakan bahwa RPB wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (KPI) Dewan Pengawas berdasarkan Usulan dari Dewan Pengawas yang bersangkutan. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Secara ringkas, Pelaksanaan Kegiatan atau Realisasi KPI yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Perusahaan selama 2019 adalah sebagai berikut:

Assessment of The Performance of The Supervisory Board and The Board of Directors

Performance Assessment of the Supervisory Board

In carrying out its duties, the Supervisory Board has the authority and obligations that must be carried out. One of the obligations of the Supervisory Board as regulated in the Regulation of the Minister of State for SOEs Number PER-01/MBU/2011 article 12 paragraph 5 as amended by Number: PER-09/MBU/2012 states that the Supervisory Board is obliged to prepare an Annual Work Plan and Budget which is an integral part of the RKAP.

In the Regulation of the State Minister for SOE, Article 15 also regulates the Key Performance Indicators (KPI) of the Supervisory Board, which states that the RPB is obliged to establish Key Performance Indicators for the Supervisory Board based on the recommendation of the relevant Supervisory Board. Performance Achievement Indicators is a measure of the success of the implementation of the duties and responsibilities of supervision and provision of advice by the Supervisory Board in accordance with the provisions of laws and regulations and the Articles of Association.

In summary, the implementation of activities or realization of KPIs that have been carried out by the Company's Supervisory Board during 2019 are as follows:

No.	Aspek Parameter Aspect Parameters	Periode Period	Satuan Unit	KPI	Bobot Weight	Capaian 2019 Achievements 2019	Realisasi 2019 Realization
I. Aspek Pengawasan dan Nasehat/Aspects of Supervision and Advice					50%		50%
1	Memberikan tanggapan kepada Pemegang Saham terhadap: Provide responses to Shareholders on:				10%		10%
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL a. Company Work Plan and Budget (RKAP) and CSR Work Plan and Budget (RKA)	Tahunan annual	Surat letter	1	3%	1	3%
	b. Laporan Tahunan b. Annual report	Tahunan annual	Surat letter	1	3%	1	3%
	c. Analisis Kinerja Triwulanan c. Quarterly Performance Analysis	Triwulan quarter	Surat letter	4	4%	4	4%
2	Memberikan persetujuan/pendapat atas usulan Direksi yang merupakan wewenang Dewan Pengawas Give approval/opinion on the proposal of the Board of Directors which is the authority of the Supervisory Board	Setahun a year	%	10	10%	10	10%
3	Rapat Dewan Pengawas Supervisory Board Meeting				5%		5%
	a. Jumlah Rapat a. Number of Meetings	Bulanan monthly	Kali Times	12	2%	12	2%
	b. Kehadiran Rapat b. Meeting Attendance	Bulanan monthly	%	100	2%	100	2%
	c. Penyelesaian Risalah Rapat c. Completion of Meeting Minutes	Bulanan monthly	%	100	1%	100	1%
4	Monitoring Tindakan lanjut temuan SPI dan Eksternal Auditor serta Assesment GCG Monitoring Follow-up findings of the SPI and External Auditor as well as GCG Assessment	Setahun a year	Surat letter	3	10%	3	10%
5	Evaluasi Pelaksanaan Audit Eksternal (BPK/KAP) Evaluation of External Audit Implementation (BPK/KAP)	Tahunan annual	Surat letter	1	10%	1	10%
6	Monitoring dan Evaluasi anak perusahaan/Unit Usaha/Proyek Investasi Monitoring and Evaluation of subsidiaries/Business Units/Investment Projects	Setahun a year	Kunjungan visit	5	5%	5	5%
II. Aspek Pelaporan/Reporting Aspects					30%		30%
7	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas Supervisory Board Work Plan and Budget	Tahunan annual	Laporan Report	1	15%	1	15%
8	Laporan Pengawasan Tahunan Annual Supervision Report	Tahunan annual	Laporan Report	1	15%	1	15%
III. Aspek Dinamis/Dynamic Aspects					20%		20%
9	Peningkatan kompetensi Dewan Pengawas melalui seminar, workshop dll Increasing the competence of the Supervisory Board through seminars, workshops etc.	Setahun a year	Kali Times	4	10%	4	10%
10	Tindakan lanjut rekomendasi hasil assesment GCG Dewan Pengawas Follow-up recommendations on the GCG assessment results of the Supervisory Board	Setahun a year	%	100	10%	100	10%
Total Nilai Total value					100%		100%

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap Direksi melekat pada KPI Perusahaan. Berdasarkan Rencana Jangka Panjang (RJP), Kebijakan Umum Perusahaan (KUP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Direksi wajib menyusun KPI sebagai sasaran kerja perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kontrak manajemen antara Direksi dan Dewan Pengawas dengan Kementerian BUMN.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SKEP-359/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019, tentang Sistem Penilaian Kinerja (KPI) Unit dan Individu. Perusahaan Umum Percetakan Uang RI, metode penetapan KPI didasarkan pada beberapa perspektif, yaitu:

1. KPI yang dilaporkan kepada kementerian BUMN menggunakan format yang ditetapkan oleh Menteri BUMN, dengan menggunakan metode *malcolm baldrige*;
2. KPI perusahaan menggunakan metode 4 (empat) perspektif *balanced scorecard*, meliputi: *financial, custom, internal business process*, serta *learning and growth*.

Penyusunan KPI dilakukan dengan melakukan transfer KPI dalam format *malcolm baldrige* yang telah disahkan oleh Kementerian BUMN ke dalam Kontrak Manajemen (KPI) dengan format *balanced scorecard*. Selanjutnya, dilakukan proses *sharing* dan *mapping* indikator dari masing-masing sasaran kerja jajaran direksi yang dikoordinasikan melalui divisi *risk management*.

Setelah KPI Direksi disetujui maka dilakukan mapping indikator untuk KPI divisi dan KPI departemen dilengkapi dengan penentuan target dan bobot sasaran kerja. Setiap departemen kemudian melakukan *mapping* KPI Individu dari pejabat setingkat seksi hingga pelaksana yang dikoordinasikan oleh divisi SDM.

Proses penilaian KPI dilakukan untuk mengukur pencapaian kinerja perusahaan sesuai dengan kontribusi dan pencapaian target yang telah ditentukan. Proses input realisasi KPI Individu dilakukan setingkat seksi hingga pelaksana sedangkan pencapaian KPI Unit dilaksanakan setingkat departemen hingga direksi.

Proses konseling dan verifikasi bukti pencapaian kerja dilakukan oleh Komite Kinerja Unit dan Komite Kinerja Individu. Pencapaian sasaran kinerja perusahaan hingga individu yang telah disahkan akan dijadikan

Performance Appraisal of the Board of Directors

Assessment of the Board of Directors is attached to the Company's KPI. Based on the Long-term Plan (RJP), General Company Policy (KUP), and the Company Work Plan and Budget (RKAP), the board of directors is required to prepare KPI as the company's work objectives as outlined in the form of a management contract between the Board of Directors and the Supervisory Board with the Ministry of SOE.

Based on the Board of Directors' Decree Number: SKEP-359/VII/2019 dated July 1, 2019, regarding Performance Appraisal System (KPI) for unit and individuals. For the Republic of Indonesia Money Printing Company, the KPI determination method is based on several perspectives, namely:

1. KPIs that are reported to the SOE ministry use the format set by the Minister of SOE, using the Malcolm Baldrige method;
2. The company's KPI uses 4 (four) balanced scorecard perspectives, including: *financial, custom, internal business process*, and *learning and growth*.

KPI preparation is done by transferring KPIs in the malcolm baldrige format which has been approved by the Ministry of SOEs into a Management Contract (KPI) with a balanced scorecard format. Furthermore, the process of sharing and mapping indicators of each work target of the board of directors is carried out which is coordinated through the risk management division.

After the Board of Board of Directors/ KPI is approved, an indicator mapping is carried out for division KPI and departmental KPI equipped with the determination of targets and work target weights. Each department then conducts a mapping of Individual KPI from section-level officials to executors coordinated by the HR division.

The KPI appraisal process is carried out to measure the achievement of company performance in accordance with predetermined contributions and target achievement. The input process for the realization of the Individual KPI is carried out at the section level to the executive level, while the achievement of KPI Unit is carried out at the department to board level.

The counseling process and verification of proof of work achievement are carried out by the Unit Performance Committee and Individual Performance Committee. The achievement of company performance

dasar pemberian insentif bagi para karyawan. Tahun ini, guna memperkuat pencapaian unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penyusunan KPI dibagi menjadi 3 (tiga) kategori indikator, yaitu *Core*, *Enabler* dan *General Function*.

Core adalah indikator kinerja utama yang dimiliki oleh *owner* KPI tersebut. *Enabler* merupakan indikator kinerja utama yang mendukung indikator kinerja utama unit kerja lain, sedangkan *General Function* adalah indikator umum yang didukung oleh semua unit kerja, sebagai contoh pencapaian skor *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).

Selain itu, adanya penambahan komitmen *Service Level Agreement* (SLA) dalam KPI masing-masing divisi, semakin mempermudah pemantauan kinerja serta menjadi bukti komitmen bersama untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja.

targets to individuals who have been approved will be used as the basis for providing incentives for employees. This year, in order to strengthen the achievement of work units in accordance with their main tasks and functions, the preparation of KPI is divided into 3 (three) categories of indicators, namely *Core*, *Enabler* and *General Function*.

Core is the main performance indicator owned by the KPI owner. The enabler is the main performance indicator that supports the main performance indicators of other work units, while the *General Function* is a general indicator supported by all work units, for example the achievement of the *Good Corporate Governance* (GCG) score and the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU).

In addition, the additional commitment to *Service Level Agreement* (SLA) in the KPI of each division, makes it easier to monitor performance and is a proof of joint commitment to increase productivity, work efficiency and effectiveness.

KPI Kinerja dan Penilaian Direksi 2019

No.	Indikator KPI Key Performance Indicators	Sat Unit	Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Skor Score
A.	Keuangan & Pasar Finance & Markets			24,00		28,38
1	Revenue	%	4.125,51	6,00	3884,67	5,65
2	Net Profit Margin	%	7,32	6,00	18,60	7,80
3	EBITDA Margin	%	21,85	6,00	33,51	7,80
4	Debt to Equity Ratio (DER)	%	116,73	6,00	98,23	7,13
B.	Fokus Pelanggan Customer Focus			18,00		21,00
5	Customer Satisfaction Index	%	82,05	9,00	84,75	9,30
6	New Partnership (Customer)	Pelanggan Customer	10,00	9,00	30,00	11,70
C.	Fokus Efektifitas Produk & Proses Focus on Product & Process Effectiveness			20,00		23,02
7	Number of New Product/Services	Item	3,00	10,00	12,00	13,00
8	Operating Margin	%	13,06	10,00	13,08	10,02
D.	Fokus Tenaga Kerja Labor Focus			14,00		16,14
9	Tingkat Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction Level	%	80,00	7,00	80,50	7,04
10	Peningkatan Produktivitas Karyawan Increased Employee Productivity	%	44,00	7,00	22,21	9,10
E.	Kepemimpinan, Tata Kelola & Tanggung Jawab Kemasyarakatan Leadership, Governance & Community Responsibility			14,00		14,36
11	Index GCG GCG Index	Skor	89,61	5,00	89,78	5,01

KPI Kinerja dan Penilaian Direksi 2019

No.	Indikator KPI Key Performance Indicators	Sat Unit	Target	Bobot Weight	Realisasi Realization	Skor Score
12	Maturity Level of Risk Management	Skor	3,00	4,00	3,08	4,11
13	Skor Tingkat Kesehatan Health Level Score	Skor	91,00	5,00	95,50	5,25
F.	Agen Pembangunan Development Agent			10,00		13,00
14	Sinergi Antar BUMN Synergy between SOEs	%	15,00	10,00	39,81	13,00
Total				100,00		115,90

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)

Sekilas Tentang KPKU

Perusahaan melakukan penilaian implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang bertujuan untuk membantu Perusahaan dalam menilai upaya perbaikan, mendiagnosa sistem manajemen kinerja secara keseluruhan dan mengidentifikasi kekuatan serta peluang-peluang untuk melakukan perbaikan.

KPKU merupakan salah satu perangkat penilaian kinerja dan pengelolaan keseluruhan aspek organisasi dari Kementerian BUMN, di mana pada tahun 2016 Kementerian BUMN telah memperbaharui perangkat penilaian KPKU melalui Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-445/D7.MBU/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan *Assessment* Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN 2016. Dalam surat ini disebutkan bahwa evaluasi menggunakan kriteria KPKU versi Tahun 2015, yaitu mengacu pada dokumen KPKU sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-445/D7.MBU/10//2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang mengadopsi dan mengadaptasi "*Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence*".

Penyelenggaraan *Malcolm Baldrige National Quality Award* (MBNQA) bertujuan untuk mengidentifikasi sebuah perusahaan yang dapat dijadikan *role model* bagi perusahaan lain. Selain itu, Perusahaan juga menerapkan kriteria *Malcolm Baldrige* untuk menguatkan daya saing melalui upaya:

1. Meningkatkan praktik kinerja organisasi, kemampuan dan hasil;
2. Memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi tentang praktik terbaik di antara perusahaan-perusahaan dari semua jenis industri;
3. Menyediakan sebuah alat untuk memahami dan mengelola kinerja perusahaan, juga sebagai alat untuk membimbing perencanaan dan meningkatkan pembelajaran.

SUPERIOR PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA (KPKU)

Overview of the KPKU

The company assesses the implementation of the Superior Performance Appraisal Criteria (KPKU) which aims to assist the Company in assessing improvement efforts, diagnosing the overall performance management system, and identifying strengths and opportunities for improvement.

The KPKU is one of the performance assessment tools and management of all organizational aspects of the Ministry of SOE, where in 2016 the Ministry of SOE has updated the KPKU assessment tool through the Secretary of the Ministry of SOE No. S-445/D7.MBU/10/2016 dated 14 October 2016 concerning Implementation of the 2016 SOE Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) Assessment. In this letter it is stated that the evaluation uses the 2015 version of the KPKU criteria, which refers to the KPKU document as stipulated by the Ministry SOE through the letter of the Secretary of the Ministry of SOE No. S-445/D7.MBU/10 // 2016 dated 14 October 2016 which adopted and adapted the "*Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence*".

The implementation of the *Malcolm Baldrige National Quality Award* (MBNQA) aims to identify a company that can be used as a role model for other companies. In addition, the Company also applies the *Malcolm Baldrige* criteria to strengthen competitiveness through:

1. Improve organizational performance practices, capabilities and results;
2. Facilitating communication and sharing of information on best practices among companies of all types of industries;
3. Provides a tool for understanding and managing company performance, as well as a tool to guide planning and enhance learning.

Proses penerapan KPKU dilakukan melalui 2 (dua) tahapan besar, yaitu tahap “*Ondesk Review*” yaitu penilaian diatas kertas berbasis pada respon KPKU pada tahun sebelumnya dan informasi pendukung Metode/Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*) dan Integrasi (*Integration*) atau disingkat ADLI; serta tahapan “*Site Visit*” ke perusahaan untuk wawancara dan klarifikasi atas respon KPKU terhadap Direksi serta *Senior Leader* lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan serta verifikasi berbagai data dan informasi.

Evaluasi kinerja KPKU didasarkan pada 2 (dua) dimensi penilaian, yaitu proses dan hasil. Faktor yang digunakan untuk menilai proses adalah ADLI. Sementara faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil perusahaan adalah *Level, Trend, Comparison* dan *Integration* (LeTCI).

Kedua dimensi evaluasi, yaitu Dimensi Proses dan Dimensi Hasil sangat penting bagi evaluasi dan umpan balik. Suatu pertimbangan yang kritical dalam evaluasi dan umpan balik adalah unsur penting atau derajat pentingnya proses dan hasil yang dilaporkan bagi faktor-faktor bisnis utama. Bidang-bidang yang paling penting harus diidentifikasi dalam Profil Perusahaan dan dalam subkategori persyaratan pelanggan utama, lingkungan kompetitif, kebutuhan tenaga kerja, tujuan strategis utama dan program kerja sangatlah penting.

Berdasarkan kedua tahapan di atas kemudian disusun laporan yang berisi Skor dan Umpan Balik yang berisikan *Opportunity for Improvements* (OFI) dan Kekuatan (*Strengths*) Perusahaan untuk dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam melakukan perbaikan, baik proses maupun peningkatan hasil-hasil bisnis.

Hasil skor atas penilaian penerapan KPKU dan kategorinya adalah sebagai berikut:

Skala Skor Score Scale	Kategori Category
876 - 1.000	World Class Leader
776 - 875	Benchmark Leader
676 - 775	Industry Leader
576 - 675	Emerging Industry Leader
476 - 575	Good Performance
376 - 475	Early Improvement
276 - 375	Early Result
0 - 275	Early Development

The process of implementing the KPKU is carried out in 2 (two) major stages, namely the "Ondesk Review" stage, namely the assessment on paper based on the KPKU response in the previous year and supporting information on the Method/System (Approach), Implementation (Deployment), Learning (Learning), and Integration (Integration) or abbreviated as ADLI; as well as the "Site Visit" stage to the company for interviews and clarification of the KPKU's response to the Directors and other Senior Leaders appointed by the company as well as verification of various data and information.

The KPKU performance evaluation is based on 2 (two) dimensions of assessment, namely the process and results. The factor used to assess the process is ADLI. Meanwhile, the factors used to evaluate company results are Level, Trend, Comparison and Integration (LeTCI).

The two dimensions of evaluation, namely the Process Dimension and the Outcome Dimension, are very important for evaluation and feedback. A critical consideration in evaluation and feedback is the important element or degree of importance of the processes and results reported for key business factors. The most important areas should be identified in the Company Profile and in the subcategories of key customer requirements, the competitive environment, manpower requirements, key strategic objectives and work program are essential.

Based on the two stages above, a report containing scores and feedback is compiled containing Opportunity for Improvements (OFI) and Company Strengths to be used as a basis for making improvements, both processes and improving business results.

The results of the scores on the assessment of the implementation of the KPKU and their categories are as follows:

Hasil Evaluasi dan Penilaian KPKU

Results of the KPKU Evaluation and Assessment

Kategori Category		2013	2014	2015	2016	2017	2019
Kepemimpinan Leadership	Kepemimpinan Senior Senior Leadership	24,50	31,50	35,00	38,50	42,00	42,00
	Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan Governance and Community Responsibility	20,00	22,50	25,00	27,50	30,00	30,00
Strategis Strategic	Pengembangan Strategi Strategy Development	14,00	20,00	20,00	22,00	27,00	27,00
	Implementasi Strategi Strategic Implementation	13,50	20,25	22,50	24,75	24,00	24,00
Pelanggan Customers	Suara Pelanggan Voice of the Customer	13,50	20,25	22,50	22,50	24,00	24,00
	Keterikatan Polanggan Customer Engagement	14,00	16,00	20,00	20,00	24,75	24,75
Pengukuran Analisis & KPI Measurement Analysis & KPI	Pengukuran Analisis dan Kinerja Perusahaan Measurement Analysis and Company Performance	18,00	18,00	20,25	22,50	24,75	24,75
	Manajemen Pengetahuan, Pengolaan Informasi TI Knowledge Management, IT Information Management	18,00	18,00	20,25	22,50	24,75	27,00
Tenaga Kerja Labor	Lingkungan Tenaga Kerja Labor Environment	12,00	18,00	20,00	20,00	22,00	22,00
	Keterikatan Tenaga Kerja Labor Engagement	13,50	18,00	22,50	22,50	24,75	24,75
Operasi Operations	Proses Kerja Work process	20,25	20,25	22,50	22,50	24,75	24,75
	Efektifitas Operasional Operational Effectiveness	18,00	16,00	20,00	20,00	22,00	22,00
Hasil – Hasil Results	Produk dan Proses Products and Processes	38,50	33,00	49,50	49,50	54,00	54,00
	Fokus Pelanggan Customer Focus	18,00	27,00	38,25	38,25	40,00	40,00
	Fokus Tenaga Kerja Manpower Focus	20,00	28,00	38,25	38,25	32,00	36,00
	Kepemimplnan dan Tata Kelola Leadership and Governance	28,00	28,00	36,00	40,00	36,00	44,00
	Finanslal dan Pasar Finanslal and Markets	31,50	36,00	40,50	45,00	49,50	49,50
TOTAL SKOR TOTAL SCORE		335,25	390,75	473,00	496,25	526,25	538,50

Dari laporan tersebut Tim Evaluator KPKU mengeluarkan umpan balik yang menghasilkan peluang perbaikan (*Opportunity for Improvements*) dan kekuatan (*Strengths*) Perusahaan untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan *improvement* baik proses maupun *improvement* hasil-hasil bisnis Perusahaan ditahun selanjutnya sehingga sangat diharapkan untuk skor KPKU di tahun mendatang dapat meningkat lagi.

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Besaran Remunerasi Gaji / Honorarium Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan Gaji Direktur Utama dan Faktor jabatan penetapan remunerasi ditetapkan dalam Peraturan Menteri No.PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

1. Dewan pengawas melakukan review atas kebijakan dan mekanisme penyusunan usulan remunerasi direksi perusahaan setiap tahunnya serta menguji kesesuaiannya dalam pelaksanaannya;
2. Dewan pengawas melakukan pengkajian atas usulan remunerasi direksi dalam penyusunan RKAP tahunan dengan pertimbangan, antara lain:
 - a. Ketentuan dalam peraturan menteri BUMN mengenai Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
 - b. Prognosa pencapaian kinerja dan KPI tahun sebelumnya;
 - c. Kemampuan keuangan perusahaan dan kewajarannya.
3. Dewan pengawas selaku Komite Remunerasi menyampaikan surat Usulan Remunerasi kepada Kementerian BUMN yang berisikan Usulan Remunerasi Gaji / Honorarium dan Tantiem tahun buku sebelumnya;
4. Setiap tahun Direksi dan Dewan Pengawas menerima jawaban dari Kementerian BUMN berupa Surat Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas.

From the report, the KPKU Evaluator Team issued feedback that resulted in opportunities for improvement (*Opportunity for Improvements*) and Company strengths to be used as a basis for improving both the process and the improvement of the Company's business results in the following year so that it is highly expected that the KPKU score in next year may increase again.

Remuneration of The Supervisory Board and The Board of Directors

The amount of remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors is determined based on the salary of the President Director and the factor of the position for determining the remuneration stipulated in Ministerial Regulation No.PER-01/MBU/05/2019 dated May 31, 2019 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration of the Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOE.

Proposal Procedure to Determine the Remuneration of the Board of Supervisors and Directors

1. The supervisory board reviews the policies and mechanisms for the preparation of remuneration proposals for company directors every year and tests their suitability in their implementation;
2. The supervisory board reviews the proposed remuneration for the directors in the preparation of the annual RKAP with the following considerations:
 - a. The provisions in the SOE ministerial regulation concerning Guidelines for Determining the Remuneration of the Directors, Commissioners and the Supervisory Board of SOE;
 - b. Prognosis for performance achievement and previous year's KPIs;
 - c. The company's financial capacity and fairness.
3. The supervisory board as the Remuneration Committee submits a Remuneration Proposal letter to the Ministry of SOE containing the Remuneration Recommendation for the previous financial year Salary/Honorarium and Tantiem;
4. Every year the Board of Directors and the Supervisory Board receive a response from the Ministry of SOE in the form of a Letter of Submission of Determination of the Remuneration for the Directors and the Supervisory Board.

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Struktur remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PeR-PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dengan komponen sebagai berikut:

1. Remunerasi Dewan Pengawas
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. THR;
 - d. Tantiem/Insentif Kinerja;
 - e. Pajak atas Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban Perusahaan; Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Pengawas.
2. Remunerasi Direksi
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. THR;
 - d. Tantiem/Insentif Kinerja;
 - e. Pajak atas Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Perusahaan; Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.

Adapun struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Pengawas dan Direksi dapat disampaikan sebagai berikut:

Remuneration Structure for the Board of Supervisors and Directors

The structure of the Board of Supervisors and Directors' remuneration refers to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-PER-01/MBU/05/2019 dated 31 May 2019 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of SOE with the following components:

1. Supervisory Board Remuneration
 - a. Honorarium;
 - b. Allowance;
 - c. THR;
 - d. Bonus/Performance Incentives;
 - e. Tax on Honorarium, Allowances and Facilities for the Supervisory Board is borne and borne by the Company; Meanwhile, taxes on bonuses/performance incentives for the Supervisory Board are borne and borne by each member of the Supervisory Board.
2. Remuneration for the Board of Directors
 - a. Salary;
 - b. Allowance;
 - c. THR;
 - d. Bonus/Performance Incentives;
 - e. Taxes on salaries, allowances and facilities for the Board of Directors are borne and borne by the Company; Meanwhile, taxes on bonuses/performance incentives for the Board of Directors are borne and borne by the respective Directors.

The remuneration structure and its components for the Supervisory Board and Board of Directors can be presented as follows:

Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas

Remuneration Structure for the Board of Directors and the Supervisory Board

	Faktor Jabatan tmt 2019 Position Factor TT 2019	Gaji/Honorarium Salary/ Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Asuransi Purnabakti Pension Insurance Allowance	THR Tunjangan hari raya	Tantiem Tantiem
Besaran Amount		Faktor Jabatan x Gaji Direktur Utama Position factor x President Director's salary	20% x Honorarium	27.500.000,-	25% x Gaji/Honorarium Salary/ Honorarium	1x Gaji Honorarium	Sesuai Penetapan Appropriate Determination
Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Board of Supervis	45%	V	V		V	V	V

Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas

Remuneration Structure for the Board of Directors and the Supervisory Board

	Faktor Jabatan tmt 2019 Position Factor TT 2019	Gaji/Honorarium Salary/Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Asuransi Purnabakti Pension Insurance Allowance	THR Tunjangan hari raya	Tantiem Tantiem
Besaran Amount		Faktor Jabatan x Gaji Direktur Utama Position factor x President Director's salary	20% x Honorarium	27.500.000,-	25% x Gaji/Honorarium Salary/Honorarium	1x Gaji Honorarium	Sesuai Penetapan Appropriate Determination
Anggota Dewan Pengawas Member of the Board of Supervisory	40,50%	V	V		V	V	V
Direktur Utama President Director	100%	V		V	V	V	V
Direktur SDM HR Director	90%	V		V	V	V	V
Direktur Director	85%	V		V	V	V	v

Pengungkapan Indikator untuk Penetapan Remunerasi Direktur Utama dan Perhitungan Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Lainnya

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019, gaji Direksi menjadi variabel utama sebagai perhitungan besaran gaji/honorarium bagi Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Lainnya. Besaran remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi, dalam hal ini gaji Direktur Utama sebagai variabel utama, ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku.

Disclosure of Indicators for Determining the Remuneration of the President Director and Calculating Remuneration for the Supervisory Board and Other Members of the Board of Directors

According to the Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/05/2019, the salary of the Board of Directors is the main variable as a calculation of the amount of salary/honorarium for the Supervisory Board and other members of the Board of Directors. The amount of remuneration for the Supervisory Board and Directors, in this case the salary of the President Director as the main variable, Determined by considering the Company's soundness level and applicable regulations.

Perhitungan Besaran Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi (Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/05/2019)

Calculation of the Amount of Remuneration for the Board of Supervisors and Directors
(In accordance with the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-PER-01/MBU/05/2019)

Direktur Utama President Director	: 100% (ditetapkan dengan menggunakan pedoman Kementerian BUMN) 100% (determined using the guidelines of the Ministry of SOE)
Direktur bidang Sumber Daya Manusia Director of Human Resources	: Sebesar 90% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 90% of the President Director's Salary/Tantiem/Performance Incentive
Direksi Lainnya Other Directors	: Sebesar 85% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 85% of the President Director's salary/bonus/performance incentive
Ketua Dewan Pengawas Ketua Dewan Pengawas	: Sebesar 45% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 45% of the President Director's Salary/Tantiem/Performance Incentive
Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	: Sebesar 90% dari Honorarium/Tantiem/Insentif Kinerja Ketua Dewan Pengawas 90% of the Honorarium/Tantiem/Performance Incentive for the Chairman of the Supervisory Board

Transparansi Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi 2019

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi berdasarkan surat keputusan di atas adalah sebagai berikut:

Transparency of the 2019 Supervisory Board and Board of Directors Remuneration

Information on the nominal amount of remuneration for the Supervisory Board and Board of Directors based on the above decision letter is as follows:

Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi 2019 Total Remuneration for the Board of Supervisors and Directors in 2019

	Jumlah Total (Rp)
Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas Total Remuneration for the Supervisory Board	7.020.702.760
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration for the Board of Directors	22.519.304.483
Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2019 Total Remuneration for the Board of Supervisory and Directors in 2019	29.540.007.243

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Rapat Dewan Pengawas

Rapat Dewan Pengawas dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau berdasarkan kebutuhan. Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Pengawas dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Dewan Pengawas. Risalah rapat di tandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh peserta yang hadir serta didistribusikan kepada semua anggota Dewan Pengawas yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Sepanjang 2019, Dewan Pengawas mengadakan Rapat Internal Dewan Pengawas sebanyak 13 (tiga belas) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Pengawas dalam rapat-rapat tersebut.

Meeting of The Supervisory Board and The Board of Directors Supervisory Board Meeting

The Supervisory Board Meeting is held regularly, at least once a month or based on need. Decisions made at the Supervisory Board meeting are well recorded and documented in the minutes of the Supervisory Board meeting. The minutes of the meeting are signed by the chairman of the meeting and all attendees and distributed to all members of the Supervisory Board who attended the meeting or not. Any dissenting opinion that occurs in a meeting will be included in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference in opinion.

In 2019, the Supervisory Board held 13 (thirteen) Internal Supervisory Board Meetings. Following are the agenda and minutes of meetings, attendance, and a summary of the level of attendance of the Supervisory Board at these meetings.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Pengawas pada Rapat Internal Dewan Pengawas

Recapitulation of the Attendance of the Supervisory Board at the Internal Meeting of the Supervisory Board

Dewan Pengawas The Board of Supervisory	Jumlah Wajib Rapat Number of Required Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance
Rizal Affandi Lukman	13	13	100
Djoko Hendratto	13	13	100
Sutanto	13	13	100
Dwi Pranoto	13	13	100
Muhammad Yusuf Ateh	12	12	100
Rata-rata Average			100

Risalah Rapat Internal Dewan Pengawas dan Kehadiran Dewan Pengawas

Minutes of Internal Meetings of the Supervisory Board and the Attendance of the Supervisory Board

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participant	Alasan Ketidakhadiran Dewan Pengawas yang Tidak Hadir Reasons for Absence of the Supervisory Board for Absence
28 Januari 2019 January 28, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi capaian kinerja bulanan s.d Bulan Desember 2018; Pembahasan Bidang Sistem Pengendalian Internal; Pembahasan Bidang Sistem Teknologi Informasi; Pembahasan Research and Development 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas, All Members of the Supervisory Board	-
		<ol style="list-style-type: none"> Evaluation of monthly performance achievements up to December 2018; Internal Control System Field Discussion; Discussion on Information Technology Systems; Discussion Research and 		
27 Februari 2019 February 27, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi capaian kinerja bulanan s.d Bulan Januari 2019; Pengawasan Bid. Pengadaan Barang dan Jasa Pengawasan Bid. Kepatuhan Perusahaan dalam Menjalankan Peraturan; Pengawasan Bid. Penerapan GCG; 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas All Members of the Supervisory Board	-
		<ol style="list-style-type: none"> Evaluation of monthly performance achievements up to January 2019; Bid Monitoring. Procurement of goods and services Bid Monitoring. Company Compliance in Implementing Regulations; Bid Monitoring. GCG implementation; 		
15 Maret 2019 March 15, 2019	Jakarta	Sosialisasi PP Nomor 6 Tahun 2019 Socialization of Government Regulation Number 6 Year 2019	Seluruh Anggota Dewan Pengawas All Members of the Supervisory Board	-
26 Maret 2019 March 26, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut Rakor bulan Januari 2019; Evaluasi capaian kinerja bulanan s.d Bulan Februari 2019; Pembahasan Laporan audit tahun buku 2018; Pembahasan Kinerja Divisi Managemen Risiko; Pembahasan Implementasi ERP. Pembahasan Kinerja Divisi Managemen Risiko; Pembahasan Implementasi ERP 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas All Members of the Supervisory Board	-
		<ol style="list-style-type: none"> Follow-up Coordination Meeting in January 2019; Evaluation of monthly performance achievements up to February 2019; Discussion on the 2018 financial year audit report; Discussion on the Performance of the Risk Management Division; ERP Implementation Discussion. Discussion on the Performance of the Risk Management Division; ERP Implementation Discussion.. 		

Risalah Rapat Internal Dewan Pengawas dan Kehadiran Dewan Pengawas

Minutes of Internal Meetings of the Supervisory Board and the Attendance of the Supervisory Board

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participant	Alasan Ketidakhadiran Dewan Pengawas yang Tidak Hadir Reasons for Absence of the Supervisory Board for Absence
15 April 2019 April 15, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan terkait Persiapan RPB Laporan Keuangan Tahun Buku 2018; Pembahasan Surat Direksi Terkait Direktur Keuangan PT Sicpa Peruri Securink; Pembahasan Kegiatan Dewas dan Organ Dewan Pengawas 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas All Members of the Supervisory Board	-
		<ol style="list-style-type: none"> Discussion related to RPB Preparation for the 2018 Financial Year Financial Statements; Discussion on the Directors' Letter Regarding the Finance Director of PT Sicpa Peruri Securink; Discussion on the activities of the Dewas and the Supervisory Board Organ 		
28 Mei 2019 May 28, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Pembagian Tugas Pengawasan Dewas Perum Peruri di Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan; Evaluasi capaian kinerja bulanan s.d Bulan April 2019 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas All Members of the Supervisory Board	-
		<ol style="list-style-type: none"> Division of Supervision Dewas Perum Peruri in the Parent Company and Subsidiaries; Evaluation of monthly performance achievements up to April 2019 		
26 Juni 2019 June 26, 2019	Jakarta	<p>Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan s.d Bulan Mei 2019;</p> <p>Discussion on the Evaluation of Monthly Performance Achievements up to May 2019;</p>	Seluruh Anggota Dewan Pengawas All Members of the Supervisory Board	-
31 Juli 2019 July 31, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Evaluasi capaian kinerja bulanan s.d Bulan Juni 2019; Pembahasan Laporan kinerja SPI; Pembahasan Laporan TI terkait Decision Support System (DSS) – ERP SAP. 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas All Members of the Supervisory Board	-
		<ol style="list-style-type: none"> Discussion on evaluation of monthly performance achievements up to June 2019; Discussion on SPI performance reports; Discussion of IT reports related to Decision Support System (DSS) - ERP SAP. 		
26 Agustus 2019 August 26, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Evaluasi capaian kinerja bulanan s.d Bulan Juli 2019; Pembahasan Laporan Kinerja Divisi Pengadaan Fasilitas Umum (Pengadaan Barang dan Jasa) 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas All Members of the Supervisory Board	-
		<ol style="list-style-type: none"> Discussion on evaluation of monthly performance achievements up to July 2019; Discussion on the Performance Report of the Public Facilities Procurement Division (Procurement of Goods and Services) 		

Risalah Rapat Internal Dewan Pengawas dan Kehadiran Dewan Pengawas

Minutes of Internal Meetings of the Supervisory Board and the Attendance of the Supervisory Board

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participant	Alasan Ketidakhadiran Dewan Pengawas yang Tidak Hadir Reasons for Absence of the Supervisory Board for Absence
24 September 2019 September 24, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Rancangan RKA Dewas 2020; Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan s.d Bulan Agustus 2019. <ol style="list-style-type: none"> Dewas 2020 draft RKA; Discussion on Evaluation of Monthly Performance Achievements up to August 2019. 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas All Members of the Supervisory Board	-
25 Oktober 2019 October 25, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja s.d Bulan September 2019; Pembahasan Optimalisasi Aset Perum Peruri. <ol style="list-style-type: none"> Discussion on the Evaluation of Performance Achievements up to September 2019; Discussion on Perum Peruri Asset Optimization. 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas All Members of the Supervisory Board	-
29 November 2019 November 29, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja s.d Bulan Oktober 2019; Pembahasan Rencana Bisnis Digital tahun 2020; Pembahasan Rencana Finished Banknotes. <ol style="list-style-type: none"> Discussion on Evaluation of Performance Achievements up to October 2019; Discussion on the 2020 Digital Business Plan; Discussion on the Finished Banknotes Plan. 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas All Members of the Supervisory Board	-
20 Desember 2019 December 20, 2019	Jakarta	Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja s.d Bulan November 2019; Discussion on Evaluation of Performance Achievements up to November 2019;	Seluruh Anggota Dewan Pengawas All Members of the Supervisory Board	-

Rapat Koordinasi: Rapat Koordinasi Dewan Pengawas dengan Mengundang Direksi

Selain rapat internal, dalam menyelenggarakan rapat yang sesuai dengan hal-hal yang akan dibicarakan, Dewan Pengawas dapat menyelenggarakan rapat dengan mengundang Direksi dan meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas.

Sepanjang 2019, rapat koordinasi yang dihadiri oleh Dewan Pengawas dan Direksi dilaksanakan sebanyak 15 (lima belas) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

Joint Meeting: Supervisory Board Coordination Meeting by Inviting the Board of Directors

In addition to internal meetings, in holding meetings in accordance with the matters to be discussed, the Supervisory Board may hold meetings by inviting the Board of Directors and asking the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Supervisors Meeting.

In 2019, joint meetings between the Supervisory Board and the Board of Directors were held 15 (fifteen) times. Following are the agenda and minutes of meetings, attendance, and a recapitulation of the attendance levels of the Board of Supervisors and Directors at these meetings.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi pada Rapat Koordinasi
Recapitulation of Attendance of the Supervisory Board and Directors at Joint Meetings

Dewan Pengawas dan Direksi Supervisory Board and Director	Jumlah Wajib Rapat Number of Required Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Presence
Dewan Pengawas Supervisory Board			
Rizal Affandi Lukman	15	15	100
Djoko Hendratto	15	15	100
Sutanto	15	15	100
Dwi Pranoto	15	15	100
Muhammad Yusuf Ateh	15	15	100
Direksi Board of Directors			
Dwina Septiani Wijaya	15	15	100
Saiful Bahri	15	15	100
Fajar Rizki	15	15	100
Winarsih Budiriani	15	15	100
Nungki Indraty	15	15	100
Rata-rata Average			100

Risalah Rapat Koordinasi Dewan Pengawas dan Direksi Serta Kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi pada Rapat Koordinasi

Minutes of Joint Meetings of the Supervisory Board and Directors and Attendance of the Supervisory Board and Directors at the Joint Meeting

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants
28 Januari 2019 January 28, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi capaian kinerja bulanan s.d Bulan Desember 2018; Pembahasan Bidang Sistem Pengendalian Internal; Pembahasan Bidang Sistem Teknologi Informasi; Pembahasan Research and Development. 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi All Members of the Supervisory Board and Directors
		<ol style="list-style-type: none"> Evaluation of monthly performance achievements up to December 2018; Internal Control System Field Discussion; Discussion on Information Technology Systems; Discussion of Research and Development. 	

**Risalah Rapat Koordinasi Dewan Pengawas dan
Direksi Serta Kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi pada Rapat Koordinasi**

Minutes of Joint Meetings of the Supervisory Board and Directors and
Attendance of the Supervisory Board and Directors at the Joint Meeting

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants
27 Februari 2019 February 27, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Nota Regularisasi; 2. Hasil Courtesy dengan Gubernur BI; 3. Hasil Kunjungan Anggota Dewas/Ketua Komite Audit ke Kawasan Produksi Karawang; 4. Laporan Temuan SPI; 5. Laporan Keuangan/Manajemen Tahun Buku 2017; 6. Laporan Kunjungan Direktur Utama dan Anggota Dewas Ke Sicpa, SA 7. Sosialisasi PP Nomor 6 Tahun 2019 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi All Members of the Supervisory Board and Directors
15 Maret 2019 March 15, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regularization Notes; 2. Results of Courtesy with the Governor of BI; 3. Results of the Visit of Dewas Members/Chairman of the Audit Committee to the Karawang Production Area; 4. Report on the Findings of the SPI; 5. Financial/Management Report for Fiscal Year 2017; 6. Report on the Visit of the Managing Director and Members of Dewas to Sicpa, SA 7. Socialization of Government Regulation Number 6 Year 2019 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi All Members of the Supervisory Board and Directors
26 Maret 2019 March 26, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut Rakor bulan Februari 2019; 2. Evaluasi capaian kinerja bulanan s.d Bulan Februari 2019; 3. Pembahasan Laporan audit tahun buku 2018; 4. Pembahasan Kinerja Divisi Manajemen Risiko; 5. Pembahasan Implementasi ERP. <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow-up Coordination Meeting in February 2019; 2. Evaluation of monthly performance achievements up to February 2019; 3. Discussion on the 2018 financial year audit report; 4. Discussion on the Performance of the Risk Management Division; 5. ERP Implementation Discussion. 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi All Members of the Supervisory Board and Directors
26 April 2019 April 26, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut Rakor bulan Maret 2019; 2. Evaluasi capaian kinerja bulanan s.d Bulan Maret 2019; 3. Pembahasan Permintaan Laporan Keuangan PT Sicpa Peruri Securink tahun 2018; 4. Pembahasan tindak lanjut Rencana Direksi terkait Kajian Persiapan Finished Banknotes; 5. Pembahasan Rencana Perjalan Dinas Luar Negeri Direksi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow-up Coordination Meeting in March 2019; 2. Evaluation of monthly performance achievements up to March 2019; 3. Discussion on PT Sicpa Peruri Securink's 2018 Financial Report Request; 4. Discussion on the follow-up plan of the Board of Directors related to the Finished Banknotes Preparation Study; 5. Discussion of the Board of Directors' Foreign Service Travel Plan. 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi All Members of the Supervisory Board and Directors
28 Mei 2019 May 28, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengenalan Dewan Pengawas; 2. Tindak lanjut Rakor bulan April 2019; 3. Evaluasi capaian kinerja bulanan s.d Bulan April 2019; <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisory Board Introduction Program; 2. Follow-up Coordination Meeting in April 2019; 3. Evaluation of monthly performance achievements up to April 2019; 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi All Members of the Supervisory Board and Directors
26 Juni 2019 June 26, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut Rakor Bulan Mei 2019; 2. Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan s.d Bulan Mei 2019; <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow-up Coordination Meeting in May 2019; 2. Evaluation of Monthly Performance Achievements up to May 2019; 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi All Members of the Supervisory Board and Directors
22 Juli 2019 July 22, 2019	Jakarta	Pembahasan Transformasi Perum Peruri Perum Peruri Transformation Discussion	Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi All Members of the Supervisory Board and Directors

**Risalah Rapat Koordinasi Dewan Pengawas dan
Direksi Serta Kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi pada Rapat Koordinasi**

Minutes of Joint Meetings of the Supervisory Board and Directors and
Attendance of the Supervisory Board and Directors at the Joint Meeting

Tanggal Date	Tempat Venue	Agenda	Peserta Participants
29 Juli 2019 July 29, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan s.d Bulan Juni 2019; 2. Pembahasan Laporan Kinerja SPI; 3. Pembahasan Laporan TI terkait Decision Support System (DSS) – ERP SAP. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Evaluation of Monthly Performance Achievements up to June 2019; 2. Discussion on SPI Performance Reports; 3. Discussion of IT reports related to Decision Support System (DSS) - ERP SAP. 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi All Members of the Supervisory Board and Directors
31 Juli 2019 July 31, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan s.d Bulan Juni 2019; 2. Pembahasan Laporan Kinerja SPI; 3. Pembahasan Laporan TI terkait Decision Support System (DSS) – ERP SAP. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Evaluation of Monthly Performance Achievements up to June 2019; 2. Discussion on SPI Performance Reports; 3. Discussion of IT reports related to Decision Support System (DSS) - ERP SAP. 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi All Members of the Supervisory Board and Directors
26 Agustus 2019 August 26, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut s.d Rakor Bulan Juli 2019; 2. Pembahasan Evaluasi capaian kinerja bulanan s.d Bulan Juli 2019; 3. Pembahasan Laporan Kinerja Divisi Pengadaan Fasilitas Umum (Pengadaan Barang dan Jasa) <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow-up to July 2019 Coordination Meeting; 2. Discussion on evaluation of monthly performance achievements up to July 2019; 3. Discussion on the Performance Report of the Public Facilities Procurement Division (Procurement of Goods and Services) 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi All Members of the Supervisory Board and Directors
24 September 2019 September 24, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan RKA Dewas 2020; 2. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan s.d Bulan Agustus 2019. <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewas 2020 draft RKA; 2. Discussion on Evaluation of Monthly Performance Achievements up to August 2019. 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi All Members of the Supervisory Board and Directors
25 Oktober 2019 October 25, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut s.d Rakor Bulan September 2019; 2. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja s.d Bulan September 2019; 3. Pembahasan Optimalisasi Aset Perum Peruri. <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow-up to September 2019 Coordination Meeting; 2. Discussion on Evaluation of Performance Achievements up to September 2019; 3. Discussion on Perum Peruri Asset Optimization. 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi All Members of the Supervisory Board and Directors
29 November 2019 November 29, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut s.d Rakor Bulan Oktober 2019; 2. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja s.d. Bulan Oktober 2019; 3. Pembahasan Rencana Bisnis Digital Tahun 2020; 4. Pembahasan Rencana Finished Banknotes. <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow-up s.d. October 2019 Coordination Meeting; 2. Discussion on Evaluation of Performance Achievement up to. October 2019; 3. Discussion on the 2020 Digital Business Plan; 4. Discussion on the Finished Banknotes Plan. 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi All Members of the Supervisory Board and Directors
20 Desember 2019 December 20, 2019	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut s.d Rakor Bulan November 2019; 2. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja s.d Bulan November 2019; <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow-up to November 2019 Coordination Meeting; 2. Discussion on Evaluation of Performance Achievements up to November 2019; 	Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi All Members of the Supervisory Board and Directors

Rapat Direksi

Direksi Perusahaan selalu mengadakan rapat secara berkala demi meningkatnya kinerja Perusahaan. Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membuat berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Perusahaan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Perusahaan.

Di sepanjang 2019, Direksi melaksanakan rapat internal sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

Board of Directors Meeting

The Company's Directors always hold regular meetings to improve the Company's performance. The Board of Directors Meeting is a meeting held by the Board of Directors to make various business decisions, evaluate the Company's performance and establish various policies in managing the Company.

Throughout 2019, the Board of Directors held 38 (thirty eight) internal meetings. Following are the agenda and minutes of meetings, attendance, and a summary of the attendance levels of the Directors at these meetings.

Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi

Recapitulation of Attendance of the Board of Directors at the Board of Directors Meeting

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Total of Required Meetings	Jumlah Kehadiran Total of Attendance	% Kehadiran %Attendance
Dwina Septiani Wijaya Direktur Utama/ <i>President Director</i>	38	38	100%
Saiful Bahri Direktur Operasi/ <i>Director of Operation</i>	38	32	84%
Fajar Rizki Direktur Pengembangan Usaha/ <i>Director of Business Development</i>	38	36	95%
Winarsih Budiriani Direktur SDM dan Umum/ <i>Director of HR an General Affairs</i>	38	36	95%
Nungki Indraty Direktur Keuangan/ <i>Director of Finance</i>	-	-	-
Rata-rata Average			93,5%

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Minutes and Attendance of the Board of Directors Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Direksi Attendance of the Board of Directors				
			DU	DK	DM	DS	DP
1.	11 Januari 2019 January 11, 2019	I. Direktur Utama President Director	V	V	V	V	V
		II. Direktur SDM & Umum - "Insentif" Non Utas Director of Human Resources & General Affairs - Non-THRead "Incentive"					
		III. Direktur SDM & Umum - Pensiun Dini Director of Human Resources & General Affairs - Early Retirement					
		IV. Direktur SDM & Umum - KPI 2018 Director of Human Resources & General Affairs - KPI 2018					
		V. Direktur Keuangan –Yapetri Finance Director -Yapetri					
2.	15 Januari 2019 January 15, 2019	I. Direktur Utama – Arahan President Director - Direction	V	V	V	V	V
		II. Direktur SDM & Umum - Insentif Semester II 2018 dan Jasa Produksi 2018. Director of Human Resources & General Affairs - 2018 Semester II Incentives and 2018 Production Services.					

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Minutes and Attendance of the Board of Directors Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Direksi Attendance of the Board of Directors				
			DU	DK	DM	DS	DP
3.	22 Januari 19 January 22, 2019	I. Direktur Utama - Arahan Penjelasan Strategy Map 2019 President Director - Direction Explanation of the 2019 Strategy Map	V	V	-	V	V
		II. Direktur SDM & Umum – Kaderisasi Director of Human Resources & General Affairs - regeneration					
		III. Direktur Pengembangan Usaha - Dukungan Peraturan dan Persiapan Holding NPNC Director of Business Development - Regulatory Support and Preparation of NPNC Holding					
		IV. Direktur Keuangan - Laporan Tindak Lanjut Dapetri Director of Finance - Dapetri Follow Up Report					
		V. Direktur Operasi - Laporan Mesin Nota Screen dan Perjalanan Dinas Ditjen Pajak Director of Operations - Report Machine Note Screen and DG Tax Office Travel					
4.	1 Februari 2019 February 1, 2019	I. Direktur Utama - Pengarahan President Director - Direction	V	Cuti Leave	V	V	V
		II. Direktur SDM & Umum - Kinerja Kadiv Semester II 2018 Director of Human Resources & General Affairs - Head of Division II 2018 Performance					
		III. Direktur SDM & Umum - Sidang Dewan Jabatan Human Resources & General Director - Board Session					
5.	8 Februari 2019 February 8, 2019	I. Direktur Utama - Pengarahan Diskusi Denda President Director - Briefing Discussion of Fines	V	V	V	V	Cuti Leave
		II. Direktur Pengembangan Usaha - Lini Internasional Director of Business Development - International Lines					
		III. Direktur Keuangan - Audit 2018 Finance Director - Audit 2018					
		IV. Direktur SDM & Umum - Pengelolaan Biaya SDM Director of Human Resources & General Affairs - Management of HR					
6.	18 Februari 2019 February 18, 2019	I. Direktur SDM & Umum - Konsultan SDM & Pensiun Dini Director of Human Resources & General Affairs - Consultant HR & Early Retirement	V	V	V	V	V
		II. Direktur Keuangan Direktur Pengembangan Usaha - Laporan Tindak Lanjut SPU Director of Finance Director of Business Development - Follow- up Report SPU					
7.	22 Februari 2019 February 22, 2019	I. Direktur Utama - Pengarahan (Posisi Strategy Map/Omti/KPI 2019) President Director - Briefing (Position Strategy Map/Omti/KPI 2019)	V	Sakit Sick	V	V	V
		II. Pembahasan Tenaga Professional Hire Discussion of Professional Hire Staff					

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Minutes and Attendance of the Board of Directors Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Direksi Attendance of the Board of Directors				
			DU	DK	DM	DS	DP
8.	28 Februari 2019 February 28, 2019	I. Direktur Utama – Pengarahan President Director - Briefing	V	V	V	V	V
		II. Direktur SDM & Umum - Laporan Tentang Bonus/Rencana Pembagian Jasa Produksi 2018 dan Kepala SPI Director of Human Resources & General Affairs - Report on Bonuses/2018 Production Service Distribution Plan and the Head of SPI					
		III. Direktur Keuangan - Efisiensi dan Optimalisasi Aset Director of Finance - Efficiency and Optimization of Assets					
		IV. Direktur Pengembangan Usaha - Optimalisasi Aset Director of Business Development - Asset Optimization					
		V. Direktur Operasi - Efisiensi Operasi Operations Director - Operations Efficiency					
9.	5 Maret 2019 March 5, 2019	I. Pembahasan Pembagian Bonus Jasa Produksi Discussion on Distribution of Bonuses Production Services	V	V	V	V	V
		II. Pembahasan Tantiem Dewas dan Direksi Discussion on Tantiem for Dewas and Directors					
		III. Kebijakan Struktur Gaji yang Baru New Salary Structure Policy					
10.	15 Maret 2019 March 15, 2019	I. Calender of Event Meeting Calendar of Event Meeting	V	V	V	V	V
11.	21 Maret 2019 March 21, 2019	I. Laporan Eagle Project Team Eagle Project Team Report	V	V	V	V	V
12.	29 Maret 2019 March 29, 2019	I. Laporan Renovasi Ruang Direksi Peruri Peruri Directors Room Renovation Report	V	V	V	V	V
		II. Laporan Rumah Kreatif Karawang Karawang Creative House Report					
13.	1 April 2019 April 1, 2019	I. Persiapan Rumah Kreatif Karawang Preparation for the Karawang Creative House	V	V	V	V	V
		II. Persiapan Peresmian Pengiriman Terakhir Paspors Srilanka Preparations for Inauguration of the Last Srilanka Passport Delivery					
14.	5 April 2019 April 5, 2019	I. Update Persiapan Rumah Kreatif Karawang dan Persiapan Peresmian Pengiriman Terakhir Paspors Srilanka Update on Preparation for Karawang Creative House and Preparation for the Inauguration of Last Srilanka Passport Delivery	V	V	V	V	Cuti Leave

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Minutes and Attendance of the Board of Directors Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Direksi Attendance of the Board of Directors				
			DU	DK	DM	DS	DP
15.	12 April 2019 April 12, 2019	I. Pembahasan Pemindahtanganan & Penghapusbukuan Lahan Untuk SPU BI Discussion on Transfer & Write-Off of Land for SPU BI	V	V	V	V	V
		II. Pembahasan Persiapan RUPS Anak Perusahaan Discussion on Subsidiary RUPS Preparation					
		III. RDPT					
		IV. Injeksi Modal Ke PTKP Capital Injection Into PTKP					
		V. Holding Percetakan dan Media Holding Printing And Media					
		VI. Commemorative Note & Coin Commemorative Note & Coin					
16.	8 Mei 2019 May 8, 2019	I. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Untuk Idul Fitri 1440h Payment of holiday allowances (THR) for Eid al-Fitr 1440h	V	V	V	RAPAT di KBUMN	V
		II. Pembayaran Jasa Produksi (JP) Tahun Buku 2018 Payment for Production Services (JP) for the 2018 Financial Year				Meeting at Ministry of SOE	
		III. Laporan Performance Level (PI) Untuk Pelaksana Sampai Dengan Kepala Seksi Performance Level Report (PI) For Implementers Up To Heads of Section					
		IV. Penyesuaian Gaji Pokok 2019 Adjustment of 2019 Basic Salary					
17	17 Mei 2019 May 17, 2019	I. Laporan Inisiatif Penambahan Fitur Sekuriti Hologram Hologram Security Feature Addition Initiative Report	V	-	V	V	-
		II. Usulan Perubahan Struktur Organisasi (STO) Direktorat Pengembangan Usaha Proposed Change in Organizational Structure (STO) of the Directorate of Business Development					
18	29 Mei 2019 May 29, 2019	I. Remunerasi Kepala Divisi Oleh DM Remuneration for Division Head By DM	V	V	V	V	V
		II. Mutasi Rotasi Penugasan Oleh DM Mutation Rotation of Assignment by DM					
		III. Laporan Perkembangan SPU Oleh DK SPU Development Report By DK					
		IV. Laporan Direktur Operasi Operations Director Report					
		V. Laporan Perjalanan Dinas Oleh DS Official Travel Report By DS					
		VI. Laporan SPI Tentang Produk Dies Plat Tera SPI Report About Dies Plate Tera Products					
19	20 Juni 2019 June 20, 2019	I. Progress Report Strategy Map Omti 2019	V	V	V	V	V
		II. Update Commemorative Banknotes 75 Tahun Indonesia Merdeka					

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Minutes and Attendance of the Board of Directors Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Direksi Attendance of the Board of Directors				
			DU	DK	DM	DS	DP
20	1 Juli 2019 July 1, 2019	I. Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Discussion of Follow-up Recommendations BPK II. Demo Penggunaan Digital Signature Demo of using Digital Signature III. Laporan Tentang Command Center Operasional Report About the Operational Command Center IV. Lain-Lain Etc	V	V	V	V	V
21	24 Juli 2019 July 24, 2019	I. Update Masing-Masing Direksi dan Diskusi Lanjutan Updates of Each Board of Directors And Further Discussion	V	V	V	V	V
22	1 Agustus 2019 August 1, 2019	I. Tindak Lanjut Radir Tentang Usulan Perubahan STO Direktorat Pengembangan Usaha (DS) Follow Up of Radir Regarding the Proposed Changes to the Directorate of Business Development (DS) STO II. Pemindahan Seksi Hubungan Karyawan Dari Divisi SDM/Departemen HRBP IR Ke Divisi Pengamanan/Departemen Pengamanan (DM) Transfer of the Employee Relations Section from the HR Division/HRBP IR Department to the Security Division/Security Department (DM) III. Usulan Penambahan Divisi Pengelolaan Aset & Investasi (DK) Proposed Addition to the Asset & Investment Management Division (DK) IV. Usulan Pembentukan Tim Counterpart Probis HSP (DS) Proposal to Form the Counterpart Probis HSP (DS) Team V. Usulan Pembentukan Tim Finished Banknotes (Dp) Proposed Formation of a Finished Banknotes (Dp) Team	V	V	V	V	V
23	28 Agustus 2019 August 28, 2019	I. Persiapan Customer Gathering, Peresmian Mbloc dan HUT Perusahaan Preparation for Customer Gathering, Inauguration of Mbloc and Company anniversary II. Pengadaan Mesin Coating Procurement of Coating Machines III. Lain – Lain Etc	V	V	Cuti Leave	V	V
24	5 September 2019 September 5, 2019	I. Cek Posisi Peruri Day 2019 Check the Position of Peruri Day 2019 II. Laporan Tindak Lanjut Kunjungan Ke Nepal Report on Follow-up Visit to Nepal	V	V	V	V	V

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Minutes and Attendance of the Board of Directors Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Direksi Attendance of the Board of Directors				
			DU	DK	DM	DS	DP
25	12 September 2019 September 12, 2019	I. Laporan Tentang Best Employee 2019 Report About the Best Employee 2019	V	V	V	V	V
		II. Laporan Tentang Belanja Modal 2020 Report on 2020 Capital Expenditure					
		III. Laporan Rkap 2020 Terkait Pencetakan Uang Rupiah 6,05 Miliar Bilyet dan Commemorative Note 75.000 Juta Bilyet Rkap 2020 Report Regarding Printing of Rupiah Currency of 6.05 Billion Bilyet and Commemorative Note 75,000 Million Bilyet					
26	2 Oktober 2019 October 2, 2019	I. Usulan Kajian Hukum NPNC Holding Proposed Legal Studies for NPNC Holding	V	V	V	V	V
		II. Pembuatan Nota Regulasi Untuk PPAT dan Penasehat Hukum Preparation of Regulatory Notes for PPAT and Legal Advisors					
		III. Lain – Lain Etc					
27	8 Oktober 2019 October 8, 2019	I. Dukungan Untuk Pengembangan Bisnis Digital Support for Digital Business Development	V	Dinas Service	V	V	V
		II. Dukungan SDM dan STO Support SDM And STO					
28	9 Oktober 2019 October 9, 2019	I. Pembahasan Penataan Struktur Organisasi (STO) Discussion of Organizational Structure Arrangement (STO)	V	V	V	V	V
29	15 Oktober 2019 October 15, 2019	I. Pembahasan Hcu 2020 Hcu 2020 discussion	V	V	V	V	V
30	30 Oktober 2019 October 30, 2019	I. Penunjukan PPAT Untuk Transaksi AJB SPU (DK Biro Legal) Appointment of PPAT for AJB SPU Transactions (DK Legal Bureau)	V	V	V	V	V
		II. Pembiayaan Manfaat Kesehatan Karyawan Paska Pensiun/Prolankesma (DM, Kadep Operasional SDM) Post-Retirement-Prolankesma Employee Health Benefits Financing (DM, Kadep Operasional SDM)					
		III. Strategy Map/Omti 2020-2021 Menuju Peruri Emas (Du Karo Corporate Planning dan Karo Transformasi & Pmo) Strategy Map/Omti 2020-2021 Towards Peruri Emas (Du Karo Corporate Planning and Karo Transformasi & Pmo)					
31	4 November 2019 November 4, 2019	I. Konfirmasi Kpk Tentang Gratifikasi dan Pembaruan Skep Tentang Gratifikasi Kpk Confirmation About Gratification And Skep Update About Gratuity	V	V	V	V	PDLN
32	5 November 2019 November 5, 2019	I. Pengawasan Direksi Komisaris Anak Perusahaan Managing Directors Commissioners of Subsidiaries	V	V	V	V	PDLN

Risalah dan Kehadiran Rapat Direksi

Minutes and Attendance of the Board of Directors Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Direksi Attendance of the Board of Directors				
			DU	DK	DM	DS	DP
33	12 November 2019 November 12, 2019	I. Skenario Rapim Iv 2019 (Hcs) Iv 2019 Rapim Screenplay (Hcs)	V	V	V	V	V
		II. Strategi Peruri Emas 2020-2021 Melalui Keberlangsungan Bisnis Berkelanjutan (Du) Peruri Emas Strategy 2020-2021 through Sustainable Business Sustainability (Du)					
		III. Penempatan Pengangkatan Management Trainee (DM) Management Trainee (DM) Placement Appointment					
34	19 November 2019 November 19, 2019	I. Prognosa Rkap 2019 Sebagai Konsekuensi Transaksi SPU BI dan Antisipasi Rkap 2020 (DK, Kadiv Keutansi dan Nara Sumber DM) Prognosis Rkap 2019 As a Consequence of SPU BI Transactions and Anticipation of Rkap 2020 (DK, Head of Finance Division and DM Resource Persons)	V	V	V	V	PDLN
35	27 November 2019 November 27, 2019	I. Pembaharuan Regulasi Internal Untuk Gratifikasi (HRM) Renewal of Internal Regulations for Gratuities (HRM)	V	V	V	V	V
		II. Arahan Tentang Antisipasi Implementasi Finished Banknotes (DU) Directions Regarding Anticipation of the Implementation of Finished Banknotes (DU)					
		III. Laporan Solusi Keuangan Untuk Transaksi SPU (DK) Financial Solution Reports for SPU (DK) Transactions					
36	3 Desember 2019 December 3, 2019	I. Usulan Pembuatan Booklet SBU Uang RI (DP) Proposal for Making the SBU Uang (DP) Booklet	V	V	V	PDLN	V
		II. Laporan Desain Commemorative Notes & Uang Rupiah (DP, Kadep Desain & Proof) Design Report Commemorative Notes & Rupiah Currency (DP, Kadep Design & Proof)					
		III. Lain - Lain. Etc.					
37	4 Desember 2019 December 4, 2019	I. Diskusi Tentang Penguatan Bisnis Utama dan Pengembangan Bisnis Baru Discussion on Strengthening Main Businesses and Developing New Businesses	V	V	V	V	V
38	9 Desember 2019 December 9, 2019	I. Pembahasan Surat Pembatalan Tender Pada Perusahaan Umum Percetakan Uang RI Dari KBA Notasys yang Disampaikan Melalui Kuasa Hukum KBA "Surat KBA" (DM dan Kadiv Dafasum) Discussion of Tender Cancellation Letters at Public Companies that Print Real Money from KBA Notasys Delivered Through KBA's Legal Counsel "Surat KBA" (DM and Kadiv Dafasum)	V	V	V	V	V

DU: Direktur Utama

DK: Direktur Keuangan

DM: Direktur SDM dan Umum

DS: Direktur Pengembangan Usaha

DP: Direktur Produksi

DU: President Director

DK: Director of Finance

DM: Director of HR and General Affairs

DS: Director of Business Development

DP: Director of Production

Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Informasi tentang Pemegang Saham Utama/ Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki seluruh saham Perusahaan atau sebesar 100,00%. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Utama/ Pengendali

Pemegang Saham Pengendali, Dewan Pengawas dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang dan hak masing-masing.

Pengungkapan hubungan afiliasi mencakup hubungan keluarga dan hubungan keuangan. Bentuk hubungan keuangan termasuk diantaranya hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsbnya; sementara bentuk hubungan keluarga mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar dan sebagainya.

Disclosure of Affiliated Relationship Between The Board of Directors, The Supervisory Council and Main and/or Controllers

Information about the Main/Controlling Shareholders to the Name of the Final Owner

As previously described, the Company's Main/Controlling Shareholder is the Government of the Republic of Indonesia, which owns all of the Company's shares or 100.00%. In accordance with Government Regulation no. 41 of 2003 concerning the Delegation of the Position, Duties and Authority of the Minister of Finance to Limited Liability Companies (Persero), Public Companies (PERUM) and Service Companies (PERJAN) to the State Minister for State-Owned Enterprises, and Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises and the State Gazette of the Republic of Indonesia; Proxy of the Company's Shareholders is the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE).

Disclosure of Affiliation Relations between the Board of Directors, the Supervisory Board and Major/Controlling Shareholders

Controlling Shareholders, Supervisory Board and Board of Directors respect each other in the implementation of their respective duties, responsibilities and authorities in accordance with laws and regulations and the Articles of Association. The Supervisory Board and the Company's Board of Directors have work guidelines and procedures that state, among other things, their respective responsibilities, obligations, powers and rights.

Disclosure of affiliated relationships includes family relationships and financial relationships. Forms of financial relationships including accounts receivable, business cooperation, etc.; meanwhile, the form of family relationship includes special relationships especially those caused by blood ties such as husband/wife/children/parents/siblings/in-laws, and so on.

	Hubungan Afiliasi dengan Affiliate With		
	Dewan Pengawas Supervisory Board	Direksi Board of Directors	Pemerintah Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan) Indonesian Government (Main/ Controlling Shareholder of the Company)
Dewan Pengawas/Supervisory Board			
Rizal Affandi Lukman	x	x	x
Djoko Hendratto	x	x	x

	Hubungan Afiliasi dengan Affiliate With		
	Dewan Pengawas Supervisory Board	Direksi Board of Directors	Pemerintah Indonesia (Pemegang Saham Utama/ Pengendali Perusahaan) Indonesian Government (Main/ Controlling Shareholder of the Company)
Sutanto	x	x	x
Dwi Pranoto	x	x	x
Muhammad Yusuf Ateh	x	x	x
Direksi Board of Directors			
Dwina Septiani Wijaya	x	x	x
Saiful Bahri	x	x	x
Fajar Rizki	x	x	x
Winarsih Budiriani	x	x	x
Gandung Anggoro Murdani	x	x	x

v = terdapat adanya hubungan | x = tidak terdapat adanya hubungan

v = has an affiliation | x = has no affiliation

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi

Seluruh Dewan Pengawas dan Direksi tidak diperbolehkan merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku terkait penerapan GCG. Rangkap jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Disclosure of The Summary of Office of The Supervisory Board and The Board of Directors

All Boards of Supervisors and Directors are not allowed to hold concurrent positions which are prohibited by applicable laws and regulations regarding the implementation of GCG. The concurrent positions of the Company's Supervisory Board and Directors can be seen in the table below:

Dewan Pengawas dan Direksi Supervisory Board and Board of Directors	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Management on other Company/Institution		
	Sebagai Anggota Dewan Pengawas As a member of Supervisory Board	Sebagai Anggota Direksi As a member of Board of Directors	Jabatan Lainnya Other Position
Dewan Pengawas Supervisory Board			
Rizal Affandi Lukman	x	x	v
Djoko Hendratto	x	x	v
Sutanto	x	x	v
Dwi Pranoto	x	x	v
Muhammad Yusuf Ateh	x	x	v
Direksi Board of Directors			
Dwina Septiani Wijaya	x	x	x
Saiful Bahri	x	x	x
Fajar Rizki	x	x	x
Winarsih Budiriani	x	x	x
Gandung Anggoro Murdani	x	x	x

v = ada / x = tidak ada

v = there is / x = there is no

Rangkap jabatan Dewan Pengawas dan Direksi di luar Perusahaan adalah sebagai berikut:

The concurrent positions of the Supervisory Board and Directors outside the Company are as follows:

Dewan Pengawas dan Direksi yang Memiliki Rangkap Jabatan Supervisory Board and Board of Directors who has Concurrent Position	Jabatan pada Perusahaan/Institusi Lain Position in Other Company/Institution
Dewan Pengawas/Supervisory Board	
Rizal Affandi Lukman	Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputy for International Economic Cooperation, Ministry Coordinator for Economic Affairs
Djoko Hendratto	Direktur Sistem Manajemen Investasi (SMI), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Director of Investment Management Systems (SMI), Directorate General Treasury, Ministry of Finance
Sutanto	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Intelijen Negara / Kalakhar Botasupal Expert Staff for Legal Affairs and Human Rights of the Intelligence Agency Country/Kalakhar Botasupal
Dwi Pranoto	Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Regional, Bank Indonesia Executive Director, Head of Regional Departments, Bank of Indonesia
Muhammad Yusuf Ateh	Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Head of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
Direksi/Board of Directors	
Dwina Septiani Wijaya	Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan yang mengandung benturan kepentingan di Perusahaan maupun Instansi lainnya All Directors do not have concurrent positions that contain conflicts of interest in the company or other institutions
Saiful Bahri	
Fajar Rizki	
Winarsih Budiriani	
Gandung Anggoro Murdani	

Rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas pada Pemerintahan dan Kementerian Negara Republik Indonesia, merupakan bagian dari representasi pengawasan oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku entitas pemilik akhir atas pengurusan Perusahaan oleh Direksi. Seluruh rangkap jabatan telah memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Concurrent positions as members of the Supervisory Board in the Government and the State Ministry of the Republic of Indonesia are part of the oversight representation by the Government of the Republic of Indonesia as the final owner entity of the management of the Company by the Board of Directors. All concurrent positions have met the prevailing laws and regulations.

Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Pengawas dan Direksi

Di bawah ini disajikan transparansi kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan dan Direksi dan kepemilikan 5% atau lebih oleh Dewan Pengawas dan Direksi di emiten atau perusahaan publik. Transparansi kepemilikan saham oleh Dewan Pengawas dan Direksi ini menjadi bagian dari upaya Perusahaan untuk memberikan informasi terkait potensi benturan kepentingan.

Share Ownership Disclosure of The Supervisory Board and The Board of Directors

Below is presented the transparency of the Company's share ownership by the Supervisory Board and ownership of 5% or more by the Board of Trustees and Directors in issuers or public companies. Transparency of share ownership by the Supervisory Board and Directors is part of the Company's efforts to provide information regarding potential conflicts of interest.

Nama Name	Saham Peruri Peruri Shares		Saham Perusahaan Lain (>5%) Other Company Shares (>5%)	
	Nilai Amount	Persen Percentage	Nilai Amount	Persen Percentage
Dewan Pengawas/Supervisory Board				
Rizal Affandi Lukman				
Djoko Hendratto				
Sutanto		Nihil Nil		Nihil Nil
Dwi Pranoto				
Muhammad Yusuf Ateh				

Nama Name	Saham Peruri Peruri Shares		Saham Perusahaan Lain (>5%) Other Company Shares (>5%)	
	Nilai Amount	Persen Percentage	Nilai Amount	Persen Percentage
Direksi/Board of Directors				
Dwina Septiani Wijaya				
Saiful Bahri				
Fajar Rizki		Nihil Nil		Nihil Nil
Winarsih Budiriani				
Gandung Anggoro Murdani				

Perusahaan tidak memiliki kebijakan terkait kepemilikan saham oleh Manajemen, oleh sebab itu tidak ada Dewan Pengawas dan Direksi yang memiliki saham Perusahaan.

The company does not have a policy regarding share ownership by management, therefore no Supervisory Board and Directors own the Company's shares.

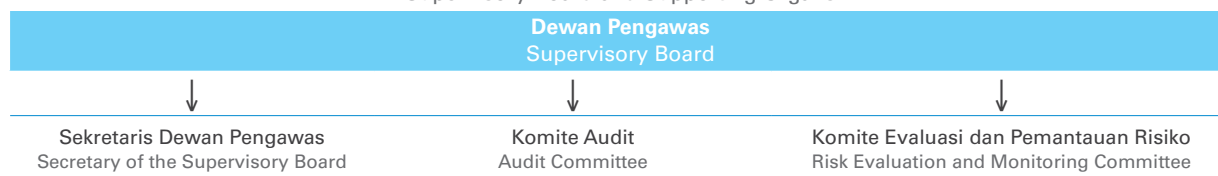
ORGAN PENDUKUNG DEWAN PENGAWAS

dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, pemberian saran serta rekomendasi, Dewan Pengawas dibantu oleh 3 (tiga) organ, yaitu Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit, serta Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko.

SUPPORT ORGANTS OF THE SUPERVISORY COUNCIL

In carrying out its supervisory duties and responsibilities, providing advice and recommendations, the Supervisory Board is assisted by 3 (three) organs, namely the Supervisory Board Secretary, the Audit Committee, and the Risk Evaluation and Monitoring Committee.

Dewan Pengawas dan Organ Pendukung Supervisory Board and Supporting Organs



Sekretaris Dewan Pengawas

dalam rangka membantu kelancaran tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas membentuk Sekretaris Dewan Pengawas dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya. Tugas dan kewajiban Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secretary of The Supervisory Council

In order to assist the smooth running of its duties and responsibilities, the Supervisory Board forms the Secretary of the Supervisory Board and is responsible to the Supervisory Board to assist the smooth implementation of its duties. The duties and obligations of the Secretary of the Supervisory Board are determined by the Supervisory Board in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.

Ketentuan Masa Jabatan

Ketentuan Masa Jabatan Sekretaris Dewan Pengawas yang ditetapkan Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurasi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Terms of Service Period

Provisions for the term of office of the Supervisory Board Secretary stipulated by the Supervisory Board are a maximum of 3 (three) years and may be reappointed for a maximum of 2 (two) years without limiting the Supervisory Board's right to dismiss him at any time.

Pejabat Sekretaris Dewan Pengawas

Sekretaris Dewan Pengawas hingga tanggal 31 Oktober 2019 dijabat oleh Rugun Hutapea. Namun saat ini dijabat oleh Khasan Anwari berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas No. SK-17/DP/XI/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

Secretary of the Supervisory Board

The Supervisory Board Secretary until October 31, 2019 is held by Rugun Hutapea. However, currently Khasan Anwari is currently in charge based on the Supervisory Board Decree No. SK-17/DP/XI/2019 dated October 28, 2019.

Khasan Anwari Sekretaris Dewan Pengawas *Secretary of the Supervisory Board*

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 34 tahun
Kelahiran Banyumas 1 Januari 1984

Personal data

Indonesian citizens
Age 34 years
Born in Banyumas January 1, 1984

Pendidikan

S1, Universitas Indonesia (2007)

Education

S1, University of Indonesia (2007)

Pengalaman Kerja

- Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Ib-1 (9 Januari 2019 – sekarang)
- Plt. Kepala Subbidang Pengembangan Bisnis BUMN (1 Juni 2018 – 8 Januari 2019)
- Kepala Subbidang Perencanaan Strategis Bisnis BUMN (22 Oktober 2015 – 8 Januari 2019)
- Analis Manajemen Kinerja (20 Mei 2014 – 21 Oktober 2015)

Work experience

- Head of Financial Services, Survey Services and Consultant Ib-1 Sub-Sector (9 January 2019 - present)
- Plt. Head of SOE Business Development Subdivision (1 June 2018 - 8 January 2019)
- Head of the SOE Business Strategic Planning Subdivision (22 October 2015 - 8 January 2019)
- Performance Management Analyst (20 May 2014 - 21 October 2015)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Pengawas

dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dewan pengawas memiliki pedoman kerja yang tertuang pada Charter Sekretaris Dewan Pengawas. Berdasarkan pada charter tersebut tugas dari sekretaris dewan pengawas adalah:

1. Mempersiapkan rapat;
2. Membuat risalah rapat dewan pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen dewan pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun rancangan RKA dewan pengawas;
5. Menyusun rancangan laporan dewan pengawas;
6. Melaksanakan tugas lain dari dewan pengawas.

Tugas lain sekretaris dewan pengawas sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa dewan pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi secara berkala yang dibutuhkan oleh dewan pengawas;
3. Mengkoordinasikan anggota komite dewan pengawas jika diperlukan;
4. Sebagai penghubung dewan pengawas dengan pihak lain.

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Supervisory Board

In carrying out his duties, the secretary of the supervisory board has work guidelines set out in the Supervisory Board Secretary Charter. Based on the charter, the duties of the supervisory board secretary are:

1. Prepare for the meeting;
2. Prepare minutes of meeting of the supervisory board in accordance with the provisions of the company's articles of association;
3. Administer documents of the supervisory board, both incoming and outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Prepare a draft RKA for the supervisory board;
5. Prepare a draft report for the supervisory board;
6. Carry out other duties of the supervisory board.

Other duties of the supervisory board secretary are as follows:

1. Ensure that the supervisory board complies with laws and regulations and applies GCG principles;
2. Provide regular information required by the supervisory board;
3. Coordinate the committee members of the supervisory board as needed;
4. As a liaison for the supervisory board with other parties.

Komite Audit

Guna membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan, Perusahaan membentuk Komite Audit yang memberikan opini profesional dan independen kepada Dewan Pengawas mengenai laporan atau hal-hal lain yang diajukan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas. Tugas komite ini termasuk memeriksa laporan dari fungsi Audit Internal dan memberikan argumen mendasar terkait pengendalian internal yang dijalankan di seluruh unit Perusahaan, menelaah laporan kepada pihak luar, serta mengevaluasi sistem pelaporan pelanggaran/*whistleblowing system*. Komitmen Komite Audit dijalankan dengan fokus pada efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risk assessment* dan pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang No. 19 tahun 2003, pasal 70, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite Audit dibentuk untuk membantu dewan pengawas dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap direksi dalam tata kelola perusahaan.

Komite Audit Peruri berada di bawah Dewan Pengawas. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komite Audit berpedoman dan telah memiliki Komite Audit Charter. Keberadaan Komite Audit dapat Dewan Pengawas dalam meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham, calon investor dan pemerintah terhadap jalannya pengurusan Perusahaan secara efektif dan optimal.

Kriteria dan Pengangkatan Anggota Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2006, tentang Komite Audit bagi BUMN, anggota Komite Audit dipersyaratkan memiliki beberapa kriteria:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersangkutan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.

Audit Committee

In order to assist the Supervisory Board in carrying out its supervisory duties, the Company has formed an Audit Committee which provides professional and independent opinion to the Supervisory Board regarding reports or other matters submitted by the Board of Directors to the Supervisory Board. The duties of this committee include examining reports from the Internal Audit function and providing basic arguments regarding internal control implemented in all Company units, reviewing reports to external parties, and evaluating the whistleblowing system. The Audit Committee's commitment is carried out with a focus on the effectiveness of corporate governance, internal control, risk assessment, and overall management of the Company.

Based on the provisions of Law No. 19 of 2003, article 70, concerning State-Owned Enterprises (SOE), is obliged to form an audit committee. The Audit Committee was formed to assist the supervisory board in carrying out supervisory duties and providing advice to the board of directors in corporate governance.

The Peruri Audit Committee is under the Supervisory Board. In carrying out its duties, the Audit Committee is guided by and has an Audit Charter Committee. The existence of the Audit Committee can be the Supervisory Board in increasing the trust of Shareholders, potential investors and the government in the management of the Company effectively and optimally.

Criteria and Appointment of Audit Committee Members

Based on the Regulation of the Minister of SOE Number PER-05/MBU/2006, regarding the Audit Committee for SOE, members of the Audit Committee are required to have several criteria:

1. Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/inspection;
2. Has no personal interest/relationship that could cause a negative impact and conflict of interest on the State Owned Enterprise (SOE) concerned;
3. Able to communicate effectively.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Audit 2019

Susunan Komite Audit Januari 2019 s.d 13 Mei 2019 sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nomor & Tanggal SK Number & Date of Decree
1.	Erna Wijayanti	Ketua Chairman	Risalah Rapat internal tanggal 25 Juli 2017 SK Dewan Pengawas No. SK-04/DP/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 SK Dewan Pengawas No. SK-07/DP/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 Minutes of internal meeting dated 25 July 2017 Supervisory Board Decree No. SK-04/DP/VII/2018 July 19, 2018 Supervisory Board Decree No. SK-07/DP/XII/2018 December 6, 2018
2.	Yanto Sugianto	Anggota Member	SK Dewan Pengawas No. SK-02/DP/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 SK Dewan Pengawas No. SK-05/DP/IX/2018 tanggal 28 September 2018 SK Dewan Pengawas No. SK-05/DP/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 SK Dewan Pengawas No. SK-16/DP/IX/2019 Tanggal 27 September 2019 Supervisory Board Decree No. SK-02/DP/X/2015 October 6, 2015 Supervisory Board Decree No. SK-05/DP/IX/2018 September 28, 2018 Supervisory Board Decree No. SK-05/DP/III/2019 March 25, 2019 Supervisory Board Decree No. SK-16/DP/IX/2019 September 27, 2019
3.	Sufi Safitri Nurwidiati	Anggota Member	SK Dewan Pengawas No. SK-05/DP/IX/2017 tanggal 22 September 2017 Dewas Decree No. SK-05/DP/IX/2017 September 22, 2017

Number, Composition and Arrangement of the Audit Committee in 2019

The composition of the Audit Committee in January 2019 to May 13 2019 is as follows:

Susunan Komite Audit 13 Mei 2019 s.d 31 Desember 2019 :

The composition of the Audit Committee from 13 May 2019 to 31 December 2019:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nomor & Tanggal SK Number & Date of Decree
1.	Dwi Pranoto	Ketua Chairman	SK Dewan Pengawas No. SK-09/DP/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 Supervisory Board Decree No. SK-09/DP/V/2019 dated May 28, 2019
2.	Yanto Sugianto	Anggota Member	SK Dewan Pengawas No. SK-02/DP/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 SK Dewan Pengawas No. SK-05/DP/IX/2018 tanggal 28 September 2018 SK Dewan Pengawas No. SK-05/DP/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 SK Dewan Pengawas No. SK-16/DP/IX/2019 Tanggal 27 September 2019 Supervisory Board Decree No. SK-02/DP/X/2015 October 6, 2015 Supervisory Board Decree No. SK-05/DP/IX/2018 September 28, 2018 Supervisory Board Decree No. SK-05/DP/III/2019 March 25, 2019 Supervisory Board Decree No. SK-16/DP/IX/2019 September 27, 2019
3.	Sufi Safitri Nurwidiati	Anggota Member	SK Dewan Pengawas No. SK-05/DP/IX/2017 tanggal 22 September 2017 Supervisory Board Decree No. SK-05/DP/IX/2017 September 22, 2017

Profil masing-masing anggota Komite Audit dapat dilihat di bawah ini.

The profiles of each member of the Audit Committee can be seen below.

Dwi Pranoto

Ketua Komite Audit/ Anggota Dewan Pengawas

Chairman of the Audit Committee/Member of the Supervisory Board

Profil Ketua Komite Audit Dwi Pranoto dapat dilihat bagian profil Dewan Pengawas pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

The profile of the Chairman of the Audit Committee, Dwi Pranoto, can be seen in the profile section of the Supervisory Board in the Company Profile chapter of this Annual Report

Sufi Safitri Nurwidiati

Anggota Komite Audit

Audit Committee Members

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 59 tahun

Personal data

Indonesian citizens
59 years old

Pendidikan

- Qualified Internal Auditor (2000).
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Indonesia (1986).

Education

- Qualified Internal Auditor (2000).
- Bachelor of Economics from the Christian University of Indonesia (1986).

Pengalaman Kerja

- Asisten Direktur pada Departement Audit Intern (DAI) Bank Indonesia.
- Kepala Biro pada YPPI (Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia).
- Auditor pada beberapa Departemen di Bank Indonesia, termasuk Departemen Pengadaan Strategis, Departemen Pengelolaan Uang dan Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter.
- Auditor pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam Negeri di bawah Departemen Regional.
- Auditor pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri sebagai auditor pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York.
- Audit investigasi terhadap kasus fraud, baik pelanggaran terhadap sistem maupun terhadap Tata Tertib di Bank Indonesia.

Work experience

- Assistant Director at the Internal Audit Department (DAI) Bank Indonesia.
- Head of Bureau at YPPI (Indonesian Banking Development Foundation).
- Auditor at several Departments at Bank Indonesia, including the Department of Strategic Procurement, Department of Money Management, and Department of Economic and Monetary Policy.
- Auditor at Bank Indonesia Domestic Representative Offices under Regional Departments.
- Auditor at Bank Indonesia Representative Offices Abroad as auditor at Bank Representative Offices Indonesia New York.
- Investigative audit of fraud cases, both violations of the system and the Code of Conduct at Bank Indonesia.

Yanto Sugianto

Anggota Komite Audit

Audit Committee Members

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 65 tahun

Personal data

Indonesian citizens
65 years old

Pendidikan

- Sarjana Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Unpad, Bandung (1982).
- Magister Manajemen Universitas Widyatama, Bandung (2009).

Education

- Bachelor of Accounting (S1), Faculty of Economics, Padjadjaran University, Bandung (1982).
- Master of Management, Widyatama University, Bandung (2009).

Pengalaman Kerja

- Konseptor instruksi mendikbud Nomor 1 Tahun 2011, tentang Rencana Aksi Kemendikbud Menuju Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Inspektur II Bidang Pengawasan Pendidikan Dasar dan Balitbang pada Inspektorat Jenderal Kemendikbud (2012- 2015).
- Inspektur Investigasi pada Inspektorat Jenderal Kemendikbud (2010- 2012).
- Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
- Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Jabar (2008-2010).
- Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat di Perwakilan BPKP Provinsi Jabar (2006-2007).

Work experience

- Education and Culture Minister's Instruction Drafter No. 1 of 2011, concerning the Ministry of Education and Culture's Action Plan Towards Financial Statements with Unqualified Opinion (WTP).
- Inspector II for Basic Education Supervision and Balitbang at the Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture (2012-2015).
- Inspector of Investigation at the Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture (2010-2012).
- Head of Operational Supervision
- Regional Government Accountability at BPKP Representatives of West Java Province (2008-2010).
- Head of Central Government Agency Supervision Division at BPKP Representatives of West Java Province (2006-2007)

Pedoman Kerja Komite Audit

Dewan Pengawas telah menetapkan Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit yang secara berkala ditinjau dan diperbarui sesuai dengan perkembangan skala bisnis dan organisasi Perusahaan. Piagam Komite Audit berisi Pedoman Kerja Komite Audit yang mencakup visi dan misi, fungsi, peran dan tanggung jawab, tugas, hubungan dengan pihak terkait, keanggotaan, persyaratan keanggotaan, rapat, remunerasi dan anggaran, kode etik, serta pelaporan dan evaluasi kerja Komite Audit.

Pedoman kerja Komite Audit, sesuai dengan Komite Audit Charter yang disempurnakan dan telah mendapatkan pengesahan dewan pengawas melalui Surat Keputusan No. SK-07/DP/XII/2018 pada tanggal 21 Desember 2018, mengatur beberapa hal yaitu sebagai berikut:

Tugas Komite Audit

Secara umum sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas No. SK-07/DP/XII/2018 pada tanggal 21 Desember 2018 tugas Komite Audit adalah membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pengawas, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan pengawas serta tugas-tugas dewan pengawas lainnya;
6. Berdasarkan instruksi dewan pengawas melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam perusahaan dan bila diperlukan meminta bantuan direksi dalam proses penunjukannya;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dewan pengawas.

Audit Committee Work Guidelines

The Supervisory Board has established an Audit Committee Charter which is regularly reviewed and updated in accordance with developments in the scale of the Company's business and organization. The Audit Committee Charter contains the Audit Committee Work Guidelines covering the vision and mission, functions, roles and responsibilities, duties, relationships with related parties, membership, membership requirements, meetings, remuneration and budget, code of ethics, and reporting and evaluation of the Audit Committee's work.

The Audit Committee work guidelines, in accordance with the Audit Committee Charter which was revised and approved by the supervisory board through Decree No. SK-07/DP/XII/2018 on December 21, 2018, regulates several things, namely as follows:

Duties of the Audit Committee

In general, according to the Supervisory Board Decree No. SK-07/DP/XII/2018 on December 21, 2018, the task of the Audit Committee is to assist the smooth implementation of the duties of the Supervisory Board, with the following information:

1. Ensuring the effectiveness of the Internal Control System and the effectiveness of the implementation of the duties of the external and internal auditors;
2. Assessing the implementation of activities as well as the results of audits carried out by the Internal Control Unit and external auditors;
3. Provide recommendations regarding the improvement of the management control system and its implementation;
4. Ensure that there is a satisfactory evaluation procedure for all information released by the company;
5. Identify things that require the attention of the supervisory board and other duties of the supervisory board;
6. Based on the instructions of the supervisory board, the process of appointing prospective external auditors in accordance with the provisions of the procurement of goods and services within the company and if necessary, requesting assistance from the board of directors in the appointment process;
7. Carry out other duties assigned by the supervisory board.

Wewenang Komite Audit

Berdasarkan Charter, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memiliki akses terhadap catatan akuntansi, dokumen, data penunjang dan informasi sumber daya lainnya mengenai Peruri, sepanjang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
2. Berkomunikasi langsung dengan pegawai termasuk dengan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawabnya;
3. Meminta informasi mengenai RKAP dan pelaksanaannya (laporan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan), sistem pengendalian intern, Standard Operating Procedure (SOP) dan instruksi kerja yang terkait dengan operasi perusahaan, manajemen risiko, rencana kerja tahunan SPI, laporan hasil audit SPI serta dokumen dan atau informasi lain yang berkaitan dengan tugas-tugas komite audit;
4. Mendapatkan informasi dari sekretaris dewan pengawas berkaitan dengan:
 - a. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan dewan pengawas;
 - b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan direksi dalam mengelola perusahaan;
 - c. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari dewan pengawas sehubungan dengan tindakan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direksi;
5. Komite audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan, baik kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas komite audit.

Independensi Komite Audit

Komite Audit bertindak mandiri (independen) dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil kerjanya dan hanya bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam Piagam Komite audit adalah bahwa seluruh anggota Komite Audit tidak boleh memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi dengan anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.

Audit Committee Authority

Based on the Charter, the Audit Committee has the following powers:

1. Have access to accounting records, documents, supporting data and other resource information regarding Peruri, as long as necessary for the performance of duties;
2. Communicate directly with employees including those who carry out the internal audit function, risk management and external auditors regarding their duties and responsibilities;
3. Request information regarding the RKAP and its implementation (monthly, quarterly, semester and annual reports), internal control system, Standard Operating Procedure (SOP) and work instructions related to company operations, risk management, SPI annual work plan, SPI audit reports as well as documents and or other information relating to the duties of the audit committee;
4. Obtain information from the secretary of the supervisory board regarding:
 - a. Monitoring of follow-up results of decisions, recommendations and directives of the supervisory board;
 - b. Administrative materials regarding reports/activities of directors in managing the company;
 - c. Administrative support and monitoring relating to matters that must obtain approval and recommendation from the supervisory board in connection with company management actions taken by the board of directors;
5. The audit committee is obliged to maintain the confidentiality of documents, data and company information, both to internal and external parties and is only used for the purpose of carrying out the duties of the audit committee.

Independence of the Audit Committee

The Audit Committee acts independently (independently) in carrying out its duties and reporting its work and is only responsible to the Supervisory Board. The Audit Committee is obliged to maintain the confidentiality of documents, data and information of the Company, both from internal and external parties and only used for the purposes of carrying out its duties. One of the qualifications stated in the Audit Committee Charter is that all members of the Audit Committee must not have personal interests/relationships with members of the Board of Directors and the Board of Supervisors which may cause negative impacts and conflicts of interest on the Company.

Transparansi Hubungan Afiliasi Komite Audit

Transparency of Audit Committee Affiliation Relationships

Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Dwi Pranoto (Ketua/ Chairman)	Yanto Sugianto (Anggota/Member)	Sufi Safitri Nurwidiati (Anggota/Member)
Dengan Anggota Dewan Pengawas With the Supervisory Board Members	x	x	x
Dengan Direksi With the Board of Directors	x	x	x
Dengan Pemerintah Indonesia sebagai Pemegang Saham Utama/Pengendali With the Government of Indonesia as the Main/Controlling Shareholder	x	x	x

v = ada/have | x = tidak ada/nothing

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi dilakukan oleh Komite Audit agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas usaha Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit. Tentang program peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Competency Improvement Program

A competency improvement program is carried out by the Audit Committee to keep up with and update information on the latest developments in the Company's business activities and other knowledge related to the implementation of the Audit Committee's duties. Regarding the competency improvement program that the Audit Committee participated in throughout 2019, please see the Company Profile chapter in this Annual Report.

Rapat Komite Audit

Sepanjang 2019, Komite Audit melakukan Rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Berikut risalah dan rekapitulasi kehadiran rapat-rapat Komite Audit sebagaimana terlampir di bawah ini.

Audit Committee Meetings

In 2019, the Audit Committee held 12 (twelve) meetings. Following are the minutes and recapitulation of attendance at Audit Committee meetings as attached below.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat

Recapitulation of Attendance of the Audit Committee at Meetings

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Required Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance
Dwi Pranoto (Ketua) (Chairman)	12	12	100%
Yanto Sugianto (Anggota) (Member)	12	12	100%
Sufi Safitri Nurwidiati (Anggota) (Member)	12	12	100%
Rata-rata Average			100%

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit Tahun 2019

Secara umum pelaksanaan tugas dan kegiatan Komite Audit berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu: menganalisis laporan hasil audit SPI dan KAP, menelaah laporan berkala keuangan dan kinerja manajemen serta menyusun masukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja manajemen.

Brief Description of the Implementation of the Duties and Activities of the Audit Committee in 2019

In general, the implementation of the duties and activities of the Audit Committee went well. Some of the activities that have been carried out are: analyzing reports on SPI and KAP audit results, reviewing periodic financial reports and management performance, and compiling inputs based on management performance evaluation results.

Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko

Dewan Pengawas telah membentuk Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko yang bertugas untuk memantau dan memberi nasihat kepada direksi terkait efektivitas perusahaan dalam pengelolaan manajemen risiko. Pembentukan ini tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor SK 14/DP/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, tentang Piagam Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko Peruri.

Masa Jabatan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko

Masa Jabatan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko ditentukan oleh Dewan Pengawas dan dapat diangkat lagi maksimal 2 (dua) periode berturut-turut, tanpa mengurangi kewenangan Dewan Pengawas untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko Tahun 2019

Susunan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko terdiri dari minimal 3 (tiga) orang, terdiri dari sedikitnya 1 (satu) orang dari Dewan Pengawas, 2 (dua) orang dari pihak independen.

Dengan demikian, Susunan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko Per 31 Desember 2019
Composition of the Risk Evaluation and Monitoring Committee as of December 31, 2019

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nomor & Tanggal SK Number & Date of Decree
1.	Rizal Affandi Lukman	Ketua Chairman	Risalah Rapat internal tanggal 25 Juli 2017 SK Dewan Pengawas No. SK-04/DP/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 SK Dewan Pengawas No. SK-07/DP/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 Minutes of internal meeting dated 25 July 2017 Supervisory Board Decree No. SK-04/DP/VII/2018 July 19, 2018 Supervisory Board Decree No. SK-07/DP/XII/2018 December 6, 2018
2.	Teguh Widhyo Utomo	Anggota Member	SK Dewan Pengawas No. SK-07/DP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 SK Dewan Pengawas No. SK-03/DP/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 SK Dewan Pengawas No. SK-04/DP/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 SK Dewan Pengawas No. SK-15/DP/IX/2019 Tanggal 27 September 2019 Supervisory Board Decree No. SK-07/DP/IX/2017 September 25, 2017 Supervisory Board Decree No. SK-03/DP/III/2018 March 29, 2018 Supervisory Board Decree No. SK-04/DP/III/2019 March 25, 2019 Supervisory Board Decree No. SK-15/DP/IX/2019 September 27, 2019

Risk Evaluation and Monitoring Committee

The Supervisory Board has established a Risk Evaluation and Monitoring Committee whose task is to monitor and provide advice to the board of directors regarding the effectiveness of the company in managing risk management. This formation is contained in the Supervisory Board Decree Number SK 14/DP/XII/2017 dated 22 December 2017, concerning the Peruri Risk Evaluation and Monitoring Committee Charter.

Term of Office of the Risk Evaluation and Monitoring Committee

The term of office of the Risk Evaluation and Monitoring Committee is determined by the Supervisory Board, and can be reappointed for a maximum of 2 (two) consecutive terms, without reducing the Supervisory Board's authority to dismiss at any time.

Number, Composition and Arrangement of the Risk Evaluation and Monitoring Committee in 2019

The composition of the Risk Evaluation and Monitoring Committee consists of a minimum of 3 (three) people, consisting of at least 1 (one) person from the Supervisory Board, 2 (two) from an independent party.

Thus, the composition of the Risk Evaluation and Monitoring Committee as of 31 December 2019 is as follows:

Susunan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko Per 31 Desember 2019

Composition of the Risk Evaluation and Monitoring Committee as of December 31, 2019

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nomor & Tanggal SK Number & Date of Decree
3.	Maya Indreswari	Anggota Member	SK Dewan Pengawas No. SK-01/DP/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 Supervisory Board Decree No. SK-01/DP/III/2018 March 9, 2018

Profil masing-masing anggota Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko dapat dilihat di bawah ini.

The profiles of each member of the Risk Evaluation and Monitoring Committee can be seen below.

Rizal Affandi Lukman

Ketua Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko /Dewan Pengawas
Chairman of the Risk Evaluation and Monitoring Committee/Supervisory Board

Profil Ketua Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko Rizal Affandi Lukman dapat dilihat bagian profil Dewan Pengawas pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

The profile of the Chairman of the Risk Evaluation and Monitoring Committee Rizal Affandi Lukman can be seen in the profile section of the Supervisory Board in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Maya Indreswari

Anggota Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko
Member of the Risk Evaluation and Monitoring Committee

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 57 tahun

Personal data

Indonesian citizens
57 years old

Pendidikan

Institut Teknologi Bandung, Jurusan Matematika, Bandung (1986).

Education

Bandung Institute of Technology, Mathematics Department, Bandung (1986).

Pengalaman Kerja

- Reviewer Implementasi Sistem Aplikasi Adminstrasi PT Wahana Arthadinamika.
- Platform IT Project Bank Niaga (2014-2016).
- Change Agent For Performance Management System Bank Niaga (2013).
- Anti Fraud Management unit Bank Niaga (2012-2014).
- Operations Policy & Procedure Head Bank Niaga (2010-2012).
- IT Merger Team – Funding & Loan Team Leader Bank Niaga (2009-2010).
- Bussiness Continuity Management Head Bank Niaga (2007-2009).

Work experience

- Reviewer of PT Wahana Arthadinamika Administration Application System Implementation.
- Bank Niaga's IT Project Platform (2014-2016).
- Change Agent For Performance Management System of Bank Niaga (2013).
- Anti Fraud Management Unit of Bank Niaga (2012-2014).
- Operations Policy & Procedure Head of Bank Niaga (2010-2012).
- T Merger Team - Funding & Loan Team Leader of Bank Niaga (2009-2010).
- Business Continuity Management Head of Bank Niaga (2007-2009).

Teguh Widhyo Utomo

Anggota Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko
Member of the Risk Evaluation and Monitoring Committee

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 67 tahun

Personal data

Indonesian citizens
67 years old

Pendidikan

- Institut Ilmu Keuangan, Jurusan Akuntansi (Sarjana Muda), Bandung (1975).
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta (1983).

Education

- Institute of Financial Sciences, Department of Accounting (Bachelor Degree), Bandung (1975).
- State College of Accountancy, Jakarta (1983).

Pengalaman Kerja

- Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup (2012-2014).
- Direktur PLP Bidang Polsoskam Lainnya pada Deputi PIP Bidang Polsoskam di BPKP Pusat (2011-1 April 2012).
- Direktur Pengawasan Fiskal dan Investasi pada Deputi PIP Bidang Perekonomian di BPKP Pusat dan Ketua Harian Tim Teknis Optimalisasi Penerimaan Negara (2009-2011).
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di Surabaya (2007-2009).
- Inspektur BPKP di BPKP Pusat, Jakarta (2004-2007).
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua di Jayapura (2003-2004).

Work experience

- Special Staff of the Minister of Environment (2012-2014).
- Director of PLP for Other Polsoskam Division at PIP Deputy for Polsoskam at Central BPKP (2011- April 1 2012).
- Director of Fiscal and Investment Supervision at the Deputy of PIP for Economic Affairs at the Central BPKP and Daily Chair of the State Revenue Optimization Technical Team (2009-2011).
- Head of Representative Office for East Java Provincial BPKP in Surabaya (2007-2009).
- BPKP Inspector at BPKP Pusat, Jakarta (2004-2007).
- Chief Representative of the Papua Provincial BPKP in Jayapura (2003-2004).

Pedoman Kerja Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko

Berdasarkan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko (Komite EPR) *Charter*, pokok-pokok tugas Komite EPR adalah membantu Dewan Pengawas untuk:

1. Mempelajari sistem manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan di sepanjang 2019;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas sistem Manajemen Risiko;
3. Melakukan rapat internal Komite EPR;
4. Rapat koordinasi dalam rangka sinergitas dengan Komite Audit;
5. Mengikuti Workshop Seminar;
6. Rapat koordinasi dengan RM;
7. Menyusun masukan berdasarkan hasil evaluasi laporan berkala manajemen untuk Dewan Pengawas sebagai bahan rapat;
8. Menyusun laporan periodik kegiatan komite EPR;
9. Melaksanakan tugas khusus dari Dewan Pengawas dan Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
10. Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dewan Pengawas;

Tugas serta Tanggung Jawab Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko

Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko perusahaan;
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja manajemen risiko;
4. Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban direksi atas penerapan kebijakan manajemen risiko;
5. Menyampaikan rekomendasi kepada dewan pengawas atas kebijakan yang telah diambil oleh direksi berkaitan dengan manajemen risiko.

Wewenang Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko

Wewenang yang dimiliki Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko antara lain:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan serta informasi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas;

Risk Evaluation and Monitoring Committee Work Guidelines

Based on the Charter Risk Evaluation and Monitoring Committee (EPR Committee), the main tasks of the EPR Committee are to assist the Supervisory Board to:

1. Studying the risk management system implemented by the company in 2019;
2. Monitoring and evaluating the effectiveness of the Risk Management system;
3. Conducting internal EPR Committee meetings;
4. Coordination meetings in the framework of synergy with the Audit Committee;
5. Attending Seminar Workshop;
6. Coordination meeting with RM;
7. Prepare input based on the evaluation results of management periodic reports for the Supervisory Board as material for meetings;
8. Prepare periodic reports on the activities of the EPR committee;
9. Carry out special tasks from the Supervisory Board and prepare reports on the implementation of tasks;
10. Coordination Meeting (Rakor) with the Supervisory Board;

Duties and Responsibilities of the Risk Evaluation and Monitoring Committee

Risk Evaluation and Monitoring Committee Has the duties and responsibilities to:

1. Evaluating the company's risk management policy;
2. Evaluating the suitability between risk management policies and policy implementation;
3. Monitoring and evaluating the implementation of the risk management work unit's duties;
4. Evaluating the board of directors' accountability report on the implementation of risk management policies;
5. Delivering recommendations to the supervisory board on the policies that have been taken by the board of directors relating to risk management.

Authority of the Risk Evaluation and Monitoring Committee

The authority of the Risk Evaluation and Monitoring Committee includes:

1. Access documents, data and information about employees, funds, assets and company resources as well as other information needed to carry out the aforementioned duties and responsibilities;

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, direksi dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan; 3. Meminta pihak eksekutif untuk menyampaikan laporan profil risiko perusahaan dan/atau laporan kejadian yang berpotensi menimbulkan kerugian; 4. Jika diperlukan, komite EPR berwenang untuk melibatkan pihak independen di luar keanggotaan untuk membantu pelaksanaan tugasnya; 5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan pengawas. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Communicate directly with employees, directors and other related parties to obtain the necessary information and data; 3. Requesting the executive to submit a company risk profile report and/or a potential loss incident report; 4. If necessary, the EPR committee is authorized to involve independent parties outside the membership to assist in carrying out its duties; 5. Perform other powers assigned by the supervisory board. |
|---|---|

Independensi Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko

Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko bertindak mandiri (independen) dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil kerjanya dan hanya bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Transparansi Hubungan Afiliasi Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko

Independence of the Risk Evaluation and Monitoring Committee

The Risk Evaluation and Monitoring Committee acts independently (independently) in carrying out its duties and reporting its work results and is only responsible to the Supervisory Board. The Risk Evaluation and Monitoring Committee is obliged to maintain the confidentiality of documents, data and information of the Company, both from internal and external parties and only used for the purpose of carrying out its duties.

Transparency of Affiliation Relationship of the Risk Evaluation and Monitoring Committee

Transparansi Hubungan Afiliasi Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko

Transparency of Affiliation Relationship of the Risk Evaluation and Monitoring Committee

Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Rizal Affandi Lukman (Ketua/Chairman)	Maya Indreswari (Anggota/Member)	Teguh Widhyo Utomo (Anggota/Member)
Dengan Anggota Dewan Pengawas With the Supervisory Board Members	x	x	x
Dengan Direksi With the Board of Directors	x	x	x
Dengan Pemerintah Indonesia sebagai Pemegang Saham Utama/Pengendali With the Government of Indonesia as the Main/Controlling Shareholder	x	x	x

v = ada/have | x = tidak ada/nothing

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi dilakukan oleh Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko agar senantiasa dapat mengikuti informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas usaha Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko. Tentang program peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko di sepanjang 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Competency Improvement Program

The competency improvement program is carried out by the Risk Evaluation and Monitoring Committee in order to keep abreast of the latest developments in the Company's business activities and other knowledge related to the implementation of the duties of the Risk Evaluation and Monitoring Committee. Concerning the competency improvement program that the Risk Evaluation and Monitoring Committee participated in throughout 2019 can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Rapat Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko

Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko melakukan rapat secara berkala. Pada 2019, Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko melakukan Rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Risk Evaluation and Monitoring Committee Meetings

The Risk Evaluation and Monitoring Committee holds regular meetings. In 2019, the Risk Evaluation and Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings.

Rekapitulasi Kehadiran Komite Evaluasi Pemantauan Risiko pada Rapat
Recapitulation of Attendance of the Risk Evaluation Monitoring Committee at Meetings

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Total of Required Meeting	Jumlah Kehadiran Total of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Rizal Affandi Lukman (Ketua/Chairman)	12	12	100%
Teguh Widhyo Utomo (Anggota/Member)	12	12	100%
Maya Indreswari (Anggota/Member)	12	12	100%
Rata-rata/Average			100%

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko

Secara umum pelaksanaan tugas dan kegiatan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu: Mempelajari sistem manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan, melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas sistem Manajemen Risiko, menyusun masukan berdasarkan hasil evaluasi laporan berkala manajemen untuk Dewan Pengawas sebagai bahan rapat dan lainnya.

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the Risk Evaluation and Monitoring Committee

In general, the implementation of the duties and activities of the Risk Evaluation and Monitoring Committee went well. Some of the activities that have been carried out are: Studying the risk management system implemented by the Company, monitoring and evaluating the effectiveness of the Risk Management system, Compiling input based on the evaluation results of management periodic reports for the Supervisory Board as material for meetings, and others.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Fungsi nominasi dan remunerasi melekat kepada tugas Dewan Pengawas, oleh karena itu, fungsi ini dijalankan oleh dewan pengawas sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor SK-13/DP/XII/2017, pada 22 Desember 2017, tentang Charter Dewan Pengawas. Tugas dan fungsi yang melekat sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Functions

The nomination and remuneration functions are attached to the duties of the Supervisory Board, therefore, this function is carried out by the supervisory board in accordance with the Supervisory Board Decree Number SK-13/DP/XII/2017, December 22, 2017, concerning the Supervisory Board Charter. The inherent duties and functions are as follows:

1. Pengangkatan direksi dan dewan pengawas anak perusahaan.
 - a. Dewan pengawas melakukan review terhadap kebijakan, prosedur, proses penjurangan, penilaian dan penetapan calon direksi dan dewan pengawas anak perusahaan yang disampaikan oleh direksi berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri BUMN;
 - b. Dewan pengawas dalam melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan calon direksi dan dewan pengawas anak perusahaan tersebut dapat mengundang direksi;
 - c. Dewan pengawas dapat melakukan wawancara terhadap calon direksi dan dewan pengawas anak perusahaan yang diajukan oleh direksi;
1. Appointment of directors and supervisory boards of subsidiaries.
 - a. The supervisory board reviews the policies, procedures, selection process, assessment and determination of candidates for directors and supervisory boards for subsidiaries submitted by the directors based on the provisions in the SOE ministerial regulation;
 - b. The supervisory board in assessing the process of appointing candidate directors and the subsidiary's supervisory board may invite the directors;
 - c. The supervisory board may conduct interviews with candidates for directors and supervisory boards of subsidiaries proposed by the directors;

- d. Dewan pengawas menyampaikan rekomendasi/persetujuan tertulis terhadap usulan pengangkatan direksi dan dewan pengawas anak perusahaan.
2. Kebijakan atas pengusulan remunerasi direksi:
- a. Dewan pengawas melakukan *review* atas kebijakan dan mekanisme penyusunan usulan remunerasi direksi perusahaan setiap tahunnya serta menguji kesesuaiannya dalam pelaksanaannya;
- b. Dewan pengawas melakukan pengkajian atas usulan remunerasi direksi dalam penyusunan RKAP tahunan dengan pertimbangan, antara lain:
- Ketentuan dalam peraturan menteri BUMN mengenai Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas BUMN;
 - Prognosa pencapaian kinerja dan KPI tahun sebelumnya;
 - Kemampuan keuangan perusahaan dan kewajarannya.
- c. Dewan pengawas menyampaikan rekomendasi atas penetapan anggaran remunerasi direksi sebagai bagian dari rekomendasi atas penetapan RKAP kepada pemilik modal;
- d. Dewan pengawas menyampaikan rekomendasi remunerasi direksi kepada pemilik modal dalam rapat pembahasan bersama (RPB);
- e. Dewan pengawas dalam melakukan proses teluahnya menggunakan seluruh perangkat di dewan pengawas.
- d. The supervisory board submits a written recommendation/approval of the proposed appointment of the board of directors and the supervisory board of the subsidiary.
2. Policy on proposing remuneration for directors:
- a. The supervisory board reviews the policies and mechanisms for the preparation of remuneration proposals for company directors every year and tests their suitability in their implementation;
- b. The supervisory board reviews the proposed remuneration for the directors in the preparation of the annual RKAP with the following considerations:
- Provisions in the SOE ministerial regulation regarding Guidelines for Determining the Remuneration of the Directors, Supervisory Board and Supervisory Board of SOE;
 - Prognosis for performance achievement and previous year's KPIs;
 - The company's financial capacity and fairness.
- c. The supervisory board submits recommendations on the determination of the board of directors' remuneration budget as part of the recommendations on the determination of the RKAP to the owners of capital;
- d. The supervisory board submits recommendations on the remuneration of directors to owners of capital in a joint discussion meeting (RPB);
- e. The supervisory board in carrying out the review process uses all the instruments on the supervisory board.

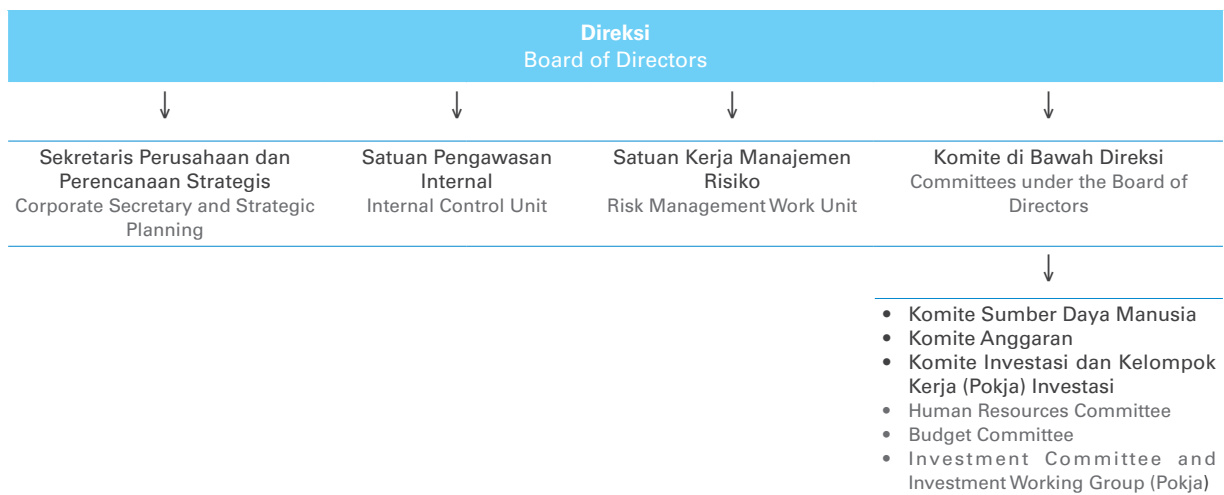
ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Direksi memiliki organisasi yang menjalankan fungsi bisnis serta pengawasan internal. Fungsi bisnis dijalankan oleh Direktur Utama dan Direksi lainnya beserta organ perangkat di bawahnya. Sedangkan fungsi pengawasan internal terhadap berbagai aspek didukung oleh Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis, Satuan Pengawasan Internal, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko. Direksi juga dibantu oleh Komite-komite dibawah Direksi yaitu Komite Sumber Daya Manusia, Komite Anggaran serta Komite Investasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Investasi. Seluruh Komite dan organ pendukung Direksi ini, telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif.

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has an organization that carries out business functions as well as internal supervision. Business functions are carried out by the President Director and other Directors along with their subordinate organs. Meanwhile, the internal oversight function for various aspects is supported by the Corporate Secretary and Strategic Planning, the Internal Control Unit and the Risk Management Unit. The Board of Directors is also assisted by Committees under the Board of Directors, namely the Human Resources Committee, the Budget Committee and the Investment Committee and the Investment Working Group (Pokja). All Committees and supporting organs of the Board of Directors have carried out their duties and responsibilities quite effectively.

Direksi dan Organ Pendukung Directors and Supporting Organs



Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis merupakan organ pendukung Direksi yang bertanggung jawab terhadap pembentukan citra positif Perusahaan serta kegiatan penyampaian informasi material Perusahaan secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi dan berkoordinasi dengan organ Perusahaan lain seperti Dewan Pengawas dan Auditor Internal maupun eksternal.

Corporate Secretary

The Corporate Secretary and Strategic Planning are the supporting organs of the Board of Directors which are responsible for the formation of a positive image of the Company and the activities of delivering the Company's material information in a timely and accurate manner to all stakeholders. The Corporate Secretary reports directly to the Board of Directors and coordinates with other Company organs such as the Supervisory Board and Internal and External Auditors.

Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis memiliki peran yang penting dalam memperlancar hubungan antar Organ Perusahaan dan hubungan antara Perusahaan dengan *Stakeholders* dengan dipenuhinya ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan, oleh karenanya Direksi wajib menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis

Pejabat Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pejabat Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis serta Dasar Pengangkatan

Sejak Januari hingga 1 Desember 2019, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis dijabat oleh Eddy Kurnia sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor SKEP SKEP-430/V/2018. Pada 29 November 2019 Divisi Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis dipecah menjadi dua divisi yaitu Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP – 688/XI/2019 per 1 Desember 2019 hingga saat ini Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Adi Sunardi.

The Corporate Secretary and Strategic Planning have an important role in smoothing the relationship between the Company's Organs and the relationship between the Company and the Stakeholders by complying with the provisions of the prevailing laws and regulations in the context of implementing corporate governance, therefore the Board of Directors is obliged to carry out the function of the Corporate Secretary.

The Party Appointing and Dismissing the Corporate Secretary and Strategic Planning

The Corporate Secretary and Strategic Planning Officer is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism with the approval of the Supervisory Board.

Corporate Secretary Officers and Strategic Planning and Basic Appointment

From January to December 1, 2019, Eddy Kurnia, the Head of the Corporate Secretary and Strategic Planning Division, was following the Decree of the Board of Directors Number SKEP SKEP-430/V/2018. On November 29, 2019, the Corporate Secretary and Strategic Planning Division was split into two divisions, namely the Corporate Secretary Division and the Corporate Strategic Planning Division. Based on the Decree of the Board of Directors Number SKEP - 688/XI/2019 as of December 1, 2019, until now the Head of the Corporate Secretary Division is held by Adi Sunardi.

Adi Sunardi Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 34 tahun
Kelahiran Serang, 21 Maret 1985

Personal data

Indonesian citizens
34 years old
Born in Serang, March 21, 1985

Pendidikan

S1 Akuntansi Universitas Padjadjaran, Jawa Barat (2009).

Education

S1 Accounting, Padjadjaran University, West Java (2009).

Pengalaman Kerja

- Kepala Biro Kesekretariatan dan Protokol Peruri (2019)
- Kepala Departemen Pengelolaan Anak Perusahaan Peruri (2016-2019)

Work experience

- Head of the Secretariat and Protocol Bureau of Peruri (2019)
- Head of Peruri Subsidiary Management Department (2016-2019)

Tugas Pokok Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP-3/III/2019 tanggal 5 Maret 2019, tentang Board of Director Charter (Pedoman Kerja Direksi) Peruri, tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Peruri mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;

Main Duties of Corporate Secretary and Strategic Planning

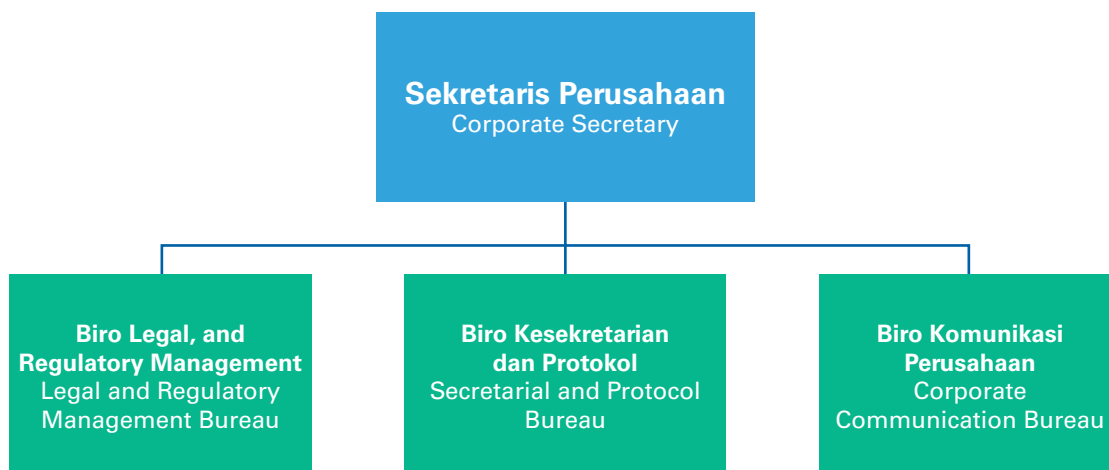
Based on the Decree of the Board of Directors Number KEP-3/III/2019 date March, 5 2019, concerning the Board of Director Charter (Directors Work Guidelines) Peruri, the duties and functions of the Corporate Secretary and Strategic Planning are as follows:

1. Ensure that Peruri adheres to the regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles;

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh direksi dan dewan pengawas secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diminta serta memberikan informasi yang materil dan relevan kepada <i>stakeholders</i>; 3. Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas sebagai pejabat penghubung (<i>liason officer</i>); 4. Menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RPB dan rapat direksi serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada risalah rapat direksi, rapat dewan pengawas. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Provide information needed by the board of directors and supervisory boards periodically and at any time when requested and provide material and relevant information to stakeholders; 3. The Corporate Secretary performs duties as a liaison officer; 4. Carry out the function of implementing and documenting the RPB and board of directors meetings as well as keeping Company documents, including but not limited to minutes of board of directors' meetings, board of supervisory meetings. |
|---|---|

Struktur Organ Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis

Corporate Secretary Organ Structure and Strategic Planning



Mengingat pentingnya fungsi sekretaris perusahaan dan perencanaan strategis dalam mendukung setiap aktivitas Perusahaan, Peruri melalui Nomor: KEP-10/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Percetakan Uang RI menetapkan bahwa terdapat 3 (tiga) biro.

In accordance with the importance of Corporate secretary and strategic planning function in supporting every activity of the Company, Peruri through Number: KEP-10/XI/2019 dated 19 November 2019 concerning Organizational Structure of Perusahaan Umum Percetakan Uang RI stipulates that there are 3 (three) bureaus.

Adapun ketiga biro, yaitu:

The Three bureaus, namely:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Kesekretarian dan Protokol. <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya berbagai kegiatan kesekretarian korporasi dan protokoler, korespondensi dan kerumahtanggaan yang terkait dengan direksi dan dewan pengawas; b. Melakukan kegiatan tata usaha dan penyimpanan dokumen perusahaan; c. Memastikan kelancaran dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan direksi dan dewan pengawas; d. Mengkoordinasikan/memonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi korporasi serta pelaksanaan rapat direksi dan dewan pengawas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretariat and Protocol Bureau. <ol style="list-style-type: none"> a. Ensuring the implementation of various corporate secretarial activities and protocols, correspondence and housekeeping related to the board of directors and the supervisory board; b. Conducting administrative and corporate document storage activities; c. Ensuring the smooth running and increasing the effectiveness of work procedures related to the activities of the board of directors and the supervisory board; d. Coordinating/monitoring activities related to the receipt and delivery of corporate information and the implementation of meetings of the board of directors and the supervisory board. |
|--|---|

2. Biro Hukum, Manajemen Regulatori dan Tata Kelola Perusahaan.
 - a. Menjamin terlaksananya kepastian taat asas, taat kebijakan dan taat aturan yang dipersyaratkan oleh RUPS, dewan pengawas pengawas dan direksi;
 - b. Memastikan terhadap rancangan kebijakan dan prosedur internal Peruri sesuai dengan asas kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memastikan setiap aktivitas baru tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Mendorong kesadaran akan budaya patuh dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada unit kerja dan karyawan;
 - e. Menjamin kesesuaian aspek hukum terhadap seluruh kegiatan Perusahaan;
 - f. Memberikan pandangan hukum, mengkoordinasikan tindakan penyelesaian masalah hukum antara lain litigasi dan bisnis;
 - g. Melakukan pengendalian terhadap risiko hukum;
 - h. Memastikan tersedianya panduan untuk hokum perusahaan;
3. Biro Komunikasi Perusahaan;
 - a. Mempersiapkan materi untuk komunikasi dan publikasi Perusahaan (*company profile* dan laporan perusahaan, majalah internal dan lain-lain);
 - b. Mengelola dan mengembangkan citra positif Perusahaan melalui pengembangan hubungan internal dan eksternal melalui kegiatan kehumasan;
 - c. Menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak internal dan eksternal serta mitra kerja.
2. Legal, Regulatory Management and Corporate Governance Bureau
 - a. Ensure the implementation of certainty in compliance with principles, adhering to policies and obeying the rules required by the GMS, supervisory board and directors;
 - b. Ensure that the draft policies and internal procedures of Peruri are in accordance with the principles of compliance with the prevailing rules and regulations;
 - c. Ensure that each new activity does not conflict with applicable regulations;
 - d. Encourage awareness of compliance culture by conducting outreach and training to work units and employees;
 - e. Ensure the conformity of legal aspects to all Company activities;
 - f. Providing legal views, coordinating actions to resolve legal issues, including litigation and business;
 - g. Control legal risks;
 - h. Ensure that guidelines for corporate law are in place;
3. Corporate Communications Bureau;
 - a. Prepare materials for Company communications and publications (company profile and company reports, internal magazines and others);
 - b. Manage and develop a positive image of the Company through developing internal and external relations through public relations activities;
 - c. Maintain good communication and working relationships with internal and external parties and work partners.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis 2019

Di sepanjang 2019, Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis telah menyelenggarakan aktivitas/kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan fungsi Sekretaris Perusahaan. Secara rinci aktivitas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan dan Perencanaan Strategis meliputi kegiatan, di antaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses komunikasi Kementerian BUMN, Dewan Pengawas, Direksi;
2. Mengkoordinir penyelenggaraan rapat;
3. Melakukan komunikasi dengan *stakeholder*;
4. Memproses administrasi arsip dan dokumen perusahaan.

Brief Report on the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary and Strategic Planning 2019

Throughout 2019, the Corporate Secretary and Strategic Planning have organized activities/activities in the context of carrying out the duties, responsibilities, and functions of the Corporate Secretary. In detail, the activities carried out by the Corporate Secretary and Strategic Planning include activities, including the following:

1. Carry out the communication process of the Ministry of SOE, Supervisory Board, Directors;
2. Coordinating the implementation of the meeting;
3. Communicating with stakeholders;
4. Processing administrative records and company documents.

Satuan Pengawasan Internal

Peruri menerapkan Sistem Pengawasan Internal Perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu, serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha perusahaan.

Kegiatan audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan organ internal perusahaan yang memiliki peran dalam memberikan jaminan dan konsultasi independen, objektif dan profesional dengan menjunjung kode etik auditor internal. Dalam menjalankan tugasnya SPI melakukan pengawasan pada internal perusahaan termasuk melakukan assurance atas efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola yang baik.

Kedudukan dan Fungsi SPI

SPI berkedudukan langsung dibawah direktur utama, dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI) yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan dewan pengawas sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan.

SPI adalah unit intern yang bersifat independen dan berfungsi untuk membantu Direktur Utama dalam:

1. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
2. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
3. Pendampingan auditor eksternal dalam pelaksanaan audit di lingkungan Peruri.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala SPI

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Kepala SPI dan Dasar Pengangkatan

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan tertulis Dewan Pengawas. Di tahun 2019, Perusahaan menunjuk David I.B Situmeang sebagai Kepala SPI berdasarkan Surat

Internal Control Unit

Peruri implements the Company's Internal Control System to improve the Company's compliance with the prevailing laws and regulations, ensures the availability of correct, complete and timely financial reports and management reports, and fulfills the efficiency and effectiveness of the company's business activities.

Internal audit activities are carried out by the Internal Audit Unit (SPI), which is an internal company organ that has a role in providing assurance and independent, objective and professional consultation by upholding the internal auditor's code of ethics. In carrying out its duties, SPI carries out internal supervision of the company, including assurance on the effectiveness of risk management, control and good governance processes.

SPI Position and Function

SPI is directly under the president director, headed by a Head of the Internal Audit Unit (KSPI) who reports directly to the president director. The head of SPI is appointed and dismissed by the president director with the approval of the supervisory board in accordance with the applicable regulations in the company.

SPI is an internal unit that is independent and functions to assist the President Director in:

1. Evaluating the effectiveness of the implementation of internal control, risk management, and corporate governance processes, in accordance with laws and regulations and company policies;
2. Examination and assessment of efficiency and effectiveness in the fields of finance, operations, human resources, information technology and other activities;
3. Assisting external auditors in conducting audits within Perum Peruri.

Party Appointing and Dismissing the Head of SPI

The Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism with the approval of the Supervisory Board.

Head of SPI and Basic Appointment

The Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director upon written approval from the Supervisory Board. In 2019, the Company appointed David I.B Situmeang as the Head of SPI based on

Keputusan SKEP-232/IV/2019 tentang Penerimaan Tenaga Profesional Berjangka Waktu tertanggal 29 April 2019.

Decree SKEP-232/IV/2019 concerning the Admission of Timed Professionals dated 29 April 2019.

David I.B Situmeang

Kepala SPI
Head of SPI

Periode Jabatan: 1 Mei 2019 - 30 April 2020

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 58 tahun
Kelahiran Jakarta, 19 September 1961

Personal data

Indonesian citizens
Age 58 years
Born in Jakarta, 19 September 1961

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Domicile

East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan

- Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta (1986)
- Magister Manajemen, Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat (1999)

Education

- Bachelor of Accountancy, University of Indonesia, Jakarta (1986)
- Master of Management, Padjajaran University, Bandung, West Java (1999)

Pengalaman Kerja

- Professional Star – Urusan Pengawasan Internal (1989-1991)
- Senior Manager – Internal Audit (1999-2000)
- Dept. Head of Operational Risk (2004-2013)
- Dept. Head of Audit Development & Advisory (2013-2014)
- Dean G.I.S Academy Mandiri University (2015-2017)
- Senior Cost Control – Rekayasa Industri (2017-2019)
- Vice President Internal Audit – Perum Peruri (2019-sekarang)

Work experience

- Professional Star - Internal Control Affairs (1989-1991)
- Senior Manager - Internal Audit (1999-2000)
- Dept. Head of Operational Risk (2004-2013)
- Dept. Head of Audit Development & Advisory (2013-2014)
- Dean G.I.S Academy Mandiri University (2015-2017)
- Senior Cost Control - Industrial Engineering (2017-2019)
- Vice President Internal Audit - Perum Peruri (2019-present)

Struktur Organisasi SPI

Sesuai dengan Nomor: KEP-10/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Percetakan Uang RI, posisi struktural dalam SPI dapat dilihat pada skema di bawah ini:

SPI Organizational Structure

In accordance with Number: KEP-10/XI/2019 dated 19 November 2019 concerning Organizational Structure of Perusahaan Umum Percetakan Uang RI, the structural position in the SPI can be seen in the scheme below:

Struktur Keorganisasian SPI SPI Organizational Structure



Hingga akhir 2019, jumlah pegawai yang tergabung dalam unit Satuan Kerja Audit Internal sebanyak 20 orang.

Until the end of 2019, the number of employees who are members of the Internal Audit Unit is 20 people.

Jabatan Position	Jumlah Total	Sertifikasi Certification	Keterangan Information
Penanggung Jawab SPI, terdiri dari : The person in charge of SPI, consisting of:			
Kepala SPI (Auditor Utama) Head of SPI (Main Auditor)	1 orang/people	Bersertifikasi KSPI KSPI certified	
Kepala Biro Audit Keuangan & Fraud (Auditor Madya) Head of Financial & Fraud Audit Bureau (Intermediate Auditor)	1 orang/people		
Kepala Biro Operasional & TI (Auditor Madya) Head of Operations & IT Bureau (Intermediate Auditor)	1 orang/people		
Kepala Biro Kebijakan & Perencanaan Audit (Auditor Madya) Head of Audit Policy & Planning Bureau (Intermediate Auditor)	1 orang/people	Bersertifikat PIA PIA Certified	
JUMLAH Total	4 orang/people		
Personil Auditor Internal SPI, terdiri dari : SPI Internal Auditor personnel, consisting of:			
Senior Penyusun Kebijakan dan Pengelolaan Audit/ Supervisor Senior Policymaker and Audit Management/Supervisor	1 orang/people	Bersertifikat PIA PIA Certified	
Staff Penyusun Kebijakan dan Pengelolaan Audit Staff of Policy Development and Audit Management	1 orang/people		
Staff Dukungan dan Analisa Data Audit Support Staff and Audit Data Analysis	2 orang/people		
Auditor Muda/ Ast. Manager Young Auditor/Ast. Manager	2 orang/people		1 orang di SPITMT per 1 Agustus 2019 1 person at SPITMT as of 1 August 2019
Auditor Pertama First Auditor	2 orang/people	Bersertifikat QIA QIA Certified	
Auditor Dasar Basic Auditor	1 orang/people	Bersertifikat PIA PIA Certified	
Auditor Dasar Basic Auditor	4 orang/people	Bersertifikat QIA QIA Certified	
Auditor Dasar Basic Auditor	1 orang/people		
Auditor Junior 2 Junior Auditor 2	2 orang/people		
JUMLAH Total	16 orang/people		
Jumlah Total Grand Total	20 orang/people		

Kualifikasi dan Sertifikasi Profesi

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki pegawai Audit Internal hingga akhir 2019.

Professional Qualifications and Certifications

Professional certification is an important aspect for auditors to understand audit developments, particularly regarding regulatory compliance and industrial developments. Following is the professional certification held by Internal Audit employees until the end of 2019.

Jabatan Position	Jumlah Pemegang Sertifikasi Number of Certification Holders	Level Sertifikasi Certification Level
Kepala Biro Kebijakan & Perencanaan Audit (Auditor Madya) Head of Audit Policy & Planning Bureau (Intermediate Auditor)	1 orang/people	PIA
Senior Penyusun Kebijakan dan Pengelolaan Audit/ Supervisor Senior Policymaker and Audit Management/Supervisor	1 orang/people	PIA
Auditor Pertama First Auditor	2 orang/people	QIA
Auditor Dasar Basic Auditor	1 orang/people	PIA
Auditor Dasar Basic Auditor	4 orang/people	QIA

Rekapitulasi jumlah karyawan SPI Perusahaan yang memiliki sertifikasi adalah sebagai berikut

The recapitulation of the number of employees of the Company's SPI who have certification is as follows

Level Sertifikasi Certification Level	Jumlah Pemegang Sertifikasi Number of Certification Holders	Persentase Terhadap Karyawan SPI yang sebanyak 20 orang The percentage of SPI employees is 20 people
PIA	3 orang/people	15,00%
QIA	6 orang/people	30,00%

Tugas dan Tanggung Jawab SPI

Tugas dan tanggung jawab SPI adalah sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan pengawasan berdasarkan risiko atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang terdiri dari:
 - Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berpedoman pada internal audit berbasis risiko (Risk Based Internal Audit/RBIA);
 - Program Kerja Non-Audit Tahunan (PKNAT);
- Mengkomunikasikan kebijakan pengawasan, RKT dan kebutuhan auditor kepada direktur utama untuk mendapat persetujuan dengan tembusan kepada dewan pengawas;
- Melakukan audit, evaluasi, review, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas pada seluruh kegiatan operasional perusahaan;
- Melaksanakan audit khusus (investigative audit) atas kasus-kasus berindikasi penyimpangan/kecurangan (fraud) yang ditemukan, isu-isu yang menjadi perhatian direksi atau informasi yang diperoleh dari Whistleblowing System atas persetujuan dan/atau instruksi direktur utama;
- Melaksanakan audit lain secara segera atas transaksi tertentu yang dipandang perlu dan memiliki dampak risiko kerugian perusahaan dengan atau tanpa persetujuan dari direktur utama;
- Membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) secara akurat, lengkap dan tepat waktu serta menyampaikannya kepada direktur utama dengan tembusan direktur terkait dan dewan pengawas c;q komite audit;

Duties and Responsibilities of SPI

The duties and responsibilities of the SPI are as follows:

- Formulating a risk-based supervisory policy on the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
- Prepare an Annual Work Plan (RKT) which consists of:
 - Annual Supervision Work Program (PKPT) which is guided by a risk-based internal audit (Risk Based Internal Audit/RBIA);
 - Annual Non-Audit Work Program (PKNAT);
- Communicate the supervisory policy, RKT and auditors' requirements to the president director for approval with a copy to the supervisory board;
- Perform audits, evaluations, reviews, monitoring and other supervisory activities on compliance, efficiency and effectiveness in all operational activities of the company;
- Conducting special audits (investigative audit) on cases indicating irregularities/fraud (fraud) found, issues that concern the board of directors or information obtained from the Whistleblowing System with the approval and/or instructions of the president director;
- Carry out other audits promptly on certain transactions deemed necessary and have an impact on the risk of loss to the company with or without the approval of the president director;
- Making a Supervisory Report (LHP) accurately, completely and on time and submitting it to the president director with copies of the related directors and the supervisory board c;q the audit committee;

8. Memantau dan mendorong auditi untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP SPI dan hasil audit dari auditor eksternal;
9. Mengembangkan, melaksanakan dan memelihara program quality assurance fungsi SPI secara berkala antara lain: prosedur penyusunan RKT, prosedur audit, prosedur monitoring tindak lanjut dan prosedur penilaian sistem pengendalian intern perusahaan;
10. Mengembangkan kompetensi auditor dalam menghadapi tantangan perkembangan usaha perusahaan dan strategi bisnis serta kemajuan dan perkembangan ilmu audit;
11. Menjaga dan menyimpan seluruh data dan/atau informasi yang diterima dari auditi dan hanya digunakan untuk kepentingan audit serta tidak dibenarkan memberikan dan/atau menginformasikan kepada pihak lain.

Wewenang SPI

Agar fungsi, tugas dan tanggung jawab SPI dapat berjalan dengan hasil yang optimal, maka SPI diberi kewenangan untuk:

1. Menentukan objek audit, ruang lingkup, strategi, metode dan frekuensi audit internal secara independen;
2. Memasuki setiap unit kerja yang berada di perusahaan (audit);
3. Memiliki hak akses atas seluruh sistem informasi perusahaan (database perusahaan) dengan tetap menjaga keamanan serta kerahasiaan data;
4. Memperoleh data dan/atau informasi dari semua level manajemen berkenaan dengan pelaksanaan tugas SPI dengan tetap menjaga keamanan serta kerahasiaan data dan/atau informasi tersebut;
5. Melakukan peninjauan fisik atas seluruh aset milik perusahaan;
6. Melakukan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan direksi, dewan pengawas dan atau komite audit jika diperlukan;
7. Menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh unit kerja sebagai peninjau bila dipandang perlu;
8. Menghadiri kegiatan pencacahan, pemusnahan dan penghapusan barang, akan tetapi tidak menandatangani berita acara;
9. dalam melaksanakan kegiatan audit dapat meminta pendampingan pihak-pihak yang memiliki keahlian setelah mendapat persetujuan dari direktur utama.

Internal Audit Charter

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, SPI mengacu pada corporate policy manual bagian *audit policy & charter* yang mengatur mengenai: standar auditor internal, kode etik, perencanaan audit,

SPI Authority

In order for the functions, duties and responsibilities of SPI to run with optimal results, SPI is given the authority to:

1. Determine the audit object, scope, strategy, method and frequency of the internal audit independently;
2. Entering each work unit in the company (audit);
3. Have access rights to the entire company information system (company database) while maintaining data security and confidentiality;
4. Obtain data and/or information from all levels of management regarding the implementation of SPI duties while maintaining the security and confidentiality of such data and/or information;
5. Conduct a physical inspection of all company assets;
6. Communicating directly or indirectly with the board of directors, supervisory board and/or audit committee if necessary;
7. Attend meetings organized by the work unit as an observer if deemed necessary;
8. Attending census, destroying and deletion activities, but not signing the minutes;
9. In conducting audit activities, parties with expertise may seek assistance after obtaining approval from the president director.

Internal Audit Charter

In carrying out its duties and responsibilities, SPI refers to the corporate policy manual of the audit policy & charter section which regulates: internal auditor standards, code of ethics, audit planning, internal

pengawasan internal, pelaporan hasil pengawasan *intern anti-fraud risk program* management dan *risk based audit*. Dokumen tersebut telah ditetapkan oleh direktur utama dan ketua dewan pengawas dalam *audit policy and charter* nomor dokumen: 02/APC/DW-DU/2017 tanggal 24 Januari 2017.

Kode Etik Auditor

dalam menjalankan tugasnya, Auditor Internal memiliki kode etik sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, jujur, objektif dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya;
2. Menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani;
3. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau perusahaan;
4. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan organisasi;
5. Tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasi;
6. Melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;
7. Mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal;
8. Bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya dan tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya;
9. dalam melaporkan hasil pekerjaannya, harus mengungkapkan semua fakta, jika tidak diungkap dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang di review atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum;
10. Konsisten meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya dan wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Program Pengembangan Kompetensi

Perusahaan mengikutsertakan personel SPI dalam kegiatan pengembangan kompetensi, untuk menunjang pelaksanaan tugas SPI. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala SPI di sepanjang 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Selain itu, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan SPI pada 2019 adalah sebagai berikut:

control, reporting on the results of internal control on anti-fraud risk management program and risk based audit. This document has been determined by the president director and chairman of the supervisory board in the audit policy and charter document number: 02/APC/DW-DU/2017 dated January 24, 2017.

Auditor Code of Ethics

In carrying out their duties, the Internal Auditor has a code of ethics as follows:

1. Have integrity, are honest, objective and seriousness in carrying out their duties and fulfilling their professional responsibilities;
2. Shows loyalty to the organization or to the party served;
3. Should not be involved in any action or activity that could discredit the internal audit profession or the company;
4. Refrain from activities that can create organizational conflicts of interest;
5. Must not accept anything in any form from clients, customers, suppliers or business partners of the organization;
6. Perform services that can be completed by using its professional competence;
7. Making efforts to meet the Internal Audit Professional Standards;
8. Be careful and prudent in using information obtained in the performance of their duties and must not use confidential information for personal gain or that may cause harm to the organization;
9. In reporting the results of their work, all facts must be disclosed, if not disclosed it can distort the report on the activities being reviewed or cover up any unlawful practices;
10. Consistently improve the competence as well as the effectiveness and quality of the implementation of their duties and must attend continuing professional education.

Competency Development Program

The company includes SPI personnel in competency development activities, to support the implementation of SPI duties. Regarding the list of training activities and competency improvement that the Head of SPI participated in throughout 2019, it can be seen in the Company Profile chapter in this annual report. In addition, the competency development programs participated in by SPI employees throughout 2019 are as follows:

No.	Nama Name	NIP	Nama Diklat Name of Education and Training	Rencana dan Realisasi Plan and Realization		Keterangan Information
				Rencana Pelaksanaan Implementation Plan	Realisasi Pelaksanaan Implementation Realization	
1	Jarot Bujono	6362	Sertifikasi Auditor Intern TK Lanjutan Advanced Kindergarten Internal Auditor Certification	Tentative	-	
2	Munawar	6199	Dasar-Dasar Audit Audit Basics	Tentative		
3	Nurwandi	6709	ISO 31000 Series 2: Risk Assessment Technique	Tentative		
4	Ferri Gamal	5795	Audit Intern TK Dasar Basic Level Internal Audit	4-16 Maret 2019 March 4-16, 2019	4-16 Maret 2019 March 4-16, 2019	
5	Dewi W	6486	Enterprise Risk Management Fundamentals ISO 31000 Seri 1	5-9 September 2019 September 5-9, 2019	-	
			Workshop Big Data Analytic		20-21 November 2019 November 20-21, 2019	
6	Deddy H	5968	ISO 31000 Series 2: Risk Assessment Technique	19-22 Maret 2019 March 19-22, 2019	-	
7	M. Erfo P	7544	Pengukuhan Gelar QIA Confirmation of the QIA Title	23-25 April 2019 April 23-25, 2019	23-25 April 2019 April 23-25, 2019	
8	Dedi K	7539	Pengukuhan Gelar QIA Confirmation of the QIA Title	23-25 April 2019 April 23-25, 2019	23-25 April 2019 April 23-25, 2019	
9	Veryal AF	7547	Sertifikasi Auditor Internal Tk Manajerial Managerial Level Managerial Internal Auditor Certification	18-27 Maret 2019 March 18-27, 2019	18-27 Maret 2019 March 18-27, 2019	
			Pengukuhan Gelar QIA Confirmation of the QIA Title		23-25 April 2019 April 23-25, 2019	
10	Adi Purnomo	7587	Sertifikasi Auditor Internal Tk Manajerial Managerial Level Managerial Internal Auditor Certification	15-27 Juli 2019 July 15-27, 2019	20-28 Mei 2019 May 20-28, 2019	
11	Arham K	7509	Sertifikasi Auditor Internal Tk Manajerial Managerial Level Managerial Internal Auditor Certification	18-27 Maret 2019 March 18-27, 2019		
			Pengukuhan Gelar QIA Confirmation of the QIA Title		23-25 April 2019 April 23-25, 2019	
12	Rizki T	7546	Sertifikasi Auditor Internal Tk Manajerial Managerial Level Managerial Internal Auditor Certification	18-27 Maret 2019 March 18-27, 2019		
			Pengukuhan Gelar QIA Confirmation of the QIA Title		23-25 April 2019 April 23-25, 2019	
13	Hani Sabrina	7545	Sertifikasi Auditor Internal Tk Manajerial Managerial Level Managerial Internal Auditor Certification	15-27 Juli 2019 July 15-27, 2019	20-28 Mei 2019 May 20-28, 2019	
14	Heri Indriyanto	6261	Audit Intern Tk Dasar Basic Level Internal Audit	17-29 Juni 2019 June 17-29, 2019	17-29 Juni 2019 June 17-29, 2019	
15	Bambang SR	5646	Audit Intern Tk Dasar Basic Level Internal Audit	17-29 Juni 2019 June 17-29, 2019		
16	Fahmi	6718	Audit Intern Tk Dasar Basic Level Internal Audit	4-16 Maret 2019 March 4-16, 2019	4-16 Maret 2019 March 4-16, 2019	
			Workshop Big Data Analytic		20-21 November 2019 November 20-21, 2019	
17	Suratno	6727	Audit Intern Tk Dasar Basic Level Internal Audit	4-16 Maret 2019 March 4-16, 2019	4-16 Maret 2019 March 4-16, 2019	
18	Deslina Pinem	7243	-	-	-	TMT di SPI per 1 Agustus 2019
19	Novianti Mega. P	7729	Workshop Big Data Analytic		20-21 November 2019 November 20-21, 2019	

Rencana Kegiatan Tahunan SPI 2019

SPI telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019, yang telah ditandatangani bersama oleh direktur utama dan kepala SPI pada 19 Desember 2018, yang menjadi panduan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan non pengawasan (audit), sehingga kegiatan dimaksud dapat bekerja secara efektif dan efisien serta hasilnya mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Penyusunan RKT berdasarkan pada kebijakan sebagai berikut:

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), disusun dengan menggunakan pendekatan risk based internal audit dan arahan direksi, dewan pengawas, RJPP 2017-2021, RKAP 2019 serta kegiatan yang sedang berjalan;
2. Seluruh program kerja tidak lepas dari prinsip GCG;
3. Pelaksanaan PKPT sesuai Audit Policy and Charter pada Corporate Policy Manual;
4. RKT SPI 2019 dapat dilakukan evaluasi dan revisi bila dipandang perlu;
5. Penetapan objek pengawasan sudah mempertimbangkan waktu dan sumber daya yang tersedia.

Adapun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Description	RKT 2019 2019 RKT
1.	Jumlah Objek Audit Number of Audit Objects	17 Objek 17 Objects
2.	Program Kerja Non Audit Non Audit Work Program	35 Kegiatan 35 Activities
3.	Jumlah Tugas Pengawasan Number of Supervision Tasks	147 Hari Kerja 147 Working Days
4.	Jumlah Tugas Non Pengawasan Number of Non-Supervision Tasks	63 Hari Kerja 63 Working Days

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SPI

Seusai dengan RKT 2019, SPI telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan non-pengawasan yang memprioritaskan kegiatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan SPI. Berikut disampaikan realisasi pencapaian kegiatan SPI:

1. Realisasi pencapaian program kerja pengawasan tahunan sebesar 147%.
2. Realisasi pencapaian program kerja non-pengawasan tahunan sebesar 96%.
3. Realisasi pencapaian kompetensi SPI sebesar 100%.

SPI 2019 Annual Activity Plan

SPI has compiled the 2019 Annual Work Plan (RKT), which was jointly signed by the main director and the head of SPI on 19 December 2018, which serves as a guide for carrying out supervisory and non-supervisory (audit) tasks, so that these activities can work effectively and efficiently the result is able to provide added value for the company. The RKT preparation is based on the following policies:

1. Annual Supervision Work Program (PKPT), prepared using a risk-based internal audit approach and directives of the board of directors, the supervisory board, RJPP 2017-2021, RKAP 2019 and ongoing activities;
2. All work programs cannot be separated from the principles of GCG;
3. Implementation of PKPT in accordance with the Audit Policy and Charter in the Corporate Policy Manual;
4. The 2019 SPI RKT can be evaluated and revised if deemed necessary;
5. The determination of the object of supervision takes into account the time and resources available.

The 2019 Annual Work Plan (RKT) is as follows:

Brief Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of SPI

After the 2019 RKT, SPI has carried out supervisory and non-supervisory activities that prioritize follow-up activities on the recommendations of the BPK and SPI examination results. Following is the realization of the achievements of the SPI activities:

1. The realization of the achievement of the annual supervisory work program was 147%.
2. Actual achievement of the annual non-supervision work program was 96%.
3. Realization of 100% SPI competency achievement.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI (audit kinerja, PDDT produksi non-uang dan general affair 2015) sebesar 74,4%. 5. Penyelesaian tindak lanjut temuan SPI 6. Audit 2017 sebesar 91,67%. 7. Audit 2018 sebesar 43,87 8. Audit 2019 sebesar 49,5% | <ol style="list-style-type: none"> 4. Completion of follow-up findings by BPK RI (performance audits, non-currency PDDT production and general affairs 2015) amounting to 74.4%. 5. Completion of follow-up to SPI findings 6. Audit 2017 of 91.67%. 7. 2018 audits of 43.87 8. 2019 Audit of 49.5% |
|---|--|

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Implementasi manajemen risiko di Peruri mengacu pada prinsip Three Lines of Defences International Standard Organization (ISO) 31000:2018. Manajemen risiko di Peruri mulai dibentuk pada 2013 dan telah perubahan bentuk organisasi dengan histori sebagai berikut:

Nama Unit Kerja Work Unit Name	Tahun Year	Keputusan Direksi Board of Directors Decisions
Perencanaan Perusahaan dan Manajemen Risiko Corporate Planning and Risk Management	2013	Nomor/Number: KEP-I/III/2013
Perencanaan Strategi Perusahaan dan Manajemen Risiko Corporate Strategy Planning and Risk Management	2016	Nomor/Number: KEP-3/IV/2016
Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance	2017	Nomor/Number: KEP-4/V/2017
Manajemen Risiko Risk Management	2018	Nomor/Number: KEP-12/VIII/2018
Manajemen Risiko Risk Management	2019	Nomor/Number: KEP-10/XI/2019

Kedudukan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko berkedudukan langsung dibawah direktur utama, dikepalai oleh seorang Kepala Manajemen Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Kepala Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan dewan pengawas sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan.

Kepala Manajemen Risiko dan Dasar Pengangkatan

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan tertulis Dewan Pengawas. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Peruri Nomor: SKEP-23/IV/2019 tanggal 29 April 2019, bahwa terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 ditetapkan Kepala Manajemen Risiko dijabat oleh Devi Syafriyeni.

Risk Management Work Unit

The implementation of risk management at Peruri refers to the principles of the Three Lines of Defense International Standard Organization (ISO) 31000: 2018. Risk Management in Peruri began to be formed in 2013 and has changed the form of the organization with the following history:

Position of the Risk Management Unit

Risk Management Unit is directly under the president director, headed by a Head of Risk Management who reports directly to the president director. The Head of Risk Management is appointed and dismissed by the president director with the approval of the supervisory board in accordance with the applicable regulations in the company.

Head of Risk Management and Basic Appointment

The Head of Risk Management is appointed and dismissed by the President Director upon written approval from the Supervisory Board. Based on the Decree of the Directors of Peruri Number: SKEP-23/IV/2019 dated April 29, 2019, that starting from May 1, 2019, Devi Syafriyeni has appointed the Head of Risk Management.

Devi Syafriyeni

Kepala Manajemen Risiko
Menjabat sejak: 1 Mei 2019
Head of Risk Management
Served since: May 1, 2019

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 41 tahun
Kelahiran Padang, 12 Juni 1978

Personal data

Indonesian citizens
41 years old
Born in Padang, June 12, 1978

Pendidikan

- S2, Finance Management, Universitas Indonesia. Depok (2012)
- S1, Akuntansi, Universitas Padjadjaran. Jawa Barat (2005)

Education

- S2, Finance Management, University of Indonesia. Depok (2012)
- S1, Accounting, Padjadjaran University. West Java (2005)

Pengalaman Kerja

- Direktur PT Sicpa Peruri Securink (2017-2019)
- Kepala Divisi Akuntansi dan Administrasi Anak Perusahaan (2016-2017)

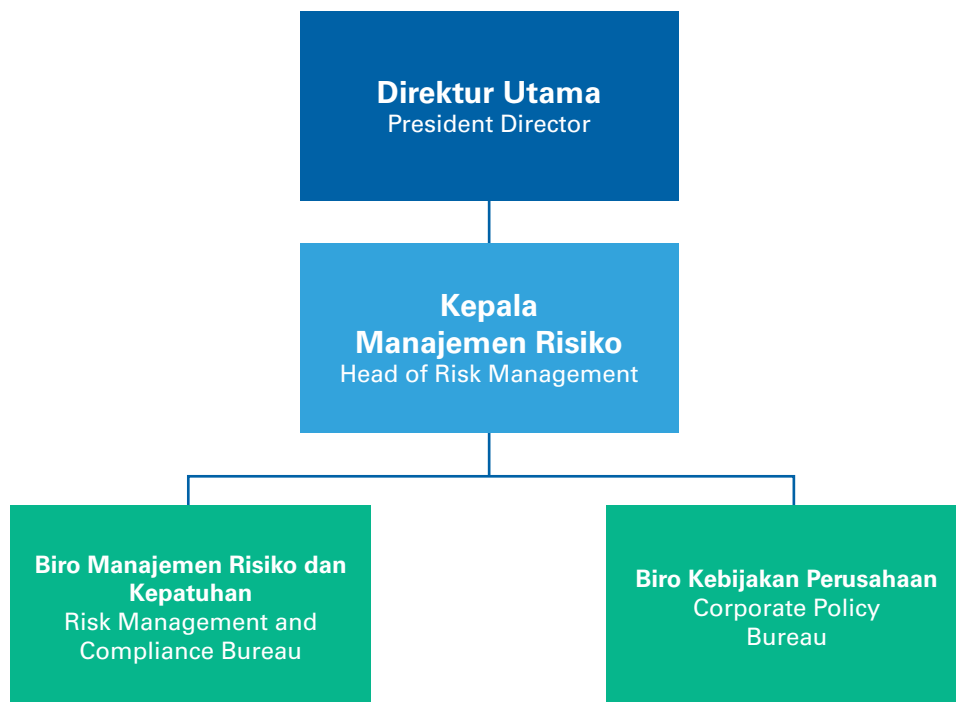
Work experience

- Director of PT Sicpa Peruri Securink (2017-2019)
- Head of Accounting and Administration Division of Subsidiaries (2016-2017)

Struktur Organ serta Tugas Pokok dan Fungsi Manajemen Risiko

Organ Structure and Main Duties and Function of Risk Management

Struktur Organ Manajemen Risiko Risk Management Organ Structure



Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-10/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Percetakan Uang RI, tugas pokok dan fungsi masing-masing Biro di bawah Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Biro Manajemen Risiko dan Kepatuhan
 - a. Memastikan bahwa unit kerja/ bisnis sebagai pemilik risiko telah melaksanakan proses manajemen risiko berdasarkan 6-Eyes Principle dan jika perlu memberikan asistensi pada kegiatan sebagai berikut:
 - Pemutakhiran risk register;
 - Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
 - Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - Penyusunan Rencana investasi strategis;
 - Penyusunan Justifikasi Kebutuhan;
 - Rencana penempatan dana investasi keuangan.
 - b. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran kebijakan dan pedoman manajemen risiko;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan manajemen risiko secara triwulanan;
 - d. Menentukan Top Risk Perusahaan dan melaksanakan pemantauan secara berkala;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko (K-EPR) secara bulanan sebagai bagian dari evaluasi dan memastikan proses pengelolaan risiko telah dilaksanakan tepat sasaran;
 - f. Melaksanakan asesmen risk maturity level setiap tahun;
 - g. Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang manajemen risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG);
 - h. Melaksanakan pemantauan dan melaporkan tindak lanjut hasil asesmen GCG (baik secara eksternal maupun internal) secara triwulanan;
 - i. Melaksanakan pemutakhiran wajib lapor, memantau dan melaporkan status Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara triwulanan;
 - j. Memutakhirkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance/ CoCG) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct/ CoC);
 - k. Membantu pelaksanaan asesmen GCG, baik yang dilaksanakan oleh eksternal asesor maupun internal asesor dan mengevaluasi tindak lanjut hasil asesmen bekerjasama dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI);

Based on the Decree of the Board of Directors Number: KEP-10/XI/2019 dated 19 November 2019 concerning the Organizational Structure of the Public Company for Printing Indonesian Money, the main duties and functions of each Bureau under Risk Management are as follows:

1. Risk Management and Compliance Bureau
 - a. Ensure that the work/business unit as the risk owner has implemented a risk management process based on the 6-Eyes Principle and, if necessary, provides assistance for the following activities:
 - Risk register updating;
 - Preparation of the Company's Long-term Plan (RJPP);
 - Company Work Plan and Budget (RKAP);
 - Preparation of strategic investment plans;
 - Formulation of Needs Justification;
 - Placement of financial investment funds.
 - b. Evaluating and updating risk management policies and guidelines;
 - c. Prepare quarterly risk management implementation reports;
 - d. Determine the Company's Top Risk and carry out regular monitoring;
 - e. Coordinating with the Risk Evaluation and Monitoring Committee (K-EPR) on a monthly basis as part of the evaluation and ensuring that the risk management process is carried out on target;
 - f. Carry out an annual risk maturity level assessment;
 - g. Carry out outreach and increase understanding of risk management and Good Corporate Governance (GCG);
 - h. Monitoring and reporting the follow-up results of the GCG assessment (both externally and internally) on a quarterly basis;
 - i. Implementing updating is obliged to report, monitor, and report the status of the Report on Assets of State Officials (LHKPN) on a quarterly basis;
 - j. Updating the Code of Corporate Governance (CoCG) and Code of Conduct (CoC);
 - k. Assisting the implementation of GCG assessments, both carried out by external assessors and internal assessors and evaluating follow-up results of the assessment in collaboration with the Internal Audit Unit (SPI);

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> l. Melaksanakan fungsi Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) sesuai dengan Pedoman Gratifikasi; m. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU); n. Melaksanakan pemantauan rekomendasi hasil asesmen KPKU. <p>2. Biro Kebijakan Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan, <i>me-review</i> sistem manajemen dan operasional Perusahaan termasuk SOP dan pengembangannya (<i>Business Process</i>); b. Melakukan simplifikasi dan kodifikasi SKEP; c. Mengelola Corporate Policy Manual Perusahaan; d. Menetapkan indikator kinerja perusahaan (KPI Direksi, Kepala Divisi dan Kepala Departemen); e. Mengkoordinir proses pengelolaan Kontrak Manajemen; f. Menjamin dan melakukan review atas terlaksananya implementasi sistem manajemen. | <ul style="list-style-type: none"> l. Carry out the functions of the Gratification Management Unit (UPG) in accordance with the Gratification Guidelines; m. Facilitating and coordinating the implementation of the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) assessment; n. Carry out monitoring of recommendations from the KPKU assessment results. <p>2. Corporate Policy Bureau</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Establish, review the Company's management and operational systems including SOPs and their development (Business Process); b. Simplify and codify SKEP; c. Managing the Company's Corporate Policy Manual; d. Establish company performance indicators (KPI Directors, Division Heads and Department Heads); e. Coordinating the management contract management process; f. Guarantee and review the implementation of the management system. |
|--|---|

Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Satuan Kerja Manajemen Risiko

Untuk meningkatkan kompetensi dalam hal pengetahuan dan pemahaman dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi sepanjang 2019 Satuan Kerja Manajemen Risiko mengikuti seminar, pendidikan dan/atau pelatihan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Manajemen Risiko di sepanjang 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Sementara guna meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM terkait Manajemen Risiko selama 2019 Jajaran Manajemen Risiko telah mengikuti beberapa program pengembangan kompetensi dan sertifikasi, yaitu:

Competency Development and Certification of Risk Management Work Units

To improve competence in terms of knowledge and understanding in assisting the implementation of the Board of Directors' duties throughout 2019, the Risk Management Unit participates in seminars, education and/or training. The list of training activities and competency enhancement that the Head of Risk Management participated in throughout 2019 can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.

Meanwhile, in order to improve the competence and quality of human resources related to Risk Management during 2019, the Risk Management staff have participated in several competency development and certification programs, namely:

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity	Waktu Pelaksanaan Execution Time	Penyelenggara Organizers
1	Risiko Pembentukan Holding Company Risk of Holding Company Formation	Workshop	Maret 2019 March 2019	Forum Diskusi Manajemen Risiko BUMN
2	ISO 31000 Series 2: Risk Assessment Technique	Pelatihan Training	Maret 2019 March 2019	CRMS Indonesia
3	Certified Governance Professional	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	Juni 2019 June 2019	LSP MKS

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity	Waktu Pelaksanaan Execution Time	Penyelenggara Organizers
4	Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Gratuity Control Technical Guidance	Pelatihan Training	Juli 2019 July 2019	KPK
5	Business Continuity Management	Pelatihan Training	Juli 2019 July 2019	CRMS Indonesia
6	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Chief Governance Officer Certified Chief Governance Officer Training and Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	Agustus 2019 August 2019	LSP MKS
7	Risk Control Self-Assessment	Pelatihan Training	September 2019	CRMS Indonesia
8	Risk Management in Digital Transformation 4.0	Workshop	September 2019	Forum Diskusi Manajemen Risiko BUMN
9	Legal and Compliance Risk Management	Pelatihan Training	Oktober 2019 October 2019	CRMS Indonesia
10	Risk Based Budgeting	Workshop	Oktober 2019 October 2019	CRMS Indonesia
11	Audit and Risk Integration	Pelatihan Training	November 2019	CRMS Indonesia
12	Master Class Risk Governance	Workshop	Desember 2019 December 2019	CRMS Global and ERMA
13	Risk Beyond 2019: International Conference Embracing GRC in Industry 4.0	Workshop	Desember 2019 December 2019	ERMA

Komite di Bawah Direksi

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan, Direksi juga dibantu oleh Komite-komite dibawah Direksi yaitu Komite Sumber Daya Manusia, Komite Anggaran serta Komite Investasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Investasi.

Komite Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menangani hal-hal terkait dengan SDM sehingga dapat menjadi satu acuan dalam upaya mencapai produktifitas organisasi yang tinggi dan efektifitas kerja yang optimal. Sesuai dengan *Corporate Policy Manual* bagian *Human Capital Manual* Bab XII tentang Pemantauan atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia tugas Komite SDM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan keselarasan kebijakan SDM dengan strategi dan tujuan bisnis perusahaan;
2. Menetapkan strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan SDM yang berkualitas;
3. Membahas dan menyempurnakan berbagai kebijakan penting terkait bidang SDM;
4. Memantau dan melaporkan pelaksanaan atas program-program terkait SDM yang dijalankan.

Committees Under The Board of Directors

In carrying out the Company's operational activities, the Board of Directors is also assisted by committees under the Board of Directors, namely the Human Resources Committee, the Budget Committee and the Investment Committee and the Investment Working Group (Pokja).

Human Resources Committee

In order to handle matters related to HR so that it can become a reference in an effort to achieve high organizational productivity and optimal work effectiveness. In accordance with the Corporate Policy Manual section of the Human Capital Manual Chapter XII concerning Monitoring of Human Resources Management, the duties of the HR Committee are as follows:

1. Ensuring the alignment of HR policies with the company's strategy and business objectives;
2. Establish strategies to maintain and develop quality human resources;
3. Discussing and perfecting various important policies related to the HR sector;
4. Monitor and report on the implementation of HR-related programs.

Komposisi Keanggotaan Komite SDM

Susunan keanggotaan Komite SDM adalah sebagai berikut:

Posisi Position	Jabatan Position
Ketua Komite Committee Chair	Direktur SDM dan Umum HR and General Director
Anggota Tetap Permanent member	Anggota BoD dan Kepala Divisi SDM (sebagai sekretaris komite) Member of the BoD and Head of the HR Division (as committee secretary)
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	Pihak-pihak lain terkait agenda pertemuan Other parties related to the meeting agenda

Anggota tidak tetap Komite SDM dapat berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan di bidang SDM;
2. Memiliki pengalaman kerja di bidang SDM sekurangnya 5 tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memastikan keselarasan kebijakan SDM dengan strategi dan tujuan bisnis perusahaan;
2. Menetapkan strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan SDM yang berkualitas;
3. Membahas dan menyempurnakan berbagai kebijakan penting terkait bidang SDM;
4. Memantau dan melaporkan pelaksanaan atas program-program terkait SDM yang dijalankan.

Komite Anggaran

Pada 2019 Perusahaan sudah tidak lagi memiliki Komite Anggaran. Dalam rangka menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020, Direksi menugaskan kepada seluruh Kepala Divisi untuk menyusun anggaran di unit kerja masing-masing.

Komite Investasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Investasi

Pada 2019 Perusahaan sudah tidak lagi memiliki Komite Investasi dan Kelompok Kerja (Pokja). Dalam rangka menjalankan fungsi pengelolaan proyek kerja, Direksi telah membentuk beberapa *project management* salah satunya adalah proyek investasi yang bertujuan untuk memonitor belanja modal (*Capital Expenditure*) 2020.

Composition of HR Committee Membership

The composition of the HR Committee's membership is as follows:

Posisi Position	Jabatan Position
Ketua Komite Committee Chair	Direktur SDM dan Umum HR and General Director
Anggota Tetap Permanent member	Anggota BoD dan Kepala Divisi SDM (sebagai sekretaris komite) Member of the BoD and Head of the HR Division (as committee secretary)
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	Pihak-pihak lain terkait agenda pertemuan Other parties related to the meeting agenda

Non-permanent members of the HR Committee can come from independent parties with expertise in human resources that meet the following criteria:

1. Have knowledge of knowledge in the field of HR;
2. Have work experience in the HR field for at least 5 years.

Duties and Responsibilities

1. Ensure the alignment of HR policies with the company's strategy and business objectives;
2. Define strategies to maintain and develop quality human resources;
3. Discussing and perfecting various important policies related to HR;
4. Monitor and report on the implementation of HR-related programs.

Budget Committee

In 2019 the Company no longer has a Budget Committee. To prepare the 2020 Work Plan and Company Budget (RKAP), the Board of Directors assigns all Division Heads to prepare budgets in their respective work units.

Investment Committee And Investment Working Group (Pokja)

In 2019 the company no longer has an Investment Committee and a Working Group (Pokja). To carry out the work project management function, the Board of Directors has formed several project management, one of which is an investment project that aims to monitor 2020 capital expenditures.

AUDIT EKSTERNAL/AKUNTAN PUBLIK

Audit independen eksternal adalah kegiatan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik independen yang memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku dan memiliki tujuan untuk menyatakan pendapat, dalam semua hal yang material, apakah laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Auditor Eksternal tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan guna menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan terhadap SAK di Indonesia.

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perusahaan dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

Auditor Publik harus terbebas dari pengaruh Dewan Pengawas, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan dalam proses audit eksternal sehingga memungkinkan Auditor Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Prosedur audit eksternal dan standar audit yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Auditor Publik mengacu kepada Peraturan Pemerintah No; 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik; Berdasarkan PP tersebut, Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, di mana Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama;
2. Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan;

EXTERNAL AUDIT/PUBLIC ACCOUNTANT

External independent audit is an audit activity carried out by an independent public accounting firm that meets the applicable statutory requirements and has the objective of expressing an opinion, in all material respects, whether the Company's consolidated financial statements are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).

External auditors are not allowed to have a conflict of interest with the Company to ensure the independence and quality of the audit results. The External Auditor is responsible for conveying an opinion on the suitability of the Company's Financial Statements to Indonesian GAAP.

Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

Management is responsible for the presentation of the Company's financial statements and is in compliance with the applicable Indonesian Accounting Standards established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

External Audit Procedures and Audit Standards

Public Auditors must be free from the influence of the Supervisory Board, Directors and other interested parties in the Company, and the Company is required to provide all accounting records and supporting data required in the external audit process so as to enable the Public Auditor to give his opinion on the fairness, prudence and suitability of the report. Company finance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The external audit procedures and auditing standards that apply are as follows:

1. The appointment of a Public Auditor refers to Government Regulation No; 20 of 2015 concerning Public Accountant Practices; Based on the PP, the Public Accountant is limited to a maximum of 5 (five) consecutive financial years, in which the Public Accountant can provide audit services again after 2 (two) consecutive financial years do not provide audit services to the same company;
2. The audit of the Company's financial statements is carried out in accordance with the professional standards of the Public Accountant which includes all audit procedures deemed necessary according to the circumstances;

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan; Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI; 4. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan; 5. Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material; Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen; 6. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-<i>review</i> oleh badan atau otoritas terkait. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Audit includes testing and evaluation of the internal control system, as well as examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements; An audit will also include assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI; 4. As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducts questions and answers to management regarding management's statements presented in the financial statements; 5. An audit carries an inherent risk that there will be material errors and irregularities; If there is such a thing, KAP will inform management; 6. Management approved the KAP examination work paper on the Company to be reviewed by the relevant agency or authority. |
|---|---|

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

The audit is carried out based on the Professional Standards for Public Accountants issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia, the audit is carried out based on the State Financial Audit Standards (SPKN) issued by the Indonesian Financial Supervisory Agency (BPK).

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Tahapan mekanisme penunjukan Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Perusahaan; 2. Dewan Pengawas dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan; 3. Dewan Pengawas menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RPB dan besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut; 4. Usulan kepada RPB tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Pengawas atas kinerja tahunan Perusahaan; | <h3>Public Accountant Appointment Mechanism</h3> <p>The stages of the mechanism for the appointment of a Public Accountant are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Supervisory Board through the Audit Committee conducts the process of appointing external Auditor candidates by requesting the assistance of the Board of Directors in the appointment process in accordance with the provisions for procurement of goods/services applicable in the Company; 2. The Supervisory Board may reappoint the external auditor based on the results of the evaluation of the external auditor's performance to audit the financial statements; 3. The Supervisory Board conveys the reasons for the nomination to the RPB and the amount of honorarium/fees proposed for the external auditor; 4. The proposal to the RPB can be submitted through a separate letter which is part of the Supervisory Board's response letter to the Company's annual performance; |
|--|--|

- | | |
|---|---|
| <p>5. Dewan Pengawas mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku;</p> <p>6. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RPB, Dewan Pengawas cukup memberikan kuasa kepada RPB untuk menetapkan auditor tersebut.</p> | <p>5. The Supervisory Board evaluates the performance of the external auditors through the Audit Committee in accordance with applicable regulations and standards;</p> <p>6. For the process of appointing prospective external auditors and/or re-appointment of external auditors by RPB, it is sufficient for the Supervisory Board to authorize RPB to appoint the auditors.</p> |
|---|---|

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik

Appointment Mechanism to Appointment of a Public Accountant



Akuntan Publik 2019

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-693/MBU/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019 hal Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perum Peruri Tahun Buku 2019 dan Surat Perintah Kerja Nomor: PLJ194400000456 tanggal 15 Oktober 2019 tentang pelaksanaan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) tahun buku 2019, Perusahaan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2019. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Public Accountant of 2019

Based on the Letter of the Minister for State-Owned Enterprises (SOE) Number S-693/MBU/10/2019 dated October 3, 2019, regarding the Approval of the Appointment of the Public Accounting Firm Perum Peruri for the 2019 Fiscal Year and Work Order Number: PLJ194400000456 dated 15 October 2019 regarding the implementation of the Report audit The Consolidated Financials of Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (Perum Peruri) for the financial year 2019, the Company has appointed the HLB Hadori Sugiarto Adi & Partners Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2019 Fiscal Year. may not have a conflict of interest with the Company.

Akuntan Publik Tahun 2019

Public Accountant of 2019

Kantor Akuntan Publik Public accounting firm	:	HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Akuntan Accountant	:	Abdul Khoir, MSi, CA, CPA
Tahun Audit Audit Year	:	Tahun Buku 2019 Fiscal Year 2019
Periode Penugasan Assignment Period	:	15 Oktober 2019 – 18 Februari 2020
Jasa Service	:	Audit atas Laporan Keuangan Audit Laporan Keuangan PKBL Audit of Financial Statements CSR Financial Report Audit
Biaya Cost	:	Rp740.000.000

Daftar Akuntan Publik dan Biaya

Untuk menjaga profesionalitas dan independensi, pemilihan Auditor Eksternal yang dilakukan setiap tahun wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengatur bahwa 1 (satu) Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit maksimal 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan dengan Akuntan Publik (Partner) maksimal 3 (tiga) Tahun Buku berturut-turut.

Guna kebutuhan transparansi, berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan 6 (enam) tahun terakhir dan biaya yang diberikan dalam mengaudit laporan keuangan Perusahaan sejak Perusahaan.

List of Public Accountants and Fees

To maintain professionalism and independence, the selection of an External Auditor which is conducted annually must comply with the provisions of Regulation of the Minister of Finance No. 17/PMK.01/2008 dated 5 February 2008 concerning Public Accountant Services which regulates that 1 (one) Public Accounting Firm (KAP) may only conduct audits for a maximum of 6 (six) consecutive financial years and with a maximum Public Accountant (Partner) 3 (three) consecutive Financial Years.

For transparency purposes, here is a list of Public Accounting Firms, Accountants for the last 6 (six) years and the fees they have been given in auditing the Company's financial statements since the Company.

Tahun Year	Nama KAP dan Alamat KAP Name and Address	Ruang Lingkup Scope	Nama Akuntan Accountant Name	Jasa Lain Other Services	Upah Fee
2019	KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan Wisma Staco 3 rd Floor, Jl. Casablanca No.Kav 18, RT.4/RW.13, Menteng dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2019. Laporan Keuangan Unit PKBL Tahun Buku 2019. Laporan Evaluasi Kinerja dan KPI Tahun Buku 2019. Laporan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan. Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2018. Financial Report for the CSR Unit for Fiscal Year 2018. Performance Evaluation Report and KPI for Fiscal Year 2018. Compliance Report on Internal Control. Compliance Report with Legislation. 	Abdul Khoir, MSi, CA, CPA	Tidak ada No	Rp740.000.000

Tahun Year	Nama KAP dan Alamat KAP Name and Address	Ruang Lingkup Scope	Nama Akuntan Accountant Name	Jasa Lain Other Services	Upah Fee
2018	KAP Wisnu Karsono Soewito Soho Pancoran, Splendor Wings Lantai 16 Unit S-1612. Jl. MT Haryono Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta (12810)	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2018. Laporan Keuangan Unit PKBL Tahun Buku 2018. Laporan Evaluasi Kinerja dan KPI Tahun Buku 2018. Laporan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan. Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2018. Financial Report for the CSR Unit for Fiscal Year 2018. Performance Evaluation Report and KPI for Fiscal Year 2018. Compliance Report on Internal Control. Compliance Report with Legislation. 	Wisnu B Soewito, CPA	Tidak ada No	Rp 750.000.000
2017	Wisnu B. Soewito & Rekan Gedung Gajah Unit ABC Lantai 6 All Jl. Dr. Saharjo Nomor III Jakarta 12810-Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Laporan posisi keuangan konsolidasi Peruri dan entitas perusahaan anak. Laporan laba rugi komprehensif. Laporan perubahan ekuitas. Laporan arus kas konsolidasian. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Pengendalian intern. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Consolidated statement of financial position for Peruri and its subsidiaries. Comprehensive income statement. Statement of Changes in Equity. Consolidated statements of cash flows. Compliance with Legislation. Internal control. Partnership and Community Development Program Report (PKBL). 	Wisnu B Soewito, CPA	Tidak ada No	Rp 935.000.000
2016	Wisnu B. Soewito & Rekan Gedung Gajah Unit ABC Lantai 6 All Jl. Dr. Saharjo Nomor III Jakarta 12810-Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Laporan posisi keuangan konsolidasi Peruri dan entitas perusahaan anak. Laporan laba rugi komprehensif. Laporan perubahan ekuitas. Laporan arus kas konsolidasian. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Pengendalian intern. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Consolidated statement of financial position for Peruri and its subsidiaries. Comprehensive income statement. Statement of Changes in Equity. Consolidated statements of cash flows. Compliance with Legislation. Internal control. Partnership and Community Development Program Report (PKBL). 	Wisnu B Soewito, CPA	Tidak ada No	Rp 935.805.000

Tahun Year	Nama KAP dan Alamat KAP Name and Address	Ruang Lingkup Scope	Nama Akuntan Accountant Name	Jasa Lain Other Services	Upah Fee
2015	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jl. Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta 10210-Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan posisi keuangan konsolidasi Peruri dan entitas perusahaan anak. • Laporan laba rugi komprehensif. • Laporan perubahan ekuitas. • Laporan arus kas konsolidasian. • Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. • Pengendalian intern. • Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). • Consolidated statement of financial position for Peruri and its subsidiaries. • Comprehensive income statement. • Statement of Changes in Equity. • Consolidated statements of cash flows. • Compliance with Legislation. • Internal control. • Partnership and Community Development Program Report (PKBL). 	Erwin Miftah, MHRM, CIA, CA	Tidak ada No	Rp 0
2014	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto Plaza Asia Lt. 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190 Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan posisi keuangan konsolidasi Peruri dan entitas anak perusahaan. laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas konsolidasian. • Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan. • Pengendalian intern. • Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). • Consolidated statement of financial position for Peruri and its subsidiaries. statements of comprehensive income, statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows. • Compliance with laws and regulations. • Internal control. • Partnership and Community Development Program Report (PKBL). 	Leknor Joni	Audit, Tax, Advisory	Rp 891.000.000



MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT



Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perusahaan. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif merupakan salah satu aspek penting bagi Perusahaan untuk mengelola secara efektif, efisien dan konsisten berbagai risiko yang dihadapi sebagai perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

In carrying out business activities, the Company realizes that risk is an inseparable part of its operational activities and can affect the Company's results of operations and performance. The implementation of comprehensive risk management is one of the important aspects for the Company to manage effectively, efficiently and consistently the various risks it faces as a manifestation of the implementation of good corporate governance (GCG).



Kebijakan dan Pengelolaan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko) di Peruri didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di BUMN khususnya klausul yang ada pada bagian ke-enam dan pasal 25 tentang Manajemen Risiko, yaitu:

1. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha;
2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program *good corporate governance* (GCG);
3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko;
4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

Selain itu, Peruri juga memiliki kebijakan dan pedoman pengelolaan manajemen risiko yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-01/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Corporate Policy Manual dan Risk Management and Compliance Manual.

Risk Management Policy and Management

The implementation of Risk Management (Risk Management) in Peruri is based on the Regulation of the Minister of SOEs Number: Per-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOE, especially the clauses in section six and article 25 on Risk Management, namely:

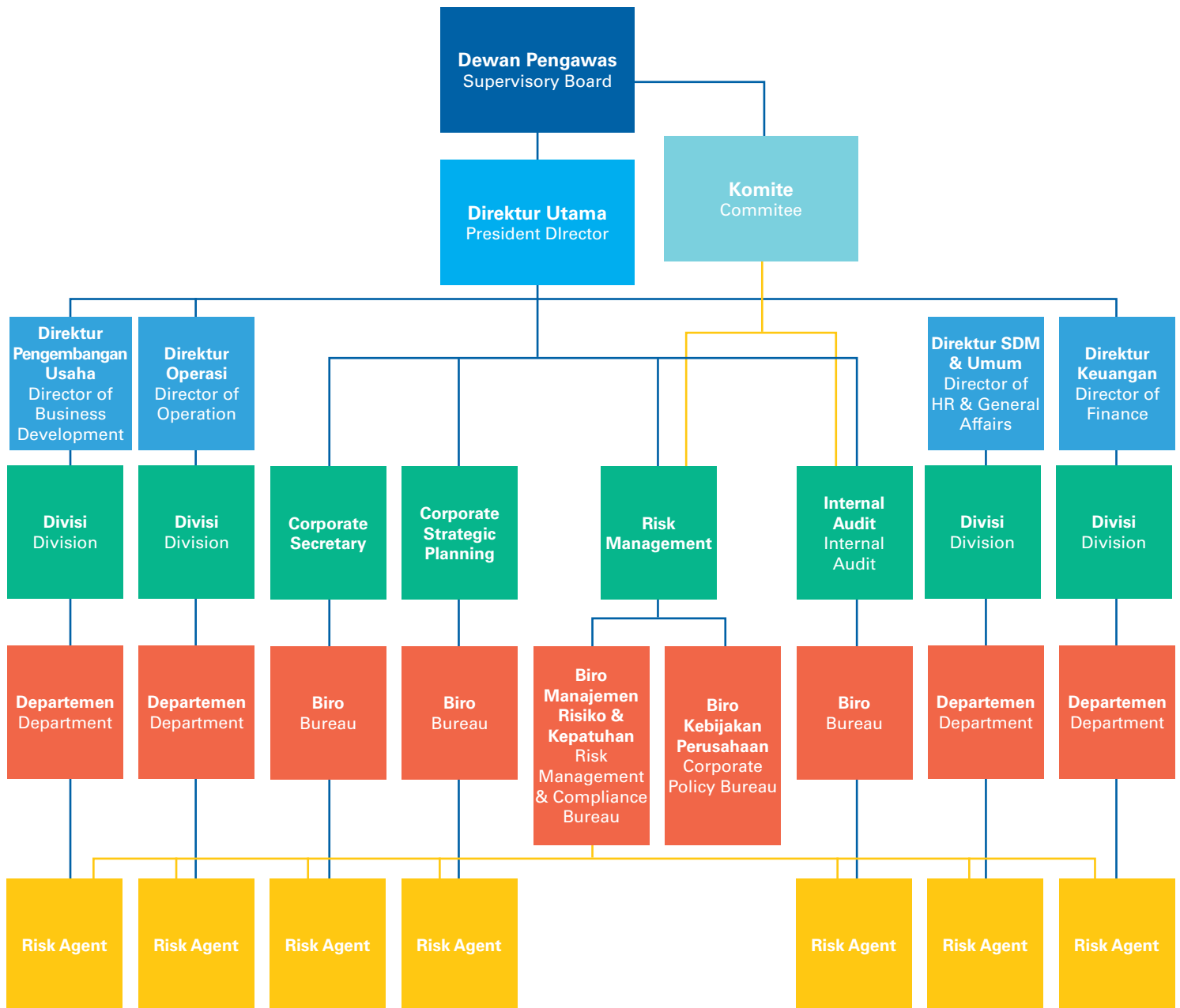
1. In making decisions/actions, the Board of Directors must consider business risks;
2. The Board of Directors must build and implement an integrated corporate risk management program as part of the implementation of the good corporate governance (GCG) program;
3. Risk management program implementation can be done, by forming a separate work unit under the Board of Directors or assigning existing and relevant work units to carry out risk management functions;
4. The Board of Directors is obliged to submit a risk management profile report and its handling together with the company's regular reports.

In addition, Peruri also has policies and risk management guidelines as outlined in the Decree of the Board of Directors Number: KEP-01/I/2017 dated January 24, 2017 concerning the Corporate Policy Manual and Risk Management and Compliance Manual.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko serta Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Pengawas

Risk Management Governance Structure and Active Oversight of the Board of Directors and the Supervisory Board

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Peruri Peruri Risk Management Governance Structure



Keterangan/Description:

- Garis Hubungan Komando
Line of Relationship Command
- Garis Hubungan Koordinasi
Line of Relationship Coordination

Pembagian peran dan tugas dari masing-masing bagian dalam penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan. Dalam penerapan Manajemen Risiko, Dewan Pengawas berperan untuk melakukan telaah atas informasi mengenai:
 - a. Kebijakan Manajemen Risiko perusahaan;
 - b. Hasil evaluasi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko perusahaan; dan
 - c. laporan pelaksanaan Manajemen Risiko.
 dalam melaksanakan telaah, Dewan Pengawas menggunakan perangkat yaitu Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko, yang diatur lebih lanjut dalam Piagam Dewan Pengawas Peruri.
2. Direksi
Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam penerapan Manajemen Risiko, Direksi berperan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan selalu mempertimbangkan risiko sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan;
 - b. Membangun dan melaksanakan program Manajemen Risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan GCG;
 - c. Memastikan sistem penerapan Manajemen Risiko komprehensif dan terukur, yang mencakup penetapan Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko dan Selera Risiko;
 - d. Menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang memuat: kerangka, tahap pelaksanaan, pelaporan dan penanganan risiko;
 - e. Membentuk dan/atau menunjuk unit kerja untuk menjalankan fungsi Manajemen Risiko;
 - f. Menyampaikan laporan penerapan Manajemen Risiko bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.
3. Komite Evaluasi & Pemantauan Risiko (EPR)
Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas Peruri untuk membantu Dewan Pengawas dalam mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi berkenaan dengan efektivitas perusahaan dalam pengelolaan Manajemen Risiko. Komite EPR terdiri dari minimal 3 (tiga) orang, yaitu sedikitnya 1 (satu) orang Dewan Pengawas yang

The division of roles and duties of each section in implementing Risk Management is as follows:

1. Supervisory Board
The Supervisory Board is a company organ whose job is to supervise and provide advice to the Board of Directors in carrying out corporate management activities. In implementing Risk Management, the Supervisory Board has a role to review information on:
 - a. Company Risk Management policy;
 - b. Evaluation results on the effectiveness of the company's Risk Management application; and
 - c. Risk Management implementation report.
 In carrying out the review, the Supervisory Board uses a tool, namely the Risk Evaluation and Monitoring Committee, which is further regulated in the Peruri Supervisory Board Charter.
2. Directors
The Board of Directors is a company organ that is responsible for managing the company for the interests and goals of the company and representing the company both inside and outside the court. In implementing Risk Management, the Board of Directors has the following roles:
 - a. Implement the principles of good corporate governance and always consider risk as part of the precautionary principle in every decision/ action;
 - b. Build and implement an integrated corporate Risk Management program which is part of the GCG implementation;
 - c. Ensuring a comprehensive and measurable Risk Management application system, which includes the determination of Risk Categories, Risk Criteria, Risk Analysis Matrix, Risk Levels, and Risk Appetite;
 - d. Establish an Risk Management Policy which includes: framework, implementation stage, reporting and risk handling;
 - e. Establish and/or appoint a work unit to carry out Risk Management functions;
 - f. Delivering the Risk Management application report together with the company periodic report.
3. Risk Evaluation & Monitoring Committee (EPR)
The Risk Evaluation and Monitoring Committee was formed and responsible to the Peruri Supervisory Board to assist the Supervisory Board in supervising and providing advice to the Board of Directors regarding the effectiveness of the company in managing Risk Management. The EPR Committee consists of a minimum of 3 (three) people, namely at least 1 (one) Supervisory

- membidangi Manajemen Risiko dan 2 (dua) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko dan/atau keuangan. Komite EPR bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas, yaitu:
- a. Melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 - b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Manajemen Risiko;
 - d. Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban Direksi atas penerapan kebijakan Manajemen Risiko;
 - e. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan Manajemen Risiko.
4. Komite Manajemen Risiko (KPIR)
KPIR beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko berfungsi membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan kerangka Manajemen Risiko serta melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaannya untuk memastikan kecukupan kerangka kerja, metodologi dan sistem informasi Manajemen Risiko.
5. Kepala Manajemen Risiko
Kepala Manajemen Risiko membawahi Satuan Kerja Manajemen Risiko yang merupakan unit independen terhadap *Risk Owner* dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal. Kepala Manajemen Risiko memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memastikan penerapan Manajemen Risiko terintegrasi dengan sistem manajemen lain;
 - b. Memastikan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan *framework* dan mengevaluasi penerapannya;
 - c. Melaporkan penerapan Manajemen Risiko kepada Direksi;
 - d. Memberikan saran dan masukan kepada unit pengelola Manajemen Risiko;
 - e. Menyampaikan informasi profil risiko dan berkoordinasi dengan Internal Audit terkait dengan pelaksanaan *Risk Based Audit*;
 - f. Memastikan ketersediaan dan kompetensi SDM di unit pengelola Manajemen Risiko.
6. Biro Manajemen Risiko dan Kepatuhan (*Risk Advisor*)
Biro Manajemen Risiko merupakan salah satu Biro di Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memiliki tugas sebagai berikut:
- Board in charge of Risk Management and 2 (two) independent parties who have expertise in Risk Management and/or finance. The EPR Committee is responsible to the Supervisory Board, namely:
- a. Evaluating Risk Management policies;
 - b. Evaluating the suitability between Risk Management policies and policy implementation;
 - c. Monitor and evaluate the implementation of Risk Management Unit duties;
 - d. Evaluating the Board of Directors' accountability report on the implementation of Risk Management policies;
 - e. Delivering recommendations to the Supervisory Board on the policies that have been taken by the Board of Directors regarding Risk Management.
4. Risk Management Committee (KPIR)
KPIR consists of the Board of Directors and Executive Officers of Risk Management. The Risk Management Committee functions to assist the Board of Directors in formulating Risk Management policies and frameworks as well as evaluating Risk Management policies by implementing them to ensure the adequacy of the Risk Management framework, methodology and information system.
5. Head of Risk Management
The Risk Management Head oversees the Risk Management Work Unit which is an independent unit from the Risk Owner and to the work unit that carries out the internal control function. The Risk Management head has the following duties:
- a. Ensuring the implementation of Risk Management is integrated with other management systems;
 - b. Ensuring Risk Management implementation is in accordance with the framework and evaluating its implementation;
 - c. Reporting the application of Risk Management to the Board of Directors;
 - d. Provide suggestions and input to the Risk Management management unit;
 - e. Delivering risk profile information and coordinating with Internal Audit regarding the implementation of a Risk Based Audit;
 - f. Ensuring the availability and competence of human resources in the Risk Management management unit.
6. Risk Management and Compliance Bureau (Risk Advisor)
The Risk Management Bureau is one of the Bureaus in the Risk Management Unit which has the following duties:

- | | |
|--|--|
| <p>a. Melakukan sosialisasi dan <i>transfer knowledge</i> Manajemen Risiko kepada seluruh risk taking unit;</p> <p>b. Membuat/ menyusun perencanaan kegiatan Manajemen Risiko;</p> <p>c. Memastikan ditunjuknya koordinator risiko (<i>risk agent</i>) di setiap unit kerja;</p> <p>d. Memfasilitasi risk owner dalam penerapan proses Manajemen Risiko (menyusun lingkup, konteks dan kriteria; <i>assessment; treatment; komunikasi dan konsultasi; monitoring and review; dan reporting and recording</i>);</p> <p>e. Memberikan hasil analisa risiko/<i>risk opinion</i> dan <i>early warning</i> sebagai dasar pengambilan keputusan strategis perusahaan;</p> <p>f. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko.</p> <p>7. <i>Risk Owner/Risk Taking Unit/Unit Kerja</i>
Seluruh insan Peruri merupakan <i>risk owner</i> untuk setiap pekerjaan yang dilakukannya dan dalam pelaksanaan <i>assessment</i> risiko perusahaan akuntabilitas sebagai <i>risk owner</i> adalah Kepala Departemen, Kepala Divisi dan Direksi. Peran <i>risk owner</i> dalam penerapan Manajemen Risiko antara lain:</p> <p>a. Mengkomunikasikan tentang penerapan Manajemen Risiko dan mengembangkan budaya sadar risiko dalam lingkungan kerjanya;</p> <p>b. Menetapkan <i>risk context</i> dan <i>risk criteria</i> bersama sama dengan <i>risk agent</i>;</p> <p>c. Melaksanakan <i>risk assessment</i> yang terdiri dari identifikasi, analisis dan evaluasi risiko;</p> <p>d. Merencanakan treatment/penanganan risiko;</p> <p>e. Mendokumentasikan kegiatan Manajemen Risiko di dalam lingkungan kerjanya;</p> <p>f. Menunjuk <i>risk agent</i> pada masing – masing unit kerja;</p> <p>g. Melaporkan semua risiko di dalam ruang lingkup tanggung jawabnya, baik yang di dalam maupun di luar kendali kepada <i>Risk Advisor</i>;</p> <p>h. Melaporkan dengan segera setiap kegagalan dalam penanganan risiko (<i>lost event</i>) kepada <i>Risk Advisor</i>.</p> <p>8. <i>Risk Agent/Risk Coordinator</i>
Risk agent merupakan tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang beranggotakan perwakilan dari setiap Departemen/ Biro yang bertugas sebagai koordinator penerapan Manajemen Risiko di unit kerja masing-masing.</p> <p>9. Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit)</p> <p>a. Melaksanakan audit berbasis risiko;</p> <p>b. Melakukan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>c. Memberikan saran dan rekomendasi terhadap penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko secara berkelanjutan.</p> | <p>a. Conduct socialization and transfer of Risk Management knowledge to all risk taking units;</p> <p>b. Creating/compiling Risk Management activity planning;</p> <p>c. Ensuring the appointment of a risk coordinator (risk agent) in each work unit;</p> <p>d. Facilitating risk owners in implementing the Risk Management process (compiling scope, context and criteria; assessment; treatment; communication and consultation; monitoring and review; and reporting and recording);</p> <p>e. Providing the results of risk analysis/risk opinion and early warning as the basis for making strategic corporate decisions;</p> <p>f. Develop and improve the application of risk management.</p> <p>7. Risk Owner/Risk Taking Unit/Work Unit
All Peruri personnel are risk owners for every work they do and in implementing the risk assessment of the company the accountability as a risk owner is the Department Head, Division Head and Board of Directors. The role of the risk owner in implementing Risk Management includes:</p> <p>a. Communicating about the application of Risk Management and developing a culture of risk awareness in the work environment;</p> <p>b. Establishing the risk context and risk criteria together with the risk agent;</p> <p>c. Carry out a risk assessment which consists of identification, analysis and evaluation of risks;</p> <p>d. Planning treatment/risk management;</p> <p>e. Documenting Risk Management activities in the work environment;</p> <p>f. Appoint a risk agent in each work unit;</p> <p>g. Report all risks within the scope of responsibility, both inside and outside of control to the Risk Advisor;</p> <p>h. Immediately report any failure in risk handling (lost event) to the Risk Advisor.</p> <p>8. Risk Agent/Risk Coordinator
The risk agent is a team formed based on the Decree of the Board of Directors consisting of representatives from each Department/Bureau who are assigned to coordinate the implementation of Risk Management in their respective work units.</p> <p>9. Internal Audit Unit (Internal Audit)</p> <p>a. Carry out risk-based audits;</p> <p>b. Evaluating the application of Risk Management;</p> <p>c. Provide suggestions and recommendations for the improvement of Risk Management implementation on an ongoing basis.</p> |
|--|--|

10. Seluruh Karyawan

Setiap karyawan mempunyai peran dalam mewujudkan Manajemen Risiko yang efektif dan secara aktif berpartisipasi mengidentifikasi risiko potensial yang ada di lingkungannya serta membantu melaksanakan tindakan mitigasi risiko.

Sistem Manajemen Risiko yang Diterapkan Perusahaan

Sebagai wujud komitmen Direksi atas pelaksanaan Manajemen Risiko, Peruri telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko yang dituangkan dalam *Corporate Policy Manual (CPM)* dan *Risk Management and Compliance Manual (RMCM)*. Kebijakan ini diterapkan pada semua tingkatan di Peruri, termasuk semua fungsi, satuan kerja dan Divisi yang akan bertanggung jawab terhadap rencana Manajemen Risiko.

Implementasi Manajemen Risiko di Peruri dilaksanakan menggunakan metode *Enterprise Risk Management (ERM)* dengan tujuan mengelola risiko perusahaan secara menyeluruh yang menjangkau berbagai jenis risiko, lokasi dan aktivitas bisnis. Penerapan Manajemen Risiko di Peruri mengadopsi prinsip, kerangka kerja dan proses Manajemen Risiko dalam ISO 31000:2018 (*Risk Management – Principles and Guideliness*).

Mengacu pada ISO 31000:2018, proses Manajemen Risiko di Peruri, terdiri dari:

1. Komunikasi dan Konsultasi.
Komunikasi dan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik internal maupun eksternal harus dilakukan pada setiap proses Manajemen Risiko guna memastikan terakomodirnya ide, pandangan dan persepsi para pemangku kepentingan dalam mengelola risiko. Setiap perkembangan dan perubahan level risiko maupun *risk treatment* harus diinformasikan kepada pemangku kepentingan.
2. Penyusunan Lingkup, Konteks dan Kriteria.
Penyusunan lingkup, konteks dan kriteria dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan agar proses asesmen risiko efektif. Khusus pada penyusunan lingkup dimaksudkan agar untuk dalam proses tersebut melalui penetapan sasaran unit kerja serta agar terdapat keselarasan antara sasaran unit kerja dengan sasaran perusahaan. Penyusunan konteks dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkini atas kondisi lingkungan bisnis, termasuk isu eksternal dan internal yang dapat berpengaruh dalam mencapai sasaran. Sedangkan penentuan kriteria risiko terdiri dari kriteria probabilitas dan

10. All Employees

Every employee has a role in realizing effective Risk Management and actively participates in identifying potential risks in their environment and helping to implement risk mitigation actions.

Risk Management System Implemented by the Company

As a manifestation of the Board of Directors' commitment to Risk Management implementation, Peruri has compiled an Risk Management policy as outlined in the Corporate Policy Manual (CPM) and the Risk Management and Compliance Manual (RMCM). This policy is applied at all levels in Peruri, including all functions, work units, and divisions that will be responsible for the Risk Management plan.

Risk Management implementation in Peruri is carried out using the Enterprise Risk Management (ERM) method with the aim of managing corporate risk as a whole that covers various types of risks, locations and business activities. The application of Risk Management in Peruri adopts Risk Management principles, frameworks and processes in ISO 31000: 2018 (Risk Management - Principles and Guideliness).

Referring to ISO 31000: 2018, the Risk Management process in Peruri consists of:

1. Communication and Consultation.
Communication and consultation with all stakeholders, both internal and external, must be carried out in each Risk Management process to ensure that the ideas, views and perceptions of stakeholders are accommodated in managing risk. Every development and change in risk level and risk treatment must be informed to stakeholders.
2. Formulation of Scope, Context and Criteria.
The preparation of scope, context and criteria is carried out periodically according to needs and developments so that the risk assessment process is effective. Particularly in the preparation of the scope it is intended that in the process it is through the determination of work unit targets and so that there is a balance between the work unit's goals and the company's goals. Context is prepared to obtain an up-to-date picture of the condition of the business environment, including external and internal issues that can affect the achievement of goals. Meanwhile, the determination of risk criteria consists of probability criteria and impact criteria.

kriteria dampak. Pada 2019, setiap *risk owner* telah menyusun kriteria risiko dari semua kategori risiko yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan *risk owner* saat melakukan asesmen risiko.

3. **Asesmen Risiko.**
Seluruh *risk taking unit* melakukan proses asesmen risiko yang terdiri dari: identifikasi, analisis dan evaluasi risiko dengan panduan dalam form risk register secara berkala. Risiko diidentifikasi berdasarkan penyebab, kejadian dan dampak yang ditimbulkan yang kemudian dianalisis dengan menentukan tingkat probabilitas dan tingkat dampak dari masing-masing risiko sehingga menggambarkan level-nya. Kemudian evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari *existing control* yang ada serta penentuan perlunya treatment/ penanganan risiko sesuai dengan *appetite* dari *stakeholder* yang ada.
4. **Treatment (Penanganan) Risiko.**
Perlakuan terhadap risiko yang telah diidentifikasi dilakukan dengan 4 (empat) macam cara, yakni: *accepted risk, transfer risk, mitigation/ reduction risk dan avoid risk*. Treatment tersebut dapat dilakukan secara proaktif dan reaktif, namun Peruri lebih berfokus pada pengambilan treatment proaktif, sesuai prinsip pengelolaan risiko yaitu mengutamakan upaya pencegahan/preventif.
5. **Monitoring and Review.**
Kegiatan monitoring and review dilakukan untuk mengetahui perubahan level risiko dan memantau pelaksanaan treatment yang telah direncanakan. Pelaksanaan kegiatan *monitoring and review* ini dilakukan secara berkala dengan mengundang risk agent dari seluruh unit kerja secara periodik.
6. **Reporting and Recording.**
Setiap kegiatan dalam proses Manajemen Risiko terdokumentasi dalam dokumen Manajemen Risiko yang terdapat di perusahaan serta dilaporkan secara berkala.

Dalam rangka membangun kapabilitas Manajemen Risiko juga diterapkan konsep pengendalian Pertahanan Tiga Lapis (*The three lines of defense*) untuk membedakan antara fungsi bisnis sebagai pemilik risiko terhadap fungsi yang menangani risiko dan antara fungsi yang mengawasi risiko dengan fungsi independent *assurance*. Seluruh fungsi tersebut memiliki peranan penting dalam penerapan *Enterprise Risk Management (ERM)* yang terdiri dari:

1. **Pertahanan Lapis Pertama (1st Line of Defence).**
Pertahanan lapis pertama ini dilakukan oleh pemilik proses (unit kerja) yang juga selaku pemilik risiko yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Unit kerja harus memastikan adanya

In 2019, each risk owner has compiled risk criteria for all risk categories which will then be used as a reference for the risk owner when conducting risk assessments.

3. **Risk Assessment.**
All risk taking units carry out a risk assessment process consisting of: identification, analysis and evaluation of risks with guidance in the risk register form on a regular basis. Risks are identified based on causes, events and impacts which are then analyzed by determining the level of probability and level of impact of each risk so that it describes the level. Then evaluation is carried out to determine the effectiveness of existing existing controls and to determine the need for treatment/ risk management in accordance with the appetite of existing stakeholders.
4. **Treatment (Handling) Risk.**
Treatment of identified risks is carried out in 4 (four) ways, namely: accepted risk, transfer risk, mitigation/reduction risk and avoid risk. These treatments can be carried out proactively and reactively, however Peruri focuses more on taking proactive treatment, according to the principle of risk management, namely prioritizing preventive/preventive efforts.
5. **Monitoring and Review.**
Monitoring and review activities are carried out to determine changes in risk levels and to monitor the implementation of planned treatments. Monitoring and review activities are carried out regularly by inviting risk agents from all work units periodically.
6. **Reporting and Recording.**
Every activity in the Risk Management process is documented in the Risk Management document contained in the company and is reported regularly.

In order to build Risk Management capability, the three lines of defense control concept is also applied to distinguish between business functions as risk owners from functions that handle risk and between functions that oversee risk and the independent assurance function. All of these functions play an important role in the implementation of Enterprise Risk Management (ERM), which consists of:

1. **First Line of Defense.**
This first layer of defense is carried out by the process owner (work unit) who is also the risk owner who carries out the company's day-to-day operational activities. The work unit

lingkungan pengendalian yang kondusif, menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan risiko dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan dan pengendalian internal yang efektif.

2. **Pertahanan Lapis Kedua (*2nd Line of Defence*).**
Pertahanan lapis kedua dilakukan oleh Satuan Manajemen Risiko dan berfungsi menjadi pengendali/control atas kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja (*1st Line of Defence*). Pertahanan lapis kedua ini bertugas memantau implementasi Manajemen Risiko secara obyektif dan menyeluruh, melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor Manajemen Risiko dan prosedur yang ditetapkan.
3. **Pertahanan Lapis Ketiga (*3rd Line of Defence*).**
Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh internal audit untuk memastikan lapis pertama dan kedua telah dilaksanakan. Internal audit juga memiliki tugas untuk melakukan review dan evaluasi terhadap rencana dan implementasi Manajemen Risiko secara keseluruhan.

Upaya Pengelolaan Risiko

Sebagaimana tertuang dalam prinsip-prinsip dasar Pengelolaan Risiko dalam ISO 31000 yang salah satunya adalah bahwa *risk management is integral part of organization process*, maka untuk memastikan terwujudnya *risk awareness and culture*, Peruri mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam seluruh proses bisnis perusahaan yaitu:

1. **Proses Bisnis Utama dan Operasional Perusahaan.**
Risiko proses bisnis utama diidentifikasi mulai dari input, proses dan output oleh seluruh *risk owner* dan dilaporkan kepada *risk advisor* (Manajemen Risiko) dan dipantau *treatment/* perlakuannya secara berkala.
2. **Perencanaan Strategis Bisnis Perusahaan.**
Peruri secara konsisten mengimplementasikan Manajemen Risiko pada setiap proses perencanaan strategi bisnis perusahaan yang mencakup risk review terhadap rencana pengembangan strategi bisnis baru, investasi, rencana kerjasama perusahaan, termasuk keikutsertaan tender, merger, akuisisi dan setoran modal anak perusahaan. Pelaksanaan review ini mengacu pada prinsip *six eyes principals*, di mana realisasi dari sebuah inisiatif bisnis harus melalui tahapan inisiator, *reviewer* dan *approval*.

must ensure a conducive control environment, implement established policies and consider risks in every decision and action taken, and effective internal control.

2. **Second Line of Defense (*2nd Line of Defense*).**
The second layer of defense is carried out by the Risk Management Unit and functions as a controller/control over the activities carried out by the work unit (*1st Line of Defense*). This second layer of defense is tasked with monitoring Risk Management implementation objectively and thoroughly, supervising how business functions are carried out within the Risk Management corridor and the established procedures.
3. **Third Line of Defense (*3rd Line of Defense*).**
The third layer of defense is carried out by internal audit to ensure the first and second layers have been implemented. Internal audit also has a duty to review and evaluate the overall Risk Management plan and implementation.

Risk Management Efforts

As stated in the basic principles of Risk Management in ISO 31000, one of which is that risk management is an integral part of the organization process, so to ensure the realization of risk awareness and culture, Peruri integrates Risk Management into all company business processes, namely:

1. **Main Business Processes and Company Operations.**
The main business process risks are identified starting from the input, process and output by all risk owners and reported to the risk advisor (Risk Management) and their treatment/treatment is monitored periodically.
2. **Corporate Business Strategic Planning.**
Peruri consistently implements Risk Management in every corporate business strategy planning process which includes risk review of new business strategy development plans, investments, corporate cooperation plans, including participation in tenders, mergers, acquisitions and subsidiary capital deposits. The implementation of this review refers to the *six eyes principals*, where the realization of a business initiative must go through the initiator, reviewer and approval stages.

3. Perencanaan dan Penganggaran.
Risk review/analysis dilakukan juga pada proses perencanaan dan penganggaran, mencakup penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang disusun berdasarkan risiko perusahaan (RKAP berbasis risiko) serta *risk review/analysis* terhadap pengalihan dan penyimpangan anggaran perusahaan. *Risk review/analysis* dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dengan tujuan untuk meminimalisir *potential loss* dari keputusan yang diambil.
4. Sistem Manajemen Terintegrasi Mutu, K3, Lingkungan dan Pengamanan
Peruri telah aktif secara berkala melakukan identifikasi bahaya/aspek dan penilaian terhadap risiko/dampak K3, Lingkungan dan Pengamanan yang ada dalam semua aktivitas dan aset perusahaan. Hasil dari identifikasi dan penilaian berupa program mitigasi risiko menjadi salah satu bahan pertimbangan manajemen dalam menyusun Program K3, Lingkungan dan Pengamanan perusahaan.

Hal itu dilakukan guna mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan serta menjaga keamanan dan mengantisipasi ancaman baik dari internal maupun eksternal yang berdampak negatif bagi sumber daya dan produk perusahaan. Program mitigasi risiko tersebut dipantau dan dievaluasi dalam Rapat Tinjauan Manajemen guna memastikan tingkat efektivitas penerapan perbaikan secara berkelanjutan.

Profil Risiko 2019 dan Mitigasinya

Penentuan risiko tingkat korporat (*Corporate Risk*) menggunakan metode *Risk Control Self Assessment* (RCSA) oleh unit kerja secara *bottom-up*. Pelaksanaan assessment disesuaikan dengan sasaran utama di setiap unit kerja dan dilakukan konsolidasi penentuan Corporate Risk dengan Manajemen Risiko. Dari hasil *assessment*, terdapat 25 (dua puluh lima) risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan dan terus dimonitor oleh *Risk Owner* yang telah melakukan komunikasi dan konsultasi secara rutin dengan Manajemen Risiko. Selain itu, terdapat pula risiko yang baru diidentifikasi pada pertengahan 2019 disesuaikan dengan perubahan konteks internal dan eksternal yang terjadi.

3. Planning and Budgeting.
Risk review/analysis is also carried out in the planning and budgeting process, including the preparation of the Company's Budget Work Plan which is prepared based on company risk (risk-based RKAP) as well as risk review/analysis of changes and deviations in the company's budget. Risk review/analysis is used as a basis for decision making with the aim of minimizing the potential loss of decisions made.
4. Integrated Quality Management System, K3, Environment, and Security
Peruri has been active in periodically identifying hazards/aspects and assessing the risks/impacts of K3, Environment and Security that exist in all company activities and assets. The results of the identification and assessment in the form of a risk mitigation program are one of the management considerations in preparing the company's K3, Environment and Safeguard Programs.

This is done in order to prevent occupational accidents, occupational diseases, environmental pollution and to maintain security and to anticipate threats from both internal and external that have a negative impact on the company's resources and products. The risk mitigation program is monitored and evaluated in Management Review Meetings to ensure the effectiveness of the implementation of continuous improvements.

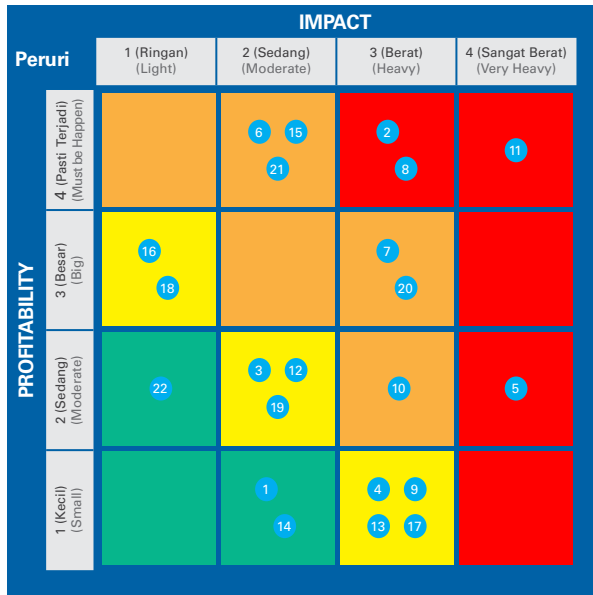
Risk Profile for 2019 and Mitigation

Determination of corporate risk (*Corporate Risk*) using the Risk Control Self Assessment (RCSA) method by the work unit on a bottom-up basis. The assessment is carried out in accordance with the main targets in each work unit and a consolidation of the determination of Corporate Risk with Risk Management. From the assessment results, there are 25 (twenty five) main risks faced by the company and are continuously monitored by the Risk Owner who has communicated and consulted regularly with Risk Management. In addition, there are also risks that were only identified in mid-2019 according to changes in the internal and external context that occur.

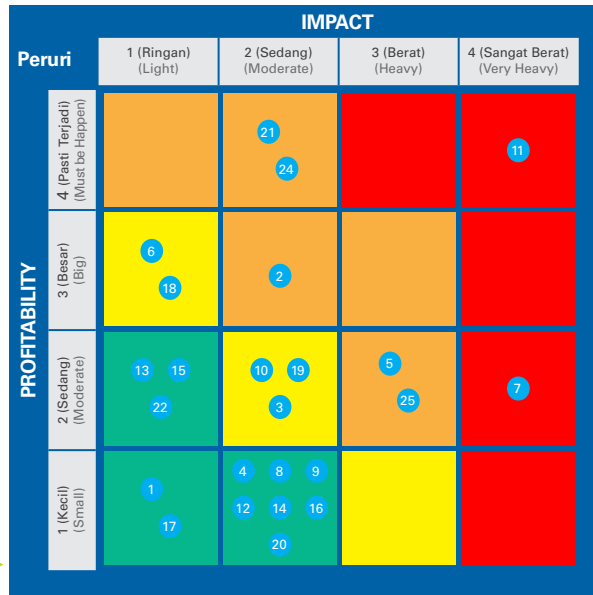
Untuk menggambarkan posisi level risiko sepanjang 2019, digunakan *Heat Map* sebagai berikut.

To illustrate the position of the risk level throughout 2019, the following Heat Map is used.

Profil Corporate Risk Peruri pada Awal 2019
Peruri Corporate Risk Profile in Early 2019



Profil Corporate Risk Peruri pada Akhir 2019
Peruri Corporate Risk Profile in the end of 2019



Sumber: Review Risk Register, 2019

Source: Review Risk Register, 2019

Level dari masing-masing risiko telah mengalami perubahan, setelah dilakukan *treatment* (penanganan risiko). Namun, sebagian *treatment* risiko belum selesai dilaksanakan dan masih belum memberikan dampak yang signifikan. Oleh sebab itu, Manajemen Risiko terus melakukan monitoring dan memberikan layanan berkonsultasi dengan *Risk Owner* agar semua risiko yang dihadapi Peruri dapat ditangani dan tidak menimbulkan *potential loss*.

The level of each risk has changed, after treatment (risk management) is carried out. However, some risk treatments have not been completed and still have not had a significant impact. Therefore, Risk Management continues to monitor and provide consultation services with the Risk Owner so that all risks faced by Peruri can be handled and do not cause potential loss.

Berikut merupakan daftar risiko-risiko utama yang dihadapi Peruri:

The following is a list of the main risks faced by Peruri:

No	Owner	Risiko Risk	Treatment Risiko Treatment Risk
1	Direktorat Operasi Directorate of Operations	Keterlambatan Bahan Baku Kertas Uang dan Logam Uang Delay in Raw Material for Banknotes and Currency	Join Planning Session (JPS) bersama BI Join Planning Session (JPS) with BI
2	Direktorat Operasi Directorate of Operations	Kerusakan pada Mesin Produksi Damage to the Production Machine	Preventive Maintenance
3	Direktorat Operasi Directorate of Operations	Kualitas Bahan Baku Kertas Uang Tidak Sesuai Spesifikasi The quality of the raw material for bank notes does not match the specifications	Koordinasi dengan Bank Indonesia terkait pemilihan pemasok kertas yang sesuai standar Coordination with Bank Indonesia regarding the selection of paper suppliers that comply with standards

No	Owner	Risiko Risk	Treatment Risiko Treatment Risk
4	Direktorat SDM dan Umum Directorate of Human Resources and General Affairs	Terjadi pencurian dan Sabotase There was theft and sabotage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan TNI dan POLRI; 2. Koordinasi dengan MUSPIDA dan Lingkungan Perusahaan; 3. Monitoring melalui Peralatan Pengamanan elektronik; 4. Pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patrol. <ol style="list-style-type: none"> 1. Cooperation and coordination with the security apparatus of the TNI and POLRI; 2. Coordination with MUSPIDA and Company Environment; 3. Monitoring through electronic security equipment; 4. Arrangement, guarding, supervision and patrol.
5	Direktorat Pengembangan Usaha Directorate of Business Development	Perhitungan harga jual tidak tepat The selling price calculation is incorrect	Penyajian tarif Jam Kerja Orang (JKO), Jam Kerja Mesin (JKPI) dan harga yang akurat dan selalu diperbaharui Presentation of rates for Person Work Hours (JKO), Machine Hours (JKPI) and prices that are accurate and always updated
6	Direktorat Operasi Directorate of Operations	<i>Delivery time</i> yang singkat akibat penerbitan SPK yang mendadak oleh customer karena menunggu pengesahan APBN Short delivery time due to sudden SPK issuance by customers pending APBN approval	Mengadakan koordinasi dengan pelanggan membahas perencanaan terkait pekerjaan sebelum tahun anggaran Coordinating with customers to discuss planning related to work before the fiscal year
7	Direktorat Pengembangan Usaha Directorate of Business Development	Belum adanya aturan dari Direktorat Jenderal Pajak terkait e-Meterai There is no regulation from the Directorate General of Taxes regarding e-Stamp	Melakukan audiensi dan pembahasan semiformal meeting Conducting audiences and discussing semiformal meetings
8	Direktorat Pengembangan Usaha Directorate of Business Development	Keterbatasan kapasitas mesin Limited machine capacity	Rapat kerja bersama customer untuk menentukan jumlah dan jenis pesanan yang akan datang Work meetings with customers to determine the number and types of future orders
9	Direktorat Pengembangan Usaha Directorate of Business Development	Tidak tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bisnis digital The unavailability of competent human resources in the digital business	Pemenuhan SDM dengan jalan mutasi internal, pro hired dan atau mitra pihak ketiga. Fulfillment of human resources by means of internal transfers, pro hired, and/or third party partners.
10	Direktorat Pengembangan Usaha Directorate of Business Development	Belum memiliki jenis <i>security feature</i> yang spesifik/ paten sendiri Do not have a specific type of security feature/patent itself	Melakukan verifikasi fitur pengaman dan melakukan telusur serta pemetaan fitur pengaman yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual Verify security features and perform search and mapping of security features that have Intellectual Property Rights
11	Direktorat Pengembangan Usaha Directorate of Business Development	Belum adanya target pasar yang pasti untuk bisnis High Security Paper There is no definite target market for the High Security Paper business	Menyusun Feasiibility Study dan Bussiness Model Canvassing untuk project High Security Paper Prepare Feasiibility Study and Business Model Canvassing for the High Security Paper project
12	Direktorat Keuangan Directorate of Finance	Realisasi biaya tahun melebihi anggaran (<i>over budget</i>) Realized over-budget year (over budget)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan pengendalian anggaran biaya; 2. Menyusun laporan laba rugi sensitivitas bulanan; 3. Meng-upgrade sistem penganggaran dan ERP yang digunakan untuk support proses monitoring <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulate and disseminate cost budget control policies; 2. Prepare a monthly sensitivity income statement; 3. Upgrade the budgeting and ERP systems used to support the monitoring process
13	Direktorat Keuangan Directorate of Finance	Adanya fluktuasi valas yang mempengaruhi perubahan harga melebihi HPS The existence of foreign currency fluctuations that affect price changes beyond the HPS	User/pengusul melakukan koordinasi dengan jajaran pengadaan dan menyusun serta me-monitor jadwal realisasi/implementasi The user/proposer coordinates with the ranks of procurement and compiles and monitors the realization/ implementation schedule

No	Owner	Risiko Risk	Treatment Risiko Treatment Risk
14	Direktorat Keuangan Directorate of Finance	Perpindahan, Kehilangan dan Kerusakan Aset Transfer, Loss and Damage of Assets	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan update data asset tetap/inventaris melalui asset tracking dan portal BUMN secara berkala; 2. Monitoring dan call visit terhadap batas-batas tanah/lahan dan bangunan secara berkala; 3. Pembangunan gudang transit untuk asset yang diusulkan peghapusan; 4. Asuransi asset (bangunan, mesin, kendaraan, persediaan). <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventory and update of fixed asset/inventory data through asset tracking and SOE portal on a regular basis; 2. Monitoring and call visits to the boundaries of land and buildings regularly; 3. Construction of transit warehouses for assets proposed for write-off; 4. Asset insurance (buildings, machinery, vehicles, supplies).
15	Direktorat Keuangan Directorate of Finance	Sulit mendapatkan mitra binaan yang sesuai dengan kriteria Difficulties in finding partners who match the criteria	Membuat list dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan mitra. Make a list and coordinate with related parties to get partners.
16	Direktorat Keuangan Directorate of Finance	<i>Non Performing Loan</i> (NPL) tinggi High Non Performing Loan (NPL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring pinjaman secara berkala; 2. Penagihan secara berkala. <ol style="list-style-type: none"> 1. Regular loan monitoring; 2. Regular billing.
17	Direktorat SDM dan Umum Directorate of Human Resources and General Affairs	Tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan PKB No agreement was reached in the PKB negotiations	Memperpanjang masa berlaku PKB 2018-2019 Extending the validity period of the 2018-2019 PKB
18	Direktorat SDM dan Umum Directorate of Human Resources and General Affairs	Pelanggaran disiplin pegawai cenderung meningkat Employee discipline violations tend to increase	Memberikan pembinaan secara langsung maupun melalui atasannya Provide guidance directly or through superiors
19	Direktorat SDM dan Umum Directorate of Human Resources and General Affairs	Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja meningkat The number of work accidents and occupational diseases increases	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan APD dan sosialisasi peraturan K3 kepada karyawan 2. Pelaksanaan Safety Patrol <ol style="list-style-type: none"> 1. Use of PPE and socialization of K3 regulations to employees 2. Implementation of Safety Patrol
20	Direktorat Operasi Directorate of Operations	Gangguan supply listrik PLN PLN electricity supply disruption	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi mesin generator listrik eksisting sesuai kapasitasnya dan jadwal produksi; 2. Sewa mesin generator listrik. <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimization of the existing electric generator engine according to its capacity and production schedule; 2. Rent an electric generator engine.
21	Direktorat Pengembangan Usaha Directorate of Business Development	Project Pencetakan Perangko Nepal mengalami kerugian The Nepal Stamp Printing Project is at a disadvantage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perhitungan estimasi profit margin dengan benar; 2. Melakukan kemitraan dengan mirroring contract <ol style="list-style-type: none"> 1. Calculating the estimated profit margin correctly; 2. Partnering with a mirroring contract
22	Direktorat Operasi Directorate of Operations	Inefisiensi produksi Uang RI RI Money production inefficiency	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbaikan bisnis proses SBU Uang RI; 2. Menyelesaikan partial good sheet dan mengurangi inschiet <ol style="list-style-type: none"> 1. To improve the business process of the RI Currency SBU; 2. Complete partial good sheets and reduce inschiet

No	Owner	Risiko Risk	Treatment Risiko Treatment Risk
23*	Direktorat Utama Main Directorate	Inefisiensi holding NPNC karena tumpang tindih bisnis dan pengelolaan hubungan antar anggota holding yang kurang efektif Inefficiency of NPNC holding due to overlapping business and ineffective management of relationships between holding members	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan business architecture anggota holding 2. Penyusunan dan penerapan strategi pengelolaan bisnis yang tumpang tindih (co-existence, collaboration, consolidation, combination) 3. Penguatan struktur, sistem dan SDM dalam pengelolaan dan pengawasan holding <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulation of the business architecture of the holding members 2. Compilation and implementation of overlapping business management strategies (co-existence, collaboration, consolidation, combination) 3. Strengthening the structure, systems and human resources in the management and supervision of holding
24	Direktorat Keuangan Directorate of Finance	Program kerja strategis tidak dijalankan karena pemberlakuan pagu anggaran Strategic work programs are not implemented because the budget ceiling is enforced	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan one-on-one kepada unit kerja terkait program kerja strategis dan pendukung 2. Mencadangkan dana darurat yang dapat digunakan untuk menjalankan program di unit kerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Conduct one-on-one for work units related to strategic and support work programs 2. Reserving emergency funds that can be used to run programs in the work unit
25	Direktorat Pengembangan Usaha Directorate of Business Development	Kalah bersaing dengan kompetitor untuk produk turunan dari <i>Government Solution dan Track and trace</i> Lose in competing with competitors for derivative products from Government Solution and Track and trace	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan marketing program kepada potensial client (perikatan kerjasama dalam kurun waktu panjang dengan klien) 2. Melakukan diferensial produk dari kompetitor <ol style="list-style-type: none"> 1. Conducting marketing programs to potential clients (long-term cooperation agreements with clients) 2. Doing product differentials from competitors

* Dari daftar risiko utama di atas, terdapat risiko yang sudah tidak relevan bagi Peruri, yaitu Risiko Nomor 23: inefisiensi holding NPNC karena tumpang tindih bisnis dan pengelolaan hubungan antar anggota holding yang kurang efektif. Risiko tersebut sudah tidak relevan bagi perusahaan karena adanya perubahan konsep holding menjadi clustering.

*From the list of main risks above, there are risks that are no longer relevant to Peruri, namely Risk Number 23: inefficiency of NPNC holding due to overlapping businesses and ineffective management of relationships between holding members. This risk is no longer relevant to the company because of the change in the concept of holding to clustering.

Review dan Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko 2019

dalam hal *review* dan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko, Peruri melakukan pengukuran Risk Management Maturity Level. Pengukuran Risk Management Maturity Level dilakukan setiap tahun secara self-assessment dengan menggunakan dua pendekatan/ metode, yaitu:

1. Pengukuran pengetahuan dasar persepsi karyawan tentang implementasi manajemen risiko menggunakan kuesioner;
2. Penilaian kecukupan dokumentasi manajemen risiko secara *self assessment*.

Berdasarkan penilaian *Risk Management Maturity Level* pada tahun 2019 Peruri memperoleh skor 3,083 (skala 0 – 5) atau "*ERM Defined*". Pada level ini perusahaan telah memiliki kebijakan/prosedur baku formal dan tertulis mengenai manajemen risiko yang telah disosialisasikan kepada jajaran manajemen dan karyawan untuk dipatuhi dan dijalankan dalam aktivitas sehari-hari.

Review and Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System in 2019

In terms of review and evaluation of the effectiveness of risk management implementation, Peruri measures the Risk Management Maturity Level. Measurement of Risk Management Maturity Level is carried out annually on a self-assessment basis using two approaches/methods, namely:

1. Measuring basic knowledge of employees' perceptions about the implementation of risk management using a questionnaire;
2. Self-assessment of the adequacy of risk management documentation.

Based on the assessment of Risk Management Maturity Level in 2019 Peruri obtained a score of 3.083 (scale 0 - 5) or "ERM Defined". At this level the company has a formal and written standard policy/procedure regarding risk management which has been socialized to management and employees to be obeyed and carried out in daily activities.

Upaya Peningkatan Budaya Sadar Risiko

dalam rangka meningkatkan budaya sadar risiko di lingkungan perusahaan, sepanjang 2019 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang ditujukan pada tiap tingkat manajemen mulai dari pelaksana sampai dengan *top* manajemen, antara lain:

1. *Executive Briefing: Risk Based Budgeting* kepada pejabat tingkat Kepala Departemen hingga *Top Management*;

Efforts to Increase Risk Awareness Culture

In order to improve the culture of risk awareness in the company environment, throughout 2019, socialization activities were carried out aimed at each level of management, from implementer to top management, including:

1. *Executive Briefing: Risk Based Budgeting* for officials from Head of Department level to Top Management;



2. *Sosialisasi Audit Risk Management Integration* untuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Pengawasan Intern;

2. *Socialization of Risk Management Integration Audit* for Risk Management Unit and SPI;



3. Sosialisasi *Risk Control Self-Assessment* untuk seluruh Kepala Departemen dan *Risk Agent*;



3. Socialization of Risk Control Self-Assessment for all Department Heads and Risk Agents;



4. Kegiatan *Sharing Session* RM kepada *Risk Agent*;



4. RM Sharing Session with Risk Agents;

5. Sosialisasi manajemen risiko, GCG dan Penggunaan Nota Justifikasi kepada setiap unit kerja;



5. Socialization of risk management, GCG and Use of Justification Notes to each work unit;



Pada 2019 juga dilaksanakan kegiatan *Risk Management Award* yaitu kegiatan yang merupakan bentuk pemberian penghargaan/*reward* yang diberikan kepada *risk owner* yang memiliki kesadaran dalam penerapan Manajemen Risiko di unit kerjanya.. Terdapat 3 (tiga) kategori pemenang pada *Risk Management Award*, yaitu:

1. The Best Risk Owner 2019
Pemenang kategori ini merupakan unit kerja yang menerapkan manajemen risiko dengan baik yang berimplikasi pada kinerja unit kerja tersebut;
2. The Most Committed Risk Leader 2019
Pemenang kategori ini merupakan para Kepala Divisi dan Kepala Departemen yang memiliki komitmen kuat dalam menerapkan manajemen risiko;
3. Risk Agent of the Year
Pemenang kategori ini merupakan *risk agent* yang memiliki inisiatif dalam menjalankan tugas sebagai koordinator manajemen risiko di unit kerjanya.

In 2019, the Risk Management Award activity was also carried out, which is an activity which is a form of award/*reward* given to risk owners who have awareness in implementing Risk Management in their work units. There are 3 (three) categories of winners in the Risk Management Award, namely:

1. The Best Risk Owner 2019
The winner of this category is a work unit that implements risk management well which has implications for the work unit's performance;
2. The Most Committed Risk Leader 2019
The winners of this category are Division Heads and Department Heads who have a strong commitment to implementing risk management;
3. Risk Agent of the Year
The winner of this category is a risk agent who has the initiative in carrying out his duties as risk management coordinator in his work unit.

Pengumuman pemenang Risk Management Award ini dilakukan pada *Executive Briefing: Risk Based Budgeting* dengan rincian pemenang sebagai berikut:

The announcement of the winner of the Risk Management Award will be made at the Executive Briefing: Risk Based Budgeting with the details of the winners as follows:



Sistem Informasi/Aplikasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam penerapan manajemen risiko yang lebih efektif. Aplikasi tersebut mulai dikembangkan pada akhir tahun 2018 dan dinamai sebagai aplikasi *Risk Control Self-Assessment (RCSA)*.

Risk Management Information System/ Application

The risk management information system is part of the management information system that is owned and developed in accordance with the needs for a more effective risk management application. The application was developed at the end of 2018 and was named the Risk Control Self-Assessment (RCSA) application.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sesuai dengan pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

Pembentukan Sistem Pengendalian Internal juga dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Perusahaan sebagai Perusahaan yang tunduk dan patuh terhadap prinsip penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Upaya pengendalian internal ini secara khusus diterapkan dalam aspek-aspek penting seperti aspek operasional, keuangan, SDM dan juga kepatuhan terhadap perundang-undangan. Selain itu, sistem pengendalian internal juga dimaksudkan untuk menekan potensi risiko usaha maupun praktik penyimpangan etika bisnis yang berdampak negatif pada kinerja Perusahaan.

KESESUAIAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA COSO

Pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dilakukan secara terus-menerus oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Sistem pengendalian intern yang diterapkan telah terlaksana secara menyeluruh dan terintegrasi pada proses bisnis perusahaan dengan mengadaptasi pada COSO Internal Control. Serangkaian sistem pengendalian intern yang telah dikembangkan dan dijalankan secara konsisten meliputi:

1. Lingkungan pengendalian internal direalisasikan ke dalam pedoman *Code of Conduct* dan *Code of Corporate Governance* yang di dalamnya telah mengandung segala kebijakan terkait dengan integritas, etika, kewenangan, tanggung jawab, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, dengan merujuk pada ISO 31000:2018, seluruh kebijakan dan panduan pengelolaan risiko dituangkan dalam risk management and compliance manual;
3. Aktivitas pengendalian, direalisasikan dalam bentuk:
 - a. *Corporate policy manual* dan *standar operating procedures* serta instruksi kerja yang diterapkan secara konsisten, di-review dan secara berkala dilakukan sosialisasi;

In accordance with Article 26 of the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 regarding the Implementation of Good Corporate Governance in SOE, the Board of Directors must establish an effective internal control system to safeguard the Company's investment and assets.

The establishment of the Internal Control System is also intended to realize the Company's commitment as a company that complies with and adheres to the principles of implementing Good Corporate Governance. This internal control effort is specifically applied in important aspects such as operational, financial, human resources, and compliance with laws and regulations. In addition, the internal control system is also intended to reduce potential business risks and practices of deviations in business ethics that have a negative impact on the Company's performance.

INTERNAL CONTROL POLICY CONFORMITY WITH THE COSO FRAMEWORK

Management and all employees are continuously understanding about the Company's Internal Control System to provide adequate confidence in the achievement of organizational goals. The internal control system implemented has been implemented thoroughly and integrated in the company's business processes by adapting to COSO Internal Control. A series of internal control systems that have been developed and implemented consistently include:

1. The internal control environment is realized in the Code of Conduct and Code of Corporate Governance guidelines, which contain all policies related to integrity, ethics, authority, responsibility, organization and human resource development;
2. Business risk assessment and management, with reference to ISO 31000:2018, all risk management policies and guidelines are set forth in the risk management and compliance manual;
3. Control activities are realized in the form of:
 - a. Corporate policy manuals and standard operating procedures as well as work instructions that are consistently implemented, reviewed and regularly socialized;

- b. Nota Justifikasi pada kegiatan berikut:
- Inisiatif strategis bisnis (*merger*, akuisisi, investasi dan rencana kerja sama);
 - *Getting order management*;
 - Pengalihan dan penyimpangan anggaran;
 - Penyaluran dana program kemitraan (kegiatan PKBL);
 - Pembayaran denda;
- c. Divisi risk management and compliance melakukan pengawalan terhadap proses bisnis yang berjalan di perusahaan atas kegiatan pengelolaan risiko dan kepatuhan akan efektivitas mitigasi risiko perusahaan;
4. Sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi atau *Enterprise Resource Planning Oracle* dan aplikasi monitoring PMO, secara rutin dan berkala menyajikan Laporan Manajemen baik triwulanan, semesteran dan tahunan; Untuk jalur komunikasi Peruri membangun media komunikasi yaitu:
- a. Secara tertulis dengan memanfaatkan media portal peruri;co;id dan di dalamnya terintegrasi pula dengan menu persuratan elektronik dan mail;peruri;co;id;
- b. Secara bertatap muka melalui rapat mingguan yang secara rutin dilakukan dan dihadiri mulai dari anggota unit terkecil hingga Direksi; Sedangkan, Rapat rutin Direksi dan Dewan Pengawas diselenggarakan satu bulan sekali;
5. Monitoring dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulanan dan semesteran oleh tiap unit kerja dan sebagai garda terakhir yang memberikan keyakinan (*assurance*) secara memadai dan independen atas efektivitas sistem pengendalian intern melalui kegiatan pengawasan secara rutin dan konsultasi.
- b. Note of Justification on the following activities:
- Business strategic initiatives (mergers, acquisitions, investment and cooperation plans);
 - Getting order management;
 - Budget diversions and deviations;
 - Distribution of partnership program funds (PKBL activities);
 - Payment of fines;
- c. The risk management and compliance division monitors the business processes that run in the company for risk management activities and compliance with the effectiveness of corporate risk mitigation;
4. The information and communication system that is implemented by utilizing an accounting information system or Oracle's Enterprise Resource Planning and PMO monitoring application, regularly and periodically presents Management Reports both quarterly, semiannually and annually; For communication lines, Peruri builds communication media, namely:
- a. In writing by utilizing the peruri;co;id media portal and it is also integrated with the electronic correspondence menu and mail;peruri;co;id;
- b. Face to face through weekly meetings which are routinely held and attended, starting from the unit member to the Board of Directors; Meanwhile, The Board of Directors and Supervisory Board meetings is held once a month;
5. Monitoring is carried out regularly both monthly, quarterly and semiannually by each work unit and as the last guard that provides adequate and independent assurance on the effectiveness of the internal control system through routine monitoring and consultancy activities.

HASIL EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya SPIP yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi. Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPIP secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perusahaan.

Satuan Pengawasan Intern melakukan review dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja dan Entitas Anak. Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif. Dewan Pengawas khususnya melalui peran Komite Audit turut berperan aktif terkait evaluasi SPIP dengan melakukan telaah hasil evaluasi oleh Satuan Pengendalian Intern. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2019, diperoleh hasil bahwa sistem Pengendali Internal pada Perusahaan telah memadai.

Sementara review atas efektivitas sistem pengendalian internal dalam pelaporan keuangan untuk tahun buku 2019 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Handori Sugiarto Adi & Rekan yang dijelaskan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 005/LK-PI/Peruri/II/2020 tanggal 17 Februari 2020. Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Handori Sugiarto Adi & Rekan telah memberikan hasil penilaian yang menyatakan bahwa Peruri telah mematuhi dalam semua hal yang material dalam pelaksanaan pengendalian intern secara memadai.

RESULTS OF THE EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors is responsible for the implementation of a reliable and effective SPIP and has an obligation to promote an effective risk awareness culture and must ensure that this is inherent at every level of the organization. The Internal Control Unit is responsible for evaluating and playing an active role in improving the effectiveness of SPIP on an ongoing basis with regard to operational implementation in achieving the goals set by the Company.

The Internal Control Unit reviews and periodically checks all activities in the Work Unit and Subsidiaries. The results of the evaluation are submitted to the Board of Directors for follow-up and monitoring of its implementation to ensure that the SPI is running effectively. The Supervisory Board, especially through the role of the Audit Committee, plays an active role in the evaluation of SPIP by reviewing the results of the evaluation by the Internal Control Unit. Based on the evaluations that have been carried out during 2019, it was found that the Company's Internal Control system was adequate.

Meanwhile, a review on the effectiveness of the internal control system in financial reporting for the 2019 financial year was carried out by the HLB Handori Sugiarto Adi & Rekan Public Accountant Firm (KAP) as described in the Independent Auditor's Report Number 005/LK-PI/Peruri/II/2020 dated 17 February 2020. HLB Handori Sugiarto Adi & Partners Public Accountant Firm (KAP) has provided an assessment result which states that Peruri has complied with all material matters in the implementation of adequate internal control.

PERKARA PENTING

IMPORTANT EVENT

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan pada 2019 adalah sebagai berikut.

LEGAL MATTERS

The legal problems faced by the Company in 2019 are as follows.

Permasalahan Hukum Legal Matters	2018		2019	
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perdata Civil	Pidana Criminal
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In the process of being completed	-	-	1	-
Jumlah Total	-	-	1	-

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DI 2019 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Pada Senin 13 Mei 2019, Peruri menerima surat panggilan Pengadilan Negeri Jakarta Sleatan Nomor: 403/Pdt.G/2019/PN.Jkt-Sel untuk menghadiri pemeriksaan Perkara Perdata dalam perkara antara Try Haryanto,dkk. sebagai Penggugat melawan Peruri sebagai tergugat 1 & Ir. Ashari sebagai tergugat 2. Dalam gugatannya para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) meminta pada tergugat untuk mempekerjakan kembali para penggugat dan membayar kerugian materiil dan immaterial dengan rincian :

1. Kerugian material sebesar Rp 3.294.000.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah);
2. Kerugian Immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).

Pada 17 Mei 2019 Peruri memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk menangani perkara gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 2 Desember 2019, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan pada perkara tersebut. Putusan tersebut menyatakan

1. Menolak eksepsi para tergugat (Peruri);
2. Menolak gugatan para penggugat (Try Haryanto,dkk) untuk seluruhnya;
3. Menghukum para penggugat (Try Haryanto, dkk) untuk membayar biaya perkara.

Permohonan banding dapat diajukan oleh para Penggugat di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Sampai dengan saat ini belum ada pemberitahuan dari kepaniteraan mengenai pengajuan banding terhadap putusan PN Jakarta Selatan tersebut.

LEGAL ISSUES FACED BY COMPANIES IN 2019 AND THEIR IMPACT ON THE COMPANY

On Monday, 13 May 2019, Peruri received a summons from the South Jakarta District Court Number: 403/Pdt.G/2019/PN.Jkt-Sel to attend the Civil Case examination in the case between Try Haryanto, et al. as Plaintiff against Peruri as Defendant 1 & Ir. Ashari as the defendant 2. In their lawsuit, the plaintiffs filed a lawsuit against the law (onrechtmatige daad) asking the defendant to reinstate the plaintiffs and pay for material and immaterial losses with details:

1. Material loss of IDR 3,294,000,000 (Three Billion Two Hundred Ninety-Four Million Rupiah);
2. Immaterial loss of IDR 5,000,000,000 (Five Billion Rupiah).

On May 17, 2019 Peruri gave power to the attorney to handle the lawsuit at the South Jakarta District Court. On December 2, 2019, the Panel of Judges at the South Jakarta District Court read out the verdict on the case. The verdict stated

1. Refusing the exception of the defendants (Peruri);
2. Refusing the plaintiff's claim (Try Haryanto, et al) for the whole;
3. Sentenced the plaintiffs (Try Haryanto, et al) to pay court fees.

The Plaintiffs may submit an appeal request at the clerkship of the district court within 14 (fourteen) calendar days from the day after the verdict is pronounced or after being notified to a party who was not present at the reading of the decision. Until now, there has been no notification from the secretariat regarding the filing of an appeal against the decision of the South Jakarta District Court.

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama periode 2019, tidak ada Dewan Pengawas maupun Direksi Perusahaan yang memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN

Selama periode 2019, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi Anak Perusahaan baik perdata maupun pidana.

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRASI OLEH OTORITAS TERKAIT

Selama tahun 2019, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan sebagai organisasi, entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Pengawas oleh Otoritas terkait.

PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM

Di sepanjang 2019, Perusahaan tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perusahaan sebagai organisasi, entitas anak, Dewan Pengawas maupun Direksi.

DISCLOSURE OF LEGAL ISSUES CURRENTLY FACING THE CURRENT SUPERVISORY BOARD AND DIRECTORS

During the period of 2019, there was no Supervisory Board or Board of Director facing legal issues, both civil and criminal.

DISCLOSURE OF LEGAL ISSUES CURRENTLY FACING SUBSIDIARIES

During the 2019 period, there were no legal problems faced by the Subsidiaries, both civil and criminal.

DISCLOSURE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS BY RELATED AUTHORITIES

During 2019, there were no material administrative sanctions that affected the Company's business continuity and there were also no administrative sanctions imposed on the Company as an organization, subsidiaries, members of the Board of Directors or members of the Supervisory Board by the relevant authorities.

IMPORTANT MATTERS OUTSIDE THE LEGAL ASPECTS

Throughout 2019, the Company did not find any important cases outside the legal aspects involving the Company as an organization, subsidiaries, the Supervisory Board or the Board of Directors.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Dalam rangka memudahkan komunikasi dan akses para pemangku kepentingan termasuk informasi terbaru mengenai laporan kondisi keuangan, non-keuangan dan data Perusahaan lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban transparansi serta akuntabilitas perusahaan, Perusahaan senantiasa melakukan pembaharuan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi.

Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai GCG, di antaranya melalui penerapan keterbukaan informasi baik secara internal maupun eksternal. Hal ini mengacu kepada Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan, "bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik" dan sebagai pelaksanaan prinsip GCG.

KORESPONDENSI DAN LAPORAN BERKALA

Informasi keuangan dan non keuangan dari Perusahaan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan. Informasi dipaparkan melalui laporan berupa:

1. Laporan Triwulan;
2. Penjelasan dan klarifikasi atas pemberitaan di media massa;
3. Keterbukaan informasi terkait *corporate action*;
4. Laporan administrasi bulanan pemegang saham Perusahaan;
5. Laporan Tahunan.

SITUS WEB PERUSAHAAN

Peruri memiliki website resmi perusahaan dengan domain www.peruri.co.id yang dapat diakses selama 24 jam dan 7 hari seminggu. Website senantiasa memberikan kemudahan untuk mengakses informasi, diantaranya mengenai informasi *corporate identity*, finansial dan Perusahaan, publikasi, produk dan layanan, aksi korporasi, visi dan misi Perusahaan dan lain-lain. Untuk memungkinkan adanya interaksi antara Perusahaan dan publik maka disediakan alamat www.peruri.co.id.

In order to facilitate communication and access for stakeholders including the latest information on reports on financial, non-financial conditions, and other Company data related to accountability for transparency and corporate accountability, the Company constantly updates the facilities and infrastructure to support the delivery of information.

The company is always committed to implementing GCG values, including through the implementation of information disclosure both internally and externally. This refers to Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness which states, "that Public Information Disclosure is a means of optimizing public oversight of the administration of the State and other Public Bodies and anything that has an impact on the public interest", and as an implementation of the principles of GCG.

CORRESPONDENCE AND PERIODIC REPORTS

Financial and non-financial information from the Company has been prepared and reported in a transparent manner to shareholders, stakeholders and other institutions as required. Information is reported according to the target date, presented completely and accurately, current, intact and sufficiently in accordance with the procedure, type and scope as stipulated in the provisions concerning Transparency of Company Financial Conditions. Information is presented through reports in the form of:

1. Quarterly Reports;
2. Explanation and clarification of news coverage in the mass media;
3. Information disclosure related to corporate actions;
4. Monthly administrative reports of the Company's shareholders;
5. Annual report.

COMPANY WEBSITE

Peruri has an official company website with the domain www.peruri.co.id which can be accessed 24 hours and 7 days a week. The website always provides easy access to information, including information regarding corporate identity, finance and the Company, publications, products and services, corporate actions, the Company's vision and mission and others. To allow for interaction between the Company and the public, the address www.peruri.co.id is provided.

SALURAN KOMUNIKASI INTERNAL

Selain menggunakan media komunikasi untuk menyebarkan informasi mengenai Perusahaan, dikembangkan juga berbagai forum tatap muka untuk memfasilitasi komunikasi antara Direksi, manajemen dan pegawai.

HUBUNGAN MEDIA

Untuk dapat menyampaikan informasi secara komprehensif, Perusahaan melakukan hubungan media melalui Rilis Media maupun aktivitas hubungan dengan sejumlah media baik nasional maupun lokal. Di bawah ini disajikan hubungan media yang dilakukan di sepanjang 2019.

INTERNAL COMMUNICATION CHANNELS

Apart from using communication media to disseminate information about the Company, various face-to-face forums have also been developed to facilitate communication between Directors, management and employees.

MEDIA RELATIONS

In order to provide comprehensive information, the Company maintains media relations through Release Media as well as relationship activities with a number of national and local media. Below is presented the media relations conducted throughout 2019.

Rilis Media Sepanjang 2019
Media Release Throughout 2019

Tanggal Rilis Release Date	Risalah Minutes
31 Januari 2019 January 31, 2019	Kementerian BUMN Ganti Satu Anggota Dewan Pengawas Peruri Ministry of SOE Changes One Member of Peruri's Supervisory Board
09 April 2019 April 9, 2019	Peruri Ekspor 1 Juta Buku Paspor Sri Lanka Peruri Exports 1 million Sri Lanka Passport
09 April 2019 April 9, 2019	Peruri Resmikan Rumah Kreatif Karawang Peruri established Karawang Creative Hub
30 April 2019 April 30, 2019	Peruri Teken Kerja Sama Dengan Ditjen Dukcapil dalam Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik untuk Layanan eKYC Biometrik Peruri signed Cooperation with Directorate General of Population and Civil Registration in NIK utilization, Population Data, and E-KTP for eKYC Biometric Service.
13 Mei 2019 May 13, 2019	Pergantian Anggota Dewan Pengawas Peruri Changes in Supervisory Board of Peruri
17 Mei 2019 May 17, 2019	M Bloc: Dari Gudang Produksi Uang Menuju Ruang Kreatif Generasi Milenial M-Bloc: From a Money Production Warehouse to the Millennials Creative Hub
30 Mei 2019 May 30, 2019	Peruri Berangkatkan 1.050 Orang Pada Program Mudik BUMN 2019 Peruri Sends 1,050 People for the 2019 SOE Homecoming Program
11 June 2019 June 11, 2019	Peruri Torehkan Laba Bersih Konsolidasian Rp288 Miliar pada 2018 Peruri recorded Consolidated Net-Income of Rp288 Billion in 2018
01 August 2019 August 1, 2019	Peruri, Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan Berikan Santunan Pada Keluarga Korban Kecelakaan di Tol Cipali KPI 154 Peruri, Jasa Raharja, and BPJS Ketenagakerjaan distributed donation for the Family of Accident Victim in Cipali Toll Road KPI 154
08 August 2019 August 8, 2019	Semester I 2019: Peruri Catat Laba Bersih Sebesar Rp 167 miliar Semester 1 2019: Peruri Recorded Net Income of Rp167 Billion.
27 September 2019 September 27, 2019	Luncurkan Produk Digital, Peruri Gelar "Business Conference and Exhibition" Established Digital Product, Peruri Held "Business Conference and Exhibition"
27 September 2019 September 27, 2019	Grand Launching M Bloc: Program Optimalisasi Aset Peruri dari Gudang Percetakan Uang Menjadi Creative Hub M-Bloc Grand Llaunching: Peruri Asset Optimization, from Money Printing Warehouse into Creative Hub
10 October 2019 October 10, 2019	Bangun Perumahan Karyawan, Peruri Gandeng BPJSTK dan BTN Build Employee Housing, Peruri Colaborated with BPJSTK and BTN
08 November 2019 November 08, 2019	Kinerja Triwulan III 2019: Peruri Raih Laba Bersih Konsolidasian Sebesar Rp 266,72 Miliar Trimester III 2019 Performance: Peruri Recorded Consolidated Net Income of Rp266.72 Billion

LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan Mengacu kepada Peraturan Kementerian BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Perusahaan mengungkapkan informasi keuangan, informasi penting maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan termasuk juga pelaksanaan pencapaian dan kegiatan usaha Perusahaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Tahunan tersebut dapat diunduh pada website Perusahaan.

Setiap tahun Peruri mengeluarkan Laporan Tahunan yang nantinya akan di informasikan kepada publik melalui website perusahaan serta dibagikan kepada pemegang saham dan regulator pengawas diantaranya Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian BUMN.

AKSES PUBLIK DAN HUBUNGAN INVESTOR

Perusahaan memanfaatkan media komunikasi seperti telepon, website, faksimili, surat dan surat elektronik untuk mendukung kemudahan dan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan pelanggan. Selain itu, Perusahaan juga berupaya memanfaatkan media massa dan sosial untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Adapun media komunikasi yang digunakan untuk mendukung kemudahan dan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dan Pemangku Kepentingan:

Sosial Media Perusahaan

Facebook	: @peruri.indonesia
Twitter	: @PeruriID
Instagram	: @peruri_indonesia
Youtube	: Peruri Indonesia

ANNUAL REPORT

Annual Report Referring to the Regulation of the Ministry of SOE Number: PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN, the company discloses financial information, important information and other matters concerning the Company in the Annual Report and The Financial Report includes the implementation of achievements and the Company's business activities within a period of 1 (one) year. The Annual Report can be downloaded on the Company's website.

Every year Peruri issues an Annual Report which will be notified to the public through the company's website and distributed to shareholders and supervisory regulators including the Ministry of Finance, the Financial Services Authority and the Ministry of BUMN.

PUBLIC ACCESS AND INVESTOR RELATIONS

The Company utilizes communication media such as telephone, website, facsimile, letter and electronic mail to support the ease and smoothness of communication between the Company and customers. In addition, the Company also seeks to utilize mass and social media to communicate with stakeholders.

The communication media used to support the ease and smoothness of communication between the Company and Stakeholders:

Company Social Media

Facebook	: @peruri.indonesia
Twitter	: @PeruriID
Instagram	: @peruri_indonesia
Youtube	: Peruri Indonesia

KODE ETIK

CODE OF ETHICS



Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan komitmen penerapan GCG Perusahaan yang mengandung hal-hal yang wajib dilaksanakan dan hal-hal yang wajib dihindari bagi insan Perusahaan dalam etika bisnis dan etika kerja, baik dalam melaksanakan aktivitas operasional Perusahaan maupun kehidupan sehari-hari. Sebagai upaya dalam menegakkan kode etik berbisnis, Perusahaan tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Selain itu *Code of Conduct* juga mengatur tentang tata cara berperilaku Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan beretika.

Dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, setiap insan Peruri wajib menaati kode etik yang tercantum dalam surat keputusan bersama dewan pengawas dan direksi nomor SK-04/DP/XII/2015 dan KEP-12/XII/2015, pada 17 Desember 2015, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Etika Perilaku.

The Code of Conduct is a commitment to the implementation of the Company's GCG which contains things that must be implemented and things that must be avoided for the Company's personnel in business ethics and work ethics, both in carrying out the Company's operational activities and daily life. . In an effort to uphold the code of conduct for business, the Company is subject to laws and regulations relating to business. In addition, the Code of Conduct also regulates the behavior of the Supervisory Board, Directors and Company Employees towards Stakeholders based on sound and ethical corporate principles.

In carrying out their daily activities, every Peruri person is obliged to obey the code of ethics stated in the joint decree of the supervisory board and directors number SK-04/DP/XII/2015 and KEP-12/XII/2015, on December 17 2015, regarding Guidelines Good Corporate Governance and Code of Conduct.



Perusahaan telah menetapkan kode etik sesuai dengan visi dan misi Perusahaan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh pegawai dalam berinteraksi, baik dengan pihak di dalam lingkungan Perusahaan maupun pihak luar. Kode etik Perusahaan diperkenalkan ke seluruh tingkatan di lingkungan Perusahaan dan tertulis dalam kontrak kerja perekrutan pegawai yang harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh pegawai. Seluruh pegawai diharapkan untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Perusahaan dan menerapkan kode etik dalam kegiatan sehari-hari.

KOMITMEN CoC DAN PEMBERLAKUAN KODE ETIK KEPADA SELURUH LEVEL ORGANISASI

Implementasi *Code of Conduct* sebagai bentuk pernyataan bahwa Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja dipatuhi dan dijalankan dengan baik, maka kepada seluruh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan setiap individu (karyawan) diwajibkan untuk menandatangani pernyataan secara pribadi, setiap tahunannya. Pernyataan yang tercantum di dalam dokumen ini merupakan acuan bagi Dewan Pengawas, Direksi dan segenap karyawan tentang prinsip-prinsip pokok pengelolaan organisasi perusahaan, harta kekayaan dan sumber daya penting lainnya sehingga dapat terjamin pencapaian standar kerja yang maksimal dalam segenap jajaran organisasi Peruri. Kebijakan ini berlaku bagi setiap direktorat unit kerja serta perusahaan anak. Perusahaan akan menginformasikan kebijakan ini kepada semua pihak yang berkepentingan. Khusus kepada mitra usaha, Perusahaan juga akan senantiasa aktif mendorong mereka untuk menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan ini dan bilamana diperlukan Perusahaan akan memberikan tuntunan praktisnya.

The Company has established a code of ethics in accordance with the Company's vision and mission which serves as a code of conduct for all employees in interacting with parties within the Company as well as with external parties. The Company's code of ethics is introduced to all levels within the Company and is written in the employee recruitment work contract which must be understood and signed by all employees. All employees are expected to behave in accordance with Company values and apply a code of ethics in their daily activities.

COMMITMENT OF THE CoC AND ENFORCEMENT OF THE CODE OF ETHICS AT ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

Implementation of the Code of Conduct as a form of statement that the guidelines for the Code of Business Ethics and Work Ethics are adhered to and implemented properly, so all members of the Supervisory Board, Board of Directors and each individual (employee) are required to sign a statement personally, every year. The statement stated in this document is a reference for the Supervisory Board, Board of Directors and all employees regarding the main principles of managing the company's organization, assets and other important resources so that maximum work standards can be guaranteed in all levels of the Peruri organization. This policy applies to each work unit directorate and subsidiary companies. The company will inform this policy to all interested parties. Especially for business partners, the Company will also actively encourage them to implement policies that are in line with this policy and if necessary, the Company will provide practical guidance.

POKOK-POKOK ISI DAN KEBERLAKUAN CoC

Untuk melaksanakan pengelolaan Perusahaan yang baik dan benar diperlukan suatu pedoman yang bertujuan untuk membentuk dan mengatur kesesuaian tingkah laku dengan tujuan mencapai penerapan GCG yang konsisten dan menjadi standar minimal yang harus dipatuhi oleh insan Perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan demi mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Perusahaan telah memiliki pedoman perilaku yang menjadi pedoman berperilaku, pada aspek etika bisnis dan etika kerja karyawan, direksi dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugas di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Pedoman ini juga sebagai bentuk kebijakan Perusahaan dalam menghargai dan menghormati kemajemukan sehingga terjalin kerja sama dan kebersamaan dengan menciptakan etos dan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif agar produktivitas dan kualitas terjaga.

Pada pedoman perilaku ini dijelaskan prinsip-prinsip panduan Peruri, standar etika, tata nilai, integritas dalam berbisnis, integritas laporan keuangan, pernyataan klaim palsu dan konspirasi, benturan kepentingan, hadiah, suap, tempat penyelenggaraan jamuan bisnis, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang (narkoba) dan minuman keras, merokok, perjudian, penyelewengan dan penyimpangan sejenisnya, tanggung jawab sosial perusahaan, keterlibatan dalam politik, aktivitas politik, perjalanan dinas, perilaku korporasi dari karyawan dan hubungan industrial, menjaga aset/harta perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan, masyarakat lingkungan, persaingan usaha, pengelolaan stakeholders, kebijakan pengelolaan atas mitra kerja, etika pengelolaan atas mitra kerja, hubungan dengan pegawai dan pejabat pemerintah, data perusahaan dan kerahasiaan informasi serta pelaporan pelanggaran atas *code of conduct*.

MAIN CONTENT AND APPLICABILITY OF THE CoC

To carry out good and correct Company management, a guideline is needed that aims to form and regulate conformity of behavior with the aim of achieving consistent GCG implementation and a minimum standard that must be adhered to by the Company's personnel in carrying out work in order to achieve the Company's Vision and Mission.

The company has a code of conduct that becomes a code of conduct, in the aspects of business ethics and work ethics of employees, directors and supervisory board in carrying out duties inside and outside the company. This guideline is also a form of Company policy in valuing and respecting diversity so as to establish cooperation and togetherness by creating a healthy and conducive work ethos and environment so that productivity and quality are maintained.

This code of conduct describes Peruri's guiding principles, ethical standards, values, integrity in doing business, integrity of financial reports, statements of false claims and conspiracies, conflicts of interest, gifts, bribes, business banquets, narcotics and drug abuse.) and liquor, smoking, gambling, fraud and similar deviations, corporate social responsibility, involvement in politics, political activities, official travel, corporate behavior of employees and industrial relations, safeguarding company assets/assets, occupational health and safety and environmental preservation, the environmental community, business competition, stakeholder management, management policies for work partners, management ethics for work partners, relationships with government employees and officials, company data and confidentiality of information and reporting of violations of the code of conduct.

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI KODE ETIK

Direksi dan Dewan Pengawas wajib melakukan sosialisasi atas pedoman ini ke seluruh karyawan hingga kepada karyawan baru. Setiap insan Peruri dapat meminta penjelasan kepada atasan langsungnya apabila terdapat ketidakjelasan pedoman ini dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Biro tata kelola perusahaan telah membagikan buku pedoman etika perilaku kepada seluruh karyawan untuk dibaca sehingga mengerti pentingnya penerapan etika perilaku dalam menjalankan bisnis, setelahnya seluruh karyawan wajib menandatangani surat pernyataan etika usaha dan tata perilaku yang menyatakan menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi pedoman perilaku yang terdapat pada lembar akhir buku pedoman etika perilaku. Surat pernyataan ini senantiasa diperbaharui dan ditandatangani apabila terjadi perubahan pedoman perilaku.

PENEGAKAN DAN SANKSI PELANGGARAN STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

Selama 2019 tidak pelanggaran pelanggaran kode etik Perusahaan baik yang dilakukan dari internal maupun eksternal Perusahaan.

KAJIAN DAN EVALUASI MANAJEMEN

Manajemen Perusahaan secara konsisten melakukan kajian dalam rangka mengevaluasi kinerja Perusahaan, termasuk keterkaitan antara visi, misi dan budaya perusahaan serta kode etik dengan rencana jangka panjang dan profil risiko yang dihadapi Perusahaan. Penerapan Kode Etik juga menjadi kajian manajemen untuk menjadi salah satu perangkat evaluasi keorganisasian Perusahaan.

DISSEMINATION AND INTERNALIZATION OF THE CODE OF ETHICS

The Board of Directors and the Supervisory Board must disseminate this guideline to all employees up to new employees. Each Peruri individual can ask for an explanation from his/her immediate superior if there is uncertainty in this guideline with the implementation of duties and responsibilities.

The corporate governance bureau has distributed a code of conduct ethics to all employees to read so that they understand the importance of implementing ethical behavior in running a business, after which all employees are required to sign a business ethics and code of conduct statement which states that they accept, understand and agree to comply with the existing code of conduct. on the final sheet of the code of conduct ethics. This statement letter is constantly updated and signed when the code of conduct changes.

ENFORCEMENT AND SANCTIONS FOR VIOLATION OF COMPANY ETHICAL STANDARDS

During 2019, there were no violations of the Company's code of ethics, both internal and external.

MANAGEMENT ASSESSMENT AND EVALUATION

The Company's management consistently conducts studies in order to evaluate the Company's performance, including the relationship between the vision, mission and corporate culture as well as the code of ethics with the long-term plans and risk profile faced by the Company. The implementation of the Code of Ethics is also a management review to become a tool for evaluating the organization of the Company.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

ANTI CORRUPTION POLICY

Dewan Pengawas, Direksi, serta seluruh Insan Peruri senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang *fair*, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perusahaan dengan tegas menolak segala praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) demi mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan sehat. Komitmen ini tertuang dalam surat keputusan bersama dewan pengawas dan direksi nomor SK-04/ DP/XII/2015 dan KEP-12/XII/2015, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Etika Perilaku, Peruri menyatakan komitmen untuk melaksanakan proses bisnis dengan mengutamakan etika dalam berbisnis dan berperilaku. Komitmen tersebut ditandatangani oleh direksi, dewan pengawas dan jajaran manajemen Peruri yang menyatakan:

1. Tidak melakukan segala bentuk tindakan koruptif/ fraud, kolusi dan nepotisme dalam melaksanakan pengurusan dan pengawasan kegiatan perusahaan;
2. Turut serta dalam penyelenggaraan system pengendalian/pengawasan yang jujur, adil dan dapat dipertanggung jawabkan;
3. Tidak memiliki benturan kepentingan dan/ atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan Peruri dan/atau perusahaan anak.

Sosialisasi perwujudan perusahaan yang bersih dan bebas KKN secara berkala terus dilakukan baik dalam rapat direksi, rapat pimpinan maupun rapat koordinasi antara dewan pengawas dan direksi, juga sosialisialisasi melalui media internal perusahaan (Portal Peruri).

The Supervisory Board, Directors, and all Peruri Individuals always uphold fair competition, the value of sportsmanship and professionalism, as well as the principles of GCG. The company is also committed to creating a healthy business climate, avoiding actions, behavior or actions that can lead to conflicts of interest, corruption, collusion and nepotism (KKN) and always prioritizing the interests of the company above personal, family, group or group interests. The company also always adhering to the anti-CCBI policy as written in Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime.

The company firmly rejects all practices of corruption, collusion and nepotism (KKN) in order to create a clean and healthy work environment. This commitment is stated in the joint decision letter of the supervisory board and directors number SK-04/DP/XII/2015 and KEP-12/XII/2015, regarding the Corporate Governance Guidelines and Code of Conduct, Peruri stated its commitment to carry out business processes by prioritizing ethics. in doing business and behaving. The commitment was signed by Peruri's board of directors, supervisors and management, which stated:

1. Do not commit any forms of corruption/fraud, collusion and nepotism in managing and supervising company activities;
2. Participate in the implementation of an honest, fair and accountable control/supervision system;
3. Has no conflict of interest and/or is involved in transactions that have a conflict of interest with Peruri and/or its subsidiaries.

Socialization of the realization of a company that is clean and free from KKN is regularly carried out both in board meetings, leadership meetings and coordination meetings between the supervisory board and directors, as well as socialization through the company's internal media (Portal Peruri).

PENGELOLAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

MANAGEMENT OF POTENTIAL CONFLICT OF INTEREST AND GRATIFICATION CONTROL

Dalam rangka menegakkan citra Perusahaan, maka perilaku dalam hubungan bisnis perusahaan dengan mitra usaha harus mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP-271/VI/2009, pada 22 Juni 2009, tentang Pelaksanaan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Peruri, ditetapkan kepala satuan pengawas intern (SPI) menjadi koordinator pelaksanaan pelaporan karyawan Peruri yang menerima gratifikasi.

Tugas kepala SPI terkait pelaksanaan pelaporan gratifikasi adalah:

1. Membantu KPK dalam mengkoordinasikan berkas laporan gratifikasi yang disampaikan karyawan;
2. Menyampaikan berkas pelaporan gratifikasi kepada KPK;
3. Memonitor himbauan mengenai larangan memberi, menjanjikan dan/atau menerima hadiah sesuai surat keputusan direksi nomor SKEP-133/II/2008.

In order to uphold the Company's image, behavior in the company's business relations with business partners must prioritize the principles of good governance. Through the Decree of the Board of Directors Number SKEP-271/VI/2009, on June 22, 2009, regarding the Implementation of Gratification Reporting in Peruri's Environment, the head of the Internal Supervisory Unit (SPI) was appointed to be the coordinator of reporting implementation for Peruri employees who received gratuities.

The duties of the head of the SPI regarding the implementation of gratification reporting are:

1. Assisting the KPK in coordinating the gratuity report files submitted by employees;
2. Submit the gratuity report file to the KPK;
3. Monitored the prohibition of giving, promising and/or receiving gifts according to the decision letter of the board of directors number SKEP-133/II/2008.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

REPORT ON ASSETS OF STATE OFFICIALS



PRINSIP DASAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Sebagai BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, Perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

BASIC PRINCIPLES OF REPORT ON ASSETS OF STATE OFFICIAL

As a SOE owned by the State through the Government of Indonesia, the Company is obliged to comply with binding laws and regulations. One form of statutory regulation that is based on the spirit of eradicating corruption and acts of internal irregularities is the obligation of the Report on Assets of State Officials (LHKPN).

LHKPN is a list of all the assets of state officials as outlined in the LHKPN form stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in KPK Decree No. KEP 07/KPK/02/2005 concerning Procedures for Registration, Examination and Announcement of Report on Assets of State Official. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Crime Eradication Commission affirms the authority of the KPK to

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan Korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik Korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENERAPKAN LHKPN DI PERUSAHAAN

dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No; 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No; 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No; PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya;
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

carry out measures or efforts to prevent Korupsi, including through registration and examination of LHKPN. In addition, Law no. 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free from corruption, Collusion and Nepotism, mandating that each organizer is obliged to report and announce his assets before and after taking office and are willing to have their assets examined before and after taking office. In Law No. 28 of 1999 article 2 (7) along with its explanation, states that other officials who have strategic functions in relation to state administrators include the Supervisory Board, Directors, and other structural officials at State-Owned Enterprises (SOE) and Regional-Owned Enterprises (BUMD).

The LHKPN examination submitted to the KPK is aimed at realizing State Administrators who obey the general principles of state administrators who are free from corruption, collusion and nepotism, as well as other despicable acts. Every State Administrator is required to report their wealth through the LHKPN form that has been provided by the KPK to be filled in honestly, correctly and completely, so that the KPK can analyze, evaluate, and assess all reported assets, types and values, correctly, quickly, accurately, accurate and responsible.

LEGAL AND REGULATORY BASIS IN IMPLEMENTING LHKPN IN COMPANIES

In implementing LHKPN, the Company considers several legal and regulatory bases as a basis for the perspective on LHKPN implementation within the Company. The legal basis is:

1. Law No; 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free of Corruption, Collusion, and Nepotism;
2. Law No; 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
3. Regulation of the Minister of State for SOEs No; PER-01/BUMN/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, and its amendments;
4. Decree of the Secretary of the Minister of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good GCG Implementation.

KEPATUHAN PERUSAHAAN ATAS PENYAMPAIAN LHKPN

Kepatuhan atas penyampaian LHKPN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wujud penerapan GCG. Penyempurnaan/pemutakhiran atas pedoman penyampaian LHKPN 2017 adalah dengan mempertegas sanksi bagi wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN yang sebelumnya berbentuk teguran maka pada tahun 2019 telah dimutakhirkan, dituangkan dan disahkan pada Manual Risk Management and Compliance khususnya Bab X tentang Anti Fraud Program tanggal 9 Desember 2019.

Adapun perubahan tersebut antara lain:

1. Wajib Lapor LHKPN di Peruri adalah :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi;
 - c. Kepala Divisi/setingkat;
 - d. Direksi Anak Perusahaan.
2. Sanksi yang akan diberikan pada Wajib Lapor yang tidak menyampaikan LHKPN adalah kepada yang bersangkutan akan ditunda pemberian Jasa Produksi hingga Wajib Lapor tersebut menyampaikan LHKPN.

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN 2019

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan di tahun 2019.

COMPANY COMPLIANCE WITH LHKPN SUBMISSION

Compliance with LHKPN submission is an integral part of the implementation of GCG. The refinement/ updating of the 2017 LHKPN submission guidelines is by affirming the sanctions for mandatory reporters who do not submit LHKPN which was previously in the form of a warning then in 2019 it has been updated, outlined and ratified in the Manual of Risk Management and Compliance, especially Chapter X on Anti-Fraud Program dated 9 December 2019.

The changes include:

1. The mandatory LHKPN report at Peruri are:
 - a. Supervisory Board;
 - b. Directors;
 - c. Head of Division/level;
 - d. Subsidiary Directors.
2. The sanction that will be given to Reporting Obligators who do not submit LHKPN is that the person concerned will be postponed to provide Production Services until the Report Obligator submits LHKPN

TRANSPARENCY OF LHKPN OF COMPANY OFFICIALS IN 2019

Below is presented the transparency of the submission of LHKPN by Company officials in 2019.

Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat Peruri Tahun 2019

Disclosure of LHKPN Submission of Peruri Officials in 2019

Jumlah Wajib Lapor Total Report Mandatory	Tingkat Kepatuhan Level of Compliance	Tingkat Ketepatan Waktu Level of Timeliness
26	26 100%	24 92,31%

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES POLICY

Seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa mengacuk kepada Keputusan direksi Nomor KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Perum Percetakan Uang RI.

All goods and service procurement activities refer to the Decree of the board of directors Number KEP-11/XII/2019 dated 19 December 2019 concerning Guidelines for the Procurement of Goods and Services at Perum Percetakan Uang RI.



WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan GCG, manajemen Perusahaan berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan CoC dan budaya kerja. Oleh karena itu, Perusahaan menetapkan kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai salah satu bagian yang menjadi acuan perilaku dan budaya kerja Perusahaan. Kebijakan WBS Perusahaan senantiasa dilakukan pemutakhiran untuk meningkatkan efektifitas penerapannya.

PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran yang jelas merupakan hal yang mutlak diperlukan, agar tidak terjadi perselisihan atau potensi sengketa yang berlarut-larut antara pihak *stakeholders* dengan Perusahaan. Secara internal Perusahaan, pelaporan pelanggaran menjadi cara untuk mendorong Karyawan Perusahaan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Hal ini berarti, mengurangi budaya "diam" menuju ke arah budaya "kejujuran" "kepedulian" dan "keterbukaan".

Whistleblowing System (WBS) sebagai sarana penyampaian informasi yang sistematis dari stakeholder terkait dengan penyelenggaraan perusahaan agar informasi tersebut dapat dikelola dan ditindaklanjuti dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Pedoman pengelolaan WBS tertuang dalam surat keputusan direksi nomor SKEP-164/III/2019, pada 27 Maret 2019, tentang *Whistleblowing System*. Evaluasi dan pembaharuan atas pedoman pelaksanaan WBS selalu dilakukan oleh biro legal, manajemen *regulatory* dan *compliance*.

RUANG LINGKUP PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Maksud penyusunan Pedoman Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani Pelaporan Pelanggaran dari *stakeholders* untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai oleh *stakeholders*.

Secara khusus, Perusahaan menyediakan sarana pelaksanaan WBS melalui e-mail: wbs@peruri.co.id. Secara berkala, unit kerja yang ditunjuk memantau dan melakukan tindak lanjut atas pelaporan WBS yang diterima baik melalui e-mail, website www.peruri.co.id, maupun yang disampaikan secara langsung.

In order to increase the effectiveness of GCG implementation, the Company's management is committed to running the company in a professional manner based on company behavior in accordance with the CoC and work culture. Therefore, the Company has established a Whistleblowing System (WBS) policy as a part of the Company's behavior and work culture references. The Company's WBS policy is constantly updated to increase the effectiveness of its implementation.

ESTABLISHMENT OF VIOLATION REPORTING SYSTEM GUIDELINES

A clear mechanism for handling reporting violations is absolutely necessary, so that there are no disputes or potential protracted disputes between stakeholders and the Company. Internally, the reporting of violations is a way to encourage Company employees to take more courage to prevent fraud and corruption by reporting it to a party who can handle it. This means reducing the culture of "silence" towards a culture of "honesty" "caring" and "openness".

The Whistleblowing System (WBS) is a means of conveying systematic information from stakeholders related to the organization of the company so that information can be managed and followed up by referring to the provisions of the prevailing laws and regulations. The guidelines for managing WBS are contained in the decision letter of the board of directors number SKEP-164/III/2019, on 27 March 2019, regarding Whistleblowing System. Evaluation and updating of the WBS implementation guidelines are always carried out by the legal bureau, regulatory management and compliance.

SCOPE OF VIOLATIONS THAT CAN BE REPORTED

The purpose of developing a Violation Reporting Management Guidelines as a basis or implementation guideline in handling Violation Reporting from stakeholders is to ensure the implementation of an effective violation reporting resolution mechanism by the stakeholders.

In particular, the Company provides a means of implementing WBS via e-mail: wbs@peruri.co.id. Periodically, the appointed work unit monitors and follows up on WBS reports received either via e-mail, the website www.peruri.co.id, or submitted directly.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Pengaduan WBS ini dikelola oleh unit kerja biro legal, *management regulatory and compliance*. Masyarakat maupun insan Peruri dapat menyampaikan laporan aduannya melalui e-mail: wbs@peruri.co.id, website resmi di www.peruri.co.id, maupun disampaikan secara langsung.

PARTIES MANAGING COMPLAINTS

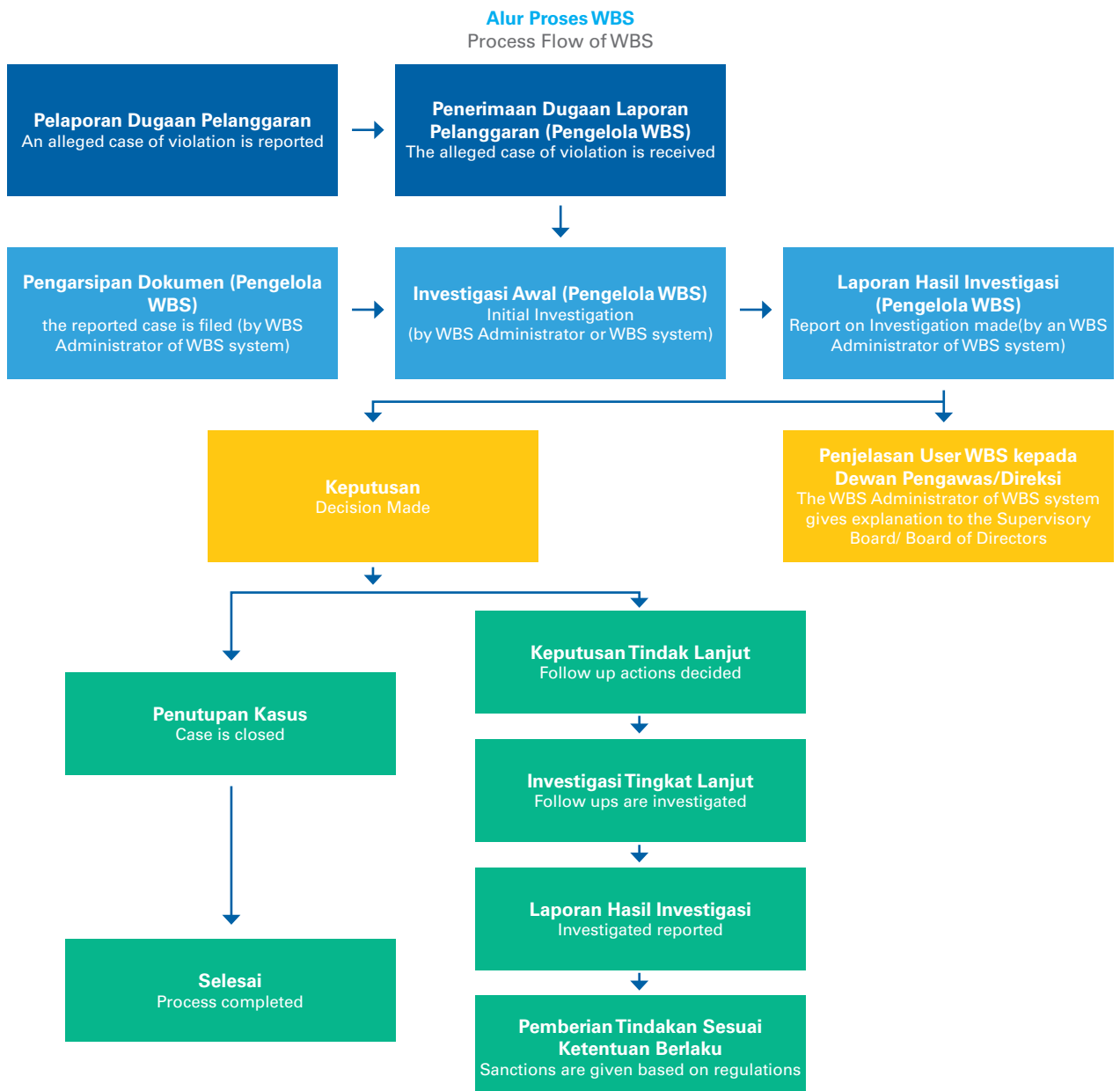
WBS complaints are managed by legal bureau work unit, *management regulatory and compliance*. The public and Peruri individuals can submit their complaint reports via e-mail: wbs@peruri.co.id, the official website at www.peruri.co.id, or submitted directly.

MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN

Setiap karyawan dan masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat melaporkan kepada tim pengelola WBS Peruri, di bawah ini adalah skema pelaporan pelanggaran di lingkungan Perusahaan.

MECHANISM FOR SUBMITTING AND HANDLING REPORTS OF VIOLATIONS

Every employee and public who is aware of a suspected violation can report to the WBS Peruri management team, below is the violation reporting scheme within the Company.



PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN PENANGANAN PENGADUAN

Tim pengelola WBS memberikan perlindungan bagi pelapor pelanggaran, guna menjamin keamanan pihak pelapor dan keluarga. Pelapor yang ingin identitasnya tetap dirahasiakan diberi jaminan, kecuali proses hukum atas laporan menuntut identitas pelapor dibuka.

Sistem perlindungan bagi pelapor dilakukan dengan cara pengguna aplikasi WBS memastikan bahwa identitas pelapor tidak diketahui oleh siapapun kecuali pengguna aplikasi itu sendiri. Apabila terdapat informasi tentang aduan maka pengguna aplikasi WBS akan menelaah aduan tersebut terlebih dahulu, sebelum diteruskan ke unit kerja terkait untuk melakukan tindakan selanjutnya.

JUMLAH PENGADUAN PADA 2019 DAN TINDAK LANJUTNYA

Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk melalui WBS Online selama 2019 adalah sebanyak 8 (delapan), dengan rincian sebagai berikut,

PROTECTION FOR REPORTERS AND HANDLING OF COMPLAINTS

The WBS management team provides protection for whistleblowers to ensure the safety of the reporting party and their families. Reporters who wish to remain anonymous are guaranteed a guarantee, unless the legal process for the report demands disclosure of the reporter's identity.

The protection system for whistleblowers is carried out by means of the WBS application user ensuring that the identity of the reporter is not known by anyone except the application user himself. If there is information about a complaint, the WBS application user will review the complaint first, before being forwarded to the relevant work unit to take further action.

NUMBER OF COMPLAINTS IN 2019 AND THEIR FOLLOW UP

The number of violation complaints submitted through WBS Online during 2019 was 8 (eight), with the following details,

No	Tanggal Pengaduan Complaint Date	Pengaduan Complaint	Action	Keterangan Information
1	16 May May 16	Bukan pengaduan Not a complaint	Tidak dapat ditindaklanjuti Cannot be followed up	Bukan laporan Pengaduan Not a complaint report
2	10 Juli July 10	Bukan pengaduan Not a complaint	Tidak dapat ditindaklanjuti Cannot be followed up	Bukan laporan Pengaduan Not a complaint report
3	12 Juli July 12	Bukan pengaduan Not a complaint	Tidak dapat ditindaklanjuti Cannot be followed up	Bukan laporan Pengaduan Not a complaint report
4	26 Juli July 26	Bukan pengaduan Not a complaint	Tidak dapat ditindaklanjuti Cannot be followed up	Bukan laporan Pengaduan Not a complaint report
5	4 September September 4	Bukan pengaduan Not a complaint	Tidak dapat ditindaklanjuti Cannot be followed up	Bukan laporan Pengaduan Not a complaint report
6	10 September September 10	Bukan pengaduan Not a complaint	Tidak dapat ditindaklanjuti Cannot be followed up	Bukan laporan Pengaduan Not a complaint report
7	25 September September 25	Penyalahgunaan Wewenang Abuse of Authority	Diteruskan untuk ditindaklanjuti Forward to be followed up	Ditindaklanjuti oleh SPI Followed up by SPI
8	7 Oktober October 7	Perbuatan Tidak Menyenangkan Unpleasant acts	Diteruskan untuk ditindaklanjuti Forward to be followed up	Ditindaklanjuti oleh Divisi SDM Followed up by the HR Division

REPUBLIC INDONESIA



PASPOR
PASSPORT



REPUBLIC OF INDIA
OFFICIAL PASSPORT



TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan bisnis yang di jalankan tidak terlepas dari interaksi secara langsung dan tidak langsung dengan masyarakat sekitar area pabrik serta lingkungan hidup. Oleh karena itu, praktik *bad corporate governance* senantiasa menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga dampak negatifnya dapat diminimalisir.

Kebijakan perusahaan terkait pengelolaan lingkungan terdapat dalam UKL-UPL yang setiap 6 bulan sekali dilakukan perbaharuan dan dilaporkan kepada badan lingkungan hidup. Selain itu, manajemen juga telah mengadopsi sistem manajemen lingkungan ISO14001: 2004, yang merupakan komitmen Peruri dalam mewujudkan kelangsungan hidup lingkungan serta pengelolaan yang berkelanjutan.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Perusahaan terhadap pembangunan masyarakat dan pelestarian. Lingkungan melalui tanggungjawab sosial perusahaan. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Praktik *bad corporate governance* lainnya juga tidak terlihat pada ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta ketidaksesuaian penyajian, LHKPN, gratifikasi dan benturan kepentingan.

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Selama 2019 Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Adapun kontribusi pajak dari Perusahaan, adalah sebagai berikut.

Uraian Description	Tahun Pajak Tax Year		Kenaikan (Penurunan) Increases (decreases)	
	2018	2019	Rp	%
Jenis Pajak Type of Tax				
PPh 21	41.724	49.845	8.121	19,46%
PPh 22	18.531	19.985	1.604	8,73%
PPh 23	5.422	5.568	146	2,69%
PPh 25	74.682	54.470	(20.212)	(27,06%)
PPh 4 (2)	2.216	17.180	14.964	675,27%
PPN Masa	8.231	140.250	132.019	1603,92%
PBB	8.360	9.587	1.227	14,68%
Jumlah Total	159.166	296.886	137.720	86,53%

REPORTS ON COMPANY ACTIVITIES THAT POLLUTE THE ENVIRONMENT

The company realizes that the business activities carried out cannot be separated from direct and indirect interactions with the community around the factory area and the environment. Therefore, the practice of bad corporate governance is always one of the concerns in the company's operational activities so that the negative impact can be minimized.

Company policies related to environmental management are contained in the UKL-UPL which is updated once every 6 months and reported to the environmental agency. In addition, management has also adopted the environmental management system ISO14001: 2004, which is Peruri's commitment to realizing environmental sustainability and sustainable management.

This is inseparable from the Company's commitment to community development and conservation. Environment through corporate social responsibility. Companies are not only profit-oriented, but also provide benefits to society and the environment. Other bad corporate governance practices are also not seen in non-compliance in fulfilling tax obligations as well as mismatches in presentation, LHKPN, gratuities and conflicts of interest.

DISCLOSURE OF TAXATION OBLIGATIONS COMPLIANCE

During 2019 the Company has fulfilled all tax obligations. The tax contributions from the Company are as follows.

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Seluruh penyajian informasi dalam Laporan Tahunan ini, khususnya terkait kinerja keuangan dan hal-hal lainnya, mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

KASUS TERKAIT DENGAN BURUH DAN KARYAWAN

Selama 2019 tidak ada permasalahan yang terjadi antara Perusahaan dengan buruh dan karyawan.

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Laporan Tahunan digital Perusahaan baik yang disampaikan kepada pemegang saham, investor, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

INCOMPATIBILITY OF ANNUAL REPORT PRESENTATION AND FINANCIAL STATEMENTS WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

All information presented in this Annual Report, especially related to financial performance and other matters, refers to the Financial Statements for the years ended 31 December 2019 and 31 December 2018 which were audited by HLB Public Accounting Firm Hadori Sugiarto Adi & Rekan. Presentation and disclosure of the Company's financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

CASES RELATED TO LABOR AND EMPLOYEES

Selama 2019 tidak ada permasalahan yang terjadi antara Perusahaan dengan buruh dan karyawan.

SUITABILITY OF THE ANNUAL REPORT BOOK AND DIGITAL ANNUAL REPORT

The Company's digital annual reports, whether submitted to shareholders, investors, stakeholders, or those uploaded on the Company's official website are in accordance with the Annual Report book that is printed and published by the Company.

07

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Perusahaan berkomitmen untuk menyelaraskan kinerja usaha dengan pemberian manfaat untuk masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari pemangku kepentingan Perusahaan.

The company is committed to aligning business performance with the provision of benefits to society and the environment as part of the Company's stakeholders.



TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Sebagai entitas usaha, Peruri merasa memiliki kewajiban untuk turut berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, atau *corporate social responsibility* (CSR). Konsep pembangunan berkelanjutan yang telah berkembang di berbagai negara muncul sebagai bagian dari keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara *people, planet, partnership, peace* dan *prosperity*. Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui tanggung jawab sosial perusahaan, atau *corporate social responsibility* (CSR).

Perusahaan menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan ini harus didukung melalui upaya untuk merealisasikan hal tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam mengimplementasikan CSR, Perusahaan mengadopsi ISO 26000 yang merupakan Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*). Panduan ini merupakan salah satu referensi yang menjadi standar di dunia internasional. Di Indonesia, ISO 26000 telah diratifikasi oleh Pemerintah pada 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagi Perusahaan, tanggung jawab sosial merupakan bagian dari komitmen yang perlu terus menerus diupayakan. Hal ini adalah dikarenakan Perusahaan sangat memahami bahwa dalam setiap aktivitas operasional yang dilakukan memiliki dampak positif maupun negatif. Oleh karenanya, untuk memastikan keberlanjutan, Perusahaan berupaya penuh memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari setiap aktivitas operasional.

Dasar pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan yang ditetapkan dan dilaksanakan Peruri, menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

1. ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan;
2. ISO 26000;
3. OHSAS 18001 tentang kesehatan dan keselamatan kerja;
4. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang pelayanan mutu terhadap pelanggan.

Terkait ISO 26000, subyek ataupun lingkup yang menjadi fokus keberlanjutan bukan hanya kinerja ekonomi semata. Namun, Perusahaan berupaya penuh

As a business entity, Peruri has an obligation to participate in sustainable development through Corporate Social Responsibility (CSR) activities. The concept of sustainable development that has developed in various countries emerged as part of the expectation of many parties about the balance between people, planet, partnership, peace and prosperity. In Indonesia, regulators have encouraged this harmonization effort through Corporate Social Responsibility (CSR).

The Company realizes that this sustainable development must be supported through efforts to be realized in accordance with its capabilities. In implementing CSR, the Company adopts ISO 26000 which is the Guidance on Social Responsibility. This guide is one of the references that has become a standard in the international world. In Indonesia, ISO 26000 was ratified by the Government in 2010 and made into a National Standard (SNI) in 2012.

COMMITMENT AND IMPLEMENTATION POLICY OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

For the Company, social responsibility is part of the commitment that needs to be continuously pursued. This is because the Company fully understands that every operational activity it carries out has a positive or negative impact. Therefore, to ensure sustainability, the Company strives to maximize positive impacts and minimize negative impacts from any operational activities.

The basis for implementing the corporate social responsibility program established and implemented by Peruri based on several approaches, including:

1. ISO 14001 regarding environmental management systems;
2. ISO 26000;
3. OHSAS 18001 concerning occupational health and safety;
4. Partnership and Community Development Program (PKBL);
5. Minimum Service Standards (SPM) regarding quality service to customers.

Regarding ISO 26000, the subject or scope that becomes the focus of sustainability is not just economic performance. However, the Company makes

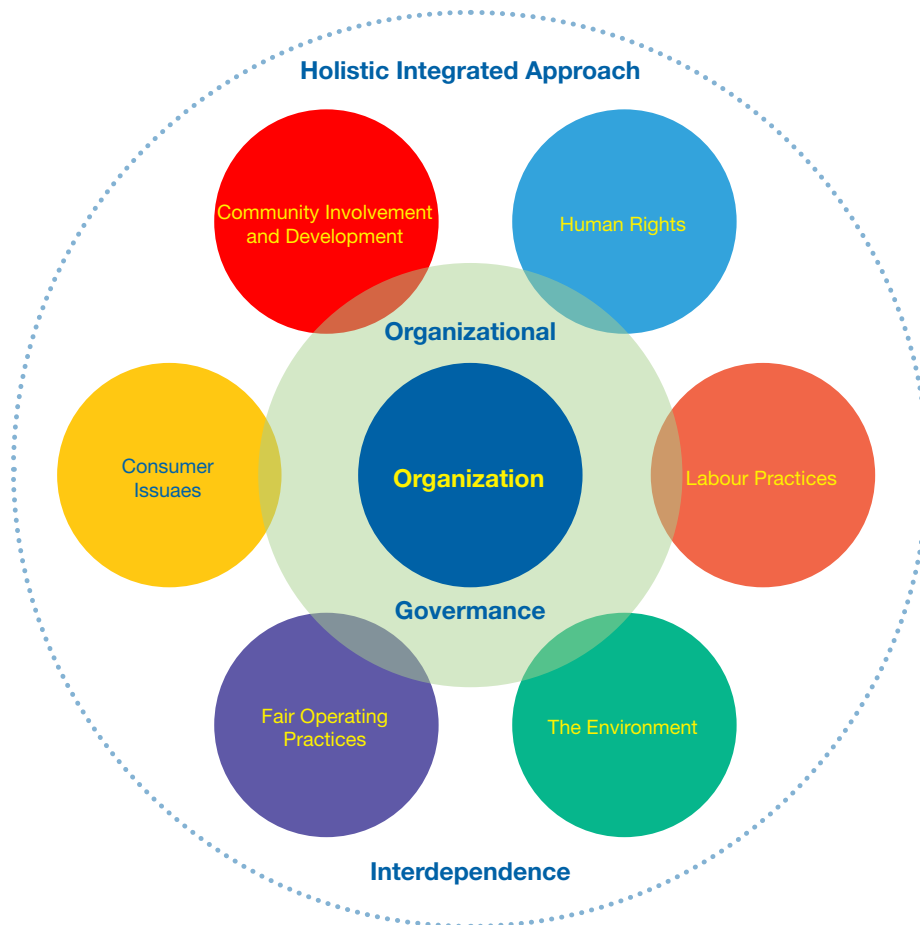
agar dapat memastikan keberlanjutan sesuai subyek dalam ISO 26000 yang meliputi:

1. Tata kelola organisasi yang baik;
2. Penegakkan hak asasi manusia;
3. Praktik ketenagakerjaan yang manusiawi dan berkeadilan;
4. Pengelolaan kegiatan perusahaan terhadap Lingkungan;
5. Prosedur operasi yang wajar;
6. Tanggung jawab terhadap konsumen;
7. Pelibatan dalam pengembangan masyarakat.

every effort to ensure sustainability according to the subjects in ISO 26000 which includes:

1. Good organizational governance;
2. Upholding of human rights;
3. Humane and fair employment practices;
4. Environmental management of company activities;
5. Reasonable operating procedures;
6. Responsibility towards costumers;
7. Involvement in community development.

Pendekatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan ISO 26000 Approach to Corporate Social Responsibility Based on ISO 26000



Berdasarkan pendekatan di atas, para pelaku bisnis diuntut untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab dan dapat berkontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan bukan hanya sekedar menciptakan keuntungan dari kegiatan usahanya.

Based on the above approach, business people are required to run their businesses more responsibly and be able to positively contribute to their social environment to create sustainable development, and not just achieved profits from their business activities.

Peruri menyadari bahwa keberadaannya tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan nilai manfaat bagi pemegang saham, namun juga bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, lingkungan, karyawan dan mitra kerjanya. Disamping itu, keberhasilan Perusahaan juga tidak terlepas dari hubungan yang harmonis, dinamis, serta saling menguntungkan dengan lingkungan masyarakat sekitar.

Oleh karenanya, Perusahaan sangat memahami bahwa kegiatan operasi yang dilakukan dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan, ekonomi maupun sosial. Untuk itu, Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Prinsip-prinsip ISO 26000 seperti akuntabilitas, transparansi, berperilaku etis, menghormati kepentingan para *stakeholders*, mematuhi hukum yang berlaku, menghormati norma yang berlaku, serta menghormati hak asasi manusia, merupakan prinsip-prinsip yang dianut Perusahaan.

Perusahaan menetapkan program tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) sebagai upaya strategis dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan lingkungan masyarakat sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan.

DASAR PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dasar pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan yang ditetapkan dan dilaksanakan Peruri, menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

1. ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan;
2. ISO 26000;
3. OHSAS 18001 tentang kesehatan dan keselamatan kerja;
4. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang pelayanan mutu terhadap pelanggan.

UJI TUNTAS/DUE DILLIGENCE TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Dalam merencanakan program CSR, Perusahaan selalu berusaha melibatkan lingkungan masyarakat, dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan kondisi

Peruri realizes that its existence is not only intended to create beneficial value for shareholders, but also for all stakeholders including the community, the environment, employees and their partners. In addition, the Company's success is also inseparable from a harmonious, dynamic and mutually beneficial relationship with the surrounding community.

Therefore, the Company fully understands that the operations carried out can have a positive or negative impact on the environment, economy and society. Therefore, the Company carries out social responsibility as an effort to ensure business sustainability. ISO 26000 principles such as accountability, transparency, ethical behavior, respecting the interests of stakeholders, complying with applicable laws, respecting applicable norms, and respecting human rights, are the principles adopted by the Company.

The Company establishes a corporate social responsibility program as a strategic effort in order to maintain and enhance a harmonious relationship between the Company and the community so as to create conducive conditions to support business development and sustainable growth of the Company.

BASIC IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The basis for implementing the corporate social responsibility program established and implemented by Peruri based on several approaches, as follows:

1. ISO 14001 regarding environmental management systems;
2. ISO 26000;
3. OHSAS 18001 concerning occupational health and safety;
4. Partnership and Community Development Program (PKBL);
5. Minimum Service Standards (SPM) regarding quality service to customers.

DUE DILLIGENCE ON THE SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF COMPANY ACTIVITIES

In planning the CSR program, the Company always tries to involve the community environment, by first mapping the environmental conditions of the

lingkungan masyarakat dari sisi sosial, budaya, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Tujuannya adalah agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan lingkungan masyarakat setempat, serta selaras dengan kebutuhan dan/atau keinginan para pemangku kepentingan. Dengan cara ini, diharapkan para pemangku kepentingan turut merasa memiliki program yang akan dijalankan Perusahaan.

Uji tuntas kegiatan operasional Perusahaan dan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan maupun sosial dipetakan berdasarkan tingkatan materialitas serta risiko negatif yang mungkin timbul. Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan memetakan subyek maupun isu penting yang memengaruhi Perusahaan dan pembangunan berkelanjutan. Subyek maupun isu prioritas dirumuskan untuk kemudian dirancang sebagai program yang dapat memastikan keberlanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Dalam aspek ekonomi, sebagai entitas usaha, Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kinerja ekonomi yang berkelanjutan, bersih dari praktik korupsi serta memiliki manfaat bagi pemangku kepentingan yang lain. Pada aspek lingkungan, Perusahaan senantiasa melaksanakan kaji risiko lingkungan hidup, untuk menentukan risiko lingkungan dari kegiatan operasional dan langkah pengendaliannya. Sementara pada aspek sosial, perhatian Perusahaan tidak hanya pada pemangku kepentingan internal, melainkan juga eksternal.

Detail informasi aspek, topik maupun isu yang memengaruhi Perusahaan serta pembangunan berkeberlanjutan tersaji pada sub bab isu-isu penting ekonomi, lingkungan dan sosial terkait dampak kegiatan Perusahaan.

ISU-ISU PENTING EKONOMI, LINGKUNGAN DAN SOSIAL TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERUSAHAAN

Perusahaan berkomitmen untuk menyelaraskan kinerja usaha dengan pemberian manfaat untuk masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari pemangku kepentingan Perusahaan. Dalam menentukan isu sosial, ekonomi dan lingkungan terkait dampak dari kegiatan usaha, Perusahaan melakukan uji tuntas pada level operasional. Isu ini kemudian dijadikan dasar bagi manajemen untuk memprioritaskan penganggulannya dengan melakukan berbagai pendekatan. Pemetaan risiko dan pengelolaan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha Perusahaan terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial adalah sebagai berikut:

community from a social, cultural, economic, health and educational perspective. The aim is that the program implemented is in accordance with the environmental needs of the local community, and in line with the needs and/or desires of stakeholders. In this way, it is expected that the stakeholders will feel that they own the program that the Company conducted.

Due diligence on the Company's operational activities and their impact on the economy, environment and social aspects are mapped based on the level of materiality and the negative risks that may arise. Based on this, the Company maps important subjects and issues that affect the Company and sustainable development. Subjects and priority issues are formulated and then designed as programs that can ensure sustainability for stakeholders.

In the economic aspect, as a business entity, the Company has the responsibility to ensure sustainable economic performance, free from corrupt practices and has benefits for other stakeholders. In the environmental aspect, the Company always carries out environmental risk assessments, to determine environmental risks from operational activities and control measures. Meanwhile, on the social aspect, the Company's attention is not only to internal stakeholders, but also external ones.

Detailed information on aspects, topics and issues that affect the Company and sustainable development are presented in the sub-chapter of important economic, environmental and social issues related to the impact of the Company's activities.

IMPORTANT ECONOMIC, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ISSUES RELATED TO THE IMPACT OF COMPANY ACTIVITIES

The company is committed to aligning business performance with the provision of benefits to society and the environment as part of the Company's stakeholders. In determining social, economic and environmental issues related to the impact of business activities, the Company carries out due diligence at the operational level. This issue is then used as a basis for management to prioritize overcoming it by taking various approaches. Mapping of risks and management of impacts arising from the Company's business activities on economic, environmental and social aspects are as follows:

Aspek Aspect	Isu-isu Penting atas Dampak dari Kegiatan Operasi dan Bisnis Perusahaan Important Issues on the Impact of the Company's Operations and Business Activities	Pendekatan yang dilakukan Perusahaan Approach taken by the Company
Ekonomi Economy	Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Non-Cash National Movement	Pengembangan bisnis digital melalui tiga lini produk yaitu Peruri Code, Peruri Sign dan Peruri Trust Digital business development through three product lines, namely Peruri Code, Peruri Sign and Peruri Trust.
Lingkungan Environment	Pengelolaan energi dengan baik Well Energy-Management	Sebagai BUMN, Peruri berupaya melakukan efisiensi energi sebagaimana diatur dalam UU 30/2007 yang mewajibkan setiap kegiatan pengelolaan energi untuk mengutamakan penggunaan teknologi ramah lingkungan. As a state-owned company, Peruri strives for energy efficiency as regulated in Law 30/2007 which requires each energy management activities to prioritize use environmentally friendly technology.
	Optimalisasi penggunaan sumber daya air Optimization of Water Resources Usage	Pada 2019, Perusahaan bekerja sama dengan Perum JasaTirta II untuk memanfaatkan air permukaan Sungai Citarum Barat untuk memenuhi 85% kebutuhan air produksi. Selain itu, sumber pasokan air Perusahaan berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), air tanah dan air daur ulang. In 2019, the Company collaborated with Perum JasaTirta II to utilize the surface water of the Citarum Barat River to fulfill 85% of production water needs. In addition, the Company's water supply source comes from Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), groundwater and water recycling.
	Menjaga kualitas emisi Maintaining emission quality	Peruri berkomitmen untuk ikut berperan serta dalam upaya global mengendalikan emisi GRK untuk menghambat pemanasan global. Peruri is committed to participating in global efforts controlling GHG emissions to prevent global warming.
	Pengendalian limbah produksi Production waste management	Perusahaan melakukan pengolahan limbah mandiri sesuai ketentuan yang berlaku. Perencanaan, implementasi, monitoring, reporting dan evaluasi selalu menjadi bagian yang terpisahkan di dalam pengolahan limbah produksi. The company carried out independent waste treatment according to the regulations applicable. Planning, implementation, monitoring, reporting and evaluation is always an integral part of processing production waste.
Sosial Social	Pengembangan Sosial Masyarakat Social Community Development	Peruri melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang terdiri dari Program Kemitraan (PK) dan Program Bina Lingkungan (BL). Peruri carried out corporate social and environmental responsibility in the form of Partnership and Community Development Program which consists of from the Partnership Program (PK) and the Community Development Program (BL).
		Pendirian Rumah Kreatif BUMN di Karawang (RKB Karawang) bertujuan untuk membina para pelaku UMKM di wilayah Karawang. The establishment of the SOE Creative Hub in Karawang (RKB Karawang) aims to foster MSME actors in Karawang area.
		Pendirian M Bloc Space, sebuah ruang urban atau creative hub yang dapat mengakomodir komunitas milenial maupun pelaku industri kreatif. The establishment of M Bloc Space, an urban space or creative hub which can accommodate the millennial community and creative industry actors.
		Pendirian Kreo Clothing District, tempat bagi anak muda dan pelaku industri kreatif lainnya dalam memasarkan produk dan mengembangkan ide-ide kreatifnya. The establishment of Kreo Clothing District, a place for young people and actors of other creative industries in product marketing and developing creative ideas.

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA PERUSAHAAN DALAM MENANGANI ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan telah dikelola dengan baik oleh Perusahaan dengan dimilikinya rencana kerja dan anggaran yang relevan. Dalam membangun relasi dengan pemangku kepentingan, Perusahaan menggunakan dasar kedekatan (*proximity*) dan tingkat kepentingan (*level of interest*) sebagai dasar penentuan pemangku kepentingan Perusahaan. Secara internal, hubungan dibangun melalui berbagai saluran komunikasi untuk berinteraksi, seperti melalui surat elektronik (surel) dan rapat berkala. Secara eksternal, Perusahaan terlibat dengan klien dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan usaha sehari-hari. Selain itu, dalam strategi CSR Perusahaan, juga lebih ditekankan pada upaya menciptakan manfaat bagi Peruri dan *stakeholders* dalam rangka membangun hubungan yang berkelanjutan dan memperkuat keberlanjutan pertumbuhan Perusahaan.

Melalui proses pendekatan yang dilakukan pada para pemangku kepentingan, Perusahaan dapat menggali informasi yang menjadi topik kunci dan hal-hal yang menjadi kekhawatiran para pemangku kepentingan. Topik yang dianggap menjadi isu penting bagi Perusahaan, kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti sebagai upaya *stakeholders engagement* dan meningkatkan *value* untuk *stakeholders* dan *shareholder*.

STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH ATAS DAMPAK DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang properti, dalam kegiatan usahanya, Perusahaan berinteraksi dengan berbagai *stakeholder* baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau terdampak dari kegiatan usaha Perusahaan. Pemangku kepentingan yang berpengaruh atau terdampak dari kegiatan usaha Perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Definisi Definition	Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan Impact of Company Activities
Pemegang Saham Shareholders	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ministry of State-Owned Enterprises (SOE)	Kinerja keuangan Perusahaan akan berdampak terhadap besarnya setoran dividen yang diserahkan kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham The company's financial performance will have an impact on the amount of dividend payments that are submitted to the Ministry of SOE as the shareholder

STRATEGIES AND WORK PROGRAMS OF THE COMPANY IN HANDLING SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES

Social, economic and environmental issues have been well managed by the Company by having relevant work plans and budgets. In building relationships with stakeholders, the Company uses the basis of proximity and level of as the basis for determining the Company's stakeholders. Internally, relationships are built through various communication channels to interact, such as through electronic mail (e-mail) and regular meetings. Externally, the Company engages with clients and other stakeholders through its daily business activities. In addition, in the Company's CSR strategy, more emphasis is placed on creating benefits for Peruri and stakeholders in order to build sustainable relationships and strengthen the sustainable growth of the Company.

Through a process of approaching stakeholders, the Company can gather information that is a key topic and issues of concern to stakeholders. Topics that are considered to be important issues for the Company are then evaluated and followed up as part of stakeholder engagement and increasing value for stakeholders and shareholders.

IMPORTANT STAKEHOLDERS WHO ARE AFFECTED BY THE IMPACT OF COMPANY ACTIVITIES

As a company engaged in the property sector, in its business activities, the Company interacts with various stakeholders, either directly or indirectly influenced or being affected by the Company's business activities. Stakeholders who have an influence or are affected by the Company's business activities can be described as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Definisi Definition	Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan Impact of Company Activities
Karyawan Employees	Seluruh pekerja yang bekerja di Perusahaan All workers who work for the Company	Kesinambungan Perusahaan berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang Company sustainability affects the welfare of workers in the long term
Pemerintah Government	Pemerintah c.q Kementerian Keuangan Government c.q Ministry of Finance	Kinerja keuangan perusahaan akan berdampak terhadap besarnya setoran pajak yang diserahkan kepada Pemerintah sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk modal pembangunan The company's financial performance will have an impact on the amount of tax payments submitted to the Government as state revenue which is used for development capital
Masyarakat Public	Masyarakat umum baik yang menggunakan produk-produk Perusahaan maupun tidak The general public, whether using the Company's products or not	Kegiatan bisnis Perusahaan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat baik melalui produk dan layanan maupun atas keberadaan Perusahaan yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar The Company's business activities have an impact on improving the quality of life of the community both through products and services as well as on the Company's existence which can have a positive impact on the economy of the surrounding community.
Konsumen/Pelanggan Customers	Para klien baik domestik maupun asing Both domestic and foreign clients	Kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada Konsumen akan berpengaruh terhadap loyalitas mereka dalam menggunakan produk dan layanan tersebut The quality of products and services provided to costumers will affect their loyalty in using these products and services
Rekanan Partner	Kontrak dan Perjanjian Kerja Sama, Proses Operasional Contracts and Cooperation Agreements, Operational Process	Proses pengadaan yang adil dan transparan; Proses evaluasi yang objektif; Hubungan yang harmonis; Fair and transparent procurement processes; An objective evaluation process; Harmonious relationship;
Media Massa Mass media	Media yang menyiarkan informasi tentang perusahaan baik media cetak, media elektronik maupun media sosial, media online maupun Media that broadcast information about the company, both print media, electronic media and social media, online media as well	Kegiatan Perusahaan yang disampaikan oleh media massa, akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan produk- produk Perusahaan The Company's activities conveyed by the mass media will affect the level of knowledge and understanding of the community about the Company's products

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pengelolaan program CSR di lingkup Perusahaan dilakukan melalui koordinasi dari beberapa Unit/ Divisi dengan tanggung jawab masing-masing sesuai kategori program. Namun, tanggung jawab pengelolaan CSR terkait pelibatan dan pengembangan masyarakat berada dalam koordinasi fungsi *Corporate Secretary*.

Dalam menerapkan tanggung jawab sosial, Perusahaan membagi pelaksanaan kegiatan CSR ke dalam 4 (empat) aspek pokok, yaitu: aspek lingkungan hidup; praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; pengembangan sosial dan kemasyarakatan; serta tanggung jawab barang dan/atau jasa. Aspek inilah yang menjadi dasar pelaksanaan program CSR yang dilakukan Perusahaan dalam menjalin hubungan harmonis untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The management of CSR programs within the scope of the Company is carried out through the coordination of several Units/Divisions with each responsibility according to the program category. However, the responsibility for managing CSR related to community involvement and development lies with the coordination of the *Corporate Secretary* function.

In implementing social responsibility, the Company divides the implementation of CSR activities into 4 (four) main aspects, namely: environmental aspects; labor, health and safety practices; social and community development; as well as responsibility for goods and/or services. This aspect is the basis for the implementation of the CSR programs carried out by the Company in establishing harmonious relationships to achieve sustainable growth.

Aspek Dasar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Basic Aspects of Corporate Social Responsibility



Pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan dibagi menjadi tanggung jawab beberapa direktorat, yaitu:

1. Bidang lingkungan berada di bawah koordinasi Direktur Operasi c.q Divisi *Production Planning and Inventory Control*;
2. Bidang kesehatan dan keselamatan kerja berada di bawah koordinasi Direktur SDM dan Umum c.q Divisi Pengamanan Perusahaan;
3. Bidang sosial masyarakat di bawah koordinasi Direktur Keuangan c.q unit kerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG RELEVAN DENGAN BISNIS YANG DIJALANKAN

Pada 2019, Peruri memberikan bantuan pelatihan pengembangan keterampilan teknik dan kewirausahaan untuk lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja melalui program Technical and Entrepreneurial Skill Development Center (TESDC). Program pelatihan ini bekerja sama dengan TESDC Polman Bandung. Peserta mendapat pelatihan di bidang manufaktur dan Industri selama ± 6 bulan di Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung.

ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perusahaan telah merealisasikan dana untuk kegiatan sosial melalui dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebesar Rp19,74 miliar yang sebagian besar dana tersebut digunakan untuk kegiatan sosial di wilayah operasi yang berfokus pada pelibatan dan pengembangan lingkungan masyarakat. Sementara untuk aspek pengelolaan hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan, prosedur operasi yang adil, serta tanggung jawab terhadap konsumen, mengikat pada biaya operasional Perusahaan.

The implementation of corporate social responsibility is divided into responsibilities of several directorates, namely:

1. The environmental sector is under the coordination of the Operations Director c.q Production Planning and Inventory Control Division;
2. The occupational health and safety sector is under the coordination of the Director of Human Resources and General Affairs, cq Corporate Security Division;
3. Community social sector under the coordination of the Director of Finance c.q the Partnership and Community Development Program work unit.

PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF RELEVANCE TO BUSINESS RUN

On 2019 , peruri provide assistance training of skills engineering and entrepreneurship for graduates senior and for has not worked through the technical and entrepreneurial skill development center (tesdc) .Training program is working with tesdc polman bandung .Participants received training in manufacturing and industry for ± 6 months in manufacturing polytechnic (polman) bandung.

BUDGET AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM FINANCING

The company has realized budgets for activities through the Partnership and Environment Development Program (PKBL) of Rp19.74 billion which mostly were used for social activities in a focused area of operation on Public environmental engagement and development. Meanwhile, in human rights management, labor practices, environment management, fair operating procedures, and responsibility responsible to consumers, tied up on Company operations budgets.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TOWARDS THE
FULFILLMENT OF HUMAN RIGHTS



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Sebagai sebuah korporasi, Perusahaan berkomitmen untuk memastikan aktivitas operasional telah memenuhi aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Perusahaan mempunyai komitmen untuk memperlakukan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan hak yang sama sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan dasar Perusahaan sebagai kebijakan pengelolaan hak asasi manusia mengacu pada ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial, hak-hak asasi manusia mencakup nondiskriminasi dan perhatian pada kelompok rentan, menghindari kerumitan, hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak dasar pekerja.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY AND COMMITMENT TOWARDS THE FULFILLMENT OF HUMAN RIGHTS

As a corporation, the Company is committed to ensuring that its operational activities meet the aspects of protecting human rights (HAM). The company is committed to treating all stakeholders according to the same rights in accordance with what has been stipulated in the prevailing laws and regulations.

The basic foundation of the Company as a human rights management policy refers to ISO 26000 regarding the Guidelines for Social Responsibility, human rights including non-discrimination and attention to vulnerable groups, avoid hassle, civil and political rights, economic, social and cultural rights as well as basic workers' rights.

Cakupan definitif tersebut telah dilaksanakan oleh Perusahaan, baik dalam kegiatan operasional yang melibatkan karyawan, maupun lingkungan masyarakat. Perusahaan mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak mendasar bagi setiap individu yang terlibat maupun yang terkena dampak dari kegiatan operasi dan usaha yang dilakukan Perusahaan.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait HAM dilaksanakan dengan senantiasa menjunjung dasar-dasar hak asasi manusia dan menghormati budaya, adat istiadat dan nilai-nilai. Dimana Perusahaan memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi siapa pun untuk bekerja di Peruri sesuai kebutuhan Perusahaan, tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, *gender*, atau lainnya, termasuk dalam hal pengangkatan calon karyawan. Perusahaan juga menerapkan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh karyawan, kebebasan berserikat, pelaksanaan sistem remunerasi dan kesejahteraan karyawan, komitmen atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta hal terkait lainnya.

Perusahaan juga menjamin hak masyarakat untuk turut berkontribusi dan menjalani kehidupan dengan tenang tanpa terganggu atau terkena dampak negatif akibat kegiatan operasional Perusahaan, khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasi. Jika upaya penghormatan hak asasi manusia sudah ditegakkan dan ternyata masih terjadi masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, maka Perusahaan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, melalui musyawarah untuk mufakat. Dengan berbagai pertimbangan ini, maka Perusahaan berupaya semaksimal mungkin agar hak asasi manusia dapat terkelola dengan baik.

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ditujukan untuk membina hubungan industrial secara proporsional serta menciptakan hubungan yang sinergis antara Perusahaan dengan karyawan dan lingkungan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan nilai. Selain itu, dalam menyusun perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam

This definitive scope has been implemented by the Company, both in operational activities that involve employees and the community. The Company defines human rights as a fundamental right for every individual involved in or affected by the operations and business activities carried out by the Company.

SCOPE AND FORMULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE HUMAN RIGHTS SECTOR

The scope of the Company's social responsibility related to human rights is carried out by always upholding the principles of human rights and respecting culture, customs and values. Where the Company provides equal rights and opportunities for anyone to work at Peruri according to the needs of the Company, regardless of differences in religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or others, including in terms of the appointment of prospective employees. The company also applies the principles of diversity and equality for all employees, freedom of association, implementation of a remuneration system and employee welfare, commitment to Collective Labor Agreement (PKB) and other related matters.

The company also guarantees the right of the community to contribute and live a peaceful life without being disturbed or negatively impacted by the Company's operational activities, especially the communities around the operational area. If efforts to respect human rights have been enforced, and there are still problems related to human rights, the Company will strive to resolve these problems properly, through deliberation to reach consensus. With these various considerations, the Company makes every effort so that human rights can be managed properly.

PLANNING FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR THE FULFILLMENT OF HUMAN RIGHTS

The Company is committed to always implementing human rights principles aimed at fostering industrial relations proportionally and creating synergistic relationships between the Company and employees and the community in general, to increase value. In addition, in preparing the activity planning as outlined in the Company Work Plan and Budget (RKAP), one of which is aimed at fulfilling human rights in the scope

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), salah satunya ditujukan untuk pemenuhan HAM pada lingkup operasi dan bisnis Perusahaan. Salah satunya, Perusahaan menekankan pentingnya hak-hak karyawan, terutama hak terkait HAM seperti kehidupan yang layak, hak untuk berserikat dan berkumpul, serta pemenuhan hak dasar karyawan. Perusahaan telah memiliki sejumlah prosedur yang mengatur berbagai pemenuhan hak karyawan dan akan terus mengevaluasi serta mengembangkan penerapan prosedur yang sejalan dengan kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Program kegiatan tanggung jawab terkait dengan hak asasi manusia ini, juga diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan produktivitas dan kinerja Perusahaan, sehingga pada akhirnya dapat membawa pengaruh positif sesuai dengan harapan *stakeholder*.

PENERAPAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA HAK ASASI MANUSIA

Perusahaan memiliki komitmen untuk membina hubungan baik dengan *shareholder* dan *stakeholders* yang bukan hanya berdasarkan keuntungan semata namun juga perilaku-perilaku yang mencerminkan warga korporasi yang menjunjung tinggi etika dalam menjalankan aktivitas bisnisnya seperti integritas, kepatuhan terhadap hukum, persamaan hak maupun bentuk etika lainnya. Perusahaan meyakini bahwa hal ini dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif, menjadikan seluruh insan Perusahaan mampu bertindak secara profesional dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lingkungan Perusahaan.

Sebagai entitas usaha, isu hak asasi manusia dititik beratkan pada 2 (dua) elemen penting, yakni terkait etika bisnis Perusahaan dan etika kerja di lingkup Perusahaan. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan hak asasi manusia salah satunya dengan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa memerhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia atau keadaan khusus seseorang.

Sementara salah satu penerapan hak asasi manusia terhadap konsumen/pelanggan dilakukan dengan memberikan pelayanan yang optimal pada seluruh konsumen/pelanggan secara adil dan transparan serta membuka layanan konsumen dan menindaklanjuti keluhan konsumen tanpa melakukan diskriminasi terhadap konsumen.

of the Company's operations and business. One of them, the Company emphasizes the importance of employee rights, especially rights related to human rights such as a decent life, the right to associate and assemble, and fulfill employees' basic rights. The company already has a number of procedures that govern the fulfillment of various employee rights, and will continue to evaluate and develop the application of procedures in line with the increasingly complex needs of life. This program of responsible activities related to human rights is also expected to have a positive impact on increasing the productivity and performance of the Company, so that in the end it can have a positive influence in accordance with stakeholder expectations.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES ON HUMAN RIGHT

The company is committed to fostering good relationships with shareholders and stakeholders that are not only based on profit but also on behavior that reflects corporate citizens who uphold ethics in carrying out their business activities such as integrity, compliance with law, equality of rights and other forms of ethics. The Company believes that this can create a conducive working atmosphere, enabling all Company personnel to act professionally and to provide benefits to the community in the Company.

As a business entity, human rights issues are emphasized on 2 (two) important elements, namely related to the Company's business ethics and work ethics within the Company. Activities of implementing social responsibility related to human rights, one of which is by providing equal opportunities for employees to get jobs and promotions as stipulated in the Collective Labor Agreement (PKB) regardless of background, ethnicity, religion, gender, age, or someone's special circumstances.

Meanwhile, one of the applications of human rights to Customer is carried out by providing optimal service to all customers fairly and transparently as well as opening Customer services and following up on Customer complaints without discriminating against costumers.

Perusahaan juga menjamin dan memastikan bahwa setiap kegiatan operasional Perusahaan serta hubungan Perusahaan dengan karyawan dan masyarakat tidak akan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setiap jajaran Manajemen Perusahaan pun wajib untuk memahami prinsip-prinsip dan peraturan mengenai hak asasi manusia dalam membuat kebijakan, baik yang berlaku internal bagi Pegawai maupun yang berlaku bagi *stakeholder* Perusahaan secara luas.

PROSEDUR DAN MEKANISME PENANGANAN KONFLIK TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Perusahaan menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik dan meminimalisasi konflik yang terjadi terkait hak asasi manusia. Oleh karenanya, Perusahaan mempersilahkan setiap aduan permasalahan disampaikan kepada Perusahaan. Setiap keluhan maupun pengaduan yang sampai akan ditindaklanjuti sesuai hukum dan peraturan yang berlaku secara umum, maupun prosedur dan peraturan yang berlaku dilingkup Perusahaan.

PENCAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Pada 2019 tidak terdapat penghargaan secara spesifik terkait tanggung jawab sosial bidang hak asasi manusia. Namun, di sepanjang tahun 2019, Perusahaan tidak mendapati atau menerima pengaduan terkait pelanggaran hak asasi manusia antara lain pengaduan tindakan diskriminasi, insiden pelanggaran HAM maupun pengaduan terkait kebebasan berserikat di lingkungan Perusahaan serta insiden kerja paksa yang dialami karyawan. Perusahaan senantiasa berusaha meningkatkan mutu manajemen dan kualitas karyawan sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh Insan Perusahaan. Penghargaan inisiatif tanggung jawab sosial bidang hak asasi manusia juga ditunjukkan oleh karyawan berupa peningkatan loyalitas, produktivitas dan efektivitas karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan dalam membentuk citra positif Perusahaan untuk kesejahteraan bersama.

Disamping itu, untuk menghormati hak-hak konsumen dan lingkungan masyarakat, Perusahaan membuka layanan konsumen dan masyarakat, dengan siap menindaklanjuti setiap keluhan konsumen atau masyarakat tanpa melakukan diskriminasi terhadap konsumen dan masyarakat.

The Company also guarantees and ensures that every operational activity of the Company as well as the Company's relationship with employees and the community will not violate human rights principles. Every level of Company Management is also required to understand the principles and regulations regarding human rights in making policies, both those that apply internally to employees and those that apply to the Company's stakeholders at large.

PROCEDURES AND MECHANISMS FOR HANDLING CONFLICT RELATED TO HUMAN RIGHTS

The company guarantees the implementation of policies properly and minimizes conflicts related to human rights. Therefore, the Company welcomes any complaints regarding problems to the Company. Any complaints or complaints that will be followed up in accordance with the laws and regulations that apply in general, as well as procedures and regulations that apply to the Company.

ACHIEVEMENTS AND AWARDS FOR THE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVE IN THE HUMAN RIGHTS SECTOR

In 2019, there were no awards specifically related to social responsibility in the field of human rights. However, throughout 2019, the Company did not find or receive complaints regarding human rights violations, including complaints of discrimination, incidents of human rights violations and complaints regarding freedom of association within the Company and incidents of forced labor experienced by employees. The company always strives to improve the quality of management and the quality of employees so that they can work efficiently and effectively and provide benefits to all Company personnel. Employees also demonstrated appreciation for social responsibility initiatives in the field of human rights in the form of increased loyalty, productivity and employee effectiveness in order to improve the Company's performance in shaping the Company's positive image for mutual welfare.

In addition, to respect the rights of customers and the community, the Company opens customer and community services, ready to follow up on any complaints from customers or the society without discriminating against customers and society.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK OPERASI YANG ADIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR FAIR OPERATIONS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP OPERASI YANG ADIL

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik operasi yang adil. Praktik ini didasari bahwa sebagai entitas bisnis Perusahaan harus profesional dalam menghasilkan produk dan jasanya, menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan bisnisnya, memiliki kesadaran untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, menghargai hak cipta dan sadar untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui langkah-langkah ini, Perusahaan berupaya menerapkan praktik operasi yang adil. Sebagai landasan dari praktik ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal, serta berbagai standar baku yang berlaku baik nasional maupun internasional.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen, Perusahaan mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung. Kebijakan ini tertera pada peraturan Perusahaan, *code of conduct*, maupun dokumen lainnya. Selain itu, Perusahaan juga membangun *whistleblowing systems* untuk memudahkan pengaduan bila terdapat pelanggaran. Kebijakan dan pedoman tersebut khususnya ditujukan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat dan adil.

Perusahaan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menerapkan kegiatan operasional dengan memerhatikan hak para pemangku kepentingan sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan mewujudkan keseimbangan atas kepentingan seluruh para pemangku kepentingan.

Di samping itu, penerapan prinsip GCG seperti yang telah disampaikan dalam keseluruhan bagian Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam laporan tahunan ini akan memperkuat aspek fundamental Perusahaan yang akan berimbas pada nilai positif bagi keberlanjutan Perusahaan. Wujud kegiatan operasional yang adil yaitu praktik bebas dari korupsi dan suap, netralitas dalam isu-isu politik, menghormati kekayaan intelektual, berkompetisi dengan adil serta patuh pada hukum dan regulasi yang berlaku.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY AND COMMITMENT TO FAIR OPERATIONS

The company is committed to always carrying out fair operating practices. This practice is based on the fact that as a business entity the Company must be professional in producing its products and services, uphold integrity in conducting its business, have the awareness to create a climate of fair business competition, respect copyright and be aware of complying with applicable laws and regulations. Through these steps, the Company strives to adopt fair operating practices. As the basis for this practice are the applicable laws and regulations, internal policies, and various standards that apply both nationally and internationally.

As a follow-up to the commitment, the Company has developed various supporting policies. This policy is stated in the Company regulations, code of conduct, and other documents. In addition, the Company has also built whistleblowing systems to facilitate complaints when there are any violations. These policies and guidelines are specifically aimed at preventing conflicts of interest and implementing healthy and fair business activities.

The company guarantees that all interested parties receive fair treatment in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. The company implements operational activities by adhering to the rights of the stakeholders so as to create a harmonious relationship and create a balance for the interests of all stakeholders.

In addition, the application of GCG principles as stated in the entire section of Good Corporate Governance in this annual report will strengthen the Company's fundamental aspects which will have a positive value for the Company's sustainability. A form of fair operational activity, namely practices free from corruption and bribery, neutrality in political issues, respecting intellectual property, competing fairly and complying with applicable laws and regulations.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG ADIL

ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial memberikan definisi operasi yang adil sebagai praktik yang mencakup anti korupsi, keterlibatan yang bertanggung jawab dalam politik, kompetisi yang adil, promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok (*supply chain*) serta penghargaan atas *property rights*.

Perusahaan berpandangan bahwa keadilan adalah kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian maupun karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkup tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Visi dan Misi, serta kebijakan-kebijakan internal Perusahaan yang mengatur segala sesuatunya terkait operasi yang adil.

Berdasarkan prinsip ini, Perusahaan melakukan pemetaan risiko dari kegiatan bisnis yang dilaksanakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai risiko negatif yang mungkin terjadi dan berdampak terhadap Perusahaan dapat dimitigasi secepat mungkin. Lingkup praktik operasi yang adil dititikberatkan pada pencegahan korupsi, persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, praktik politik praktis, serta kepatuhan regulasi secara umum. Pemetaan ini juga didasarkan atas *review* regulasi yang berlaku di Indonesia, serta berbagai standar internasional yang relevan dan baik untuk diterapkan.

Praktik anti korupsi merupakan perhatian utama Perusahaan. Hal ini didasarkan pengalaman terdahulu bahwa dampak penggelapan (*fraud*) sangat memengaruhi budaya dan kinerja Perusahaan. Oleh karenanya, sebagai bentuk mitigasi risiko, Perusahaan menerapkan kebijakan untuk membangun sistem yang menutup celah pelanggaran serta menerapkan sanksi berat atasnya. Pengembangan sistem ini juga merupakan kesungguhan untuk memberikan jaminan kepastian penyelenggaraan praktik operasi yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan.

THE SCOPE OF FAIR OPERATIONS SOCIAL RESPONSIBILITY

ISO 26000 regarding to Social Responsibility Guidelines provides a definition of fair operation as a practice that includes anti-corruption, responsible involvement in politics, fair competition, promotion of social responsibility in the supply chain as well as awards for property rights.

The company is of the view that justice is equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and due to applicable laws and regulations. The scope of social responsibility related to fair operations is stated in the Company's Articles of Association, Vision and Mission, as well as the Company's internal policies that regulate everything related to fair operations.

Based on this principle, the Company carries out risk mapping of its business activities which aim to ensure that any negative risks that may occur and impact the Company can be mitigated as quickly as possible. The scope of fair operating practices focuses on preventing corruption, business competition, intellectual property rights, practical political practices, and regulatory compliance in general. This mapping is also based on a review of applicable regulations in Indonesia, as well as various international standards that are relevant and good to apply.

Anti-corruption practices are a major concern of the Company. This is based on previous experience that the impact of embezzlement (*fraud*) greatly affects the Company's culture and performance. Therefore, as a form of risk mitigation, the Company implements a policy to build a system that closes the loopholes of violations and imposes severe sanctions on them. The development of this system is also a serious effort to guarantee the assurance of the implementation of good operating practices to all stakeholders.

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ASPEK OPERASI YANG ADIL

Perusahaan senantiasa menargetkan dalam perencanaan tahunannya untuk menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Sasaran dan target serta rencana penerapan tanggung jawab atas operasi yang adil ditekankan pada penerapan Tata Kelola Perusahaan yang bersandar pada 2 (dua) tujuan utama, yaitu pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta pelibatan pemangku kepentingan untuk dapat tumbuh bersama. Perusahaan berupaya untuk terus meningkatkan penerapan GCG pada ke-2 aspek tersebut, dengan harapan mampu menciptakan operasi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP DAMPAK TANGGUNG JAWAB ATAS OPERASI YANG ADIL

Operasi yang adil terutama menekankan pada pentingnya pengelolaan Perusahaan yang transparan, wajar dan setara. Pemenuhan aspek operasi yang adil melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, meliputi:

1. Pemegang saham dan kepentingannya terhadap pengelolaan Perusahaan yang transparan dan akuntabel;
2. Karyawan yang berkepentingan terhadap Prosedur Tetap yang wajar, adil dan dengan mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mitra kerja dan pemasok yang memiliki kepentingan terhadap proses kemitraan yang bersandar pada transparansi dan keadilan;
4. Konsumen atau pelanggan dengan kepentingan atas pengelolaan jasa layanan yang bertanggung jawab;
5. Regulator yang memiliki kepentingan atas industri yang stabil.

PENERAPAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA ASPEK OPERASI YANG ADIL

Perusahaan memiliki Tata Kelola Organisasi yang telah menyesuaikan dengan iklim dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan Perusahaan dijalankan dengan kelengkapan organ pendukung yang dapat memberikan kinerja yang optimal. Perusahaan juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan strategis bagi kinerja keberlanjutan Perusahaan.

PLANNING FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ASPECTS OF FAIR OPERATIONS

The company always targets in its annual planning to ensure the implementation of all policies for fair operating practices. The targets and targets as well as the implementation plan for fair operations are emphasized on the implementation of Corporate Governance which rests on 2 (two) main objectives, namely the fulfillment of compliance with applicable laws and regulations, as well as the involvement of stakeholders to grow together. The company strives to continue to improve the implementation of GCG in these 2 aspects, with the expectation of being able to create fair and accountable operations.

STAKEHOLDERS AND SCOPE OF IMPACT OF RESPONSIBILITY FOR FAIR OPERATIONS

Fair operation especially emphasizes the importance of transparent, fair and equal management of the Company. Fulfillment of the fair operating aspects involves the interests of various stakeholders, including:

1. Shareholders and their interests in transparent and accountable management of the Company;
2. Employees with an interest in Standard Procedures that are fair, fair, and with a work mechanism that can be accounted for;
3. Partners and suppliers who have an interest in a partnership process that rests on transparency and fairness;
4. Customers with an interest in responsible service management;
5. Regulators who have an interest in a stable industry.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES IN THE ASPECT OF FAIR OPERATIONS

The company has an Organizational Governance that has adjusted to the climate and the prevailing laws and regulations. The duties and powers of the Supervisory Board and the Board of Directors in the supervision and management of the Company are carried out with complete supporting organs that can provide optimal performance. The company also holds a General Meeting of Shareholders (GMS) as a forum for shareholders to make strategic decisions for the Company's sustainability performance.

Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kode Etik, hingga prosedur dan kebijakan Perusahaan lainnya disusun untuk menciptakan operasi yang adil dalam praktik operasi dan bisnis Peruri. Perusahaan berharap, penerapan GCG yang dilakukan akan terus memperkuat kinerja Peruri dan melindungi seluruh insan Perusahaan dari kemungkinan praktik pengelolaan bisnis yang tidak sehat.

Perusahaan menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, segenap insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah. Segenap insan Perusahaan dan keluarganya juga dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari mitra usaha dan pihak lainnya yang akan memengaruhi independensi dan obyektifitas pelaksanaan tugasnya di Perusahaan.

PROSEDUR DAN MEKANISME PENANGANAN KONFLIK TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Perusahaan menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik dan meminimalisasi konflik yang terjadi terkait kegiatan operasi yang adil. Oleh karenanya, Perusahaan membuka sarana penyampaian saran dan pendapat atau pengaduan yang disajikan secara terbuka bagi para pemangku kepentingan. Adapun setiap keluhan maupun pengaduan yang sampai, akan ditindaklanjuti secara independen dan rahasia oleh fungsi-fungsi terkait. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya, sehingga mekanisme ini aman bagi para pelapor. Pelaporan yang masuk akan ditelusuri fakta material yang terjadi. Bila memang terdapat pelanggaran, maka Perusahaan akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan.

The Articles of Association, Guidelines for Good Corporate Governance, Code of Ethics, and other Company policies and procedures have been formulated to create fair operations in Peruri's operating and business practices. The company hopes that the implementation of GCG will continue to strengthen Peruri's performance and protect all Company personnel from any unhealthy business management practices possibility.

The company guarantees fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders based on the prevailing laws and regulations. In addition, by referring to laws and regulations, all Company personnel are prohibited from taking actions that have a conflict of interest, and taking personal gain, either directly or indirectly from decision making and Company activities other than legal income. All Company personnel and their families are also prohibited from accepting gratuities in any form, either directly or indirectly, from business partners and other parties that will affect the independence and objectivity of the implementation of their duties in the Company.

PROCEDURES AND MECHANISMS FOR HANDLING CONFLICT RELATED TO FAIR OPERATIONS

The company guarantees the implementation of policies properly and minimizes conflicts that occur related to fair operating activities. Therefore, the Company opens a means of conveying suggestions and opinions or complaints that are presented openly to stakeholders. Any complaints that have been received will be followed up independently and confidentially by the related functions. The confidentiality of the reporter is guaranteed so that this mechanism is safe for the whistleblower. Incoming reports will be traced to material facts that occur. If there is a violation, the Company will provide sanctions according to the level of the violation committed.

PENCAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Komitmen Perusahaan dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait praktik operasi yang adil telah meningkatkan kepercayaan para *stakeholders*. Sepanjang 2019, Perusahaan tidak memiliki kasus indikasi korupsi dan suap yang dihadapi oleh anggota Dewan Pengawas dan Direksi maupun karyawan Perusahaan. Segenap insan Perusahaan juga tercatat tidak berpartisipasi aktif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada partai politik. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan *Code Of Conduct* serta prinsip-prinsip GCG yang telah diterapkan dengan baik serta partisipasi pemangku kepentingan yang turut mendukung penerapan program tanggung jawab sosial terhadap operasi yang adil.

Selain itu, atas pelaksanaan bisnis Perusahaan yang terarah dan bertujuan luhur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Perusahaan juga memberikan dampak positif atas operasi yang telah dilakukan dalam bentuk nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan. Bentuk penghargaan yang diberikan Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, dibuktikan dengan ketaatan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban terhadap negara berupa pajak dari nilai ekonomi yang dihasilkan. Perusahaan juga mendistribusikannya langsung kepada lingkungan dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dan bantuan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar khususnya di sekitar proyek operasi Perusahaan, yang diberikan secara adil dan sesuai kebutuhan.

ACHIEVEMENTS AND AWARDS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES RELATED TO FAIR OPERATIONS

The Company's commitment to implementing social responsibility related to fair operating practices has increased the trust of stakeholders. Throughout 2019, the Company did not have cases indicating corruption and bribery faced by members of the Supervisory Board and Directors or employees of the Company. All Company personnel are also recorded as not actively participating, either directly or indirectly, in political parties. This is influenced by the implementation of the Code of Conduct and GCG principles that have been implemented properly as well as the participation of stakeholders who also support the implementation of social responsibility programs for fair operations.

In addition, for carrying out the Company's business that is directed and has a noble aim to improve the welfare of the community, the Company also has a positive impact on its operations in the form of economic value generated and distributed. The form of appreciation given by the Company to stakeholders is evidenced by the Company's obedience in fulfilling its obligations to the state in the form of taxes on the resulting economic value. The company also distributes it directly to the environment and the community in the form of activities and assistance to the community and the surrounding environment, especially around the Company's operational projects, which are given fairly and as needed.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP LINGKUNGAN HIDUP

ENVIRONMENTAL SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Perusahaan menyadari bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan memberikan dampak bagi lingkungan. Untuk itu Perusahaan secara proaktif membina budaya tanggung jawab lingkungan tidak saja terhadap karyawan tetapi juga meliputi masyarakat pada umumnya. Sekalipun kegiatan usaha Perusahaan tidak berdampak langsung terhadap lingkungan hidup, namun Perusahaan memiliki komitmen kuat untuk ikut terlibat pada upaya memelihara kelestarian lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan Perusahaan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk himbauan, maklumat dan peraturan Perusahaan dalam rangka meminimalisir dampak operasional Perusahaan terhadap lingkungan hidup. Perusahaan berkomitmen mencegah pencemaran lingkungan dengan melaksanakan kegiatan operasi yang dibarengi dengan pengelolaan lingkungan dan melakukan penghematan sumber daya alam.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pencegahan pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup dari aktivitas bisnis perusahaan, Peruri memiliki kebijakan untuk mengupayakan terciptanya efisiensi energi dan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta melakukan proteksi sehingga tercipta lingkungan bersih dan aman guna mencapai Industri Hijau atau "Go Green". Kebijakan ini telah dituangkan dalam Kebijakan Sistem Manajemen Peruri yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada 1 April 2019 dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan *stakeholder* di lingkungan Peruri.

Perusahaan menyadari bahwa lingkungan hidup menjadi salah satu indikator dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, Perusahaan senantiasa memerhatikan keseimbangan lingkungan hidup, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional. Perusahaan selalu berupaya untuk menjaga pencemaran lingkungan serta melestarikan lingkungan dalam setiap kegiatan operasional. Setiap kebijakan terkait pelestarian lingkungan senantiasa di evaluasi dengan melakukan identifikasi, kontrol dan menghindari atau meminimalkan penggunaan bahan atau alat-alat dalam kegiatan operasional Perusahaan yang dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan.

COMMITMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY RELATED TO THE ENVIRONMENT

The company realizes that its business activities have an impact on the environment. For this reason, the Company proactively fosters a culture of environmental responsibility not only for employees but also for society in general. Even though the Company's business activities do not have a direct impact on the environment, the Company has a strong commitment to be involved in efforts to preserve the environment, either directly or indirectly.

Company policies related to environmental management and protection are manifested in the form of Company appeals, notices and regulations in order to minimize the impact of the Company's operations on the environment. The company is committed to preventing environmental pollution by carrying out operational activities coupled with environmental management and saving natural resources.

As a form of commitment to preventing pollution and preserving the environment from the company's business activities, Peruri has a policy to strive for energy and natural resource efficiency, prevent environmental pollution and provide protection so that a clean and safe environment is created to achieve a Green Industry or "Go Green". This policy has been stated in the Peruri Management System Policy which was signed by the President Director on April 1, 2019, and has been disseminated to all employees and stakeholders in the Peruri environment.

The company realizes that the environment is an indicator of the implementation of sustainable development. To that end, the Company always pays attention to environmental balance, by prioritizing the principle of prudence in carrying out business and operational activities. The company always strives to maintain environmental pollution and preserve the environment in every operational activity. Every policy related to environmental preservation is constantly evaluated by identifying, controlling and avoiding or minimizing the use of materials or tools in the Company's operational activities that can have a negative impact on the environment.

Pemenuhan kepatuhan perundangan terkait lingkungan senantiasa dipantau dan dievaluasi guna menjamin perusahaan sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance. Pengelolaan lingkungan khususnya terkait aspek dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan percetakan security tentunya menjadi prioritas dari manajemen yang didasarkan pada hasil analisis risiko dari masing-masing lini proses produksi. Berkenaan dengan hal itu, Peruri membentuk departemen pengelolaan limbah yang bertugas untuk melaksanakan, mengevaluasi kegiatan operasional dan tata kelola limbah produksi serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang terkait dengan pengelolaan limbah perusahaan. Departemen pengelolaan limbah diharapkan mampu mengembangkan proyek penelitian dan memberikan kontribusi kelompok kegiatan di skala nasional yang berkaitan dengan upaya pengelolaan dan pengolahan limbah produksi.

Peruri telah tersertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 sejak 6 Maret 2013 dan dilakukan upgrade ISO 14001:2015 di tahun 2018. Pada 2019 Peruri melakukan resertifikasi ISO 14001:2015 dari badan sertifikasi PT. SGS Indonesia untuk memperpanjang kepemilikan sertifikat tersebut hingga 6 Maret 2022.

DAMPAK DAN RISIKO LINGKUNGAN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN BESERTA PENGELOLAANNYA

Perusahaan berkomitmen untuk mengelola lingkungan dengan baik, pengelolaan terhadap lingkungan dalam hal ini adalah segala upaya yang dilakukan Perusahaan dalam rangka melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan semua aspek yang timbul dalam proses usaha Perusahaan sehingga meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul terhadap karyawan dan lingkungan sekitar.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN

dalam setiap aktivitas bisnisnya, Perusahaan selalu berupaya memerhatikan aspek lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kepatuhan Peraturan Perundangan Terkait Lingkungan
Evaluasi kepatuhan peraturan perundangan terkait lingkungan dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dari tingkat nasional hingga tingkat daerah. Peran tersebut dilakukan oleh Divisi Risk Management bekerjasama dengan unit kerja terkait, khususnya Departemen Pengelolaan limbah setiap tahunnya.

Compliance with environmental laws is monitored and evaluated to ensure the company is in line with the principles of Good Corporate Governance. Environmental management, especially related to aspects and impacts arising from security printing activities, is of course a priority for management based on the results of risk analysis from each production process line. In this regard, Peruri formed a waste management department whose task is to carry out, evaluate operational activities and management of production waste and ensure compliance with regulations related to corporate waste management. The waste management department is expected to be able to develop research projects and contribute to group activities at a national scale related to the management and processing of production waste.

Peruri has been certified ISO 14001: 2004 Environmental Management System since March 6, 2013 and has been upgraded to ISO 14001: 2015 in 2018. In 2019 Peruri carried out ISO 14001: 2015 recertification from the certification agency PT. SGS Indonesia to extend ownership of the certificate until March 6, 2022.

ENVIRONMENTAL IMPACTS AND RISKS RELATED TO THE COMPANY'S BUSINESS ACTIVITIES AND THEIR MANAGEMENT

The company is committed to managing the environment properly, management of the environment in this case is all the efforts made by the Company in planning, implementing and supervising all aspects that arise in the Company's business processes so as to minimize any negative impacts that may arise on employees and the surrounding environment.

PROGRAMS AND ACTIVITIES RELATED TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TOWARDS THE ENVIRONMENT

In every business activity, the Company always strives to pay attention to environmental aspects through various activities as follows:

1. Compliance with Environmental Related Laws and Regulations
Evaluation of environmental compliance with laws and regulations is carried out by identifying and evaluating the company's compliance with laws and regulations and other requirements from the national to the regional levels. This role is carried out by the Risk Management Division in collaboration with related work units, in particular the Department of Waste Management every year.

2. Perizinan Lingkungan

Peruri telah memiliki izin lingkungan Nomor: 503/2970/67/ILK/III/DPMPSTSP/2017, yang disahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang pada 23 Maret 2017. Perizinan tersebut berdasarkan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No. 05 Tahun 2012.

Setelah memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Peruri berkewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hidup yang merupakan dokumen panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan setiap semester. Pada 2016, Peruri melakukan proses pengajuan izin lingkungan dengan melakukan penyusunan Dokumen AMDAL dan pada 30 November 2016, Peruri telah mendapat rekomendasi Teknis Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)-Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang sebagai dasar pertimbangan dalam penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Dokumen tersebut dipantau dan dievaluasi melalui pelaporan RKL RPL (Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan) yang secara rutin dilaksanakan pada setiap semester (6 bulan) pada tahun produksi, sebagai contoh Izin Insinerator dan monitor untuk uji emisi udara cerobong, Izin Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun (IPSLB3).

3. Perizinan Fasilitas Pengelolaan Limbah

dalam melakukan pengelolaan limbah, baik limbah berbahaya dan beracun (B3) maupun limbah non B3 yang bersifat padat dan cair, Peruri memiliki beberapa fasilitas pengelolaan limbah, diantaranya:

- a. 2 buah incinerator dengan kapasitas 300 kg/jam dan 400 kg/jam untuk pembakaran limbah padat B3;
- b. Tempat pembuangan sampah domestik sementara;
- c. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPSLB3) dengan Nomor Izin 503/7429/58/IPLSB3/VII/ BPMPT/2015 yang berlaku untuk 5 tahun;
- d. Bak Evaporasi untuk limbah B3 cair akan digantikan dengan investasi tangki penyimpanan limbah cair B3 pada 2020 depan dengan kapasitas total 300 m³;

2. Environmental Permits

Peruri already has an environmental permit Number: 503/2970/67/ILK/III/DPMPSTSP/2017, which was approved by the Karawang Regency One Stop Investment and Integrated Service Agency on March 23, 2017. The permit is based on the AMDAL document (Environmental Impact Analysis) which refers to the Regulation of the Minister of Environment (PermenLH) No. 05 of 2012.

After having an Environmental Impact Analysis Document (AMDAL), Peruri is obliged to prepare an Environmental Management Plan (RKL) and a Living Environmental Monitoring Plan (RPL) document which are environmental management guidance documents for all organizers of an activity every semester.

In 2016, Peruri conducted an environmental permit application process by compiling an AMDAL document and on 30 November 2016, Peruri received a technical recommendation for an Environmental Impact Analysis (ANDAL) Environmental Management Plan (RKL) -Environmental Monitoring Plan (RPL) from the Environmental Management Agency. Karawang Regency as a basis for consideration in issuing Decree of Environmental Feasibility and Environmental Permits.

These documents are monitored and evaluated through the RKL RPL (Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan) reporting which is routinely carried out every semester (6 months) in the production year, for example Incinerator Permits and monitors for stack air emission tests, Temporary Storage Permits for Hazardous Waste. and Toxic (IPSLB3).

3. Waste Management Facility Permit

In carrying out waste management, both hazardous and toxic waste (B3) and non-B3 waste which is solid and liquid waste, Peruri have several waste management facilities, including:

- a. 2 incinerators with a capacity of 300 kg/hour and 400 kg/hour for burning B3 solid waste,
- b. Temporary domestic garbage disposal,
- c. Temporary storage place for B3 waste (TPSLB3) with Permit Number 503/7429/58/IPLSB3/VII/ BPMPT/2015, valid for 5 years,
- d. The evaporation tub for liquid B3 waste will be replaced with an investment in a B3 liquid waste storage tank in 2020 with a total capacity of 300 m³,

- e. Sewage Treatment Plan (STP) yang pada tahun lalu sedang dalam tahap *re-engineering* untuk pengolahan limbah cair domestik yang terdapat pada masing-masing gedung utama di area perusahaan untuk memenuhi baku mutu No. 68 Tahun 2016;
- f. Investasi alat pengolahan limbah cair B3 pada 2020 berupa incinerator khusus untuk limbah cair B3.
4. Pelestarian Lingkungan Hayati
Untuk menjaga ekosistem alam, mendukung ketersediaannya sarana kebersihan dan memberdayakan kebiasaan menanam pohon untuk keberlangsungan penghijauan, Perusahaan melakukan kegiatan penanaman pohon dan penyediaan peralatan angkut sampah yang dilaksanakan di setiap area operasi Perusahaan. Sebagai bentuk budaya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, Perusahaan proaktif dalam berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perusahaan serta untuk mendukung program-program nasional yang terkait dengan lingkungan hidup.
Guna membentuk lingkungan hidup yang harmonis antara kegiatan operasional dan kebutuhan akan lingkungan alam, Perusahaan menata taman sekitaran Kantor Pusat dan area kawasan industri milik Peruri. Selain digunakan untuk menciptakan suasana yang asri, taman ini dapat berfungsi sebagai area resapan air, sekaligus untuk menjaga kualitas udara agar dapat selalu terjaga dalam kondisi baik.
5. Pengelolaan Limbah
Perusahaan memiliki kebijakan dalam proses dan prosedur pengolahan limbah yang ramah lingkungan, baik limbah padat maupun cair. Kegiatan pengelolaan limbah padat mencakup pemilihan dan pengelolaan limbah biasa dengan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta pengelolaan tempat pembuangan sampah sementara.
6. Program *Green Office*
Program CSR terhadap lingkungan hidup dilaksanakan melalui Program *Green Office* yaitu dengan menerapkan berbagai penghematan, yakni dengan melakukan berbagai macam program dan kebijakan yang terkait dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Seperti pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana dalam kegiatan operasional menjadi salah satu kebijakan Perusahaan, di antaranya penggunaan
- e. Sewage Treatment Plan (STP), which last year was in the re-engineering stage for processing domestic liquid waste in each main building in the company's premises to meet quality standards No. 68 of 2016,
- f. Investment in B3 liquid waste treatment equipment in 2020 is in the form of a special incinerator for B3 liquid waste.
4. Conservation of the Living Environment
To protect the natural ecosystem, support the availability of sanitary facilities, and empower the habit of planting trees for sustainable reforestation, the Company carries out tree planting activities and provides garbage transportation equipment which is carried out in every area of the Company's operations. As a form of corporate social responsibility culture towards the environment, the Company is proactive in contributing to environmental preservation. This is done in order to reduce the environmental impact of the Company's activities and to support national programs related to the environment.
In order to create a harmonious living environment between operational activities and the need for the natural environment, the Company has arranged a park around the Head Office and an industrial area owned by Peruri. Apart from being used to create a beautiful atmosphere, this park can function as a water catchment area, as well as to maintain air quality so that it can always be maintained in good condition.
5. Waste Management
The company has policies in processes and procedures for treating environmentally friendly waste, both solid and liquid waste. Solid waste management activities include the selection and management of ordinary waste with hazardous and toxic materials (B3), as well as management of temporary landfills.
6. Green Office Program
The CSR program for the environment is carried out through the Green Office Program, namely by implementing various savings, namely by carrying out various programs and policies related to concern for environmental sustainability. For example, the wise use of natural resources in operational activities is one of the Company's policies, including the use of electricity, water, paper, and all things related to natural resources.

energi listrik, air, kertas dan semua hal yang terkait dengan sumber daya alam.

Program tersebut dapat memberikan manfaat nyata seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi dan juga peningkatan citra Perusahaan. Peruri telah menerapkan aplikasi *Office Automation* (OA) sebagai sarana informasi dan komunikasi perusahaan, khususnya dalam administrasi persurutan perusahaan. Sejalan dengan tema Peruri, yakni, "Go Global, Go Digital", penerapan *Office Automation* (OA) merupakan salah satu bentuk nyata Peruri dalam upaya pengurangan penggunaan sumber daya kertas (paperless), meningkatkan kinerja dan menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Melalui aplikasi OA, karyawan lebih mudah untuk melakukan koordinasi secara formal baik internal maupun eksternal.

7. Pengelolaan penggunaan Material dan Energi
Salah satu komitmen menjaga lingkungan hidup diwujudkan Perusahaan melalui kebijakan penggunaan energi yang efektif dan efisien. Selain berimbang pada penggunaan energi yang tepat guna, kebijakan ini terbukti dapat mengurangi beban biaya operasional Perusahaan. Material dan energi yang kerap digunakan dalam operasional Perusahaan adalah air, kertas maupun bentuk alat tulis kantor (ATK) lainnya, listrik dan bahan bakar minyak (BBM).
Perusahaan memiliki kebijakan terkait penggunaan material dan energi pada kegiatan operasional agar digunakan secara efisien serta berorientasi pada meminimalisir dampak lingkungan. Perusahaan berkomitmen melaksanakan efisiensi terkait material dan energi yang digunakan dalam operasional Perusahaan melalui penerapan sejumlah program. Di mana Perusahaan menghimbau agar seluruh insan Perusahaan menggunakan kertas kembali pada sisi yang kosong dan menggunakan air bersih secukupnya, serta mematikan semua listrik apabila tidak digunakan atau selesai bekerja, juga menggunakan BBM sesuai dengan kebutuhan.
Sementara itu, keberadaan air bersih yang terus menyusut tiap tahunnya, juga membuat insan Perusahaan terus berupaya dalam menjaga persediaannya. Untuk menjaga stok atau persediaan air bersih dalam kegiatan operasional kantor sehari-hari, Perusahaan melakukan sosialisasi penghematan terhadap penggunaan sumber daya air di lingkungan kantor, serta melakukan pengecekan secara rutin terhadap instalasi air sehingga dengan cepat diketahui dan dilakukan perbaikan apabila ada kebocoran.

This program can provide tangible benefits such as reducing operating costs, increasing efficiency, and also enhancing the Company's image. Peruri has implemented the Office Automation (OA) application as a means of corporate information and communication, especially in corporate correspondence administration. In line with Peruri's theme, namely, "Go Global, Go Digital", the explanation of Office Automation (OA) is one of Peruri's tangible forms of reducing the use of paper resources (paperless), improving performance and creating efficiency for the company. Through the OA application, it is easier for employees to coordinate formally both internally and externally.

7. Management of Material and Energy use
One of the commitments to protect the environment is manifested by the Company through policies on the use of energy that are effective and efficient. Apart from having an impact on the use of appropriate energy, this policy has been proven to reduce the Company's operational costs. The materials and energy that are often used in the Company's operations are water, paper and other forms of office stationery (ATK), electricity, and fuel oil (BBM).
The company has policies related to the use of materials and energy in operational activities so that they are used efficiently and are oriented towards minimizing environmental impacts. The Company is committed to implementing efficiency related to the materials and energy used in the Company's operations by implementing a number of programs. Where the Company urges all Company personnel to use paper again on the blank side, and use enough clean water, and turn off all electricity when not in use or after work, also use fuel as needed.

Meanwhile, the existence of clean water which continues to decline every year has also made the Company's people continue to strive to maintain its supply. To maintain a stock or supply of clean water in daily office operations, the Company socializes savings on the use of water resources in the office environment, and conducts regular checks on water installations so that they are quickly identified and repaired if there is a leak.

Di samping itu, Perusahaan mendorong penggunaan listrik dalam kegiatan operasional perkantoran secara lebih optimal dan efisien. Perusahaan menggunakan listrik yang di beli dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai sumber energi untuk kegiatan operasional kantor. Perusahaan menggunakan pendekatan perhitungan jumlah konsumsi energi listrik dengan cara mengkonversi total biaya penggunaan listrik dari PLN menjadi rata-rata jumlah kilo watt jam penggunaan.

Sementara itu, kebijakan penggunaan BBM, lebih mempertimbangkan kelayakan seluruh kendaraan operasional yang telah lulus uji emisi. Upaya efisiensi yang dilakukan Perusahaan terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

8. Pemantauan Kualitas Lingkungan

Komitmen Perusahaan terhadap kualitas lingkungan diterapkan dalam bentuk pemantauan atas kualitas lingkungan. Program pemantauan lingkungan yang dilakukan Perusahaan, diantaranya:

a. Pemantauan Kualitas dan Debit Air Limbah Domestik.

Pemantauan debit air limbah domestik dari STP yang akan dialirkan ke badan Sungai Cisubah sesuai izin Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang Nomor: 503/Kep.8289/025/IPALASA/BPMPT/2013 tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (IPALASA). Sedangkan, Pemantuan kualitas air limbah domestik dilaksanakan setiap bulan bekerjasama dengan Laboratorium JasaTirta II. Mulai 2017, baku Mutu yang digunakan sebagai acuan adalah Permen LH No. 68 Tahun 2016, dengan menambahkan parameter dari 4 menjadi 8 parameter. Sepanjang 2019 hasil laporan pengujian tersebut berada di bawah baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 68 Tahun 2016 untuk parameter bakteri E.Coli sehingga diperlukan proses perbaikan dan desain ulang (*re-engineering*) sistem STP dengan sistem yang baru dikarenakan laporan tersebut harus dilaporkan kepada BPLH Kabupaten Karawang setiap 3 (tiga) bulan.

b. Pemantauan Kualitas Air Bersih.

Air bersih yang digunakan untuk aktivitas baik produksi dan non-produksi perusahaan secara rutin dilakukan pengujian di laboratorium internal Peruri baik sebelum dan setelah diproses melalui *Water Treatment Plant* (WTP) yang dimiliki Peruri.

In addition, the Company encourages more optimal and efficient use of electricity in office operations. The company uses electricity purchased from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) or PLN as a source of energy for office operations. The company uses an approach to calculating the amount of electrical energy consumption by converting the total cost of electricity usage from PLN into the average number of kilo watt hours of use.

Meanwhile, the fuel use policy considers the feasibility of all operational vehicles that have passed the emission test. The efficiency efforts undertaken by the Company are shown in the table and graph below.

8. Environmental Quality Monitoring

The Company's commitment to environmental quality is implemented in the form of monitoring environmental quality. Environmental monitoring programs carried out by the Company, including:

a. Monitoring the Quality and Discharge of Domestic Wastewater.

Monitoring the discharge of domestic wastewater from STP which will be flowed into the Cisubah River body in accordance with the permit of the Decree of the Head of the Investment and Integrated Services Agency of Karawang Regency Number: 503/Kep.8289/025/IPALASA/BPMPT/2013 concerning the Issuance of Permits for Disposing of Wastewater to Water or Sumber Air (IPALASA). Meanwhile, monitoring of the quality of domestic waste water is carried out every month in collaboration with the Tirta II Service Laboratory. Starting 2017, the quality standard used as a reference is the Permen LH No. 68 of 2016, by adding parameters from 4 to 8 parameters. Throughout 2019 the results of the test were below the quality standard for the Minister of Environment Regulation No. 68 of 2016 for E. Coli bacteria parameters, so it needs repair and re-engineering of the STP system with a new system due to be reported to BPLH Karawang Regency every 3 (three) months.

b. Monitoring Clean Water Quality.

Clean water used for both production and non-production activities of the company is routinely tested at Peruri's internal laboratory both before and after being processed through Peruri's Water Treatment Plant (WTP).

- c. Pemantauan Emisi Udara Incinerator.
Pemantauan kualitas udara di incinerator dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan jasa laboratorium yang berizin dan tersertifikasi.
 - d. Pemantauan Nilai Konsentrasi Limbah B3 Padat dan Cair.
Peruri secara konsisten melakukan pengujian konsentrasi Limbah B3 baik padat maupun cair ke laboratorium yang telah bersertifikasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) serta melakukan pencatatan limbah B3 perusahaan yang dihasilkan dari masing-masing unit kerja dan disimpan didalam TPS Limbah B3 yang dituangkan kedalam Neraca Limbah, untuk selanjutnya disusun kedalam Dokumen RKL RPL yang dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, BPLH Propinsi Jawa Barat dan BPLH Kabupaten Karawang setiap tiga bulan.
 - e. Pemantauan Kualitas Udara Ambient dan Tingkat Kebisingan
Pemantauan Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan dilaksanakan secara rutin setiap semester yang dilakukan pada area *indoor* dan *outdoor* di koordinat area lingkungan Peruri yang kemudian dimasukkan ke dalam pelaporan Dokumen RKL RPL.
9. Program Efisiensi, *Reuse* dan *Recycle*
- a. Efisiensi
Peruri melakukan upaya efisiensi energi dengan melakukan program pemasangan *chiller* dengan tipe kondensor *watercool* pada *air conditioner* yang mampu menghemat energi sampai dengan 50%. Selain itu guna efisiensi energi, dilakukan juga pemasangan Alat Penghilang Daya Reaktif pada instalasi listrik. Upaya Efisiensi sumber daya air bersih dilakukan dengan penggunaan air hujan dan air permukaan yang kemudian di-*treatment* menggunakan sistem *water treatment plant* untuk kebutuhan domestik dan pendukung aktivitas Perusahaan.
 - b. *Recycle*
Sedangkan untuk proses *recycle* air limbah dilakukan penerapan sistem pengolahan *aquasave* dan WTP. Dalam instalasi *aquasave*, air yang digunakan untuk melakukan pembersihan mesin produksi diolah menggunakan sistem pengendapan dan filtrasi yang kemudian dapat digunakan kembali sampai dengan titik jenuh (TSD 5,5%) sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- c. Incinerator Air Emission Monitoring.
Air quality monitoring in the incinerator is carried out every 3 (three) months by using a licensed and certified laboratory service.
 - d. Monitoring the Concentration Value of Solid and Liquid B3 Waste.
Peruri consistently tests the concentration of hazardous waste both solid and liquid to a laboratory that has been certified by KAN (National Accreditation Committee) and records the company's B3 waste produced from each work unit and stored in the TPS of B3 Waste which is poured into the Waste Balance, for then compiled into the RKL RPL document which is reported to the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, BPLH West Java Province and BPLH Karawang Regency every three months.
 - e. Monitoring Ambient Air Quality and Noise Level
Monitoring of Air Quality and Noise Levels is carried out regularly every semester which is carried out in indoor and outdoor areas in the coordinates of the Peruri environmental area which is then entered into the RKL RPL document reporting.
9. Efficiency, Reuse and Recycle Program
- a. Efficiency
Peruri makes energy efficiency efforts by installing a chiller with a watercool condenser type in the air conditioner which can save energy up to 50%. In addition, for energy efficiency, reactive power removal equipment is also installed in electrical installations. Efficiency of clean water resources is carried out by using rainwater and surface water which is then treated using a water treatment plant system for domestic needs and to support the Company's activities.
 - b. Recycle
Meanwhile, for the waste water recycle process, the *aquasave* and WTP treatment systems are implemented. In *aquasave* installations, the water used for cleaning production machines is treated using a deposition and filtration system which can then be reused up to its saturation point (TSD 5.5%) according to the specified requirements.

c. *Reuse*

Upaya *reuse* dilakukan dengan cara penggunaan kembali kaleng-kaleng tinta yang telah digunakan untuk menempatkan *base ink* dalam proses produksi Uang Kertas dan produk Kertas Berharga Non-Uang. Selain itu upaya *reuse* juga dilakukan dengan cara penggunaan pallet yang masih bisa digunakan untuk digunakan kembali sebagai wadah angkut limbah serta penggunaan kembali drum bekas dari uang logam sebagai tempat penampungan tinta netralisir.

10. Pertimbangan Aspek Lingkungan terkait Kerja Sama dengan Mitra Kerja Pemasok/Vendor/Supplier

Dalam kegiatan usaha yang dilakukan, Perusahaan kerap melakukan proses kerja sama dengan beberapa mitra kerja seperti pemasok, *vendor* ataupun *supplier*, yang pada setiap prosesnya, Perusahaan selalu mempertimbangkan kualitas material yang akan di pakai oleh mitra kerja. Perusahaan senantiasa menganalisa setiap material yang akan digunakan oleh mitra kerja untuk meminimalisir dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN HIDUP

Komitmen Perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan diwujudkan dengan efisiensi penggunaan kertas, listrik dan BBM, atau pengelolaan lingkungan lainnya yang berdampak terhadap efisiensi biaya operasional Perusahaan.

PENINGKATAN KESADARAN KARYAWAN TERKAIT LINGKUNGAN

Menyadari bahwa pengelolaan limbah merupakan tantangan yang cukup besar bagi perusahaan dan mengingat isu pencemaran lingkungan menjadi perhatian baik internal maupun masyarakat, khususnya yang berada di sekitar area Perusahaan. Peruri terus berupaya meningkatkan kesadaran dan kompetensi karyawan terhadap pengelolaan lingkungan melalui beberapa kegiatan yang diadakan pada 2019, seperti:

1. Pemasangan *signage* terkait kebersihan lingkungan;
2. Pemilahan sampah organik dan non organik.

MEKANISME DAN INFORMASI TENTANG PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

Perusahaan membuka kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan pengaduan terkait pelanggaran pencemaran lingkungan dari kegiatan operasi yang

c. *Reuse*

Reuse efforts were made by reusing ink cans that had been used to place base ink in the production process for Banknotes and Valuable Paper Non Currency Product. In addition, reuse efforts are also carried out by using pallets which can still be used for reuse as a container for transporting waste and reusing used drums from coins as a container for neutralizing ink.

10. Consideration of Environmental Aspects related to Cooperation with Partner/Vendor/Supplier Partners

In conducting business activities, the Company often carries out the process of collaborating with several partners such as suppliers, vendors or suppliers, which in each process, the Company always considers the quality of the materials its partners will use. The company always analyzes every material that will be used by partners to minimize the impact that may be caused to the environment.

QUANTITATIVE IMPACT OF ENVIRONMENTAL SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES

The Company commitment in sustainable environment management manifested in paper, electricity, fuel usage efficiency, or other environment management that impacted to the Company operational cost efficiency.

INCREASING EMPLOYEE AWARENESS REGARDING THE ENVIRONMENT

Recognizing that waste management is quite a challenge for the company and considering that the issue of environmental pollution is a concern both internally and society, especially those around the Company area. Peruri continues to strive to increase employee awareness and competence in environmental management through several activities held in 2019, such as:

1. Installment of signage regarding on environmental hygiene;
2. Sorting of organic and non organic waste.

MECHANISMS AND INFORMATION ON COMPLAINTS ON ENVIRONMENTAL PROBLEMS

The company opens opportunities for all parties to complaints regarding violations of environmental pollution from the Company's operations.

dilakukan Perusahaan. Saluran pengaduan tersebut dilayangkan melalui telepon, surat, *email*, atau situs web resmi Perusahaan, sebagaimana terlampir di bawah ini.

The complaint channels are posted by telephone, letter, email, or the Company's official website, as attached below.

Kantor Pusat Peruri	Peruri Head Office
Jl. Palatehan Nomor 4, Blok K-V Kebayoran Baru, Jakarta, 12160, Indonesia. Telepon: +62 21 7395000 Faksimili: +62 21 7221567 Email: contact@peruri.co.id Situs Web: www.peruri.co.id	Jl. Palatehan Number 4, Blok K-V Kebayoran Baru, Jakarta, 12160, Indonesia. Phone: +62 21 7395000 Facsimile: +62 21 7221567 Email: contact@peruri.co.id Website: www.peruri.co.id

Hingga akhir 2019, Perusahaan tidak mendapati adanya pengaduan terkait masalah lingkungan yang berdampak cukup signifikan dan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.

Until the end of 2019, the Company did not find any complaints related to environmental problems that had a significant impact nor affecting the Company's business continuity.

SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN

Peruri telah memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan Internasional ISO 14001:2004 sejak 6 Maret 2013 dan sampai dengan 2016 Peruri telah berhasil mempertahankan sertifikat tersebut. Dengan mengimplementasikan standar ISO 14001:2004 membuktikan bahwa Peruri telah memiliki kebijakan, program, tujuan dan sasaran yang sesuai terhadap implementasi Sistem Manajemen Lingkungan termasuk di dalamnya upaya pemenuhan kepatuhan perundangan, pengendalian dampak lingkungan dan kegiatan audit internal sebagai upaya perbaikan berkelanjutan yang dievaluasi secara berkala dalam tinjauan manajemen. Peruri mengajukan update untuk ISO 14001:2004 menjadi ISO 14001:2015 pada 2018 bersamaan dengan audit eksternal pada Semester II 2018. Pada 2019 Peruri melakukan resertifikasi ISO 14001:2015 dari badan sertifikasi PT. SGS Indonesia untuk memperpanjang kepemilikan sertifikat tersebut hingga 6 Maret 2022.

ENVIRONMENTAL CERTIFICATION AND AWARDS

Peruri has obtained the ISO 14001: 2004 International Environmental Management System certificate since 6 March 2013 and up to 2016 Peruri has successfully maintained the certificate. Implementing the ISO 14001: 2004 standard proves that Peruri has policies, programs, objectives and targets that are appropriate for the implementation of the Environmental Management System, including efforts to comply with legislation, control environmental impacts and internal audit activities as continuous improvement efforts that are evaluated periodically in management review. Peruri submitted an update for ISO 14001: 2004 to ISO 14001: 2015 in 2018 along with an external audit in Semester II of 2018. In 2019 Peruri conducted a recertification of ISO 14001: 2015 from the certification body PT. SGS Indonesia to extend ownership of the certificate until March 6, 2022.

Selain itu, Peruri juga berhasil memperoleh penghargaan Properda dari Provinsi Jawa Barat dengan Predikat Biru (terbaik untuk kelas Properda) pada 26 Desember 2018. Audit untuk Properda tersebut akan rutin dilaksanakan setiap tahun pada Oktober-November oleh Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Untuk saat ini Peruri akan berusaha mengajukan Sertifikasi Proper dari Properda menjadi Propernas pada tahun 2021 yang terdiri dari 2 penilaian Hijau dan Emas.

In addition, Peruri also won the Properda award from West Java Province with the Blue Award (best for the Properda class) on December 26, 2018. The Properda audit will be routinely carried out every year in October-November by the Ministry of Environment of West Java Province. For the time being, Peruri will try to apply for a Proper Certification from Properda to Propernas in 2021, which consists of 2 Green and Gold assessments.

Sertifikasi Bidang Lingkungan yang Masih Berlaku di 2019

Environmental Sector Certification Still Valid in 2019

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Certification Issuance Date	Jenis Sertifikat Type of Certification	Dikeluarkan Oleh Issued By	Masa Berlaku Hingga Valid Until
6 Maret 2019 March 6, 2019	ISO 14001:2015	PT SGS Indonesia	6 Maret 2022 March 6, 2022

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SCOPE OF LABOR, SAFETY AND OCCUPATIONAL HEALTH

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Hubungan industrial yang baik antara Perusahaan dengan seluruh karyawan merupakan kunci dalam menunjang pencapaian berbagai target Perusahaan. Implementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan terkait praktik ketenagakerjaan adalah tanggung jawab Perusahaan terhadap karyawan sebagai pemangku kepentingan internal. Implementasi ini meliputi praktik terbaik atas pengelolaan ketenagakerjaan, keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi, serta persamaan hak dan kesempatan kerja.

Untuk memastikan praktik ketenagakerjaan tersebut, Perusahaan menerapkan berbagai kebijakan. Di antaranya melakukan berbagai pemenuhan atas hak karyawan, melakukan pengembangan talenta, mengupayakan remunerasi yang kompetitif, memberikan apresiasi serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Selain praktik ketenagakerjaan, Perusahaan juga mengupayakan praktik mitigasi keselamatan dan kesehatan kerja terbaik untuk para karyawan. Komitmen ini meliputi mitigasi maupun minimalisasi atas risiko kecelakaan, penyakit ataupun absensi kerja yang dapat terjadi pada karyawan. Di samping itu, Perusahaan juga menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari budaya kerja yang diharapkan mampu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh Insan Perusahaan.

Sebagai perusahaan yang mencetak uang kertas dan uang logam dan dokumen sekuriti lainnya tentu ada risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dihadapi karyawan, masyarakat, para pemangku kepentingan dan lingkungan. Demi meminimalkan risiko ini, Peruri berkomitmen untuk mematuhi perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dituangkan dalam Kebijakan Sistem Manajemen Peruri.

COMMITMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Good industrial relations between the Company and all employees are key in supporting the achievement of the Company's various targets. The implementation of corporate social responsibility policies related to employment practices is the responsibility of the Company to employees as internal stakeholders. This implementation includes best practices on labor management, a balance between work and personal life, and equal rights and employment opportunities.

To ensure such employment practices, the Company implements various policies. Among other, fulfillment of employees' rights, develop talent, seek competitive remuneration, provide appreciation and create a conducive work environment.

Apart from employment practices, the Company also strives for the best safety and health mitigation practices for employees. This commitment includes mitigation and minimization of the risk of accidents, illness or work absences that can occur to employees. In addition, the Company also applies occupational safety and health standards as part of a work culture which is expected to be able to create a conducive working environment for all Company personnel.

As a company that prints banknotes and coins and other security documents, of course there are occupational safety and health (OSH) risks faced by employees, the community, stakeholders and the environment. In order to minimize this risk, Peruri is committed to complying with laws and other requirements related to occupational safety and health as well as preventing occupational accidents and diseases as outlined in the Peruri Management System Policy.

Kebijakan ini ditanda tangani oleh Direktur Utama pada 1 April 2019, kemudian disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan di lingkungan perusahaan. Peruri juga berusaha untuk selalu meningkatkan kesadaran serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi karyawan dan pihak terkait guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, selamat dan sehat.

Peruri memiliki departemen pengamanan elektronik dan K3 yang bertanggung jawab untuk memastikan penerapan terhadap kepatuhan peraturan Perundang-undangan K3 serta disiplin sistem manajemen K3. Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P23K) yang diketuai oleh Direktur Operasi dengan beranggotakan seluruh kepada divisi memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan K3 perusahaan.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Peruri adalah perusahaan yang bertanggungjawab atas kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja para pegawai. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan bagi para pegawai serta menyediakan peralatan dan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Lingkup kegiatan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja terdiri daripada program ketenagakerjaan yang meliputi kesetaraan *gender*, kesempatan kerja yang sama, kesetaraan dalam program pengembangan kompetensi, pemenuhan hak kesejahteraan karyawan, remunerasi, pembentukan lingkungan kerja yang kondusif, rekrutmen dan *turnover* karyawan, apresiasi terhadap karyawan, kebebasan berserikat, perjanjian kerja bersama dan program pensiun.

Selanjutnya, program pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi program sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, memperkuat sarana keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi dan pelatihan K3, program jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja bagi karyawan. Perusahaan juga telah mengatur pengelolaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja para pegawai dalam beberapa kebijakan dengan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

This policy was signed by the President Director on April 1, 2019, then socialized to all employees and stakeholders in the company. Peruri also strives to always raise awareness and provide supporting facilities and infrastructure for employees and related parties in order to create a safe, secure and healthy work environment.

Peruri has an electronic security and OHS department which is responsible for ensuring the implementation of OHS statutory compliance and OHS management system discipline. The Committee for Occupational Safety and Health (P23K) chaired by the Operating Director with members of all divisions has the task of evaluating and monitoring the implementation of company OHS.

SCOPE AND FORMULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY FOR THE ASPECTS OF EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Peruri is a company that is responsible for the welfare, safety and health of employees. The company is committed to providing welfare for employees and providing equipment and a safe and healthy work environment. The scope of social responsibility activities related to employment, occupational safety and health consists of employment programs which include gender equality, equal employment opportunities, equality in competency development programs, fulfillment of employee welfare rights, remuneration, establishment of a conducive work environment, recruitment and employee turnover, appreciation for employees, freedom of association, collective work agreements, and pension programs.

Furthermore, the occupational safety and health management program includes a work safety and health certification program for employees, strengthening occupational safety and health facilities, OHS socialization and training, work accident insurance programs, as well as health insurance and work accident insurance for employees. The company has also regulated the management of the safety and health aspects of employees in several policies by referring to the policies and regulations in force.

Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap K3 meliputi pelaksanaan program mitigasi risiko K3, penyediaan sarana dan prasarana K3 yang sesuai dengan standar, peningkatan pengetahuan, kemampuan dan kesadaran karyawan melalui sosialisasi maupun pelatihan, evaluasi kepatuhan regulasi terkait K3, pengendalian operasional K3 di lingkungan kerja seperti *safety patrol*, *pest control*, pengukuran lingkungan kerja, sertifikasi peralatan kerja, evaluasi *catering* dan pelaksanaan rutin simulasi tanggap darurat berdasarkan risiko area kerja.

Perusahaan juga secara konsisten menerapkan standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Internasional dan berhasil mempertahankan sertifikat OHSAS 18001:2007, sejak 2013, dari badan sertifikasi PT SGS Indonesia. Tahun ini, perusahaan juga telah melakukan peningkatan kompetensi kepada para karyawan sebagai upaya untuk mempersiapkan *upgrade* sertifikasi OHSAS 18001:2007, menjadi ISO 45001:2018, yang direncanakan dilakukan pada 2020.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Aspek Ketenagakerjaan

1. Kesetaraan *Gender* dan Kesempatan Kerja yang Sama, serta Pemberian Izin Cuti
Perusahaan senantiasa memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam hal kesempatan bekerja tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, *gender*, ataupun kondisi fisik lainnya. Demikian juga dalam sistem rekrutmen, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun untuk dapat diterima menjadi karyawan Perusahaan, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun *gender*.
Kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja yang sama, juga berlaku dalam program pengembangan karir, di mana sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlaku di internal Perusahaan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga memberikan izin cuti bagi karyawan perempuan yang sedang hamil dan akan melahirkan. Sementara untuk karyawan laki-laki yang istrinya tengah melahirkan, mendapatkan izin tidak bekerja tanpa dipotong cuti.

In general, corporate social responsibility for OHS includes implementing OHS risk mitigation programs, providing OHS facilities and infrastructure in accordance with standards, increasing employee knowledge, skills and awareness through socialization and training, evaluating OHS related regulatory compliance, OHS operational control in the work environment. such as safety patrol, pest control, work environment measurement, work equipment certification, catering evaluation and routine implementation of emergency response simulations based on work area risks.

The company also consistently applies the standards of the International Health and Safety Management System and has successfully maintained the OHSAS 18001: 2007 certificate, since 2013, from the certification body PT SGS Indonesia. This year, the company has also improved the competence of employees in an effort to prepare for the upgrade of the OHSAS 18001: 2007 certification to ISO 45001: 2018, which is planned to be carried out in 2020.

PROGRAMS AND ACTIVITIES RELATED TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Manpower Aspects

1. Gender Equality and Equal Opportunity to Work, and Granting Leave Permits
The company always provides equal rights and opportunities in terms of work opportunities regardless of differences in religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions. Likewise in the recruitment system, the Company provides equal opportunities for anyone to be accepted as Company employees, regardless of ethnicity, religion, race or gender differences.

Gender equality and equal employment opportunities also apply in career development programs, where the Human Resources (HR) development system that applies within the Company provides equal opportunities for every employee to be promoted to a higher position in accordance with applicable regulations. within the Company.

In addition, the Company also provides leave permission for female employees who are pregnant and are about to give birth. Meanwhile, for male employee whose wife is giving birth, get leave permission without cut his leave allowance.

2. **Persamaan Hak dalam Pengembangan Kompetensi dan Karir**
 Perusahaan senantiasa menyelenggarakan beberapa program pengembangan kompetensi bagi karyawan secara berkala setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan usaha Perusahaan. Disamping itu, Perusahaan juga menjamin bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program pendidikan dan pelatihan yang di buka sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan organisasi. Perusahaan merealisasikan program pengembangan kompetensi dengan kesempatan yang terbuka bagi seluruh karyawan. Seperti yang telah di ulas pada bagian Sumber Daya Manusia dalam bab Profil serta bab Fungsi Penunjang Bisnis di laporan tahunan ini. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan, baik sebagai aset Perusahaan maupun sebagai masyarakat.
 Di sepanjang 2019, Perusahaan menginvestasikan pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp2,38 miliar, meningkat dibandingkan 2018 yang sebesar Rp1,80 miliar. Pengembangan kompetensi yang dilakukan Perusahaan ini disesuaikan dengan kebutuhan, yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap kinerja Perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan tanggung jawab terhadap para pemegang saham dalam rangka memperkuat keberlanjutan usaha Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga memberikan hak yang sama bagi semua pegawai dalam hal pengembangan karir baik promosi, maupun rotasi. Program ini dilakukan untuk membentuk para pemimpin masa depan Perusahaan. Program ini dikembangkan untuk menempatkan karyawan pada beberapa *level* tertentu yang disesuaikan dengan kompetensi dan skill yang dimiliki sehingga proses regenerasi karyawan dari *level* terendah pada organisasi Perusahaan dapat berjalan dengan baik.
2. **Equal Rights in Competency and Career Development**
 The Company always organizes several competency development programs for employees every year to support the Company's business activities. In addition, the Company also ensures that every employee has the same opportunity to participate in any education and training programs that are open according to the needs and organizational development plans.
 The company realizes a competency development program with opportunities that are open to all employees. As discussed in the Human Resources section in the Profile chapter and the Business Support Functions chapter in this annual report. The company is committed to improving the competence and capabilities of employees, both as Company assets and community.
 Throughout 2019, the Company invested in employee competency development by Rp2.38 billion increasing compared to 2018 which amounted to Rp1.80 billion. Competency development carried out by the Company is tailored to the needs, which are expected to have a positive impact on performance. The company as a form of responsibility for the implementation of responsibility towards shareholders in order to strengthen the sustainability of the Company's business.
 In addition, the Company also provides equal rights to all employees in terms of career development, both promotion and rotation. This program is carried out to shape the future leaders of the Company. This program was developed to place employees at certain levels according to their competencies and skills so that the employee regeneration process from the lowest level in the Company's organization can run well.
3. **Pemenuhan Hak Kesejahteraan Karyawan**
 Kesejahteraan insan Perusahaan juga tidak luput dari perhatian. Standar gaji telah ditetapkan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku, termasuk pemberian tunjangan kepada karyawan. Kesejahteraan seluruh karyawan senantiasa menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Perusahaan, agar selalu terjalin sinergi antar karyawan dengan Perusahaan demi terciptanya produktivitas kerja dan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, Perusahaan terus berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan
3. **Fulfillment of Employee Welfare Rights**
 The welfare of the Company's personnel also does not go unnoticed. Salary standards have been set in accordance with the applicable Regency/City Minimum Wage, including the provision of allowances to employees. The welfare of all employees is always a matter of great concern to the Company, in order to create synergy between employees and the Company in order to create optimal work productivity and performance. Therefore, the Company continues to be committed to improving employee welfare

guna meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas karyawan terhadap Perusahaan. Hal ini mendorong Perusahaan untuk senantiasa memberikan kompensasi yang layak dan adil sebagai imbal jasa terhadap hasil kinerja karyawan.

4. Tingkat *Turnover* Karyawan

Rasio *employee turnover* dapat menunjukkan produktivitas dan loyalitas SDM. Selain itu, tingkat *turnover* karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perusahaan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Tahun Year	Tingkat Rekrutmen Recruitment Level		Tingkat Perputaran Pegawai Employee Turnover Rate		Tingkat Perputaran (%) Turnover Rate (%)
	Organik Organic	Kontrak Contract	Organik Organic	Kontrak Contract	Organik Organic
2017	-	352	130	204	6,61%
2018	77	633	80	802	4,20%
2019	57	706	140	552	7,53%

5. Hubungan Industrial

Perusahaan berkomitmen untuk mendukung hubungan industrial antara karyawan dan Perusahaan melalui kebebasan karyawan untuk berserikat. Hubungan industrial karyawan dan Perusahaan telah memenuhi standar dan perundangan-undangan yang berlaku; di samping tentunya memaksimalkan peran karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan Perusahaan. Manajemen Perusahaan secara aktif melakukan komunikasi dalam rangka menyampaikan informasi-informasi terkini sesuai dengan azas keterbukaan informasi dengan Serikat Pekerja secara berkala. Dengan kegiatan ini maka hubungan harmonis antara Manajemen dengan karyawan dapat terus terjaga dengan baik.

Bentuk lain dari harmonisnya hubungan antara Manajemen dan karyawan adalah dengan disepakatinya keseimbangan antara hak dan kewajiban Manajemen dan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang secara berkala dievaluasi.

Hingga akhir 2019, tercatat tidak ada kasus atau perkara yang melibatkan antara Perusahaan dengan karyawan, hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan berhasil melakukan pengelolaan hubungan industrial antara karyawan dan Perusahaan.

in order to increase performance motivation and employee loyalty to the Company. This encourages the Company to continue to provide appropriate and fair compensation in return for employee performance results.

4. Employee Turnover Rate

Employee turnover ratios can show the productivity and loyalty of HR. In addition, the employee turnover rate is also a reflection of the Company's culture and work system which can be an indicator of the Company's success in creating a conducive work environment.

5. Industrial relations

The company is committed to supporting industrial relations between employees and the Company through employees' freedom of association. Employee and Company industrial relations have met the applicable standards and laws; in addition, of course, maximizing the role of employees as one of the Company's stakeholders. The Company's management actively communicates in order to provide the latest information in accordance with the principle of information disclosure with the Workers Union on a regular basis. With this activity, the harmonious relationship between management and employees can be maintained properly.

Another form of harmonious relationship between management and employees is the agreement on a balance between the rights and obligations of management and employees in the form of a Collective Labor Agreement (PKB) which is regularly evaluated.

Until the end of 2019, there were no recorded cases or cases involving the Company and employees, this shows that the Company has succeeded in managing industrial relations between employees and the Company.

6. Survei Kepuasan Karyawan

Survei kepuasan karyawan merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan selama bekerja di Peruri. Perusahaan menyadari bahwa tingkat kepuasan yang tinggi akan menunjukkan loyalitas dan tingkat produktivitas kinerja yang optimal.

Employee Engagement Survey terhadap karyawan merupakan cara yang dilakukan untuk mengukur tingkat keterikatan karyawan terhadap Perusahaan. Tingkat keterikatan karyawan tercermin dari semangat, dedikasi dan rasa kebersamaan pada seluruh karyawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan Perusahaan. Tingkat keterikatan karyawan ini juga menggambarkan bagaimana kesiapan Perusahaan akan menjadi *High Performing Organization* dan siap berkompetisi baik pada industri keuangan nasional maupun regional.

6. Employee Satisfaction Survey

The employee satisfaction survey is a parameter to measure the level of employee satisfaction while working at Peruri. The company realizes that a high level of satisfaction will indicate optimal loyalty and productivity.

Employee Engagement Survey of employees is a way to measure the level of employee engagement with the Company. The level of employee engagement is reflected in the enthusiasm, dedication and sense of togetherness of all employees for the achievement of the Company's goals and success. The level of employee engagement also illustrates how the Company is ready to become a High Performing Organization, and is ready to compete in both the national and regional financial industries.

Indeks Kepuasan Satisfaction Index

Status	2017	2018	2019
Indeks Index	78,2%	76,8%	80,5%

Skor Kepuasan Satisfaction Score

Status	2018	2019
Skor Score	6,71	6,95

Indeks Kepuasan karyawan adalah proporsi karyawan yang *satisfied* dan *very satisfied*. Indeks kepuasan 2019 sebesar 80,5% masuk dalam kategori *high* dan mengalami kenaikan dari tahun lalu sebesar 3,7%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum karyawan puas dengan pekerjaan di lingkungan kerjanya, utamanya pada indikator *Reputation*, *Diversity* dan *Colleague*. Selain itu dua aspek yang dianggap masih perlu ditingkatkan yaitu *Career opportunity* dan *Learning development* hal ini menunjukkan bahwa karyawan Peruri memiliki antusiasme untuk meningkatkan *skill* untuk menunjang produktivitas Perusahaan.

Sementara, skor kepuasan adalah rata-rata (*mean*) dari masing-masing item/indikator yang diukur dalam penilaian kepuasan karyawan dan menjadi nilai paling mendekati untuk menggambarkan kepuasan karyawan. Pada 2019, skor kepuasan karyawan sebesar 6,95 dengan skala 1 – 10 dalam level kepuasan *satisfied* yang artinya karyawan puas dengan pekerjaan di lingkungan kerjanya.

The employee satisfaction index is the proportion of employees who are satisfied and very satisfied. The 2019 satisfaction index of 80.5% is in the high category and has increased from last year's 3.7%. This shows that in general employees are satisfied with their work in their work environment, especially in the indicators of Reputation, Diversity, and Colleague. In addition, two aspects that are considered still need to be improved, namely career opportunity and learning development, this shows that Peruri employees have enthusiasm to improve skills to support company productivity.

Meanwhile, the satisfaction score is the average (*mean*) of each item/indicator measured in the employee satisfaction assessment and is the closest value to describe employee satisfaction. In 2019, the employee satisfaction score was 6.95 on a scale of 1-10 in the satisfaction level, which means that employees are satisfied with their work in their work environment.

Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Pemantauan atau Pengawasan K3

Pemantauan dan pengawasan terkait implementasi K3 di lingkup Perusahaan dilakukan melalui beberapa program atau metode sebagai berikut:

 - a. Pelaksanaan *Safety Patrol*

Program *safety patrol* merupakan salah satu cara untuk memantau implementasi K3 di masing-masing unit kerja. Tim unit K3 melaksanakan *safety patrol* minimal sebulan sekali ke area produksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; Hasil *safety patrol* akan dilaporkan kepada unit kerja terkait dan manajemen untuk selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian;
 - b. Pengukuran Kebisingan dan Pencahayaan Lingkungan Kerja

Salah satu metode untuk memantau kondisi K3 lingkungan kerja agar selalu aman dan tidak menyebabkan penyakit akibat kerja (PAK) ialah dengan melakukan pengukuran Indeks Suhu Bola Basah (ISBB) di lingkungan kerja, analisa udara ambient, kebisingan dan pencahayaan area kerja; Program K3 ini dilakukan setahun sekali, khususnya di area produksi; Unit K3 bekerjasama dengan PT Sucofindo melakukan pengukuran tersebut; dalam pengukuran analisa udara ambient, faktor-faktor yang diukur antara lain kadar debu total, hidrokarbon dan tingkat kebauan (amonia, gas hidrogen sulfida); Hasil pengukuran dan rekomendasi akan ditindaklanjuti sebagai program K3 perusahaan;
 - c. Sertifikasi Alat

Unit K3 bekerja sama dengan perusahaan jasa K3 (PJK3) untuk melakukan sertifikasi peralatan operasional penunjang produksi; Sertifikasi ini dilakukan setahun sekali yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelayakan alat operasional yang digunakan agar tidak mengancam keselamatan operator dan pekerja di sekitarnya; Pada saat proses sertifikasi alat berlangsung, tim unit K3 berkoordinasi pula dengan tim unit pemeliharaan mesin dan tim dari area kerja yang bersangkutan; Alat operasional yang disertifikasi tersebut antara lain:

 - Forklift;
 - Hoist/Crane;
 - Bejana tekan;
 - Instalasi penyalur petir;
 - Instalasi listrik;
 - Genset;
 - Lift.

Occupational Safety and Health Aspects

1. OHS monitoring or supervision

Monitoring and supervision related to the implementation of OHS within the Company is carried out through several programs or methods as follows:

 - a. Implementation of Safety Patrol

The safety patrol program is one way to monitor OHS implementation in each work unit; The OHS unit team carries out safety patrols at least once a month to the production area according to a predetermined schedule; The results of the safety patrol will be reported to the relevant work unit and management for further corrective action if there are discrepancies;
 - b. Measurement of Work Environment Noise and Lighting

One of the methods to monitor the OHS condition of the work environment so that it is always safe and does not cause occupational disease (PAK) is to measure the Wetball Temperature Index (ISBB) in the work environment, analyze ambient air, noise and work area lighting; This OHS program is conducted once a year, especially in production areas; The OHS Unit in collaboration with PT Sucofindo carried out these measurements; In the measurement of ambient air analysis, the factors measured include total dust, hydrocarbons, and odor levels (ammonia, hydrogen sulfide gas); The measurement results and recommendations will be followed up as a company's OHS program;
 - c. Tool Certification

The OHS Unit collaborates with an OHS service company (PJK3) to certify production supporting operational equipment; This certification is carried out once a year which aims to ensure the safety and appropriateness of operational equipment used so as not to threaten the safety of operators and workers around them; During the equipment certification process, the OHS unit team coordinates with the machine maintenance unit team and the team from the work area concerned; The operational tools that are certified include:

 - Forklifts;
 - Hoist/Crane;
 - Pressure vessel;
 - Installation of lightning rods;
 - Electrical installation;
 - Diesel generator
 - Elevator.

2. Struktur P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
Berdasarkan PERMENAKER RI Nomor: PER/04/MEN/1987, tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja, setiap tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih wajib membentuk P2K3; Peruri memiliki struktur organisasi P2K3 yang telah disahkan berdasarkan surat keputusan Nomor: SKEP-445/VIII/2019, tentang Pembaharuan Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P3K3) Peruri;
Berikut adalah Susunan Tim P2K3 Inti di Peruri:
- a. Penanggung jawab: Direktur Utama
 - b. Ketua: Direktur Operasi
 - c. Sekretaris:
 - Kepala Departemen Pengamanan;
 - Kepala Seksi K3 dan Damkar;
 - d. Anggota:
 - Kepala Departemen Pengamanan Elektronik dan K3;
 - Kepala Unit K3;
 - Koordinator Biro Kebijakan Perusahaan;
 - Kepala Departemen Cetak Uang Kertas;
 - SBU Uang RI;
 - Seksi Cetak dalam;
 - Seksi Penyelesaian LKU Partial dan HCTS ;
 - Seksi Pembuatan Pelat dan Rol;
 - Seksi Khazanah Produksi Uang Logam;
 - Seksi Cetak dan Sortir Uang Logam;
 - Departemen Khazanah dan Verifikasi Kertas Berharga Non Uang;
 - Seksi Cetak Materai, Produk Umum dan Produk Digital;
 - Seksi Cetak Pita Cukai;
 - Seksi Rekayasa Teknik;
 - Seksi Fisik Investasi Mesin dan Kalibrasi;
 - Seksi Pemeliharaan Bangunan dan Penataan Lingkungan;
 - Seksi Tata Kelola Utilitas Pabrik dan Limbah Produksi;
 - Seksi Utilitas;
 - Seksi Hubungan Karyawan;
 - Departemen Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
 - Seksi Human Resources Business Partner;
 - Seksi Pengamanan Fisik, Personil dan Material;
 - Ketua Umum SPPB;
 - Ketua Umum SP3;
 - Ketua Umum BEMPER;
2. P2K3 Structure (Occupational Safety and Health Committee)
Based on the Minister of Labor Republic of Indonesia Regulation, Number: PER/04/MEN/1987, concerning the Committee for Occupational Safety and Health and the procedures for the appointment of occupational safety experts, every workplace where an entrepreneur or management employs 100 people or more is required to form a P2K3; Peruri has a P2K3 organizational structure that has been ratified based on a decree Number: SKEP-445/VIII/2019, concerning the Renewal of Peruri's Committee for Occupational Safety and Health (P3K3);
The following is the composition of the Core P2K3 Team in Peruri:
- a. Person in charge: President Director
 - b. Chairman: Director of Operations
 - c. Secretary: -
 - Head of the Department of Security
 - Head of Section K3 and Damkar
 - d. Members:
 - Head of Department of Electronic Security and K3
 - Head of K3 Unit
 - Coordinator of the Corporate Policy Bureau
 - Head of Banknote Printing Department
 - SBU Money Republic of Indonesia
 - Inner Print Section
 - Partial LKU and HCTS Settlement Section
 - Plates and Rollers Manufacturing Section
 - Coin Production Treasury Section
 - Printing and Sorting Section of Coins
 - Department of Khazanah and Verification of Non-currency Securities
 - Stamp Printing Section, General Products and Digital Products
 - Customs Tape Printing Section
 - Engineering Section
 - Physical Section of Machinery Investment and Calibration
 - Building Maintenance and Environmental Arrangement Section
 - Factory Utilities Governance and Production Waste Section
 - Utilities Section
 - Employee Relations Section
 - Department of Planning, Implementation and Evaluation of Education and Training
 - Human Resources Business Partner Section
 - Physical, Personnel and Material Security Section
 - Chairman of SPPB;
 - Chairman of SP3;
 - Chairman of BEMPER;

3. Pemenuhan Peraturan Perundangan Terkait K3 Departemen Pengamanan Elektronik (Pamlek) dan K3, Divisi Risk Management serta unit kerja terkait, bekerjasama melakukan identifikasi dan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan setingkat undang-undang sampai dengan peraturan daerah serta persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3.

Hingga 2019, Peruri telah memiliki personil yang tersertifikasi Ahli K3 Umum sebanyak 19 orang, 6 personil. Merupakan karyawan yang bertugas di Seksi K3 dan pemadam kebakaran dan lainnya merupakan perwakilan dari unit-unit kerja yang memiliki risiko kerja yang cukup tinggi berdasarkan hasil penilaian risiko K3 perusahaan.

Selanjutnya karyawan akan diberikan pelatihan guna menunjang aktivitas kerja dan fungsi dan tanggung jawab unit K3 seperti pelatihan sistem manajemen K3, pelatihan ahli K3 lingkungan kerja, serta pelatihan *food safety*. Pada bulan K3, Peruri melakukan beberapa kegiatan seperti:

- a. Pelatihan Ahli K3 Lingkungan kerja yang tersertifikasi Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP yang dilaksanakan pada 27 Oktober – 3 November 2019, dengan jumlah peserta sebanyak 3 orang;
- b. Pelatihan Ahli K3 Konstruksi yang tersertifikasi Kementerian Ketenagakerjaan yang dilaksanakan 17– 23 November 2019, dengan jumlah peserta sebanyak 3 orang;
- c. Workshop pembinaan tim P2K3 tanggal 19 – 20 Desember 2019;
- d. Lomba cerdas cermat yang dilaksanakan pada 21 Februari 2019, dengan jumlah peserta sebanyak 38 tim yang masing-masing tim nya terdiri dari 3 orang;
- e. Lomba pemadaman api yang dilaksanakan pada 28 Februari 2019, dengan jumlah peserta sebanyak 23 tim yang masing-masing tim nya terdiri dari 5 orang;
- f. Seminar K3 yang dilaksanakan pada 28 Maret 2019;
- g. Lomba senam 21 Maret 2019, dengan jumlah peserta sebanyak 11 regu yang masing-masing regu nya terdiri dari 5 orang.

Sepanjang 2019, Peruri menindaklanjuti dan memperbaiki hasil *gap analysis* yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya guna mempersiapkan sertifikasi sistem manajemen K3, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

3. Fulfillment of Laws Related to OHS The Department of Electronic Security (Pamlek) and OHS, the Risk Management Division and related work units, collaborate to identify and evaluate compliance with laws and regulations at the level of laws up to regional regulations and other requirements related to OHS.

Until 2019, Peruri has 19 personnel who are certified as General OHS Experts, 6 personnel. Are employees who serve in the OHS Section and fire fighters and others are representatives of work units that have a high enough work risk based on the results of the company's OHS risk assessment

Furthermore, employees will be given training to support work activities and the functions and responsibilities of the OHS unit, such as training in the OHS management system, training for occupational safety and health experts, and food safety training. In the month of OHS , Peruri carries out several activities such as:

- a. OSH Expert Training for the work environment certified by the Ministry of Manpower and BNSP which was held on 27 October - 3 November 2019, with 3 participants,
- b. Training for OHS Construction Experts certified by the Ministry of Manpower which was held on November 17-23 2019, with 3 participants;
- c. P2K3 team coaching workshop on 19-20 December 2019;
- d. Quiz competition which was held on February 21, 2019, with 38 teams of participants, each team consisting of 3 people;
- e. Fire fighting competition which was held on February 28, 2019, with 23 teams of participants, each team consisting of 5 people;
- f. K3 Seminar which was held on March 28, 2019;
- g. Gymnastic competition on March 21, 2019, with 11 teams of participants, each team consisting of 5 people.

Throughout 2019, Peruri followed up and corrected the results of the gap analysis carried out in the previous year in order to prepare OHS management system certification, in accordance with Government Regulation Number 50 of 2012.

4. Peningkatan Kompetensi Karyawan Terkait K3

Demi terlaksananya program K3 yang tepat dan efisien diperlukan peningkatan kompetensi terkait K3 tidak hanya khusus untuk personil yang berada di unit K3 tetapi juga bagi seluruh karyawan. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap tahun perusahaan berupaya melakukan pemenuhan kompetensi K3 untuk karyawan.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, pada 2019 Perusahaan telah melaksanakan program sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 5 (lima) orang karyawan, sebagaimana yang terlampir di bawah ini.

No	Nama Name	Nama Sertifikat Certification	Pemberi Sertifikat Issuer	Tanggal Sertifikat Certification Date
1	Tukini	Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3K) Di tempat Kerja First Aid Officer in work place	Kementrian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labor Republic of Indonesia	Juni 2018 June 2018
		Ahli Higiene Industri Muda (HIMU)	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Agency for Profession Certification	Desember 2018 December 2018
		Ahli K3 Umum (AK3U)	Kementrian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labor Republic of Indonesia	
2	Atsni Kautsar Rahmawani	Ahli Muda K3 Konstruksi	Kementrian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labor Republic of Indonesia	Desember 2019 December 2019
		Ahli K3 Umum (AK3U)	Kementrian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labor Republic of Indonesia	Juni 2016 June 2016
		Ahli Higiene Industri Muda (HIMU)	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Agency for Profession Certification	Desember 2018 December 2018
3	Dewi Afriyanti	Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Muda bidang Lingkungan Kerja	Kementrian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labor Republic of Indonesia	Desember 2019 December 2019
		Ahli Muda K3 Konstruksi	Kementrian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labor Republic of Indonesia	Desember 2019 December 2019
		Ahli K3 Umum (AK3U)	Kementrian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labor Republic of Indonesia	Juni 2016 June 2016
		Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (P3K) Di tempat Kerja	Kementrian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labor Republic of Indonesia	Juni 2018 June 2018
4	Berry Suprima A K	Ahli K3 Umum (AK3U)	Kementrian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labor Republic of Indonesia	
		Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Muda bidang Lingkungan Kerja	Kementrian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labor Republic of Indonesia	Desember 2019 December 2019
5	Jupentinus Simanullang	Ahli Higiene Industri Muda (HIMU)	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Agency for Profession Certification	Desember 2018 December 2018
		Ahli Muda K3 Konstruksi	Kementrian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labor Republic of Indonesia	Desember 2019 December 2019
		Ahli K3 Umum (AK3U)	Kementrian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labor Republic of Indonesia	Maret 2018 March 2018

5. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peruri telah memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001:2007, sejak 20 Maret 2013. Implementasikan standar OHSAS 18001:2007, membuktikan Peruri telah memiliki kebijakan, program, tujuan dan sasaran yang sesuai terhadap

4. Occupational Health and Safety Employee Competency Improvement

In order to implement a proper and efficient OHS program, it is necessary to increase the competence related to OHS, not only specifically for personnel in the OHS unit, but also for all employees. In this regard, every year the company makes efforts to fulfill OHS competencies for employees.

In order to increase concern for the safety and health of employees, in 2019, the Company has implemented an occupational safety and health certification program for 5 (five) employees, as attached below.

5. Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems

Peruri has obtained the OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety Management System certificate, since March 20, 2013. Implement the OHSAS 18001: 2007 standard, proving that Peruri has policies, programs, goals and objectives that are appropriate for the implementation of

implementasi sistem manajemen K3 termasuk didalamnya upaya pemenuhan kepatuhan perundangan, pengendalian risiko K3 dan kegiatan audit internal sebagai upaya perbaikan berkelanjutan yang dievaluasi secara berkala dalam tinjauan manajemen.

6. Sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perusahaan telah menyediakan sarana keselamatan dan kesehatan kerja, baik di lingkungan kantor pusat maupun area operasi bisnis Perusahaan, seperti pada apartemen, kawasan LRT City dan Hotel, yakni berupa peralatan P3K, sarana pemadam kebakaran dan klinik kesehatan. Seluruh sarana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut, selalu di kontrol kesiapannya dengan melakukan perawatan dan pengecekan secara berkala. Perusahaan senantiasa melakukan pemeliharaan sarana penanggulangan kecelakaan dan kebakaran sesuai potensi risiko kondisi darurat dan kesiagaan personil untuk melakukan penanggulangan serta penyediaan sarana K3 (rambu keselamatan, poster K3, APD, dll).

Selain itu, Perusahaan juga menjamin perlindungan atas kesehatan karyawan di lokasi operasi agar terbebas dari gangguan kesehatan serta dampak buruk yang diakibatkan oleh kegiatan proses kerja. Perusahaan senantiasa menjaga dan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sehat, di antaranya dengan melakukan pengukuran dampak suatu kegiatan proses kerja terhadap manusia serta lingkungan sekitar.

Peruri berkomitmen untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK), dengan menyediakan alat pelindung diri bagi setiap karyawan yang tertuang dalam Surat Keputusan No:SKEP-357/VII/2019 tentang Standar Alat Pelindung Diri (APD) Perum Percetakan Uang RI 2019, meliputi:

- a. Helm;
- b. Penutup muka (*face shield*);
- c. Kacamata;
- d. Google;
- e. *Earplug*;
- f. *Earmuff*;
- g. Masker debu;
- h. Masker kimia;
- i. SCBA (Self Contained Breathing Apparatus);
- j. Sarung tangan kulit;
- k. Sarung tangan tahan panas dan tahan api;
- l. Sarung tangan karet;
- m. Sarung tangan kaos;
- n. Sarung tangan elektrik;
- o. Sepatu *safety*;
- p. Sepatu boot;
- q. Baju tahan api;

the OHS management system including efforts to fulfill compliance legislation, OHS risk control and internal audit activities as continuous improvement efforts that are evaluated periodically in management reviews.

6. Work Safety and Health Facilities

The company has provided occupational safety and health facilities, both in the head office and in the Company's business operation areas, such as in apartments, LRT City areas and hotels, namely in the form of first aid kits, fire fighting facilities and health clinics. The readiness of all health and safety facilities is always controlled by conducting regular maintenance and checking. The company always maintains the facilities for handling accidents and fires according to the potential risk of emergency conditions and the alertness of personnel to carry out countermeasures and the provision of OHS facilities (safety signs, OHS posters, PPE, etc.).

In addition, the Company also guarantees protection for the health of employees at the operating site so that they are free from health problems and bad impacts caused by work process activities. The company always maintains and creates a healthy work environment, among others by measuring the impact of a work process activity on humans and the surrounding environment.

Peruri is committed to prevent occupational accident and disease through providing personal protective equipment (APD) for all employees as stipulated in the Decree No:SKEP-357/VII/2019 concerning Standard of Personal Protective Equipment (APD) Perum Percetakan Uang RI 2019, as follows:

- a. Helmet;
- b. Face shield;
- c. Glasses;
- d. Google;
- e. Earplug;
- f. Earmuff;
- g. Dust mask;
- h. Chemical masks;
- i. SCBA (Self Contained Breathing Apparatus);
- j. Leather gloves;
- k. Heat resistant and fire resistant gloves;
- l. Rubber gloves;
- m. T-shirt gloves;
- n. Electrical gloves;
- o. Safety shoes;
- p. Boots;
- q. Fire resistant clothes;

- r. Baju tahan panas;
- s. Apron;
- t. *Sweater*;
- u. *Back support*;
- v. *Supporter bike*;
- w. *Safety belt dan body harness*.

7. Evaluasi Katering

Demi menjamin keamanan dan kebersihan makanan katering yang dikonsumsi seluruh karyawan, unit K3 memiliki program evaluasi katering yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Evaluasi ini dilakukan di setiap katering yang menjadi rekanan Peruri. Tim unit K3 bersama dengan perwakilan dari departemen pengadaan melakukan kunjungan langsung ke tempat operasional masing-masing katering, kemudian melakukan observasi tempat, peralatan dan proses operasional katering sesuai dengan petunjuk persyaratan peraturan menteri kesehatan nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011, tentang hygiene sanitasi jasa boga.

Hasil dari evaluasi ini selanjutnya dilaporkan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang telah diberikan. Hasil laporan ini juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan atau memberhentikan sebagai rekanan katering.

Pada 2019, tim K3 melaksanakan evaluasi katering Semester I pada 22 Maret 2019 di Karawang dan 27 Maret 2019 di Jakarta, serta Semester II pada 26 September 2019 di Karawang dan 27 September 2019 di Jakarta.

8. Penyediaan Tanda dan Rambu K3

Setiap orang yang berada di area Peruri wajib memahami atau paling tidak mengetahui aspek K3 yang ada di wilayah perusahaan. Salah satu cara untuk membantu menanamkan pemahaman mengenai aspek K3 adalah dengan menempelkan tanda dan rambu K3 di setiap area kerja. Unit K3 menyediakan, memasang dan memelihara tanda dan rambu K3 di area Peruri.

Tanda dan rambu K3 tersebut antara lain:

- a. Rambu alat pelindung diri (APD);
- b. Tanda bahaya bahan kimia;
- c. Tanda alat pemadam api ringan;
- d. Tanda jalur evakuasi;
- e. Tanda arah parkir;
- f. Lain-lain.

9. *Pest Control dan Fogging*

Setiap tahun unit K3 membuat program *pest control* dan *fogging* di area perusahaan dan rumah dinas, dengan pemberian pengumpan tikus di area kerja tertentu sesuai dengan permintaan

- r. Heat resistant clothes;
- s. Apron;
- t. Sweaters;
- u. Back support;
- v. Bike supporter;
- w. Safety belt and body harness.

7. Catering Evaluation

In order to ensure the safety and cleanliness of catering food consumed by all employees, the OHS unit has a catering evaluation program which is carried out every six months. This evaluation is carried out in every caterer that is Peruri's partner. The OHS unit team together with representatives from the procurement department conducted direct visits to the operational places of each catering, then observed the catering location, equipment and operational processes in accordance with the guidelines for the requirements of the minister of health regulation number 1096/MENKES/PER/VI/2011, concerning hygiene sanitation catering services.

The results of this evaluation are then reported to the relevant parties to be followed up according to the recommendations that have been given. The results of this report will also be used as material for consideration to continue or dismiss as a catering partner.

In 2019, OHS team conducting catering evaluation for Semester I on March 22, 2019 at Karawang and March 27, 2019 at Jakarta, in Semester II on September 26 2019, at Karawang and September 27, at Jakarta.

8. Provision of OHS Signs and Signs

Every person in the Peruri area must understand or at least know the OHS aspects in the company area. One way to help instill an understanding of OHS aspects is by placing OHS signs and signs in each work area. The OHS unit provides, installs and maintains OHS signs and signs in the Peruri area.

The OHS signs and signs include:

- a. Signs of personal protective equipment (PPE);
- b. Chemical hazard sign;
- c. Light fire extinguisher sign;
- d. Evacuation route sign;
- e. Parking direction sign;
- f. Others.

9. Pest Control and Fogging

Every year the OHS unit creates a pest control and fogging program in company areas and official homes, by providing rat feeders in certain work areas according to the work unit's request. The

unit kerja. Unit K3 menganggarkan biaya khusus untuk penyediaan pengumpan tikus setiap tahun sehingga unit kerja dapat memintanya sewaktu-waktu jika diperlukan. Pelaksanaan fogging dilakukan setiap Juni dan Desember di area perusahaan dan rumah dinas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, akan tetapi jika terdapat endemic akan dilakukan fogging tambahan.

OHS unit budgeted a special cost for providing rat feeders every year so that the work unit could request it at any time if needed. Fogging is carried out every June and December in the company area and official residence according to the predetermined schedule, but if there is an endemic, additional fogging will be carried out.

10. Struktur Organisasi Tanggap Darurat

Untuk menyempurnakan jalur komunikasi dan koordinasi yang efektif ketika terjadi keadaan darurat, Peruri telah merevisi SKEP struktur organisasi tanggap darurat dalam Surat Keputusan No. SKEP-328/VI/2019, tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Tanggap Darurat Perum Percetakan Uang RI. Dalam SKEP tersebut tertulis tugas dan wewenang setiap penanggung jawab/koordinator sebagai pedoman kerja saat terjadi keadaan darurat.

10. Emergency Response Organizational Structure

In order to improve effective communication and coordination channels when an emergency occurs, Peruri has revised the SKEP for emergency response organizational structure in Decree No. SKEP-328/VI/2019, concerning Improvement of the Organizational Structure for Emergency Response of Perum Percetakan Uang RI. In the SKEP, the duties and authorities of each person in charge/ coordinator are written as a work guide when an emergency occurs.

11. Perencanaan Dan Pelaksanaan Simulasi Tanggap Darurat (Termasuk Pelatihan Alat Pemadam Api Ringan, Hydrant dan lainnya)

Setiap karyawan diharuskan dapat mengerti dan memahami bagaimana cara penanggulangan keadaan darurat seperti kebakaran, ledakan, tumpahan bahan kimia, keracunan, huru-hara dan sebagainya di perusahaan, untuk mengurangi besarnya kerugian. Salah satunya dengan melakukan simulasi tanggap darurat.

Program ini dilakukan setahun sekali di area yang berbeda. Unit K3 bekerjasama dengan unit pemadam kebakaran melaksanakan kegiatan simulasi tanggap darurat dengan melibatkan area kerja bersangkutan yang menjadi lokasi kegiatan tersebut maupun dengan pihak eksternal jika diperlukan. Kegiatan simulasi ini akan didokumentasikan baik dengan video, foto maupun pencatatan yang kemudian akan dievaluasi keefektifitasannya sesuai dengan prosedur tanggap darurat yang ada. Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan pertimbangan untuk perbaikan selanjutnya dan dilaporkan kepada pihak terkait.

11. Planning and Implementation of Emergency Response Simulation (Including Training for Light Fire Extinguishers, Hydrant, and others)

Every employee is required to be able to understand and understand how to handle emergencies such as fire, explosion, chemical spills, poisoning, riots, and so on in the company, to reduce the amount of losses. One of them is by performing an emergency response simulation.

This program is conducted once a year in a different area. The OHS Unit collaborates with the fire department to carry out emergency response simulation activities by involving the relevant work area which is the location of the activity as well as with external parties if necessary. This simulation activity will be documented either by video, photos or recording which will then be evaluated for its effectiveness in accordance with existing emergency response procedures. The results of this evaluation are then taken into consideration for further improvements and reported to related parties.

12. Program Bulan K3 Nasional

Bulan K3 Nasional diperingati setiap 12 Januari – 12 Februari setiap tahunnya. Peruri berpartisipasi untuk turut menyukseskan bulan K3 nasional dengan menyelenggarakan beberapa program, yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran setiap karyawan terhadap penerapan K3 di tempat kerja.

Program-program yang telah dan akan dilaksanakan pada bulan K3 di antaranya:

12. National OHS Month Program

The National OHS Month is commemorated every 12 January - 12 February every year. Peruri participates in the success of the national OHS month by organizing several programs, which are expected to increase the compliance and awareness of every employee towards the implementation of OHS in the workplace.

Programs that have been and will be implemented in the OHS month include:

- Pemasangan spanduk bulan K3;
- Diklat pemadaman api menggunakan karung goni, APAR dan hydrant;
- Diklat P3K;
- Lomba pemadaman api menggunakan APAR dan hydrant;
- Lomba penerapan 5R;
- Lomba cerdas cermat K3 dan lain-lain.

13. Pengungkapan Tingkat Angka Kecelakaan Kerja Unit K3 mencatat semua kejadian kecelakaan yang terjadi pada karyawan baik yang terjadi di dalam perusahaan maupun kecelakaan lalu lintas pada saat karyawan berangkat maupun pulang bekerja. Setiap kecelakaan yang terjadi di dalam perusahaan akan diinvestigasi oleh tim K3 untuk kemudian dicari akar penyebabnya.

Hasil investigasi tersebut akan dievaluasi dan diberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan pencegahan selanjutnya. Dokumentasi kecelakaan kerja tersebut juga akan dilaporkan kepada dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Karawang bersama dengan laporan triwulan P2K3.

Berikut Tingkat Angka Kecelakaan kerja yang terjadi selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Indikator Indicator	2017		2018		2019	
	Qty	Satuan Unit	Qty	Satuan Unit	Qty	Satuan Unit
Total Korban Kecelakaan Kerja Total of Work Accident Victim	3	orang Person	3	orang Person	8	orang Person
Kecelakaan kerja yang mengakibatkan kehilangan hari kerja Work Accident that impacted to work absent	0	orang Person	3	orang Person	3	orang Person
Kecelakaan yang tidak mengakibatkan kehilangan hari kerja Work Accident that not impacted to work absent	3	orang Person	0	orang Person	5	orang Person
Kecelakaan yang mengakibatkan kematian Work Accident that caused death	0	orang Person	0	orang Person	0	orang Person
Jumlah Jam Kerja Kumulatif Total Work Hour	14,5	jam hour	0	jam hour	20	jam hour
Jumlah Hilang Hari Kerja Total Loss of Work Days	0	hari Day	17	hari Day	28	hari Day

14. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Karyawan

Perusahaan telah menyiapkan fasilitas berupa jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja bagi karyawan. Kedua fasilitas jaminan bagi karyawan tersebut diberikan dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja, sehingga para karyawan tetap fokus dan tidak khawatir dalam melakukan kegiatannya untuk memberikan kinerja terbaik bagi Perusahaan. Salah satu kebijakan yang dimiliki Perusahaan adalah menekankan pentingnya aspek kesehatan para karyawan. Guna memenuhi Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan

- Installation of the OHS month banner;
- Fire fighting training using gunny sacks, APAR and hydrant;
- P3K training;
- Fire fighting competition using APAR and hydrant;
- Competition for implementing 5R;
- OSH quiz competition, and others.

13. Disclosure of Work Accident Rate

The OHS Unit records all accidents that occur to employees, both those that occur within the company and traffic accidents when employees leave or come home from work. Every accident that occurs in the company will be investigated by the OHS team to find the root cause.

The results of the investigation will be evaluated and recommendations for further corrective and preventive actions. Documentation of work accidents will also be reported to the Karawang Regency Manpower and Transmigration Office along with the P2K3 quarterly report.

Following is the number of work accident in the last 3 (three) years.

14. Health Insurance and Work Accident Benefits for Employees

The company has prepared facilities in the form of health insurance and work accident insurance for employees. The two guarantee facilities for employees are provided in order to maintain the safety and comfort of employees at work, so that employees remain focused and do not worry about carrying out their activities to provide the best performance for the Company.

One of the Company's policies is to emphasize the importance of the health aspect of its employees. In order to comply with Law No. 24 of 2011 concerning BPJS and Presidential Regulation (Perpres) No.

Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2013 yang telah diubah melalui Perpres No. 111 Tahun 2013, Perusahaan telah mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

DAMPAK KUANTITATIF ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dampak dari pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial terkait dengan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja terlihat dari suasana yang kondusif di lingkungan Perusahaan, di mana hingga akhir 2019 tidak terdapat permasalahan yang melibatkan karyawan dengan Perusahaan, baik di kantor pusat maupun di area operasional Perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan Perusahaan terhadap seluruh karyawan yang terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan, telah berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Perusahaan selalu berupaya untuk memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Perusahaan menyusun suatu mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan setiap saat siap untuk melakukan tindakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan, produk dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Perusahaan terus berupaya untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan terhadap kenyamanan, keselamatan, kesehatan, ketertiban, keamanan, kualitas lingkungan dan produktivitas kerja akibat aktivitas kerja dari penggunaan alat, mesin dan bahan berbahaya dalam lingkungan kerja. Penyelesaian pengaduan masalah ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dalam rangka menjamin hak-hak para karyawan.

Masalah ketenagakerjaan di Peruri pada dasarnya telah diatur dalam PKB pada BAB XV Penyelesaian Keluh Kesah Pasal 103, yaitu:

1. Perlakuan yang layak sesuai dengan peraturan serta ketentuan-ketentuan yang ada dan berlaku di Perusahaan.

12 of 2013 as amended by Presidential Decree No. 111 In 2013, the Company has enrolled all employees in the BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan programs.

QUANTITATIVE IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF MANPOWER, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

The impact of the implementation of social responsibility activities related to employment, occupational safety and health can be seen from the conducive atmosphere within the Company, where up to the end of 2019, there were no issues involving employees with the Company, either at the head office or in the Company's operational areas. This proves that the social responsibility activities related to employment, occupational safety and health carried out by the Company to all employees involved in the Company's business activities have been going well and in accordance with applicable regulations.

MANPOWER, SAFETY AND HEALTH COMPLAINTS MECHANISM

The company always strives to comply with applicable laws and regulations, one of which is Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, the Company has formulated a mechanism for complaints about manpower, safety and health issues. The company is at any time ready to take control measures against activities, products and services that may cause occupational accidents and diseases.

The company continues to strive to prevent unwanted incidents of comfort, safety, health, order, security, environmental quality and work productivity due to work activities from the use of tools, machines and hazardous materials in the work environment. Settlement of complaints about labor issues, occupational safety and health for employees is one form of the company's responsibility in order to guarantee the rights of employees.

Basically, the manpower issue in Peruri has been regulated in the PKB in CHAPTER XV Article 103 Complaint Resolution, namely:

1. Proper treatment in accordance with the rules and regulations that exist and apply in the Company.

2. Perlindungan hukum terhadap ketidakadilan atau tindakan sewenang-wenang dari atasannya.

Apabila Karyawan/ti merasa tidak puas karena terdapat dalam hal-hal pada ketentuan dimaksud, maka karyawan/ti tersebut membuat surat kepada atasan langsung untuk mendapatkan penyelesaian dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap I
Keluh kesah disampaikan kepada atasan untuk diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan tembusan dapat disampaikan kepada Serikat Pekerja.
2. Tahap II
dalam penyampaian keluh kesah Tahap I tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang sudah ditetapkan, maka keluh kesah disampaikan kepada Kadiv SDM untuk diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
3. Tahap III
dalam hal penyampaian keluh kesah Tahap II tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang sudah ditetapkan, maka:
 - a. Keluh kesah terkait dengan Perselisihan Hubungan Industrial dapat melakukan penyelesaian melalui Perundingan Bipartit.
 - b. Keluh kesah yang tidak terkait dengan Perselisihan Hubungan Industrial dapat melakukan penyelesaian melalui Lembaga Kerja Sama Bipartit.

2. Legal protection against injustice or arbitrary actions by their superiors.

If the employees is not satisfied because of the matters in the provisions above, then the employees will write a letter to the direct superior to get a settlement with the following stages:

1. Phase I
Complaints are submitted to superiors to be resolved within 7 (seven) working days and a copy can be submitted to the Workers Union.
2. Phase II
In the submission of Phase I complaints that cannot be resolved according to the predetermined time, the complaints are submitted to the Head of HR Division to be resolved within 7 (seven) working days.
3. Stage III
In the event that the submission of Phase II complaints cannot be resolved within the stipulated time, then:
 - a. Complaints related to Industrial Relations Disputes can be resolved through Bipartite Negotiations.
 - b. Complaints that are not related to Industrial Relations Disputes can be resolved through the Bipartite Cooperation Institution.

SERTIFIKASI ATAU PENGHARGAAN TERKAIT INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA ASPEK KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Perusahaan secara konsisten menerapkan standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Internasional dan berhasil mempertahankan sertifikat OHSAS 18001:2007, sejak 2013, dari badan sertifikasi PT SGS Indonesia. Tahun ini, perusahaan juga telah melakukan peningkatan kompetensi kepada para karyawan sebagai upaya untuk mempersiapkan upgrade sertifikasi OHSAS 18001:2007, menjadi ISO 45001:2018, yang direncanakan dilakukan pada 2020.

CERTIFICATION AND AWARDS FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES IN THE ASPECTS OF LABOR, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

The company consistently applies the standards of the International Health and Safety Management System and has successfully maintained the OHSAS 18001: 2007 certificate, since 2013, from the certification body PT SGS Indonesia. This year, the company has also improved the competence of employees in an effort to prepare for the upgrade of the OHSAS 18001: 2007 certification to ISO 45001: 2018, which is planned to be carried out in 2020.

Sertifikasi yang Berlaku di Tahun 2019

Certification Valid in 2019

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Certification Issuance Date	Jenis Sertifikat Type of Certification	Dikeluarkan Oleh Issued by	Masa Berlaku Hingga Valid Until
12 Oktober 2018 October 12, 2018	OHSAS 18001:2007	PT SGS Indonesia	11 Maret 2021 March 11, 2018

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN DAN MITRA KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SCOPE OF RESPONSIBILITY FOR PRODUCTS/SERVICES AS WELL AS CONSUMERS AND WORK PARTNERS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN DAN MITRA KERJA

Kepercayaan dan kepuasan konsumen merupakan kunci penting bagi Perusahaan agar usahanya terus bertahan. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan melakukan inovasi produk agar sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus sejalan dengan keinginan konsumen. Upaya yang dilakukan tersebut terbukti membawa hasil, yakni Perusahaan tetap tumbuh dan berkembang hingga saat ini.

Komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan yang terbaik dan bermanfaat bagi setiap pemangku kepentingan atau konsumen diwujudkan melalui sikap dan respon yang profesionalisme dari Perusahaan dan segenap jajaran dalam melayani konsumen. Perusahaan juga menjamin kualitas pelayanan kepada setiap konsumen dengan sigap, responsif dan terpercaya. Di samping itu, untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan, Perusahaan terus memperkuat hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan mitra kerja, baik pemasok maupun vendor untuk lebih mempermudah kegiatan Perusahaan, khususnya dalam menghadirkan produk dan layanan yang bermutu.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN 2019

Bentuk tanggung jawab terhadap pelanggan yang dilakukan oleh Perusahaan adalah menyediakan layanan informasi pelanggan mengenai Perusahaan, pusat pelayanan pelanggan serta program peningkatan layanan. Selain pelanggan langsung seperti instansi pemerintah yang melakukan pemesanan, Peruri melihat masyarakat Indonesia sebagai *The Ultimate Customer* yang mesti dipenuhi kebutuhannya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, Peruri memastikan bahwa produk *security* yang dihasilkannya, terutama uang kartal, senantiasa memiliki kualitas terbaik.

Dalam melaksanakan pencetakan produk uang kartal, Peruri menerapkan sistem pengendalian yang ketat sehingga menghasilkan produk dengan tingkat kerusakan (*inschiet*) serendah mungkin. Tingkat kerusakan ini diukur dengan menggunakan metode khusus.

COMMITMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY FOR PRODUCTS/SERVICES AS WELL AS CONSUMERS AND WORK PARTNERS

Customer trust and satisfaction are important keys for the Company so that its business continues to survive. To that end, the Company is committed to continuously improving its services and making product innovations to suit the times, as well as in line with customer desires. These efforts have proven to be fruitful, namely that the Company continues to grow and develop to this day.

The Company's commitment to providing the best and beneficial service to every stakeholder or customer is manifested through a professional attitude and response from the Company and all levels in serving customers. The company also guarantees the quality of service to every customer with alacrity, responsiveness and reliability. In addition, to increase customer or customer satisfaction, the Company continues to strengthen good and mutually beneficial relationships with business partners, both suppliers and vendors to facilitate the Company's activities, particularly in presenting quality products and services.

TARGETS AND ACTIVITY PLANS FOR 2019

The form of responsibility to customers carried out by the Company is to provide customer information services about the Company, customer service centers, and service improvement programs. In addition to direct customers such as government agencies who place orders, Peruri sees Indonesian people as *The Ultimate Customer* who must fulfill their needs with full responsibility. Therefore, Peruri ensures that the security products it produces, especially currency, are always of the best quality.

In carrying out the printing of currency products, Peruri implements a strict control system so as to produce products with the lowest possible level of damage (*incshiet*). This level of damage is measured using a special method.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN

- 1. Kesehatan dan Keselamatan Konsumen atau Pelanggan**
Perusahaan berkomitmen melaksanakan proses produksi dan jasa sesuai dengan standar operasional dengan menjadikan aspek kesehatan dan keselamatan konsumen atau pelanggan sebagai prioritas utama. Untuk itu, Perusahaan senantiasa meningkatkan kualitas produknya, dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu. Produk yang dihasilkan Peruri bukan merupakan produksi untuk keperluan konsumsi ataupun produk yang dapat membahayakan penggunaannya. Perusahaan juga selalu berusaha melakukan pemeliharaan, perbaikan dan penataan berbagai fasilitas secara bertahap sesuai skala prioritas, agar ketersediaan fasilitas maupun peralatan tetap terjamin dengan kualitas memadai. Perusahaan senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas produk dan layanan sesuai dengan kemampuan Perusahaan melalui penerapan sistem yang terencana serta memberikan layanan yang memadai sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama.
- 2. Kejelasan Informasi Produk dan Promosi**
Perusahaan menyediakan informasi material yang diperlukan tentang Peruri secara transparan dan terbuka, akurat dan tepat waktu, sebagai dasar pengambilan keputusan bagi konsumen untuk menggunakan produk atau jasa Perusahaan. Kegiatan komunikasi kejelasan informasi produk ini juga menjadi salah satu upaya untuk melindungi hak konsumen atau pelanggan untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas dan dapat dipercaya. Perusahaan menyadari, komunikasi yang berjalan secara efektif dan selaras dengan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan, dapat menciptakan loyalitas pelanggan dan hubungan bisnis jangka panjang. Perusahaan menyediakan berbagai sarana komunikasi yang memadai, agar kualitas produk dan layanan yang dimiliki Perusahaan senantiasa dapat memenuhi harapan konsumen atau pelanggan salah satunya melalui website Perusahaan.
Produk yang paling banyak dihasilkan oleh Peruri adalah uang kertas. Sebagaimana diketahui, saat ini masih ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan untuk melakukan kecurangan dengan mencetak uang palsu.

PROGRAMS AND ACTIVITIES CONDUCTED

- 1. Customer Health and Safety**
The company is committed to carrying out production and service processes in accordance with operational standards by making the health and safety aspects of customers a top priority. For this reason, the Company continues to improve the quality of its products, by implementing a Quality Management System. Products produced by Peruri are not produced for consumption purposes or products that can endanger users.

The company also always tries to carry out maintenance, repair and arrangement of various facilities in stages according to the priority scale, so that the availability of facilities and equipment is guaranteed of adequate quality. The Company always makes improvements and enhances the quality of products and services in accordance with the Company's capabilities through the implementation of a planned system and provides adequate services in accordance with mutually agreed contracts.
- 2. Clarity of Product and Promotion Information**
The Company provides the necessary material information about Peruri in a transparent and open manner, accurately and in a timely manner, as a basis for making decisions for costumers to use the Company's products or services. This product information clarity communication activity is also an effort to protect customers' rights to obtain accurate, clear, and reliable information. The company is aware that communication that runs effectively and in line with services that meet customer expectations can create customer loyalty and long-term business relationships. The Company provides various adequate means of communication, so that the quality of its products and services can always meet the expectations of customers, one of which is through the Company's website.

The product that Peruri mostly produces is paper money. As is well known, currently there are parties who take advantage of committing fraud by printing counterfeit money.

Dalam konteks ini, peran mensosialisasikan produk uang kertas yang diproduksi oleh Peruri sebagian besar dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pemesan dan pendistribusi produk. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat luas melalui berbagai media yang ada, baik itu media masa seperti televisi dan radio serta media cetak, maupun mediamedia online serta situs resmi Bank Indonesia.

3. *Survey* Kepuasan Pelanggan

Selama beroperasi, Peruri telah mendapat banyak kepercayaan dari konsumen atau pelanggan. Perusahaan memandang pentingnya kepuasan pelanggan sebagai salah satu tolok ukur penilaian paling efektif dari keseluruhan aspek kualitas produk yang dimiliki Perusahaan. Untuk memetakan kelemahan-kelebihan produk dan posisinya di tengah-tengah pelanggan, Perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan yang meliputi penilaian terhadap produk dan layanan yang dimiliki Perusahaan.

- ### 4. Pengelolaan Hubungan dengan Mitra Kerja Prinsipal/Distributor/Pemasok/*Supplier/Vendor*
- Mitra Kerja adalah pihak yang telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Peruri untuk kegiatan pengembangan usaha setelah melalui proses evaluasi kelayakan. Perusahaan terus melakukan pengembangan usaha, yang tentunya melibatkan mitra kerja di berbagai bidang pengembangan usaha. Dalam menjalankan kegiatan pengembangan usaha, pemilihan mitra kerja yang akan bekerjasama dengan Peruri tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan ketentuan internal yang berlaku. Calon mitra kerja yang dapat ditetapkan menjadi mitra kerja adalah calon mitra kerja yang telah mengikuti prosedur dan aturan serta evaluasi yang berlaku dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi Perusahaan.

LAYANAN KELUHAN DAN PENGADUAN BAGI KONSUMEN DAN MITRA KERJA

Dalam rangka melayani keluhan pelanggan, Peruri memberikan kesempatan kepada para pelanggan untuk menyampaikan keluhannya kepada Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung melalui saluran komunikasi yang tersedia sebagai berikut:

In this context, the role of socializing banknotes produced by Peruri was largely carried out by Bank Indonesia as a buyer and distributor of the product. Socialization was carried out to the wider community through various existing media, including mass media such as television and radio and print media, as well as online media and the official website of Bank Indonesia.

3. Customer satisfaction survey

During its operation, Peruri has won a lot of trust from customers. The Company views the importance of customer satisfaction as one of the most effective benchmarks for assessing all aspects of product quality owned by the Company. To map the strengths of the product and its position among customers, the Company conducts a customer satisfaction survey which includes an assessment of the Company's products and services.

- ### 4. Management of Relationships with Principal Partners/Distributors/Suppliers/Vendors
- Work Partners are parties who have agreed and signed a cooperation agreement with Peruri for business development activities after going through the feasibility evaluation process. The company continues to carry out business development, which of course involves partners in various fields of business development. In carrying out business development activities, the selection of partners who will cooperate with Peruri must of course be carried out in accordance with the principles of Good Corporate Governance and applicable internal regulations. Prospective work partners who can be appointed as work partners are prospective partners who have followed the applicable procedures and regulations as well as evaluations and provide benefits or benefits to the Company.

COMPLAINTS AND COMPLAINTS SERVICES FOR CUSTOMERS AND WORK PARTNERS

In order to serve customer complaints, Peruri provides opportunities for customers to submit their complaints to the Company directly or indirectly through the available communication channels as follows:

Kantor Pusat Peruri
Peruri Head Office

Jl. Palatehan Nomor 4, Blok K-V Kebayoran Baru, Jakarta, 12160, Indonesia.
Telepon: +62 21 7395000
Faksimili: +62 21 7221567
Email: contact@peruri.co.id
Situs Web: www.peruri.co.id

Selain itu, Peruri juga telah membentuk pusat pengaduan pelanggan yang dapat diakses melalui website Peruri via "Kontak Kami". Perusahaan akan memberikan respon terhadap pengaduan keluhan yang masuk melalui surat resmi, faksimili dan telepon yang ditujukan kepada Direktur Pengembangan Usaha.

MEKANISME PENANGANAN DAN PENGELOLAAN KELUHAN PELANGGAN

1. Pusat Pengaduan Pelanggan
Pelanggan-pelanggan yang berada dibawah tanggung jawab Direktorat Pengembangan Usaha (DPU) meliputi pelanggan-pelanggan dari SBU Digital Security dan Probis Internasional & LNU selama 2019 apabila terdapat komplain/keluhan maupun kebutuhan lain dari pelanggan, maka pelanggan tersebut akan langsung menghubungi *key account* yang bersangkutan dari masing-masing unit kerja tersebut.
2. Mekanisme Penanganan Keluhan Pelanggan
Mekanisme penanganan keluhan pelanggan pada 2019 masih mengacu kepada Corporate Policy Manual (CPM) Bagian Marketing, Sales & Product No; Dokumen : 02/MSP/DU-DS/I/ 2017 yang mulai berlaku sejak 24 Januari 2017; Berdasarkan CPM tersebut Standarisasi Penanganan Keluhan sebagai berikut:
 - a. Keluhan pelanggan dapat dibedakan berdasarkan penyebab terjadinya keluhan sebagai berikut (mengacu pada bisnis proses penjualan):
 - Keluhan terhadap kualitas produk
Keluhan pelanggan disebabkan oleh bahan baku substandar dan atau kesalahan produksi yang lolos kirim;
 - Keluhan terhadap kuantitas produk jadi
Keluhan ini timbul karena jumlah produk jadi yang dikirim ke pelanggan tidak sesuai dengan kontrak/SPK;
 - Keluhan terkait pengiriman
Keluhan ini timbul karena dilampauinya jatuh tempo pengiriman dan atau kesalahan alamat pengiriman;

In addition, Peruri has also established a customer complaint center which can be accessed through the Peruri website via "Contact Us". The company will respond to complaints received through official letters, facsimile and telephone to the Director of Business Development.

CUSTOMER COMPLAINT HANDLING AND MANAGEMENT MECHANISMS

1. Customer Complaint Center
Customers who are under the responsibility of the Directorate of Business Development (DPU) include customers from SBU Digital Security and Probis International & LNU during 2019 if there are complaints or other needs from customers, then the customer will directly contact the key account concerned from each of these work units.
2. Customer Complaint Handling Mechanism
The mechanism for handling customer complaints in 2019 still refers to the Corporate Policy Manual (CPM) for the Marketing, Sales & Product Section No. Document: 02/MSP/DU-DS/I/2017 which took effect from January 24, 2017. Based on the CPM, the Standardization of Complaints Handling is as follows:
 - a. Customer complaints can be differentiated based on the cause of the complaint as follows (referring to sales business process):
 - Complaints about product quality
Customer complaints are caused by substandard raw materials and/or production errors that have escaped delivery.
 - Complaints about the quantity of the finished product
This complaint arises because the number of finished products sent to customers is not in accordance with the contract/SPK.
 - Complaints regarding delivery
This complaint arises because the delivery date is exceeded and/or an error in the delivery address.

- b. Rincian kegiatan dalam penanganan keluhan pelanggan adalah sebagai berikut:
- Keluhan terhadap kualitas dan kuantitas produk:
 - » Informasi keluhan pelanggan dapat diterima secara lisan (via telepon/ bertatap muka langsung) atau secara tertulis;
 - » Apabila keluhan tersebut diterima oleh personil yang bukan PIC pelanggan tersebut maka penerima keluhan akan meneruskan keluhan tersebut kepada PIC yang sesuai;
 - » PIC pelanggan terkait menyampaikan respon pertama dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam yang berisi permintaan maaf serta janji penanganan komplain;
 - » PIC membuat nota dinas yang dilampirkan dengan berkas dokumen pendukungnya kepada unit kerja PPIC untuk penggantian produk dan/ atau Laboratorium untuk dimintakan pemeriksaan lebih lanjut bila diperlukan;
 - » Unit PPIC menyerahkan produk pengganti ke unit pengiriman untuk diserahkan kepada pelanggan.
 - Keluhan terhadap kesalahan alamat pengiriman
 - » Pelanggan menginformasikan kesalahan alamat pengiriman ke PIC;
 - » PIC pelanggan merespon dengan menyampaikan permohonan maaf dan segera meneruskan informasi ke unit pengiriman untuk ditindaklanjuti;
 - » Unit pengiriman melakukan koordinasi dengan pelanggan untuk menentukan teknis penyelesaian masalah (pengambilan produk yang salah kirim dan penyerahan produk yang seharusnya dikirim).
 - Keluhan terhadap keterlambatan kirim
 - » Pelanggan menginformasikan jumlah hari keterlambatan kirim dan nilai denda melalui surat;
 - » PIC pelanggan menerima surat, melakukan verifikasi data keluhan pelanggan dengan data pengiriman dan data pada kontrak; Selanjutnya, sebisa mungkin untuk melakukan nego dengan pelanggan untuk keringanan denda atau penghilangan denda yang didukung dengan data yang valid;
- b. Details of activities in handling customer complaints are as follows:
- Complaints on product quality and quantity:
 - » Customer complaint information can be received verbally (via telephone/ face to face) or in writing;
 - » If the complaint is received by personnel who are not the customer's PIC, the recipient of the complaint will forward the complaint to the appropriate PIC;
 - » The relevant customer PIC submits the first response within 1 x 24 hours which contains an apology and an appointment for handling complaints;
 - » PIC makes an official note attached with supporting documents to the PPIC work unit for product replacement and/ or the laboratory to request further examination if needed;
 - » PPIC units deliver replacement products to the delivery unit to be delivered to customers.
 - Complaints about shipping address errors
 - » The customer informs the wrong delivery address to the PIC;
 - » The customer's PIC responds by submitting an apology and immediately forwarding the information to the delivery unit for follow up;
 - » The delivery unit coordinates with the customer to determine technical problem solving (picking up the wrong product and handing over the product that should have been sent).
 - Complaints about late delivery
 - » The customer informs the number of days of late delivery and the amount of the penalty by mail;
 - » Customer PIC receives letters, verifies customer complaint data with delivery data and data on contracts; Furthermore, as much as possible to negotiate with customers for fine relief or penalty elimination, supported by valid data;

- » Jika data sesuai dan nego tidak berhasil, PIC membuat ijin prinsip persetujuan pejabat berwenang untuk proses pembayaran denda;
 - » Mengirimkan nota dinas kepada unit PPIC terkait sebagai bahan evaluasi dan koordinasi penyelesaian pencetakan produk;
 - » Jika tidak sesuai, maka segera membuat klarifikasi ke pelanggan.
- Klaim Pelanggan akan ditindaklanjuti apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - » Penyebab kerusakan dapat dibuktikan bukan karena penanganan produk di Gudang pelanggan;
 - » Produk yang diklaim dapat dibuktikan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan atau dengan specimen yang berlaku;
 - » Produk yang diklaim diserahkan kembali melalui unit pengiriman atau dibawa langsung oleh pelanggan disertai dengan surat komplain yang berisi setidaknya penyebab komplain dan jumlah produk yang dikomplain;
 - » Waktu penyampaian klaim masih dalam masa pemeliharaan.
 - Penerimaan produk rusak dari pelanggan
 - » Jika pelanggan langsung membawa produk rusak, maka produk diterima oleh unit penjualan, menandatangani surat tanda terima produk rusak dan menerima surat keluhan dari pelanggan; Selanjutnya PIC membuat nota dinas ke unit PPIC untuk dilakukan penggantian produk rusak (retur barang);
 - » Jika produk rusak dijemput di Gudang pelanggan, unit pengiriman melakukan penjemputan ke gudang pelanggan, menandatangani surat tanda terima produk rusak, menerima surat keluhan pelanggan dan menyerahkan produk rusak ke unit produksi;
 - » Unit penjualan menerbitkan sales order retur.
- c. Data Keluhan Pelanggan
Komplain / keluhan pelanggan pada Direktorat Pengembangan Usaha (DPU) terbagi ke masing-masing unit kerja yaitu Departemen
- » If the data is in accordance and the negotiation is unsuccessful, the PIC will issue a principal permit for approval by the competent authority to process the payment of fines;
 - » Sending official notes to the relevant PPIC unit as material for evaluation and coordination of product printing completion;
 - » If it is not appropriate, then immediately make clarification to the customer.
- Customer claims will be followed up if they meet the following requirements:
 - » The cause of the damage can be proven not due to the handling of the product in the customer's warehouse;
 - » The claimed product can be proven that it does not comply with the required specifications or with the applicable specimen;
 - » The claimed product is returned via the delivery unit or brought directly by the customer accompanied by a complaint letter that contains at least the cause of the complaint and the number of products being complained;
 - » Time for submission of claims is still under maintenance.
 - Receipt of damaged products from customers
 - » If the customer immediately brings a damaged product, then the product is accepted by the sales unit, signs a receipt for the damaged product, and receives a complaint letter from the customer; Then the PIC makes an official note to the PPIC unit to replace damaged products (goods returns);
 - » If the damaged product is picked up at the customer's warehouse, the delivery unit picks up the product to the customer's warehouse, signs a receipt for the damaged product, receives a customer complaint letter and delivers the damaged product to the production unit;
 - » The sales unit issues a sales return order.
- c. Customer Complaint Data
Complaints from customers at the Directorate of Business Development (DPU) are divided into each work unit, namely the Domestic

Unit Bisnis Domestik, Probis Internasional & LNU dan SBU Digital Security; Jumlah komplain / keluhan pelanggan di Direktorat Pengembangan Usaha (DPU) pada tahun 2019 sebanyak 8 (Delapan) Buah; Jumlah Komplain terbagi ke dalam unit kerja sebagai berikut:

- Departemen Unit Bisnis Domestik
Pada 2019 jumlah komplain / keluhan pelanggan yang diterima oleh Departemen Unit Bisnis Domestik sebanyak 4 (Empat) Buah; Komplain / keluhan pelanggan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Business Unit Department, Probis International & LNU and SBU Digital Security; The number of customer complaints at the Directorate of Business Development (DPU) in 2019 was 8 (Eight); The number of complaints is divided into work units as follows:

- Domestic Business Unit Department
In 2019 the number of customer complaints received by the Domestic Business Unit Department was 4 (four); The customer complaints are as follows:

Kategori Komplain/ Complaint Category	Nama Pelanggaran/ Violation	Produk/ Product	Penyebab Komplain/ Cause of Complaint	Penanganan Komplain (Action Plan)	Bulan/ Month
Cetak Printing	Universitas Padjajaran	Personalisasi ijazah & Transkrip Nilai Personalized diplomas & grade transcripts	Cetakan personalisasi menggunakan font yang berbeda (tidak sesuai dengan jenis font yang telah ditentukan). Personalized print using a different font (not according to the predefined font type).	Melakukan rapat koordinasi dengan PDS untuk membahas kesalahan cetak tersebut dan mengganti cetakan yang salah. Conduct a coordination meeting with the PDS to discuss these misprints and replace the wrong ones.	Februari/ February
Keterlambatan Pengiriman Delivery Delays	PT POS Indonesia	Prangko Stamps	Keterlambatan Pengiriman. Delivery Delays.	Melakukan negosiasi dengan PT POS Indonesia untuk menurunkan denda yang dibebankan kepada Peruri karena keterlambatan pengiriman tersebut. Negotiating with PT POS Indonesia to reduce the fines imposed on Peruri for the late delivery.	Maret/ March
Verifikasi Verification	PT PELNI (Persero)	Tiket Kapal Penumpang Passenger Boat Tickets	Urutan penyusunan produk saat dikemas tidak sesuai kemauan pelanggan. The order in which the product is arranged when packaged is not according to the wishes of the customer.	Berkoordinasi dengan mitra produksi untuk perbaikan pada pengiriman selanjutnya. Coordinate with production partners for improvements on future deliveries.	Mei/ May
Verifikasi Verification	PT POS Indonesia	Prangko Stamps	Kekurangan jumlah pengiriman. Lack of number of deliveries.	Mengirim nota dinas kepada unit kerja terkait untuk pengiriman kekurangan prangko. Send official notes to related work units for postage shortages.	November

- Divisi Proyek Bisnis Internasional & Logam Non Uang
Pada 2019 jumlah komplain/keluhan pelanggan yang diterima oleh Proyek Bisnis Internasional & Logam Non Uang (LNU) sebanyak 4 (empat) buah. Komplain/ keluhan pelanggan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- International Business Project & Non-currency Metals Division
In 2019 the number of customer complaints received by International Business Project & Non-currency Metals (LNU) was 4 (four). The customer complaints are as follows:

Kategori Komplain/ Complaint Category	Nama Pelanggaran/ Violation	Produk/ Product	Penyebab Komplain/ Cause of Complaints	Penanganan Komplain (Action Plan)	Bulan/ Month
Cetak Printing	BPK-RI (PT Raisa Persada)	Pin, Cincin, dll Pin, ring, etc	Produk cacat/ kurang, tutup jarum untuk Pin Emas belum disertakan di produk. Defective/deficient product, needle cap for Pin Gold has not been included in the product.	Dilakukan penggantian produk. Product Replacement.	Maret / March
Cetak Printing	Department Immigration and Emigration Sri Lanka	Paspor Sri Lanka Sri Lanka Passport	Terdapat cacat mutu pada Gold Foil. There is a quality defect in the Gold Foil.	-Melakukan pengujian terhadap kualitas bahan baku maupun kualitas cetak Gold Foil. -Mencari alternative bahan baku cover maupun gold foil. -Melakukan kalibrasi ulang terhadap permesinan yang ada. -Testing the quality of raw materials and the quality of Gold Foil printing. -Looking for alternative raw materials for cover and gold foil. -Recalibrate existing machinery.	Februari/ February
Keterlambatan Pengiriman Delivery Delays	BKKBN (CV Ikan Sugitama)	Medali Souvenir/Plakat Medals, Souvenir/ Placards	Keterlambatan pengiriman dikarenakan proses penyepuhan medali terlambat karena bahan baku untuk sepuh nikel sudah habis. The delay in delivery was due to the late gilding process because the raw materials for nickel had run out.	Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk percepatan pembelian bahan baku. Coordinate with related work units to accelerate the purchase of raw materials.	Maret/ March
Keterlambatan Pengiriman Delivery Delays	PT Pelni (Persero)	Lencana Non Emas Non Gold Badge	Keterlambatan pengiriman dikarenakan perbaikan stempel untuk jenis 25 &30 tahun yang terhambat karena dilakukan di SBU Uang (Persiapan stempel Ugam/ Tandies). The delay in delivery was due to stamps repairments for types 25&30 years, was hampered caused being done at the Money Strategic Business Unit (Preparation of coins/Tandies stamps).	Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk percepatan perbaikan stempel. Coordinate with related work units to accelerate stamp repairs.	Mei/ May

- SBU Digital Security
Pada Tahun 2019, SBU Digital Security tidak mendapatkan komplain / keluhan dari pelanggan.

- SBU Digital Security
In 2019, SBU Digital Security received no complaints from customers.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Sepanjang 2019, Perusahaan belum memiliki dan/atau menerima sertifikasi maupun penghargaan terkait produk/jasa serta konsumen dan mitra kerja.

AWARDS AND CERTIFICATIONS

Throughout 2019, the Company has not owned and/or get any certification or awards regarding product/ services as well as consumers and work partner.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SCOPE OF SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan atau *community involvement & development* (CID) dalam rangka memberikan manfaat bagi masyarakat. Perusahaan juga memiliki komitmen kuat untuk senantiasa memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan secara luas. Filosofi ini dianut agar dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan senantiasa dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, termasuk keberadaan Perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial. Hal ini juga sejalan dengan upaya Perusahaan dalam menciptakan kinerja usaha yang berkesinambungan.

Sebagai BUMN, pengembangan sosial kemasyarakatan yang dilakukan Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan pertama No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan perubahan kedua No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial diselenggarakan dengan melakukan analisis,

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY AND COMMITMENT IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

The company is committed to carrying out social and community development programs or community involvement & development (CID) in order to provide benefits to the community. The company also has a strong commitment to always provide benefits to a wide range of stakeholders. This philosophy is adhered to so that every business activity carried out can always provide added value to the community, including the Company's presence in the community. Benefits that can be received by the community are not only economically, but also socially. This is also in line with the Company's efforts to create sustainable business performance.

As a SOE, the social development carried out by the Company also refers to the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-09/MBU/07/2015 dated 3 July 2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises along with the first amendment No. PER-03/MBU/12/2016 dated 16 December 2016 and the second amendment No. PER-02/MBU/7/2017 dated July 5, 2017. Implementation of social responsibility programs is carried out by analyzing, planning, implementing

perencanaan, pelaksanaan program hingga melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Bagi Perusahaan, kelangsungan dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan tidak hanya didasarkan pada kekuatan finansial saja namun harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan sekitar di mana Perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, Perusahaan merancang dan merealisasikan program pengembangan masyarakat dengan melibatkan masyarakat sekitar, sebagai bentuk partisipasinya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan skala global, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs).

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP DAMPAK PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pemangku kepentingan yang memiliki dampak atas pengembangan sosial kemasyarakatan adalah masyarakat di sekitar lokasi operasi Perusahaan, serta masyarakat pada umumnya. Untuk itu, Perusahaan berupaya melibatkan masyarakat sekitar, baik melalui rekrutmen maupun dalam kegiatan CSR. Selain itu, Perusahaan berupaya memberikan program pengembangan sosial kemasyarakatan yang bersifat langsung melalui PKBL, dengan tujuan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

PERUMUSAN ISU-ISU DAN RISIKO SOSIAL YANG TIMBUL DARI OPERASI DAN BISNIS PERUSAHAAN

Perusahaan berkomitmen untuk menyelaraskan kinerja usaha dengan pemberian manfaat untuk masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari pemangku kepentingan Perusahaan. Komitmen ini direalisasikan melalui pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang fokus pada pemenuhan harapan seluruh pemangku kepentingan dengan tujuan menyeimbangkan pencapaian kinerja aspek ekonomi dengan kinerja aspek sosial kemasyarakatan serta aspek keberlanjutan lingkungan sekitar, atau pemenuhan terhadap konsep *triple bottom line*.

Peruri merealisasikan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan melalui pelaksanaan program CSR yang berfokus pada 5 (lima) bidang utama, yaitu peningkatan kesehatan, pendidikan, sarana ibadah, kegiatan keagamaan dan sumbangan sosial.

Lima bidang utama tersebut sejalan dengan konsep *good corporate citizen* yang dikembangkan Peruri. Perusahaan sangat menyadari bahwa keberadaannya

programs and evaluating the implementation of activities.

For the Company, sustainability and sustainable business growth are not only based on financial strength but must pay attention to the social and environmental dimensions in which the Company operates. Therefore, the Company designs and realizes community development programs by involving the surrounding community, as a form of participation in supporting the achievement of global scale sustainable development goals, namely Sustainable Development Goals (SDGs).

STAKEHOLDERS AND THE SCOPE OF THE IMPACT OF SOCIAL DEVELOPMENT

Stakeholders who have an impact on community social development are the communities around the Company's operational locations, as well as the community in general. For this reason, the Company seeks to involve the surrounding community, both through recruitment and in CSR activities. In addition, the Company seeks to provide direct social development programs through PKBL, with the aim of having a direct impact on society.

FORMULATION OF SOCIAL ISSUES AND RISKS ARISING FROM THE COMPANY'S OPERATIONS AND BUSINESS

The company is committed to aligning business performance with the provision of benefits to the community and the surrounding environment as part of the Company's stakeholders. This commitment is realized through the implementation of a community development program that focuses on meeting the expectations of all stakeholders with the aim of balancing the performance of the economic aspects with the performance of the social aspects of the community and the sustainability of the surrounding environment, or the fulfillment of the triple bottom line concept.

Peruri realizes social and community development programs through the implementation of CSR programs that focus on 5 (five) main areas, namely health improvement, education, worship facilities, religious activities and social contributions.

The five main areas are in line with the concept of good corporate citizen which was developed by Peruri. The company is very aware that its existence

merupakan bagian dari masyarakat, di mana pertumbuhan usaha yang diraih juga tak lepas dari peran serta masyarakat. Terlebih dengan statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peruri merasa memiliki tanggung jawab yang lebih untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan.

Untuk itu, Peruri memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan CSR yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Sebagai BUMN, perusahaan memiliki komitmen untuk terus berpartisipasi mengembangkan dan membina usaha kecil dan menengah (UKM), serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Lingkup dan perumusan tanggung sosial perusahaan terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan meliputi program peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan PKBL, dengan tujuan:

1. Meningkatkan kompetensi usaha kecil sehingga dapat menjadi tangguh dan mandiri;
2. Memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk bantuan korban bencana alam, peningkatan kesehatan, pendidikan & kesehatan, Pengembangan sarana/prasarana umum, Sarana Ibadah, Pelestarian Lingkungan, BUMN Peduli dan lain-lain.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN 2019

Perusahaan berusaha memahami dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan membantu pengembangan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip warga perusahaan yang baik (*Good Corporate Citizenship*).

Selain itu, pada PKBL, Perusahaan memiliki target yang terencana. Program Kemitraan merupakan bantuan bagi masyarakat dalam meningkatkan kompetensi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Program ini diharapkan menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal dan mengembangkan ekonomi kemasyarakatan.

is part of society, where the business growth it has achieved cannot be separated from the participation of the community. Especially with its status as a State-Owned Enterprise (SOE), Peruri feels that it has more responsibility to contribute to social development.

For this reason, Peruri pays great attention to social development which is manifested in various CSR activities related to the community's socio-culture.

SCOPE AND FORMULATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

As a SOE, the company is committed to continuing to participate in developing and fostering small and medium enterprises (SME), as well as helping to improve community welfare through various activities of the Partnership and Community Development Program (PKBL).

The scope and formulation of corporate social responsibility towards community social development includes programs to improve the quality of life of the community through PKBL activities, with the aim of:

1. Increase the competence of small businesses so that they can become strong and independent;
2. Providing benefits to the community in the form of assistance for victims of natural disasters, health improvement, education & health, development of public facilities/infrastructure, worship facilities, environmental preservation, BUMN Peduli and others.

TARGETS AND ACTIVITY PLANS FOR 2019

The company seeks to understand and interact with the surrounding community and assist community development in a way that is in accordance with the principles of good corporate citizenship (*Good Corporate Citizenship*).

In addition, in PKBL, the Company has well-planned targets. The Partnership Program is an assistance for the community in increasing the competence of Micro and Small Enterprises (MSEs) so that they become strong and independent businesses. This program is expected to absorb labor from the local community and develop the community economy.

Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan. Cakupan kegiatan Program Bina Lingkungan meliputi pemberian bantuan untuk bencana alam, pendidikan & pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana, sarana ibadah, pelestarian alam dan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan.

Program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan ditetapkan berdasarkan pelaksanaan *social mapping* sehingga sasaran dan kegiatan yang dilakukan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perusahaan telah menyusun rencana dan target kegiatan terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang terdiri dari beberapa program kegiatan, antara lain:

Meanwhile, the Community Development Program is a program to empower the social conditions of the community around the Company's operational areas. The scope of activities of the Community Development Program includes providing assistance for natural disasters, education & training, health improvement, development of infrastructure, religious facilities, nature conservation, and social activities for poverty alleviation.

The corporate social responsibility program for social and community development is determined based on the implementation of social mapping so that the targets and activities carried out are precise and in accordance with the needs of the community. The company has prepared plans and targets for activities related to social and community development which consist of several program activities, including:

Sektor Program Kemitraan	Aspek Program Bina Lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Industri Jasa Pertanian Peternakan Perikanan Lainnya/Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> BUMN Hadir untuk Negeri Bencana alam Pendidikan Kesehatan Sarana Ibadah Sarana dan prasarana umum Pelestarian alam
Partnership Program Sector	Environmental Development Program Aspects
<ul style="list-style-type: none"> Trade Industry Services Agriculture Livestock Fisheries Others/Cooperatives 	<ul style="list-style-type: none"> BUMN Hadir untuk Negeri Natural disasters Education Health Place of worship Public facilities and infrastructure Nature conservation

DASAR KEBIJAKAN PELAKSANAAN PKBL

Landasan hukum pelaksanaan PKBL mengacu pada peraturan dan ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017, pada 5 Juli 2017, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-895/MBU/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Pengesahan/Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 Perum Percetakan Uang Republik Indonesia.
- Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-1/I/2017, pada 24 Januari 2017, tentang Pedoman Corporate Policy Manual (CPM) dan Operation Manual pada bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

BASIC PKBL IMPLEMENTATION POLICY

The legal basis for implementing PKBL refers to the following rules and regulations:

- Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/7/2017, on July 5, 2017, concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of SOE Number PER-09/MBU/07/2015, concerning the Partnership Program and the Community Development Program for Owned Enterprises Country.
- Letter of the Minister for State-Owned Enterprises Number S-895/MBU/12/2018, on December 31, 2018, regarding the Approval and Ratification of the 2019 Corporate Work and Budget Plan (RKAP) Perum Percetakan Uang RI (Peruri).
- Decree of the Board of Directors Number KEP-1/I/2017, on January 24, 2017, regarding the Corporate Policy Manual (CPM) and Operation Manual in the Partnership and Community Development Program section.

STRUKTUR ORGANISASI PKBL

Struktur organisasi PKBL adalah sebagai berikut:



PKBL ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The PKBL organizational structure is as follows:

SEKILAS JEJAK LANGKAH PELAKSANAAN PKBL PERUSAHAAN

Program tanggung jawab sosial Peruri telah dilaksanakan melalui unit kerja PKBL sejak 1990 melalui berbagai kegiatan yang telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Hingga akhir 2019, jumlah keseluruhan UKM mitra binaan mencapai 147 mitra yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SOSIAL MASYARAKAT YANG DILAKUKAN

1. **Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Lokasi Usaha**
Perusahaan berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera, khususnya bagi masyarakat sekitar operasi. Perusahaan memberikan prioritas pengisian karyawan baru dengan menggunakan metode rekrutmen dan seleksi yang dapat mengoptimalkan waktu, mengoptimalkan pencarian karyawan yang berkompeten dan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja Perusahaan selalu diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Penggunaan tenaga kerja lokal akan menciptakan efisiensi biaya dan pengelolaan SDM Perusahaan yang efektif. Disamping itu, melalui pemanfaatan penggunaan tenaga kerja lokal, Perusahaan secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam meningkatkan perkembangan SDM nasional dan mengurangi angka pengangguran di sekitar lokasi usaha Perusahaan.

OVERVIEW OF THE FOOTPRINTS OF IMPLEMENTING THE COMPANY'S PKBL

Peruri social responsibility program has been done through PKBL work unit since 1990 with various activities that has real contribution for the society. Until the end of 2019, total foster partner of SME recorded 147 partners that scattered in various regions of Indonesia.

COMMUNITY SOCIAL DEVELOPMENT PROGRAMS AND ACTIVITIES

1. **Absorption of Local Workers and Empowerment of Communities Around the Business Location**
The company is committed to continuing to carry out community development and empowerment programs in order to achieve an independent and prosperous community, especially for the communities around the operation. The company gives priority to filling new employees by using recruitment and selection methods that can save time, optimize the search for competent employees and utilize local labor. Employment opportunities for communities around the Company's work areas are always provided in an effort to increase employment opportunities for local communities.

The use of local labor will create cost efficiency and effective HR management of the Company. In addition, through the use of local manpower, the Company indirectly contributes to improving the development of national human resources and reduces unemployment around the Company's business locations.

Dalam pelaksanaan rekrutmen, Perusahaan tidak membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan serta kondisi fisik seseorang.

2. Kebijakan dan Sosialisasi Anti Korupsi kepada Masyarakat

Tanggung jawab atas nilai-nilai Anti Korupsi tidak hanya dijalankan dalam pengelolaan organisasi untuk menopang kegiatan operasi dan bisnis semata. Perusahaan memiliki komitmen untuk membagikan nilai-nilai Anti Korupsi kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha, dengan harapan bahwa nilai kebaikan ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi pembentukan masyarakat madani.

3. Program Kemitraan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Program Kemitraan menasar pada para pelaku UKM. Adapun sektor kegiatan usaha mereka meliputi sektor perkebunan, perdagangan, industri, pertanian, jasa, peternakan, perikanan dan lainnya. Program Kemitraan merupakan program yang mendorong masyarakat pelaku usaha mikro atau Mitra Binaan untuk dapat tumbuh melalui pinjaman berbunga lunak. Konsep pinjaman dengan model bantuan ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat pelaku usaha mikro untuk dapat memperbesar skala bisnisnya, di samping juga menciptakan peluang-peluang baru atas usaha yang dijalankannya.

In conducting recruitment, the Company does not differentiate between gender, ethnicity, religion, race and class as well as a person's physical condition.

2. Anti-Corruption Policy and Outreach to the Community

The responsibility for Anti-Corruption values is not only carried out in the management of the organization to support operations and business activities alone. The company is committed to sharing Anti-Corruption values with the communities around the business location, with the expectation that these good values will become a strong foundation for the formation of civil society.

3. Partnership Program

As explained above, the Partnership Program targets SME actors. Their business activities include the plantation, trade, industry, agriculture, services, livestock, fisheries and other sectors. The Partnership Program is a program that encourages the community of micro business actors or Foster Partners to grow through soft interest loans. The concept of a loan with this assistance model is expected to be able to create a community of micro-entrepreneurs to be able to enlarge the scale of their business, as well as create new opportunities for the business they are doing.

Sektor Usaha Mitra Binaan Foster Partner Business Sector	Realisasi 2017 2017 Realization		Realisasi 2018 2018 Realization		Realisasi 2019 2019 Realization	
	Jumlah Mitra Total Partner	Rp	Jumlah Mitra Total Partner	Rp	Jumlah Mitra Total Partner	Rp
Sektor Usaha Industri Industrial Business Sector	42	1.790.000.000	86	4.550.000.000	28	1.160.000.000
Sektor Usaha Perdagangan Trading Business Sector	44	1.750.000.000	118	6.438.750.000	32	2.935.000.000
Sektor Usaha Pertanian Agriculture Business Sector	3	130.000.000	3	135.000.000	60	4.500.000.000
Sektor Usaha Peternakan Poultry Business Sector	1	40.000.000	6	200.000.000	5	690.000.000
Sektor Usaha Perkebunan Plantation Business Sector	0	-	90	4.426.250.000	2	85.000.000
Sektor Usaha Perikanan Fishery Business Sector	2	70.000.000	-	-	-	-

Sektor Usaha Mitra Binaan Foster Partner Business Sector	Realisasi 2017 2017 Realization		Realisasi 2018 2018 Realization		Realisasi 2019 2019 Realization	
	Jumlah Mitra Total Partner	Rp	Jumlah Mitra Total Partner	Rp	Jumlah Mitra Total Partner	Rp
Sektor Usaha Jasa Services Business Sector	10	350.000.000	31	1.735.000.000	17	1.830.000.000
Sektor Usaha Lainnya Other Business Sector	-	-	16	1.315.000.000	3	125.000.000
Dana Pembinaan Kemitraan Partnership Development Fund						
Jumlah Total	102	4.130.000.000	350	18.800.000.000	147	11.325.000.000

Realisasi Penyaluran Dana Pinjaman Per Sektor Provinsi

Realization of Loan Distribution by Provincial Sector
2017-2019

No.	Provinsi Province	Realisasi Tahun 2017 2017 Realization		Realisasi Tahun 2018 2018 Realization		Realisasi Tahun 2019 2019 Realization	
		Jumlah Mitra Total Partner	Rp	Jumlah Mitra Total Partner	Rp	Jumlah Mitra Total Partner	Rp
1	Banten	47	1.740.000.000	3	115.000.000		
2	DKI Jakarta	23	935.000.000	4	200.000.000		
3	Jawa Barat West Java	22	1.000.000.000	135	7.710.000.000	47	2.135.000.000
4	DI Yogyakarta	10	455.000.000	16	800.000.000	16	1.655.000.000
5	Jawa Tengah Central Java			97	5.165.000.000	12	1.035.000.000
6	Jawa Timur East Java			95	4.810.000.000	72	6.500.000.000
	Dana Pembinaan Kemitraan Partnership Development Fund						1.436.536.543
	Jumlah Total	102	4.130.000.000	350	18.800.000.000	147	12.761.536.543

4. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan, dengan cakupan kegiatan meliputi pemberian bantuan untuk bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam dan pengentasan kemiskinan.

Program pengembangan masyarakat pada dasarnya tidak membedakan daerah pelaksanaan, namun disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Hal ini menjadi tanggung jawab sosial Perusahaan dalam bentuk Program Bina Lingkungan di seluruh wilayah operasi bisnis Perusahaan.

4. Community Development Program

The Community Development Program is an empowerment program for the social conditions of the community around the Company's operational areas, with the scope of activities covering the provision of assistance for natural disasters, education and training, health improvement, public facilities and infrastructure, religious facilities, nature conservation and poverty alleviation.

Basically, community development programs do not differentiate between implementation areas, but are tailored to existing needs. This is becoming Corporate social responsibility in the form of Community Development Programs in all areas of the Company's business operations.

Penyaluran Program Bina Lingkungan Berdasarkan Bidang Bantuan

Distribution of Community Development Programs by Assistance

No.	Bentuk Bantuan Type of Assistance	Realisasi Realization	Realisasi Realization	Realisasi Realization
		2017	2018	2019
I	Berdasarkan Dana Tersedia Dari Alokasi Laba Based on available funds from profit allocation			
1	Bantuan korban bencana alam Natural disaster victims assistance	25.000.000		-
2	Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan Education and/or training assistance	127.766.300	29.073.008	-
3	Bantuan peningkatan Kesehatan Health improvement assistance	-		-
4	Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum Development assistance for public infrastructure and/or facilities	127.000.000		-
5	Bantuan sarana ibadah Religious facilities assistance	419.700.000		-
6	Bantuan pelestarian alam Nature conservation assistance	-		-
7	Bantuan pengentasan kemiskinan Poverty alleviation assistance	140.160.000		-
8	Bantuan peningkatan kapasitas mitra Partner capacity improvement assistance	-		-
	Jumlah Total	839.626.300	29.073.008	-

Penyaluran Program Bina Lingkungan Berdasarkan Bidang Bantuan
Distribution of Community Development Programs by Assistance

No.	Bentuk Bantuan Type of Assistance	Realisasi Realization	Realisasi Realization	Realisasi Realization
		2017	2018	2019
II	Berdasarkan Dari Anggaran Perusahaan yang Diperhitungkan Sebagai Biaya Based on the Company Budget which is Calculated as a Cost			
1	Bantuan korban bencana alam Aid to Natural Disaster Victims	100.000.000	200.000.000	225.000.000
2	Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan Education and/or training assistance	942.736.000	1.375.864.153	3.701.294.089
3	Bantuan peningkatan Kesehatan Health improvement assistance	215.470.650	299.165.320	382.282.000
4	Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum Development assistance for public infrastructure and/or facilities	225.000.000	656.000.000	681.360.000
5	Bantuan sarana ibadah Religious facilities assistance	1.018.100.000	2.278.000.000	1.416.500.000
6	Bantuan pelestarian alam Nature conservation assistance	93.590.000	74.546.000	115.000.000
7	Bantuan pengentasan kemiskinan Poverty alleviation assistance	485.000.000	250.000.000	463.500.000
	Jumlah Total	3.079.896.650	5.133.575.473	6.984.936.089
	Subtotal	3.919.522.950	5.162.648.481	6.984.936.089

Penyaluran Program Bina Lingkungan Berdasarkan Provinsi 2018-2019
Distribution of Community Development Programs by Province 2018-2019

No.	Provinsi Province	Realisasi Realization	Realisasi Realization	Realisasi Realization
		2017	2018	2019
I	Berdasarkan Dana Tersedia Dari Alokasi Laba Based on available funds from profit allocation			
1	Banten	25.000.000		-
2	DKI Jakarta	130.000.000		-
3	Jawa Barat West Java	228.000.000		-
4	DI Yogyakarta	76.000.000		-
5	Jawa Tengah Central Java	196.700.000		-
6	Jawa Timur East Java	30.000.000	29.073.008	-
7	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara	61.766.300		-
8	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	92.160.000		-

Penyaluran Program Bina Lingkungan Berdasarkan Provinsi 2018-2019
Distribution of Community Development Programs by Province 2018-2019

No.	Provinsi Province	Realisasi Realization	Realisasi Realization	Realisasi Realization
		2017	2018	2019
9	Kalimantan Timur East Kalimantan			-
10	Sulawesi Selatan South Sulawesi			-
11	Aceh			-
12	Riau			-
13	Jambi			-
	Jumlah Total	839.626.300	29.073.008	-

II	Berdasarkan Dari Anggaran Perusahaan yang Diperhitungkan Sebagai Biaya Based on the Company Budget which is Calculated as a Cost			
1	Banten	194.500.000	744.000.000	258.000.000
2	DKI Jakarta	322.000.000	587.000.000	812.398.000
3	Jawa Barat West Java	1.717.371.650	2.676.378.260	4.352.256.089
4	DI. Yogyakarta	25.000.000	80.000.000	115.000.000
5	Jawa Tengah Central Java	100.000.000	306.000.000	159.000.000
6	Jawa Timur East Java	118.125.000	606.197.213	179.000.000
7	Sumatera Utara North Sumatera	165.500.000	10.000.000	-
8	DI Aceh	15.000.000	10.000.000	-
9	Kalimantan Barat West Kalimantan	20.000.000	7.000.000	-
10	Kalimantan Timur East Kalimantan	360.400.000		-
11	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara	42.000.000	7.000.000	-
12	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara		50.000.000	-
13	Sulawesi Tengah Central Sulawesi		50.000.000	213.282.000,00
14	Provinsi Lain Other Province			896.000.000
	Jumlah Total	3.079.896.650	5.133.575.473	6.984.936.089
	Total Subtotal	3.919.522.950	5.162.648.481	6.984.936.089

DAMPAK KUANTITATIF ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Secara umum, kegiatan CSR yang dilakukan Perusahaan telah memberikan manfaat terhadap pembangunan berkelanjutan khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan melalui program pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Perusahaan juga secara tidak langsung telah ikut serta dalam membangun ekonomi kerakyatan dan membantu program Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia yang juga sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Disamping itu, Perusahaan secara tidak langsung telah ikut berkontribusi dalam meningkatkan perkembangan SDM nasional dan mengurangi angka pengangguran, melalui program penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Perusahaan.

SALURAN PENGADUAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Perusahaan berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan, untuk itu, Perusahaan menyediakan sarana saluran pengaduan bagi masyarakat, apabila terdapat kendala atau keluhan dalam kegiatan kemasyarakatan, yang dapat dilayangkan langsung ke Perusahaan atau melalui kontak layanan yang tertera di *website* Perusahaan atau langsung ke kantor pusat.

QUANTITATIVE IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

In general, the CSR activities carried out by the Company have provided benefits for sustainable development, especially those related to poverty alleviation through social and community development programs. The company has also indirectly participated in building a people's economy and assisting the Government's program to reduce poverty in Indonesia which is also in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

In addition, the Company has indirectly contributed to improving the development of national human resources and reducing unemployment, through the Company's local employment and community empowerment programs.

CHANNELS FOR COMPLAINTS ON THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT SECTOR

The company is committed to continuing to carry out social and community development programs, for this reason, the Company provides a means of channeling complaints for the public, if there are obstacles or complaints in community activities, which can be sent directly to the Company or through service contacts listed on the Company's website or directly to the office center.

Kantor Pusat Peruri Peruri Head Office

Jl. Palatehan Nomor 4, Blok K-V Kebayoran Baru, Jakarta, 12160, Indonesia.
Telepon: +62 21 7395000
Faksimili: +62 21 7221567
Email: contact@peruri.co.id
Situs Web: www.peruri.co.id

Hingga akhir 2019, Perusahaan tidak mendapati adanya pengaduan terkait keluhan masyarakat atas kegiatan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh Perusahaan yang berdampak cukup signifikan dan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.

Until the end of 2019, the Company did not find any complaints related to public complaints regarding community development activities carried out by the Company which had a significant impact and affected the Company's business continuity.

BIAYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Jumlah penyaluran program tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang telah disalurkan oleh Perusahaan di sepanjang 2019, adalah sebagai berikut:

SOCIAL RESPONSIBILITY COSTS FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

The amount of distribution of social responsibility programs in the field of social and community development that has been channeled by the Company throughout 2019, was as follows:

Perihal Subjects	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2018-2019 (%)
Program Kemitraan Fostering Program	18.800.000.000	11.325.000.000	(39,76)
Dana Pembinaan Kemitraan (Hibah) Partnership Development Fund (Grant)	405.670.227	1.436.536.543	254,11
Program Bina Lingkungan Environment Development Program	5.162.648.481	6.984.936.089	35,30
Jumlah Total	24.368.318.708	19.746.472.632	(18,97)





w	Close	Chg	Chg (%)	Volume
.69	2801.3	+3.02	+0.11	1,758.00M
.88	1687.08	0.00	0.00	N/A
9.3	12540.7	-47.7	+0.38	82.96M
0.1	25049.4	-87.50	+0.38	255.52M
35	2888.95	+0.03	+0.03	413.25M
55	592.17M	-0.14	-0.14	592.17M
	N/A	0.36	0.36	N/A

08

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT



24%

- 16,203+
- 7,410+
- 4,991+
- 2,007+



**PERUM PERURI DAN ENTITAS ANAKNYA /
*AND ITS SUBSIDIARIES***

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

*As of December 31, 2019 and for the year then ended
with Independent Auditors' Report*

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2019
PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK
INDONESIA DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2019
PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK
INDONESIA AND SUBSIDIARIES**

Nomor : 118 /II/2020

Number : 118/II/2020

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama : Dwina Septiani Wijaya
Alamat Kantor : Jalan Palatehan No.4 Blok K-V Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Telepon : 021-7395000
Jabatan : Direktur Utama

1. *Name : Dwina Septiani Wijaya
Office Address : Jalan Palatehan No.4 Blok K-V Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Telephone : 021-7395000
Title : President Director*

2. Nama : Nungki Indraty
Alamat Kantor : Jalan Palatehan No.4 Blok K-V Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Telepon : 021-7395000
Jabatan : Direktur Keuangan

2. *Name : Nungki Indraty
Office Address : Jalan Palatehan No.4 Blok K-V Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Telephone : 021-7395000
Title : Finance Director*

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar;

1. *We are responsible for the preparation and presentation of Perum Percetakan Uang Republik Indonesia and subsidiaries' consolidated financial statements;*
2. *Perum Percetakan Uang Republik Indonesia and subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the Perum Percetakan Uang Republik Indonesia and subsidiaries' consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567
E. contact@peruri.co.id W. www.peruri.co.id

Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

b. Laporan keuangan konsolidasian Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

b. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia and subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan entitas anak.

4. We are responsible for Perum Percetakan Uang Republik Indonesia and subsidiaries' internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Directors*


Dwina Septiani Wijaya
Direktur Utama/
President Director

Nungki Indraty
Direktur Keuangan/
Finance Director

Jakarta, 17 Februari / *February 17, 2020*

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
T. (021) 739 5000 F. (021) 722 1567

E. contact@peruri.co.id W. www.peruri.co.id
Kawasan Produksi : Desa Parung Mulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361



DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

○ Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 <i>Consolidated Statements of Financial Position as of December 31, 2019</i>	1
○ Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 <i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the year then ended December 31, 2019</i>	3
○ Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 <i>Consolidated Statements of Changes In Equity for the year then ended December 31, 2019</i>	4
○ Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 <i>Consolidated Statements of Cash Flows for the year then ended December 31, 2019</i>	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN <i>NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS</i>	6 - 68
LAMPIRAN <i>APPENDICES</i>	1-4

Laporan Auditor Independen

Laporan No.: 00016/2.0768/AU.1/04/0048-1/1/III/2020

Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia ("Perum Peruri") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri atas laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan kepatuhan terhadap kontrak perjanjian, undang-undang dan peraturan sesuai kegiatan usaha.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No.: 00016/2.0768/AU.1/04/0048-1/1/III/2020

The Owner, Board of Supervisory and Directors
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia ("Perum Peruri") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and its compliance to contractual agreements, laws and regulations applicable to the businesses.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Financial Auditing Standard issued by Supreme Audit Body of the Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free of material misstatement.

Laporan No.: 00016/2.0768/AU.1/04/0048-1/1/II/2020
(lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu audit juga mencakup pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap kontrak, persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Peruri dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perum Peruri dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan.

Report No.: 00016/2.0768/AU.1/04/0048-1/1/II/2020
(continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amount and disclosure in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. The audit also includes test of compliance with contracts, terms of grants and applicable certain articles of law and regulation and internal controls.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perum Peruri and its subsidiaries as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

Our audits of the accompanying consolidated financial statements of Perum Peruri and its subsidiaries as of December 31, 2019 and for the year then ended, were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole.

Laporan No.: 00016/2.0768/AU.1/04/0048-1/1/II/2020
(lanjutan)

Informasi keuangan Perum Peruri (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan kebijakan akuntansi mengenai dasar penyajian tersendiri entitas induk dan investasi pada entitas anak dan asosiasi (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan keuangan konsolidasian Perum Peruri dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi.

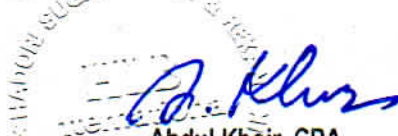
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada Manajemen Perum Peruri masing-masing dalam laporan kami No. 004/LK-PU/PERURI/II/2020 dan No. 005/LK-PI/PERURI/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.

Report No.: 00016/2.0768/AU.1/04/0048-1/1/II/2020
(continued)

The accompanying financial information of Perum Peruri (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2019, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and accounting policies related to basis of preparation of the separate financial statements of the parent and investments in subsidiaries and associates (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the above-mentioned consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the above mentioned consolidated financial statements. The Parent entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole

The consolidated financial statements of Perum Peruri and its subsidiaries for the year ended December 31, 2018, were audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion.

Compliance with applicable laws and regulations and internal control are reported separately to the Company's Management in our reports No. No. 004/LK-PU/PERURI/II/2020 and No. 005/LK-PI/PERURI/II/2020 dated February 17, 2020.



Abdul Khoir, CPA

Izin Akuntan Publik / Public Accountant License AP.0048

17 Februari 2020 / February 17, 2020

**PERUM PERCETAKAN UANG
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	<i>Catatan/ Notes</i>	2018	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	1.924.761.449.588	2e, 3, 29a, 29b	837.083.007.783	Cash and cash equivalents
Piutang usaha				Account receivables
(Setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai penyisihan piutang sebesar Rp4.115.479.018 dan Rp3.581.913.509 pada 31 Desember 2019 dan 2018)				(Net of accumulated allowance for impairment of Rp4,115,479,018 and Rp3,581,913,509 as of December 31, 2019 and 2018)
Pihak berelasi	12.134.066.040	2f, 4, 29c	18.606.961.720	Related parties
Pihak ketiga	41.319.351.440	4	262.037.757.280	Third parties
Piutang lain - lain				Other receivables
(Setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai penyisihan piutang sebesar Rp7.418.251.127 dan Rp4.989.687.506 pada 31 Desember 2019 dan 2018)				(Net of accumulated allowance for impairment of Rp7,418,251,127 and Rp4,989,687,506 as of December 31, 2019 and 2018)
Pihak berelasi	16.327.149.985	2f, 5, 29d	23.486.493.413	Related parties
Pihak ketiga	11.244.956.135	5	13.184.916.163	Third parties
Persediaan				Inventories
(Setelah dikurangi akumulasi penyisihan persediaan sebesar Rp14.965.519.355 dan Rp17.336.006.429 pada 31 Desember 2019 dan 2018)				(Net of accumulated allowance for inventory of Rp14,965,519,355 and Rp17,336,006,429 as of December 31, 2019 and 2018)
	364.530.521.353	2g, 6	548.144.350.893	
Pajak dibayar dimuka	44.487.453.043	2l, 7a	104.520.601.371	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	208.377.823.860	8	114.721.510.318	Advances and prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar	<u>2.623.182.771.444</u>		<u>1.921.785.598.941</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON- CURRENT ASSETS
Investasi pada ventura bersama	138.474.780.921	2h, 9	97.735.918.260	Investment in joint venture
Surat berharga	40.000.000.000	2g, 10	-	Marketable securities
Aset tetap				Fixed assets
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.383.878.219.142 dan Rp3.166.772.193.059 pada 31 Desember 2019 dan 2018)				(Net of accumulated depreciation of Rp3,383,878,219,142 and Rp3,166,772,193,059 as of December 31, 2019 and 2018)
	2.946.077.638.205	2i, 11	2.719.933.946.352	
Aset pajak tangguhan	27.706.959.111	7d	19.225.471.208	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya - bersih	290.119.370.615	2j, 12	296.622.715.412	Other non current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>3.442.378.748.852</u>		<u>3.133.518.051.232</u>	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET	<u>6.065.561.520.296</u>		<u>5.055.303.650.173</u>	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole

**PERUM PERCETAKAN UANG
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	<i>Catatan/ Notes</i>	2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS LANCAR				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman Bank jangka panjang - Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	307.716.481.473	17, 29f	290.636.646.228	<i>Long term Bank loans - Current maturities</i>
Utang usaha				<i>Trade payables</i>
Pihak berelasi	109.941.983.565	2f, 13	140.184.945.305	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	303.589.816.279	13	96.611.044.743	<i>Third parties</i>
Utang pajak	121.632.440.119	2l, 7b	38.645.304.658	<i>Taxes payables</i>
Beban akrual	132.961.669.096	14	69.556.708.174	<i>Accrued expenses</i>
Uang muka pelanggan	32.654.602.445	15	7.118.396.387	<i>Advances from customers</i>
Liabilitas lancar lainnya	480.735.463.444	16	329.662.909.248	<i>Other current liabilities</i>
Jumlah Liabilitas Lancar	<u>1.489.232.456.421</u>		<u>972.415.954.743</u>	<i>Total Current Liabilities</i>
LIABILITAS JANGKA PANJANG				LONG - TERMS LIABILITIES
Pinjaman Bank jangka panjang - Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.169.551.148.491	17, 29f	1.333.344.473.791	<i>Long term Bank loans - Net of current maturities</i>
Liabilitas imbalan kerja	333.418.469.793	2m, 18	219.216.209.702	<i>Employment benefits obligation</i>
Liabilitas jangka panjang lainnya	6.625.000.000	19	16.192.775.424	<i>Other long-terms liabilities</i>
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>1.509.594.618.284</u>		<u>1.568.753.458.917</u>	<i>Total Long-terms Liabilities</i>
Jumlah Liabilitas	<u>2.998.827.074.705</u>		<u>2.541.169.413.660</u>	<i>Total Liabilities</i>
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham	363.573.454.896	20	363.573.454.896	<i>Capital stock</i>
Tambahan modal disetor	(64.058.953.996)		(64.058.953.996)	<i>Additional paid in capital</i>
Komponen ekuitas lainnya	(107.362.416.418)	21	(34.942.418.489)	<i>Other components equity</i>
Saldo Laba				<i>Retained earnings</i>
Telah ditentukan penggunaannya	1.927.106.922.491		1.706.966.274.313	<i>Appropriated</i>
Belum ditentukan penggunaannya	933.683.166.792		531.628.316.705	<i>Unappropriated</i>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas	<u>3.052.942.173.765</u>		<u>2.503.166.673.429</u>	<i>Equity attributable to the owners of the Entity</i>
Kepentingan nonpengendali	13.792.271.826		10.967.563.084	<i>Non-controlling interest</i>
Jumlah Ekuitas	<u>3.066.734.445.591</u>		<u>2.514.134.236.513</u>	<i>Total Equity</i>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>6.065.561.520.296</u>		<u>5.055.303.650.173</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole

**PERUM PERCETAKAN UANG
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT & LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended December 31, 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENJUALAN	3.884.671.877.061	2k, 23	3.196.517.230.189	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(2.713.047.542.821)	2k, 24	(2.130.611.368.483)	COST OF GOODS SOLD
LABA (RUGI) KOTOR	1.171.624.334.240		1.065.905.861.706	GAIN (LOSS) GROSS
Pendapatan lainnya	73.357.097.693	28a	59.093.905.824	<i>Others income</i>
Pendapatan bunga	43.528.707.319	27a	23.753.496.297	<i>Interest income</i>
Bagian laba bersih ventura bersama	43.138.862.661	2h, 9	24.090.970.044	<i>Share in net income of joint venture</i>
Laba penjualan aset	383.775.090.939		398.178.223	<i>Gain on assets disposal</i>
Beban umum dan administrasi	(615.565.203.438)	2k, 25	(557.000.385.100)	<i>General and Administrative Expenses</i>
Beban bunga	(142.710.871.209)	27b, 29g	(137.612.364.185)	<i>Interest expenses</i>
Beban penjualan dan pemasaran	(47.911.421.448)	2k, 26	(53.171.871.510)	<i>Selling and marketing expenses</i>
Beban pajak	(14.330.784.202)		(7.992.227.209)	<i>Tax expenses</i>
Beban lain - lain	(14.645.627.098)	28b	(9.518.673.630)	<i>Other expenses</i>
Jumlah bersih	(291.364.148.783)		(657.958.971.246)	Total - net
LABA SEBELUM PAJAK	880.260.185.457		407.946.890.460	PROFIT BEFORE INCOME TAX
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK				INCOME TAX (EXPENSES)
- Pajak kini	(139.261.569.772)	7c	(121.290.910.763)	<i>Current tax -</i>
- Pajak tangguhan	(15.692.367.368)	7d	879.382.667	<i>Deferred tax -</i>
Jumlah Pendapatan (Beban) Pajak	(154.953.937.140)		(120.411.528.096)	Total Income Tax (Expenses)
LABA BERSIH	725.306.248.317		287.535.362.364	NET INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Bagian penghasilan komprehensif lain				<i>Share in other comprehensive income of</i>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				<i>Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss:</i>
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(96.695.421.079)		(8.004.028.056)	<i>Remeasurement of defined benefit obligation</i>
Efek pajak penghasilan	24.173.855.270	7d	2.001.007.014	<i>Income tax effect</i>
	(72.521.565.809)		(6.003.021.042)	
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	652.784.682.508		281.532.341.322	TOTAL PROFIT (LOSS) COMPREHENSIVE INCOME
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :				PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO :
Entitas Induk	722.379.971.695		285.040.648.178	<i>Owners of the Company</i>
Kepentingan nonpengendali	2.926.276.622		2.494.714.186	<i>Non-controlling interest</i>
	725.306.248.317		287.535.362.364	
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :				COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO :
Entitas Induk	649.959.973.766		278.613.873.005	<i>Owners of the Company</i>
Kepentingan nonpengendali	2.824.708.742		2.918.468.317	<i>Non-controlling interest</i>
	652.784.682.508		281.532.341.322	

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the financial statements taken as a

PERUM PERCETAKAN UANG
 REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM PERCETAKAN UANG
 REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
 For the year ended December 31, 2019
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Equity attributable to the owner of the parent entity						Keperluan nonpengendali / Non-controlling interest	Jumlah ekuitas / Total equity		
	Modal / Capital	Tambahan modal disetor / Additional paid in capital	Komponen ekuitas lainnya / Other components of equity	Telah ditentukan penggunaannya / Appropriated	Saldo laba / Retained earnings	Belum ditentukan penggunaannya / Unappropriated				Jumlah / Total
Saldo 1 Januari 2018	363.573.454.896	(64.058.953.996)	(28.871.112.301)	1.484.045.760.748	222.920.513.565	368.535.850.659	2.346.145.513.571	10.936.334.881	2.357.081.848.452	Balance January, 1 2018
Penyesuaian saldo - Keperluan non pengendali	-	-	-	-	-	5.655.593.041	5.655.593.041	(2.204.978.890)	3.450.614.151	Adjustment to - Non controlling interest
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	278.613.873.005	278.613.873.005	2.918.468.317	281.532.341.322	Comprehensive income for the year
Komponen ekuitas lainnya	-	-	(6.071.306.188)	-	-	-	(6.071.306.188)	-	(6.071.306.188)	Other components of equity
Dividen	-	-	-	-	-	(121.177.000.000)	(121.177.000.000)	(682.261.224)	(121.859.261.224)	Dividends
Saldo 31 Desember 2018	363.573.454.896	(64.058.953.996)	(34.942.418.489)	1.484.045.760.748	222.920.513.565	531.628.316.705	2.503.166.673.429	10.967.563.084	2.514.134.236.513	Balance December 31, 2018
Perubahan ekuitas entitas anak	-	-	-	-	-	(1.487.334.753)	(1.487.334.753)	-	(1.487.334.753)	Change in Equity of Subsidiaries
Penambahan cadangan	-	-	-	220.140.648.178	-	(220.140.648.178)	-	-	-	Additional reserved
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	722.379.971.695	722.379.971.695	2.926.276.622	725.306.248.317	Comprehensive income for the year
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	-	-	(72.419.997.929)	-	-	(33.797.138.677)	(106.217.136.606)	(101.567.880)	(106.318.704.486)	Remeasurement of defined employee benefits
Dividen	-	-	-	-	-	(64.900.000.000)	(64.900.000.000)	-	(64.900.000.000)	Dividends
Saldo 31 Desember 2019	363.573.454.896	(64.058.953.996)	(107.362.416.418)	1.704.186.408.926	222.920.513.565	933.683.166.792	3.052.942.173.765	13.792.271.826	3.066.734.445.591	Balance December 31, 2019

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole

**PERUM PERCETAKAN UANG
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG
REPUBLIK INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS**
For the year ended December 31, 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	4.314.385.641.227	3.417.379.015.117	<i>Customer cash receipt</i>
Pengeluaran kas kepada pihak ketiga dan karyawan	(2.649.864.287.430)	(2.635.990.607.803)	<i>Third parties and employee expenditure</i>
Penerimaan kas dari bunga deposito dan jasa giro	39.014.182.667	23.378.679.099	<i>Cash receipt from deposits interest and demand services</i>
Pengeluaran kas untuk pembayaran pajak	(416.768.374.349)	(427.946.198.948)	<i>Tax expenditure</i>
Pengeluaran kas lain-lain	(131.195.876.977)	(24.141.910.017)	<i>Other cash expenditure</i>
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1.155.571.285.138	352.678.977.449	Net Cash Provided by (Used For) Operating Activity
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pengeluaran kas pencairan deposito	(30.884.051.655)	(13.664.822.151)	<i>Deposit cash disbursement</i>
Penerimaan kas dividen	2.400.000.000	16.680.000.000	<i>Cash receipts dividend</i>
Pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap	(207.147.315.901)	(100.999.499.457)	<i>Cash expenditures for fixed assets acquisition</i>
Penerimaan kas dari penjualan aset tetap	652.884.969.025	-	<i>Cash receipts from aset disposal</i>
Pengeluaran kas untuk pembelian obligasi	(40.000.000.000)	-	<i>Cash expenditures for Obligation</i>
Pengeluaran kas lain-lain	(1.640.018.406)	(603.729.442)	<i>Other cash expenditure</i>
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	375.613.583.063	(98.588.051.050)	Net Cash Provided by (Used For) Investing Activity
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FUNDING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pinjaman	38.189.550.027	51.966.441.514	<i>Cash receipt from loans</i>
Pengeluaran kas untuk pembayaran dividen	(65.887.890.026)	(121.859.261.224)	<i>Cash expenditures from dividend payment</i>
Pengeluaran kas untuk pembayaran pokok pinjaman	(274.868.908.646)	(216.705.252.575)	<i>Cash expenditure for principal payment</i>
Pengeluaran kas untuk pembayaran bunga pinjaman	(147.339.177.751)	(131.725.794.994)	<i>Cash expenditure for loan interest payments</i>
Penerimaan (pengeluaran) kas lain-lain	6.400.000.000	(20.431.808.417)	<i>Other cash receipt (expenditure)</i>
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(443.506.426.396)	(438.755.675.696)	Net Cash Provided by (Used For) Financing Activity
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	1.087.678.441.805	(184.664.749.297)	INCREASE (DECREASE) OF NET CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	837.083.007.783	1.021.747.757.080	CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	1.924.761.449.588	837.083.007.783	CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum Perum Percetakan Uang Republik Indonesia

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) didirikan pada tanggal 15 September 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1971, lalu diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 1982, PP Nomor 34 Tahun 2000, PP Nomor 32 Tahun 2006, dan terakhir dengan PP Nomor 6 Tahun 2019.

Maksud dan tujuan Perum Peruri adalah melaksanakan dan menunjang kebijakan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang berhubungan dengan pencetakan Mata Uang Rupiah, pembuatan dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan, berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Kegiatan usaha utama yang ditetapkan oleh Pemerintah RI sesuai dengan PP No. 6 tahun 2019 adalah:

- a) Mencetak Mata Uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan Bank Indonesia;
- b) Membuat dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Dokumen Keimigrasian dan Benda Meterai guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan instansi yang berwenang;
- c) Membuat dokumen lain untuk negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Pita Cukai dan Dokumen Pertanahan;
- d) Membuat dokumen lainnya untuk negara yang memiliki fitur sekuriti dan barang cetakan logam non uang;
- e) Mencetak mata uang dan membuat dokumen negara lain yang memiliki fitur sekuriti atas permintaan negara yang bersangkutan, sepanjang telah terpenuhinya pencetakan Mata Uang Rupiah;
- f) Menyediakan jasa yang mempunyai fitur sekuriti yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan;
- g) Pabrikasi kertas uang, kertas sekuriti, dan tinta sekuriti; dan
- h) Jasa digital sekuriti.

Kantor pusat Perum Peruri terletak di Jalan Palatehan No. 4, Jakarta Selatan. Sedangkan lokasi pabrik Perum Peruri terletak di Karawang, Jawa Barat.

b. Karyawan, Dewan Pengawas dan Direksi

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perum Peruri memiliki karyawan tetap masing-masing sejumlah 2.971 orang dan 2.710 orang.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information of Perum Percetakan Uang Republik Indonesia

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia ("Perum Peruri") was established on 15 September 1971 based on Government Regulation (PP) Number 60 of 1971, then amended by PP Number 25 of 1982, PP Number 34 of 2000, PP Number 32 of 2006, and finally with PP Number 6 of 2019.

Perum Peruri's objective is generally to perform and support Government policy programs in the economic sector and national development by organizing effort aimed at public benefit in the form of provision of goods and or services associated with the printing of Rupiah, document creation countries that have security features and optimal use of resources of the Company, based on the principles of good corporate governance.

PP No. 6 year 2019 defines that Perum Peruri is established with the following main activities:

- a) Printing Rupiah to meet the needs according to Bank Indonesia's request;*
- b) Make a state document that has security features in the form of Immigration Documents and Seals to meet the needs according to the request of the authorized agency;*
- c) Make other documents for countries that have security features in the form of Excise Stamps and Land Documents;*
- d) Making other documents for countries that have security features and non-money metal printed goods;*
- e) Printing currencies and making documents of other countries that have security features at the request of the country concerned, insofar as the printing of Rupiah is fulfilled;*
- f) Providing services that have security features related to the aims and objectives and business activities of the Company;*
- g) Fabrication of banknotes, security paper, and security ink; and*
- h) Digital security services.*

Head office is located at Jalan Palatehan No. 4, South Jakarta. While the factory located in Karawang, West Java.

b. Employees, Supervisory Board and Board of Directors

As of December 31, 2019 and 2018 Perum Peruri employed 2,971 and 2,710 permanent employees, respectively.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Karyawan, Dewan Pengawas dan Direksi (Lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Perum Peruri pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-93/MBU/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan No. SK-30/MBU/01/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan No. SK-124/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

31 Desember / December 31, 2019		
Ketua	Rizal Affandi Lukman	Chairman
Anggota	Muhammad Yusuf Ateh	Member
Anggota	Dwi Pranoto	Member
Anggota	Sutanto	Member
Anggota	Djoko Hendratto	Member

31 Desember / December 31, 2018		
Ketua	Rizal Affandi Lukman	Chairman
Anggota	Erna Wijayanti	Member
Anggota	Hasiholan Siahaan	Member
Anggota	Suroso Hadi Siswoyo	Member
Anggota	Ari Wahyuni *)	Member

*) Masa tugas sebagai Dewan Pengawas telah berakhir pada tanggal 7 November 2018

*) The period as Supervisory Board has been ended on November 7, 2018.

Susunan Direksi Perum Peruri pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK 209/MBU/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 dan No. SK- 247/MBU/11/2017 tanggal 20 November 2017, adalah sebagai berikut:

The composition of Perum Peruri Board of Directors as of December 31, 2019 and 2018 based on Decision Letters of Minister of SOEs No. SK-209/MBU/07/2018 dated July 18, 2018 and No. SK- 247/MBU/11/2017 dated November 20, 2017, were as follows:

31 Desember / December 31, 2019		
Direktur Utama	Dwina Septiani Wijaya	President Director
Direktur Operasi	Saiful Bahri	Operations Director
Direktur Pengembangan Usaha	Fajar Rizki	Business Development Director
Direktur Keuangan	Nungki Indraty	Finance Director
Direktur SDM dan Umum	Winarsih Budiriani	Human Resource & General Director

31 Desember / December 31, 2018		
Direktur Utama	Dwina Septiani Wijaya	President Director
Direktur Operasi	Saiful Bahri	Operations Director
Direktur Pengembangan Usaha	Fajar Rizki	Business Development Director
Direktur Keuangan	Nungki Indraty	Finance Director
Direktur SDM dan Umum	Winarsih Budiriani	Human Resource & General Director

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

c. Consolidated Subsidiaries

Penyertaan Langsung/ Direct Investment	Jenis Usaha/ Nature Of Business	2019			2018		
		Kepemilikan/ Ownership	Pendapatan/ Sales	Jumlah Aset/ Total Assets	Kepemilikan/ Ownership	Pendapatan/ Sales	Jumlah Aset/ Total Assets
		%	Rp	Rp	%	Rp	Rp
PT Peruri Wira Timur	Percetakan Dokumen Security/ Security Document Printing	67,00	62.769.059.240	52.363.954.537	67,00	60.688.216.309	47.381.593.887

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

Penyertaan Langsung/ Direct Investment	Jenis Usaha/ Nature Of Business	2019			2018		
		Kepemilikan/ Ownership	Pendapatan/ Sales	Jumlah Aset/ Total Assets	Kepemilikan/ Ownership	Pendapatan/ Sales	Jumlah Aset/ Total Assets
		%	Rp	Rp	%	Rp	Rp
PT Peruri Digital Security *)	Perdagangan bahan-bahan kertas, Jasa Security Digital dan Solusi Teknologi Informasi/ Material Trading, Digital Security Service and Information Technology Solution	99,78	192.971.541.707	207.382.278.221	99,78	180.717.641.470	199.378.265.651
PT Kertas Padalarang	Produksi Pulp dan Kertas/ Pulp and Paper Production	93,23	152.026.506.646	116.980.678.571	92,59	102.695.185.878	96.815.612.763
PT Peruri Properti	Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pengangkutan, Teknik, Percetakan dan Jasa/ Trading, Building, Industrial, Transportation, Engineering, Printing and Services	99,50	105.330.895.839	76.746.071.582	99,00	67.707.233.684	50.860.151.607

*) Laporan konsolidasian tahun 2019 dan 2018 PT Peruri Digital Security dan Entitas anak (PT Cardsindo Tiga Perkasa)

*) Consolidated statement for the year 2019 and 2018 PT Peruri Digital Security and it's subsidiaries (PT Cardsindo Tiga Perkasa)

PT Peruri Wira Timur ("PWT")

Pada tanggal 19 Januari 2011, Perum Peruri dan PT Panca Wira Usaha Jawa Timur ("PWU") telah menandatangani perjanjian atas pendirian PWT sebagai perubahan dari KSO Peruri Divisi Timur. Akta pendirian PWT telah dibuat di hadapan Notaris M. Nova Faisal, SH., M.Kn., No. 06 tanggal 5 April 2011 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan No. AHU-17296.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 6 April 2011. Berdasarkan akta pendirian tersebut, kedua belah pihak telah sepakat dan setuju mengikatkan diri untuk mendirikan perseroan terbatas di bidang percetakan dokumen sekuriti sebagai perubahan bentuk KSO Peruri Divisi Timur ("KSO-PDT") menjadi perseroan terbatas.

Modal dasar PWT ditetapkan sebesar Rp69.124.220.000 yang terbagi atas 69.124.220 saham dengan nilai nominal per lembar sebesar Rp1.000. Persentase kepemilikan Perum Peruri sebesar 67% dan PWU sebesar 33%.

Laporan keuangan PWT per 31 Desember 2019 dan 2018 diaudit oleh KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini tanpa modifikasi.

PT Peruri Wira Timur ("PWT")

On January 19, 2011, Perum Peruri and PT Panca Wira Usaha Jawa Timur ("PWU") has signed an agreement for the establishment of PWT as a transformation from KSO Peruri Divisi Timur. The PWT's deed of establishment has been put forth into notarial deed by notary M. Nova Faisal, SH., M.Kn., No. 06 dated April 5, 2011 and were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. AHU-17296.AH.01.01. Tahun 2011, dated April 6, 2011. Based on the deed, both parties have agreed and committed to bound themselves to establish a limited liability company in security printing documents as a transformation of KSO-PDT to be a limited liability company.

PWT's authorized capital is Rp69,124,220,000 which consist of 69,124,220 shares with par value of Rp1,000. The percentage of ownership of Perum Peruri is 67% and PWU is 33%.

The financial report of PWT as of December 31, 2019 and 2018 are audited by KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners with unmodified opinion.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

**c. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)
PT Peruri Digital Security ("PDS")**

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-437/MBU/2011 tanggal 27 Juli 2011, Menteri BUMN telah menyetujui pendirian PDS oleh Perum Peruri dan PT Pundi Puri Sejahtera. Entitas anak ini bergerak di bidang *certification authority* dan *smart card*. Akta pendirian PDS telah dibuat di hadapan Notaris Henny Singgih, SH., No. 22 tanggal 15 September 2011 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan No. AHU- 45677.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 19 September 2011. Akta anggaran dasar Entitas anak kemudian diubah dengan Akta No. 6 tanggal 20 November 2012 dari Notaris Agung Setiawan, SH. Modal dasar PDS ditetapkan sebesar Rp80.000.000.000 yang terbagi atas 80.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar sebesar Rp1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor oleh Perum Peruri sebesar Rp19.800.000.000 dan PT Pundi Puri Sejahtera sebesar Rp200.000.000.

Pada tanggal 21 Agustus 2014 diselenggarakan circular resolution yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham PDS sehubungan dengan penambahan penyertaan modal pada PDS sebesar Rp34.067.000.000 oleh Perum Peruri. Penambahan penyertaan modal pada PDS ini telah disetujui oleh Menteri BUMN melalui surat No. S-432/MBU/2014 tanggal 22 Juli 2014 dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Direksi PT Pundi Puri Sejahtera melalui surat No. 305/PPS/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 47 tanggal 26 Maret 2018, Notaris B. Andy Widyanto, SH, PDS melakukan pembelian saham PT Cardsindo Tiga Perkasa sebanyak 12.705.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp12.705.000.000 atau kepemilikan sebesar 55%.

Total modal disetor PDS setelah transaksi penambahan penyertaan modal adalah Rp89.367.000.000 dengan persentase kepemilikan Perum Peruri sebesar 99,78% dan PT Pundi Puri Sejahtera sebesar 0,22%.

Laporan Keuangan PDS per 31 Desember 2019 diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian. Sedangkan Laporan Keuangan PDS per 31 Desember 2018 diaudit oleh KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan dengan opini tanpa modifikasian.

1. GENERAL (Continued)

**c. Consolidated Subsidiaries (Continued)
PT Peruri Digital Security ("PDS")**

Based on Minister of SOEs letter's No. S-437/MBU/2011, dated July 27, 2011, the Minister of SOEs has approved the establishment of PDS by Perum Peruri and PT Pundi Puri Sejahtera. This Subsidiary is engaged in certification authority and smart card. The PDS's deed of establishment was made by Notary Henny Singgih, SH., No. 22 dated September 15, 2011 and were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. AHU-45677.AH.01.01 tahun 2011, dated September 19, 2011. The Subsidiarie's Articles of Association have been amended as stated in Deed No. 6 dated November 20, 2012 of Notary Agung Setiawan, SH. PDS's authorized capital is Rp80,000,000,000 is which divided into 80,000 shares with par value of Rp1,000,000 per share. The authorized capital issued and fully paid by Perum Peruri and PT Pundi Puri Sejahtera are Rp19,800,000,000 and Rp200,000,000, respectively.

On August 21, 2014 there was circular resolution signed by all shareholders of PDS in relation to additional capital injection amounting to Rp34,067,000,000 by Perum Peruri. This additional capital injection transaction was previously approved by the Minister of State-Owned-Enterprises in his letter No. S-432/MBU/2014 dated July 22, 2014 and approved by the Board of Commissioner and Directors of PT Pundi Puri Sejahtera in their letter No. 305/PPS/VIII/2014 dated August 18, 2014.

Based on the Deed of Decision of Shareholders' Decree No. 47 dated March, 26 2018, Notary B. Andy Widyanto, SH, PDS purchased 12,705,000 shares of PT Cardsindo Tiga Perkasa in the nominal amount of Rp12,705,000,000 or ownership of 55%.

PDS's fully paid capital after the injection transaction is Rp89,367,000,000 with percentage of ownership of Perum Peruri of 99.78% and PT Pundi Puri Sejahtera of 0.22%.

PDS's financial report as of December 31, 2019 is audited by KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan with unmodified opinion. While the PDS's Financial Report as of December 31, 2018 is audited by KAP Wisnu Karsono Soewito & Partners with unmodified opinion.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

PT Kertas Padalarang ("PTKP")

Pada tanggal 19 November 2008, Perum Peruri, PT Kertas Padalarang ("PTKP") dan Menteri BUMN menyelenggarakan pertemuan sehubungan dengan upaya penyelamatan PTKP dan akuisisi PTKP oleh Perum Peruri, yang sahamnya saat itu dimiliki oleh PT Kertas Kraft Aceh (Persero) ("KKA"), PT Pengelola Investama Mandiri dan Negara RI. Akuisisi saham PTKP akan dilakukan setelah dilaksanakan *due diligence* oleh konsultan independen dan skema akuisisi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri BUMN. Untuk mengatasi kesulitan likuiditas PTKP jangka pendek, Perum Peruri diminta untuk membantu pendanaan kebutuhan modal kerja (dana talangan) yang kemudian akan dikonversi menjadi kepemilikan saham di PTKP.

Pada tanggal 15 Juni 2009, PTKP dan Perum Peruri menandatangani perjanjian No. SP-308/VI/2009, sebagai tindak lanjut dari surat dari Menteri BUMN No. S-368/MBU/2009 tanggal 1 Juni 2009, yang mengatur penyediaan dana oleh Perum Peruri untuk kebutuhan modal kerja PTKP sebesar Rp34.689.259.201 dan dana tersebut akan dikompensasikan dengan hasil penjualan kertas banderol kepada Perum Peruri atau dikonversikan menjadi penyertaan saham Perum Peruri di PTKP sebagaimana yang telah disetujui oleh pemilik modal dalam pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") tahun 2009. Pada tanggal 30 Oktober 2009, dana tersebut telah dibayarkan oleh Perum Peruri.

Di samping itu, sesuai dengan perjanjian antara Perum Peruri dengan PT Kertas Kraft Aceh (Persero) ("KKA") No. SP611/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009, Perum Peruri melakukan pembelian 8.167 lembar saham (13,32%) PTKP yang dimiliki oleh KKA dengan harga saham sementara sebesar Rp500.000 per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp4.083.500.000, sambil menunggu harga saham berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh lembaga penilai independen.

Perum Peruri telah membayar uang muka atas pembelian saham PTKP yang dimiliki oleh KKA pada tanggal 30 Oktober 2009. Pada tanggal 31 Desember 2010, telah disepakati harga saham PTKP sebesar Rp239.699 per lembar saham sesuai dengan laporan penilai independen. Kelebihan uang muka pembelian saham PTKP dari KKA sebesar Rp2.125.878.267 telah ditagihkan kepada KKA dan dicatat sebagai piutang lain-lain (Catatan 5 dan 29.d).

Selanjutnya berdasarkan surat persetujuan dari Menteri BUMN No. S-502/MBU/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal persetujuan pemberian dana talangan modal kerja ke PTKP, selama tahun 2010 Perum Peruri telah menyerahkan dana kepada PTKP sebesar Rp28.000.000.000 dan diperhitungkan dalam akuisisi saham PTKP oleh Perum Peruri.

1. GENERAL (Continued)

c. Consolidated Subsidiaries (Continued)

PT Kertas Padalarang ("PTKP")

On November 19, 2008, Perum Peruri, PT Kertas Padalarang ("PTKP") and the Minister of SOEs held a meeting to discuss the rescue and acquisition of PTKP by Perum Peruri, which was at that time the shares of PTKP were owned by PT Kertas Kraft Aceh (Persero) ("KKA"), PT Pengelola Investama Mandiri and the Republic of Indonesia. The acquisition of PTKP's shares would be conducted after a *due diligence* review by independent consultant and furthermore the acquisition scheme would be decided by Minister of SOEs. In order to resolve PTKP's short term liquidity problem, Perum Peruri was assigned to give a working capital bridging fund to PTKP which later would be converted into an ownership of shares in PTKP.

On June 15, 2009, PTKP and Perum Peruri signed an agreement No. SP-308/VI/2009, as a follow up to the letter of Minister of SOEs No. S-368/MBU/2009, dated June 1, 2009, which regulates Perum Peruri's bridging fund for PTKP's working capital requirements amounting to Rp34,689,259,201 of which then the fund would be compensated with the sales of fiscal stamps paper to Perum Peruri or converted into an investment in PTKP in the form of shares as stated by the shareholders in the approval of Work Plan and Company Budget ("RKAP") year 2009. On October 30, 2009, the fund has been paid by Perum Peruri.

In addition, according to the agreement between Perum Peruri and PT Kertas Kraft Aceh (Persero) ("KKA") No. SP611/X/2009, dated October 27, 2009, Perum Peruri agreed to purchase 8,167 shares (13.32%) of PTKP owned by KKA with temporary price of Rp500,000 per share amounting to Rp4,083,500,000, while waiting the results of share price valuation carried out by an independent appraiser.

Perum Peruri has paid an advance for the purchase of shares of PTKP owned by KKA on October 30, 2009. On December 31, 2010, PTKP's share price was agreed which amounted to Rp239,699 per share based on an independent appraiser report. The excess of the share purchase advance of PTKP from KKA amounting to Rp2,125,878,267 has been billed to KKA and been recorded as other receivables (Notes 5 and 29.d).

Furthermore, based on the approval letter of Minister of SOEs No. S-502/MBU/2010, dated August 18, 2010, regarding the approval of working capital bridging fund to PTKP, during 2010 the funds have been given by Perum Peruri to PTKP amounting to Rp28,000,000,000 and accounted for as shares acquisition of PTKP by Perum Peruri.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

PT Kertas Padalarang ("PTKP") (Lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTKP tanggal 31 Desember 2010, para pemegang saham menyetujui:

1. Penjualan saham KKA kepada Perum Peruri sejumlah 8.167 lembar saham;
2. Konversi dana talangan dari Perum Peruri menjadi saham dengan harga Rp239.699 per lembar saham atau seluruhnya berjumlah 261.532 lembar saham;
3. Peningkatan modal dasar dari Rp125.000.000.000 menjadi Rp500.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp61.327.000.000 menjadi Rp322.859.000.000 termasuk disagio saham sebesar Rp198.843.171.599;
4. Menyetujui pengeluaran saham baru sejumlah 261.532 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham, yang akan diambil dan disetorkan oleh Perum Peruri;
5. Menyetujui hibah saham yang akan dilakukan oleh Perum Peruri kepada Negara Republik Indonesia sejumlah 106.614 lembar saham, sehingga saham Pemerintah RI dalam PTKP menjadi sejumlah 131.614 lembar saham atau 40,77%. Hibah saham tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga kepemilikan saham Negara RI tidak terdilusi. Akta hibah saham tersebut akan ditandatangani oleh Perum Peruri dan Negara RI cq. Kementerian Keuangan RI.

RUPSLB tanggal 31 Desember 2010 telah diaktakan oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., No. 6 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PTKP, yaitu mengukuhkan keputusan pemegang saham RUPSLB PTKP tentang pemindahtanganan saham nomor KEP- 226/MBU/2009 tanggal 13 Oktober 2009, yaitu persetujuan penjualan seluruh saham milik KKA sejumlah 8.167 lembar atau 13,32% kepada Perum Peruri. Pemindahan saham tersebut telah dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2009 dan ditegaskan kembali dalam Surat Penegasan Harga Jual Beli Saham PTKP.

Dengan demikian susunan pemegang saham PTKP untuk seluruh saham yang beredar sejumlah 61.327 lembar dengan nilai Rp61.327.000.000 terdiri dari:

1. NKRI sebanyak 25.000 lembar senilai Rp25.000.000.000;
2. PT Pengelola Investama Mandiri sebanyak 28.160 lembar senilai Rp28.160.000.000;
3. Perum Peruri sebanyak 8.167 lembar senilai Rp8.167.000.000.

1. GENERAL (Continued)

c. Consolidated Subsidiaries (Continued)

PT Kertas Padalarang ("PTKP") (Continued)

Based on the Shareholders Extraordinary General Meeting (RUPSLB) of PTKP on December 31, 2010, the shareholders agreed:

1. The sale of shares owned by KKA to Perum Peruri in total of 8,167 shares;
2. The conversion of bridging fund from Perum Peruri into shares at a price of Rp239,699 per share or in total of 261,532 shares;
3. The increase of authorized capital from Rp125,000,000,000 to Rp500,000,000,000 and the increase of issued and fully paid capital from Rp61,327,000,000 to Rp322,859,000,000 including share discount amounting to Rp198,843,171,599;
4. The issuance of new shares in total of 261,532 shares with par value of Rp1,000,000 per share, which would be taken and paid by Perum Peruri;
5. The grant of shares from Perum Peruri to the Republic of Indonesia in total of 106,614 shares, which increase the ownership of the Republic of Indonesia Government in PTKP to 131,614 shares or 40.77%. The grant would be made in accordance with the applicable law, therefore the ownership of shares is not diluted. The deed of the grant will be signed by Perum Peruri and the Republic of Indonesia cq. the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

RUPSLB held on December 31, 2010 has been put forth into notarial deed by notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., No. 6, dated January 27, 2011, regarding PTKP's RUPSLB resolutions, which upheld the resolutions of PTKP's RUPSLB about the alienation of shares No. KEP-226/MBU/2009 dated October 13, 2009, the approval of sale of all shares owned by KKA in total of 8,167 shares or 13.32% to Perum Peruri. The transfer of shares was made on October 27, 2009 and has been reaffirmed in the Affirmation Letter of PTKP Shares Selling Price.

Therefore, the composition of shareholders of PTKP for the entire outstanding shares in total of 61,327 shares with value of Rp61,327,000,000 consists of:

1. The Republic of Indonesia in total of 25,000 shares amounting to Rp25,000,000,000;
2. PT Pengelola Investama Mandiri in total of 28,160 shares amounting to Rp28,160,000,000;
3. Perum Peruri in total of 8,167 shares amounting to Rp8,167,000,000.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

PT Kertas Padalarang ("PTKP") (Lanjutan)

Pada tanggal 25 Januari 2012 pemegang saham PTKP melakukan RUPSLB yang kemudian diaktakan oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., dalam Akta No. 8 tanggal 22 Februari 2012. Hasil keputusan RUPSLB tersebut adalah menyetujui menindaklanjuti keputusan-keputusan RUPSLB tanggal 31 Desember 2010 selain yang sudah diaktakan dalam Akta No. 6 tanggal 27 Januari 2011 tentang:

1. Konversi dana talangan dari Perum Peruri kepada PTKP menjadi saham PTKP berdasarkan Perjanjian Penyediaan Modal Kerja No. SP-308/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 dan perjanjian Konversi Saham No. SP-33/II/2012. 46/K/PTKP/II/2012, yang telah ditandatangani oleh Perum Peruri pada tanggal 20 Januari 2012 dengan harga sesuai perhitungan PT Bahana Securities yaitu Rp239.699 per lembar saham atau sejumlah 261.532 lembar.
2. Menyetujui peningkatan Modal Dasar PTKP dari Rp125.000.000.000 menjadi Rp500.000.000.000.
3. Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dalam PTKP dari Rp61.327.000.000 menjadi Rp332.859.000.000.
4. Menyetujui pengeluaran saham baru dalam portepel sejumlah 261.532 lembar saham dengan nilai Rp261.532.000.000; dan
5. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PTKP.

Dengan demikian susunan pemegang saham PTKP untuk seluruh saham yang beredar sejumlah 322.859 lembar dengan nilai Rp322.859.000.000 terdiri dari:

1. NKRI sebanyak 25.000 lembar senilai Rp25.000.000.000;
2. PT Pengelola Investama Mandiri sebanyak 28.160 lembar senilai Rp28.160.000.000;
3. Perum Peruri sebanyak 269.699 lembar senilai Rp269.699.000.000.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU- 11769.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012.

Pada tanggal 8 Mei 2013 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 36 tahun 2013 yang menyatakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara perlu melakukan penjualan seluruh milik Negara Republik Indonesia pada PT Kertas Padalarang, yaitu sebanyak 25.000 lembar saham atau sebesar 7,75% melalui penjualan saham secara langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

1. GENERAL (Continued)

c. Consolidated Subsidiaries (Continued)

PT Kertas Padalarang ("PTKP") (Continued)

On January 25, 2012, the shareholders of PTKP conducted RUPSLB which has been put forth into notarial deed by notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., in the Deed No. 8, dated February 22, 2012. The results of this RUPSLB agreed to follow the resolutions of RUPSLB dated December 31, 2010, other than those were already covered in the Deed No. 6, dated January 27, 2011 regarding:

1. The conversion of bridging fund from Perum Peruri to PTKP into shares of PTKP based on Working Capital Requirement Agreement No. SP-308/VI/2009 dated June 15, 2009 and Shares Conversion Agreement No. SP-33/II/2012. 46/K/PTKP/II/2012, which has been signed by Perum Peruri on January 20, 2012 at a price based on a valuation of PT Bahana Securities amounting to Rp239,699 per share or in total of 261,532 shares.
2. The increase of PTKP's Authorized Capital from Rp 125,000,000,000 to Rp500,000,000,000.
3. The increase of Issued and Fully Paid Capital in PTKP from Rp61,327,000,000 to Rp332,859,000,000.
4. The issuance of new shares portfolio in total of 261,532 shares amounting to Rp261,532,000,000; and
5. Amendment to article 4 of PTKP's Articles of Association.

Therefore, the composition of shareholders of PTKP for the entire outstanding shares in total of 322,859 shares which amounting to Rp322,859,000,000 consists of:

1. The Republic of Indonesia in total of 25,000 shares amounting to Rp25,000,000,000;
2. PT Pengelola Investama Mandiri in total of 28,160 shares amounting to Rp28,160,000,000;
3. Perum Peruri in total of 269,699 shares amounting to Rp269,699,000,000.

The Amendment of the Articles of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights in the letter No. AHU- 11769.AH.01.02. Tahun 2012, dated March 5, 2012.

On May 8, 2013 the Government of the Republic of Indonesia issued a Regulation No. 36 year 2013 which stated to optimize the state revenue needed to sell all shares owned by the Republic of Indonesia on PT Kertas Padalarang for the overall shares owned by the Republic of Indonesia on PT Kertas Padalarang amounted to 25,000 shares equivalent to 7.75% through the direct sale of shares in accordance with the regulated of limited liability companies.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

PT Kertas Padalarang ("PTKP") (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Agustus 2013 Menteri BUMN mengirimkan surat nomor S-545/MBU/2013 kepada Perum Peruri yang menyatakan penawaran penjualan saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Kertas Padalarang yang kemudian ditanggapi oleh Perum Peruri melalui surat nomor 1365/IX/2013 tanggal 18 September 2013. Dalam surat balasan tersebut, Perum Peruri menyatakan kesediaan untuk membeli seluruh saham yang ditawarkan dengan nilai saham yang ditawarkan sebesar Rp13.000.000.000.

Pembayaran atas pembelian saham tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 yang disusul dengan akta jual beli oleh Notaris Dessy, SH., M.Kn. tanggal 18 Desember 2013. Perubahan anggaran dasar atas penambahan saham tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui surat keterangan nomor AHU-AH.01.10-00356.

Berdasarkan RUPSLB PT Kertas Padalarang ("PTKP") tanggal 29 Desember 2014, para pemegang saham menyetujui konversi dana talangan yang berasal dari Perum Peruri menjadi modal saham. Nilai dana talangan yang dikonversi menjadi modal saham sebesar Rp29.852.000.000 ditambah sebesar Rp160.000 yang disetor kemudian oleh Perum Peruri kepada PTKP. Nilai transaksi saham adalah sebesar Rp520.000 per lembar saham sehingga jumlah lembar saham yang di konversi adalah sebesar 57.408 lembar saham. Nilai nominal saham tersebut adalah sebesar Rp1.000.000. Selisih yang terjadi antara nilai transaksi dan nilai nominal akan dicatat pada akun disagio saham.

Setelah proses konversi ini, susunan pemegang saham PTKP terdiri dari Perum Peruri dan PT Pengelola Investama Mandiri dengan kepemilikan masing-masing sebanyak 352.107 dan 28.160 lembar saham setara dengan persentase masing-masing 92,59% dan 7,41%.

Berdasarkan akta nomor 07 tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN dan telah disahkan oleh kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia mengenai perubahan anggaran dasar PT Kertas Padalarang tentang persetujuan Tambahan Penyertaan Modal ditempatkan/disetor sebesar Rp.35.600.000.000 (35.600 lembar saham) oleh Perum Peruri disetor tunai.

Total modal disetor PTKP setelah transaksi penambahan penyertaan modal adalah Rp415.867.000.000 dengan persentase kepemilikan Perum Peruri sebesar 93,23% dan PT Pengelola Investama Mandiri sebesar 6,77%.

Laporan keuangan PTKP per 31 Desember 2019 dan 2018 diaudit oleh KAP Roebiandini & Rekan dengan opini tanpa modifikasi.

1. GENERAL (Continued)

c. Consolidated Subsidiaries (Continued)

PT Kertas Padalarang ("PTKP") (Continued)

On August 30, 2013 the Minister of SOEs has sent a letter No. S-545/MBU/2013 to Perum Peruri regarding an offer to sell all shares owned by the Republic of Indonesia on PT Kertas Padalarang which then responded by Perum Peruri through letter No. 1365/IX/2013 dated September 18, 2013. On that replied letter Perum Peruri stated their interest to buy all the shares offered with the value of the shares amounting to Rp13,000,000,000.

The payment of purchase of shares was executed on December 16, 2013, which then followed by the deed of purchase and sale by Notary Dessy, SH., M.Kn. dated December 18, 2013. The deed Amendment to the Ministry of Justice and Human Rights has been received by Directorate General of Legal Administration through its letter No. AHU-AH.01.10-00356.

Based on extraordinary shareholders meeting of PT Kertas Padalarang ("PTKP") dated December 29, 2014, the shareholder have approved the conversion bailouts from Perum Peruri into share capital. The bailout value that was converted into shares were amounting to Rp29,852,000,000 plus the amount of cash paid by Perum Peruri amounting to Rp160,000 to PTKP. Transaction value of shares is equal to Rp520,000 per share, bringing the total number of shares at the conversion amounted to 57,408 shares. Par value of the shares is amounted to Rp1,000,000. The differences between the transaction value and us nominal value will be recorded as premium on share.

After the conversion, the composition of PTKP's shareholders consists of Perum Peruri and PT Pengelola Investama Mandiri with respective ownership of 352,107 and 28,160 shares that were equal to the respective percentage of 92.59% and 7.41%.

Based on deed number 07 dated July 23, 2019 made by Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN and approved by the Ministry of Law and Human Rights regarding amendments to the Articles of Association of PT Kertas Padalarang regarding approval of Additional Equity Participation placed / paid up to Rp. 35,600,000,000 (35,600 shares) by Perum Peruri paid in cash.

PTKP's fully paid capital after the injection transaction is Rp415,867,000,000 with percentage of ownership of Perum Peruri of 93.23% and PT Pengelola Investama Mandiri of 6.77%.

PTKP's financial report as of December 31, 2019 and 2018 are audited by KAP Roebiandini & Partners with unmodified opinion.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

PT Peruri Property ("PT PePro")

Berdasarkan surat Menteri BUMN No S-179/MBU/2011 tanggal 12 April 2012, Menteri BUMN telah menyetujui pendirian PT PePro oleh Perum Peruri dan Yapetri. Entitas anak ini bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, teknik, percetakan dan jasa. Pendirian PT PePro berdasarkan Akta Notaris Dessi, SH., M.Kn., di Jakarta, No. 01 tanggal 10 April 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan No. AHU- 22461.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 27 April 2012. Akta pendirian perusahaan telah mengalami perubahan dan yang terakhir dengan Akta Notaris Dessi, SH., M.Kn., di Jakarta, No. 01 tanggal 7 Desember 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan No. AHU0006760.AH.01.09. tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013.

Modal dasar PT PePro ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000 yang terbagi atas 20.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar sebesar Rp1.000.000, dan telah disetor penuh. Persentase kepemilikan Perum Peruri sebesar 99% dan Yapetri sebesar 1%.

Pada tanggal 27 Maret 2019 diselenggarakan circular resolution yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham PePro sehubungan dengan penambahan penyertaan modal pada PePro sebesar Rp20.000.000 oleh Perum Peruri. Penambahan penyertaan modal pada PePro ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui surat No. AHU-0017994.AH.01.02. tahun 2019 tanggal 2 April 2019.

Total modal disetor PePro setelah transaksi penambahan penyertaan modal adalah Rp40.000.000.000 dengan persentase kepemilikan Perum Peruri sebesar 99,50% dan Yapetri sebesar 0,50%.

Laporan Keuangan PT PePro per 31 Desember 2019 diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi. Sedangkan Laporan Keuangan PT PePro per 31 Desember 2018 diaudit oleh KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan dengan opini tanpa modifikasi.

1. GENERAL (Continued)

c. Consolidated Subsidiaries (Continued)

PT Peruri Property ("PT PePro")

Based on the letter of Minister of SOEs No. S-179/MBU/2011, dated April 12, 2012, the Minister of SOEs has approved the establishment of PT PePro by Perum Peruri and Yapetri. This Subsidiary is engaged in trading, building, industrial, transportation, engineering, printing and services. The establishment of PT PePro is based on the Deed by notary Dessi, SH., M.Kn., in Jakarta, No. 01 dated April 10, 2012 and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. AHU- 22461.AH.01.01.tahun 2012, dated April 27, 2012. The Deed of establishment has been amended several times and the latest Amendment has been put forth into notarial deed by notary Dessi, SH., M.Kn., in Jakarta, No. 01 dated December 7, 2012 and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. AHU0006760.AH.01.09.tahun 2013, dated February 1, 2013.

PT PePro's authorized capital is set at Rp20,000,000,000 which divided into 20,000 shares with par value of Rp1,000,000 per share, and were fully paid. The percentage of ownership of Perum Peruri and Yapetri is 99% and 1%, respectively.

On March 27, 2019 there was circular resolution signed by all shareholders of PePro in relation to additional capital injection amounting to Rp20,000,000,000 by Perum Peruri. This additional capital injection transaction was previously approved by the Ministry of Law and Human Rights in his letter No. AHU-0017994.AH.01.02.tahun 2019 dated April 2, 2019.

PePro's fully paid capital after the injection transaction is Rp40,000,000,000 with percentage of ownership of Perum Peruri of 99.50% and Yapetri of 0.50%.

PT PePro's financial report as of December 31, 2019 is audited by KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan with unmodified opinion. While the PePro's Financial Report as of December 31, 2018 is audited by KAP Wisnu Karsono Soewito & Partners with unmodified opinion.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Perum Peruri dan entitas anak telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI).

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan sumber dan penggunaan kas dan setara kas dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perum Peruri.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang baru dan penyesuaian PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang baru

ISAK baru dan amandemen PSAK berikut yang efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 telah diterapkan di dalam laporan keuangan konsolidasian ini. Sifat dan pengaruh dari setiap ISAK baru dan amandemen PSAK yang diterapkan oleh Grup dijelaskan di bawah ini.

- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka
ISAK ini menjelaskan bagaimana menentukan tanggal transaksi dengan tujuan untuk menentukan kurs yang digunakan dalam pengukuran awal aset, beban, atau penghasilan terkait (atau bagian darinya) dalam penghentian pengakuan aset non moneter atau liabilitas non moneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan imbalan di muka dalam valuta asing.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

Perum Peruri and Subsidiarie's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), established by the Financial Accounting Standards Board Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI).

b. Basis of Measurement and Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared based on the going concern assumption and accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows which using cash basis. The basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method and present the sources and uses of cash and cash equivalents according to operating, investing and financing activities.

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is Perum Peruri functional and presentation currency.

The Statements of New Financial Accounting Standards ("PSAK") and amendments and improvement to PSAK and new Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("ISAK")

The following ISAK and amendment to PSAK which are effective for periods beginning on or after 1 January 2019 have been adopted in the consolidated financial statements. The nature and effect of amendment to ISAK and PSAK adopted by the Group are detailed below.

- ISAK 33: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
This ISAK explains how to determine the date of the transaction in order to determine the exchange rate used in the initial measurement of assets, expenses, or income related (or part of it) in terminating the recognition of non monetary assets or liabilities non monetary arising from payment or receipt of compensation in advance in foreign exchange.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)**

- ISAK 34: Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

ISAK ini mengklarifikasi penerapan persyaratan pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 46 (Pajak Penghasilan) ketika terdapat ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan. Perlakuan pajak tidak pasti dapat berdampak pada penentuan laba kena pajak (rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak yang digunakan untuk mengakui dan mengukur aset atau liabilitas pajak kini atau aset atau liabilitas pajak tangguhan sesuai dengan PSAK 46.

- PSAK 24: (amandemen), Imbalan Kerja: Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program

Amandemen memberikan panduan yang lebih jelas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amandemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru. Selain itu, amandemen ini mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amandemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan, manajemen sedang mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan PSAK dan ISAK baru dan amandemen PSAK berikut yang telah diterbitkan, namun belum efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut:

- PSAK 15: (amandemen), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura
- PSAK 62: "Kontrak Asuransi";
- PSAK 71: (amandemen), "Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa".

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan entitas-entitas anak seperti yang disebutkan pada Catatan 1.c, yang dimiliki oleh Perum Peruri (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50% dan dikendalikan oleh Perum Peruri.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**b. Basis of Measurement and Preparation of the
Consolidated Financial Statements (Continued)**

- ISAK 34: *Uncertainty over Income Tax Treatments*,

This ISAK clarifies the application of the requirements for recognition and measurement in PSAK 46 (Income Tax) when there is uncertainty over the income tax treatment. Uncertain tax treatment can have an impact on determining taxable income (tax loss), tax base, unused tax loss, unused tax credit, and tax rates used to recognize and measure current tax assets or liabilities or assets or liabilities deferred tax in accordance with PSAK 46.

- PSAK 24: (amendment), *Employee Benefits: Amendment, Curtailment or Settlement Program*

Amendments provide clearer guidance in recognizing past service costs, settlement gains and losses, current service costs and net interest after amendments, curtailments, or completion of programs when there is any change in actuarial assumptions. In addition, this amendment clarifies how the accounting requirements for amendments, curtailments, or program completion can affect the asset threshold requirements as seen from the reduction in surplus which affects the upper limit of assets.

At the authorization date of the consolidated financial statements, the management is still evaluating the potential impact of the new PSAK and ISAK and amendments to PSAK which have been issued but are not yet effective for the years beginning on or after January 1, 2019, as follows:

- PSAK 15: (amendment), *"Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures"*;
- PSAK 62: *"Insurance Contract"*;
- PSAK 71: (amendment), *"Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation"*;
- PSAK 72: *"Revenue from Contracts with Customers"*;
- PSAK 73: *"Leases"*.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the subsidiaries mentioned in Note 1.c, in which Perum Peruri maintains (directly or indirectly) equity with ownership more than 50% and is controlled by Perum Peruri.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

Entitas-entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perum Peruri memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Perum Peruri kehilangan pengendalian.

Suatu pengendalian juga ada apabila entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara jika terdapat:

- a. Kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lainnya;
- b. Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- c. Kekuasaan untuk menunjuk atau memberhentikan sebagian besar dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau
- d. Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ.

Kerugian entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perum Peruri:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali;
- Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang tercatat di ekuitas, bila ada;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- Mereklasifikasikan bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba sebagaimana mestinya.

Laporan keuangan konsolidasian harus disusun dengan basis yang sama yaitu; kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama. Kebijakan tersebut telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak, kecuali dinyatakan secara khusus.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

c. Principles of Consolidation (Continued)

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisitions, being the date on which Perum Peruri obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases.

Control also exist when the parent owns half or less of the voting power of an entity when there is:

- a. *Power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other investors;*
- b. *Power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement;*
- c. *Power to appoint or remove the majority of the members of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body; or*
- d. *Power to cast the majority of votes at meetings of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body.*

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the non-controlling interests even if that results in a deficit balance of the non-controlling interests.

In case of loss of control over a subsidiary, Perum Peruri:

- *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- *Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests;*
- *Derecognizes the cumulative translation difference, recorded in equity, if any;*
- *Recognizes the fair value of the consideration*
- *Recognizes the fair value of any investment*
- *Recognizes any difference arise as gain or loss in the profit or loss; and*
- *Reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate.*

The consolidated financial statements are prepared using uniform basis, i.e.: similar accounting policy for similar transactions, events and circumstances. The policy has been applied consistently by Subsidiaries, unless otherwise stated.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan Entitas Induk dan Entitas anak digabungkan secara baris per baris yakni dengan menjumlahkan satu persatu unsur-unsur sejenis dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban. Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antara perusahaan-perusahaan di dalam grup yang material telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Grup (Perum Peruri dan Entitas anak) sebagai satu kesatuan.

Kepentingan non-pengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas-entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs rata-rata dari kurs beli dan kurs jual yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Kurs dari mata uang asing utama yang digunakan adalah sebagai berikut (nilai Rupiah penuh):

	2019
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	13.901
1 Euro (EUR)	15.589
1 Poundsterling Inggris (GBP)	18.250
1 Yen Jepang (JPY)	128
1 Franc Swiss (CHF)	14.366
1 Dolar Singapura (SGD)	10.321

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah terealisasi maupun yang belum, baik yang berasal dari transaksi dalam mata uang asing maupun penjabaran aset dan liabilitas moneter dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan tidak dijaminkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

c. Principles of Consolidation (Continued)

In preparing the consolidated financial statements, the financial statements of the Parent Company and Subsidiaries are combined on a line by line basis by adding together similar elements of assets, liabilities, equity, income and expenses. The effect of all significant transactions and balances between companies within the group has been eliminated in the consolidated financial statements to reflect the financial position and result of operations of the Group (Perum Peruri and Subsidiaries) as one business entity.

Non-controlling interests represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries not attributable directly or indirectly to the parent company, which are presented respectively in the consolidated statement of comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent company.

d. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing as at the date of the transaction.

As at the consolidated statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using middle rate of buying rate and selling rate issued by the Bank of Indonesia which prevail as at that date. The exchange rates of the major foreign currencies used are as follows (full amount Rupiah):

	2019	2018	
	13.901	14.481	<i>1 United States Dollar (USD)</i>
	15.589	16.560	<i>1 Euro (EUR)</i>
	18.250	18.373	<i>1 British Pound sterling (GBP)</i>
	128	131	<i>1 Japan Yen (JPY)</i>
	14.366	14.710	<i>1 Swiss France (CHF)</i>
	10.321	10.603	<i>1 Singapore Dollar (SGD)</i>

Realized and unrealized foreign exchange gains or losses arising from transactions in foreign currency and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

e. Cash and Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and time deposits with maturities of three months or less, and are not pledged as collateral.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2.

e. Kas dan Setara Kas (Lanjutan)

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai jaminan atau *margin deposits* atas fasilitas *letter of credit* dan jaminan utang bank disajikan sebagai "Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya" dan dikelompokkan ke dalam aset tidak lancar lainnya.

f. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai piutang.

g. Instrumen Keuangan

PSAK 55 (Revisi 2014) mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. PSAK ini, antara lain, menyediakan definisi dan karakteristik derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung nilai.

PSAK 60 (Revisi 2014) mensyaratkan pengungkapan signifikansi instrumen keuangan untuk posisi keuangan dan kinerja; beserta sifat dan tingkat yang timbul dari risiko keuangan Perum Peruri yang terekspos selama periode berjalan dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko mereka.

Aset Keuangan

Perum Peruri mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori:

- (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba atau Rugi

Terdiri dari aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perum Peruri untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau merupakan bagian dari portofolio yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Cash and Equivalents (Continued)

Cash and cash equivalents pledged as guarantee or margin deposits for letter of credit facilities and collateral for bank loans are presented as "Cash and cash equivalents restricted in use" and classified into other non-current assets.

f. Trade Receivables and Other Receivables

Trade receivables and other receivables are presented in net of allowance for impairment of receivables.

g. Financial Instruments

PSAK 55 (Revised 2014) establishes the principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. This PSAK provides the definitions and characteristics of derivatives, the categories of financial instruments, recognition and measurement, hedge accounting and determination of hedging relationships, among others.

PSAK 60 (Revised 2014) requires disclosures of significance of financial instruments for financial position and performance; and the nature and extent of risks arising from financial instruments to which Perum Peruri is exposed during the period and at the end of the reporting period, and how the entity manages those risks.

Financial Assets

Perum Peruri classifies its financial assets in the following categories:

- (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity financial assets and (iv) available-for-sale financial assets.*

The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

- (i) *Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss*

Consist of financial assets classified as held-for-trading and financial assets designated by Perum Peruri as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

A financial asset is classified as held-for-trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a pattern of short term profit-taking. Derivatives are also categorized as held-for-trading unless they are designated as effective hedging instruments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2.

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perum Peruri dan Entitas anak tidak mempunyai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: (a) yang dimaksudkan oleh Perum Peruri untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta (b) yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; (c) yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau (d) dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang. Pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang bunga dan piutang lain-lain, dan aset tidak lancar lainnya (kas yang dibatasi penggunaannya dan uang jaminan).

(iii) Aset Keuangan yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- a. investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- b. investasi yang diklasifikasikan dalam kategori tersedia untuk dijual; atau
- c. investasi yang memenuhi kriteria sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Financial Instruments (Continued)

As of December 31, 2019 and 2018, Perum Peruri and Subsidiaries did not have any financial assets at fair value through profit loss.

(ii) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than: (a) those that Perum Peruri intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held-for-trading, and (b) those that Perum Peruri upon initial recognition designates as fair value through profit or loss; (c) those that Perum Peruri upon initial recognition designates as available-for-sale; or (d) those for which Perum Peruri may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables' deterioration. Loans and receivables are measured at amortized cost with effective interest rate method.

In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables, and recognized in the consolidated statements of comprehensive income as "Allowance for Impairment Losses".

Financial assets classified as loans and receivables consist of cash and cash equivalents, accounts receivable, interest and other receivables, and other non current assets (restricted cash and cash equivalents and guarantee deposit).

(iii) Held-to-Maturity Financial Assets

Held-to-maturity investments are non derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities, for which Perum Peruri's management has the positive intention and ability to hold to maturity, other than:

- a investment that upon initial recognition is designated as financial assets at fair value through profit or loss;
- b investment that is designated as available-for-sale; or
- c investment that meet the criteria of loans and receivables.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2.

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan diakui sebagai "Pendapatan Bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Perum Peruri memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(iv) Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki dalam periode tertentu yang akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya, laba atau rugi diakui pada pendapatan komprehensif lainnya hingga aset keuangan tersedia untuk dijual dihentikan pengakuannya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Perum Peruri mencatat investasi saham pada ventura bersama sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas Keuangan

Perum Peruri mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

(i) Liabilitas Keuangan pada Nilai Wajar melalui Laba

Terdiri dari liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perum Peruri untuk diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

g. Financial Instruments (Continued)

At initial recognition, held-to-maturity financial assets is recognized at fair value, and subsequently measured at amortized cost, using effective interest method.

Interest income on held-to-maturity financial assets is reported in the consolidated statements of comprehensive income as "Interest Income". In case of impairment, the impairment loss is recognized as a deduction from the carrying value of the investment and recognized in the consolidated financial statement as "Allowance for Impairment Losses".

Perum Peruri does have financial assets classified as Held-to-maturity Financial Assets for the years ended December 31, 2019 and 2018.

(iv) Available-for-Sale Financial Assets

Available-for-sale investments are financial assets that are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or those that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity investments or financial assets at fair value through profit or loss.

At initial recognition, available-for-sale financial assets are recognized at fair value and measured subsequently at fair value with gains and losses being recognized in other comprehensive income, until the financial assets is derecognized.

As of December 31, 2019 and 2018 Perum Peruri recorded investment in joint venture as available for sale financial assets.

Financial Liabilities

Perum Peruri classifies its financial liabilities into the category of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

(i) Financial Liabilities at Fair Value through Profit or

This category comprises financial liabilities classified as held-for-trading and financial liabilities designated by Perum Peruri as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2.

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada nilai wajarnya. Biaya transaksi sehubungan dengan penerbitannya diakui pada laporan laba rugi periode berjalan. Kenaikan atau penurunan nilai wajar selanjutnya diakui pada laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perum Peruri tidak mempunyai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(ii) Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya setelah dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Per 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh liabilitas keuangan Perum Peruri diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- (i) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1)
- (ii) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2), dan

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Financial Instruments (Continued)

Financial liabilities which measured at fair value through profit or loss is financial liabilities as held-for-trading. A financial liability is classified as held-for-trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are also categorized as held-for-trading unless they are designated as effective hedging instruments.

At initial recognition, financial liabilities measured at fair value through profit or loss are measured at fair value. Transaction costs related to the issuance are recognised in the current period profit or loss. Subsequent increase or decrease in fair value is recognised in profit or loss.

Perum Peruri did not have any financial liabilities at fair value through profit or loss as of December 31, 2019 and 2018.

(ii) Financial Liabilities Measured at Amortized Cost.

Financial liabilities that are not classified at as fair value through profit or loss fall into this category and are measured at amortized cost.

At initial recognition, financial liabilities at amortised cost are measured at fair value net of transaction costs and subsequently measured at amortized cost using effective interest rate method.

As of December 31, 2019 and 2018, all of Perum Peruri's financial liabilities are measured at amortized cost.

Determination of Fair Value

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK No. 60, "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- (i) quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1),
- (ii) inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (Level 2), and

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2.

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

(iii) input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perum Peruri untuk aset keuangan adalah harga penawaran (bid price), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin tidak mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam Tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- i) penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- ii) teknik lain, seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perum Peruri melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Financial Instruments (Continued)

(iii) inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (Level 3).

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by Perum Peruri is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as minimum as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

If one more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3. This is the case for unlisted equity securities.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- i) the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments; and
- ii) other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

Financial assets are derecognized when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred substantially all the risks and rewards of ownership (that is, if all substantial risks and rewards have not been transferred, Perum Peruri conducts the evaluation to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognized when the liabilities has discharged or cancelled or otherwise expire.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2.

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan Perum Peruri melakukan evaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba atau rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan signifikan; terjadi pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok dan bunga; kemungkinan nasabah dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; indikasi terjadi penurunan nilai berdasarkan estimasi arus kas masa depan dari portofolio pembiayaan, meskipun penurunan belum dapat diidentifikasi terhadap pembiayaan secara individual dalam portofolio, termasuk penurunan status pembayaran nasabah dalam portofolio pembiayaan.

Perum Peruri menentukan bukti penurunan nilai atas aset keuangan secara individual. Evaluasi penurunan nilai secara individual dilakukan dengan memeriksa bukti objektif yang terjadi dan menilai kecukupan aset jaminan yang dipersyaratkan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

g. Financial Instruments (Continued)

At each reporting date Perum Peruri conducts evaluation to determine whether there is objective evidence that financial assets which are not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired if objective evidence indicates that adverse events have occurred after initial recognition of financial assets, and these events have an impact on future cash flows of financial assets that can be estimated reliably.

Objective evidence that financial assets are impaired involves clients experiencing significant financial difficulties; breach of contract, such as default or arrears in payment of principal and interest; possibility of customer bankruptcy or other financial reorganization; indication to be impaired based on estimated future cash flows of portfolio financing, although the decrease can not be identified individually on the financing of the portfolio, including a decrease in customer payment status in the financing portfolio.

Perum Peruri determines evidence of impairment value of financial assets individually. Evaluation of impairment value on an individual basis is done by examining objective evidence that occurred and assesses the adequacy of asset collateral required.

Reclassification of Financial Assets

Reclassification is only permitted in rare circumstances and where the asset is no longer held for the purpose of selling in the short-term. In all cases, reclassification of financial assets is limited to debt instruments. Reclassifications are accounted for at the fair value of the financial asset on the date of reclassification.

Offsetting of Financial Assets

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statements of financial position when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention either to settle on a net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

g. Persediaan

Persediaan diukur pada nilai yang terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Metode yang dipakai untuk menentukan biaya adalah metode rata-rata bergerak. Biaya perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung serta alokasi biaya overhead yang terkait dengan produksi.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Provisi untuk persediaan usang dan persediaan tidak terpakai/tidak laris ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

h. Investasi Saham dan Ventura Bersama

Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional entitas asosiasi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan dianggap ada ketika Perum Peruri memiliki secara langsung atau tidak langsung 20% atau lebih hak suara suatu entitas, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Perum Peruri tidak memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan juga ada ketika Perum Peruri memiliki kurang dari 20% hak suara suatu entitas, namun dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Perum Peruri memiliki pengaruh signifikan.

g. Financial Instruments (Continued)

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and others paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments at measured at fair value through profit or loss.

g. Inventories

Inventories are measured at cost or net realisable value, whichever is lower. The method used to determine cost is the moving average method. Cost of finished goods and work in process comprises cost of materials, cost of direct labour and an appropriate proportion of directly attributable production overhead cost.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated costs of completion and estimated costs necessary to make the sale.

A provision for obsolete and unused/slow moving inventories is determined on the basis of estimated future usage or sale of inventory items.

h. Investment in Share and Joint Ventures

Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the associates, but does not have control or jointly control over those policies. Significant influence is presumed to exist when the Perum Peruri owns directly or indirectly 20% or more of the voting rights of an entity, unless it can be clearly demonstrated that Perum Peruri has no significant influence. Significant influence also exists when Perum Peruri has less than 20% of the voting rights of an entity, but can be clearly demonstrated that Perum Peruri has significant influence.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2.

h. Investasi Saham dan Ventura Bersama (Lanjutan)

Investasi pada entitas asosiasi yang mempunyai pengaruh signifikan dicatat menggunakan metode ekuitas.

Investasi pada entitas asosiasi dimana Perum Peruri tidak mempunyai pengaruh signifikan atas entitas asosiasi tersebut, meskipun dengan kepemilikan 20% atau lebih, dicatat sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014) sebagai investasi tersedia untuk dijual. Pengukuran nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual ditentukan berdasarkan nilai wajarnya, dan jika tidak tersedia maka ditentukan berdasarkan biaya perolehannya.

Setoran dana investasi ditanamkan Perum Peruri dalam suatu perjanjian kerjasama operasi/ventura bersama dicatat dalam kelompok investasi. Perum Peruri mencatat bagian laba yang diterima dari kerjasama operasi sebagai pendapatan lain-lain dalam tahun berjalan.

i. Aset Tetap

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehannya termasuk pajak yang berlaku, bea masuk, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya penyimpanan, biaya penyediaan lokasi, biaya pemasangan, biaya upah tenaga kerja internal, estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.

Aset tetap kecuali tanah, setelah pengakuan awal, dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya dan dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>	
Bangunan	20	<i>Building</i>
Mesin Utama Pabrik	15	<i>Main Factory Machinery</i>
Mesin Pendukung Pabrik	10	<i>Support Machinery</i>
Peralatan Pabrik	6	<i>Factory Equipment</i>
Peralatan Kantor	5	<i>Office Equipment</i>
Kendaraan	4	<i>Vehicles</i>

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan karena besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Investment in Share and Joint Ventures (Continued)

Investments in associates that have significant influence are accounted for using the equity method.

Investment in associates where Perum Peruri has no significant influence on the associated company, although the ownership is 20% or more, are recorded according to PSAK 55 (Revised 2014) as investment available for sale financial asset. The fair value measurement on the available-for-sale financial asset are based on its fair value, and when its unavailable are based on its acquisition cost.

Investment fund deposited by Perum Peruri in a joint operation/joint venture agreement are recorded as investment category. Perum Peruri record the profit received from joint operations as other income in the current year.

i. Fix Assets

Property, plant, and equipment are stated at acquisition cost, including applicable taxes, import duties, freight, handling costs, storage costs, site preparation costs, installation costs, the cost of internal labor, the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on fixed assets.

Property, plant, and equipment, except for land, after initial recognition, are measured based on cost model and stated at cost less any accumulated depreciation and any provision for impairment.

Property, plant, and equipment are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Land are stated at cost and not depreciated due to the high possibility that the land rights are renewable/extendable at its maturity date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2.

i. Aset Tetap (Lanjutan)

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana semestinya, hanya jika kemungkinan besar Perum Peruri dan entitas anak mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi komprehensif dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Aset dalam penyelesaian disajikan sebagai bagian dalam aset tetap dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian. Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak aset tersebut siap untuk digunakan.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.

Pada setiap akhir tahun, Perum Peruri dan entitas anak melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis. Pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

j. Aset Tak Berwujud

Pengeluaran tertentu yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan taksiran masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan legal hak atas tanah (Hak Guna Usaha) yang diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah tersebut.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui pada saat suatu pesanan telah dipenuhi dan faktur penagihan (*invoice*) telah diterbitkan serta risiko dan hak atas kepemilikan secara signifikan telah berpindah kepada pembeli.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

i. Fix Assets (Continued)

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Perum Peruri and Subsidiaries and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. All other repairs and maintenance are charged to the statements of comprehensive income during the financial period in which they are incurred.

Assets under construction are presented as part of property and equipment and stated at cost. All costs, including borrowing costs, incurred in connection with the construction of assets are capitalized as part of the cost of property, plant, and equipment in progress. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property, plant, and equipment account when the asset is completed or ready for use and depreciated from the date the assets are ready for use.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any, are removed from the accounts. Any resulting gain or loss on disposal is reflected in the current operations.

Each year end, Perum Peruri and subsidiaries periodically reviews the useful lives of the assets, asset's residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical specification. Effect of any changes in estimated accounted for on a prospective basis.

j. Intangible Assets

Certain expenditures that have a useful life of more than one year, are deferred and amortized in accordance with the estimated useful lives using the straight-line method.

Expenses incurred in connection with acquiring legal rights to land (Leasehold) which are amortized over the age of legal rights of the land.

k. Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized when an order has been completed and invoice for the order has been issued and all significant risks and rewards of ownership of the goods have been transferred to the buyer.

Expenses is recognized when incurred (accrual basis).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2.

I. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan kini dihitung dari laba kena pajak, yaitu laba yang telah disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan jika, dan hanya jika, entitas:

1. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
2. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) di mana pada suatu situasi tertentu peraturan perpajakan yang berlaku memerlukan interpretasi. Manajemen menetapkan ketentuan mana yang tepat atas dasar jumlah yang diharapkan akan dibayarkan kepada pihak berwenang.

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas neraca. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku.

Atas pendapatan yang terkena pajak final, tidak terdapat perbedaan temporer antara pelaporan komersial dan fiskal. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final untuk laporan komersial berbeda dengan nilai untuk pelaporan fiskal, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset dan liabilitas pajak tangguhan.

Saling hapus atas aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan jika, dan hanya jika, entitas:

1. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
2. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak yang sama atas entitas kena pajak yang sama.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

I. Corporate Income Tax

Current income tax is determined based on taxable income, which is computed using the prevailing tax rates.

Adjustments to tax obligations are recognized when the tax decision letter is received or, if an appeal is filed, when the decision of such appeal has been determined.

Current tax assets and current tax liabilities are offset if, and only if, the entity:

1. *has a legally enforceable right to set off the recognised amount; and*
2. *intend either to settle in net basis, or realises and settles the asset and liability simultaneously.*

Management periodically evaluates positions taken in tax returns (SPT) with the respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. They establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the authorities.

All temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying value for financial reporting purposes are recognized as deferred tax using balance sheet liability method. Currently or substantially enacted tax rates are used to determine deferred income tax.

For revenues subject to final income tax, there is no temporary difference between commercial and tax reporting purposes. If the carrying value of assets and liabilities related to the final income tax between commercial and tax reporting is different, it is not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, the entity:

1. *has a legally enforceable right to set off current tax asset against current tax liability; and*
2. *the deferred tax asset and the deferred tax liability relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2.

m. Liabilitas Imbalan Kerja Pegawai

(i) Kewajiban Pensiun

Imbalan jasa masa kerja diakui berdasarkan jumlah imbalan yang lebih tinggi antara Peraturan Perum Peruri dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UUTK No. 13"). Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") antara Perum Peruri dan karyawan, Perum Peruri memberikan imbalan kerja karyawan dalam bentuk:

1. Program Pensiun Imbalan Pasti

Perum Peruri menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti yang dikelola oleh dana pensiun Perum Peruri (Dapetri) untuk seluruh karyawan tetapnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perum Peruri. Jumlah kontribusi berasal dari karyawan sebesar 6% dari penghasilan dasar pensiun dan kontribusi Perum Peruri yang dihitung oleh aktuaris.

Terhitung sejak tanggal 1 Desember 2010, untuk karyawan yang baru masuk pada dan setelah tanggal 1 Juli 2007, Perum Peruri mengikutkan karyawannya dalam Program Pensiun luran Pasti (PPIP) yang dikelola oleh dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang ditunjuk dengan porsi setoran 6% oleh karyawan dan sebesar 13,3% dari gaji dasar tahunan karyawan dibayarkan oleh Perum Peruri.

Sedangkan untuk karyawan yang masuk sebelum tanggal 1 Juli 2007, imbalan dari manfaat pasti di Dapetri tetap dilanjutkan dengan ketentuan bahwa tidak ada kenaikan gaji dalam perhitungan manfaat pasti pensiunan sejak tanggal 1 Desember 2010, dengan porsi setoran 6% oleh karyawan dan sebesar 7,2% dari gaji dasar per tanggal 1 Desember 2010 yang dibayarkan oleh Perum Peruri. Karyawan yang bersangkutan juga diikutsertakan dalam DPLK yang ditunjuk serta seluruh setoran sebesar 5,9% dari gaji terakhir karyawan dibayarkan oleh Perum Peruri.

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Pada umumnya, program imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

**SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

m. Employee Benefits Liabilities

(i) Pension Liabilities

Employee benefits are recognized whichever is higher between the working period of the employees in accordance with Labor Law No. 13/2003 or the regulations of Perum Peruri, whichever benefit is higher. Based on the Collective Labor Agreement between Perum Peruri and its employees, Perum Peruri shall grant post-

1 Defined Benefit Pension Plan

Perum Peruri has defined benefit pension plan covering all of its permanent employees which is managed by Pension Fund ("Dana Pensiun/Dapetri") as stipulated in Perum Peruri regulations. Total contributions to the plan consist of employees' contribution of 6% of their basic pensionable salaries and Perum Peruri's contribution which is computed by an independent actuary.

Since December 1, 2010, for employees who joined on and after July 1, 2007, Perum Peruri registered their employees in defined contribution retirement plan (PPIP), which is managed by an appointed financial institution pension funds (DPLK) with a payment portion of 6% borne by employees and 13.3% from employees annual basic salary borne by Perum Peruri.

As for employees who joined prior to July 1, 2007, benefits from a defined benefit plan in Dapetri are continued with the provision that no salary increase in the calculation of defined benefit pension from the date of December 1, 2010, with a 6% share of payments borne by employees and 7.2% from basic salary as of December 1, 2010 borne by Perum Peruri. Those employees are also included in the appointed DPLK and all payments of 5.9% borne by Perum Peruri which calculated from the employees latest salary.

A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2.

**SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

m. Liabilitas Imbalan Kerja Pegawai (Lanjutan)

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program.

Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya. Keuntungan dan kerugian ini termasuk didalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas dan pada neraca.

2. Program Pelayanan Kesehatan Bersama (Prolankesma)

Perum Peruri menyelenggarakan program pelayanan kesehatan pensiun yang dikelola oleh BP Prolankesma Perum Peruri untuk mantan karyawan/direksi Perum Peruri dan pasangannya yang pensiun sebelum tanggal 1 Oktober 2004. Pada tahun 2019 dan 2018 Perum Peruri telah memberikan subsidi dana masing-masing sebesar Rp1.860.000.000 kepada BP Prolankesma Perum Peruri.

Sedangkan untuk karyawan yang pensiun mulai tanggal 1 Oktober 2004, semula Perum Peruri bekerja sama dengan Asuransi Bringin Life, namun pada tahun 2013 Perum Peruri memutuskan hubungan kerja dengan pihak Asuransi Bringin Life, Prolankesma hanya titipkan dana sebesar Rp51.000.000.000 murni dari Asuransi Bringin Life. Dana tersebut digunakan untuk pengajuan klaim premi Asuransi Bringin Life.

m. Employee Benefits Liabilities (Continued)

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets.

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise. They are included in retained earnings in the statement of changes in equity and in the balance sheet.

2 Health Service Program (Program Pelayanan Kesehatan Bersama - "Prolankesma")

Perum Peruri organizes retirement health care program managed by BP Prolankesma Perum Peruri to former employees/directors of Perum Peruri who retired before October 1, 2004 along with their spouses. In 2019 and 2018 Peruri has provided subsidy funds amounting to Rp1,860,000,000 to BP Prolankesma Perum Peruri.

As for employees who retire starting October 1, 2004, Perum Peruri previously cooperated with Asuransi Bringin Life but in 2013 Peruri decided to terminate the cooperation. Currently, Prolankesma get entrusted the funds amounting to Rp51,000,000,000 purely from Insurance Bringin Life. The funds are used for filing claims Bringin Life Insurance premiums.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2.

m. Liabilitas Imbalan Kerja Pegawai (Lanjutan)

3. Program Jaminan Hari Tua

Perum Peruri menyelenggarakan program jaminan hari tua yang dikelola oleh Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Pegawai Perum Peruri (Yapetri). Dalam program ini jumlah kontribusi karyawan adalah 2,50% dari gaji pokok dan kontribusi Perum Peruri adalah 5% dari gaji pokok karyawan yang bersangkutan.

4. Imbalan kerja lainnya berupa cuti panjang, masa persiapan pensiun (MPP), penghargaan masa kerja serta imbalan lainnya sesuai dengan UUTK No. 13 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tidak didanai.

(ii) Bonus dan Jasa Produksi

Bonus untuk karyawan ditetapkan berdasarkan estimasi manajemen Perum Peruri dan dibayarkan setelah disahkan oleh Menteri BUMN. Selisih antara jumlah bonus yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh Menteri BUMN dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana bonus tersebut disetujui oleh Menteri BUMN.

Jasa produksi untuk karyawan dibebankan berdasarkan estimasi manajemen Perum Peruri dan ditetapkan serta dibayarkan oleh Direksi kepada karyawan berdasarkan pencapaian laba tahun berjalan. Selisih antara jumlah jasa produksi yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang dibayarkan dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana jasa produksi tersebut dibayarkan.

(iii) Tantiem

Perum Peruri membuat penyisihan atas tantiem kepada Direksi dan Dewan Pengawas berdasarkan estimasi manajemen dan dibebankan pada laba rugi komprehensif tahun berjalan. Tantiem akan dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN. Selisih antara jumlah tantiem yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disetujui oleh Menteri BUMN dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana tantiem tersebut disahkan oleh Menteri BUMN.

n. Penggunaan Saldo Laba Berdasarkan Persetujuan dari Pemilik Modal

Penggunaan saldo laba ditentukan berdasarkan persetujuan dari pemilik modal meliputi pembagian dividen dan penyisihan cadangan umum.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

m. Employee Benefits Liabilities (Continued)

3 Post-employment Benefits Plan

Perum Peruri provides post-employment benefits plan managed by Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Pegawai Perum Peruri (Yapetri). Employees contribute 2.50% from their basic salaries and Perum Peruri's contribution is 5% of basic salaries from the respective employees.

4 Other unfunded long-term employee benefits in the form of long-service leave, loyalty rewards and other benefits which are in accordance with Labor Law No.13/2003 and the Collective Labor Agreement.

(ii) Bonus and Production Service

Bonus for employees are determined based on Perum Peruri's management estimation and paid after approval from Minister of SOEs. The difference between the amount estimated and the amount approved are credited to the statement of comprehensive income within the period where approval is received by Minister of SOEs.

Production service allowance are incurred based on Perum Peruri's management estimation and determined and paid by Directors to employees based on current profit achievement. Difference between the amount estimated and the amount paid are credited to the consolidated statement of comprehensive income within the period of payment.

(iii) Tantiem

Perum Peruri makes a provision for tantiem for the Board of Directors and the Supervisory Board based on management's estimation and charged it to the current year's consolidated statement of comprehensive income. Tantiem is paid to the Board of Directors and the Supervisory Board after obtaining approval from Minister of SOEs. The difference between the amount estimated and the amount approved by Minister of SOEs are charged or credited to the statement of comprehensive income in the period where the tantiem is approved by Minister of SOEs.

n. Utilization of Retained Earnings Based on the Approval Letter of the Owner of Capital

Retained earnings utilization are based on the capital owner's approval which include dividend's distribution, allocation of general reserve's fund.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2.

o. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang terkait dengan Perum Peruri (entitas pelapor).

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas
 - c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas Berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini didefinisikan dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

o. Transaction with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to Perum Peruri (the reporting entity).

- 1) *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that:*
 - a Has control or joint control over the reporting entity;*
 - b Has significant influence over the reporting entity;*
 - c. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting*
- 2) *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - a The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - b One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - c. Both entities are joint ventures of the same third parties;*
 - d One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
 - e The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
 - f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or*
 - g A person identified in (1) (a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*

Related Party to the Government entities are entities controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. Government in this case is defined within the scope of the Ministry of Finance.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2.

o. Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

Perum Peruri dan entitas anak telah menerapkan pengecualian dalam PSAK 7 (Revisi 2014) menyajikan luasnya penjelasan dalam kaitannya dengan transaksi dan saldo akun pihak berelasi, termasuk ikatan dengan entitas terkait dengan Pemerintah.

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perum Peruri menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan atas penurunan nilai aset tertentu (yaitu aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tak berwujud yang belum dapat digunakan, atau goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perum Peruri membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perum Peruri menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

o. Transaction with Related Parties (Continued)

Perum Peruri and subsidiaries have applied the exemption in PSAK 7 (Revised 2014) on disclosing the extent of detail in relation to related party transactions and outstanding balances, including commitments with Government-related parties.

p. Impairment of Non-Financial Assets

Perum Peruri assesses at the end of each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, Perum Peruri makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an assets or cash generating unit (CGU)'s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statement of comprehensive income as "impairment losses".

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiplier or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statements of comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan) 2.

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (Lanjutan)

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat bersih setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi goodwill ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) dimana goodwill terkait. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Impairment of Non-Financial Assets (Continued)

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

If that is the case, the carrying amount of the assets is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the assets in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of comprehensive income. After such reversal, the depreciation charge on the said assets is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is tested for impairment annually (as at December 31) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than their carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Kas	598.635.914	772.474.334
Bank		
Rupiah		
Pihak Berelasi (Catatan 28)	17.623.683.808	20.633.114.987
Pihak Ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	12.190.615.355	3.192.786.263
PT Bank BRI Syariah, Tbk	1.387.846.986	1.296.096.644
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	742.241.104	242.407.401
PT Bank DKI	726.016.075	725.519.451
PT Bank Bukopin Tbk	711.923.902	863.711.791
PT Bank CIMB Niaga Tbk	645.174.935	417.121.751
Standard Chartered Bank	306.352.065	307.042.065
PT Bank Central Asia	56.788.832	31.226.669
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	40.162.809	43.774.811
Citibank	37.838.000	43.910.000
PT Bank Syariah Mandiri	16.688.413	68.520.316
PT Bank Mega Tbk	6.542.206	7.543.041
PT Bank Negara Indonesia Syariah	227.257	3.576.512
Sub Jumlah	34.492.101.747	27.876.351.702
Dolar Amerika Serikat		
Pihak Berelasi	1.802.621.478	1.118.264.505
Pihak Ketiga		
Standard Chartered Bank	4.237.150.038	976.366.365
PT Bank Central Asia	10.789.130	12.180.576
Euro - Pihak Berelasi (Catatan 29a)	604.007.432	232.803.092
	6.654.568.078	2.339.614.538
Deposito		
Rupiah		
Pihak Berelasi (Catatan 29b)	1.592.162.073.199	604.635.117.209
Pihak Ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	130.000.000.000	-
PT Bank Syariah Mandiri	95.000.000.000	50.000.000.000
PT Bank Victoria International Tbk	30.000.000.000	20.000.000.000
PT Bank Mega Syariah	10.000.000.000	-
PT Bank Negara Indonesia Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	8.000.000.000	46.500.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	25.000.000.000
Dolar Amerika Serikat		
Pihak Berelasi (Catatan 29b)	7.854.070.650	49.959.450.000
Sub Jumlah	1.883.016.143.849	806.094.567.209
Jumlah	1.924.761.449.588	837.083.007.783

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This amount consist of:

	2019	2018
Kas	598.635.914	772.474.334
Bank		
Rupiah		
Related Parties (Note 28)	17.623.683.808	20.633.114.987
Third Parties		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	12.190.615.355	3.192.786.263
PT Bank BRI Syariah, Tbk	1.387.846.986	1.296.096.644
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	742.241.104	242.407.401
PT Bank DKI	726.016.075	725.519.451
PT Bank Bukopin Tbk	711.923.902	863.711.791
PT Bank CIMB Niaga Tbk	645.174.935	417.121.751
Standard Chartered Bank	306.352.065	307.042.065
PT Bank Central Asia	56.788.832	31.226.669
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	40.162.809	43.774.811
Citibank	37.838.000	43.910.000
PT Bank Syariah Mandiri	16.688.413	68.520.316
PT Bank Mega Tbk	6.542.206	7.543.041
PT Bank Negara Indonesia Syariah	227.257	3.576.512
Sub Total	34.492.101.747	27.876.351.702
United States Dollar		
Related Parties	1.802.621.478	1.118.264.505
Third Parties		
Standard Chartered Bank	4.237.150.038	976.366.365
PT Bank Central Asia	10.789.130	12.180.576
Euro - Related Parties (Note 29a)	604.007.432	232.803.092
	6.654.568.078	2.339.614.538
Deposits		
Rupiah		
Related Parties (Note 29b)	1.592.162.073.199	604.635.117.209
Third Parties		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	130.000.000.000	-
PT Bank Syariah Mandiri	95.000.000.000	50.000.000.000
PT Bank Victoria International Tbk	30.000.000.000	20.000.000.000
PT Bank Mega Syariah	10.000.000.000	-
PT Bank Negara Indonesia Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	8.000.000.000	46.500.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	25.000.000.000
United States Dollars		
Related Parties (Note 29b)	7.854.070.650	49.959.450.000
Sub Total	1.883.016.143.849	806.094.567.209
Total	1.924.761.449.588	837.083.007.783

Tingkat bunga deposito berjangka kurang dari tiga bulan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The interest rates of time deposits with maturity less than three months for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Deposito Rupiah
Deposito Dolar Amerika Serikat
Bagi Hasil atas Deposito Syariah

2019	2018
6.00% - 7.50%	7.15% - 8.50%
0.01% - 0.75%	0.01% - 0.75%
5.50% - 8%	5.87% - 8%

Rupiah
United States Dollar
Profit Sharing of Sharia Deposits

4. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

Pihak Berelasi (Catatan 29c)
Pihak Ketiga
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai

2019	2018
12.134.066.040	18.606.961.720
45.434.830.458	265.619.670.789
(4.115.479.018)	(3.581.913.509)
<u>41.319.351.440</u>	<u>262.037.757.280</u>
<u>53.453.417.480</u>	<u>280.644.719.000</u>

Related Parties (Notes 29c)
Third Parties
Less: Allowance for Impairment Loss

Jumlah

Total

Rincian piutang usaha berdasarkan umur (bulan) adalah sebagai berikut:

4. TRADE RECEIVABLES

This amount consist of:

Sampai dengan 3 bulan
3 bulan - 12 bulan
12 bulan - 24 bulan
Lebih dari 24 bulan

2019	2018
44.453.573.077	254.844.635.703
68.195.365	24.760.945.215
9.167.605.102	918.487.260
3.879.522.954	3.702.564.331
<u>57.568.896.498</u>	<u>284.226.632.509</u>
(4.115.479.018)	(3.581.913.509)
<u>53.453.417.480</u>	<u>280.644.719.000</u>

Up to 3 months
3 months -12 months
12 months -24 months
more than 24 months

Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai
Jumlah

Less: Allowance for Impairment Loss
Total

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

Dolar Amerika Serikat
Rupiah
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai
Jumlah

2019	2018
2.640.000	36.013.139.238
57.566.256.498	248.213.493.271
<u>57.568.896.498</u>	<u>284.226.632.509</u>
(4.115.479.018)	(3.581.913.509)
<u>53.453.417.480</u>	<u>280.644.719.000</u>

United States Dollar
Rupiah
Less: Allowance for Impairment Loss
Total

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

A detail of trade receivables based on currency is as follows:

Saldo Awal
Penambahan Tahun Berjalan
Saldo Akhir

2019	2018
3.581.913.509	3.557.717.837
533.565.509	24.195.672
<u>4.115.479.018</u>	<u>3.581.913.509</u>

Beginning Balance
Addition During the Year
Ending Balance

Manajemen Perum Peruri berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang cukup memadai untuk menutup kerugian atas kemungkinan piutang usaha tak tertagih.

The movement of allowance for impairment of receivables for the year ended December 31, 2019 and 2018 is as follows:

Perum Peruri's management believes that the allowance for impairment of receivables is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Pihak Berelasi (Catatan 29d)	16.327.149.985	23.486.493.413
Pihak Ketiga:		
Bunga Deposito	4.487.948.905	116.873.904
Piutang Pegawai	387.411.306	1.184.998.590
Lainnya	13.787.847.051	16.872.731.175
	<u>18.663.207.262</u>	<u>18.174.603.669</u>
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai	(7.418.251.127)	(4.989.687.506)
Jumlah Pihak Ketiga	<u>11.244.956.135</u>	<u>13.184.916.163</u>
Jumlah	<u>27.572.106.120</u>	<u>36.671.409.576</u>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Saldo Awal	4.989.687.506	5.030.687.506
Penambahan (Pengurangan) Tahun Berjalan	2.428.563.621	(41.000.000)
Saldo Akhir	<u>7.418.251.127</u>	<u>4.989.687.506</u>

Manajemen Perum Peruri berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain cukup memadai untuk menutup kerugian atas kemungkinan piutang lain-lain tak tertagih.

5. OTHERS RECEIVABLES

This amount consist of:

23.486.493.413	<i>Related Parties (Note 29d)</i>
116.873.904	<i>Third Parties:</i>
1.184.998.590	<i>Interest on Time Deposits</i>
16.872.731.175	<i>Employee Receivables</i>
18.174.603.669	<i>Others</i>
(4.989.687.506)	<i>Less: Allowance for Impairment Loss</i>
13.184.916.163	<i>Amount of Third Parties</i>
36.671.409.576	Total

The movement of allowance for impairment loss of other receivables for the year ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

5.030.687.506	<i>Beginning Balance</i>
(41.000.000)	<i>Additional (Deduction) During the Year</i>
4.989.687.506	Ending Balance

Perum Peruri's Management believes that the allowance for impairment of other receivables is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

6. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Persediaan dalam Pengolahan:		
Uang Kertas	35.813.842.884	158.862.517.037
Uang Logam	3.307.817.396	6.766.777.796
Produk Non-uang	8.388.443.877	48.387.189.980
	<u>47.510.104.157</u>	<u>214.016.484.813</u>
Persediaan Bahan dan Lainnya:		
Tinta dan Bahan Kimia	88.497.667.218	153.738.557.552
Kertas dan Bahan Lainnya	181.657.305.422	157.577.245.294
	<u>270.154.972.640</u>	<u>311.315.802.846</u>
Persediaan Barang Jadi	61.830.963.911	40.148.069.663
Total Persediaan	<u>379.496.040.708</u>	<u>565.480.357.322</u>
Dikurangi: Penyisihan Persediaan Usang dan Bergerak Lambat	(14.965.519.355)	(17.336.006.429)
Jumlah	<u>364.530.521.353</u>	<u>548.144.350.893</u>

Mutasi persediaan yang mengalami penurunan nilai untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Saldo Awal	17.336.006.429	21.485.756.954
Pemulihan Tahun Berjalan	(2.370.487.074)	(4.149.750.525)
Saldo Akhir	<u>14.965.519.355</u>	<u>17.336.006.429</u>

6. INVENTORIES

This amount consist of:

158.862.517.037	<i>Work in Process:</i>
6.766.777.796	<i>Banknotes</i>
48.387.189.980	<i>Coins</i>
214.016.484.813	<i>Non-money Products</i>
153.738.557.552	<i>Raw Materials and Others:</i>
157.577.245.294	<i>Ink and Chemicals</i>
311.315.802.846	<i>Paper and Other Materials</i>
40.148.069.663	<i>Finished Goods</i>
565.480.357.322	Total Inventory
(17.336.006.429)	<i>Less: Allowances for Obsolete and Slow-moving Inventory</i>
548.144.350.893	Total

A movement of the inventories that were impaired for the years ended December 31, 2019 and 2018 is as follows:

21.485.756.954	<i>Beginning Balance</i>
(4.149.750.525)	<i>Recovery in the Current Year</i>
17.336.006.429	Ending Balance

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Seluruh persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah nilai pertanggungan asuransi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp684.099.805.480 dan Rp563.364.264.377. Manajemen Perum Peruri berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya yang mungkin dialami Perum Peruri.

6. INVENTORIES (Continued)

Inventories are insured against losses from fire disaster, stealing and other risk with the amount of insurance coverage as of December 31, 2019 and 2018 is amounting to Rp684,099,805,480 and Rp563,364,264,377 respectively. Perum Peruri's management believes that the insurance coverage is sufficient to cover the possibility of fire disaster risk and other risks that may occurred.

7. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pajak Pertambahan Nilai - Entitas Anak	22.085.977.977	22.796.985.301
Pajak Penghasilan:		
Pasal 22 - Entitas Anak	9.170.269.394	6.683.637.278
Pasal 23 - Entitas Anak	943.728.063	239.581.459
Pasal 28A - Entitas Anak	4.127.986.231	8.980.894.826
Pasal 28A		
Tahun Pajak 2018	8.159.491.378	8.159.491.378
Tahun Pajak 2015	-	27.050.419.737
Tahun Pajak 2014	-	21.077.503.142
Tahun Pajak 2012	-	9.532.088.250
Jumlah	<u>44.487.453.043</u>	<u>104.520.601.371</u>

Value Added Tax - Subsidiaries
Income Taxes:
Article 22 - Subsidiaries
Article 23 - Subsidiaries
Article 28A - Subsidiaries
Article 28A
Fiscal Year 2018
Fiscal Year 2015
Fiscal Year 2014
Fiscal Year 2012
Total

b. Utang Pajak

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PPN - Entitas Anak	2.989.754.841	3.390.573.831
PPN - Perum Peruri	71.057.392.958	5.359.788.012
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21	4.596.008.867	4.616.134.662
Pasal 22	1.444.321.998	356.037.345
Pasal 23	1.765.088.221	491.087.725
Pasal 25	4.793.817.897	228.109.229
Pasal 4 (2)	1.606.955.116	648.773.057
Pasal 29	33.379.100.221	23.554.800.797
Jumlah	<u>121.632.440.119</u>	<u>38.645.304.658</u>

Value Added Tax - Subsidiaries
Value Added Tax - Perum Peruri
Income Taxes:
Article 21
Article 22
Article 23
Article 25
Article 4 (2)
Article 29
Total

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antar laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran laba kena pajak Perum Peruri serta perhitungan beban dan utang pajak penghasilan badan tahun berjalan adalah sebagai berikut:

c. Current Tax

A reconciliation between profit before corporate income tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and Perum Peruri's taxable income, and the computation of current corporate income tax payable and current income tax expense is as follows:

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Kini (Lanjutan)

	2019	2018
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Konsolidasian	880.260.185.457	407.946.890.460
Dikurangi: Laba (Rugi) Entitas Anak Sebelum Pajak Penghasilan	17.824.679.242	16.426.392.346
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Induk	<u>862.435.506.215</u>	<u>391.520.498.114</u>
Beda Tetap:		
Keuntungan dari Penjualan Aset yang Dikenakan Pajak Final	(590.906.802.222)	-
Pendapatan Bunga yang Dikenakan Pajak Final	(41.148.212.255)	(22.974.755.356)
Pendapatan Sewa yang Dikenakan Pajak Final	(4.691.142.876)	(11.454.339.415)
Bagian atas Laba Bersih - Entitas Bersama	(40.738.862.661)	(7.410.970.044)
Beban Pajak	14.330.784.202	7.992.227.209
Beban Sosial dan Lain-lain	293.767.982.575	70.530.754.929
Beban Pegawai	109.570.053.201	33.037.547.478
	<u>602.619.306.179</u>	<u>461.240.962.915</u>
Beda Temporer:		
Beban Imbalan Kerja	33.009.581.664	19.056.366.715
Beban Pegawai, Provisi, dll	51.761.973.947	130.983.362.096
Penyisihan/(Realisasi) Barang Usang dan Bergerak Lambat	(2.089.713.121)	(4.431.789.282)
Penyisihan/(Realisasi) Nilai Piutang	2.934.190.384	7.312.300
Selisih Beban Penyusutan Aset Tetap	(162.225.616.851)	(143.690.783.731)
Laba Kena Pajak	<u>526.009.722.202</u>	<u>463.165.431.013</u>
Pajak Penghasilan Badan Tahun berjalan dengan Tarif yang Berlaku	131.502.430.550	115.791.357.752
Dikurangi:		
Pajak Penghasilan Pasal 25	54.470.144.016	74.682.310.716
Pajak Penghasilan Pasal 23	22.826.720.601	31.180.497.604
Pajak Penghasilan Pasal 22	22.030.210.122	18.088.040.810
Jumlah Kredit Pajak	<u>99.327.074.739</u>	<u>123.950.849.130</u>
Taksiran Kurang (Lebih) Bayar Pajak Badan - Entitas Induk	32.175.355.811	(8.159.491.378)
Entitas Anak:		
Pajak Penghasilan Badan Tahun Berjalan	7.759.139.222	5.499.553.011
Utang Pajak Badan	1.203.744.410	42.608.311
Jumlah Beban Pajak Penghasilan Badan Tahun Berjalan	<u><u>139.261.569.772</u></u>	<u><u>121.290.910.763</u></u>

7. TAXATION (Continued)

c. Current Tax (Continued)

Consolidated Profit before Income Tax
Less: Profit (Loss) before Income Tax of Subsidiaries
Profit before Income Tax - Parent Entity
Permanent Differences:
Gain from Sales of Asset Subject to Final Tax
Interest Income Subject to Final Tax
Rent Income Subject to Final Tax
Share of Net Profit - of Joint Venture
Tax Expenses
Social Expense and Others
Employee Expenses
Temporary Differences:
Employee Benefits
Employee Expenses, Provision, etc.
Allowance/(Realization) for Obsolete And Slow Moving Inventories
Impairment Loss of Receivable
Difference in Fixed Assets
Depreciation Expense
Taxable Income
Corporate Income Tax of the Year
Less:
Income Tax Article 25
Income Tax Article 23
Income Tax Article 22
Total Tax Credit
Estimated Underpayment (Overpayment) of Parent Entity
Subsidiaries:
Corporate Income Tax of The Year
Corporate Tax Payable
Total Income Tax Expense for The Year

Manajemen Perum Peruri akan melaporkan laba kena pajak Perum Peruri dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2019 dengan jumlah yang sama dengan perhitungan laba kena pajak tahun 2019 tersebut di atas.

Perum Peruri's management will report taxable income in its Annual Tax Returns (SPT) year 2019 using the same figures as shown in the above calculation of the 2019 taxable income.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Kini (Lanjutan)

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) di mana pada suatu situasi tertentu peraturan perpajakan yang berlaku memerlukan interpretasi. Manajemen menetapkan ketentuan mana yang tepat atas dasar jumlah yang diharapkan akan dibayarkan kepada pihak berwenang.

Berdasarkan peraturan pajak yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008, Dirjen Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhitungnya pajak.

7. TAXATION (Continued)

c. Current Tax (Continued)

Management periodically evaluates positions taken in tax returns (SPT) with the respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. They establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the authorities.

Based on taxation law which are applicable starting from January 1, 2008, the Directorate General of Tax may assess or amend taxes liabilities within five years from the date the tax becomes due.

d. Manfaat/(Beban) Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax Benefits/(Expenses)

	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Dibebankan ke Laporan (Laba) Rugi/ Charged to Statement of Income	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Perum Peruri:					Perum Peruri:
<u>Aset Pajak Tangguhan:</u>					<u>Deferred Tax Assets:</u>
Cadangan Imbalan Jasa Masa Kerja	48.357.136.045	11.798.415.207	23.897.023.403	84.052.574.655	Provision for Employee Benefits
Dampak Penerapan PSAK 24	(1.251.360.811)	-	-	(1.251.360.811)	Impact of Adoption of PSAK 24
Jumlah	47.105.775.234	11.798.415.207	23.897.023.403	82.801.213.844	Total
Penyisihan Persediaan Usang dan Bergerak Lambat					Provision for Obsolete & Slow-Moving Inventories
Beban Pegawai, Provisi, dll	83.743.924.219	12.940.493.487	-	96.684.417.706	Employee Expenses, Provision, etc.
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang					Provision for Impairment Loss of Trade Receivables
Sub Jumlah	88.960.703.937	14.077.009.605	-	103.037.713.542	Sub Total
Liabilitas Pajak Tangguhan:					Deferred Tax Liabilities
Aset Tetap	(122.541.477.685)	(40.556.404.213)	-	(163.097.881.898)	Fixed Assets
Sub Jumlah	13.525.001.486	(14.680.979.401)	23.897.023.403	(163.097.881.898)	Sub Total
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan	13.525.001.486	(14.680.979.401)	23.897.023.403	22.741.045.488	Deferred Tax Assets (Liabilities)
Entitas Anak:					Subsidiaries
Liabilitas Pajak Tangguhan					Deferred Tax Liabilities
Sub Jumlah	-	-	-	-	Sub Total
Aset Pajak Tangguhan:					Deferred Tax Assets:
Aset Pajak Tangguhan	4.261.357.530	(1.011.387.967)	276.831.867	3.526.801.430	Deferred Tax Assets
Penyesuaian Pajak Tangguhan	1.855.398.093	-	-	1.855.398.093	Adjustment of Deferred Tax
Dampak Penerapan PSAK 24	(416.285.901)	-	-	(416.285.901)	Impact of Adoption of PSAK 24
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan	5.700.469.722	(1.011.387.967)	276.831.867	4.965.913.622	Deferred Tax Assets (Liabilities)
Total Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan					Total of Deferred Tax Assets (Liabilities)
	19.225.471.208	(15.692.367.368)	24.173.855.270	27.706.959.110	

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7 PERPAJAKAN (Lanjutan)

7. TAXATION (Continued)

d. Manfaat/(Beban) Pajak Tangguhan (Lanjutan)

d. Deferred Tax Benefits/(Expenses) (Continued)

	31 Desember 2017/	Dibebankan ke Laporan (Laba) Rugi/	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/	31 Desember 2018/	
	December 31, 2017	Charged to Statement of Income	Charged to Other Comprehensive Income	December 31, 2018	
Perum Peruri:					Perum Peruri:
<u>Aset Pajak Tangguhan:</u>					<u>Deferred Tax Assets:</u>
Cadangan Imbalan Jasa Masa Kerja	43.593.044.366	4.764.091.679	-	48.357.136.045	Provision for Employee Benefits
Dampak Penerapan PSAK 24	(1.251.360.811)	-	-	(1.251.360.811)	Impact of Adoption of PSAK 24
Jumlah	42.341.683.555	4.764.091.679	-	47.105.775.234	Total
Penyisihan Persediaan Usang dan Bergerak Lambat	5.278.659.772	(1.107.947.321)	-	4.170.712.451	Provision for Obsolete & Slow- Moving Inventories
Beban Pegawai, Provisi, dll	50.998.083.695	32.745.840.524	-	83.743.924.219	Employee Expenses, Provision, etc.
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	1.044.239.192	1.828.075	-	1.046.067.267	Allowance for Impairment of A/R
Sub Jumlah	57.320.982.659	31.639.721.278	-	88.960.703.937	Sub Total
Liabilitas Pajak Tangguhan:					Deferred Tax Liabilities
Aset Tetap	(86.618.781.752)	(35.922.695.933)	-	(122.541.477.685)	Fixed Assets
Sub Jumlah	13.043.884.462	481.117.024	-	13.525.001.486	Sub Total
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan	13.043.884.462	481.117.024	-	13.525.001.486	Deferred Tax Assets (Liabilities)
Entitas Anak:					Subsidiaries
Liabilitas Pajak Tangguhan	-	-	-	-	Deferred Tax Liabilities
Sub Jumlah	-	-	-	-	Sub Total
Aset Pajak Tangguhan:					Deferred Tax Assets:
Aset Pajak Tangguhan	3.464.650.595	376.461.990	420.244.945	4.261.357.530	Deferred Tax Assets
Penyesuaian Pajak Tangguhan	1.833.594.440	21.803.653	-	1.855.398.093	Adjustment of Deferred Tax
Dampak Penerapan PSAK 24	(416.285.901)	-	-	(416.285.901)	Impact of Adoption of PSAK 24
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan	4.881.959.134	398.265.643	420.244.945	5.700.469.722	Deferred Tax Assets (Liabilities)
Total Aset Pajak Tangguhan	17.925.843.596	879.382.667	420.244.945	19.225.471.208	Total of Deferred Tax Assets

e. Ketetapan Pajak

SKPLB Badan Tahun 2012

Terdapat surat perintah pemeriksaan No.Pemb 00725/WPJ.19/KP.0305 /RIK.SIS/2013 tanggal 10 Juli 2013. Dari hasil pemeriksaan tersebut sudah keluar keputusan mengenai SKPLB No.00025/406/12/051/14 tanggal 17 April 2014 yang menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang diakui oleh kantor pajak adalah sebesar Rp40.444.961.810, berbeda dengan permohonan restitusi PPh badan tahun 2012 Perum Peruri sebesar Rp49.977.050.060.

Pada tanggal 4 September 2015, Perum Peruri mengajukan permohonan Banding berdasarkan Surat No: 1572/IX/2015. Pada tanggal 25 Oktober 2019 Perum Peruri telah menerima Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put-095891.15/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019 yang telah diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2019. Hasil Putusan Pengadilan Pajak tersebut mengabulkan sebagian permohonan banding oleh Perum Peruri dari sebelumnya menurut SKPLB Rp40.444.961.810 menjadi lebih bayar Rp40.612.456.560. Atas selisih tersebut Perum Peruri telah menerima sebesar Rp167.494.750 pada tanggal 3 Desember 2019.

e. Tax Assessment Letter

SKLB Corporate Income Tax 2012

There has been an audit letter No.Pemb 00725/WPJ.19/KP.0305 /RIK.SIS/2013 on July 10, 2013. Based on the examination result there was an overpayment No.00025/406/12/051/14 dated April 17, 2014 which stated that the overpayment amount is amounting to Rp40,444,961,810 which was different from the Company's records of corporate income tax 2012 that is amounting to Rp49,977,050,060.

On September 4, 2015, Perum Peruri submitted an appeal by letter No: 1572/IX/2015. On October, 25 2019 Perum Peruri had received official copy of Tax Court Decision No. Put-095891.15/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019 which was pronounced on October 17, 2019. The Tax Decision Results granted the majority of appeal requests by Perum Peruri from the previous overpaid according to SKPLB Rp40,444,961,810 to be overpaid Rp40,612,456,560. For this difference Perum Peruri had been received Rp 167,494,750 on December 3, 2019.

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Ketetapan Pajak (Lanjutan)

SKPLB Badan Tahun 2013

Pada tanggal 26 Mei 2015 Perum Peruri menerima surat pemeriksaan untuk PPH Badan 2013 dengan nomor Pemb-00112/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2015. Dari hasil pemeriksaan tersebut telah diterbitkan SKPKB dan STP pada tanggal 2 Februari 2016 dengan total Rp36.216.374.785. Perum Peruri telah menyetujui sebagian dari hasil pemeriksaan tersebut. Atas Rp18.006.383.426, Perum Peruri telah mengajukan keberatan kepada Kantor Pajak pada tanggal 8 April 2016. Pada tanggal 20 Februari 2017, Kantor Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan Nomor: 00099/KEB/WPJ.19/2017 yang menetapkan menolak permohonan keberatan.

Pada tanggal 18 Mei 2017 Perum Peruri mengajukan surat permohonan banding dengan Nomor: 387/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 kepada Pengadilan Pajak. Pada tanggal 5 April 2019 Perum Peruri telah menerima Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put-112899.15/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2019 yang telah diucapkan pada tanggal 21 Maret 2019. Hasil Putusan Pengadilan Pajak tersebut mengabulkan seluruhnya permohonan banding oleh Perum Peruri dari sebelumnya menurut SKPKB Rp36.216.374.785 menjadi kurang bayar Rp4.271.337.451. Atas kurang bayar tersebut Perum Peruri telah menyetorkan kurang bayar sebesar Rp3.231.289.207 pada tanggal 24 Mei 2019 dan selisihnya sebesar Rp1.040.048.244 telah disetorkan pada tahun 2016.

SKPLB Badan Tahun 2014

Pada tanggal 18 April 2016, Perum Peruri menerima SKPKB untuk pajak penghasilan badan tahun 2014 sebesar Rp21.036.601.553. Atas SKPKB tersebut, Perum Peruri mengajukan keberatan ke Kantor Pajak pada tanggal 22 Juni 2016. Pada tanggal 21 Februari 2017, Kantor Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan Nomor: 00126/KEB/WPJ.19/2017 yang menetapkan menolak permohonan keberatan.

Pada tanggal 18 Mei 2017 Perum Peruri mengajukan surat permohonan banding dengan Nomor: 390/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 kepada Pengadilan Pajak. Pada tanggal 5 April 2019 Perum Peruri telah menerima Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put-112981.15/2014/PP/M.XIIIA Tahun 2019 yang telah diucapkan pada tanggal 21 Maret 2019. Hasil Putusan Pengadilan Pajak tersebut mengabulkan sebagian permohonan banding oleh Perum Peruri dari SKPKB Rp21.036.601.553 menjadi kurang bayar Rp1.545.753.845. Atas kurang bayar tersebut, Perum Peruri telah menyetorkan sebesar Rp1.545.753.845 pada tanggal 24 Mei 2019.

7. TAXATION (Continued)

e. Tax Assessment Letter (Continued)

SKPLB Corporate Income Tax 2013

On May 26, 2015 Perum Peruri received an examination letter for 2013 Corporate Income Tax with the number Pemb-00112/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2015. From the results of the examination, SKPKB and STP were issued on February 2, 2016 for a total of Rp36,216,374,785. Perum Peruri has agreed to a part of the results of the examination. With respect to Rp18,006,383,426, Perum Peruri submitted an objection to the Tax Office on April 8, 2016. On February 20, 2017, the Tax Office issued an objection decision letter Number: 00099/KEB/WPJ.19/2017 which stipulated to reject the objection request.

On May 18, 2017 Perum Peruri submitted an appeal letter with Number: 387/V/2017 dated May 17, 2017 to the Tax Court. On April 5, 2019, Perum Peruri received an official copy of Tax Court Decision No. Put-112899.15 / 2013 / PP / M.XIIIA 2019 which was pronounced on March 21, 2019. The Tax Court Decision granted the entire appeal request by Perum Peruri from the previous according to SKPKB Rp36,216,374,785 to be underpaid Rp4,271,337,451. For the underpayment Perum Peruri has paid the underpayment of Rp3,231,289,207 on May 24, 2019 and the difference amounting to Rp1,040,048,244 was paid in 2016.

SKPLB Corporate Income Tax 2014

On April 18, 2016, Perum Peruri received SKPKB for 2014 corporate income tax amounting to Rp21,036,601,553. With respect to the said SKPKB, Perum Peruri filed an objection to the Tax Office on June 22, 2016. On February 21, 2017, the Tax Office issued an objection letter No. 00126/KEB/WPJ.19/2017 which stipulated rejecting the objection request.

On May 18, 2017 Perum Peruri submitted a letter of appeal with Number: 390 / V / 2017 May 18, 2017 to the Tax Court. On 5 April 2019, Perum Peruri received an official copy of Tax Court Decision No. Put-112981.15 / 2014 / PP / M.XIIIA 2019 which was pronounced on March 21, 2019. The Tax Court Decree granted part of an appeal by Perum Peruri from SKPKB Rp21,036,601,553 to underpayment Rp1,545,753,845. For the underpayment, Perum Peruri made a deposit of Rp1,545,753,845 on May 24, 2019.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Ketetapan Pajak (Lanjutan)

SKPLB Badan Tahun 2015

Pada tanggal 26 April 2017, Perum Peruri menerima SKPKB untuk pajak penghasilan badan Tahun 2015 sebesar Rp31.676.095.497. Atas SKPKB tersebut, Perum Peruri mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 418/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 ke Kantor Pajak pada tanggal 9 Juni 2017. Pada tanggal 28 Maret 2018, Kantor Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan Nomor: KEP-90001/KEB/WPJ.19/2018 yang menetapkan menolak permohonan keberatan. Pada tanggal 7 Juni 2018 Perum Peruri mengajukan surat permohonan banding dengan Nomor: 383/VI/2018 kepada pengadilan pajak.

Pada tanggal 27 Agustus 2019 Perum Peruri telah menerima Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put-004708.15/2018/PP/M.XIIIA Tahun 2019 yang telah diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2019. Hasil Putusan Pengadilan Pajak tersebut mengabulkan seluruhnya permohonan banding oleh Perum Peruri dari SKPKB Rp31.676.095.497 menjadi kurang bayar Rp4.108.156.857. Atas kurang bayar tersebut telah dibayarkan oleh Perum Peruri sebesar Rp4.108.156.857 pada tanggal 22 Mei 2017.

Pemeriksaan Pajak Tahun 2018

Berdasarkan Surat dari KPP Wajib Pajak Besar Tiga No.PEMB-00180/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Perum Peruri saat ini menjalani pemeriksaan pajak atas lebih bayar PPh Badan Tahun 2018 sebesar Rp8.159.491.378. Hingga laporan keuangan ini diterbitkan Perum Peruri masih menjalankan proses Pemeriksaan Pajak.

7. TAXATION (Continued)

e. Tax Assessment Letter (Continued)

SKPLB Corporate Income Tax 2015

On April 26, 2017, Perum Peruri received SKPKB for 2015 corporate income tax amounting to Rp31,676,095,497. With respect to the SKPKB, Perum Peruri submitted an objection with letter Number: 418/VI/2017 dated June 2, 2017 to the Tax Office on June 9, 2017. On March 28, 2018, the Tax Office issued an objection decision letter Number: KEP-90001/KEB/WPJ.19/2018 which determined to reject the objection request. On June 7, 2018, Perum Peruri submitted an appeal letter with Number: 383/VI/2018 to the tax court.

On August 27, 2019, Perum Peruri received an official copy of Tax Court Decision No. Put-004708.15/2018/PP/ M.XIIIA 2019 which was pronounced on August 15, 2019. The results of the Tax Court Decision granted the entire appeal by Perum Peruri from the SKPKB Rp31,676,095,497 to be underpaid Rp4,108,156,857. The underpayment was paid by Perum Peruri amounting to Rp4,108,156,857 on May 22, 2017.

Tax Audit 2018

Based on the Letter from the Tax Office Number Three No. PEMB-00180/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/ 2019 dated September 3, 2019 regarding Notification of Field Inspections, Perum Peruri is currently undergoing a tax audit on overpayment of 2018 Corporate Income Tax amounting to Rp8,159,491,378. As of the issuance of these consolidated financial statements, Perum Peruri is still carrying out the Tax Audit process.

8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Uang Muka:		
Pemasok	200.568.496.092	91.422.698.027
Operasional	917.920.946	19.810.151.319
Pegawai	891.076.837	1.143.194.696
Sub jumlah	<u>202.377.493.875</u>	<u>112.376.044.042</u>
Biaya Dibayar di Muka:		
Asuransi Dibayar di Muka	1.454.222.574	1.312.787.526
Sewa Lahan	34.986.541	1.032.678.750
Biaya Dibayar Dimuka Lainnya	4.511.120.870	-
Sub jumlah	<u>6.000.329.985</u>	<u>2.345.466.276</u>
Jumlah	<u>208.377.823.860</u>	<u>114.721.510.318</u>

8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

This amount consist of:

Advances:
Suppliers
Operation
Employees
Sub total
Prepaid Expenses:
Prepaid Insurance
Land Lease
Other prepaid expenses
Sub total
Total

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Pada Awal Tahun	97.735.918.260	90.324.948.216
Bagian Keuntungan	43.138.862.661	24.090.970.044
Penerimaan Dividen dari Ventura Bersama	(2.400.000.000)	(16.680.000.000)
Jumlah	138.474.780.921	97.735.918.260

9. INVESTMENT IN JOINT VENTURES

This amount consist of:

At the Beginning of the Year
Share of profit
Dividend receipt from joint venture
Total

Nama Entitas	PT Sicpa Peruri Securink (PT SPS)	Name of Entity
Lokasi Usaha	Indonesia	Place of Business
Presentasi Kepemilikan	48%	Ownership Interest
Metode Pengukuran	Ekuitas/ Equity	Measurement Method

PT SPS sebagai ventura bersama memiliki modal saham yang terdiri dari saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh Perum Peruri.

PT SPS as a joint venture has share capital consisting solely of ordinary shares, which is held directly by Perum Peruri.

10. SURAT BERHARGA

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Surat berharga tersedia untuk dijual		
Obligasi berkelanjutan III		
Bank BRI Tahap 1 Tahun	10.000.000.000	-
Obligasi berkelanjutan I		
Semen Indonesia Tahap II	10.000.000.000	-
Obligasi berkelanjutan I		
Timah Tahap II Tahun 2019	10.000.000.000	-
Obligasi berkelanjutan I		
Timah Tahap II Tahun 2019	10.000.000.000	-
Jumlah	40.000.000.000	-

10. MARKETABLE SECURITIES

This amount consist of:

Marketable securities available for sale
Obligasi berkelanjutan III
Bank BRI Tahap 1 Tahun
Obligasi berkelanjutan I
Semen Indonesia Tahap II
Obligasi berkelanjutan I
Timah Tahap II Tahun 2019
Obligasi berkelanjutan I
Timah Tahap II Tahun 2019
Total

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan peringkat obligasi adalah sebagai berikut:

Information regarding interest rates and bond ratings is as follows:

	2019		
	Suku bunga/ Interest rate (%)	Peringkat/ Rating*)	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri A	6,50%	id AAA	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri A
Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019 Seri A	9,00%	id AA	Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019 Seri A
Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019 Seri A	8,50%	id A+	Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019 Seri A
Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019 Seri B	8,75%	id A+	Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019 Seri B

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
 tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
 AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019 and
 for the year then ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

		2019					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan / Additions Rp	Pengurangan/ Disposal Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Balance Rp		
Harga Perolehan Kepemilikan						Acquisition Cost Directly Owned:	
Langsung :							
Tanah	26.846.300.591	-	794.378.775	-	26.051.921.816	Land	
Bangunan	810.598.253.825	77.028.222.768	70.591.500	-	887.555.885.093	Building	
Mesin Utama Pabrik	4.145.982.233.893	200.905.456.395	30.596.037.469	-	4.316.291.652.819	Main Factory Machinery	
Mesin Penunjang Pabrik	350.786.273.371	22.105.781.848	-	-	372.892.055.219	Support Machinery	
Peralatan Pabrik	436.947.961.178	16.889.284.230	9.850.111.525	-	443.987.133.883	Factory Equipment	
Peralatan Kantor	39.902.286.837	73.769.682.553	274.547.139	-	113.397.422.251	Office Equipment	
Mebel dan Perabotan	2.313.505.920	8.700.000	940.858	-	2.321.265.062	Furniture and Fixture	
Kendaraan	19.997.461.065	822.522.000	871.634.850	424.400.000	20.372.748.215	Vehicles	
Aset Sewa Pembiayaan:						Assets under Finance Lease	
Kendaraan	424.400.000	-	-	(424.400.000)	-	Vehicles	
	5.833.798.676.680	391.529.649.794	42.458.242.116	-	6.182.870.084.357		
Aset Dalam Penyelesaian	52.907.462.731	595.273.199.839	501.094.889.580	-	147.085.772.990	Assets under Construction	
	5.886.706.139.411	986.802.849.633	543.553.131.696	-	6.329.955.857.347		
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation	
Kepemilikan Langsung :							
Bangunan	463.437.326.499	25.517.993.215	70.591.500	-	488.884.728.214	Building	
Mesin Utama Pabrik	2.193.024.395.720	180.342.860.395	32.545.074.013	-	2.340.822.182.102	Main Factory Machinery	
Mesin Penunjang Pabrik	105.912.467.345	24.576.978.930	-	-	130.489.446.275	Support Machinery	
Peralatan Pabrik	356.957.022.481	23.897.561.096	9.837.876.633	-	371.016.706.944	Factory Equipment	
Peralatan Kantor	29.573.584.248	4.593.236.568	274.204.434	-	33.892.616.382	Office Equipment	
Mebel dan Perabotan	819.772.877	24.951.250	941.331	-	843.782.796	Furniture and Fixture	
Kendaraan	16.676.273.903	1.752.767.376	871.634.836	371.349.986	17.928.756.429	Vehicles	
Aset Sewa Pembiayaan:						Assets under Finance Lease	
Kendaraan	-	-	-	(371.349.986)	-	Vehicles	
	3.166.772.193.059	260.706.348.830	43.600.322.747	-	3.383.878.219.142		
Nilai Buku Bersih	2.719.933.946.352				2.946.077.638.205	Net Book Value	

		2018					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan / Additions Rp	Pengurangan/ Disposal Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Balance Rp		
Harga Perolehan Kepemilikan						Acquisition Cost Directly Owned:	
Langsung :							
Tanah	25.716.756.035	-	-	1.129.544.556	26.846.300.591	Land	
Bangunan	764.032.450.603	48.462.096.532	1.896.293.310	-	810.598.253.825	Building	
Mesin Utama Pabrik	3.531.285.619.436	614.696.614.457	-	-	4.145.982.233.893	Main Factory Machinery	
Mesin Penunjang Pabrik	137.013.126.114	213.916.439.436	143.292.179	-	350.786.273.371	Support Machinery	
Peralatan Pabrik	423.383.309.040	13.685.853.468	121.201.330	-	436.947.961.178	Factory Equipment	
Peralatan Kantor	27.979.979.715	12.002.487.372	80.180.250	-	39.902.286.837	Office Equipment	
Mebel dan Perabotan	2.262.655.920	50.850.000	-	-	2.313.505.920	Furniture and Fixture	
Kendaraan	19.359.561.609	1.097.115.456	459.216.000	-	19.997.461.065	Vehicles	
Aset Sewa Pembiayaan:						Assets under Finance Lease	
Kendaraan	424.400.000	-	-	-	424.400.000	Vehicles	
	4.931.457.858.472	903.911.456.721	2.700.183.069	1.129.544.556	5.833.798.676.679		
Aset Dalam Penyelesaian	248.142.337.303	1.961.767.211.963	2.157.002.086.534	-	52.907.462.732	Assets under Construction	
	5.179.600.195.775	2.865.678.668.684	2.159.702.269.603	1.129.544.556	5.886.706.139.411		

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

11. FIXED ASSETS (Continued)

	2018				Saldo Akhir/ Balance Rp	
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan / Additions Rp	Pengurangan/ Disposal Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp		
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Kepemilikan Langsung :						Directly Owned:
Bangunan	437.034.034.698	26.428.402.407	25.110.606	-	463.437.326.499	Building
Mesin Utama Pabrik	2.047.312.147.311	145.712.248.409	-	-	2.193.024.395.720	Main Factory Machinery
Mesin Penunjang Pabrik	53.290.042.539	52.670.789.334	48.364.528	-	105.912.467.345	Support Machinery
Peralatan Pabrik	333.335.783.233	23.621.239.248	-	-	356.957.022.481	Factory Equipment
Peralatan Kantor	27.159.156.748	2.437.251.833	22.824.333	-	29.573.584.248	Office Equipment
Mebel dan Perabotan	863.034.048	26.351.796	69.612.967	-	819.772.877	Furniture and Fixture
Kendaraan	14.691.608.022	2.672.732.907	688.067.026	-	16.676.273.903	Vehicles
Aset Sewa Pembiayaan:						Assets under Finance Lease
Kendaraan	371.349.986	-	-	-	371.349.986	Vehicles
	2.914.057.156.585	253.569.015.934	853.979.460	-	3.166.772.193.059	
Nilai Buku Bersih	2.265.543.039.190				2.719.933.946.352	Net Book Value

Aset tetap Perum Peruri telah dijadikan agunan atas fasilitas pinjaman bank (Catatan 16).

Perum Peruri has pledged certain property, plant, and equipment as collateral for bank loans (Note 16).

Penambahan aset tetap selama tahun 2019 dan 2018 sebagian terdiri dari penambahan aset tetap yang berasal dari entitas anak masing-masing sebesar Rp25.387.575.626 dan Rp88.536.018.406 dan penambahan dari Perum Peruri masing-masing sebesar Rp961.415.275.014 dan Rp815.375.438.315.

The addition of property, plant, and equipment during 2019 and 2018 consist of addition from subsidiaries amounting to Rp25,387,575,626 and Rp88,536,018,406, respectively and addition from Perum Peruri amounting to Rp961,415,275,014 and Rp815,375,438,315, respectively.

Perum Peruri telah mengasuransikan aset tetapnya terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, bencana alam gempa dan risiko lainnya pada tahun 2019 dan 2018 kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Jenis aset dan nilai yang dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

Perum Peruri has insured all its property, plant, and equipment against possible losses caused by fire, natural disaster, earthquake and other risks to PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) in 2019 and in 2018. The types of assets and their coverage were as follows:

	2019	2018	
Mesin dan Peralatan	5.862.525.013.703	5.475.661.072.246	Machinery and Equipment
Bangunan Perumahan, Gedung Pabrik dan Kantor	954.854.100.000	704.688.235.455	Residential Building Office and Factory Buildings
Kendaraan	8.750.900.000	8.561.681.364	Vehicles
Jumlah	6.826.130.013.703	6.188.910.989.065	Total

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungjawaban asuransi di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from those risks.

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari mesin dan peralatan pabrik, dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2019 and 2018, construction in progress consists of land certification, machinery and factory equipment, with details as follows:

	2019	2018	
Mesin	7.834.585.253	23.032.328.808	Machinery
Peralatan	146.984.800	-	Equipment
Bangunan	29.643.043.182	29.014.028.898	Building
Software dan Modul Digital	108.255.004.170	-	Software and Digital Module
Sertifikat tanah	1.206.155.585	861.105.026	Land certificate
Jumlah	147.085.772.990	52.907.462.732	Total

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

ASET TETAP (Lanjutan)

Beban depresiasi dialokasikan ke beban pokok penjualan sebesar Rp197.088.745.401 dan Rp177.807.117.026 serta beban umum dan administrasi sebesar Rp63.617.603.429 dan Rp75.761.898.908 masing masing pada tahun 2019 dan 2018.

FIXED ASSETS (Continued)

Depreciation expenses was allocated to cost of goods sold amounting to Rp197,088,745,401 and Rp177,807,117,026 and also to general and administrative expenses amounting to Rp63,617,603,429 and Rp75,761,898,908 in 2019 and 2018, respectively.

12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	2019
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	132.132.617.923
Aset Takberwujud	211.166.424.451
Uang Jaminan	1.539.862.700
Lain-lain	24.707.556.542
	369.546.461.616
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi	(79.427.091.001)
Jumlah - Bersih	290.119.370.615

Aset yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito yang dijamin untuk fasilitas *non cash loan* antara lain pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp50.851.515.000, dan Standard Chartered Bank sebesar Rp77.845.656.000

Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak (*software*) dan Hak Guna Bangunan (HGB). *Software* yang digunakan oleh Perum Peruri untuk sistem informasi akuntansi, dan operasional lainnya. Aset tak berwujud ini diamortisasi selama umur manfaat piranti tersebut.

Beban HGB merupakan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pengurusan perpanjangan HGB yang telah habis masa berlakunya atas tanah Perum Peruri. Beban HGB diamortisasi selama umur hak atas tanah tersebut.

12. OTHER NON CURRENT ASSETS

	2018	
	103.129.050.000	<i>Restricted Cash</i>
	191.167.936.548	<i>Intangible Assets</i>
	1.609.862.700	<i>Guarantee Deposits</i>
	60.689.882.831	<i>Others</i>
	356.596.732.079	
	(59.974.016.667)	<i>Less : Accumulated Amortization</i>
	296.622.715.412	Total - Net

Restricted cash from use are deposits that are pledged as collateral for non cash loan include among others at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp50,851,515,000, and Standard Chartered Bank amounting to Rp77,845,656,000.

Intangible assets consist of software and Building Rights Title (HGB) expenses. Software used by Perum Peruri for accounting information system, and other operations. The intangible assets are amortized over their estimated useful lives.

HGB expenses represent expenses incurred in connection with the renewal of land rights (HGB). The expenses of HGB are amortized over the lives of the rights.

13. UTANG USAHA

	2019
Pihak Berelasi (Catatan 28)	109.941.983.565
Pihak Ketiga	303.589.816.279
Jumlah	413.531.799.844

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2019
Rupiah	248.300.112.148
Euro	28.513.525.610
Dolar Singapura	-
Poundsterling Inggris	61.397.860
Yen Jepang	136.448.718.156
Dolar Amerika Serikat	208.046.070
Jumlah	413.531.799.844

13. TRADE PAYABLE

	2018	
	140.184.945.305	<i>Related Parties (Note 28)</i>
	96.611.044.743	<i>Third Parties</i>
	236.795.990.048	Total

Detail of trade payables based on currency is as follows:

	2018	
	226.609.934.020	<i>Rupiah</i>
	9.129.349.333	<i>Euro</i>
	269.771.653	<i>Singapore Dollar</i>
	277.806.881	<i>British Pound sterling</i>
	331.058.496	<i>Japan Yen</i>
	178.069.665	<i>United States Dollar</i>
	236.795.990.048	Total

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. BEBAN AKRUAL

	2019	2018
Beban Kesehatan Pegawai	268.087.500	10.815.032.053
Bunga Pinjaman	4.400.733.619	12.414.215.769
Retensi	2.741.844.783	4.293.172.116
Lainnya	125.551.003.194	42.034.288.236
Jumlah	132.961.669.096	69.556.708.174

14. ACCRUED EXPENSES

*Employee Health Expenses
Interest on Loan
Retention
Others
Total*

15. UANG MUKA PELANGGAN

	2019	2018
Uang Muka Pelanggan - Produk Non Uang	31.058.146.873	214.443.423
Uang Muka Sewa	1.123.728.298	1.397.601.137
Uang Muka Non Usaha Lainnya	472.727.274	5.506.351.827
Jumlah	32.654.602.445	7.118.396.387

15. ADVANCES FROM CUSTOMERS

*Non-Money Products
Rent Advance
Others Advance
Total*

16. LIABILITAS LANCAR LAINNYA

	2019	2018
Insentif, Bonus dan Jasa Produksi	175.279.095.445	153.719.304.152
Program Pelayanan Kesehatan Bersama	35.532.239.286	34.754.566.050
Tantiem	21.856.142.845	17.664.643.903
Yapetri dan Dapetri	150.877.306	169.732.690
Lain-Lain	247.917.108.562	123.354.662.453
Jumlah	480.735.463.444	329.662.909.248

16. OTHER CURRENT LIABILITIES

*Incentive, Bonuses and Production Services
Joint Health Services Program
Tantiem
Yapetri and Dapetri
Others
Total*

17. PINJAMAN BANK

	2019	2018
Pihak Berelasi (Catatan 29f)	1.454.700.713.058	1.595.032.493.405
Pihak Ketiga		
PT BPD Jabar Banten, Tbk	8.468.528.518	21.139.242.519
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	3.098.388.388	1.001.501.244
PT Bank Bukopin Tbk	-	1.817.882.851
PT Bank Negara Indonesia Syariah Tbk	11.000.000.000	4.990.000.000
	22.566.916.906	28.948.626.614
Sub Jumlah	1.477.267.629.964	1.623.981.120.019

17. BANK LOANS

*Related Parties (Note 29f)
Third Parties
PT BPD Jabar Banten, Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Negara Indonesia Syariah Tbk*

Dikurangi : Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Pihak Berelasi (Catatan 29f)	285.149.564.567	261.688.019.613
Pihak Ketiga		
PT BPD Jabar Banten, Tbk	8.468.528.518	21.139.242.520
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	3.098.388.388	1.001.501.244
PT Bank Bukopin Tbk	-	1.817.882.851
PT Bank Negara Indonesia Syariah Tbk	11.000.000.000	4.990.000.000
	22.566.916.906	28.948.626.615

*Less: Portion of Current Maturities
Related Parties (Note 29f)
Third Parties
PT BPD Jabar Banten, Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Negara Indonesia Syariah Tbk*

Sub Jumlah	307.716.481.473	290.636.646.228
Pinjaman Bank yang akan Jatuh Tempo Lebih dari satu tahun	1.169.551.148.491	1.333.344.473.791

Sub Total

Bank Loans that will Mature in more than one year

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

17. BANK LOANS (Continued)

Other significant information related to bank loans as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Kreditur / <i>Creditor</i>	Mata Uang / <i>Currency</i>	Jumlah Fasilitas / <i>Total Facility</i>	Jumlah Outstanding / <i>Total Outstanding</i>	Periode Pinjaman/ Long Term	Periode Pembayaran Bunga/ <i>Interest Payment Period</i>	Jaminan/ <i>Collateral</i>
BRI	Rupiah	788.800.000.000	202.931.735.347	27 Mei 2015 - 27 Mei 2027/ <i>May 27, 2015 - May 27, 2027</i>	Triwulan / <i>Quarterly</i>	Mesin Produksi/ <i>Production Machine</i>
Bank Mandiri	Rupiah	650.000.000.000	282.493.400.054	17 Juli 2013 - 16 Juli 2025/ <i>July 17, 2013 until July 16, 2025</i>	Bulanan / <i>Monthly</i>	Mesin Produksi/ <i>Production Machine</i>
Bank Mandiri	Rupiah	300.000.000.000	32.836.499.200	30 November 2018 - 29 November 2030/ <i>November 30, 2018 until November 29, 2030</i>	Bulanan / <i>Monthly</i>	Mesin Produksi/ <i>Production Machine</i>
Bank Mandiri	Rupiah	630.000.000.000	9.871.708.186	26 Juli 2019 - 25 Juli 2034/ <i>July 26, 2019 until July 25, 2034</i>	Bulanan / <i>Monthly</i>	Pembiayaan Investasi/ <i>Investment Financing</i>
BJB - Entitas Anak / <i>Subsidiary</i>	Rupiah	17.500.000.000	2.500.000.001	28 Februari 2019 - 28 Februari 2020/ <i>February 28, 2019 until February 28, 2020</i>	Bulanan / <i>Monthly</i>	Tanah dan bangunan/ <i>Land and Building</i>
BJB - Entitas Anak / <i>Subsidiary</i>	Rupiah	10.000.000.000	5.968.528.517	10 Juli 2019 - 10 Juli 2020/ <i>July 10, 2019 until July 10, 2020</i>	Bulanan / <i>Monthly</i>	Tanah dan bangunan/ <i>Land and Building</i>
Bank Mandiri	Rupiah	720.000.000.000	540.347.408.000	19 Desember 2016 - 18 Desember 2028/ <i>December 19, 2016 until December 18, 2028</i>	Bulanan / <i>Monthly</i>	Mesin Produksi/ <i>Production Machine</i>
BNI	Rupiah	436.000.000.000	335.207.621.013	27 Juli 2017 - 26 Juli 2026/ <i>July 27, 2017 until July 26, 2026</i>	Bulanan / <i>Monthly</i>	Mesin Produksi/ <i>Production Machine</i>
Bank BRIS Entitas Anak / <i>Subsidiary</i>	Rupiah	15.000.000.000	3.098.388.388	29 April 2019 - 28 April 2021/ <i>April 29, 2019 until April 28, 2021</i>	Bulanan / <i>Monthly</i>	Piutang dan Asuransi Penjaminan / <i>Receivables and Guarantee Insurance</i>
Bank BTN Entitas Anak / <i>Subsidiary</i>	Rupiah	11.500.000.000	2.820.705.333	27 Desember 2018 - 27 Desember 2028/ <i>December 27, 2018 until December 27, 2028</i>	Bulanan / <i>Monthly</i>	Piutang dan Asuransi Penjaminan / <i>Receivables and Guarantee Insurance</i>
Bank BNI Entitas Anak / <i>Subsidiary</i>	Rupiah	15.000.000.000	2.622.369.498	22 Januari 2019 - 21 Januari 2020/ <i>January 22, 2019 until January 21, 2020</i>	Bulanan / <i>Monthly</i>	Tagihan Termin Proyek/ <i>Project Term Bill</i>
Bank Bukopin Entitas Anak / <i>Subsidiary</i>	Rupiah	4.500.000.000	1.817.882.851	24 Oktober 2017 - 23 Oktober 2019/ <i>October 24, 2017 until October 23, 2019</i>	Bulanan / <i>Monthly</i>	Piutang dan Asuransi Penjaminan / <i>Receivables and Guarantee Insurance</i>
Bank BNIS Entitas Anak / <i>Subsidiary</i>	Rupiah	17.000.000.000	11.000.000.000	9 Juni 2019 - 8 Juni 2020/ <i>June 9, 2019 until June 8, 2020</i>	Bulanan / <i>Monthly</i>	Tanah dan Bangunan/ <i>Land and Building</i>

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA

i) Iuran Pensiun

Perum Peruri menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dihitung berdasarkan gaji terakhir dan masa kerja karyawan. Dana pensiun ini dikelola oleh Dapetri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. S-177/MK.16/1997 tanggal 4 Juni 1997.

Pendanaan Dapetri berasal dari kontribusi karyawan dan Perum Peruri, masing-masing sebesar 6% dan 7,4% dari gaji dasar karyawan, dan bila terdapat saldo defisit antara aset dan liabilitas dana pensiun, akan ditanggung oleh Perum Peruri. Aset dana pensiun terutama terdiri atas deposito berjangka, surat-surat berharga dan investasi jangka panjang berbentuk saham, tanah, dan bangunan.

Terhitung sejak tanggal 1 Desember 2010, untuk karyawan yang baru masuk pada dan setelah tanggal 1 Juli 2007, Perum Peruri mengikutkan karyawannya dalam program pensiun iuran pasti (PPIP) yang dikelola oleh dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang ditunjuk oleh masing-masing peserta. Iuran pensiun tersebut berasal dari kontribusi karyawan dan Perum Peruri, masing-masing sebesar 6% dan 13,3% dari gaji dasar karyawan.

Sedangkan untuk karyawan yang masuk sebelum tanggal 1 Juli 2007, imbalan dari manfaat pasti di Dapetri tetap dilanjutkan dengan ketentuan bahwa tidak ada kenaikan gaji dalam perhitungan manfaat pasti pensiunan sejak tanggal 1 Desember 2010 sedangkan masa kerja tetap diperhitungkan. Karyawan yang bersangkutan juga diikutsertakan dalam DPLK yang ditunjuk serta seluruh setoran sebesar 5,9% dari gaji terakhir karyawan dibayarkan oleh Perum Peruri.

Berdasarkan hasil rapat pembahasan dengan Kementerian BUMN pada tanggal 14 Juni 2016, manajemen Perum Peruri memutuskan untuk:

- Menghentikan iuran Perusahaan pada Program Jahartu di Yapetri sebesar 5% dari gaji pokok karyawan efektif sejak bulan Juli 2016, dan
- Menghentikan potongan iuran karyawan pada Program Jahartu di Yapetri sebesar 2,5% dari gaji pokok karyawan efektif sejak bulan Juli 2016.

Tabel-tabel berikut ini meringkas unsur biaya imbalan pensiun yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif Perum Peruri dan jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perum Peruri untuk liabilitas imbalan pensiun berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen Biro Pusat Aktuaria ("BPA") seperti termuat dalam laporan tanggal 14 Januari 2020.

18. EMPLOYMENT BENEFITS

i) Pension Fund

Perum Peruri established a defined benefit pension plan for all its permanent employees, under which contributions to the plan are computed based on the employee's latest salaries and their working lives. This pension fund is administered by a Pension Fund, Dapetri, based on Decision No. S-177/MK.16/1997 dated June 4, 1997 of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

Dapetri is funded by the employees and Perum Peruri's contributions computed at 6% and 7.4%, respectively, of the annual basic salaries of the employees, and Perum Peruri shall bear any shortfall in the net asset of the pension fund. The asset of Dapetri mainly consist of time deposits, marketable securities and long-term investments in shares, land and buildings.

Effective from December 31, 2010, for new employees hired on or after July 1, 2007, Perum Peruri includes them into the defined contribution pension plan which are managed by the appointed financial institution Pension Fund by each participant. Pension contributions are derived from employees and Perum Peruri by 6% and 13.3% of annual basic salary, respectively.

While, for employee who entered prior to July 1, 2007, certain defined benefits which previously managed by Depetri is still continued with the provision that no salary increase in the calculation of defined benefit pension from December 1, 2010, while the working lives is continued to be counted. Those employees are also included in the appointed DPLK and all payments of 5.9% borne by Perum Peruri which calculated from the employees latest salary.

In accordance with the result of discussion meeting with Ministry of SOEs on June 14, 2016, Perum Peruri's management decided to:

- Terminate the company's contribution for Program Jahartu in Yapetri amounted to 5% of employees' gross salary effective since July 2016, and*
- Terminate the employees' contribution for Program Jahartu in Yapetri amounted to 2.5% of employees' gross salary effective since July 2016.*

The following table summarizes the components of pension benefit expense recognized in the consolidated statements of comprehensive income of Perum Peruri and the amounts recognized on the consolidated statements of financial positions of Perum Peruri for employee benefits liabilities based on calculations performed by an independent actuary Biro Pusat Aktuaria ("BPA") as stated in its report dated January 14, 2020.

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

a. Liabilitas (kekayaan) manfaat pensiun:

	2019	2018
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pensiun	367.153.068.000	365.070.942.000
Nilai Wajar Aset Bersih	(412.810.216.000)	(415.603.754.000)
Posisi Pendanaan	(45.657.148.000)	(50.532.812.000)
Dampak Limitasi Aset	45.657.148.000	50.532.812.000
Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	-	-

b. Beban manfaat pensiun yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian komprehensif:

	2019	2018
Biaya Jasa Kini	3.515.181.000	3.470.326.000
Iuran Karyawan	(1.053.773.000)	(865.582.000)
Biaya Bunga	30.519.931.000	27.281.750.000
Imbalan Hasil Aset Program	(34.744.474.000)	(30.136.840.000)
Biaya Bunga Batas Atas Aset	4.224.543.000	2.855.090.000
Jumlah	2.461.408.000	2.604.744.000

c. Rekonsiliasi perubahan selama periode berjalan atas liabilitas (kekayaan) bersih yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Saldo awal	-	-
Beban Manfaat Pensiun	2.461.408.000	2.604.744.000
Jumlah yang diakui pada Pendapatan		
Komprehensif lainnya	(1.141.002.000)	(1.566.045.000)
Iuran Perum Peruri	(1.320.406.000)	(1.038.699.000)
Saldo Akhir	-	-

d. Rekonsiliasi keuntungan (kerugian) aktuaris dari program imbalan manfaat pensiun yang diakui pada pendapatan komprehensif lainnya sebagai berikut:

	2019	2018
Saldo Awal	(45.614.308.000)	(44.048.263.000)
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan	(1.141.002.000)	(1.566.045.000)
Saldo Akhir	(46.755.310.000)	(45.614.308.000)

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris dalam perhitungan liabilitas beban pensiun adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Tingkat Diskonto	7,39% per Tahun/Year	8,36% per Tahun/Year
Kenaikan Gaji di Masa Depan	8,0% per Tahun/Year	6,0% per Tahun/Year
Usia Pensiun Normal	56 Tahun/Year	
Tingkat Pengunduran Diri	1% per tahun dari usia 30 tahun sampai dengan usia 46 tahun/ 1% per year from age 30 until 46	
Tingkat Cacat	10% tingkat kematian/ 10% Mortality	
Tingkat Kematian	Tabel Mortalita/ Mortality Table	
Metode Perhitungan	Projected Unit Credit	

18. EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

a. Liability (assets) of the pension fund:

Present Value of Obligation
Fair Value of Plan Assets Net
Funded Position
Effect of Assets Limitation
Net Liability

b. Pension benefit expenses recognized in the consolidated statements of comprehensive income:

Current Service Cost
Employee's Contribution
Interest Expense
Return on Plan Asset
Interest on Assets Ceiling
Total

c. Reconciliation of the movement of the net liability of the pension plan recognized in the consolidated statement of financial position were as follows:

Beginning Balance
Pension Benefit Expense
Total Recognized in Other
Comprehensif Income
Perum Peruri's Contribution
Ending Balance

d. Reconciliation of profit (loss) of benefit plan actuarial pension benefits recognized in other comprehensive income as follows:

Beginning Balance
Other Comprehensive Income/
(Expense) Current Year
Ending Balance

The principal actuarial assumption used by the actuary in calculating pension expense were as follows:

Discount Rate
Future Salary Increase
Normal Retirement Age
Resignation Rate
Disability Rate
Mortality Rate
Calculation Method

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

ii) Imbalan Jasa Masa Kerja Lainnya

Tabel-tabel berikut ini meringkas unsur biaya imbalan jasa masa kerja lainnya meliputi program jaminan hari tua, program pelayanan kesehatan bersama (prolankesma) untuk pensiunan, cuti panjang, tunjangan masa persiapan pensiun dan penghargaan masa kerja serta imbalan pascakerja lainnya yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan posisi keuangan Perum Peruri untuk liabilitas imbalan jasa masa kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen Biro Pusat Aktuaria ("BPA") seperti termuat dalam laporannya bertanggal 14 Januari 2020 sebagai berikut:

a. Liabilitas (kekayaan) manfaat pensiun:

	2019	2018
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pensiun	441.914.757.377	333.216.910.000
Nilai Wajar Aset Bersih	(122.728.655.000)	(115.120.235.000)
Posisi Pendanaan	319.186.102.377	218.096.675.000
Dampak Limitasi Aset	12.018.753.000	-
Bagian Entitas Anak	2.213.614.416	1.119.534.702
Liabilitas Bersih	333.418.469.793	219.216.209.702

b. Liabilitas (kekayaan) manfaat pe

	2019	2018
Biaya Jasa Kini	24.010.509.000	19.853.926.000
Biaya Jasa Lalu	-	-
Biaya Bunga	25.496.365.000	25.188.756.000
Imbalan Hasil Aset Program	(7.008.018.000)	(9.870.390.000)
Keuntungan/Kerugian Aktuaria		
Disebabkan oleh:		
Pengukuran Kembali		
atas Manfaat Imbalan	(5.422.324.000)	(1.609.833.000)
Jumlah	37.076.532.000	33.562.459.000

c. Perubahan liabilitas imbalan jasa masa kerja selama tahun berjalan:

	2019	2018
Saldo awal	219.216.209.702	199.571.940.824
Beban Manfaat Pensiun	37.076.532.000	33.562.458.000
Jumlah yang diakui pada		
Pendapatan Komprehensif lain	(96.695.421.079)	(6.426.775.173)
Iuran Perum Peruri	(1.860.000.000)	(1.860.000.000)
Pembayaran Manfaat	(17.696.447.000)	(6.219.316.000)
Beban Manfaat Lainnya		
- Entitas Anak	510.584.282	587.902.051
Saldo Akhir	140.551.457.905	219.216.209.702

d. Perubahan keuntungan (kerugian) aktuaris dari program imbalan manfaat pensiun yang diakui pada pendapatan komprehensif lainnya selama tahun berjalan:

	2019	2018
Saldo Awal	89.881.504.318	96.308.279.491
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan	(96.695.421.079)	(6.426.775.173)
Saldo Akhir	(6.813.916.761)	89.881.504.318

18. EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

ii) Other Employee Benefit Liabilities

The following tables summarize other employee service benefits consisting of post employment benefits plan, health service program managed by Prolankesma, long-service leave, pension preparation period, loyalty awards and other defined benefits recognized in the consolidated statements of comprehensive income and the consolidated statements of financial position of Perum Peruri related to employee benefit liability based on the calculation performed by an independent actuary Biro Pusat Aktuaria ("BPA") as reflected in its report dated January 14, 2020 were as follows:

a. Liability (assets) of the pension fund:

	2019	2018
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pensiun	441.914.757.377	333.216.910.000
Nilai Wajar Aset Bersih	(122.728.655.000)	(115.120.235.000)
Posisi Pendanaan	319.186.102.377	218.096.675.000
Dampak Limitasi Aset	12.018.753.000	-
Bagian Entitas Anak	2.213.614.416	1.119.534.702
Liabilitas Bersih	333.418.469.793	219.216.209.702

b. Liability (assets) of the pension fund:

	2019	2018
Biaya Jasa Kini	24.010.509.000	19.853.926.000
Biaya Jasa Lalu	-	-
Biaya Bunga	25.496.365.000	25.188.756.000
Imbalan Hasil Aset Program	(7.008.018.000)	(9.870.390.000)
Keuntungan/Kerugian Aktuaria		
Disebabkan oleh:		
Pengukuran Kembali		
atas Manfaat Imbalan	(5.422.324.000)	(1.609.833.000)
Jumlah	37.076.532.000	33.562.459.000

c. Movement of the employee benefits liabilities during the year:

	2019	2018
Saldo awal	219.216.209.702	199.571.940.824
Beban Manfaat Pensiun	37.076.532.000	33.562.458.000
Jumlah yang diakui pada		
Pendapatan Komprehensif lain	(96.695.421.079)	(6.426.775.173)
Iuran Perum Peruri	(1.860.000.000)	(1.860.000.000)
Pembayaran Manfaat	(17.696.447.000)	(6.219.316.000)
Beban Manfaat Lainnya		
- Entitas Anak	510.584.282	587.902.051
Saldo Akhir	140.551.457.905	219.216.209.702

d. Movement of the actuarial gains (losses) of the post employment benefit obligation will have to be recognized immediately in other comprehensive income during the year:

	2019	2018
Saldo Awal	89.881.504.318	96.308.279.491
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan	(96.695.421.079)	(6.426.775.173)
Saldo Akhir	(6.813.916.761)	89.881.504.318

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Asumsi-asumsi utama yang dipakai dalam menentukan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Tingkat Diskonto	7,39% per Tahun/Year	8,36% per Tahun/Year	Discount Rate
Kenaikan Gaji di Masa Depan	8,0% per Tahun/Year	6,0% per Tahun/Year	Future Salary Increase
Tingkat Pengembalian Hasil Investasi	0% per Tahun/Year	0% per Tahun/Year	Expected Return on Plan Asset
Tingkat Kenaikan Klaim Kesehatan	5,5% per Tahun/Year	5,5% per Tahun/Year	Rate of Increase in Health Claim
Usia Pensiun Normal	56 Tahun/Year		Normal Retirement Age
Tingkat Pengunduran Diri	1% per tahun dari usia 30 tahun sampai dengan usia 46 tahun/ 1% per year from age 30 until 46		Resignation Rate
Tingkat Cacat	10% tingkat kematian/ 10% Mortality		Disability Rate
Tingkat Kematian	Tabel Mortalita/ Mortality Table		Mortality Rate
Metode Perhitungan	Projected Unit Credit		Calculation Method

18. EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

The principal assumptions used in determining the employee benefit liabilities as of December 31, 2019 and 2018 were as follows:

Berdasarkan keyakinan manajemen, program pensiun yang ada dan pemberian imbalan jasa masa kerja lainnya, yang penyajiannya dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja adalah cukup untuk menutup tunjangan/imbalan yang diwajibkan berdasarkan UU No. 13/2003.

Management believes that the current pension plan and other employee benefits recognized, as presented in the consolidated financial statements in accordance with PSAK 24 regarding Employee Benefits, are adequate to cover the benefits required by Labor Law No. 13/2003.

Rincian dari nilai kini liabilitas manfaat pasti dan nilai wajar aset program di luar entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Obligation and the fair value of plan assets outside the subsidiaries portion for the year ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember / December 31,			
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pasti/ <i>Present value of Defined Benefit Liability</i>	809.067.825.000	698.287.852.000	749.578.617.000	651.068.794.638
Defisit Program / <i>Deficit In the Plan</i>	809.067.825.000	698.287.852.000	749.578.617.000	651.068.794.638
Penyesuaian pada Liabilitas Program/ <i>Experience Adjustments on Plan Liabilities</i>	(29.111.712.000)	(1.368.503.000)	13.715.382.000	(11.782.844.376)

Perubahan satu poin persentase terhadap tingkat diskonto yang diasumsikan pada tahun 2019 dan 2018 akan memiliki dampak sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate in 2019 and 2018 would have the following effects:

	<u>2019</u>		<u>2018</u>		
	Kenaikan / <i>Increase</i> Rp	Penurunan / <i>Decrease</i> Rp	Kenaikan / <i>Increase</i> Rp	Penurunan / <i>Decrease</i> Rp	
Biaya Jasa Kini	24.250.614.090	23.770.403.910	17.391.855.000	19.060.139.000	Current Service Cost
Nilai Kini Kewajiban	446.333.904.951	437.495.609.803	180.292.471.000	187.843.086.000	Obligation

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

19. OTHER NON CURRENT LIABILITIES

	31 December / December 31		
	2019	2018	
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	-	2.942.775.424	Other Non Current Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang - Pihak Ketiga	6.625.000.000	13.250.000.000	Non Current Borrowings - Third Parties
Jumlah - Bersih	6.625.000.000	16.192.775.424	Total - Net

20. MODAL

Pemilik modal Perum Peruri adalah Negara Republik Indonesia dengan jumlah penyertaan masing-masing sebesar Rp363.573.454.896 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Modal Perum Peruri ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP- 111/MBU/2004 tanggal 18 Oktober 2004.

20. CAPITAL

The owner of Perum Peruri's capital was the Government of the Republic of Indonesia with capital amounting to Rp363,573,454,896 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

Perum Peruri's capital is determined based on the Decision Letter No. KEP-111/MBU/2004 dated October 18, 2004 of the Minister of State-Owned Enterprises.

21. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

Ekuitas lainnya merupakan bagian dari ekuitas yang tidak dapat dikategorikan kedalam saldo laba ditahan maupun saldo laba berjalan. Ekuitas lainnya berasal dari penerapan PSAK yang berdampak retrospektif, pendapatan komprehensif lainnya maupun peristiwa lainnya.

Bagian dari ekuitas lainnya yang berasal dari penerapan PSAK serta berdampak retrospektif diklasifikasikan sebagai cadangan umum setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas pada saat Rapat Pembahasan Bersama (RPB).

Bagian dari ekuitas lainnya yang berasal dari pendapatankomprehensif lainnya diakui sebagai laba/rugi pada periode berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

21. OTHER COMPONENT OF EQUITY

Other equity are part of the equity that can not be categorized into retained earnings and current retained earnings. Other equity derived from impact of retrospective application of PSAK, other comprehensive income and other events.

Part of the other equity derived from retrospective application of PSAK and their impacts are classified as general reserves after the approval of the Supervisory Board at the time of the Joint Discussion Meeting (RPB).

Part of that comes from the other equity in other comprehensive income is recognized in profit/loss in the current period in accordance with the criteria established in the applicable financial accounting standards in Indonesia.

22. PEMBAGIAN LABA

Perum Peruri telah mengalokasikan laba bersih tahun 2018 berdasarkan Rapat Pembahasan Bersama tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan, serta penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2018 serta persetujuan laporan tahunan program kemitraan dan bina lingkungan tahun buku 2018 No. S-353/MBU/05/2019 tanggal 27 Mei 2019.

Pembagian dividen untuk laba tahun 2018 berdasarkan surat No. S-353/MBU/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 adalah sebesar Rp64.900.000.000.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2019 tentang Perum Peruri, pasal 87 dan 88, bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan umum ditentukan oleh pemilik modal dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. ALLOCATION OF RETAINED EARNINGS

Perum Peruri has allocated 2018 net income based on joint discussion meeting (RPB) regarding the approval of annual report and endorsement of the consolidated financial statements, and also determination of net income used for the year 2018, and also including the approval of annual report of partnership and community development program year 2018, No. S-353/MBU/05/2019 dated May 27, 2019.

Dividend distribution from net income 2018 according to letter No. S-353/MBU/05/2019 dated May 27, 2019 were amounting to Rp64,900,000,000.

In accordance with Government Regulation Republik Indonesia No. 6 year 2019 regarding Perum Peruri, article 87 and 88, income provided for general reserve fund determined by the owner is in accordance with prevailing laws.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. PEMBAGIAN LABA (Lanjutan)

Dana cadangan umum sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal, hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perum Peruri. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka pemilik modal dapat memutuskan untuk menggunakan kelebihan tersebut bagi keperluan Perum Peruri. Cadangan tujuan dibentuk berdasarkan persetujuan pemilik modal dan digunakan untuk tujuan investasi.

23. PENJUALAN

a. Rincian penjualan berdasarkan produk adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
Uang Kertas	2.609.184.496.372	1.950.422.536.996	Banknote
Uang Logam	103.102.442.960	103.087.440.555	Coins
Pita Cukai	334.378.634.293	289.266.388.436	Banderol
Web & Sheet	240.471.470.771	305.774.122.329	Web & Sheet
Paspor & Buku	264.529.827.500	232.949.424.000	Passport & Books
Logam Non Uang	4.823.019.000	12.914.296.250	Coins Non Money
Lainnya	328.181.986.165	302.103.021.623	Others
Jumlah	3.884.671.877.061	3.196.517.230.189	Total

b. Rincian penjualan menurut daerah geografis adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
Domestik	3.852.496.073.274	3.085.689.503.647	Domestic
Ekspor	32.175.803.787	110.827.726.542	Export
Jumlah	3.884.671.877.061	3.196.517.230.189	Total

Penjualan uang kertas dan uang logam kepada Bank Indonesia untuk tahun 2019 dan 2018 masing-masing dibukukan dengan menggunakan perjanjian Harga Cetak Uang tahun 2019 dan 2018 dan pembayaran dari Bank Indonesia telah diterima oleh Perum Peruri sesuai dengan perjanjian tersebut.

Penentuan Harga Cetak Uang (HCU) berdasarkan *Standard Cost* yang telah disepakati kedua belah pihak. Kesepakatan harga final untuk Harga Cetak Uang antara Perum Peruri dengan Bank Indonesia untuk Tahun Anggaran (TA) 2018-2019 diperoleh melalui surat No. 20/243/DPS/P – SP-413/IV/2018 tanggal 25 April 2018, beserta Adendum No. 20/387/DPS/P tanggal 31 Juli 2018. Adendum tersebut terkait perubahan jadwal kirim Uang Kertas sesuai dengan Perjanjian Percetakan Uang TA 2018-2019 (*multi years*) dengan rincian 5,9 miliar bilyet (TA 2018) dan 12,6 miliar bilyet (TA 2019).

Pelanggan luar negeri Perum Peruri adalah Nepal Rastra Bank, Inland Revenue Department of Government of Nepal dan Department of Immigration of Sri Lanka.

22. ALLOCATION OF RETAINED EARNINGS (Continued)

General reserve fund which is provided equal to at least 20% of capital is used only to cover any loss to be suffered by Perum Peruri. If the amount of the general reserve fund exceeds 20% of capital, the owner may decide to use the excess for other Perum Peruri activities. Specific-purpose reserve was provided based on the owner's approval and was used for investment purposes.

23. SALES

a. Detail of sales based on the product are as follows

	2019	2018	
Uang Kertas	2.609.184.496.372	1.950.422.536.996	Banknote
Uang Logam	103.102.442.960	103.087.440.555	Coins
Pita Cukai	334.378.634.293	289.266.388.436	Banderol
Web & Sheet	240.471.470.771	305.774.122.329	Web & Sheet
Paspor & Buku	264.529.827.500	232.949.424.000	Passport & Books
Logam Non Uang	4.823.019.000	12.914.296.250	Coins Non Money
Lainnya	328.181.986.165	302.103.021.623	Others
Jumlah	3.884.671.877.061	3.196.517.230.189	Total

b. Details of sales based on geographic were as follows

	2019	2018	
Domestik	3.852.496.073.274	3.085.689.503.647	Domestic
Ekspor	32.175.803.787	110.827.726.542	Export
Jumlah	3.884.671.877.061	3.196.517.230.189	Total

Sales of banknote and coins to Bank Indonesia for the year 2019 and 2018 were respectively recorded using the Money Printing Pricing agreement for the years 2019 and 2018 and the payments from Bank Indonesia has been accepted by Perum Peruri in accordance with the related agreement.

The determining of money printing price (HCU) was based on the Standard Costs which have been agreed by both parties. Agreed final price for HCU between Perum Peruri and Bank Indonesia for budget year (TA) 2018-2019 has been obtained through Letter No. 20/243/DPS/P - SP-413/IV/2018 dated April 25, 2018, with an addendum No. 20/387/DPS/P dated July 31, 2018. The addendum is related to changes in the schedule for sending Banknotes in accordance with the Money Printing Agreement for 2018-2019 (*multi years*) with details of 5.9 billion bilyets (TA 2018) and 12.6 billion bilyets (TA 2019).

Overseas Perum Peruri's customers are Nepal Rastra Bank, Inland Revenue Department of Government of Nepal and Department of Immigration of Sri Lanka.

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. BEBAN POKOK PENJUALAN

a. Uang Kertas

	2019	2018
Bahan Tinta & Penolong	1.193.991.224.615	800.789.336.099
Biaya Tenaga Kerja	369.090.262.074	196.686.398.047
Biaya Pemeliharaan	20.424.426.238	20.306.228.342
Biaya Penyusutan	148.841.202.316	145.883.181.724
Biaya Energi	25.737.320.109	26.201.261.203
Biaya Administrasi Pabrik	7.448.069.126	16.695.054.786
Beban Pokok Penjualan	1.765.532.504.478	1.206.561.460.201

b. Uang Logam

	2019	2018
Bahan Penolong	14.336.356.605	24.667.122.237
Biaya Tenaga Kerja	30.721.211.866	20.653.743.478
Biaya Pemeliharaan	1.660.732.014	4.817.379.177
Biaya Penyusutan	5.764.885.139	5.734.878.377
Biaya Energi	6.398.761.396	9.620.848.277
Biaya Administrasi Pabrik	2.597.952.247	2.215.818.050
Beban Pokok Penjualan	61.479.899.266	67.709.789.596

c. Web & Sheet

	2019	2018
Bahan Baku, Tinta & Penolong	123.949.928.863	239.882.769.068
Biaya Tenaga Kerja	31.559.441.286	38.505.450.999
Biaya Pemeliharaan	866.690.400	4.140.478.261
Biaya Penyusutan	13.240.361.617	4.360.841.675
Biaya Energi	3.200.844.608	6.457.763.635
Biaya Administrasi Pabrik	636.942.628	1.405.144.344
Beban Pokok Penjualan	173.454.209.402	294.752.447.982

d. Pita Cukai

	2019	2018
Bahan Baku, Tinta & Penolong	136.092.949.700	171.710.419.043
Biaya Tenaga Kerja	69.305.415.546	53.669.984.507
Biaya Pemeliharaan	3.537.726.221	5.216.538.247
Biaya Penyusutan	11.319.090.536	8.947.742.318
Biaya Energi	6.965.198.000	6.367.664.546
Biaya Administrasi Pabrik	2.321.888.918	1.800.904.111
Beban Pokok Penjualan	229.542.268.921	247.713.252.772

e. Paspur dan Buku

	2019	2018
Bahan Baku, Tinta & Penolong	49.997.964.757	46.046.554.825
Biaya Tenaga Kerja	2.692.537.050	19.018.758.519
Biaya Pemeliharaan	433.540.786	2.791.213.139
Biaya Penyusutan	2.075.602.751	4.176.525.849
Biaya Energi	1.005.931.577	4.044.207.068
Biaya Administrasi Pabrik	2.679.610.576	788.846.722
Beban Pokok Penjualan	58.885.187.497	76.866.106.122

f. Logam Non Uang

	2019	2018
Bahan Baku & Penolong	2.487.697.784	7.647.126.547
Biaya Tenaga Kerja	8.990.087.210	4.420.353.253
Biaya Pemeliharaan	426.684.451	1.009.923.819
Biaya Penyusutan	3.372.695.581	1.978.179.669
Biaya Energi	532.545.793	2.390.746.872
Biaya Administrasi Pabrik	1.141.880.060	376.553.496
Beban Pokok Penjualan	16.951.590.879	17.822.883.656

24. COST OF GOODS SOLD

a. Banknote

	2019	2018
	1.765.532.504.478	1.206.561.460.201
<i>Ink & Supporting Material</i>		
<i>Labor Costs</i>		
<i>Maintenance Costs</i>		
<i>Depreciation Costs</i>		
<i>Energy Costs</i>		
<i>Factory Administration Costs</i>		
Cost of Goods Sold		

b. Coin

	2019	2018
	61.479.899.266	67.709.789.596
<i>Supporting Material</i>		
<i>Labor Costs</i>		
<i>Maintenance Costs</i>		
<i>Depreciation Costs</i>		
<i>Energy Costs</i>		
<i>Factory Administration Costs</i>		
Cost of Goods Sold		

c. Web & Sheet

	2019	2018
	173.454.209.402	294.752.447.982
<i>Raw, Ink & Supporting Material</i>		
<i>Labor Costs</i>		
<i>Maintenance Costs</i>		
<i>Depreciation Costs</i>		
<i>Energy Costs</i>		
<i>Factory Administration Costs</i>		
Cost of Goods Sold		

d. Excise Stamp

	2019	2018
	229.542.268.921	247.713.252.772
<i>Raw, Ink & Supporting Material</i>		
<i>Labor Costs</i>		
<i>Maintenance Costs</i>		
<i>Depreciation Costs</i>		
<i>Energy Costs</i>		
<i>Factory Administration Costs</i>		
Cost of Goods Sold		

e. Passport and Book

	2019	2018
	58.885.187.497	76.866.106.122
<i>Raw, Ink & Supporting Material</i>		
<i>Labor Costs</i>		
<i>Maintenance Costs</i>		
<i>Depreciation Costs</i>		
<i>Energy Costs</i>		
<i>Factory Administration Costs</i>		
Cost of Goods Sold		

f. Coins Non Money

	2019	2018
	16.951.590.879	17.822.883.656
<i>Raw & Supporting Material</i>		
<i>Labor Costs</i>		
<i>Maintenance Costs</i>		
<i>Depreciation Costs</i>		
<i>Energy Costs</i>		
<i>Factory Administration Costs</i>		
Cost of Goods Sold		

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)

g. Lainnya

	2019	2018
Bahan Baku	274.068.469.221	147.810.670.899
Biaya Tenaga Kerja	47.529.940.312	25.658.885.367
Biaya Pemeliharaan	6.680.091.039	3.477.472.985
Biaya Penyusutan	12.474.907.461	6.725.767.415
Biaya Energi	16.967.803.293	9.148.083.771
Biaya Administrasi Pabrik	49.480.671.054	26.364.547.718
Beban Pokok Penjualan	407.201.882.379	219.185.428.155
Jumlah Beban Pokok Penjualan	2.713.047.542.821	2.130.611.368.484

24. COST OF SALES (Continued)

g. Others

Raw Material
Labor Costs
Maintenance Costs
Depreciation Costs
Energy Costs
Factory Administration Costs
Cost of Goods Sold
Total Cost of Goods Sold

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2019	2018
Gaji dan Tunjangan	420.884.209.460	390.372.055.538
Jasa Profesional	22.348.259.033	18.836.978.976
Penyusutan	63.617.603.429	75.761.898.908
Pemeliharaan dan Perbaikan	74.286.051.367	41.190.438.016
Pajak Bumi dan Bangunan	9.587.198.796	8.359.592.191
Listrik, Air dan Bahan Bakar	3.495.075.568	5.378.961.642
Lainnya	21.346.805.785	17.100.459.829
Jumlah	615.565.203.438	557.000.385.100

25. GENERAL & ADMINISTRATIVE EXPENSES

Salaries and Allowances
Professional Fees
Depreciation
Repair and Maintenance
Land and Building Tax
Electricity, Water and Fuel
Others
Total

26. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

Beban penjualan dan pemasaran adalah beban yang terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan sebagai berikut:

	2019	2018
Pemeliharaan Relasi	22.255.951.527	20.876.942.108
Pengiriman dan Pengangkutan	6.305.962.972	11.386.531.484
Riset dan Desain	11.074.353.093	10.302.304.086
Iklan, Promosi, Sponsor dan Perjalanan Dinas	1.770.145.287	1.382.021.285
Lainnya	6.505.008.569	9.224.072.547
Jumlah	47.911.421.448	53.171.871.510

26. SELLING AND MARKETING EXPENSES

Selling and marketing expenses represent expenses incurred related to activities in obtaining and maintaining customers, as follows:

Relationship Maintenance
Shipping and Transportation
Research and Design
Advertising, Promotion, Sponsorship, and Business Trip
Others
Total

27. PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA

a. Pendapatan Bunga

	2019	2018
Bunga Deposito dan Obligasi	38.651.540.944	21.437.276.854
Jasa Giro	4.877.166.375	2.316.219.443
Jumlah	43.528.707.319	23.753.496.297

27. INTEREST INCOME AND EXPENSES

a. Interest Income

Deposits and Bonds Interest
Interest Income
Total

b. Beban Bunga

	31 Desember / December 31	
	2019	2018
Pihak Berelasi (Catatan 29g)	132.045.554.586	134.101.999.321
Biaya Bunga Pendanaan	10.665.316.623	3.510.364.864
Jumlah	142.710.871.209	137.612.364.185

Related Parties (Note 29g)
Funding Interests
Total

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN

a. Pendapatan Lain-Lain

	2019	2018
Laba Selisih Kurs	758.065.744	19.655.857.930
Sewa Tanah dan Bangunan	4.591.779.244	11.630.288.493
Handling Fee dan Test Uji Mutu	1.506.149.471	6.339.752.996
Denda Atas Keterlambatan	955.787.396	1.038.464.199
Lainnya	65.545.315.838	20.429.542.206
Jumlah	73.357.097.693	59.093.905.824

b. Beban Lain-Lain

	2019	2018
Rugi Selisih Kurs	4.905.819.758	-
Beban Denda	2.391.152.408	-
Lainnya	7.348.654.932	9.518.673.630
Jumlah	14.645.627.098	9.518.673.630
Jumlah-Bersih	58.711.470.595	68.612.579.454

28. OTHER INCOME (EXPENSES)

a. Other Income

19.655.857.930	<i>Foreign Exchange Gain</i>
11.630.288.493	<i>Rental of Land and Building</i>
6.339.752.996	<i>Handling Fee and Quality Control Test</i>
1.038.464.199	<i>Penalty Due to Late Shipment</i>
20.429.542.206	<i>Others</i>
59.093.905.824	Total

b. Other Expenses

-	<i>Foreign Exchange Loss</i>
-	<i>Penalty Expenses</i>
9.518.673.630	<i>Others</i>
9.518.673.630	Total
68.612.579.454	Total-Net

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Bank

	2019	2018
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	8.105.868.432	13.714.633.368
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	8.240.552.466	4.685.343.019
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	669.421.031	1.293.390.553
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	607.841.879	939.748.047
Jumlah	17.623.683.808	20.633.114.987

Dollar Amerika Serikat

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	38.089.163	1.052.108.285
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	1.131.784.640	56.647.995
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	632.747.675	9.508.225
Jumlah	1.802.621.478	1.118.264.505

Euro

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	604.007.432	232.803.092
Jumlah	604.007.432	232.803.092
Jumlah	20.030.312.718	21.984.182.584

b. Deposito Berjangka

	2019	2018
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	393.600.000.000	197.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	789.000.000.000	57.635.117.209
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	248.000.000.000	195.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	161.562.073.199	155.000.000.000
Jumlah	1.592.162.073.199	604.635.117.209

Dollar Amerika Serikat

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	7.854.070.650	49.959.450.000
Jumlah	7.854.070.650	49.959.450.000
Jumlah-Bersih	1.600.016.143.849	654.594.567.209

29. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Disclosure of significant balances and transactions with related parties were as follows:

a. Cash In Bank

	2019	2018
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	13.714.633.368	13.714.633.368
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	4.685.343.019	4.685.343.019
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	1.293.390.553	1.293.390.553
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	939.748.047	939.748.047
Total	20.633.114.987	20.633.114.987

United States Dollar

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	1.052.108.285
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	56.647.995
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	9.508.225
Total	1.118.264.505

Euro

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	232.803.092
Total	232.803.092
Total	21.984.182.584

a. Time Deposits

	2019	2018
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	197.000.000.000	197.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	57.635.117.209	57.635.117.209
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	195.000.000.000	195.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	155.000.000.000	155.000.000.000
Total	604.635.117.209	604.635.117.209

United States Dollar

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	49.959.450.000
Total	49.959.450.000
Total-Net	654.594.567.209

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

c. Piutang Usaha

	2019	2018
Perum Percetakan Negara RI	7.592.900.654	1.515.702.368
PT Pos Indonesia (Persero)	2.082.144.396	2.316.518.727
PT Sucofindo (Persero)	1.840.000.000	101.250.000
PT Pupuk Kujang (Persero), Tbk	361.790.000	3.617.900.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	207.192.370	6.800.508.133
PT Pegadaian (Persero)	29.216.000	29.216.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk	15.134.080	15.134.080
PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk	5.688.540	5.688.540
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	-	2.982.533.465
PT Rekayasa Industri (Persero)	-	1.033.450.000
PT Balai Pustaka (Persero)	-	127.622.680
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	-	51.315.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	-	10.122.727
Jumlah	12.134.066.040	18.606.961.720

d. Piutang Lain-Lain

	2019	2018
PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	2.125.878.267	2.125.878.267
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	-	32.054.795
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	-	209.569.315
PT Sicpa Peruri Securink	14.201.271.718	20.946.643.868
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	-	115.591.004
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	-	56.756.164
Jumlah	16.327.149.985	23.486.493.413

e. Utang Usaha

	2019	2018
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk	102.647.260.164	21.587.020.486
PT Sarinah (Persero)	117.500.000	-
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	-	545.818.560
PT Sicpa Peruri Securink	7.177.223.401	117.662.046.259
PT Virama Karya (Persero)	-	390.060.000
Jumlah	109.941.983.565	140.184.945.305

f. Pinjaman Bank

	2019	2018
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	910.897.766.941	988.587.802.626
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	202.931.735.347	274.639.735.348
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	337.811.210.770	328.984.250.098
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	3.060.000.000	2.820.705.333
Jumlah	1.454.700.713.058	1.595.032.493.405

**Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo
Dalam Satu Tahun**

	2019	2018
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	71.708.000.000	71.708.000.001
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	164.159.195.069	162.859.195.068
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	46.222.369.498	24.300.119.211
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	3.060.000.000	2.820.705.333
Jumlah	285.149.564.567	261.688.019.613

**Pinjaman Bank Yang Akan Jatuh Tempo
Lebih dari Satu Tahun**

1.169.551.148.491	1.333.344.473.792
--------------------------	--------------------------

**29. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED
PARTIES (Continued)**

c. Trade Receivables

Perum Percetakan Negara RI	
PT Pos Indonesia (Persero)	
PT Sucofindo (Persero)	
PT Pupuk Kujang (Persero), Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	
PT Pegadaian (Persero)	
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk	
PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk	
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	
PT Rekayasa Industri (Persero)	
PT Balai Pustaka (Persero)	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	
Total	

d. Other Receivables

PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	
PT Sicpa Peruri Securink	
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	
Total	

e. Trade Payables

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk	
PT Sarinah (Persero)	
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	
PT Sicpa Peruri Securink	
PT Virama Karya (Persero)	
Total	

f. Bank Loans

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	
Total	

Less Portion of Current Maturities

**Bank Loans Portion of Current Maturities
More Than One Year**

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perum Peruri memiliki komitmen dan kontijensi sebagai berikut:

Fasilitas Non Cash Loan ("NCL")

- a. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")

Perum Peruri memiliki fasilitas Non Cash Loan dari BNI yang dapat digunakan untuk bank garansi maupu L/C dengan nilai plafon maksimal sebesar USD37.195.652 (Revolving). Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo outstanding adalah sebesar USD31,836,978.57.
- b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI")

Perum Peruri memiliki fasilitas L/C dari BRI dengan plafon maksimal sebesar Rp40.000.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 nilai outstanding untuk L/C sebesar Rp0. Selain fasilitas L/C Perum Peruri juga memiliki fasilitas bank garansi dari BRI dengan plafon sebesar Rp200.000.000.000 dengan nilai outstanding per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp34.702.422.530.
- c. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Bank Mandiri")

Perum Peruri memiliki 2 fasilitas L/C dari Bank Mandiri yaitu L/C yang merupakan sub limit KI dengan plafon maksimal Rp630.000.000.000 dan L/C non sub limit KI sebesar USD1.000.000 dan Rp75.000.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 untuk L/C sub limit KI memiliki nilai outstanding penggunaan sebesar Rp42.400.743.314, dan L/C non sub limit KI per 31 Desember 2019 memiliki nilai outstanding penggunaan sebesar USD0 dan Rp0. Perum Peruri juga memiliki fasilitas bank garansi dari Bank Mandiri dengan plafon Rp300.000.000.000 dengan nilai outstanding per 31 Desember 2019 sebesar Rp255.058.975.549.
- d. Standard Chartered Bank
Perum Peruri memiliki fasilitas Non Cash Loan di Standard Chartered Bank dengan plafon sebesar USD5.000.000. Per 31 Desember 2019 fasilitas tersebut digunakan untuk penerbitan bank garansi untuk keperluan proyek luar negeri dan dijamin oleh deposito yang diblokir sebesar USD5.600.000.
- e. Citibank
Perum Peruri memiliki fasilitas Non Cash Loan di Citibank dengan plafon sebesar USD15.000.000. Per 31 Desember 2019 fasilitas tersebut memiliki nilai outstanding sebesar USD0.
- f. Komitmen Pembelian Aset Tetap
Perum Peruri sampai dengan 31 Desember 2019 memiliki komitmen untuk membeli aset tetap berupa bangunan dan mesin-mesin pabrik masing-masing sebesar Rp89.393.531.000 dan Rp747.776.104.000 dan atas komitmen tersebut telah teralisasi sebesar Rp71.040.906.000 dan Rp347.103.289.000.

30. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

As of December 31, 2019, Perum Peruri has Commitment and Contingencies as follows:

Non Cash Loan ("NCL")

- a. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")

Perum Peruri obtained a Non Cash Loan facility from BNI which can be used for bank guarantees or L/C with maximum facility amounting to USD37.195.652 (Revolving). As of December 31, 2019, the outstanding balance were USD31,836,978.57.
- b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI")

Perum Peruri has L/C facilities from BRI amounting to Rp40,000,000,000. As of December 31, 2019, the outstanding amount for L/C was amounting to Rp0. In addition to the L/C facility, Perum Peruri has also bank guarantee from BRI with a limit of Rp200,000,000,000 with outstanding balance as of December 31, 2019 was amounting to Rp34,702,422,530.
- c. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Bank Mandiri")

Perum Peruri has two L/C facilities from Bank Mandiri which is a sub-limit of the credit investment with a maximum limit of Rp630,000,000,000, and a non sub-limit L/C amounting to USD1,000,000 and Rp75,000,000,000. As of December 31, 2019, the sub limit of credit investment has an outstanding balance of Rp0, and non sub limit/C as of December 31, 2019 has an outstanding amount of USD0 and Rp42,400,743,314,-. Perum Peruri has also bank guarantee from Bank Mandiri with a limit of Rp300,000,000,000 with outstanding balance as of December 31, 2019 was amounting to Rp255,058,975,549
- d. Standard Chartered Bank
Perum Peruri has Non Cash Loan in Standard Chartered Bank with maximum amounting to USD5,000,000. As of December 31, 2019, that facility used for the issuance of bank guarantee for the purpose of overseas project and secured by blocked deposits amounting to USD3,550,000.
- e. Citibank
Perum Peruri has Non Cash Loan in Citibank with maximum amounting to USD15,000,000. As of December 31, 2019, that facility has an outstanding balance of USD0.
- f. Komitmen Pembelian Aset Tetap
As of December 31, 2019 Perum Peruri has a commitment to purchase fixed assets of building and factory machines amounting to Rp89,393,531,000 and Rp747,776,104,000 respectively, and of those commitments had been realized of Rp71,040,906,000 and Rp347,103,289,000.

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Perum Peruri dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2019:

	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp
Aset Keuangan Lancar		
Kas dan Setara Kas	1.924.761.449.588	1.924.761.449.588
Piutang Usaha	53.453.417.480	53.453.417.480
Piutang Lain-Lain	27.572.106.120	27.572.106.120
	2.005.786.973.188	2.005.786.973.188
Aset Keuangan Tidak Lancar		
Aset Tidak Lancar Lainnya (Kas Yang Dibatasi Penggunaannya)	132.132.617.923	132.132.617.923
	132.132.617.923	132.132.617.923
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek		
Pinjaman Bank Yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	307.716.481.473	307.716.481.473
Utang Usaha	413.531.799.844	413.531.799.844
Beban Akrual	132.961.669.096	132.961.669.096
Liabilitas Lancar Lainnya	480.735.463.444	480.735.463.444
	1.334.945.413.857	1.334.945.413.857
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang		
Pinjaman Bank - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.169.551.148.491	1.169.551.148.491
	1.169.551.148.491	1.169.551.148.491

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan sebesar jumlah dimana instrumen keuangan tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Nilai wajar untuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset tidak lancar lainnya, utang usaha, beban akrual, liabilitas lancar lainnya mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

Instrumen keuangan pokok Perum Peruri terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset tidak lancar lainnya (kas yang dibatasi penggunaannya dan uang jaminan), utang usaha, beban yang masih harus dibayar, liabilitas lancar lainnya dan pinjaman bank. Tujuan utama dari instrumen keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional Perum Peruri. Telah menjadi kebijakan Perum Peruri bahwa tidak akan ada perdagangan dalam instrumen keuangan yang akan dilakukan.

Perum Peruri terpengaruh terhadap risiko tingkat suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen senior Perum Peruri mengawasi manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum dibawah ini:

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The following table represents the carrying values and estimated fair values of Perum Peruri's and subsidiaries financial instruments as of December 31, 2019:

	Nilai Tercatat/ Carrying Value Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	
Aset Keuangan Lancar			Financial Assets-Current
Kas dan Setara Kas	1.924.761.449.588	1.924.761.449.588	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	53.453.417.480	53.453.417.480	Trade Receivables
Piutang Lain-Lain	27.572.106.120	27.572.106.120	Other Receivables
	2.005.786.973.188	2.005.786.973.188	
Aset Keuangan Tidak Lancar			Financial Assets-Current
Aset Tidak Lancar Lainnya (Kas Yang Dibatasi Penggunaannya)	132.132.617.923	132.132.617.923	Other Non Current Assets (Restricted Cash)
	132.132.617.923	132.132.617.923	
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek			Financial Liabilities
Pinjaman Bank Yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	307.716.481.473	307.716.481.473	Current Bank Loans - Maturities Within One Year
Utang Usaha	413.531.799.844	413.531.799.844	Trade Payables
Beban Akrual	132.961.669.096	132.961.669.096	Accrued Expenses
Liabilitas Lancar Lainnya	480.735.463.444	480.735.463.444	Other Current Liabilities
	1.334.945.413.857	1.334.945.413.857	
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang			Financial Liabilities
Pinjaman Bank - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.169.551.148.491	1.169.551.148.491	Bank Loan - Net of Current Maturities Year
	1.169.551.148.491	1.169.551.148.491	

The fair values of the financial assets and liabilities are presented as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's-length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

The fair values of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, other non current assets, trade payables, other payables and accrued expenses approximates their carrying amounts due to their short-term mature.

Perum Peruri's principal financial instruments comprises of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, other non-current assets (restricted cash equivalent and guarantee payment) short-term bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses and long-term bank loans. The main purposes of these financial instruments is to raise funds for Perum Peruri's operations. It has been Perum Peruri's policy that no trading in financial instruments shall be undertaken.

Perum Peruri is exposed to interest rate risk, foreign currency risk, credit risk and liquidity risk. Perum Peruri's senior management oversees the management of these risks. The Board of Directors reviews and agrees policies for managing each of these risks which are summarized below:

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perum Peruri terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek dan utang sewa pembiayaan. Perum Peruri berusaha untuk meminimalisir saldo pinjaman yang berbunga tinggi.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam nilai tukar mata uang asing pada denominasi aset dan liabilitas Perum Peruri dan entitas anak dengan semua variabel lainnya dianggap tetap pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	2019 USD	2018 USD	
Kurs Tengah BI	13.901	14.481	<i>BI Middle Rate</i>
Kas dan Setara Kas	694.676	3.594.647	<i>Cash and Cash Equivalents</i>
Piutang Usaha	190	2.486.924	<i>Trade Receivables</i>
Utang Usaha	(14.966)	(12.297)	<i>Trade Payables</i>
Aset Bersih	693.800	6.069.274	<i>Net Assets</i>
Setara dengan Rp	9.644.524.137	87.889.156.794	<i>Equivalent in Rp</i>
Perubahan kenaikan Rp100/USD	9.713.904.161	88.496.084.194	<i>Change by increase Rp100/USD</i>
Pengaruh terhadap Perubahan Sensitivitas	69.380.024	606.927.400	<i>Impact on Sensitivity Analysis</i>

Tabel berikut menyajikan jumlah aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing pada 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan jenis mata uang asing:

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Perum Peruri akan mengalami suatu kerugian dari para pelanggan atau pihak terkait lainnya yang mengalami kegagalan dalam memenuhi liabilitasnya. Risiko kredit pelanggan dikelola oleh Direksi sesuai dengan kebijakan Perum Peruri, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur untuk menghindari risiko piutang tak tertagih. Tergantung pada penilaian Perum Peruri dan persetujuan pemilik modal, piutang akan dihapuskan jika piutang tersebut dianggap tidak tertagih.

Tabel pada halaman berikut memperlihatkan kemungkinan maksimal risiko kredit dari setiap komponen laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Perum Peruri's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to Perum Peruri's short-term bank loans and financial lease. Perum Peruri seeks to minimize outstanding high-interest loans

Foreign Currency Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.

The following table shows the sensitivity to possible changes in the foreign exchange rate of Perum Peruri and subsidiaries denominated assets and liabilities, with all other variables held constant as of December 31, 2019 and 2018:

The following table presents financial assets and liabilities in related foreign currencies as of December 31, 2019 and 2018:

Credit Risk

Credit risk is the risk that Perum Peruri will incur a loss arising from customers, or other counter parties that fail to discharge their contractual obligations. Customer credit risk is managed by the Board of Directors subject to Perum Peruri's established policies, procedures and controls relating to customer credit risk management. The receivable balances are monitored on an going basis to reduce the exposure to bad debts subject to Perum Peruri's assessment, a receivable will be written-off if the receivable is considered uncollectible.

The table on the next page shows the maximum possible credit risk of each component of the consolidated statements of financial position as of December 31, 2019 and 2018:

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan Setara Kas	1.924.761.449.588	837.083.007.783	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	53.453.417.480	280.644.719.000	Trade Receivables
Piutang Lain-Lain	27.572.106.120	36.671.409.576	Other Receivables
Aset Tidak Lancar Lainnya	132.132.617.923	103.129.050.000	Non Current Assets
Jumlah	<u>2.137.919.591.111</u>	<u>1.257.528.186.359</u>	Total

Kualitas Kredit Aset Keuangan

Perum Peruri dan Entitas anak mengelola risiko kredit yang terkait dengan rekening bank dan piutang dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Untuk bank, hanya pihak-pihak independen dengan predikat baik yang diterima.

Credit Quality of Financial Assets

Perum Peruri and Subsidiaries manages credit risk exposed from its deposits with banks and receivables by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty. For banks, only independent parties with a good rating are accepted.

Kualitas Kredit Aset Keuangan

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

Credit Quality of Financial Assets

Credit quality of financial assets that are either past due or not impaired can be assessed by reference to historical information regarding the debtor's default rate.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Kas	598.635.914	772.474.334	Cash On Hand
Bank			Cash In Bank
Rupiah			Rupiah
Pihak Berelasi (Catatan 28)			Related Parties (Notes 28)
AAA	17.015.841.929	19.693.366.940	AAA
AA+	607.841.879	939.747.047	AA+
Pihak Ketiga			Third Parties
AAA	779.964.576	460.896.562	AAA
AA+	1.404.762.656	1.368.193.472	AA+
AA	-	31.226.669	AA
AA-	12.916.631.430	3.918.305.714	AA-
A+	1.055.135.375	600.902.507	A+
A	-	-	A
A-	711.923.902	863.711.791	A-
Dollar Amerika Serikat			United States Dollar
Pihak Berelasi (Catatan 28)			Related Parties (Notes 28)
AAA	1.802.621.478	1.118.264.505	AAA
Pihak Ketiga			Third Parties
AA	10.789.130	12.180.576	AA
A+	4.237.150.038	976.366.365	A+
Euro			Euro
Pihak Berelasi (Catatan 28)			Related Parties (Notes 28)
AAA	604.007.432	232.803.092	AAA
Sub Jumlah	<u>41.745.305.738</u>	<u>30.988.439.574</u>	Sub Total

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and
for the year then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Kualitas Kredit Aset Keuangan

Deposito Berjangka

	2019	2018
Rupiah		
Pihak Berelasi (Catatan 28)		
AAA	1.430.600.000.000	547.000.000.000
AA+	161.562.073.199	57.635.117.209
Pihak Ketiga		
AAA	-	-
AA+	105.000.000.000	60.000.000.000
AA	-	-
AA-	140.000.000.000	-
A+	-	-
A	-	25.000.000.000
A-	38.000.000.000	66.500.000.000
Dollar Amerika Serikat		
Pihak Berelasi (Catatan 28)		
AAA	7.854.070.650	49.959.450.000
Pihak Ketiga		
A+	-	-
A	-	-
Sub Jumlah	1.883.016.143.849	806.094.567.209
Jumlah	1.924.761.449.588	837.083.006.783

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan suatu risiko pada saat posisi arus kas Perum Peruri mengindikasikan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi beban-beban jangka pendek Perum Peruri. Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan setara kas yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Perum Peruri menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank untuk mengelola risiko likuiditas.

Tabel berikut merangkum liabilitas keuangan Perum Peruri pada saat jatuh tempo berdasarkan kontrak pembayaran yang tidak didiskontokan.

32. MANAJEMEN PERMODALAN

Perum Peruri adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham-saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa percetakan uang kertas dan logam Rupiah Republik Indonesia, dokumen sekuriti untuk negara, dokumen uang dan dokumen sekuriti negara lain, dan menyediakan jasa yang mempunyai nilai sekuriti tinggi.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Credit Quality of Financial Assets

Time Deposits

	2019	2018
Rupiah		
Related Parties (Notes 28)		
AAA	1.430.600.000.000	547.000.000.000
AA+	161.562.073.199	57.635.117.209
Third Parties		
AAA	-	-
AA+	105.000.000.000	60.000.000.000
AA	-	-
AA-	140.000.000.000	-
A+	-	-
A	-	25.000.000.000
A-	38.000.000.000	66.500.000.000
United States Dollar		
Related Parties (Notes 28)		
AAA	7.854.070.650	49.959.450.000
Third Parties		
A+	-	-
A	-	-
Sub Total	1.883.016.143.849	806.094.567.209
Total	1.924.761.449.588	837.083.006.783

Liquidity Risk

Liquidity risk is defined as the risk when Perum Peruri's cash flow position indicates that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditure. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents to support business activities on a timely basis. Perum Peruri maintains a balance between continuity of account receivable collections and flexibility through the use of bank loans in order to manage liquidity risk.

The following table summarizes the maturity profile of Perum Peruri's financial liabilities based on contractual undiscounted payments:

32. CAPITAL MANAGEMENT

Perum Peruri is a State-Owned Enterprise that is fully owned by the State and not to divided into shares, which aims for the public benefit in the form of printing Rupiah's banknotes and coins of the Republic of Indonesia, the countries security documents, other states' banknotes and security documents, and provides services that have a high security value.

32. MANAJEMEN PERMODALAN (Lanjutan)

Untuk menjalankan kegiatan usaha dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka pengelolaan modal dilaksanakan dengan mencadangkan atau menahan sebagian laba untuk pemupukan modal. Penambahan modal dari eksternal sesuai dengan ketentuan yang untuk saat ini tidak dimungkinkan. Komponen modal Perum Peruri adalah berupa Penyertaan Modal Pemerintah dan Saldo Laba, dimana Saldo Laba terbagi atas cadangan umum untuk modal kerja dan cadangan tujuan untuk investasi.

Kebijakan dividen/pembagian laba dilakukan setiap akhir periode setelah mendapatkan Persetujuan Laporan Tahunan melalui surat pengesahan pemilik modal. Laba dibagi dan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut dividen, cadangan tujuan, cadangan umum, program kemitraan dan bina lingkungan.

33. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan dibawah ini.

Masa Manfaat Aset

Perum Peruri dan entitas anak melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan, jika ada. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan faktor yang telah disebutkan diatas. Nilai tercatat aset tetap disajikan pada Catatan 11.

Tagihan Pajak Penghasilan

Penentuan provisi perpajakan pertimbangan signifikan, yang mana keputusan final atas provisi perpajakan tersebut bisa berbeda dari jumlah yang tercatat. Adapun pengakuan aset pajak tangguhan tergantung pada harapan dan estimasi terhadap tersedianya laba kena pajak masa depan.

Manajemen Perum Peruri akan melaporkan laba kena pajak Perum Peruri dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2019 dengan jumlah yang sama dengan perhitungan laba kena pajak tahun 2019 seperti yang tersaji pada Catatan 7.

32. CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

In conducting their business and in an effort to achieve its objectives, the management of capital are held by creating reserve or keep some income for capital accumulation. The addition of capital from external party is not feasible in accordance with the existing regulations. Perum Peruri's capital component consists of direct ownership from Government and retained earnings is divided into general reserve for working capital and special purpose reserve for investments.

Dividend policy / profit distribution is carried out at the end of each period after obtaining an Annual Report Approval through a letter of authorization from the capital owner. Profits are divided and used as follows dividends, purpose reserves, general reserves, partnership programs and environmental development.

33. SOURCE OF UNCERTAINTY ESTIMATION AND CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENT

Estimates and considerations used in the preparation of the consolidated financial statements are continuously evaluated based on historical experience and other factors, including expectations on the future events which are believed to be reasonable. Although estimation is based on management's best knowledge on current events and actions, actual result may differ from those estimates. Assumptions and considerations that have a significant effect on the assets and liabilities carrying amounts are disclosed below.

Useful Life of Assets

Perum Peruri and Subsidiaries conduct periodic review on the useful lives of Property, Plant and Equipment based on factors such as technical conditions and technological development in the future, if any. The result of future operations will be materially influenced by the change in estimation from the factors mentioned above. The carrying value of property, plant and equipment is disclosed in Notes 11.

Estimated Claims for Tax Refund

Determining the tax provision needs significant judgement in which the final assessment of those tax provision could differ from the carrying amount. While the recognition of deferred tax assets depends on the expectation and estimates of availability of future taxable income.

Perum Peruri's management will report taxable income in its Annual Tax Returns (SPT) year 2019 using the same figures as shown in the 2019 taxable income as disclosed in Note 7.

**33. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING
(Lanjutan)**

Liabilitas Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini. Nilai tercatat liabilitas dan beban imbalan kerja disajikan pada Catatan 18.

34. PERKARA HUKUM

Pada tahun 2015 dan 2016 Perusahaan telah melakukan PHK terhadap 4 (empat) karyawan Perusahaan atas kasus pelanggaran Pasal 108 ayat (45) Perjanjian Kerja Bersama Periode 2014 sampai dengan 2015 yang pada intinya melarang untuk memfitnah dan menyebarkan isu negatif yang menimbulkan kerugian bagi karyawan karyawan dan/atau pekerja lain atau perusahaan.

Pada tanggal 13 Mei 2019, Perusahaan menerima surat panggilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 403/Pdt.G/2019/PN.Jkt-Sel untuk menghadiri pemeriksaan Perkara Perdata dalam perkara antara Try Haryanto, dan kawan-kawan sebagai Penggugat melawan Perusahaan sebagai tergugat 1 dan Ir. Ashari sebagai tergugat 2. Dalam gugatannya para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) meminta pada tergugat untuk mempekerjakan kembali para penggugat dan membayar kerugian materiil dan immaterial.

- a. Kerugian material sebesar Rp3.294.000.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)
- b. Kerugian Immaterial sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)

Pada tanggal 17 Mei 2019 Perusahaan memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk menangani perkara gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 2 Desember 2019, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan pada perkara tersebut. Putusan tersebut menyatakan sebagai berikut:

**33. SOURCE OF UNCERTAINTY ESTIMATION AND
CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENT (Continued)**

Employee Benefits Obligation

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on the relevant plan assets and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligations.

The expected return on plan assets assumptions is determined on a uniform basis, taking into consideration long-term historical returns, asset allocation and future estimates of long-term investments returns.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions. The employee benefits liabilities and expense are disclosed in Note 18.

34. LEGAL CASES

In 2015 and 2016 the Company had laid off four (4) Company employees in cases of violations of Article 108 paragraph (45) of the Joint Labor Agreement for the 2014 to 2015 period, which in essence prohibited slandering and spreading negative issues that caused harm to employee employees and / or other workers or companies.

On May 13, 2019, the Company received a summons from the South Jakarta District Court Number: 403 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt-Sel to attend the Civil Case examination in the case between Try Haryanto, and his friends as Plaintiffs against the Company as defendants as defendants. 1 and Ir. Ashari as the defendant 2. In the claim the plaintiffs filed a lawsuit against the law (*onrechtmatige daad*) asking the defendant to re-employ the plaintiffs and pay material and immaterial losses.

- a. Material loss of Rp3,294,000,000 (Three Billion Two Hundred Ninety Four Million Rupiah)
- b. Immaterial losses of Rp5,000,000,000 (Five Billion Rupiah)

On May 17, 2019 the Company granted attorney to the attorney to handle the case in the South Jakarta District Court. On December 2, 2019, the Panel of Judges at the South Jakarta District Court read the verdict in the case. The ruling states as follow:

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2019 and for the year then ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. PERKARA HUKUM (Lanjutan)

- Menolak eksepsi para tergugat (Perusahaan);
- Menolak gugatan Para Penggugat (Try Haryanto, dan kawan-kawan) untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat (Try Haryanto, dan kawan-kawan) untuk membayar biaya perkara.

Permohonan banding dapat diajukan oleh para Penggugat di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Sampai dengan saat tanggal 31 Desember 2019 belum ada pemberitahuan dari kepaniteraan mengenai pengajuan banding terhadap putusan PN Jakarta Selatan tersebut.

35. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Perum Peruri menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan Perum Peruri (Entitas Induk) ini di mana investasi pada Entitas anak dicatat dengan metode biaya, disajikan untuk dapat menganalisa hasil usaha Entitas Induk. Informasi keuangan tambahan Perum Peruri (Entitas Induk) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perum Peruri dan Entitas anak (Lampiran I, II, III, IV).

36. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah direklasifikasikan untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification</u>	<u>Sesudah reklasifikasi/ After reclassification</u>
Beban Pokok Penjualan		
- Uang Kertas	1.488.598.474.213	1.206.561.460.201
- Uang Logam	75.299.223.039	67.709.789.596
- Web dan Sheet	331.061.519.480	294.752.447.982
- Pita Cukai	282.670.805.714	247.713.252.772
- Paspor dan Buku	92.780.331.255	76.866.106.122
- Logam Non Uang	20.339.205.899	17.822.883.656
Beban Umum dan Administrasi	177.676.765.829	557.000.385.100
Jumlah	<u>2.468.426.325.429</u>	<u>2.468.426.325.429</u>

37. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen Perum Peruri bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 17 Februari 2020.

34. LEGAL CASES (Continued)

- Refuse the exception of the defendants (The Company);
- Refuse the claim of the Plaintiffs (Try Haryanto, and his friends) for the whole;
- Punish the Plaintiffs (Try Haryanto, and his friends) to pay the court fee.

An appeal can be filed by the Plaintiffs in the District Court Registrar within 14 (fourteen) calendar days from the following day after the decision is pronounced or after being notified of a party not present in the reading of the decision. As of December 31, 2019, there was no notification from the Registrar regarding the appeal of the South Jakarta District Court's decision.

35. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

Perum Peruri published consolidated financial statements are the main financial statements. The additional financial information of Perum Peruri (Parent Entity), where investments in Subsidiaries are accounted for under the cost method, have been presented to analyse the Parent Entity results of operations. The following additional financial information of Perum Peruri (Parent Entity) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of Perum Peruri and Subsidiaries (Attachment I, II, III, IV).

36. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018 have been reclassified to conform with the presentation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2019. The details of the accounts being reclassified are presented below.

	<u>Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification</u>	<u>Sesudah reklasifikasi/ After reclassification</u>
Cost of Goods Sold		
Banknotes -		
Coin -		
Web and Sheet -		
Excise Stamp -		
Passport and Book -		
Coins Non Money -		
General and Administration Expenses		
Total	<u>2.468.426.325.429</u>	<u>2.468.426.325.429</u>

37. THE MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Perum Peruri management is responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that were authorised for issued on February 17, 2020.

	2019	2018	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	1.886.014.386.840	796.297.050.489	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - bersih			Account receivables - nett
Pihak berelasi	4.535.566.687	7.356.666.018	Related parties
Pihak ketiga	1.992.969.472	211.434.955.924	Third parties
Piutang lain - lain - bersih			Other receivables - nett
Pihak berelasi	25.173.882.585	23.486.493.413	Related parties
Pihak ketiga	4.816.589.336	17.002.407.934	Third parties
Persediaan - bersih	276.669.862.366	471.482.707.670	Inventories - nett
Pajak dibayar dimuka	8.159.491.378	65.819.502.507	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	179.026.849.216	83.124.341.369	Advances and prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar	<u>2.386.389.597.880</u>	<u>1.676.004.125.324</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada ventura bersama	420.335.163.522	323.996.300.861	Investment in joint venture
Surat berharga	40.000.000.000	-	Marketable securities
Aset tetap - bersih	2.853.581.776.357	2.635.784.829.593	Fixed assets - nett
Aset pajak tangguhan	22.741.045.488	13.525.001.486	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya - bersih	262.660.072.675	270.359.730.785	Other non current assets - nett
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>3.599.318.058.042</u>	<u>3.243.665.862.725</u>	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET	<u>5.985.707.655.922</u>	<u>4.919.669.988.049</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS LANCAR			CURRENT LIABILITIES
Pinjaman Bank jangka panjang -			Long term Bank loans -
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	238.670.436.372	219.370.555.581	Current maturities
Utang usaha			Trade payables
Pihak berelasi	13.628.374.260	147.223.395.557	Related parties
Pihak ketiga	383.938.847.935	33.528.706.675	Third parties
Utang pajak	115.168.093.629	33.456.342.028	Taxes payables
Beban akrual	137.659.256.098	49.329.643.252	Accrued expenses
Uang muka pelanggan	31.649.580.950	1.397.601.138	Advances from customers
Liabilitas lancar lainnya	457.864.236.026	318.806.678.983	Other current liabilities
Jumlah Liabilitas Lancar	<u>1.378.578.825.270</u>	<u>803.112.923.214</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			LONG-TERMS LIABILITIES
Pinjaman Bank jangka panjang -			Long term Bank loans -
Setelah dikurangi bagian yang			Net of current maturities
jatuh tempo dalam satu tahun	1.164.999.148.491	1.330.456.674.291	Employment benefits obligation
Liabilitas imbalan kerja	331.204.855.377	218.096.675.715	Other non liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	2.942.775.424	Total Current Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>1.496.204.003.868</u>	<u>1.551.496.125.430</u>	Total Liabilities
Jumlah Liabilitas	<u>2.874.782.829.138</u>	<u>2.354.609.048.644</u>	
EKUITAS			EQUITY
Modal saham	363.573.454.896	363.573.454.896	Capital stock
Komponen ekuitas lainnya	(106.840.125.276)	(35.149.055.068)	Other components equity
Saldo laba			Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	1.578.229.518.286	1.578.229.518.286	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	1.275.961.978.878	658.407.021.291	Unappropriated
Jumlah Ekuitas	<u>3.110.924.826.784</u>	<u>2.565.060.939.405</u>	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>5.985.707.655.922</u>	<u>4.919.669.988.049</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
INDUK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENT OF PROFIT & LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
 For the year ended December 31, 2019
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	
PENJUALAN	3.556.489.890.896	2.894.414.208.565	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	<u>(2.492.151.191.982)</u>	<u>(1.911.425.940.328)</u>	COST OF GOODS SOLD
LABA (RUGI) KOTOR	<u>1.064.338.698.914</u>	<u>982.988.268.237</u>	GAIN (LOSS) GROSS
Pendapatan lainnya	76.182.601.436	50.445.861.463	<i>Other income</i>
Pendapatan bunga	42.235.503.922	22.974.755.356	<i>Interest income</i>
Bagian laba bersih ventura bersama	43.138.862.661	24.090.970.044	<i>Share in net income of joint venture</i>
Laba penjualan aset	386.052.012.015	-	<i>Gain on assets disposal</i>
Beban umum dan administrasi	(559.456.376.034)	(504.149.490.855)	<i>General and Administrative Expenses</i>
Beban bunga	(132.045.554.586)	(134.077.146.432)	<i>Interest expenses</i>
Beban penjualan dan pemasaran	(35.892.871.660)	(41.208.905.861)	<i>Selling and marketing expenses</i>
Beban pajak	(14.330.784.202)	(7.992.227.209)	<i>Tax expenses</i>
Beban lain - lain	<u>(7.786.586.251)</u>	<u>(1.551.586.629)</u>	<i>Other expenses</i>
Jumlah bersih	<u>(201.903.192.699)</u>	<u>(591.467.770.123)</u>	Total - net
LABA SEBELUM PAJAK	862.435.506.215	391.520.498.114	PROFIT BEFORE INCOME TAX
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK			INCOME TAX (EXPENSES)
- Pajak kini	(131.502.430.550)	(115.791.357.752)	<i>Current tax -</i>
- Pajak tangguhan	<u>(14.680.979.401)</u>	<u>481.117.024</u>	<i>Deferred tax -</i>
Jumlah Pendapatan (Beban) Pajak	<u>(146.183.409.951)</u>	<u>(115.310.240.728)</u>	Total Income Tax (Expenses)
LABA BERSIH	716.252.096.264	276.210.257.386	NET INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Bagian penghasilan komprehensif lain			<i>Share in other comprehensive income of</i>
Pos yang tidak akan direklasifikasi			<i>Item that will not be reclassified</i>
ke laba rugi:			<i>subsequently to profit or loss:</i>
Pengukuran kembali atas program			<i>Remeasurement of defined benefit</i>
imbalan pasti	(95.588.093.611)	(8.569.033.564)	<i>obligation</i>
Efek pajak penghasilan	23.897.023.403	2.142.258.391	<i>Income tax effect</i>
	<u>(71.691.070.208)</u>	<u>(6.426.775.173)</u>	
JUMLAH LABA (RUGI)			TOTAL PROFIT (LOSS)
KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>644.561.026.056</u>	<u>269.783.482.213</u>	COMPREHENSIVE INCOME

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
INDUK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended December 31, 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal / Capital	Komponen ekuitas lainnya / Other components of equity	Saldo laba / Retained earnings			Jumlah ekuitas/ Total equity
			Telah ditentukan Cadangan umum / General reserve	Cadangan tujuan / Specific purpose reserve	Belum ditentukan penggunaannya / Unappropriated	
Saldo 1 Januari 2018	363.573.454.896	(28.722.279.895)	1.355.309.004.721	222.920.513.565	503.373.763.905	2.416.454.457.192
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	269.783.482.213	269.783.482.213
Komponen ekuitas lainnya	-	(6.426.775.173)	-	-	6.426.775.173	-
Dividen	-	-	-	-	(121.177.000.000)	(121.177.000.000)
Saldo 31 Desember 2018	363.573.454.896	(35.149.055.068)	1.355.309.004.721	222.920.513.565	668.407.021.291	2.565.060.939.405
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	716.252.096.264	716.252.096.264
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	-	(71.691.070.208)	-	-	(33.797.138.677)	(105.488.208.885)
Dividen	-	-	-	-	(64.900.000.000)	(64.900.000.000)
Saldo 31 Desember 2019	363.573.454.896	(106.840.125.276)	1.355.309.004.721	222.920.513.565	1.275.961.978.878	3.110.924.826.784

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
INDUK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENT OF CASH FLOWS

For the year ended December 31, 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	4.032.839.097.887	3.106.772.363.777	Customer cash receipt
Pengeluaran kas kepada pihak ketiga dan karyawan	(2.391.621.026.603)	(2.329.452.559.735)	Third parties and employee expenditure
Penerimaan kas dari bunga deposito dan jasa giro	37.922.912.927	23.031.103.951	Cash receipt from deposits interest and demand services
Pengeluaran kas untuk pembayaran pajak	(407.193.708.414)	(409.716.501.726)	Tax expenditure
Pengeluaran kas lain-lain	(100.840.893.096)	(7.551.890.689)	Other (expenditure)/receipt
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1.171.106.382.701	383.082.515.579	Net Cash Provided by (Used For) Operating Activity
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Pengeluaran kas pencairan deposito	(30.884.051.655)	(13.664.822.151)	Deposit cash disbursement
Penerimaan kas dividen	4.653.719.471	17.847.642.669	Cash receipts dividend
Penerimaan kas dari penjualan aset tetap	652.254.187.988	-	Cash receipts from aset disposal
Pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap	(188.905.939.122)	(96.605.284.436)	Cash expenditures for fixed assets acquisition
Pengeluaran kas untuk penyertaan	(55.600.000.000)	(35.300.000.000)	Cash expenditures for equity investment
Pengeluaran kas untuk pembelian obligasi	(40.000.000.000)	-	Cash expenditures for Obligation
Penerimaan kas lain-lain	1.422.764.000	914.706.000	Revenue other cash
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	342.940.680.682	(126.807.757.918)	Net Cash Provided by (Used For) Investing Activity
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN			FUNDING ACTIVITIES
Pengeluaran kas untuk pembayaran dividen	(64.900.000.000)	(121.177.000.000)	Cash expenditures from dividend payment
Pengeluaran kas untuk pembayaran pokok pinjaman	(219.370.585.296)	(151.604.436.372)	Cash expenditure for principal payment
Pengeluaran kas untuk pembayaran bunga pinjaman	(140.059.141.736)	(129.533.937.505)	Cash expenditure for loan interest payments
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(424.329.727.032)	(402.315.373.877)	Net Cash Provided by (Used For) Financing Activity
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	1.089.717.336.351	(146.040.616.216)	INCREASE (DECREASE) OF NET CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	796.297.050.489	942.337.666.705	AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	1.886.014.386.840	796.297.050.489	CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR



2019 Annual Report
Laporan Tahunan

DIGITAL TRANSFORMATION FOR SUSTAINABLE GROWTH

*Transformasi Digital untuk
Pertumbuhan Berkelanjutan*



PERURI

**Perusahaan Umum
Percetakan Uang Republik Indonesia**

The Indonesian Government
Security Printing and Minting Corp.

**Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V Kebayoran Baru,
Jakarta 12160, Indonesia.**

P. +62 21 7395000 **F.** +62 21 7221567

E. contact@peruri.co.id **W.** www.peruri.co.id